

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR KEP-211/PB/2018

TENTANG

KODEFIKASI SEGMENTASI AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-617/PB/2017 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-658/PB/2017;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat yang berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;

- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG KODEFIKASI SEGMENTASI AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR.

- PERTAMA : Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal ini meliputi:
- a. Segmen Akun Kas sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;
- b. Penjelasan uraian Segmen Akun Kas sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;

- c. Segmen Akun Akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini; dan
- d. Penjelasan uraian Segmen Akun Akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- e. Segmen Akun Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- f. Segmen Akun Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV digunakan mulai 1 Januari 2018.

KEDUA

- : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:
  - a. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
  - b. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-617/PB/2017 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-658/PB/2017,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA

- : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan digunakan mulai penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri/Pimpinan Lembaga;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2018  
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



## SEGMENTASI AKUN NERACA KAS

KODE AKUN	URAIAN AKUN
1 ASET	
11 ASET LANCAR	
111 KAS DAN SETARA KAS	
1111 Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah	
11111 Kas di Bank Indonesia dalam Rupiah	
111111 Kas di Rekening KUN dalam Rupiah	
111112 Kas di Rekening Sub RKUN Kuasa BUN Pusat	
111113 Kas di Rekening SAL	
111114 Kas di Rekening Talangan Reksus Kosong	
111115 Kas di Rekening Penempatan dalam Rupiah	
111116 Kas di Rekening Antara Reksus	
111117 Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah	
111118 Kas di Rekening Sub BUN Talangan	
11112 Kas di Rekening Sub RKUN	
111121 Kas di Rekening Sub RKUN Penerimaan	
111122 Kas di Rekening Sub RKUN Pengeluaran	
111123 Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Rupiah	
11113 Kas di Rekening Surat Utang Negara	
111131 Kas di Rekening Penerimaan Surat Utang Negara	
111132 Kas di Rekening Pengeluaran Surat Utang Negara	
11114 Kas di Rekening Persepsi Pusat	
111141 Kas di Rekening Persepsi Pusat	
111142 Kas di Rekening Pos Persepsi Pusat	
11115 Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat-SPAN	
111151 Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	
111152 Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN - Gaji	
1112 Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing	
11121 Kas di Bank Indonesia dalam Valuta Asing	
111211 Kas di Rekening KUN dalam Valuta USD	
111212 Kas di Rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Asing	
111213 Kas di Rekening Hasil Minyak Perjanjian Karya	
111214 Kas di Rekening Khusus dalam Valuta Asing	
111215 Kas di Rekening Penempatan dalam Valuta USD	
111216 Kas di Rekening KUN Dalam Valuta Yen	
111217 Kas di Rekening Penempatan Dalam Valuta Yen	
111218 Kas di Rekening KUN dalam Valuta Euro	
111219 Kas di Rekening Penempatan Dalam Valuta Euro	

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
11122	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta
111221	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing JPY
111222	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing USD
111223	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing Euro
1113	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya
11131	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia
111311	Kas Pemerintah Lainnya dalam Rupiah
111312	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya dalam Valuta Asing
111313	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi
111314	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah
111315	Kas di Rekening Penerimaan Migas - RPL
111316	Kas di Rekening Penerimaan Panas Bumi pada Kuasa BUN Pusat
111317	Kas di Rekening Pertambangan dan Perikanan pada Kuasa BUN Pusat
111318	Kas di Rekening Kelolaan <i>Treasury Dealing Room</i>
111319	Kas di Rekening Penerbitan Surat Berharga Negara
11132	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Umum
111321	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat
111322	Kas Pemerintah yang ada di K/L
111323	Kas Pemerintah yang ada di BLU
111324	Kas di Rekening PFK
111325	Kas di Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Penempatan
111326	Kas di Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Hibah Luar Negeri Bencana Alam
111327	Kas di rekening PHLN
111328	Kas di Rekening Dana Bergulir
111329	Kas lainnya
11134	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN
111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN- Non Gaji
111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN- Gaji
111343	Kas di Rekening Retur Surat Berharga Syariah Negara

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
1114	Kas di Rekening Kas di KPPN
11141	Kas di Bank Indonesia <ul style="list-style-type: none"> <li>111411 Kas di Rekening Pengeluaran di Bank Tunggal</li> <li>111412 Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Rupiah</li> </ul>
11142	Kas di Bank Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>111421 Kas di Rekening Pengeluaran di Bank Operasional</li> <li>111422 Kas di Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi)</li> <li>111423 Kas di Rekening Retur BO/Pos (KPPN)</li> </ul>
11143	Kas KPPN di Bank Indonesia dalam Valuta Asing <ul style="list-style-type: none"> <li>111431 Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta USD</li> <li>111432 Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta Yen</li> <li>111433 Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta Euro</li> </ul>
11144	Kas KPPN di Bank Umum dalam Valuta Asing <ul style="list-style-type: none"> <li>111441 Kas di Rekening Penerimaan (Persepsi/ Devisa Persepsi) dalam Valuta USD</li> </ul>
11145	Kas di Rekening Retur BI dalam Rupiah <ul style="list-style-type: none"> <li>111451 Kas di Rekening Retur BI dalam Rupiah</li> </ul>
11146	Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Asing <ul style="list-style-type: none"> <li>111461 Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta USD</li> <li>111462 Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Yen</li> <li>111463 Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Euro</li> <li>111469 Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Asing Lainnya</li> </ul>
1115	Kas dalam Transito <ul style="list-style-type: none"> <li>11151 Kas dalam Transito - BUN               <ul style="list-style-type: none"> <li>111511 Kas dalam Transito - BUN</li> <li>111512 Kas dalam Transito Rekening Pinjaman/ Hibah</li> <li>111513 Kas dalam Transito TUP</li> <li>111514 Kas dalam Transito UP</li> <li>111515 Kas dalam Transito BLU</li> <li>111516 Kas dalam Transito-Transaksi Non Kas</li> <li>111517 Kas dalam Transito-Transaksi DTP</li> <li>111519 Kas dalam Transito Lainnya</li> </ul> </li> <li>11152 Kas dalam Transito - K/L               <ul style="list-style-type: none"> <li>111521 Kas dalam Transito - Perwakilan Luar Negeri</li> </ul> </li> </ul>
1116	Kas di Bendahara Pengeluaran <ul style="list-style-type: none"> <li>11161 Kas di Bendahara Pengeluaran               <ul style="list-style-type: none"> <li>111611 Kas di Bendahara Pengeluaran</li> </ul> </li> </ul>

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	111613 Kas di Bendahara Pengeluaran TUP
1117	Kas di Bendahara Penerimaan
	11171 Kas di Bendahara Penerimaan
	111711 Kas di Bendahara Penerimaan
1118	Kas Lainnya dan Setara Kas
	11181 Setara Kas
	111811 Surat Berharga
	111812 Penempatan di Bank Umum
	111813 Reverse Repo
	111814 <i>Foreign Exchange</i>
	111819 Setara Kas lainnya
	11182 Kas Lainnya Pada Kementerian Negara/Lembaga
	111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
	111822 Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah
	111823 Kas Lainnya di K/L Dana Kelolaan LPP RRI/TVRI
	111824 Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi
	111825 Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
	111826 Kas Lainnya di BLU
	111827 Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan
1119	Kas pada Badan Layanan Umum
	11191 Kas - BLU
	111911 Kas dan Bank - BLU
	111912 Dana yang akan Dijaminkan - BLU
	111913 Dana yang akan dipadankan - BLU
	111914 Kas dan Bank BLU Belum Disahkan
	11192 Setara Kas - BLU
	111921 Surat Berharga - BLU
	111929 Setara kas Lainnya - BLU
112	UANG MUKA REKENING BUN
	1121 Uang Muka Dari Rekening KUN
	11211 Uang Muka KUN UP
	112111 Uang Muka KUN UP – PP
	1122 Uang Muka Dari Rekening Khusus
	11221 Uang Muka Reksus UP
	112211 Uang Muka Reksus UP - PP Reksus
	11222 Uang Muka Reksus Non UP
	112221 Uang Muka Reksus Kosong
	1123 Talangan kepada RKUN
	11231 Talangan kepada RKUN
	112311 Talangan Dana Cadangan Subsidi kepada RKUN

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	112312 Talangan Dana Cadangan DBH kepada RKUN 112313 Talangan Dana Cadangan PMN kepada RKUN
113 INVESTASI JANGKA PENDEK	
1131 Investasi dalam Deposito	11311 Investasi dalam Deposito 113111 Investasi dalam Deposito Jangka Pendek
1132 Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara	11321 Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara 113211 Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara
11322 Investasi Jangka Pendek pada Surat Berharga Negara	113221 Investasi Jangka Pendek pada SBN dalam Rangka Stabilisasi Pasar 113222 Investasi Jangka Pendek pada SBN dalam Rangka Optimalisasi Kas
1133 Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	11331 Deposito Jangka Pendek - BLU 113311 Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan 113319 Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Dana Kelolaan BLU dan/atau Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya
1134 Bagian Lancar Investasi Non Permanen	11341 Bagian Lancar Investasi Non Permanen 113411 Bagian Lancar Investasi Non Permanen
1139 Investasi Jangka Pendek Lainnya	11391 Investasi Jangka Pendek Lainnya 113911 Investasi Jangka Pendek Lainnya
2 KEWAJIBAN	
21 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
211 UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA	
2111 Utang Perhitungan Fihak Ketiga	21111 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 211111 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji 211112 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Pensiunan PNS 211113 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog 211114 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 8% Gaji 211115 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tabungan Wajib Perumahan 211116 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Pensiunan TNI/PNS Kemhan dan Polri/PNS Polri

KODE AKUN	URAIAN AKUN
211117	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 3% Iuran Jaminan Kesehatan
211118	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2 % Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
211119	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lain-lain
21112	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lainnya
211121	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP Migas)
211122	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Penutupan Rekening
211123	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga Wesel Pemerintah
21115	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) II
211151	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada PT Taspen
211152	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada PT Asabri
211153	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada PT Askes
211154	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada Pusku POLRI
211155	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada Pusku Kemhan
211156	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Penyaluran Beras BULOG
21116	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga PFK Setoran Pajak Rokok dan Pengalihan Piutang
211161	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Setoran Pajak Rokok
211162	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengalihan Piutang
211163	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi
211164	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pemotongan DAU atau DBH untuk Alokasi Dana Desa (ADD)
219	UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
2193	Uang Muka Rekening Khusus
21931	Uang Muka Rekening Khusus
219311	Uang Muka Rekening Khusus
2194	Uang Muka
21941	Uang Muka dari KUN
219411	Uang Muka dari KUN
219412	Uang Muka dari Kementerian Negara/Lembaga
2195	Uang Muka dari KPPN
21951	Uang Muka dari KPPN

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	219511 Uang Muka dari KPPN
2197 Utang Kepada KUN	
21971 Utang Kepada KUN	219711 Utang Kepada KUN
21972 Utang Kepada kas BLU	219721 Utang Kepada kas BLU
2198 Utang Kepada RPL	
21981 Utang Kepada RPL	219811 Utang Kepada RPL
21982 Utang Talangan	219821 Utang Talangan Dana Cadangan Subsidi
	219822 Utang Talangan Dana Cadangan DBH
	219823 Utang Talangan Dana Cadangan PMN
3 EKUITAS	
31 EKUITAS	
311 EKUITAS	
3111 SAL	
31111 SAL	311111 SAL
3112 SILPA	
31121 SILPA	311211 SILPA
	311212 Koreksi pendapatan tahun anggaran yang lalu
	311213 Koreksi Belanja Tahun Anggaran yang Lalu
	311214 Surplus/Defisit
	311215 Pembiayaan Netto
3113 SAL dan SILPA BLU	
31131 SAL - BLU	311311 SAL - BLU
	311312 Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
	311313 SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi
	311314 Penggunaan SAL BLU
	311315 Penyesuaian SAL BLU
31132 SILPA BLU	
	311321 SILPA BLU
3117 Keuntungan/Kerugian yang Belum Terealisasi	
31171 Selisih Kurs	311711 Selisih Kurs
3119 Ekuitas Dana Lancar Lainnya	31191 Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	311911 Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung
39 EKUITAS	
391 EKUITAS	
3911 Ekuitas	
	39114 Setoran Surplus BLU
	391141 Setoran Surplus BLU

## **SEGMENTASI AKUN PENDAPATAN - LRA**

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
4 PENDAPATAN NEGARA	
41 PENDAPATAN PERPAJAKAN	
411 PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI	
4111 Pendapatan Pajak Penghasilan	
41111 Pendapatan PPh Migas	
411111 Pendapatan PPh Minyak Bumi	
411112 Pendapatan PPh Gas Bumi	
411119 Pendapatan PPh Migas Lainnya	
41112 Pendapatan PPh Non-Migas	
411121 Pendapatan PPh Pasal 21	
411122 Pendapatan PPh Pasal 22	
411123 Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	
411124 Pendapatan PPh Pasal 23	
411125 Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	
411126 Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	
411127 Pendapatan PPh Pasal 26	
411128 Pendapatan PPh Final	
411129 Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	
41113 Pendapatan PPh Fiskal	
411131 Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	
41114 Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah	
411141 Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	
411142 Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah	
411143 Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah	
411144 Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah	
411145 Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah	
411146 Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah	
411147 Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	
411148 Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah	
411149 Pendapatan PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah	
4112 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	
41121 Pendapatan PPN	
411211 Pendapatan PPN Dalam Negeri	
411212 Pendapatan PPN Impor	
411219 Pendapatan PPN Lainnya	
41122 Pendapatan PPnBM	
411221 Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	
411222 Pendapatan PPnBM Impor	
411229 Pendapatan PPnBM Lainnya	

KODE AKUN	URAIAN AKUN
4113 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	
41131 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	
411311 Pendapatan PBB Pedesaan	
411312 Pendapatan PBB Perkotaan	
411313 Pendapatan PBB Perkebunan	
411314 Pendapatan PBB Kehutanan	
411315 Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	
411316 Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	
411317 Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	
411319 Pendapatan PBB Lainnya	
4114 Pendapatan BPHTB	
41141 Pendapatan BPHTB	
411411 Pendapatan BPHTB	
4115 Pendapatan Cukai	
41151 Pendapatan Cukai	
411511 Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	
411512 Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	
411513 Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	
411514 Pendapatan Denda Administrasi Cukai	
411519 Pendapatan Cukai Lainnya	
4116 Pendapatan Pajak Lainnya	
41161 Pendapatan Pajak Lainnya	
411611 Pendapatan Bea Meterai	
411612 Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	
411613 Pendapatan PPn Batubara	
411619 Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	
41162 Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	
411621 Pendapatan Bunga Penagihan PPh	
411622 Pendapatan Bunga Penagihan PPN	
411623 Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	
411624 Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	
41163 Pendapatan Pajak Lainnya Ditanggung Pemerintah	
411631 Pendapatan Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah	
412 PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL	
4121 Pendapatan Bea Masuk	
41211 Pendapatan Bea Masuk	
412111 Pendapatan Bea Masuk	
412112 Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)	
412113 Pendapatan Denda Administrasi Pabean	

KODE AKUN	URAIAN AKUN
412114	Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
412115	Denda Atas Sanksi Administrasi Dari Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Tertentu Yang Pengangkutannya Di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)
412116	Pendapatan BM-DTP
412119	Pendapatan Pabean Lainnya
41212	Pendapatan Bea Masuk Tindakan
412121	Pendapatan Bea Masuk Antidumping
412122	Pendapatan Bea Masuk Imbalan
412123	Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan
4122	Pendapatan Bea Keluar
41221	Pendapatan Bea Keluar
412211	Pendapatan Bea Keluar
412212	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar
412213	Pendapatan Bunga Bea Keluar
419	PENDAPATAN PAJAK LAIN-LAIN
4199	Pendapatan Pajak Lain-lain
41999	Pendapatan Pajak Lain-lain
419999	Pendapatan Pajak Lain-lain
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
421	PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM
4211	Pendapatan Minyak Bumi
42111	Pendapatan Minyak Bumi
421111	Pendapatan Minyak Bumi
4212	Pendapatan Gas Bumi
42121	Pendapatan Gas Bumi
421211	Pendapatan Gas Bumi
4213	Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara
42132	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara
421321	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Eksplorasi
421322	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Operasi Produksi
421323	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Izin Pertambangan Rakyat
42133	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara
421331	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Batubara
421332	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Tembaga
421333	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Emas

KODE AKUN	URAIAN AKUN
421334	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Perak
421335	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Nikel
421336	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Timah
421339	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Lainnya
42134	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
421341	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
4214	Pendapatan Kehutanan
42141	Pendapatan Dana Reboisasi
421411	Pendapatan Dana Reboisasi
42142	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
42143	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)
421435	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)
42144	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan
4215	Pendapatan Perikanan
42152	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan
421521	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap
421522	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
42153	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan
421531	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan
4216	Pendapatan Panas Bumi
42162	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi
421621	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi
42163	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi
421631	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Eksplorasi
421632	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Operasi Produksi
42164	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi
421641	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi
422	PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND)
4221	Pendapatan Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN
42213	Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN

KODE AKUN	URAIAN AKUN
422131	Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan di Bawah Kementerian BUMN
422132	Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN
42214	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan
422141	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan
422142	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan
4222	Pendapatan Dari KND Lainnya
42221	Pendapatan dari Surplus Lembaga
422211	Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia
422212	Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan
422213	Pendapatan dari Surplus Lembaga Penjamin Simpanan
	422219 Pendapatan dari Surplus Lembaga Lainnya
424	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum
42411	Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran
424118	Pendapatan Penyediaan Barang
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya
42412	Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita
424122	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya
42413	Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat
424131	Pendapatan Program Dana Penjaminan
424132	Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah
424133	Pendapatan Program Modal Ventura
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah
424136	Pendapatan Investasi

KODE AKUN	URAIAN AKUN
424137	Pendapatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya
42414	Pendapatan dari pengelolaan BMN pada Pengelola Barang
424141	Pendapatan dari pengelolaan BMN pada Pengelola Barang
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum
42421	Pendapatan Hibah Terikat - Uang
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang
424214	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
424216	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara - Uang
424219	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya - Uang
42422	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Uang
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang
424224	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang
424225	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
424226	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara - Uang
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya - Uang
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
42431	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah
4244	Pendapatan dari Alokasi APBN
42441	Pendapatan dari Alokasi APBN
424411	Pendapatan dari Alokasi APBN
42442	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat

KODE AKUN	URAIAN AKUN
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU
4249 Pendapatan BLU Lainnya	
42491 Pendapatan BLU Lainnya	
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
424912	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang dibatasi pengelolaannya
424913	Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU
424914	Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi - BLU
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
424917	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan / TGR - BLU
424919	Pendapatan Lain-lain BLU
42492 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa	
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin
424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya
42493 Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN BLU	
424931	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Tanah BLU
424932	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU
424933	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU
424934	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU
424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU
42494 Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar BMN BLU	
424941	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Tanah BLU
424942	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Gedung dan Bangunan BLU

KODE AKUN	URAIAN AKUN
424943	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin BLU
424944	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU
424945	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya BLU
424949	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar BMN Lainnya BLU
425  PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA	
4251 Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	
42511 Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	
425111 Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara	
425112 Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	
425113 Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	
425114 Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni	
425119 Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	
42512 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	
425121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	
425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	
425123 Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	
425124 Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	
425125 Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	
425126 Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan	
425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	
42513 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	
425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	
425132 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	
425133 Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	
425134 Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	
425135 Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	
425136 Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
425137 Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)	
425138 Pendapatan dari Bangun, Serah, dan Guna (BSG)	
425139 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	
42514 Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
425141	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS
425142	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B
425143	Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti
425144	Pendapatan Atas Aset Saham dan Surat Berharga Lain
425145	Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari Pengelola Barang
42515	Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi
42516	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas
425161	Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak
425162	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)
425169	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas
42517	Pendapatan Iuran Badan Usaha
425171	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM
425172	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum
42521	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum
425211	Pendapatan Paspor
425212	Pendapatan Visa
425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)
425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya
425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia
425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum
425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya
425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual
425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya
42522	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri
425221	Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri
425222	Pendapatan Paspor Republik Indonesia di Luar Negeri
425223	Pendapatan Dokumen Kekonsuleran
425224	Pendapatan Jasa Pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Luar Negeri
425228	Pendapatan Pelayanan Lainnya di Luar Negeri

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	425229 Pendapatan Administrasi di Luar Negeri
42523	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi
	425231 Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan
	425232 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan
	425233 Pendapatan Ongkos Perkara
	425234 Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara
	425235 Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi
	425236 Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan
	425237 Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas
	425238 Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya
	425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
42524	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang
	425241 Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
	425242 Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
	425243 Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
	425244 Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang
	425245 Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi
	425246 Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi
	425247 Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
	425248 Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara
	425249 Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
42525	Pendapatan Perizinan
	425251 Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing
	425252 Pendapatan Perizinan Pertanian
	425253 Pendapatan Perizinan di Bidang Perdagangan
	425254 Pendapatan Perizinan di Bidang Kesehatan
	425255 Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	425259 Pendapatan Perizinan Lainnya
42526	Pendapatan Pelayanan Kepolisian I
	425261 Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)
	425262 Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)

KODE AKUN	URAIAN AKUN
425263	Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
425264	Pendapatan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
425265	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
425266	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
425267	Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi
425268	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah
425269	Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan
42527	Pendapatan Pelayanan Kepolisian II
425271	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara
425272	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara
425273	Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
425274	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)
425275	Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman
425276	Pendapatan Pengamanan Obyek Vital
425279	Pendapatan Pelayanan Kepolisian Lainnya
42528	Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi
425281	Pendapatan Akreditasi
425282	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
425283	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian
425284	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perdagangan
425285	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan
425286	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum
425287	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan
425288	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan
42531	Pendapatan Jasa Kesehatan
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
425312	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan
425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan
425316	Pendapatan Registrasi Tenaga Kesehatan
42532	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan
425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan
42533	Pendapatan Jasa Karantina
425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan
425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan
42534	Pendapatan Jasa Agraria
425341	Pendapatan Pelayanan Pertanahan
425342	Pendapatan Penerimaan Hak Atas Tanah P3MB/Presidium Kabinet Dwikora
42535	Pendapatan Jasa Keagamaan
425351	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama
425359	Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi
42541	Pendapatan Pendidikan
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan
425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya
42542	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya
42543	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek
425431	Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan
425433	Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual
425439	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya

KODE AKUN	URAIAN AKUN
42545	Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan
425451	Pendapatan Museum
425459	Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan Lainnya
4255	Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika
42551	Pendapatan Jasa Transportasi
425511	Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
425512	Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge
425513	Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
425514	Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran
425515	Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan
425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan
425517	Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan
425518	Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi
425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya
42552	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika
425521	Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
425522	Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi
425523	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran
425524	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos
425525	Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal
425526	Pendapatan Pengelolaan Nama Domain Indonesia
425529	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika Lainnya
42553	Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik
425531	Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI
425532	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP RRI
425533	Pendapatan Jasa Siaran LPP TVRI
425534	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP TVRI
4256	Pendapatan Jasa Lainnya
42561	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
425611	Pendapatan Wisata Alam
425612	Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
425619	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya
42562	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan
425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya
42569	Pendapatan Jasa Lainnya
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi
425693	Pendapatan dari Jasa Layanan Jalan Tol

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	425694 Pendapatan dari Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA)
	425699 Pendapatan Jasa Lainnya
4257 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	
42571 Pendapatan Bunga	
425711 Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi	
425712 Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi	
425713 Pendapatan Bunga dari Piutang dan Pemberian Pinjaman	
425714 Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah	
425715 Pendapatan Komitmen Pemberian Pinjaman	
425716 Pendapatan Bunga Kredit Program	
425717 Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan	
425719 Pendapatan Bunga Lainnya	
42572 Pendapatan Gain on Bond Redemption	
425721 Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Jangka Panjang	
425722 Pendapatan dari Transaksi Security Lending	
425723 Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valuta Asing	
425724 Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali SBSN Jangka Panjang	
425725 Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali SBSN Valuta Asing Jangka Panjang	
42573 Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	
425731 Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	
425732 Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing	
425733 Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah	
425734 Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Valuta Asing	
42574 Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara	
425741 Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	
425742 Pendapatan Selisih Harga SBN	
425743 Pendapatan Kupon SBN	
425744 Pendapatan Bunga Reverse Repo	
425745 Pendapatan Fee atas Transaksi Security Lending SUN	

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	425746 Pendapatan Lain-lain atas Rekening Tujuan Tertentu
42575	Pendapatan dari Selisih Kurs
	425751 Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN
	425752 Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan
	425753 Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D
42576	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening
	425761 Pendapatan Layanan Jasa Perbankan
	425762 Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman
	425763 Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman
	425764 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
	425765 Pendapatan dari Penutupan Rekening
42577	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara
	425771 Pendapatan atas Penerbitan SP2D Dalam Rangka TSA
	425772 Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum
	425773 Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling
	425774 Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia
	425775 Pendapatan dari Penempatan Uang Sebelum Rekonsiliasi
42578	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara
	425781 Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa
	425782 Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
	425783 Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II
	425784 Pendapatan Bea Lelang Pegadaian
	425785 Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara
42577	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara
	425771 Pendapatan atas Penerbitan SP2D Dalam Rangka TSA
	425772 Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum
	425773 Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling

KODE AKUN	URAIAN AKUN
425774	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia
425775	Pendapatan dari Penempatan Uang Sebelum Rekonsiliasi
42577	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara
425771	Pendapatan atas Penerbitan SP2D Dalam Rangka TSA
425772	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum
425773	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling
425774	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia
425775	Pendapatan dari Penempatan Uang Sebelum Rekonsiliasi
42578	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara
42579	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga
4258	Pendapatan Denda
42581	Pendapatan Denda I
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
425812	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha
425813	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Perdagangan
425814	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA
425815	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia
425816	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling

KODE AKUN	URAIAN AKUN
425817	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi
425818	Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas
425819	Pendapatan Denda terkait Pengusahaan Panas Bumi
42582	Pendapatan Denda II
425821	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyaluran SP2D pada Bank Operasional dan Bank Penyalur Gaji
425822	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pembagian PBB oleh BO III PBB
425823	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman
425824	Pendapatan Denda Penyaluran Kredit Program
425825	Pendapatan Denda Administrasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
425826	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Kredit Pemerintah (KUMK)
425827	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Pemberian Pinjaman
425828	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III
425829	Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
42583	Pendapatan Denda III
425839	Pendapatan Denda Lainnya
4259	Pendapatan Lain-Lain
42591	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
425914	Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu
425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu
425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu
425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	Anggaran Yang Lalu
425919	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu
42592	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II
425921	Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL
42593	Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS
425932	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan
425933	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Anggota Polri/PNS Polri
425934	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara
42598	Pendapatan Lain-Lain I
425981	Penerimaan Lainnya dari Piutang Pemberian Pinjaman
42599	Pendapatan Lain-Lain II
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
425992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional
425993	Pendapatan Jasa Perbendaharaan
425994	Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari Bank/Pos Persepsi
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak
425996	Pendapatan dalam rangka Refund Dana PHLN
425997	Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan
425998	Pendapatan dari Retur SP2D
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain
43	PENDAPATAN HIBAH
431	PENDAPATAN HIBAH DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
4311	Pendapatan Hibah Dalam Negeri
43111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Terencana
431111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Perorangan
431112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Lembaga/Badan Usaha
431119	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Lainnya
43112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang/Jasa/ Surat Berharga
431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang
431122	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Jasa
431123	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
43113	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang
431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Perorangan
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lembaga/ Badan Usaha
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Pemerintah Daerah
431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lainnya
4312	Pendapatan Hibah Luar Negeri
43121	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana
431211	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Perorangan
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Bilateral
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Multilateral
431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Lainnya
43122	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
431221	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang
431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Jasa
431223	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga
43123	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang
431231	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Perorangan
431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Bilateral
431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Multilateral
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Lainnya
43124	Pendapatan Hibah Luar Negeri yang Langsung Diterushibahkan
431241	Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Barang yang Langsung Diterushibahkan
431242	Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Jasa yang Langsung Diterushibahkan
431243	Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Surat Berharga yang Langsung Diterushibahkan
439	PENDAPATAN HIBAH LAIN-LAIN
4399	Pendapatan Hibah Lain-lain
43999	Pendapatan Hibah Lain-lain
439999	Pendapatan Hibah Lain-lain

## SEGMENTASI AKUN BELANJA

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
5 BELANJA NEGARA	
51 BELANJA PEGAWAI	
511 BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN	
5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	
51111 Belanja Gaji PNS	
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	
51112 Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS	
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS	
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS	
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS	
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS	
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS	
511127 Belanja Tunjangan Kemahalan PNS	
511128 Belanja Tunjangan Lauk pauk PNS	
511129 Belanja Uang Makan PNS	
51113 Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS	
511131 Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS	
511132 Belanja Tunjangan Cacat PNS	
511133 Belanja Tunjangan Khusus Peralihan PNS	
511134 Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS	
511135 Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	
511136 Belanja Tunjangan Guru/Dosen/PNS yang Dipekerjakan pada Sekolah/ PT Swasta/ Badan/Komisi	
511137 Belanja Tunjangan Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk Mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana PNS	
511138 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	
511139 Belanja Tunjangan SAR PNS	
51114 Belanja Tunjangan-tunjangan III Pegawai Negeri/ Staff di Luar Negeri	
511141 Belanja Tunjangan Sewa Rumah PNS (Staff di LN)	
511142 Belanja Tunjangan Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)	
511143 Belanja Tunjangan <i>Social Security</i> PNS (Staff di LN)	
511144 Belanja Tunjangan Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di LN)	
511145 Belanja Tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN)	
511146 Belanja Tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN)	

KODE AKUN	URAIAN AKUN
511147	Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri
511149	Belanja Lokal Staff Lainnya
51115	Belanja Tunjangan-tunjangan IV PNS
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS
511152	Belanja Tunjangan Profesi Guru
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor
511155	Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS
511156	Belanja Tunjangan Khusus Guru/Dosen
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim
511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc
51116	Belanja Gaji- PNS TNI/Polri
511161	Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri
511169	Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri
51117	Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS TNI/Polri
511171	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS TNI/Polri
511172	Belanja Tunjangan Anak PNS TNI/Polri
511173	Belanja Tunjangan Struktural PNS TNI/Polri
511174	Belanja Tunjangan Fungsional PNS TNI/Polri
511175	Belanja Tunjangan PPh PNS TNI/Polri
511176	Belanja Tunjangan Beras PNS TNI/Polri
511177	Belanja Tunjangan Kemahalan PNS TNI/Polri
511178	Belanja Tunjangan Lauk pauk PNS TNI/Polri
511179	Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri
51118	Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS TNI/Polri
511181	Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS TNI/Polri
511182	Belanja Tunjangan Cacat PNS TNI/Polri
511183	Belanja Tunjangan Khusus Peralihan PNS TNI/Polri
511184	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS TNI/Polri
511185	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS TNI/Polri
511187	Belanja Tunjangan Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS TNI/Polri
511188	Belanja Tunjangan Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS
511189	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS TNI/Polri
51119	Belanja Tunjangan-tunjangan III PNS TNI/POLRI
511191	Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
511192	Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/POLRI
511193	Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri
511194	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri
511195	Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan PNS TNI
511196	Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi PNS Polri
511197	Belanja Tunjangan Profesi Dosen/Kehormatan Guru Besar PNS TNI/Polri
5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri
51121	Belanja Gaji TNI/POLRI
511211	Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI
511219	Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI
51122	Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI
511221	Belanja Tunjangan Suami/Istri TNI/POLRI
511222	Belanja Tunjangan Anak TNI/POLRI
511223	Belanja Tunjangan Struktural TNI/POLRI
511224	Belanja Tunjangan Fungsional TNI/POLRI
511225	Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI
511226	Belanja Tunjangan Beras TNI/POLRI
511227	Belanja Tunjangan Kemahalan TNI/POLRI
511228	Belanja Tunjangan Lauk Pauk TNI/POLRI
511229	Belanja Uang Makan TNI/POLRI
51123	Belanja Tunjangan-tunjangan II TNI/POLRI
511231	Belanja Tunjangan Anggota Cadangan TNI DDA TNI/POLRI
511232	Belanja Tunjangan Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI
511233	Belanja Tunjangan Babinkamtibmas TNI/POLRI
511234	Belanja Tunjangan Khusus Papua untuk TNI/ POLRI
511235	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI
511236	Belanja Tunjangan Brevet TNI/POLRI
511237	Belanja Tunjangan Keahlian/ Keterampilan TNI/POLRI
511238	Belanja Tunjangan Keterampilan Khusus TNI/POLRI
511239	Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan TNI
51124	Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI
511241	Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	511242 Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka TNI/POLRI
	511243 Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/ Sangat Terpencil TNI/Polri
	511244 Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri
	511245 Belanja Santunan Cacat TNI
	511246 Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil Terluar/ Perbatasan Polri
	511247 Belanja Tunjangan Profesi Dosen/Kehormatan Guru Besar TNI/Polri
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara
51131	Belanja Gaji Pejabat Negara
	511311 Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara
	511319 Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara
51132	Belanja Tunjangan-tunjangan I Pejabat Negara
	511321 Belanja Tunjangan Suami/Istri Pejabat Negara
	511322 Belanja Tunjangan Anak Pejabat Negara
	511323 Belanja Tunjangan Struktural Pejabat Negara
	511324 Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara
	511325 Belanja Tunjangan Beras Pejabat Negara
51133	Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara
	511331 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pejabat Negara
	511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara
	511333 Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara
	511334 Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara
	511335 Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara
	511336 Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara
	511337 Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat Negara
	511338 Belanja Tunjangan Fasilitas KPK
	511339 Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara
5114	Belanja Gaji Dokter PTT
51141	Belanja Gaji Dokter PTT
	511411 Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT
	511412 Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT
	511413 Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT
	511414 Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
51151	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
	511511 Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS
	511512 Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	511513 Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS
	511519 Belanja Tunjangan Lainnya Non PNS
51152	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluhan Non PNS
	511521 Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS
	511522 Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluhan Non PNS
	511529 Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluhan Lainnya Non PNS
512	BELANJA HONORARIUM/LEMBUR /TUNJANGAN KHUSUS & BELANJA PEGAWAI TRANSITO
5121	Belanja Honorarium
	51211 Belanja Honorarium
	512111 Belanja Uang Honor Tetap
5122	Belanja Lembur
	51221 Belanja Lembur
	512211 Belanja Uang Lembur
5124	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito
51241	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito
	512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja)
	512412 Belanja Pegawai Transito
	512413 Belanja Pembayaran Uang Kompensasi Bagi PNS yang Diberhentikan sebagai Dampak Reformasi Birokrasi
513	BELANJA KONTRIBUSI SOSIAL
5131	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu
51311	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara
	513111 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS
	513112 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Daerah
	513113 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Kemhan
	513114 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri
	513115 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Eks Pegadaian
51312	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri
513121	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (Lama)
513122	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Kemhan
513123	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Polri
51313	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara
513131	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara
513132	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Hakim
51314	Belanja Kontribusi APBN sebagai pendanaan bersama dalam pembayaran pensiun eks PNS Kemhub pada PT KAI

KODE AKUN	URAIAN AKUN
513141	Kontribusi APBN sebagai Pendanaan Bersama Dalam Pembayaran Pensiun Eks PNS Kemhub pada PT KAI
51315	Belanja Pensiun Veteran dan PKRI/KNIP
513151	Belanja Tunjangan Veteran
513152	Belanja Dana Kehormatan Veteran
513153	Belanja Tunjangan PKRI dan KNIP
51316	Belanja Tunjangan Hari Tua
513161	Belanja Tunjangan Hari Tua ( <i>Unfunded Liability</i> )
5132	Belanja Program Jaminan Sosial Pegawai
51321	Belanja Askes PNS/Pejabat Negara
513211	Belanja Askes PNS
513212	Belanja Askes Pejabat Negara
51322	Belanja Askes Penerima Pensiun
513221	Belanja Askes Penerima Pensiun
51323	Belanja Askes TNI/Kemhan
513231	Belanja Askes TNI/Kemhan
51324	Belanja Askes Polri
513241	Belanja Askes Polri
51325	Belanja Askes Veteran
513251	Belanja Askes Veteran
51326	Belanja Katastropik
513261	Belanja Katastropik
51327	Belanja Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai
513271	Belanja Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai
51328	Belanja Program Jaminan Kematian Pegawai
513281	Belanja Program Jaminan Kematian Pegawai
5133	Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
51331	Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
513311	Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
5134	Belanja Cadangan Perubahan Sharing
51341	Belanja Cadangan Perubahan Sharing
	513411 Belanja Cadangan Perubahan Sharing
52	BELANJA BARANG DAN JASA
521	BELANJA BARANG
5211	Belanja Barang Operasional
52111	Belanja Barang Operasional
521111	Belanja Keperluan Perkantoran
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	521116 Belanja Keperluan Perkantoran Atase Pertahanan Luar Negeri
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
52112	Belanja Barang Operasional kepada BLU
	521121 Belanja Barang Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
	521122 Belanja Barang Operasional Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain
5212	Belanja Barang Non Operasional
52121	Belanja Barang Non Operasional
	521211 Belanja Bahan
	521212 Belanja Barang Transito
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan
	521214 Belanja Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan
	521215 Belanja Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun
	521216 Belanja Pencairan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
	521217 Belanja Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Kepada Negara
	521218 Belanja dalam Rangka <i>Refund</i> Dana PHLN
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
52122	Belanja Barang Non Operasional kepada BLU
521221	Belanja Barang Non Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
521222	Belanja Barang Non Operasional Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain
52123	Belanja Barang Bantuan Pemerintah
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang
521232	Belanja Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam bentuk uang
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang
521234	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk barang
5215	Belanja Barang Pengganti Pajak Dalam Rangka Hibah MCC
52151	Belanja Barang Pengganti Pajak Pusat Dalam Rangka Hibah MCC
521511	Belanja Barang Pengganti PPN Dalam Rangka Hibah MCC
521512	Belanja Barang Pengganti PPh Dalam Rangka Hibah MCC
521513	Belanja Barang Pengganti Pajak Lainnya Dalam Rangka Hibah MCC

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
5217 Belanja Kontribusi	
52171 Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan <i>Trust Fund</i>	
521711 Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan <i>Trust Fund</i>	
52172 Belanja Kontribusi Dukungan Pemerintah dan Ketersediaan Layanan	
521721 Belanja Kontribusi Dana Dukungan Kelayakan ( <i>Viability Gap Fund</i> )	
521722 Belanja Kontribusi Fasilitas Penyiapan Proyek ( <i>Project Development Facility</i> )	
521723 Belanja Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )	
5218 Belanja Barang Persediaan	
52181 Belanja Barang untuk Persediaan	
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	
521812 Belanja Barang Persediaan Amunisi	
521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	
52182 Belanja Barang Persediaan untuk proses produksi	
521821 Belanja Barang Persediaan bahan baku	
521822 Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	
52183 Belanja Barang Persediaan Bahan Lainnya	
521831 Belanja Barang Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	
521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya	
522 BELANJA JASA	
5221 Belanja Jasa	
52211 Belanja Langganan Daya dan Jasa	
522111 Belanja Langganan Listrik	
522112 Belanja Langganan Telepon	
522113 Belanja Langganan Air	
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	
52212 Belanja Jasa Pos dan Giro	
522121 Belanja Jasa Pos dan Giro	
52213 Belanja Jasa Konsultan	
522131 Belanja Jasa Konsultan	
52214 Belanja Sewa	
522141 Belanja Sewa	
52215 Belanja Jasa Profesi	
522151 Belanja Jasa Profesi	
52216 Belanja Jasa kepada BLU	
522161 Belanja Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	522162 Belanja Jasa Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain
	52219 Belanja Jasa Lainnya
	522191 Belanja Jasa Lainnya
523 BELANJA PEMELIHARAAN	
5231 Belanja Pemeliharaan	
	52311 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
	523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
	523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
	523113 Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan
	523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
	52312 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
	523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
	523122 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina
	523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
	523124 Belanja Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor
	523129 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	52313 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
	523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	523132 Belanja Pemeliharaan Irigasi
	523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan
	523134 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	523135 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi
	523136 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan
	523137 Belanja Asuransi Jembatan
	52319 Belanja Pemeliharaan Lainnya
	523191 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya
	523199 Belanja Pemeliharaan Lainnya
524 BELANJA PERJALANAN DINAS	
5241 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	
	52411 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
	524112 Belanja Perjalanan Dinas Tetap
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
5242	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
52421	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri
524212	Belanja Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri
525	BELANJA BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
5251	Belanja Barang BLU
52511	Belanja Barang dan Jasa BLU
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan
525112	Belanja Barang
525113	Belanja Jasa
525114	Belanja Pemeliharaan
525115	Belanja Perjalanan
525116	Belanja atas Pengelolaan <i>Endowment Fund</i>
525117	Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
525118	Belanja Ketersediaan Layanan BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
52512	Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
525122	Belanja Barang Persediaan Amunisi - BLU
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU
525124	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges - BLU
525125	Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU
525126	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU
525127	Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses untuk Proses Produksi - BLU
525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU
52513	Belanja Asuransi BMN di BLU
525131	Belanja Asuransi BMN Gedung dan Bangunan - BLU
525132	Belanja Asuransi BMN Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor - BLU
525133	Belanja Asuransi BMN Jembatan - BLU
52514	Belanja Barang dan Jasa BLU kepada BLU Lain
525141	Belanja Barang BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
525142	Belanja Barang BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain
525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	525144 Belanja Jasa BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain
526 BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/ PEMDA	
5261 Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	
52611 Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda	
526111 Belanja Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	
526113 Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	
526114 Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	
52612 Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang	
526121 Belanja Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	
526122 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	
526123 Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	
526124 Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	
5262 Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	
52621 Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah	
526211 Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah	
526212 Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah	
5263 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	
52631 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	
526311 Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	
526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	
527 BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN	
5271 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden	

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
52711	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden
527111	Belanja Tanah untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden
527112	Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden
527113	Belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden
53 BELANJA MODAL	
531 BELANJA MODAL TANAH	
5311 Belanja Modal Tanah	
53111 Belanja Modal Tanah	
531111 Belanja Modal Tanah	
531112 Belanja Modal Pembebasan Tanah	
531113 Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	
531114 Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	
531115 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	
531116 Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	
531117 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	
532 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	
5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
53211 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
532112 Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	
532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	
532114 Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin	
532115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	
532116 Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin	
532117 Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	
532118 Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	
53212 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	
532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	
533 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	
5331 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
53311 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
533112 Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	
533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	

KODE AKUN	URAIAN AKUN
533114	Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan
533116	Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan
533117	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan
53312	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
534	BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
53411	Belanja Modal Jalan dan Jembatan
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan
534112	Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan
534113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan
534114	Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan
534115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
534116	Belanja Modal Perijinan Jalan dan Jembatan
534117	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan
534118	Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan
53412	Belanja Modal Irigasi
534121	Belanja Modal Irigasi
534122	Belanja Modal Bahan Baku Irigasi
534123	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi
534124	Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi
534125	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi
534126	Belanja Modal Perijinan Irigasi
534127	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Irigasi
534128	Belanja Modal Perjalanan Irigasi
53413	Belanja Modal Jaringan
534131	Belanja Modal Jaringan
534132	Belanja Modal Bahan Baku Jaringan
534133	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan
534134	Belanja Modal Sewa Peralatan Jaringan
534135	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	534136 Belanja Modal Perijinan Jaringan
	534137 Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Jaringan
	534138 Belanja Modal Perjalanan Jaringan
53414	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan
	534141 Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan
53415	Belanja Penambahan Nilai Irigasi
	534151 Belanja Penambahan Nilai Irigasi
53416	Belanja Penambahan Nilai Jaringan
	534161 Belanja Penambahan Nilai Jaringan
536	BELANJA MODAL LAINNYA
5361	Belanja Modal Lainnya
53611	Belanja Modal Lainnya
	536111 Belanja Modal Lainnya
53612	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya
	536121 Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya
537	BELANJA MODAL BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
5371	Belanja Modal BLU
53711	Belanja Modal BLU
	537111 Belanja Modal Tanah - BLU
	537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
	537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU
	537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
	537115 Belanja Modal Lainnya - BLU
54	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG
541	BELANJA PEMBAYARAN BUNGA UTANG
5411	Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Jangka Pendek
54111	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara
541111	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara – Rupiah
541112	Belanja Pembayaran Kupon SBN-TDR
541113	Belanja Pembayaran Bunga Repo-TDR
541119	Belanja Pembayaran Biaya/ Kewajiban Lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara
54112	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara – Valas
541121	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara-Valas
541122	Belanja Pembayaran Kupon SBN Valas-TDR
541123	Belanja Pembayaran Bunga Repo Valas-TDR
541129	Belanja Pembayaran Biaya/ Kewajiban Lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara - Valas
5412	Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Jangka Panjang

KODE AKUN	URAIAN AKUN
54121	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara
541211	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah
541219	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara
54122	Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang Lainnya
541221	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan
541229	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara Lainnya
54123	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri
541231	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri
541232	Belanja Biaya/Kewajiban Lainnya terhadap Pinjaman DN
54124	Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Dalam Negeri
541241	Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Dalam Negeri
54125	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas
541251	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas
541259	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara
5413	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara
54131	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang
541311	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang
541312	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang
54132	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek
541321	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek
541322	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek
54133	Belanja Pembayaran Imbalan SPN Syariah
541331	Belanja Pembayaran Imbalan SPN Syariah
541332	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya- Imbalan SPN Syariah
54134	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang Valas
541341	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang Valas
541342	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang Valas

KODE AKUN	URAIAN AKUN
54135	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek Valas
541351	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek Valas
541352	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek Valas
5414	Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang
54141	Belanja Bunga Pinjaman program
541411	Belanja Bunga Pinjaman Program
541419	Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program
54142	Belanja Bunga Pinjaman Proyek
541421	Belanja Bunga Pinjaman Proyek
541429	Belanja Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Proyek
54144	Belanja Bunga Utang LN Melalui Penjadwalan Kembali Pinjaman
541441	Belanja Bunga Utang LN dari Penjadwalan Kembali Pinjaman Program
541442	Belanja Bunga Utang LN dari Penjadwalan Kembali Pinjaman Proyek
541449	Belanja Biaya/Kewajiban Lainnya – Bunga Utang LN Melalui Penjadwalan Kembali Pinjaman
54146	Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri
541461	Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri
542	BELANJA PEMBAYARAN DISCOUNT SURAT UTANG NEGARA
5421	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara
54211	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara
542111	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara
542119	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara
54212	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara
542121	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara
542129	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Obligasi Negara
54213	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Valas
542131	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Valas
542139	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Valas
54214	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas
542141	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	542149 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Obligasi Negara Valas
544 BELANJA PEMBAYARAN LOSS ON BOND REDEMPTION	
5441 Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara	
54411 Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara	
544111 Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara	
544112 Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara	
544113 Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valas	
544114 Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara Valas	
545 BELANJA PEMBAYARAN DISCOUNT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA	
5451 Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara	
54511 Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang	
545111 Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang	
545119 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang	
54512 Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek	
545121 Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek	
545129 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Disocunt Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek	
54513 Belanja Pembayaran Discount SPN	
545131 Belanja Pembayaran Discount SPN	
545139 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya- Discount SPN	
54514 Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang Valas	
545141 Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang Valas	
545149 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang Valas	
54515 Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek Valas	
545151 Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek Valas	

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	545159 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek Valas
547 BELANJA DENDA	
5471 Belanja Pembayaran Denda	
54711 Belanja Pembayaran Imbalan Bunga	
54712 Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan	
54713 Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Bea dan Cukai (SPM-IB Bea dan Cukai)	
54719 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya	
55 BELANJA SUBSIDI	
551 BELANJA SUBSIDI PERUSAHAAN NEGARA	
5511 Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	
55111 Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	
551111 Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	
5512 Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – BBM	
55121 Belanja Subsidi BBM	
551211 Belanja Subsidi Avgas	
551212 Belanja Subsidi Avtur	
551213 Belanja Subsidi Premium	
551214 Belanja Subsidi Minyak Bakar	
551215 Belanja Subsidi Minyak Solar	
551216 Belanja Subsidi Minyak Diesel	
551217 Belanja Subsidi Minyak Tanah	
551218 Belanja Subsidi Elpiji	
551219 Belanja Subsidi <i>Liquefied Gas For Vehicle (LGV)</i>	
5513 Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – Non BBM	
55131 Belanja Subsidi Non-BBM – Harga/Biaya	
551311 Belanja Subsidi Pangan	
551312 Belanja Subsidi Listrik	
551313 Belanja Subsidi Benih	
551314 Belanja Subsidi Obat	
551315 Belanja Subsidi Gula	
551316 Belanja Subsidi Pupuk	
551317 Belanja Subsidi Perawatan Beras	
551318 Belanja Subsidi Pengawasan Pupuk	
551319 Belanja Subsidi Harga/Biaya Lainnya	
55132 Belanja Subsidi Non-BBM – Pajak	
551321 Belanja Subsidi PPh-DTP	
551323 Belanja Subsidi BM-DTP	
55133 Belanja Subsidi Non-BBM – Lainnya	
551331 Belanja Subsidi Haji	

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	551332 Belanja Subsidi Kendaraan Bermotor
	551339 Belanja Subsidi Lainnya
55134	Belanja Subsidi Non BBM - Harga/Biaya II
	551341 Belanja Subsidi Minyak Goreng
5514	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – PSO
	55141 Belanja Subsidi dalam rangka PSO
	551411 Belanja Subsidi PT KAI
	551412 Belanja Subsidi PT PELNI
	551413 Belanja Subsidi PT Pos Indonesia
	551414 Belanja Subsidi TVRI
	551415 Belanja Subsidi BULOG
	551419 Belanja Subsidi Dalam Rangka PSO Lainnya
552	BELANJA SUBSIDI PERUSAHAAN SWASTA
5521	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
	55211 Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
	552111 Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
	552112 Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan
55212	Belanja Subsidi – Bunga Kredit
	552121 Belanja Subsidi Bunga KUT
	552122 Belanja Subsidi Bunga KOP PIR
	552123 Belanja Subsidi Bunga KOP
	552124 Belanja Subsidi Bunga KOP PRIM
	552125 Belanja Subsidi Bunga KPR
	552126 Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi
	552127 Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Eks KLBI
	552128 Belanja Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)
	552129 Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya
55213	Belanja Subsidi Imbalan Jasa Peminjam dan Risk Sharing
	552131 Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
	552132 Belanja Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi
55214	Belanja Subsidi Kredit Program II
	552141 Belanja Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias
	552142 Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan
	552143 Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang
5522	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan
	55221 Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan
	552211 Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan
56	BELANJA HIBAH
561	BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH LUAR NEGERI
	5611 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	56111 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
	561111 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
562	BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI INTERNASIONAL
	5621 Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
	56211 Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
	562111 Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
563	BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH
	5631 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
	56311 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
	563111 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah
	56312 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah
	563121 Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
	563122 Belanja Hibah Jasa Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
	563123 Belanja Hibah Surat Berharga Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
565	BELANJA HIBAH LAINNYA
	5651 Belanja Hibah Lainnya
	56511 Belanja Hibah Lainnya
	565111 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Terkait Pendapatan/Belanja Hibah
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL
	571 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK REHABILITASI SOSIAL
	5711 Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial
	57111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial
	571111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang
	571112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang
	571113 Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Jasa
	572 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK JAMINAN SOSIAL
	5721 Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial
	57211 Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial
	572111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang
	572112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Barang
	572113 Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Jasa
	573 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN SOSIAL
	5731 Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial
	57311 Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial

KODE AKUN	URAIAN AKUN
573111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang
573112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang
573113	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Jasa
574	BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL
5741	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial
57411	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial
574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang
574112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang
574113	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Jasa
575	BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
5751	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan
57511	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan
575111	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang
575112	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang
575113	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Jasa
576	BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA
5761	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana
57611	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana
576111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang
576112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Barang
576113	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Jasa
58	BELANJA LAIN-LAIN
581	BELANJA LAIN-LAIN
5811	Belanja Lain-lain Dana Cadangan
58111	Belanja Lain-lain Cadangan I
581111	Belanja Cadangan Umum
581112	Belanja Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi)
581113	Belanja Cadangan Dana Reboisasi
581114	Belanja Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/Polri
581115	Belanja Cadangan Kenaikan Harga Tanah ( <i>Land Capping</i> )
581116	Belanja Cadangan Risiko Perubahan Asumsi Makro

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	581117 Belanja Cadangan Stabilisasi Harga Pangan
	581118 Belanja Cadangan Risiko Lifting
	581119 Belanja Cadangan Lainnya
58112	Belanja Lain-lain Cadangan II
	581121 Belanja Cadangan Fiskal Lainnya (Risiko Kenaikan TTL Listrik)
	581122 Belanja Cadangan Beras Pemerintah
	581123 Belanja Cadangan Benih Nasional
5812	Belanja Lain-lain Lembaga Non Kementerian
	58121 Belanja Lain-lain Lembaga Non Kementerian
	581211 Belanja Lain-lain Lembaga Non Kementerian
	581212 Belanja Operasional Kegiatan SKK Migas
5813	Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN
	58131 Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN
	581311 Belanja Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi
	581312 Belanja Jasa Surveyor
	581314 Belanja Jasa Pelayanan Bank Operasional
	581315 Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan
	581316 Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog
	581319 Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN Lainnya
5814	Belanja Lain-lain BUN
	58141 Belanja Lain-lain BUN
	581411 Belanja Iuran ke Lembaga Internasional
	581412 Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua
	581413 Belanja Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga
	581414 Belanja Dana Penunjang (PHLN)
	581415 Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN
	581417 Belanja Kompensasi Kenaikan Harga BBM
	581418 Belanja Konversi BBM ke BBG untuk Transportasi Umum
	581419 Belanja Lain-lain BUN Lainnya
58142	Belanja Lain-lain BUN II
	581421 Belanja Selisih Harga SBN
	581422 Belanja karena Selisih Kurs Satker Perwakilan RI/Atase Teknis BA Belanja Lainnya
5815	Belanja Lain-lain Tanggap Darurat
	58151 Belanja Lain-lain Tanggap Darurat
	581511 Belanja Keperluan Mendesak/Tak Terduga
	581512 Belanja Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
5816	Belanja Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D
	58161 Belanja Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D

-50-

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	581611 Belanja Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D dan <i>Exotic Currency</i>
5819	Belanja Lain-lain Lainnya
58191	Belanja Lain-lain Lainnya
	581911 Belanja Pemilu
	581919 Belanja Lain-lain

## **SEGMEN AKUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA**

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
6 TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	
61 DANA BAGI HASIL	
611 DANA BAGI HASIL PAJAK	
6111 Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	
61111 Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	
611111 Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	
611112 Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	
6112 Dana Bagi Hasil PBB	
61121 Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	
611211 Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	
611212 Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	
611213 Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi	
611214 Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota	
611215 Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota	
611216 Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan sebagai Insentif PBB ke Kabupaten/Kota	
612 DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM	
6121 Dana Bagi Hasil-SDA Minyak Bumi	
61211 Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	
612111 Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	
612112 Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0.5%	
612113 Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus	
6122 Dana Bagi Hasil -SDA Gas Bumi	
61221 Dana Bagi Hasil Gas Bumi	
612211 Dana Bagi Hasil Gas Bumi	
612212 Dana Bagi Hasil Gas Bumi 0.5%	
612213 Tambahan Dana Bagi Hasil Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus	
6123 Dana Bagi Hasil -SDA Pertambangan Umum	
61231 Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Umum	
612311 Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	
612312 Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalty	
6124 Dana Bagi Hasil -SDA Pertambangan Panas Bumi	
61241 Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	
612411 Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah	

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	612412 Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap
	612413 Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Produksi (Royalti)
6125 Dana Bagi Hasil -SDA Kehutanan	
61251 Dana Bagi Hasil Kehutanan	
612511 Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	
612512 Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	
612513 Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	
6126 Dana Bagi Hasil Perikanan	
61261 Dana Bagi Hasil Perikanan	
612611 Dana Bagi Hasil Perikanan	
613 DANA BAGI HASIL CUKAI	
6131 Dana Bagi Hasil Cukai	
61311 Dana Bagi Hasil Cukai	
613111 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	
62 DANA ALOKASI UMUM	
621 DANA ALOKASI UMUM	
6211 Dana Alokasi Umum	
62111 Dana Alokasi Umum	
621111 Dana Alokasi Umum	
621114 Koreksi Dana Alokasi Umum	
63 DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	
631 DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	
6311 Dana Alokasi Khusus Reguler	
63111 Dana Alokasi Khusus Reguler	
631111 Dana Alokasi Khusus Reguler	
631113 Koreksi Dana Alokasi Khusus Reguler	
6312 Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan	
63121 Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan	
631211 Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah	
631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan	
6313 Dana Alokasi Khusus Affirmasi	
63131 Dana Alokasi Khusus Affirmasi	
631311 Dana Alokasi Khusus Affirmasi	
6314 Tambahan DAK Fisik	
63141 Tambahan DAK Fisik	
631411 Tambahan DAK Fisik	

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
64 DANA OTONOMI KHUSUS, DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DAN DANA INSENTIF DAERAH	
641 DANA OTONOMI KHUSUS	
6411 Dana Otonomi Khusus Aceh	
64111 Dana Otonomi Khusus Aceh	
641111 Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	
6412 Dana Otonomi Khusus Papua	
64121 Dana Otonomi Khusus Papua	
641211 Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	
641212 Dana Tambahan Infrastruktur Papua	
6413 Dana Otonomi Khusus Papua Barat	
64131 Dana Otonomi Khusus Papua Barat	
641311 Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	
641312 Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	
642 DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	
6421 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	
64211 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	
642111 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	
643 DANA INSENTIF DAERAH	
6431 Dana Insentif Daerah	
64311 Dana Insentif Daerah	
643111 Dana Insentif Daerah	
65 DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	
654 DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	
6541 Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	
65411 Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	
654111 Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	
654112 Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	
6542 Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	
65421 Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	
654211 Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	
6543 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	
65431 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	
654311 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	
6545 Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)	
65451 Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)	
654511 Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)	

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
6546	Dana Darurat
65461	Dana Darurat
	654611 Dana Darurat
6547	Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana
65471	Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana
	654711 Dana Bantuan Operasional Kesehatan
	654712 Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana
6548	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan dan Kependudukan
65481	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan dan Kependudukan
	654811 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi
	654812 Dana Peningkatan Kapasitas Usaha Kecil Menengah
	654813 Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan
	654814 Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
6549	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)
65491	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)
	654911 Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)
66	DANA DESA
662	DANA DESA
6621	Dana Desa
66211	Dana Desa
	662111 Dana Desa

## **SEGMENT AKUN PEMBIAYAAN**

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
7 PEMBIAYAAN	
71 PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
711 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	
7111 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan	
71111 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan	
711111 Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)	
711112 Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Dana Investasi	
711113 Penerimaan Pembiayaan dari Rekening BUN untuk Obligasi	
711114 Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Pembangunan Hutan	
71112 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Dana Moratorium	
711121 Penerimaan Pembiayaan dari Dana Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh	
7112 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Non Perbankan	
71121 Penerimaan Kembali Investasi	
711211 Penerimaan Hasil Privatisasi	
711219 Penerimaan Kembali Investasi Lainnya	
71122 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri-Pinjaman Dalam Negeri	
711221 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Daerah	
711222 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	
711223 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah	
7113 Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	
71131 Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	
711311 Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	
711312 Penerimaan Hasil Penjualan/ Penyelesaian Aset Eks. BPPN	
711313 Penerimaan Hasil Penjualan/ Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)	
7114 Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara	
71141 Penerimaan dari Penjualan Surat Perpendaharaan Negara	
711411 Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perpendaharaan Negara	
71142 Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara	
711421 Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara	
711422 Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara	
71143 Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara-Jangka Pendek	
711431 Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN - Jangka Pendek	

KODE AKUN	URAIAN AKUN
71144	Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang
711441	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN - Jangka Panjang
711442	Penerimaan Imbalan Dibayar Di Muka SBSN - Jangka Panjang
71145	Penerimaan dari Penjualan Surat Perpendaharaan Negara Syariah
711451	Penerimaan dari Penjualan Surat Perpendaharaan Negara Syariah
71146	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dalam Rangka Pembiayaan Proyek Melalui SBSN PBS
711461	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dalam Rangka Pembiayaan Proyek melalui SBSN PBS
7115	Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir
71151	Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir
711511	Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir
7116	Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara - Valuta Asing
71161	Penerimaan Obligasi Negara - Valuta Asing
711611	Penerimaan Penerbitan/ Penjualan Obligasi Negara - Valuta Asing
711612	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara - Valuta Asing
71162	Penerimaan Surat Perpendaharaan Negara - Valuta Asing
711621	Penerimaan Penerbitan/ Penjualan Surat Perpendaharaan Negara - Valuta Asing
71163	Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri - Jangka Pendek
711631	Penerimaan Penerbitan/ Penjualan SBSN Valas - Jangka Pendek
71164	Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri - Jangka Panjang
711641	Penerimaan Penerbitan/ Penjualan SBSN Valas - Jangka Panjang
711642	Penerimaan Imbalan Dibayar Di Muka SBSN Valas - Jangka Panjang
71165	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dalam Rangka Pembiayaan Proyek melalui SBSN Valas PBS
711651	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dalam Rangka Pembiayaan Proyek melalui SBSN Valas PBS
712	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI
7121	Penarikan Pinjaman Tunai
71213	Penarikan Pinjaman Tunai
712131	Penarikan Pinjaman Tunai
7122	Penarikan Pinjaman Kegiatan
71226	Penarikan Pinjaman Kegiatan
712261	Penarikan Pinjaman Kegiatan

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
713	PENERIMAAN DARI PENJADWALAN KEMBALI POKOK UTANG LUAR NEGERI
7131	Penerimaan dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
71311	Penerimaan Pinjaman Tunai dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
713111	Penerimaan Pinjaman Tunai dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
71312	Penerimaan Pinjaman Kegiatan dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
713121	Penerimaan Pinjaman Kegiatan dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
714	PENERIMAAN DARI PENJADWALAN KEMBALI BUNGA UTANG LUAR NEGERI
7141	Penerimaan dari Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
71411	Penjadwalan Kembali Bunga Utang Pinjaman Luar Negeri
714111	Penerimaan Pembiayaan dari Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
715	PENERIMAAN CICILAN PENGEMBALIAN PEMBERIAN PINJAMAN
7151	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri
71511	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri
715111	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri kepada Pema
715112	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMD
715113	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada BUMN
715114	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada Non Pemerintah
7152	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri
71521	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan
715211	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar negeri kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan
715212	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar negeri kepada BUMD Tahun Anggaran Berjalan
715213	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar negeri kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan
715214	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri Non Pemerintah
71522	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Lalu
715221	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu

KODE AKUN	URAIAN AKUN
715222	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada BUMD Tahun Anggaran Yang Lalu
715223	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN Tahun Anggaran Yang Lalu
717 PENERIMAAN CICILAN POKOK INVESTASI PEMERINTAH	
7171 Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah	
71711 Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah	
717111 Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah	
717112 Penerimaan Pembiayaan Atas Investasi Pemerintah Untuk Pembiayaan Dana Geothermal	
7172 Penerimaan yang Berasal dari Penjaminan Pemerintah	
71721 Penerimaan yang Berasal dari Penjaminan Pemerintah	
717211 Penerimaan Cicilan atas Penjaminan Pemerintah	
717212 Penerimaan atas Pencairan Dana Cadangan Pemerintah	
717213 Penerimaan atas Pengembalian Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah	
7173 Penerimaan yang Berasal dari Manajemen Aset Negara	
71731 Penerimaan yang Berasal dari Manajemen Aset Negara	
717311 Penerimaan Kembali Modal Awal Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara	
719 PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN	
7192 Penerimaan Piutang Yang Belum Direkonsiliasi	
71921 Penerimaan Piutang Yang Belum Direkonsiliasi	
719211 Penerimaan Piutang Yang Belum Diidentifikasi	
719212 Penerimaan Selisih Piutang ( <i>on Account</i> )	
719213 Penerimaan Piutang Yang Belum Disesuaikan	
7193 Penerimaan Pembiayaan atas Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	
71931 Penerimaan Pembiayaan atas Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	
719311 Penerimaan Pembiayaan atas Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	
72 PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
721 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	
7211 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan	
72111 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan	
721111 Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari Sektor Perbankan	
721112 Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan	

KODE AKUN	URAIAN AKUN
72112	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan untuk Moratorium
721121	Pengeluaran Pembiayaan Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh
7212	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Non-Perbankan
72121	Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi
721211	Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi
72122	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri-Pengembangan Pendidikan Nasional
721221	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri- Pengembangan Pendidikan Nasional
72123	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri
721231	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari Pemda
721232	Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN
721233	Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah
7213	Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara
72131	Pengeluaran untuk Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara
721311	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara
721312	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara melalui Pembelian Kembali
72132	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara
721321	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara
721322	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara melalui Pembelian Kembali
721324	Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara
72133	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek
721331	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek
721332	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali
72134	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang
721341	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang
721342	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali
721343	Pengeluaran Pembayaran Imbalan dibayar dimuka Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang
72135	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara-Syariah
721351	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara-Syariah

KODE AKUN	URAIAN AKUN
721352	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara-Syariah-melalui Pembelian Kembali
7214	Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir
72141	Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir
721411	Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir
7215	Pengeluaran untuk Pelunasan Surat Berharga Negara - Valuta Asing
72151	Pengeluaran untuk Pelunasan Obligasi Negara - Valas
721511	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara - Valas
721512	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Valas - melalui Pembelian Kembali
721513	Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara - Valas
72152	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Valas
721521	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Valas
721522	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Valas melalui Pembelian Kembali
72153	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Pendek
721531	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Pendek
721532	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas melalui Pembelian Kembali
72154	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang
721541	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang
721542	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas-Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali
721543	Pembayaran Imbalan Dibayar Di Muka Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang
722	PENGELUARAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI
7221	Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Tunai
72211	Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Tunai
722113	Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Tunai
7222	Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Kegiatan
72221	Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Kegiatan
722213	Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Kegiatan
7224	Pengembalian Pinjaman
72241	Pengembalian Pinjaman
722411	Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran <i>Ineligible</i>

KODE AKUN	URAIAN AKUN
723	PELUNASAN POKOK UTANG LUAR NEGERI MELALUI PENJADWALAN KEMBALI
7231	Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadwalan Kembali – Pinjaman Tunai
72311	Pengeluaran Penjadwalan Kembali Utang LN Pinjaman Tunai
723111	Pengeluaran Penjadwalan Kembali Utang LN Pinjaman Tunai
7232	Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadwalan Kembali – Pinjaman Kegiatan
72321	Pengeluaran Penjadwalan Kembali Utang LN Pinjaman Kegiatan
723211	Pengeluaran Penjadwalan Kembali Utang LN Pinjaman Kegiatan
7233	Pelunasan Bunga Utang Luar Negeri melalui Penjadwalan Kembali – Pinjaman Kegiatan
72331	Pengeluaran Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
723311	Pengeluaran Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
724	PENYERTAAN MODAL NEGARA
7241	Penyertaan Modal Negara pada BUMN
72411	Penyertaan Modal Negara pada BUMN
724111	PMN untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
724112	Dana Investasi Pemerintah untuk Restrukturisasi BUMN
7242	Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional
72421	Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional
724211	Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional
7244	Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah
72441	Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah
724411	Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah
7249	Penyertaan Modal Negara Lainnya
72491	Penyertaan Modal Negara Lainnya
724911	Penyertaan Modal Negara Lainnya
724912	Penyertaan Modal Negara SMF
724913	Penyertaan Modal Negara ke Bank Indonesia
725	RDI/RPD
7251	Pemberian Pinjaman Dalam Negeri RDI/RPD
72511	Pemberian Pinjaman Dalam Negeri
725111	Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada Daerah
725112	Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada BUMD
725113	Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada BUMN

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	725114 Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada Non Pemerintah
7252 Pemberian Pinjaman Luar Negeri	
72521 Pemberian Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan	
725211 Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan	
725212 Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMD Tahun Anggaran Berjalan	
725213 Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan	
72522 Pemberian Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu	
725221 Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu	
725222 Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMD Tahun Anggaran Yang Lalu	
725223 Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Yang Lalu	
726 DUKUNGAN INFRASTRUKTUR	
7261 Dukungan Infrastruktur	
72611 Dukungan Infrastruktur	
726111 Dukungan Infrastruktur	
727 PENGELUARAN INVESTASI PEMERINTAH	
7271 Investasi Pemerintah	
72711 Investasi Pemerintah	
727111 Investasi Pemerintah	
727112 Investasi Pemerintah untuk Pembiayaan Dana Geothermal	
72712 Pengeluaran Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah	
727121 Pengeluaran Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah	
72713 Pengeluaran Pembiayaan untuk Manajemen Aset Negara	
727131 Pengeluaran Pembiayaan untuk Modal Awal Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara	
727132 Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional	
7272 Investasi Pemerintah Untuk Kemudian Dipinjamkan	
72721 Investasi Pemerintah Untuk Kemudian Dipinjamkan Kepada BUMN	
727211 Investasi Pemerintah Untuk Kemudian Dipinjamkan Kepada BUMN	
7273 Investasi Pemerintah dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah	
72731 Investasi Pemerintah dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah	
727311 Pembayaran Penjaminan Pemerintah kepada Pihak Ketiga/ Kreditur	

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	727312 Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah
729 PENGELUARAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN	
7292	Pengeluaran Pembiayaan untuk Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
72921	Pengeluaran Pembiayaan untuk Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
729211	Pengeluaran Pembiayaan untuk Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
79 PENGELUARAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN	
798 SUSPENSE PEMBIAYAAN	
7981	Suspense Penerimaan Pembiayaan
79811	Suspense Penerimaan Pembiayaan
798111	Suspense Penerimaan Pembiayaan
79812	Suspense Pengeluaran Pembiayaan
798121	Suspense Pengeluaran Pembiayaan

## **SEGMENT AKUN TRANSITORIS**

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
8 NON ANGGARAN	
81 PENERIMAAN NON ANGGARAN	
811 PENERIMAAN NON ANGGARAN PFK	
8111 Penerimaan PFK 10 % Gaji	
81111 Penerimaan PFK 10 % Gaji	
811113 Penerimaan Setoran/Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji PNS Daerah	
811114 Penerimaan Setoran/Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 8% Gaji PNS Daerah	
81113 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10%	
811131 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	
811132 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji PNS Pusat	
811133 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji Polri dan PNS Polri	
811134 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji TNI dan PNS Kemhan	
811135 Penerimaan Setoran/Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji PNS Pusat	
811136 Penerimaan Setoran/Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Polri dan PNS Polri	
811137 Penerimaan Setoran/Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji TNI dan PNS Kemhan	
81114 Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS yang Berasal dari APBN	
811141 Penerimaan PFK 2 % Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS yang Berasal dari APBN	
811142 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja Pegawai Pemerintah Non PNS-APBN	
81115 Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS yang Berasal dari APBD	
811151 Penerimaan PFK 2 % Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS-APBD	
811152 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja Pegawai Pemerintah Non PNS-APBD	
81116 Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Jaminan Kesehatan Pejabat Negara	
811161 Penerimaan PFK 2 % Iuran Jaminan Kesehatan Pejabat Negara	
811162 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja Pejabat Negara	

KODE AKUN	URAIAN AKUN
81117	Penerimaan Setoran PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pihak Ketiga
811171	Penerimaan Setoran PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan dari PT. Taspen
811172	Penerimaan Setoran PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan dari PT. Asabri
81118	Penerimaan Setoran / Potongan Iuran Jaminan Kesehatan Pejabat Daerah
811181	Penerimaan Setoran/Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD
811182	Penerimaan Setoran/Potongan 3% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
8112	Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan
81121	Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan
811212	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji terusan PNS Daerah
8113	Penerimaan PFK Beras BULOG
81131	Penerimaan PFK Beras BULOG
811311	Penerimaan Setoran / Potongan PFK Bulog PNS Pusat
811312	Penerimaan Setoran / Potongan PFK Bulog Polri & PNS POLRI
811313	Penerimaan Setoran/ Potongan PFK Bulog TNI & PNS Dephan
8114	Penerimaan PFK 3 % Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah
81141	Penerimaan PFK 3 % Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah
811411	Penerimaan Setoran PFK 3 % Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Propinsi
811412	Penerimaan Setoran PFK 3 % Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Kabupaten/Kota
8115	Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT
81151	Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT
811511	Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
8117	Penerimaan PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP Migas)
81171	Penerimaan PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP Migas)
811711	Penerimaan Setoran PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP Migas)
8118	Penerimaan PFK Penutupan Rekening
81181	Penerimaan PFK Penutupan Rekening
811811	Penerimaan Setoran Penutupan Rekening

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
8119 Penerimaan PFK Lain-lain	
81191 Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS	
811911 Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Pusat	
811912 Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Daerah	
81192 Penerimaan Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu	
811921 Penerimaan Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu	
812 PENERIMAAN WESEL PEMERINTAH	
8121 Penerimaan Wesel Pemerintah	
81211 Penerimaan Wesel Pemerintah	
812111 Penerimaan potongan WP dari SPM KPPN	
812112 Penerimaan Setoran untuk penerbitan WP	
813 PENERIMAAN REIMBURSEMENT DALAM RANGKA PREFINANCING (PP) DAN PFK BUN LAINNYA	
8131 Penerimaan Reimbursement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya	
81311 Penerimaan Reimbursement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya	
81316 Penggantian Dana dari Reksus ke Rekening BUN karena Prefinancing Reksus	
81317 Penggantian Dana dari Pihak ketiga ke Rekening BUN atas pembayaran kepada PPHLN (Karena adanya pembayaran <i>ineligible</i> )	
81318 Penggantian Dana dari Rekening Dana Talangan Reksus Kosong	
81312 Penerimaan Dana Talangan	
813122 Penerimaan Dana Talangan dari dana Moratorium	
813123 Penerimaan Dana Talangan dari Rekening Lainnya	
813124 Penerimaan Pengembalian dana Talangan ke rekening lainnya	
813125 Penerimaan Talangan Dana Cadangan Subsidi	
813126 Penerimaan Talangan Dana Cadangan DBH	
813127 Penerimaan Talangan Dana Cadangan PMN	
815 PENERIMAAN TRANSITO	
8151 Penerimaan Transito	
81511 Penerimaan Transito	
815111 Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan	
815113 Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana)	
815114 Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu	

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	815115 Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak
81512	Penerimaan Dana dari BLU pada Rekening BUN
	815121 Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN
	815122 Penerimaan Penarikan Dana Kelolaan BLU pada Rekening RPL
81513	Penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan
	815131 Penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan
8153	Penerimaan Persekot/ Uang Muka
	81531 Penerimaan Persekot/ Uang Muka
	815311 Penerimaan Persekot Gaji
81532	Penerimaan Uang Muka Transfer
	815321 Penerimaan Uang Muka Dana Perimbangan
	815322 Penerimaan Uang Muka Dana Otonomi Khusus
8154	Suspense Currency Loan
	81541 Suspense <i>Currency Loan</i>
	815411 Suspense <i>Currency Loan</i>
8155	Penerimaan Transito Tambahan Uang Persediaan
	81551 Penerimaan Transito Uang Persediaan
	815511 Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan
	815513 Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana)
	815514 Penerimaan Pengembalian Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu
	815515 Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak
8156	Penerimaan <i>Escrow</i>
	81561 Penerimaan <i>Escrow</i>
	815611 Penerimaan <i>Escrow</i> Dana Reboisasi
	815612 Penerimaan <i>Escrow</i> Dana Subsidi/PSO
	815613 Penerimaan <i>Escrow</i> Dana Bagi Hasil SDA
	815614 Penerimaan <i>Escrow</i> Dana Penyertaan Modal Negara
	815615 Penerimaan Non Anggaran Dana Penjaminan
	815616 Penerimaan Non Anggaran Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah
81562	Penerimaan Pengembalian <i>Escrow</i>
	815621 Penerimaan Pengembalian <i>Escrow</i> Pajak
	815622 Penerimaan Pengembalian <i>Escrow</i> PNBP

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
8157	Transito Diskonto Surat Berharga Negara
81571	Transito Diskonto Surat Berharga Negara
815711	Penerimaan Transito Diskonto Surat Berharga Negara
8158	Penerimaan Transito Pengalihan Piutang Pemerintah
81581	Penerimaan Transito Pengalihan Piutang Pemberian Pinjaman
815811	Penerimaan Transito Pengalihan Piutang Pemberian Pinjaman
816	KOREKSI PENGELUARAN PEMINDAHBUKUAN
8161	Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan
81611	Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan
816111	Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan
8162	Penerimaan Jasa Perbankan
81621	Penerimaan Jasa Perbankan
816211	Penerimaan Jasa Perbankan
8163	Penerimaan Koreksi Pembukuan Perbankan
81631	Penerimaan Koreksi Pembukuan Perbankan
816311	Penerimaan Koreksi Pembukuan Perbankan
817	PENERIMAAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA
8171	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga
81711	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga
817111	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Rekening
817113	Penerimaan Non Anggaran setoran dana rekening retur ke kas negara
81712	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga di RKUN yang ditangguhkan
817121	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga di RKUN yang ditangguhkan
8172	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya
81721	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Sumber Daya Alam
817211	Penerimaan Setoran Migas
817212	Penerimaan Setoran Pertambangan
817213	Penerimaan Setoran Panas Bumi
817214	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena Retur pada Rekening Pemerintah Lainnya
817215	Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi-Reimbursement PPN
817216	Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi Transito diestimasi-Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi
817217	Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi-Penggantian Bonus Produksi

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	817218 Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi Transito diestimasi-Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi
81722	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan Surat Berharga Negara
	817221 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan Surat Berharga Negara
	817222 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan SBN Ritel Online
81723	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Aset Lainnya
	817231 Penerimaan dari Aset Lainnya (Rek.Dana Talangan)
	817232 Penerimaan dari Aset Lainnya (Rek.Bapertarum)
	817233 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam rangka tujuan tertentu
	817234 Penerimaan dari Aset Lainnya
8173	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas
	81731 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas
	817311 Penerimaan Pihak Ketiga Migas-Pajak Air Tanah ke Pemda
	817312 Penerimaan Pihak Ketiga Migas-Pajak Penerangan Jalan non PLN ke Pemda
	817313 Penerimaan Pihak Ketiga Migas-Lainnya
	817314 Penerimaan Pihak Ketiga Migas-Reimbursement DMO Fee KKKS
	817315 Penerimaan Pihak Ketiga Migas-Reimbursement PPN KKKS
	817316 Penerimaan Pihak Ketiga Migas-Reimbursement Underlifting KKKS
	817317 Penerimaan Pihak Ketiga Migas-Fee BP Migas
	817318 Penerimaan Pihak Ketiga Migas – Fee Penjualan Migas Bagian Negara
81732	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas Transito I
	817321 Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Minyak Bumi
	817322 Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Gas Bumi
	817323 Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Migas Lainnya
	817324 Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan Minyak Bumi
	817325 Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan Gas Bumi
	817326 Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PBB Minyak Bumi
	817327 Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPN Dalam Negeri

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	817328 Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Pasal 23
	817329 Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito – Pendapatan Migas Lainnya
81733	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas Transito II
	817331 Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito – Pendapatan Atas Denda Keterlambatan Pembayaran
8174	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas
81741	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas
	817411 Penerimaan Pihak Ketiga Perusahaan Pertambangan Umum Non Migas
	817412 Penerimaan Pihak Ketiga Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara - Valas
	817413 Penerimaan Pihak Ketiga Utang Bunga Obligasi Negara - Valas
	817414 Penerimaan Pihak Ketiga Penerbitan Surat Utang Negara
	817415 Penerimaan Pihak Ketiga-Penjualan SPN
	817416 Penerimaan Pihak Ketiga-Penjualan Obligasi Negara DN
	817417 Penerimaan Pihak Ketiga-Utang Bunga Obligasi Negara DN
	817418 Penerimaan Pihak Ketiga-Retensi
	817419 Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi-Reimbursement PPN
81742	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas Transito
	817421 Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi Transito - Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi
	817422 Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi Transito - Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi
81743	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Panas Bumi
	817431 Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi - Penggantian Bonus Produksi
8175	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus
81751	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman
	817511 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Dalam negeri
	817512 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri
81752	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah
	817521 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Dalam Negeri
	817522 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar negeri

KODE AKUN	URAIAN AKUN
8176	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas
81761	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum
817611	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah
817612	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
817613	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen
817614	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
817619	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya
81762	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN
817621	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah
817622	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
817623	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah Valuta Yen
817624	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
817626	Penerimaan Non Anggaran Pendapatan Kupon SBN Ditangguhkan
817627	Penerimaan Non Anggaran Pendapatan Selisih Harga SBN Ditangguhkan
817629	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya
81763	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo
817631	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah
817632	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
817633	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen

KODE AKUN	URAIAN AKUN
817634	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
817639	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya
81764	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo
817641	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah
817642	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
817643	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen
817644	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
817649	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya
81765	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah
817651	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta USD
817652	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Yen
817653	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Euro
817659	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Asing Lainnya
81766	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
817661	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Rupiah
817662	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Yen
817663	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Euro

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
817669	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Asing Lainnya
81767	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen
817671	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Rupiah
817672	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta USD
817673	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta Euro
817679	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta Asing Lainnya
81768	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
817681	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Rupiah
817682	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta USD
817683	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta Yen
817689	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta Asing Lainnya
8177	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok dan Piutang Lainnya
81771	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok dan Piutang Lainnya
817711	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok
817712	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang
817713	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	Bank Dalam Likuidasi
817714	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU atau DBH untuk Alokasi Dana Desa (ADD)
8179	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan
81791	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan
817911	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan
818	PENERIMAAN KIRIMAN UANG ANTAR REKENING BANK
8181	Kiriman Uang antar Rekening Bank
81811	Kiriman Uang antar Rekening Bank
818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank
82	PENGELUARAN NON ANGGARAN
821	PENGELUARAN NON ANGGARAN PFK
8211	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 10% Gaji
82113	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 10% Gaji
821131	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 2% Gaji untuk Penyaluran kepada BPJS Kesehatan
821132	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 3.25% Gaji untuk Tabungan Hari Tua PT. Taspen
821133	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 4.75% Gaji untuk Iuran Dana Pensiun PT. Taspen
821134	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 3.25% Gaji untuk Tabungan Hari Tua PT. Asabri
821135	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 4.75% Gaji untuk Iuran Dana Pensiun PT. Asabri
8212	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan
82121	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan
821211	Pengembalian Penerimaan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan PNS
821212	Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Daerah (2%)
821213	Pengembalian Penerimaan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan TNI/PNS Kemhan dan Polri/PNS Polri
8213	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog
82131	Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog
821311	Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog PNS Pusat
821312	Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog Polri & PNS Polri

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	821313 Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog TNI & PNS Dephan
8214	Pengembalian Penerimaan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan
82141	Pengembalian Penerimaan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan
	821411 Pengembalian Penerimaan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja untuk Penyaluran kepada BPJS Kesehatan
8215	Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT
82151	Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT
	821511 Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
8217	Pengembalian Penerimaan Dana Tabungan Pesangon Tenaga kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP Migas)
82171	Pengembalian Penerimaan PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP Migas)
	821711 Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi
8218	Pengembalian Penerimaan PFK Penutupan Rekening
82181	Pengembalian Penerimaan PFK Penutupan Rekening
	821811 Pengembalian Penerimaan Setoran Penutupan Rekening Pihak Ketiga
8219	Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain
82191	Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS
	821911 Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Pusat
	821912 Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Daerah
82192	Pengembalian Penerimaan PFK Lain-Lain
	821921 Pengembalian Penerimaan PFK Lain-Lain
822	PELUNASAN WESEL PEMERINTAH
8221	Pelunasan Wesel Pemerintah
	82211 Pelunasan Wesel Pemerintah
	822111 Pelunasan Wesel Pemerintah
823	PEMBAYARAN PFK PREFINANCING DAN PFK BUN LAINNYA
8231	Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya
	82311 Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya
	823116 Pembayaran dari Rekening BUN karena Prefinancing UP-Reksus
	823117 Pengisian Rekening Dana SAL
	823118 Pembayaran ke Rekening Dana Talangan Reksus kosong

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
82312	Pengembalian Dana Talangan
823122	Pengembalian Dana Talangan ke dana moratorium
823123	Pengeluaran dana talangan dari rekening lainnya
823124	Pengembalian dana talangan ke rekening lainnya
823125	Pengeluaran Talangan Dana Cadangan Subsidi
823126	Pengeluaran Talangan Dana Cadangan DBH
823127	Pengeluaran Talangan Dana Cadangan PMN
825 PENGELUARAN TRANSITO	
8251 Pengeluaran Transito	
82511 Pengeluaran Transito	
825111 Pengeluaran Uang Persediaan	
825113 Pengeluaran Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana)	
825114 Pengeluaran Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu	
825115 Pengeluaran Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak	
82512 Pengembalian Penerimaan Dana dari BLU pada Rekening BUN	
825121 Pengembalian Penerimaan Surplus BLU pada Rekening Kas Negara ke Rekening Kas BLU	
825122 Pengembalian Penerimaan Penarikan Dana Kelolaan BLU pada Rekening RPL	
82513 Pengeluaran penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	
825131 Pengeluaran penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	
8252 Suspense TUP	
82521 Suspense TUP	
825211 Suspense TUP	
8253 Pengeluaran Persekot/Uang Muka	
82531 Pengeluaran Persekot/Uang Muka	
825311 Pengeluaran Persekot Gaji	
82532 Pengeluaran Uang Muka Transfer	
825321 Pengeluaran Uang Muka Dana Perimbangan	
825322 Pengeluaran Uang Muka Dana Otonomi Khusus	
8255 Pengeluaran Transito Tambahan Uang Persediaan	
82551 Pengeluaran Transito Tambahan Uang Persediaan	
825511 Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan	
825513 Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana)	
825514 Pengeluaran Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu	

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	825515 Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak
8256 Pengeluaran <i>Escrow</i>	
82561 Pengeluaran <i>Escrow</i>	
825611 Pengeluaran <i>Escrow</i> Dana Reboisasi	
825612 Pengeluaran <i>Escrow</i> Dana Subsidi/PSO	
825613 Pengeluaran <i>Escrow</i> Dana Bagi Hasil SDA	
825614 Pengeluaran <i>Escrow</i> Dana Penyertaan Modal Negara	
825615 Pengeluaran Non Anggaran Dana Penjaminan	
825616 Pengeluaran Non Anggaran Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah	
82562 Pengeluaran Pengembalian <i>Escrow</i>	
825621 Pengeluaran Pengembalian <i>Escrow</i> Pajak	
825622 Pengeluaran Pengembalian <i>Escrow</i> PNBP	
8257 Pengeluaran Transito Diskonto Surat Berharga Negara	
82571 Pengeluaran Transito Diskonto Surat Berharga Negara	
825711 Pengeluaran Transito Diskonto Surat Berharga Negara	
8258 Pengeluaran Transito Pengalihan Piutang Pemerintah	
82581 Pengeluaran Transito Pengalihan Piutang Pemberian Pinjaman	
825811 Pengeluaran Transito Pengalihan Piutang Pemberian Pinjaman	
826 KOREKSI PENERIMAAN PEMINDAHBUKUAN	
8261 Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	
82611 Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	
826111 Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	
827 PENGELUARAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA	
8271 Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	
82711 Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	
827111 Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Rekening	
827113 Pengeluaran Non Anggaran Pembayaran Kembali Retur kepada Pihak Ketiga	
82712 Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga di RKUN yang ditangguhkan	
827121 Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga di RKUN yang ditangguhkan	
8272 Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	
82721 Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Sumber Daya Alam	
827211 Pengeluaran Setoran Migas	
827212 Pengeluaran Setoran Pertambangan	
827213 Pengeluaran Setoran Panas Bumi	

KODE AKUN	URAIAN AKUN
827214	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Pembayaran Kembali Retur pada Rekening Pemerintah Lainnya
827215	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi-Reimbursement PPN
827216	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi Transito diestimasi-Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi
827217	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi Transito diestimasi-Pengembalian Bonus Produksi
827218	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi Transito diestimasi-Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi
82722	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan Surat Berharga Negara
827221	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan Surat Berharga Negara
827222	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan SBN Ritel Online
82723	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Aset Lainnya
827231	Pengeluaran ke Aset Lainnya (Rek.Dana Talangan)
827232	Pengeluaran ke Aset Lainnya (Rek.Bapertarum)
827233	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam rangka tujuan tertentu
827234	Pengeluaran dari Aset Lainnya
8273	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas
82731	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas
827311	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas-Pajak Air Tanah ke Pemda
827312	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas-Pajak Penerangan Jalan non PLN ke Pemda
827313	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas-Lainnya
827314	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas-Reimbursement DMO Fee KKKS
827315	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas-Reimbursement PPN KKKS
827316	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas-Reimbursement Underlifting KKKS
827317	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas-Fee BP Migas
827318	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas – Fee Penjualan Migas Bagian Negara
82732	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas Transito I
827321	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Minyak Bumi
827322	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Gas Bumi
827323	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	Pendapatan PPh Migas Lainnya
827324	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan Minyak Bumi
827325	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan Gas Bumi
827326	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PBB Minyak Bumi
827327	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPN Dalam Negeri
827328	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Pasal 23
827329	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito - Pendapatan Migas Lainnya
82733	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas Transito II
827331	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito - Pendapatan Atas Denda Keterlambatan Pembayaran
8274	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas
82741	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas
827411	Pengeluaran Pihak Ketiga Perusahaan Pertambangan Umum Non Migas
827412	Pengeluaran Pihak Ketiga Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara - Valas
827413	Pengeluaran Pihak Ketiga Utang Bunga Obligasi Negara - Valas
827414	Pengeluaran Pihak Ketiga Penerbitan Surat Utang Negara
827415	Pengeluaran Pihak Ketiga-Penjualan SPN
827416	Pengeluaran Phak Ketiga-Penjualan Obligasi Negara DN
827417	Pengeluaran Pihak Ketiga-Utang Bunga Obligasi Negara DN
827418	Pengeluaran Pihak Ketiga-Retensi
827419	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi- Reimbursement PPN
82742	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas Transito
827421	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi Transito Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi
827422	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi Transito Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi
82743	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Panas Bumi
827431	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi - Penggantian Bonus Produksi
8275	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus
82751	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	Khusus Pinjaman
827511	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Dalam Negeri
827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri
82752	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah
827521	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Dalam Negeri
827522	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri
8276	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas
82761	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum
827611	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah
827612	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
827613	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen
827614	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
827619	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya
82762	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN
827621	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah
827622	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
827623	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen
827624	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
827626	Pengeluaran Non Anggaran Pendapatan Kupon SBN Ditangguhkan
827627	Pengeluaran Non Anggaran Pendapatan Selisih Harga SBN Ditangguhkan
827629	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR

KODE AKUN	URAIAN AKUN
dalam Valuta Asing Lainnya	
82763	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo
827631	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah
827632	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
827633	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen
827634	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
827639	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya
82764	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo
827641	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah
827642	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
827643	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah Valuta Yen
827644	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
827649	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya
82765	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah
827651	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta USD
827652	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Yen
827653	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Euro
827659	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Asing Lainnya

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
82766	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
827661	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Rupiah
827662	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Yen
827663	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Euro
827669	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Asing Lainnya
82767	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen
827671	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Rupiah
827672	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta USD
827673	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta Euro
827679	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta Asing Lainnya
82768	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
827681	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Rupiah
827682	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta USD
827683	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	Valuta Yen
827689	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta Asing Lainnya
8277	Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok dan Piutang Lainnya
82771	Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok dan Piutang Lainnya
827711	Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok
827712	Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang
827713	Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi
827714	Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU atau DBH untuk Alokasi Dana Desa (ADD)
8279	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan
82791	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan
827911	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan
828	PENGELUARAN KIRIMAN UANG ANTAR REKENING BANK
8281	Kiriman Uang antar Rekening Bank
82811	Kiriman Uang antar Rekening Bank
828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank
83	OUTPUT KINERJA
831	OUTPUT KINERJA
8311	Output Kinerja
83111	Output Kinerja
831111	Output Kinerja



## PENJELASAN URAIAN SEGMENTASI AKUN NERACA-KAS

AKUN	PENJELASAN
<b>1</b>	<b>ASET</b>
	Digunakan untuk mencatat sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
<b>11</b>	<b>ASET LANCAR</b>
	Digunakan untuk mencatat aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.
<b>111</b>	<b>KAS DAN SETARA KAS</b>
	Digunakan untuk mencatat kas dan setara kas berupa uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
<b>1111</b>	<b>Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah</b>
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam Rupiah
<b>11111</b>	<b>Kas di Bank Indonesia dalam Rupiah</b>
	Digunakan untuk mencatat kas yang ada di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam Rupiah
111111	Kas di Rekening KUN dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening KUN dalam Rupiah 502.000000980
111112	Kas di Rekening Sub RKUN Kuasa BUN Pusat
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Sub RKUN Kuasa BUN Pusat 500.000000980
111113	Kas di Rekening SAL
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening SAL
111114	Kas di Rekening Talangan Reksus Kosong
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Talangan Reksus Kosong
111115	Kas di Rekening Penempatan dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penempatan dalam Rupiah 518.000122980
111116	Kas di Rekening Antara Reksus
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Antara Reksus
111117	Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah
111118	Kas di Rekening SUBBUN Talangan
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Sub BUN Talangan
<b>11112</b>	<b>Kas di Rekening Sub RKUN</b>
111121	Kas di Rekening Sub RKUN Penerimaan
	Digunakan untuk mencatat pelimpahan penerimaan negara dari seluruh bank

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	persepsi ke Rekening sub RKUN penerimaan. Rekening ini dibuat pada Bank Indonesia dan dimiliki oleh satker Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN).
111122	Kas di Rekening Sub RKUN Pengeluaran
	Digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran pinjaman luar negeri dan transaksi SP2D Valas. Rekening ini dibuat pada Bank Indonesia dan dimiliki oleh Satker Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN).
111123	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Rupiah
<b>11113</b>	<b>Kas di Rekening Surat Utang Negara</b>
111131	Kas di Rekening Penerimaan Surat Utang Negara
	Digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dari penerbitan SUN. Rekening ini dibuat pada Bank Indonesia dan dimiliki oleh Satker Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN).
111132	Kas di Rekening Pengeluaran Surat Utang Negara
	Digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran cicilan kupon atau pelunasan SUN. Rekening ini dibuat pada Bank Indonesia dan dimiliki oleh Satker Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN).
<b>11114</b>	<b>Kas di Rekening Persepsi Pusat</b>
111141	Kas di Rekening Persepsi Pusat
	Digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan pendapatan dari bank persepsi. Rekening ini dibuat pada bank umum dan PT Pos dan dimiliki oleh Satker Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN).
111142	Kas di Rekening Pos Persepsi Pusat
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pos Persepsi Pusat
<b>11115</b>	<b>Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat-SPAN</b>
111151	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji
111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN - Gaji
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Gaji
<b>1112</b>	<b>Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing</b>
<b>11121</b>	<b>Kas di Bank Indonesia dalam Valuta Asing</b>
111211	Kas di Rekening KUN dalam Valuta USD
111212	Kas di Rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Asing
111213	Kas di Rekening Hasil Minyak Perjanjian Karya
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Hasil Minyak Perjanjian Karya 600.000411980
111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Khusus dalam Valuta Asing
111215	Kas di Rekening Penempatan dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penempatan dalam Valuta USD 608.001411980
111216	Kas di Rekening KUN Dalam Valuta Yen

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening KUN Dalam Valuta Yen 600.502111980
111217	Kas di rekening Penempatan Dalam Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Kas di rekening Penempatan Dalam Valuta Yen 608.000111980
111218	Kas di Rekening KUN dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening KUN dalam Valuta Euro 600.502991980
111219	Kas di Rekening Penempatan Dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penempatan Dalam Valuta Euro 608.000991980
<b>11122</b>	<b>Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing</b>
111221	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing JPY
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing JPY
111222	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing USD
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing USD
111223	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing Euro
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing Euro
<b>1113</b>	<b>Kas di Rekening Pemerintah Lainnya</b>
<b>11131</b>	<b>Kas di Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia</b>
111311	Kas Pemerintah Lainnya dalam rupiah
	Digunakan untuk mencatat Kas Pemerintah Lainnya dalam Rupiah
111312	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pemerintah Lainnya dalam Valuta Asing
111313	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi
111314	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah
111315	Kas di Rekening Penerimaan Migas - RPL
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan Migas - RPL
111316	Kas di Rekening Penerimaan Panas Bumi pada Kuasa BUN Pusat
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan Panas Bumi pada Kuasa BUN Pusat
111317	Kas di Rekening Pertambangan dan Perikanan pada Kuasa BUN Pusat
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pertambangan dan Perikanan pada Kuasa BUN Pusat
111318	Kas di Rekening Kelolaan <i>Treasury Dealing Room</i>
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Kelolaan <i>Treasury Dealing Room</i> .
111319	Kas di Rekening Penerbitan Surat Berharga Negara

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerbitan Surat Berharga Negara
<b>11132</b>	<b>Kas di Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Umum</b>
111321	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat
111322	Kas Pemerintah yang ada di K/L
	Digunakan untuk mencatat Kas Pemerintah yang ada di K/L
111323	Kas Pemerintah yang ada di BLU
	Digunakan untuk mencatat Kas Pemerintah yang ada di BLU
111324	Kas di Rekening PFK
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening PFK
111325	Kas di Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Penempatan
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Penempatan
111326	Kas di Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Hibah luar negeri bencana alam
	Digunakan untuk mencatat transaksi pinjaman dan hibah luar negeri melalui rekening khusus. Rekening ini dimiliki oleh satker Direktorat Pengelolaan Kas negara (PKN). Akun ini terdiri dari rekening khusus yang dibuat di Bank Indonesia dan Bank Umum.
111327	Kas di rekening PHLN
	Digunakan untuk mencatat Kas di rekening PHLN
111328	Kas di Rekening Dana Bergulir
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Dana Bergulir
111329	Kas lainnya
	Digunakan untuk mencatat Kas lainnya
<b>11134</b>	<b>Kas di Rekening Retur Kuasa BUN</b>
111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Non Gaji
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Non Gaji.
111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji.
111343	Kas di Rekening Retur Surat Berharga Syariah Negara
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur Surat Berharga Syariah Negara
<b>1114</b>	<b>Kas di Rekening Kas di KPPN</b>
<b>11141</b>	<b>Kas di Bank Indonesia</b>
111411	Kas di Rekening Pengeluaran di Bank Tunggal
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pengeluaran di Bank Tunggal
111412	Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam rupiah
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Rupiah
<b>11142</b>	<b>Kas di Bank Umum</b>
111421	Kas di Rekening Pengeluaran di Bank Operasional
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pengeluaran di Bank Operasional

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
111422	Kas di Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi)
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi)
111423	Kas di Rekening Retur BO/Pos (KPPN)
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur BO/BO KPPN
<b>11143</b>	<b>Kas KPPN di Bank Indonesia dalam Valuta Asing</b>
111431	Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam valuta USD
111432	Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam valuta Yen
111433	Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam valuta Euro
<b>11144</b>	<b>Kas KPPN di Bank Umum dalam Valuta Asing</b>
111441	Kas di Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi) dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi) dalam Valuta USD.
<b>11145</b>	<b>Kas di Rekening Retur BI dalam Rupiah</b>
111451	Kas di Rekening Retur BI dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur BI dalam Rupiah.
<b>11146</b>	<b>Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Asing</b>
111461	Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta USD.
111462	Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Yen.
111463	Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Euro.
111469	Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Asing Lainnya.
<b>1115</b>	<b>Kas dalam Transito</b>
<b>11151</b>	<b>Kas dalam Transito - BUN</b>
111511	Kas dalam Transito - BUN
	Digunakan untuk mencatat selisih kiriman uang/pemindahbukuan antara pengeluaran dan penerimaan pada BUN.
111512	Kas dalam Transito Rekening Pinjaman/Hibah
	Digunakan untuk mencatat Kas dalam Transito Rekening Pinjaman/Hibah
111513	Kas dalam Transito TUP
	Akun antara pada SPAN untuk mencatat transaksi pertanggungjawaban TUP satker. Akun ini adalah akun yang menggunakan nomor rekening bank ( <i>dummy</i> ) dan menghubungkan pembayaran GTUP Nihil dengan pemotongan dana TUP ( <i>zero payment</i> ). Secara transaksi, akun ini akan nihil dalam laporan keuangan.
111514	Kas dalam Transito UP
	Akun antara untuk mencatat transaksi pertanggungjawaban UP satker. Akun ini adalah akun yang menggunakan nomor rekening bank ( <i>dummy</i> ) dan menghubungkan pembayaran GUP Nihil dengan pemotongan dana UP ( <i>zero</i>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	<i>payment).</i> Secara transaksi, akun ini akan nihil dalam laporan keuangan.
111515	Kas dalam Transito BLU
	Akun antara untuk mencatat transaksi pertanggungjawaban UP satker. Akun ini adalah akun yang tidak memiliki nomor rekening bank dan menghubungkan pembayaran Pengesahan Transaksi BLU ( <i>zero payment</i> ). Secara transaksi, akun ini akan nihil dalam laporan keuangan.
111516	Kas dalam Transito-Transaksi Non Kas
	Akun antara yang menggunakan nomor rekening bank ( <i>dummy</i> ) dan dibutuhkan untuk menciptakan aliran kas masuk dan keluar pada proses transaksi hibah non kas. Secara transaksi, akun ini akan nihil dalam laporan keuangan.
111517	Kas dalam Transito-Transaksi DTP
	Digunakan untuk mencatat proses in out dari penerimaan pajak ditanggung pemerintah. Jika menggunakan akun kas ini maka tidak akan masuk LAK.
111519	Kas dalam Transito Lainnya
	Akun antara untuk mencatat pertanggungjawaban transaksi transito yang melalui modul Penerimaan dan Pembayaran. Akun ini menggunakan nomor rekening bank ( <i>dummy</i> ) yang ada pada segmen bank.
<b>11152</b>	<b>Kas dalam Transito - K/L</b>
111521	Kas dalam Transito - Perwakilan Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat kiriman sisa UP/Kas di Bendahara Pengeluaran Satker Perwakilan RI di luar negeri yang sudah disetorkan, namun sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima.
<b>1116</b>	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>
<b>11161</b>	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>
111611	Kas di Bendahara Pengeluaran
	Digunakan untuk mencatat kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.
111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP
	Digunakan untuk mencatat kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.
<b>1117</b>	<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>
<b>11171</b>	<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>
111711	Kas di Bendahara Penerimaan
	Digunakan untuk mencatat Kas di Bendahara Penerimaan yang mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	pelaksanaan tugas pemerintahan (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke kas negara.
<b>1118</b>	<b>Kas Lainnya dan Setara Kas</b>
<b>11181</b>	<b>Setara Kas</b>
111811	Surat Berharga Digunakan untuk mencatat setara kas Surat Berharga
111812	Penempatan di Bank Umum Digunakan untuk mencatat setara kas Penempatan di Bank Umum
111813	Reverse Repo Digunakan untuk mencatat setara kas Reverse Repo
111814	Foreign Exchange Digunakan untuk mencatat setara kas transaksi Foreign Exchange.
111819	Setara Kas lainnya Digunakan untuk mencatat Setara Kas lainnya
<b>11182</b>	<b>Kas Lainnya Pada Kementerian Negara/Lembaga</b>
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Digunakan untuk mencatat Kas Lainnya dan Setara Kas, yang mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran berupa kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai.
111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah Digunakan untuk mencatat Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah Langsung yang telah disahkan.
111823	Kas Lainnya di K/L Dana Kelolaan LPP RRI/TVRI Digunakan untuk mencatat Kas Lainnya di K/L Dana Kelolaan LPP RRI/TVRI
111824	Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi Digunakan untuk mencatat reklasifikasi Kas Besi yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Satker Perwakilan RI di Luar Negeri selama Uang Persediaan belum diterima. Digunakan pada BA Kementerian Luar Negeri (011).
111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan Digunakan untuk mencatat kas lainnya di bendahara penerimaan yang berasal dari penerimaan yang belum diperhitungkan atau belum dapat diakui sebagai pendapatan.
111826	Kas Lainnya di BLU Digunakan untuk mencatat saldo Kas BLU yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan BLU, seperti dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, uang muka pelayanan, pajak-pajak yang belum disetor, uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai atau pajak yang belum disetor yang sumber dananya berasal dari DIPA Rupiah Murni dan/atau DIPA PNBP
111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan Digunakan untuk mencatat Kas di K/L dari hibah langsung bentuk uang yang belum disahkan
<b>1119</b>	<b>Kas pada Badan Layanan Umum</b>
<b>11191</b>	<b>Kas - BLU</b>
111911	Kas dan Bank - BLU Digunakan untuk mencatat Kas Pada BLU, yang mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di BLU (yang sudah

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	disahkan BUN).
111912	Dana yang akan Dijaminkan - BLU
	Digunakan untuk mencatat Dana yang akan Dijaminkan - BLU
111913	Dana yang akan dipadankan - BLU
	Digunakan untuk mencatat Dana yang akan dipadankan - BLU
111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan
	Digunakan untuk mencatat Kas dan Bank BLU Belum Disahkan
<b>11192</b>	<b>Setara Kas - BLU</b>
111921	Surat Berharga - BLU
	Digunakan untuk mencatat Surat Berharga - BLU
111929	Setara kas Lainnya - BLU
	Digunakan untuk mencatat Setara kas Lainnya - BLU
<b>112</b>	<b>UANG MUKA REKENING BUN</b>
<b>1121</b>	<b>Uang Muka Dari Rekening KUN</b>
<b>11211</b>	<b>Uang Muka KUN UP</b>
112111	Uang Muka KUN UP – PP
	Digunakan untuk mencatat Uang Muka KUN UP – PP
<b>1122</b>	<b>Uang Muka Dari Rekening Khusus</b>
<b>11221</b>	<b>Uang Muka Reksus UP</b>
112211	Uang Muka Reksus UP - PP Reksus
	Digunakan untuk mencatat Uang Muka Reksus UP - PP Reksus
<b>11222</b>	<b>Uang Muka Reksus Non UP</b>
112221	Uang Muka Reksus Kosong
	Digunakan untuk mencatat Uang Muka Reksus Kosong
<b>1123</b>	<b>Talangan kepada RKUN</b>
<b>11231</b>	<b>Talangan kepada RKUN</b>
112311	Talangan Dana Cadangan Subsidi kepada RKUN
	Digunakan untuk mencatat Talangan Dana Cadangan Subsidi kepada RKUN
112312	Talangan Dana Cadangan DBH kepada RKUN
	Digunakan untuk mencatat Talangan Dana Cadangan DBH kepada RKUN
112313	Talangan Dana Cadangan PMN kepada RKUN
	Digunakan untuk mencatat Talangan Dana Cadangan PMN kepada RKUN
<b>113</b>	<b>INVESTASI JANGKA PENDEK</b>
<b>1131</b>	<b>Investasi dalam Deposito</b>
<b>11311</b>	<b>Investasi dalam Deposito</b>
113111	Investasi dalam Deposito Jangka pendek
	Digunakan untuk mencatat Investasi dalam Deposito Jangka pendek
<b>1132</b>	<b>Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara</b>
<b>11321</b>	<b>Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara</b>
	Digunakan untuk mencatat Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
113211	Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara
	Digunakan untuk mencatat Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara
<b>11322</b>	<b>Investasi Jangka Pendek pada Surat Berharga Negara</b>
113221	Investasi jangka Pendek pada SBN dalam rangka stabilisasi pasar
	Digunakan untuk mencatat Investasi jangka Pendek pada SBN dalam rangka stabilisasi pasar
113222	Investasi jangka Pendek pada SBN dalam rangka optimalisasi kas
	Digunakan untuk mencatat Investasi jangka Pendek pada SBN dalam rangka optimalisasi kas
<b>1133</b>	<b>Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum</b>
<b>11331</b>	<b>Deposito Jangka Pendek - BLU</b>
113311	Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan
	Digunakan untuk mencatat Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan
113319	Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Dana Kelolaan BLU dan/atau Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya
	Digunakan untuk mencatat Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Dana Kelolaan BLU dan/atau Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya
<b>1134</b>	<b>Bagian Lancar Investasi Non Permanen</b>
<b>11341</b>	<b>Bagian Lancar Investasi Non Permanen</b>
113411	Bagian Lancar Investasi Non Permanen
	Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Investasi Non Permanen.
<b>1139</b>	<b>Investasi Jangka Pendek Lainnya</b>
<b>11391</b>	<b>Investasi Jangka Pendek Lainnya</b>
113911	Investasi Jangka Pendek Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Investasi Jangka Pendek Lainnya
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>
	Digunakan untuk mencatat kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
<b>21</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>
	Digunakan untuk mencatat kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
<b>211</b>	<b>UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA</b>
<b>2111</b>	<b>Utang Perhitungan Fihak Ketiga</b>
<b>21111</b>	<b>Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) I</b>
	Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pungutan iuran Askes, Bulog, Taspen/Asabri dan Taperum serta badan lainnya. Termasuk akun ini antara lain terdiri dari potongan iuran Taspen, Bulog, Bapertarum, dan Askes.
211111	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFP) 2% Gaji
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFP) 2% Gaji

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
211112	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Pensiunan PNS Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Pensiunan PNS
211113	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog
211114	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 8% Gaji Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 8% Gaji
211115	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tabungan Wajib Perumahan Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tabungan Wajib Perumahan
211116	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Pensiunan TNI/PNS Kemhan dan Polri/PNS Polri Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Pensiunan TNI/PNS Kemhan dan Polri/PNS Polri
211117	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 3% Iuran Jaminan Kesehatan Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 3% Iuran Jaminan Kesehatan
211118	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2 % Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2 % Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
211119	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lain-lain Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lain-lain
<b>21112</b>	<b>Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lainnya</b>
211121	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemberong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP Migas) Digunakan untuk mencatat Bagian pihak ketiga Pemberong Migas atas Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemberong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP M) sebelum dibayarkan kepada yang berhak. Utang ini menjadi transaksi satker BUN
211122	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Penutupan Rekening Digunakan untuk mencatat Bagian penerimaan PFK Penutupan rekening sebelum dibayarkan kepada yang berhak. Utang ini menjadi transaksi satker BUN.
211123	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga Wesel Pemerintah Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga Wesel Pemerintah
<b>21115</b>	<b>Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) II</b>
211151	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada PT Taspen Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada PT Taspen.
211152	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada PT Asabri Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada PT Asabri.
211153	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada PT Askes

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada PT Askes.
211154	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada Pusku POLRI
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada Pusku POLRI.
211155	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada Pusku Kemhan
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada Pusku Kemhan.
211156	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Penyaluran Beras BULOG
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Penyaluran Beras BULOG.
<b>21116</b>	<b>Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga PFK Setoran Pajak Rokok dan Pengalihan Piutang</b>
211161	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Setoran Pajak Rokok
	Digunakan untuk mencatat utang atas selisih penerimaan non anggaran pihak ketiga setoran pajak rokok dan pengembalian penerimaan non anggaran pihak ketiga setoran pajak rokok.
211162	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengalihan Piutang
	Digunakan untuk mencatat utang atas selisih penerimaan non anggaran pihak ketiga pengalihan piutang dan pengembalian penerimaan non anggaran pihak ketiga pengalihan piutang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemotongan DAU dan/atau DBH bagi daerah induk yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada Daerah Otonom Baru.
211163	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Hasil Penjualan/ Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi
	Digunakan untuk mencatat utang atas selisih penerimaan non anggaran pihak ketiga hasil penjualan/penyelesaian aset bekas milik eks Bank Dalam Likuidasi dan pengembalian penerimaan non anggaran pihak ketiga hasil penjualan/penyelesaian aset bekas milik eks Bank dalam Likuidasi.
211164	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pemotongan DAU atau DBH untuk Alokasi Dana Desa (ADD)
	Digunakan untuk mencatat utang atas selisih penerimaan non anggaran pihak ketiga pemotongan DAU atau DBH dan pengembalian penerimaan non anggaran pihak ketiga pemotongan DAU atau DBH sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD).
<b>219</b>	<b>UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA</b>
	Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya seperti kelebihan pembayaran pendapatan, pendapatan diterima di Muka, uang muka, pendapatan yang ditangguhkan dan utang jangka pendek lainnya.
<b>2193</b>	<b>Uang Muka Rekening Khusus</b>
<b>21931</b>	<b>Uang Muka Rekening Khusus</b>
219311	Uang Muka Rekening Khusus
	Digunakan untuk mencatat Uang muka dari rekening khusus (valas)
<b>2194</b>	<b>Uang Muka</b>
<b>21941</b>	<b>Uang Muka dari KUN</b>
219411	Uang Muka dari KUN
	Digunakan untuk mencatat uang muka dari kas umum negara yang belum dipertanggungjawabkan pada tanggal neraca
219412	Uang Muka dari Kementerian Negara/Lembaga
	Digunakan untuk mencatat Uang Muka yang berasal dari Kementerian

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Negara/Lembaga
<b>2195</b>	<b>Uang Muka dari KPPN</b>
<b>21951</b>	<b>Uang Muka dari KPPN</b>
219511	Uang Muka dari KPPN
	Digunakan untuk mencatat Uang Muka yang berasal dari KPPN (uang persediaan dan tambahan uang persediaan) yang belum dipertanggungjawabkan pada tanggal neraca
<b>2197</b>	<b>Utang Kepada KUN</b>
<b>21971</b>	<b>Utang Kepada KUN</b>
219711	Utang Kepada KUN
	Digunakan untuk mencatat utang-utang kepada Kas Umum Negara
<b>21972</b>	<b>Utang Kepada kas BLU</b>
219721	Utang Kepada kas BLU
	Digunakan untuk mencatat Utang kepada Kas BLU.
<b>2198</b>	<b>Utang Kepada RPL</b>
<b>21981</b>	<b>Utang Kepada RPL</b>
219811	Utang Kepada RPL
	Digunakan untuk mencatat utang-utang kepada Rekening Pemerintah Lainnya
<b>21982</b>	<b>Utang Talangan</b>
219821	Utang Talangan Dana Cadangan Subsidi
	Digunakan untuk mencatat Utang Talangan Dana Cadangan Subsidi
219822	Utang Talangan Dana Cadangan DBH
	Digunakan untuk mencatat Utang Talangan Dana Cadangan DBH
219823	Utang Talangan Dana Cadangan PMN
	Digunakan untuk mencatat Utang Talangan Dana Cadangan PMN
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>
	Digunakan untuk mencatat pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
<b>31</b>	<b>EKUITAS</b>
<b>311</b>	<b>EKUITAS</b>
<b>3111</b>	<b>SAL</b>
<b>31111</b>	<b>SAL</b>
311111	SAL
	Digunakan untuk mencatat SAL sebagai akun lawan yang menampung kas dan setara kas serta investasi jangka pendek.
<b>3112</b>	<b>SILPA</b>
<b>31121</b>	<b>SILPA</b>
311211	SILPA
	Digunakan untuk mencatat SILPA sebagai selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama 1 (satu) periode pelaporan.
311212	Koreksi pendapatan tahun anggaran yang lalu
	Digunakan untuk mencatat Koreksi pendapatan tahun anggaran yang lalu
311213	Koreksi belanja tahun anggaran yang lalu

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Koreksi belanja tahun anggaran yang lalu
311214	Surplus/Defisit
	Digunakan untuk mencatat Surplus/Defisit
311215	Pembiayaan Netto
	Digunakan untuk mencatat Pembiayaan Netto
<b>3113</b>	<b>SAL dan SILPA BLU</b>
<b>31131</b>	<b>SAL - BLU</b>
311311	SAL - BLU
	Digunakan untuk mencatat SAL - BLU
311312	Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
311313	SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU
	Digunakan untuk mencatat SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU
311314	Penggunaan SAL BLU
	Digunakan untuk mencatat Penggunaan SAL BLU
311315	Penyesuaian SAL BLU
	Digunakan untuk mencatat Penyesuaian SAL BLU
<b>31132</b>	<b>SILPA BLU</b>
311321	SILPA BLU
	Digunakan untuk mencatat SILPA BLU
<b>3117</b>	<b>Keuntungan/Kerugian yang Belum Terealisasi</b>
<b>31171</b>	<b>Selisih Kurs</b>
311711	Selisih Kurs
	Digunakan untuk mencatat Selisih Kurs belum terealisasi sebelum direklas menjadi akun pendapatan LO/Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<b>3119</b>	<b>Ekuitas Dana Lancar Lainnya</b>
<b>31191</b>	<b>Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung</b>
311911	Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung
	Digunakan untuk mencatat Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung
<b>39</b>	<b>EKUITAS</b>
<b>391</b>	<b>EKUITAS</b>
<b>3911</b>	<b>Ekuitas</b>
<b>39114</b>	<b>Setoran Surplus BLU</b>
391141	Setoran Surplus BLU
	Digunakan untuk mencatat Setoran Surplus BLU

## **PENJELASAN URAIAN SEGMENT AKUN PENDAPATAN-LRA**

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA</b>
<b>41</b>	<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>
<b>411</b>	<b>PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI</b>
<b>4111</b>	<b>Pendapatan Pajak Penghasilan</b>
<b>41111</b>	<b>Pendapatan PPh Migas</b>
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi
	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari PPh minyak bumi yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setoran PPh Minyak Bumi;</li> <li>- Surat Tagihan Pajak (STP);</li> <li>- SKPKB PPh Minyak Bumi; dan</li> <li>- SKPKBT PPh Minyak Bumi.</li> </ul>
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi
	Digunakan untuk mencatat penerimaan ke kas negara yang berasal PPh gas bumi yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setoran PPh Gas Bumi;</li> <li>- Surat Tagihan Pajak (STP);</li> <li>- SKPKB PPh Gas Bumi; dan</li> <li>- SKPKBT PPh Gas Bumi.</li> </ul>
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya
	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari PPh Lainnya yang dihasilkan dari kegiatan penambangan Gas Alam, yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setoran PPh Lainnya dari Gas Bumi;</li> <li>- Surat Tagihan Pajak (STP) Lainnya dari Gas Bumi;</li> <li>- SKPKB PPh Lainnya dari Gas Bumi; dan</li> <li>- SKPKBT PPh Lainnya dari Gas Bumi.</li> </ul>
<b>41112</b>	<b>Pendapatan PPh Non-Migas</b>
411121	Pendapatan PPh Pasal 21
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa/Angsuran Tahunan;</li> <li>- Surat Tagihan Pajak (STP);</li> <li>- PPh Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua,</li> <li>- Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon; Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);</li> <li>- SKPKB PPh Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua,</li> <li>- Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon;</li> <li>- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);</li> <li>- SKPKBT PPh Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua,</li> <li>- Uang Tebusan Pensiun, dan</li> <li>- Uang pesangon.</li> </ul>
411122	Pendapatan PPh Pasal 22
	Penerimaan dari transaksi dalam negeri yang diatur berdasarkan ketentuan dalam

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	<p>Pasal 22 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Masa;</li><li>- PPh Penebusan Migas;</li><li>- PPh Penyerahan Rokok Produksi Dalam Negeri;</li><li>- PPh yang dipungut Bendaharawan; PPh yang dipungut Badan Pemungut Lainnya;</li><li>- Surat Tagihan Pajak (STP);</li><li>- SKPKB; SKPKB PPh Penebusan Migas;</li><li>- SKPKB PPh Penyerahan Rokok Produksi Dalam Negeri;</li><li>- SKPKBT;</li><li>- SKPKBT PPh Penebusan Migas; dan</li><li>- SKPKBT PPh Penyerahan Rokok Produksi Dalam Negeri.</li></ul>
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor
	<p>Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Masa;</li><li>- Surat Tagihan Pajak (STP);</li><li>- SKPKB;</li><li>- SKPKBT.</li></ul>
411124	Pendapatan PPh Pasal 23
	<p>Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Masa;</li><li>- Dividen;</li><li>- Bunga;</li><li>- Royalti;</li><li>- Jasa;</li><li>- PPh Bunga Simpanan Anggota Koperasi;</li><li>- Surat Tagihan Pajak (STP);</li><li>- STP Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa;</li><li>- SKPKB;</li><li>- SKPKB Dividen, Bunga Royalti dan Jasa;</li><li>- SKPKB PPh Bunga Simpanan Anggota Koperasi;</li><li>- SKPKBT;</li><li>- SKPKBT Dividen, Bunga, Royalti dan Jasa; dan</li><li>- SKPKBT PPh Bunga Simpanan Anggota Koperasi.</li></ul>
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
	<p>Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Masa/Angsuran;</li><li>- Tahunan;</li></ul>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Tagihan Pajak (STP);</li><li>- SKPKB; dan</li><li>- SKPKBT.</li></ul>
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan
	<p>Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Masa/Angsuran;</li><li>- Tahunan;</li><li>- Surat Tagihan Pajak (STP);</li><li>- SKPKB; dan</li><li>- SKPKBT.</li></ul>
411127	Pendapatan PPh Pasal 26
	<p>Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Masa/Angsuran;</li><li>- Dividen;</li><li>- Bunga;</li><li>- Royalti;</li><li>- Jasa;</li><li>- Laba setelah pajak BUT;</li><li>- Surat Tagihan Pajak (STP);</li><li>- STP Dividen, Bunga, Royalti, Jasa dan Laba setelah pajak BUT;</li><li>- SKPKB;</li><li>- SKPKB Dividen, Bunga Royalti, Jasa dan Laba setelah pajak BUT;</li><li>- SKPKBT; dan</li><li>- SKPKBT Dividen, Bunga, Royalti, Jasa dan Laba setelah pajak BUT.</li></ul>
411128	Pendapatan PPh Final
	<p>Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fiskal Luar Negeri;</li><li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Diskonto/Bunga Obligasi Orang Pribadi;</li><li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan OP;</li><li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Orang Pribadi;</li><li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Bunga Deposito/Tabungan dan SBI Orang Pribadi;</li><li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian Orang Pribadi;</li><li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Transaksi saham dan obligasi di Bursa Efek Orang Pribadi;</li><li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham Pendiri Orang Pribadi;</li><li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura Orang Pribadi;</li><li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi Orang Pribadi;</li></ul>

AKUN	PENJELASAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>- PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran Dalam Negeri Orang Pribadi;</li><li>- PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar</li><li>- PPh Final Pasal 15 Jasa Penerbangan Dalam Negeri Orang Pribadi;</li><li>- PPh Final Pasal 15 Penghasilan Perwakilan Dagang LN Orang Pribadi;</li><li>- PPh Final Pasal 15 Pola Bagi Hasil Orang Pribadi;</li><li>- PPh Final Pasal 15 Kerjasama Bentuk BOT Orang Pribadi;</li><li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Diskonto/Bunga Obligasi Badan;</li><li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Badan;</li><li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Badan;</li><li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Bunga Deposito/Tabungan dan SBI Badan;</li><li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian Badan;</li><li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Transaksi saham dan obligasi di Bursa Efek Badan;</li><li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham Pendiri Badan;</li><li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura Badan;</li><li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi Badan;</li><li>- PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konsultasi Badan;</li><li>- PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran Dalam Negeri Badan;</li><li>- PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri Badan;</li><li>- PPh Final Pasal 15 Jasa Penerbangan Dalam Negeri Badan;</li><li>- PPh Final Pasal 15 Penghasilan Perwakilan Dagang LN Badan;</li><li>- PPh Final Pasal 15 Pola Bagi Hasil Badan;</li><li>- PPh Final Pasal 15 Kerjasama Bentuk BOT Badan;</li><li>- PPh Final Pasal 19 Revaluasi Aktiva Tetap Badan;</li><li>- PPh Final Lainnya;</li><li>- Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Final;</li><li>- SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) Orang Pribadi;</li><li>- SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) Badan;</li><li>- SKPKB PPh Final Pasal 15 Orang Pribadi;</li><li>- SKPKB PPh Final Pasal 15 Badan;</li><li>- SKPKB PPh Final Pasal 19 Badan;</li><li>- SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2) Orang Pribadi;</li><li>- SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2) Badan;</li><li>- SKPKBT PPh Final Pasal 15 Orang Pribadi;</li><li>- SKPKBT PPh Final Pasal 15 Badan;</li><li>- SKPKBT PPh Final Pasal 19 Badan</li></ul>
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya
	<p>Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari PPh, selain yang dihasilkan dari kegiatan penambangan minyak bumi, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PPh Lainnya dari Minyak Bumi;</li><li>- Surat Tagihan Pajak (STP) Lainnya dari Minyak Bumi;</li><li>- SKPKB PPh Lainnya dari Minyak Bumi dan;</li><li>- SKPKBT PPh Lainnya dari Minyak Bumi.</li></ul> <p>Pendapatan yang berasal dari PPh, selain yang dihasilkan dari kegiatan</p>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	penambangan Gas Alam, yang terdiri dari: - PPh Lainnya dari Gas Alam; - Surat Tagihan Pajak (STP) Lainnya dari Gas Alam; - SKPKB PPh Lainnya dari Gas Alam; dan - SKPKBT PPh Lainnya dari Gas Alam.
<b>41113</b>	<b>Pendapatan PPh Fiskal</b>
411131	Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran Fiskal Luar Negeri.
<b>41114</b>	<b>Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah</b>
411141	Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.
411142	Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah.
411143	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah.
411144	Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah.
411145	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah.
411146	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah.
411147	Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah.
411148	Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah.
411149	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah.
<b>4112</b>	<b>Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai</b>
<b>41121</b>	<b>Pendapatan PPN</b>
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri
	Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 18 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran: - Setoran Masa; - Setoran Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar Daerah Pabean; - Setoran Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean; - Setoran Kegiatan Membangun Sendiri; - Setoran Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	<p>diperjualbelikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- STP;</li> <li>- SKPKB Masa;</li> <li>- SKPKB Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean;</li> <li>- SKPKB Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean;</li> <li>- SKPKB Kegiatan Membangun Sendiri;</li> <li>- SKPKB Pemungut PPN;</li> <li>- SKPKBT Masa;</li> <li>- SKPKBT Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean;</li> <li>- SKPKBT Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean;</li> <li>- SKPKBT Kegiatan Membangun Sendiri;</li> <li>- SKPKBT Pemungut PPN;</li> <li>- PPN Final Membangun Sendiri;</li> <li>- Pemungut.</li> </ul>
411212	Pendapatan PPN Impor
	<p>Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 18 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setoran Masa;</li> <li>- STP;</li> <li>- SKPKB PPN Impor;</li> <li>- SKPKBT PPN Impor;</li> <li>- Pemungut.</li> </ul>
411219	Pendapatan PPN Lainnya
	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PPN, yang belum tertampung dalam pembagian jenis penerimaan PPN.
<b>41122</b>	<b>Pendapatan PPnBM</b>
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri
	<p>Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 18 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setoran Masa/Angsuran;</li> <li>- STP;</li> <li>- SKPKB Masa;</li> <li>- SKPKB Pemungut PPn BM;</li> <li>- SKPKBT Masa;</li> <li>- SKPKBT Pemungut PPnBM;</li> <li>- Pemungut.</li> </ul>
411222	Pendapatan PPnBM Impor
	<p>Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 18 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setoran Masa;</li> <li>- STP;</li> <li>- SKPKB PPn BM Impor;</li> <li>- SKPKBT PPn BM Impor;</li> <li>- Pemungut.</li> </ul>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya
	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PPnBM, yang belum tertampung dalam pembagian jenis penerimaan PPnBM.
<b>4113</b>	<b>Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan</b>
<b>41131</b>	<b>Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan</b>
411311	Pendapatan PBB Pedesaan
	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB sektor pedesaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411312	Pendapatan PBB Perkotaan
	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB sektor perkotaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411313	Pendapatan PBB Perkebunan
	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB sektor perkebunan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411314	Pendapatan PBB Kehutanan
	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB sektor kehutanan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara
	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB sektor pertambangan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
	Pendapatan yang diperoleh dari penarikan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam. Mulai digunakan untuk tahun 2009.
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi
	Pendapatan yang diperoleh dari penarikan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan Panas Bumi. Mulai digunakan untuk tahun 2014.
411319	Pendapatan PBB Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PBB Lainnya.
<b>4114</b>	<b>Pendapatan BPHTB</b>
<b>41141</b>	<b>Pendapatan BPHTB</b>
411411	Pendapatan BPHTB
	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran BPHTB yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No.21 Tahun 1997 UU No. 20 tahun 2000.
<b>4115</b>	<b>Pendapatan Cukai</b>
<b>41151</b>	<b>Pendapatan Cukai</b>
411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau
	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari cukai hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak menggunakan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya pasal 4 ayat (1) c UU No. 11 Tahun 1995.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
411512	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol  Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari cukai Ethyl Alkohol atau etanol meliputi barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH yang diperoleh baik secara peragian dan/ atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
411513	Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol  Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari cukai MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman mengandung ethyl alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya dengan tidak menggunakan bahan antara lain : bir, shandy, anggur, gin, whisky (pasal 4 a).
411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai  Penerimaan Denda Administrasi pada Direktorat Bea dan Cukai yang selama ini masih tergabung dalam MA Pabean Lainnya.
411519	Pendapatan Cukai Lainnya  Pendapatan cukai lainnya adalah penerimaan dari cukai yang tidak tertampung pada Cukai Hasil Tembakau, Ethyl alcohol, Minuman Ethyl Alkohol dan Denda Administrasi Cukai (pasal 7 ayat (7) UU No. 11 tahun 1995).
<b>4116</b>	<b>Pendapatan Pajak Lainnya</b>
<b>41161</b>	<b>Pendapatan Pajak Lainnya</b>
411611	Pendapatan Bea Meterai  Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari penggunaan Bea Meterai yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 1985.
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai  Penerimaan dana hasil Penjualan Benda Materai oleh PT. Pos Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan (BA.015).
411613	Pendapatan PPn Batubara  Digunakan untuk mencatat Pajak Penjualan (PPn) yang dilakukan oleh Wajib Pajak terkait dengan Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Penjualan bagi Kontraktor PKP2B Generasi I.
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya  Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari pembayaran pajak tidak langsung lainnya yang tidak termasuk dalam ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 18 Tahun 2000.
<b>41162</b>	<b>Pendapatan Bunga Penagihan Pajak</b>
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh  Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PPh yang diatur berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 19 Tahun 2000.
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN  Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PPN yang diatur berdasarkan UU No. 19 Thn 1997 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 19 Thn 2000.
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM  Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PPnBM yang diatur berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 19 Thn 2000.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL
	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PTLL yang diatur berdasarkan UU No. 19 Thn 1997 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 19 Thn 2000.
<b>41163</b>	<b>Pendapatan Pajak Lainnya Ditanggung Pemerintah</b>
411631	Pendapatan Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah.
<b>412</b>	<b>PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL</b>
<b>4121</b>	<b>Pendapatan Bea Masuk</b>
<b>41211</b>	<b>Pendapatan Bea Masuk</b>
412111	Pendapatan Bea Masuk
	Pendapatan yang berasal dari pungutan bea atas barang-barang impor.
412112	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah sesuai dengan UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 25/26.
412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean
	Penerimaan Denda Administrasi pada Direktorat Bea dan Cukai yang selama ini masih tergabung dalam MA Pabean Lainnya.
412114	Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
	Pendapatan bea masuk atas barang impor yang dibayar oleh perusahaan pengguna fasilitas KITE dengan mendapatkan fasilitas pengembalian Bea masuk.
412115	Denda Atas Sanksi Administrasi Dari Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Tertentu yang Pengangkutannya Di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)
	Dalam rangka pelaksanaan undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai diberi kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap barang tertentu yang pengangkutannya di dalam daerah pabean (antar pulau). Denda ini berasal dari penerapan peraturan pasal 4,7,8 dan 9 UU No 17 tahun 2006.
412116	Pendapatan BM-DTP
	Untuk mencatat pendapatan bea masuk yang ditanggung pemerintah dan pada saat bersamaan dibayarkan Belanja Subsidi BM-DTP.
412119	Pendapatan Pabean Lainnya
	Pendapatan pabean lainnya adalah Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanksi administrasi berupa denda (pasal 37 ayat (1) UU No. 10 tahun 1995);</li> <li>- Bunga (pasal 38 ayat (1) UU No. 10 tahun 1995).</li> </ul>
<b>41212</b>	<b>Pendapatan Bea Masuk Tindakan</b>
412121	Pendapatan Bea Masuk Antidumping
	Digunakan untuk mencatat penerimaan negara atas pungutan yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian. Merupakan pendapatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (015.05).
412122	Pendapatan Bea Masuk Imbalan
	Digunakan untuk mencatat penerimaan negara atas pungutan yang dikenakan terhadap barang impor mengandung subsidi yang menyebabkan kerugian.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Merupakan pendapatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (015.05).
412123	Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan
	Digunakan untuk mencatat penerimaan negara atas pungutan untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan. Merupakan pendapatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (015.05).
<b>4122</b>	<b>Pendapatan Bea Keluar</b>
<b>41221</b>	<b>Pendapatan Bea Keluar</b>
412211	Pendapatan Bea Keluar
	Pendapatan yang diperoleh dari pungutan atas barang-barang yang dieksport (sebelumnya disebut pajak ekspor).
412212	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar
	Pendapatan yang diperoleh dari Denda Administrasi atas Bea keluar yang tidak dibayar/terlambat dibayar.
412213	Pendapatan Bunga Bea Keluar
	Pendapatan yang diperoleh dari beban Bunga atas Bea keluar yang tidak dibayar/terlambat dibayar.
<b>419</b>	<b>PENDAPATAN PAJAK LAIN-LAIN</b>
<b>4199</b>	<b>Pendapatan Pajak Lain-lain</b>
<b>41999</b>	<b>Pendapatan Pajak Lain-lain</b>
<b>419999</b>	Pendapatan Pajak Lain-lain
	Hanya digunakan untuk mencatat Pendapatan Pajak Lain-lain oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Jurnal Penyesuaian tingkat LKPP.
<b>42</b>	<b>PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>
<b>421</b>	<b>PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM</b>
<b>4211</b>	<b>PENDAPATAN MINYAK BUMI</b>
<b>42111</b>	<b>Pendapatan Minyak Bumi</b>
421111	Pendapatan Minyak Bumi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bagian Pemerintah dari penjualan minyak bumi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan-BUN (BA 999.99).
<b>4212</b>	<b>PENDAPATAN GAS BUMI</b>
<b>42121</b>	<b>Pendapatan Gas Bumi</b>
421211	Pendapatan Gas Bumi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bagian Pemerintah dari penjualan gas bumi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan-BUN (999.99).
<b>4213</b>	<b>PENDAPATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA</b>
<b>42132</b>	<b>Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara</b>
421321	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara – Eksplorasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemberian izin melaksanakan eksplorasi pertambangan Mineral dan Batubara. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
421322	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Operasi Produksi Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemberian izin melaksanakan operasi produksi pertambangan Mineral dan Batubara. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421323	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Izin Pertambangan Rakyat Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemberian izin melaksanakan usaha pertambangan di bidang Mineral dan Batubara dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
<b>42133</b>	<b>Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara</b>
421331	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Batubara Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan batubara. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421332	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Tembaga Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan tembaga. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421333	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Emas Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan emas. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421334	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Perak Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan perak. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421335	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Nikel Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan nikel. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421336	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Timah Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan timah. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421339	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Lainnya Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan komoditi tambang selain batubara, tembaga, emas, perak, nikel, timah dan besi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
<b>42134</b>	<b>Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)</b>
421341	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Digunakan untuk mencatat penerimaan dari bagian pemerintah atas keuntungan bersih dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>4214</b>	<b>PENDAPATAN KEHUTANAN</b>
<b>42141</b>	<b>Pendapatan Dana Reboisasi</b>
421411	Pendapatan Dana Reboisasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Dana Reboisasi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029)
<b>42142</b>	<b>Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan</b>
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029).
<b>42143</b>	<b>Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)</b>
421435	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH) antara lain Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IIUPHHK-HA) dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IIUPHHK-HTR).Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029).
<b>42144</b>	<b>Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan</b>
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan sebagai pengganti lahan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029).
<b>4215</b>	<b>PENDAPATAN PERIKANAN</b>
<b>42152</b>	<b>Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan</b>
421521	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari izin untuk melaksanakan pengusahaan perikanan bidang perikanan tangkap antara lain Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) atau Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI)
421522	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari izin untuk melaksanakan pengusahaan perikanan bidang pembudidayaan ikan antara lain Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan dan Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal (RPIPM).
<b>42153</b>	<b>Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan</b>
421531	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dalam rangka penangkapan ikan antara lain Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
<b>4216</b>	<b>PENDAPATAN PANAS BUMI</b>
<b>42162</b>	<b>Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi</b>
421621	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari setoran bagian pemerintah setelah dikurangi dengan kewajiban perpjakan dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan-BUN (BA 999.99)

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>42163</b>	<b>Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi</b>
421631	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Eksplorasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemberian izin melaksanakan eksplorasi pengusahaan panas bumi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421632	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Operasi Produksi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemberian izin melaksanakan operasi produksi pengusahaan panas bumi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
<b>42164</b>	<b>Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi</b>
421641	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pengusahaan panas bumi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
<b>422</b>	<b>PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND)</b>
<b>4221</b>	<b>PENDAPATAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN</b>
<b>42213</b>	<b>Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN</b>
422131	Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan di Bawah Kementerian BUMN
	Digunakan untuk mencatat penerimaan bagian Pemerintah dari laba BUMN Perbankan. Masuk Bagian Anggaran BUN (BA 999.03)
422132	Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN
	Digunakan untuk mencatat penerimaan bagian Pemerintah dari laba BUMN Non Perbankan. Masuk Bagian Anggaran BUN (BA 999.03)
<b>42214</b>	<b>Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan</b>
422141	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Laba dari Investasi pada BUMN/Lembaga Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan. Masuk Bagian Anggaran BUN (BA 999.03)
422142	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Laba dari Investasi pada BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan. Masuk Bagian Anggaran BUN (BA 999.03)
<b>4222</b>	<b>PENDAPATAN DARI KND LAINNYA</b>
<b>42221</b>	<b>Pendapatan dari Surplus Lembaga</b>
422211	Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah.
422212	Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi bagian Pemerintah.
422213	Pendapatan dari Surplus Lembaga Penjamin Simpanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang menjadi bagian Pemerintah.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
422219	Pendapatan dari Surplus Lembaga Lainnya  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus lembaga lainnya yang menjadi bagian Pemerintah.
<b>424</b>	<b>PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM</b>
<b>4241</b>	<b>Pendapatan Jasa Layanan Umum</b>
<b>42411</b>	<b>Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat</b>
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU bagi BLU Penyedia Barang dan Jasa dari hasil pelayanan jasa yang merupakan <i>core business</i> -nya sebagaimana terlampir.
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit  Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU dari hasil pelayanan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan, baik yang berada di Lingkungan Kementerian Kesehatan (BA 024) maupun kementerian lainnya. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> rumah sakit/instansi kesehatan walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti rumah sakit yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas pendidikan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan  Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU yang berasal dari Sekolah maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (BA 023) maupun di kementerian lain. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> layanan pendidikan, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti perguruan tinggi yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas kesehatan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi  Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU dari kegiatan Jasa layanan bantuan tenaga terampil, informasi, pekerjaan, pelatihan dan teknologi. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> layanan bantuan tenaga terampil, informasi, pekerjaan, pelatihan dan teknologi, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti BLU jasa layanan IT yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas kesehatan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan  Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU dari jasa pencetakan dokumen, buku dan sejenisnya. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> layanan jasa pencetakan, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti BLU layanan jasa pencetakan yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas pendidikan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian  Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU dari jasa kegiatan bandara, pelabuhan laut dan pengaturan navigasi untuk kepentingan transportasi. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> layanan jasa kegiatan bandara, pelabuhan laut dan pengaturan navigasi untuk kepentingan transportasi, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti BLU layanan jasa pelabuhan yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas kesehatan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi  Pendapatan BLU atas kegiatan layanan penyelenggaraan kegiatan telekomunikasi melalui media atau sarana yang ada seperti alat telekomunikasi dan sejenisnya. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> layanan jasa telekomunikasi, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti BLU layanan jasa telekomunikasi yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas layanan lainnya, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran  Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU atas jasa layanan kegiatan pemasaran produk-produk tertentu yang ditujukan bagi konsumen atau pengguna produk atau jasa yang ditawarkan. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> layanan kegiatan pemasaran, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti BLU layanan kegiatan pemasaran yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas kesehatan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
424118	Pendapatan Penyediaan Barang  Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU yang diperoleh dari kegiatan penyediaan barang untuk kepentingan masyarakat atau instansi pengguna lainnya. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> layanan penyediaan barang, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti BLU layanan penyediaan barang yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas pendidikan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya  Pendapatan BLU yang diperoleh dari kegiatan di luar penyediaan barang dan jasa lainnya selain dari yang telah dijelaskan pada akun 424111, 424112, 424113, 424114, 424115, 424116, 424117, dan 424118. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> layanan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, seperti BLU layanan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas pendidikan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
<b>42412</b>	<b>Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu</b>
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU bagi BLU Pengelola Wilayah/Kawasan tertentu dari hasil pelayanannya termasuk pendapatan yang berasal dari kerjasama operasional dan sewa menyewa.
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita  Pendapatan BLU dari hasil pengelolaan Kawasan Otorita yang ditetapkan oleh Pemerintah.
424122	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu  Pendapatan BLU dari hasil pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah
	Pendapatan BLU dari hasil pengelolaan Fasilitas Umum milik Pemerintah.
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya  Pendapatan BLU dari hasil diluar pengelolaan kawasan otorita, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan fasilitas umum lainnya.
<b>42413</b>	<b>Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
424131	Pendapatan Program Dana Penjaminan
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan program dana penjaminan.
424132	Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan program dana penjaminan Syariah.
424133	Pendapatan Program Modal Ventura
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan program Modal Ventura.
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan program dana bergulir Sektoral.
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan program dana bergulir Syariah.
424136	Pendapatan Investasi
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan investasi atas bidang-bidang tertentu.
424137	Pendapatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
	Pendapatan yang berasal dari pengelolaan dana pengembangan pendidikan nasional.
424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
	Pendapatan BLU yang berasal dari Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana khusus lainnya.
<b>42414</b>	<b>Pendapatan dari pengelolaan BMN pada Pengelola Barang</b>
424141	Pendapatan dari pengelolaan BMN pada Pengelola Barang
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil kelolaan BMN pada satuan kerja pengelola aset BUN. Dicatat pada Bagian Anggaran Kementerian Keuangan (015).
<b>4242</b>	<b>Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum</b>
	Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah yang diterima oleh Satker BLU.
<b>42421</b>	<b>Pendapatan Hibah Terikat - Uang</b>
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang
	Pendapatan Hibah terikat Dalam Negeri yang berasal dari perorangan.
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
	Pendapatan Hibah terikat Dalam Negeri yang berasal dari Lembaga / Badan Usaha.
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang
	Pendapatan Hibah terikat Dalam Negeri yang berasal dari Pemda.
424214	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang
	Pendapatan Hibah terikat Luar Negeri yang berasal dari perorangan.
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
	Pendapatan Hibah terikat Luar Negeri yang berasal dari Lembaga/Badan Usaha.
424216	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara - Uang

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Pendapatan Hibah terikat Luar Negeri yang berasal dari Negara.
424219	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya - Uang
	Pendapatan Hibah terikat Dalam/ Luar Negeri yang bukan berasal dari perorangan, lembaga/ Badan Usaha dan Pemda.
<b>42422</b>	<b>Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Uang</b>
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam Negeri yang berasal dari perorangan.
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam Negeri yang berasal dari lembaga/Badan Usaha.
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam Negeri yang berasal dari pemda.
424224	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Luar Negeri yang berasal dari perorangan.
424225	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Luar Negeri yang berasal dari Lembaga/Badan Usaha.
424226	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara - Uang
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Luar Negeri yang berasal dari Negara lain.
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya - Uang
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam / Luar Negeri yang bukan berasal dari perorangan, lembaga/ Badan Usaha dan Pemda.
<b>4243</b>	<b>Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU</b>
	Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dan sewa menyewa bagi semua BLU selain Pengelola Wilayah/Kawasan tertentu.
<b>42431</b>	<b>Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU</b>
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan
	Pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dengan pihak lain : perorangan.
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
	Pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dengan pihak lain : Lembaga/Badan Usaha.
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah
	Pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dengan pihak lain : Pemda.
<b>4244</b>	<b>Pendapatan dari Alokasi APBN</b>
<b>42441</b>	<b>Pendapatan dari Alokasi APBN</b>
424411	Pendapatan dari Alokasi APBN
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU yang berasal dari DIPA sumber dana Rupiah Murni (RM), yang akan dieliminasi dalam proses konsolidasi LKKL
<b>42442</b>	<b>Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat</b>
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU
<b>4249</b>	<b>Pendapatan BLU Lainnya</b>
	Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU lainnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai pendapatan jasa layanan umum, pendapatan hasil kerja sama BLU, dan pendapatan hibah BLU, dengan rincian sesuai dengan kode akun 6 digitnya.
<b>42491</b>	<b>Pendapatan BLU Lainnya</b>
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
	Kode akun ini digunakan untuk mencatat pendapatan jasa giro dan layanan perbankan yang diterima oleh Badan Layanan Umum.
424912	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang dibatasi pengelolaannya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga dari penempatan endowment fund dan dana cadangan pendidikan oleh BLU bidang pendidikan atau yang ditunjuk pada Kementerian Keuangan.
424913	Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU
	Digunakan untuk mencatat Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU
424914	Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi - BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi - BLU
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
424917	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perpendaharaan / TGR - BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perpendaharaan / TGR - BLU
424919	Pendapatan Lain-lain BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Lain-lain BLU
<b>42492</b>	<b>Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa</b>
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin
424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya
<b>42493</b>	<b>Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN BLU</b>
424931	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Tanah BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Tanah BLU
424932	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU
424933	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU
424934	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU
424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU
<b>42494</b>	<b>Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar BMN BLU</b>
424941	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Tanah BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Tanah BLU
424942	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Gedung dan Bangunan BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Gedung dan Bangunan BLU
424943	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin BLU
424944	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU
424945	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya BLU
424949	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar BMN Lainnya BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar BMN Lainnya BLU
<b>425</b>	<b>PENDAPATAN PNBP LAINNYA</b>
<b>4251</b>	<b>PENDAPATAN DARI PENJUALAN, PENGELOLAAN BMN, DAN IURAN BADAN USAHA</b>
<b>42511</b>	<b>Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang</b>
425111	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat penerimaan dari penjualan produksi batubara bagian pemerintah di luar royalti. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan budidaya yang tidak berasal dari hasil kegiatan penelitian dan/atau pengembangan. Merupakan pendapatan yang bisa terdapat di semua Kementerian/Lembaga
425113	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari penjualan dokumen lelang. Merupakan pendapatan yang bisa terdapat di semua Kementerian/Lembaga
425114	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni
	Digunakan untuk mencatat pendapatan penjualan cadangan beras pemerintah dalam rangka menstabilkan harga beras di pasaran
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan selain kelompok pendapatan atas penjualan-penjualan di atas dan tidak berasal dari hasil kegiatan penelitian/pengembangan, antara lain berasal dari hasil penjualan produk ekonomi kreatif, penjualan obat-obatan dan hasil farmasi. Merupakan pendapatan yang bisa terdapat di semua Kementerian/Lembaga
<b>42512</b>	<b>Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN</b>
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan, tidak termasuk penjualan sewa beli rumah negara, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425123	Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III
	Digunakan untuk mencatat pendapatan kompensasi sewa beli rumah negara golongan III. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BA 033) .
425124	Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari tukar menukar Tanah, Gedung dan Bangunan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425125	Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari tukar menukar Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425126	Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari tukar menukar jalan, irigasi dan jaringan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>42513</b>	<b>Pendapatan dari Pemanfaatan BMN</b>
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  Digunakan untuk mencatat pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan termasuk pendapatan sewa rumah dinas. Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin  Digunakan untuk mencatat pendapatan sewa Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425133	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan  Digunakan untuk mencatat pendapatan sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425135	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang bisa ada di semua Kementerian/Lembaga.
425136	Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi, dan Jaringan  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425137	Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)  Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
425138	Pendapatan dari Bangun, Serah, dan Guna (BSG)  Digunakan untuk mencatat pendapatan pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan BMN Lainnya, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
<b>42514</b>	<b>Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang</b>
425141	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS  Digunakan untuk mencatat pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN yang berasal dari KKKS, baik masih berada dalam penguasaan KKKS maupun yang telah diserahkan kepada BUN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.
425142	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B  Digunakan untuk mencatat pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B, baik masih berada dalam penguasaan Kontraktor PKP2B maupun yang telah diserahkan kepada BUN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
425143	Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari Pemanfaatan aset properti/Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dicatat pada Bagian Anggaran Transaksi Khusus (999.99)
425144	Pendapatan Atas Aset Saham dan Surat Berharga Lain
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari aset saham dan surat berharga lain eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) berupa dividen, bunga dan denda keterlambatan. Dicatat pada Bagian Anggaran Transaksi Khusus (999.99)
425145	Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas kompensasi aset bekas milik Asing/Tionghoa.
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari Pengelola Barang
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengelolaan barang pada pengelola barang selain yang berasal dari KKKS, Kontraktor PKP2B, aset eks BLBI dan aset bekas milik asing/Tionghoa.
<b>42515</b>	<b>Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi</b>
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari penatausahaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah yang mengatur Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
<b>42516</b>	<b>Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas</b>
425161	Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak
	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang timbul akibat selisih harga beli BBM Pemerintah dari Badan Usaha (harga patokan) lebih rendah/kecil dari harga jual BBM Pemerintah kepada Masyarakat yang ditetapkan dalam Perpres. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan-BUN (BA 999.99)
425162	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)
	Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari selisih antara nilai minyak mentah DMO / <i>Domestic Market Obligation</i> dengan harga ICP / <i>Indonesian Crude Price</i> dengan <i>DMO Fee</i> . Nilai minyak mentah DMO adalah hasil penjualan minyak mentah bagian KKKS (Kontraktor Kontrak kerja Sama) diserahkan kepada Pemerintah atau dibeli Pemerintah. Sedangkan <i>DMO Fee</i> adalah pembayaran atau harga beli Pemerintah atas penyerahan minyak mentah DMO bagian KKKS. Penerimaan ini bersifat kontijensi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan-BUN (BA 999.99).
425169	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diterima dari kegiatan usaha hulu migas antara lain penerimaan bonus dari KKKS, transfer material, dan <i>firm commitment</i> .
<b>42517</b>	<b>Pendapatan Iuran Badan Usaha</b>
425171	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
425172	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha niaga dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.
<b>4252</b>	<b>PENDAPATAN ADMINISTRASI DAN PENEGRAKAN HUKUM</b>
<b>42521</b>	<b>Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum</b>
425211	Pendapatan Paspor
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan pembuatan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia antara lain berupa paspor biasa, paspor pengganti, surat perjalanan laksana paspor, dan pas lintas batas. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425212	Pendapatan Visa
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan Visa, antara lain berupa visa kunjungan dan visa tinggal terbatas. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali ( <i>Re-entry permit</i> )
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan pemberian Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali ( <i>Re-entry permit</i> ) antara lain berupa izin kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan keimigrasian selain paspor, visa, dan izin keimigrasiand dan Izin Masuk Kembali ( <i>Re-entry permit</i> ), antara lain berupa biaya beban keimigrasian, <i>Smart Card</i> , pembuatan Surat Keterangan Keimigrasian, pembuatan dan penggantian Kartu Perjalanan Pebisnis APEC (KPP APEC) / <i>APEC Business Travel Card</i> (ABTC), pemberian fasilitas AFFIDAVIT. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan fidusia antara lain berupa pendaftaran jaminan fidusia dan penghapusan atau pencoretan sertifikat jaminan fidusia. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan Badan Hukum antara lainberupa pendirian badan usaha, yayasan, dan perseroan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan jasa hukum selain pelayanan fidusia dan pelayanan badan hukum, antara lain berupa Pendapatan dari pelayanan perdata umum, notariat, harta peninggalan, pengambilan sidik jari (daktiloskopi), partai politik, kewarganegaraan dan perwarganegaraan RI. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan atas kekayaan intelektual antara lain berupa hak cipta, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merek, dan indikasi geografis, dan Pengangkatan Konsultan Kekayaan Intelektual. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan dan administrasi hukum selain pelayanan keimigrasian, pelayanan jasa hukum dan pelayanan kekayaan intelektual, antara lain kegiatan pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
<b>42522</b>	<b>Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri</b>
425221	Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari visa Republik Indonesia di luar negeri. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri (BA 011).
425222	Pendapatan Paspor Republik Indonesia di Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari paspor Republik Indonesia di luar negeri, termasuk Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri (BA 011).
425223	Pendapatan Dokumen Kekonsuleran
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengurusan dokumen konsuler. Antara lain pengesahan tandatangan/legalisasi salinan dokumen, surat keterangan jalan, surat keterangan usaha/ bisnis dan buku pengenalan diri ( <i>ID Book</i> ). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri (BA 011).
425224	Pendapatan Jasa Pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Pelayanan pada KDEI di Luar Negeri, meliputi pendapatan paspor, visa, fasilitas keimigrasian (affidavit) bagi anak berkewarganegaraan ganda, Dokumen Konsuler, dan pelayanan lainnya yang dilaksanakan oleh KDEI. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perdagangan (BA 090).
425228	Pendapatan Pelayanan Lainnya di Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan lainnya di luar negeri antara lain pendapatan fasilitas keimigrasian (affidavit) bagi anak berkewarganegaraan ganda, Surat Keterangan Keimigrasian, pelayanan kepelautan, pelayanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan, dan pelayanan lainnya. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri (BA 011).
425229	Pendapatan Administrasi di Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari administrasi di luar negeri antara lain pendapatan cicilan Beban Pusat Persekutuan Resmi (BPPR), pengembalian <i>Value Added Tax</i> (VAT), dan pendapatan administrasi lainnya. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri (BA 011).
<b>42523</b>	<b>Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi</b>
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengesahan surat di bawah tangan. Masuk ke Bagian Anggaran Mahkamah Agung (BA 005).
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung (BA 005).
425233	Pendapatan Ongkos Perkara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari ongkos perkara. Masuk Bagian Anggaran Mahkamah Agung (BA 005), Kejaksaan Agung (BA 006), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (093).
425234	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari gratifikasi yang

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	ditetapkan KPK menjadi milik negara.
425235	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari lelang barang-barang gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara.
425236	Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan hasil sitaan dan/atau temuan berupa barang yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan selain dari perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006).
425237	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hasil Denda Pelanggaran Lalu Lintas. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006).
425238	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana selain Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, antara lain berupa denda hasil tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006).
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari kejaksaan dan peradilan lainnya, antara lain berupa pendaftaran pengangkatan sita, hasil penjualan barang bukti yang tidak diambil orang yang berhak, hasil pemulihan kerugian negara, hasil kerja sama di bidang hukum dengan negara lain, sisa panjar biaya perkara, dan hak redaksi. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Mahkamah Agung (BA 005).
<b>42524</b>	<b>Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang</b>
425241	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari uang sitaan hasil korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425242	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari uang sitaan tindak pidana pencucian uang yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425243	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari uang pengganti tindak pidana korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425244	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan hasil lelang barang rampasan tindak pidana pencucian uang. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425245	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan hasil lelang barang rampasan tindak pidana korupsi dan hasil penjualan barang sita eksekusi. Masuk

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425246	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari denda hasil tindak pidana korupsi. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425247	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari denda hasil tindak pidana pencucian uang. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425248	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian uang Negara tanpa putusan pengadilan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006).
425249	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil sitaan dan/atau temuan berupa uang yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan selain dari perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, antara lain berupa uang sitaan dari tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
<b>42525</b>	<b>Pendapatan Perizinan</b>
425251	Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas kompensasi penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan (BA 026).
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari jasa pelayanan pengajuan Hak dan Perizinan di bidang pertanian antara lain berupa jasa pelayanan perlindungan varietas tanaman (PVT), jasa pendaftaran pupuk, jasa pendaftaran pestisida, jasa pendaftaran obat hewan, dan jasa sertifikasi obat hewan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Pertanian (BA 018).
425253	Pendapatan Perizinan di Bidang Perdagangan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA), jasa pengujian dalam rangka persyaratan izin tanda pabrik dan izin tipe alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, izin usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi, dan perizinan lainnya di bidang perdagangan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perdagangan (BA 090).
425254	Pendapatan Perizinan di Bidang Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari perizinan kefarmasian, perizinan alat kesehatan, izin edar alat kesehatan, dan izin edar perbekalan kesehatan rumah tangga. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kesehatan (BA 024).
425255	Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain berupa iuran izin pemanfaatan kawasan, iuran izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi (IUPJL), penerbitan izin lingkungan, dan penerbitan izin pengendalian pencemaran air. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029).

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari perizinan selain perizinan Tenaga Kerja Asing, perizinan Pertanian, perizinan bidang perdagangan, perizinan bidang kesehatan dan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain berupa perizinan undian berhadiah serta perizinan penelitian, perizinan pelaksanaan reklamasi dan pengembangan bagi peneliti asing, dan iuran tahunan akibat penerapan hak.
<b>42526</b>	<b>Pendapatan Pelayanan Kepolisian I</b>
425261	Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425262	Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) Digunakan untuk mencatat pendapatan dari perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425263	Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425264	Pendapatan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pendapatan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425265	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425266	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425267	Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Ujian Keterampilan Mengemudisесuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425268	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerahsesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
425269	Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihansesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
<b>42527</b>	<b>Pendapatan Pelayanan Kepolisian II</b>
425271	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang melintasi batas negara Indonesiasesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425272	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang melintasi batas negara Indonesiasesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425273	Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak serta penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425274	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425275	Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pelayanan Satuan Pengaman, yaitu penerbitan kartu anggota satuan pengaman, penerbitan ijazah satuan pengaman, dan penerbitan surat izin operasional badan usaha jasa pengamanan sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425276	Pendapatan Pengamanan Obyek Vital  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Jasa Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek tertentu dan Jasa Manajemen sistem pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek tertentu sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425279	Pendapatan Pelayanan Kepolisian Lainnya  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pelayanan Kepolisian Lainnya, termasuk pelayanan penyelenggaraan assesment center Polri sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>42528</b>	<b>Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi</b>
425281	Pendapatan Akreditasi  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari akreditasi antara lain akreditasi pada Badan Standardisasi Nasional. Merupakan penerimaan yang bisa terdapat di seluruh Kementerian/Lembaga.
425282	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari antara lain pendapatan dari sertifikasi benih, Jasa Akreditasi Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jasa Pengujian Benih Tanaman Kehutanan, Pengujian Bibit Tanaman Hutan, dan Jasa Laboratorium. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029)
425283	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian (BA 019) antara lain meliputi jasa pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi serta pelayanan teknis mesin.
425284	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perdagangan  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (BA 090) antara lain meliputi jasa pelayanan teknis pengujian kalibrasi dan verifikasi, pelayanan inspeksi teknik, pelayanan teknis mesin, pelayanan teknis sertifikasi, serta jasa tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang memerlukan penanganan khusus.
425285	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (BA 024) antara lain meliputi jasa pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi dan pelayanan teknis sertifikasi.
425286	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum  Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BA 033)
425287	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pengujian selain dari pengujian kendaraan bermotor, Sertifikasi, dan Kalibrasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (BA 022) antara lain meliputi sertifikasi angkutan penyeberangan lintas dalam negeri, sertifikasi kompetensi pengawakan angkutan umum, sertifikasi SDM perkeretaapian, sertifikasi sarana dan prasarana perkeretaapian, penerbitan lisensi dan sertifikasi bidang transportasi udara, dan kalibrasi peralatan penerbangan.
425288	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika  Digunakan untuk mencatat pendapatan pengujian, sertifikasi dan kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi selain di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, perindustrian, perdagangan, kesehatan, dan pekerjaan umum, antara lain pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standardisasi di bidang tenaga nuklir dan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
<b>4253</b>	<b>PENDAPATAN KESEHATAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, DAN KEAGAMAAN</b>
<b>42531</b>	<b>Pendapatan Jasa Kesehatan</b>
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
425312	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL).
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan lainnya selain dari BPJS Kesehatan.
425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari jasa karantina kesehatan antara lain karantina kapal yang dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kesehatan (024).
425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari jasa pemberian vaksin kesehatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kesehatan (024).
425316	Pendapatan Registrasi Tenaga Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari registrasi tenaga kesehatan, meliputi dokter, dokter gigi, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kesehatan (024).
<b>42532</b>	<b>Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan</b>
425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan pengawasan obat dan makanan antara lain berupa pendaftaran, sertifikasi, dan pengujian obat dan makanan. Masuk Bagian Anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BA 063).
<b>42533</b>	<b>Pendapatan Jasa Karantina</b>
425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari jasa tindakan karantina pertanian dan peternakan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Pertanian (BA 018).
425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari jasa tindakan karantina perikanan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032).
<b>42534</b>	<b>Pendapatan Jasa Agraria</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
425341	Pendapatan Pelayanan Pertanahan  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan survei, pengukuran, dan pemetaan, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan pertimbangan teknis pertanahan, pelayanan pendaftaran tanah, pelayanan informasi pertanahan, pelayanan lisensi, dan pelayanan di bidang pertanahan yang berasal dari kerja sama dengan pihak lain. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BA 056).
425342	Pendapatan Penerimaan Hak Atas Tanah P3MB/Presidium Kabinet Dwikora  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan penetapan tanah obyek penguasaan benda-benda tetap milik perseorangan warga negara Belanda (P3MB) sesuai Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BA 056).
<b>42535</b>	<b>Pendapatan Jasa Keagamaan</b>
425351	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama  Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari hasil pelayanan Jasa Kantor Urusan Agama dari pencatatan nikah dan rujuk. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Agama (BA 025).
425359	Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya, antara lain pendapatan dari pengelolaan asrama haji, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, dan pencetakan Al Qur'an. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Agama (BA 025).
<b>4254</b>	<b>PENDAPATAN PENDIDIKAN, BUDAYA, RISET, DAN TEKNOLOGI</b>
<b>42541</b>	<b>Pendapatan Pendidikan</b>
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan  Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan pada Sekolah maupun Perguruan Tinggi Pemerintah (PTP).
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan  Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Biaya Pendidikan di Sekolah maupun PTP yang dibayarkan selama masa pendidikan antara lain berupa uang kuliah tunggal, SPP, uang praktikum, cuti akademik, semester pendek, bimbingan karya ilmiah akhir, Praktik Kerja Lapangan, ujian remedial, dan ujian komprehensif.
425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari kegiatan penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Sekolah maupun PTP, antara lain kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta dalam rangka kajian reorientasi pembangunan pedesaan, kajian dalam kebijakan strategis dalam pemetaan cluster sektor unggulan, kajian pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis ekonomi kreatif).
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya  Digunakan untuk mencatat seluruh pendapatan pendidikan pada Sekolah maupun PTP selain pendapatan ujian masuk/seleksi masuk pendidikan, pendapatan biaya pendidikan, dan pendapatan penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat. Antara lain berupa wisuda, kartu perpustakaan, penjualan hasil praktik pendidikan, dan pendapatan try out.
<b>42542</b>	<b>Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan, merupakan penerimaan yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya di berbagai Kementerian/Lembaga selain layanan pendidikan dan/atau pelatihan serta assessment dan sertifikasi kompetensi. Antara lain berasal dari <i>assessment center</i> dan psikometri, sertifikasi kepabeanan, sertifikasi <i>welding</i> , jasa registrasi kompetensi nasional bidang lingkungan hidup, dan sertifikasi penanggulangan bencana.
<b>42543</b>	<b>Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek</b>
425431	Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek, merupakan penerimaan yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga, antara lain berupa pengukuran debit air permukaan menggunakan <i>current meter type propeler OTT C2</i> (Jasa Instrumentasi Peralatan Lapang).
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Layanan Survei dan Pemetaan di lingkungan Kementerian/Lembaga, antara lain pengolahan data sosial ekonomi pertanian, jasa survey dan pemetaan dalam rangka survey hidro oseanografi.
425433	Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Masuk Bagian Anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BA 075).
425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Hasil Penelitian/Riset dan hasil Pengembangan Iptek. merupakan penerimaan yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga, antara lain pendapatan dari laboratorium bank gen.
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Hasil Survei dan Pemetaan di lingkungan Kementerian/Lembaga, antara lain peta laut navigasi, buku nautis, peta navigasi elektronis.
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual
	Digunakan untuk mencatat pendapatan royalti atas kekayaan intelektual. Merupakan penerimaan yang bisa terdapat di seluruh Kementerian/Lembaga, antara lain pendapatan royalti dari kekayaan intelektual yang berasal dari alih teknologi hasil litbang kesehatan.
425439	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Penelitian/Riset, Survei, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya, antara lain jasa penggunaan peralatan survey dan pemetaan, jasa penimbalan peralatan nautika dan tiket masuk kebun raya dan balai konservasi tumbuhan.
<b>42545</b>	<b>Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan</b>
425451	Pendapatan Museum
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari museum antara lain berupa tiket masuk museum dan pameran. Merupakan penerimaan yang (bisa) ada di Kementerian/Lembaga, antara lain museum Basoeki Abdullah, Museum Nasional, museum Sumpah Pemuda, museum geologi.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
425459	Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan Lainnya Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kegiatan di bidang sejarah dan kebudayaan lainnya antara lain kerja sama pengelolaan cagar budaya (contoh: Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Pawon, dan Candi Mendut).
<b>4255</b>	<b>PENDAPATAN JASA TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>
<b>42551</b>	<b>Pendapatan Jasa Transportasi</b>
425511	Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Digunakan untuk mencatat pendapatan dari jasa pengujian kendaraan bermotor antara lain berupa uji tipe kendaraan, uji sampel kendaraan dan penerbitan surat sertifikat uji tipe (SUT) serta surat registrasi uji tipe (SRUT). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425512	Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian / <i>Track Access Charge</i> Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425513	Pendapatan Jasa Kepelabuhanan Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan lintas dalam negeri antara lain berupa jasa pelayanan kapal, jasa pelayanan barang, jasa pelayanan orang, penggunaan sarana dan prasarana di pelabuhan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425514	Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan jasa navigasi pelayaran antara lain berupa penggunaan sarana bantu navigasi pelayaran, pelayanan jasa telekomunikasi pelayaran, pelayanan jasa salvage dan pekerjaan bawah air. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425515	Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerimaan uang perkapalan dan kepelautan antara lain berupa surat pengukuran kapal, dokumen kepelautan, dan pengawasan barang berbahaya. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan di bandar udara antara lain berupa pelayanan jasa penumpang pesawat udara, pelayanan jasa pendaratan penempatan dan penyimpanan pesawat udara, jasa kargo dan pos pesawat udara, penggunaan sarana dan prasarana di bandar udara serta penerbitan izin masuk daerah keamanan terbatas. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425517	Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan jasa navigasi penerbangan. antara lain <i>terminal navigation charge, enroute charge dan overflying</i> . Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425518	Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi Digunakan untuk mencatat pendapatan dari konsesi di bidang transportasi, antara lain konsesi jasa kepelabuhanan dan konsesi jasa kebandarudaraan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pelayanan di bidang transportasi selain pengujian kendaraan bermotor, penggunaan prasarana perkeretaapian, jasa

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	kepelabuhanan, jasa navigasi pelayaran, jasa perkapalan dan kepelautan, jasa kebandarudaraan, jasa navigasi penerbangan, dan pendapatan dari konsesi bidang transportasi. Penerimaan Jasa Transportasi Lainnya antara lain berupa penerbitan izin angkutan jalan, penerbitan izin bidang perkeretaapian, penerbitan Surat izin Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL), dan penerbitan izin bidang angkutan udara. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
<b>42552</b>	<b>Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika</b>
425521	Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).
425522	Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).
425523	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiarian Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Penyiarian. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).
425524	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Pos. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).
425525	Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).
425526	Pendapatan Pengelolaan Nama Domain Indonesia Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Pengelolaan Nama Domain Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).
425529	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika Lainnya Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Jasa Komunikasi dan Informatika Lainnya di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).
<b>42553</b>	<b>Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik</b>
425531	Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Jasa Siaran. Masuk Bagian Anggaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (BA 116).
425532	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP RRI Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Jasa Non Siaran. Masuk Bagian Anggaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (BA 116).
425533	Pendapatan Jasa Siaran LPP TVRI Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Jasa Siaran. Masuk Bagian Anggaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (BA 117).
425534	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP TVRI Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Jasa Non Siaran. Masuk Bagian Anggaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (BA 117).
<b>4256</b>	<b>PENDAPATAN JASA LAINNYA</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>42561</b>	<b>Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>
425611	Pendapatan Wisata Alam  Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari wisata alam di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain berupa pungutan hasil usaha penyediaan jasa wisata alam, pungutan hasil usaha penyediaan sarana pariwisata alam, pungutan jasa kegiatan wisata alam, dan karcis masuk di kawasan suaka alam (KSA), kawasan pariwisata alam (KPA) dan taman buru (TB). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA.029).
425612	Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari iuran di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang pembayarannya dilakukan secara periodik, antara lain berupa iuran pengumpulan/pengunduhan benih dan anakan, pungutan usaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pungutan usaha pemanfaatan air (PUPA), dan pungutan usaha pemanfaatan energi air (PUPEA). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA.029).
425619	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya  Digunakan untuk mencatat pendapatan jasa di bidang lingkungan hidup dan kehutanan selain pendapatan wisata alam, dan pendapatan iuran di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain berupa hasil lelang kayu temuan dan hasil lelang tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang, hasil silvopastural system, hasil <i>silvofishery system</i> , penerbitan rekomendasi pengangkutan dan registrasi bahan berbahaya dan beracun (B3), pendapatan dari pengumpulan benih dan anakan dan transaksi kegiatan penyerapan dan atau penyimpanan karbon dari kawasan hutan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029).
<b>42562</b>	<b>Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan</b>
425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan  Pendapatan dari pelayanan di pelabuhan perikanan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032).
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya  Digunakan untuk mencatat pendapatan selain Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan, antara lain berupa pungutan dari penggunaan kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan dan pembudidayaan ikan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032).
<b>42569</b>	<b>Pendapatan Jasa Lainnya</b>
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan  Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kegiatan pengawasan dan/atau pemeriksaan yang bisa terdapat di seluruh Kementerian/Lembaga antara lain berupa jasa inspeksi, jasa surveilans dan jasa audit.
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari jasa tenaga, pekerjaan, dan informasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga, antara lain jasa tenaga ahli, jasa perpustakaan,jasa rancang bangun dan perekayasaan,dan jasa konsultasi.
425693	Pendapatan dari Jasa Layanan Jalan Tol  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari jasa layanan jalan tol. Masuk ke Bagian Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (BA 033).
425694	Pendapatan dari Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA)

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Pendapatan dari Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA). Masuk ke Bagian Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (BA 033).
425699	Pendapatan Jasa Lainnya
	Digunakan untuk mencatat penerimaan dari pelayanan lainnya yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi.
<b>4257</b>	<b>PENDAPATAN BUNGA, PENGELOLAAN REKENING PERBANKAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN</b>
<b>42571</b>	<b>Pendapatan Bunga</b>
425711	Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga yang bersumber dari investasi atau pembelian surat-surat berharga berupa obligasi.
425712	Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga dari BPPN yang bersumber dari investasi/ pembelian surat-surat berharga berupa obligasi.
425713	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari pemberian piutang tersebut di atas.
425714	Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya yang berasal dari pemberian kredit pemerintah termasuk kredit investasi pemerintah dan kredit bidang perkebunan dan kehutanan.
425715	Pendapatan Komitmen Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari biaya komitmen yang timbul akibat pemberian pinjaman, merupakan transaksi BA BUN Satker Direktorat SMI.
425716	Pendapatan Bunga Kredit Program
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga transaksi kredit program.
425717	Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan
	Digunakan untuk mencatat PNBP yang berasal dari bunga dari pengelolaan rekening pembangunan hutan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029).
425719	Pendapatan Bunga Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga selain yang bersumber dari investasi atau pembelian surat-surat berharga lainnya.
<b>42572</b>	<b>Pendapatan Gain on Bond Redemption</b>
425721	Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diperoleh dari selisih lebih <i>carrying value</i> Obligasi yang dibeli kembali dengan <i>clean price</i> yang dibayar Pemerintah pada saat pembelian kembali Obligasi ( <i>buyback</i> ). <i>Carrying Value</i> Obligasi ialah nominal Obligasi setelah dikurangi atau ditambah <i>unamortized discount</i> atau premium.
425722	Pendapatan dari Transaksi <i>Security Lending</i>
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Transaksi <i>Security Lending</i> .
425723	Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valuta Asing

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valuta Asing.
425724	Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali SBSN Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali SBSN Jangka Panjang.
425725	Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali SBSN Valuta Asing Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali SBSN Valas Jangka Panjang.
<b>42573</b>	<b>Pendapatan Premium atas Obligasi Negara</b>
425731	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diperoleh pada saat penerbitan SUN berdenominasi Rupiah yang dihitung dari selisih lebih penerimaan kas ( <i>clean price</i> ) dengan nominal SUN yang diterbitkan.
425732	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diperoleh pada saat penerbitan SUN berdenominasi Valuta Asing yang dihitung dari selisih lebih penerimaan kas ( <i>clean price</i> ) dengan nominal SUN yang diterbitkan.
425733	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diperoleh pada saat penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berdenominasi Rupiah yang dihitung dari selisih lebih penerimaan kas ( <i>clean price</i> ) dengan nominal SBSN.
425734	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diperoleh pada saat penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berdenominasi Valuta Asing yang dihitung dari selisih lebih penerimaan kas ( <i>clean price</i> ) dengan nominal SBSN.
<b>42574</b>	<b>Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara</b>
425741	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas imbal jasa penjaminan infrastruktur.
425742	Pendapatan Selisih Harga SBN
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Selisih Harga SBN.
425743	Pendapatan Kupon SBN
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan atas Kupon SBN.
425744	Pendapatan Bunga Reverse Repo
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga atas transaksi <i>reverse repo</i> .
425745	Pendapatan Fee atas Transaksi Security Lending SUN
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas SUN yang dipinjamkan kepada Dealer Utama. Masuk Bagian Anggaran 999.01 (Sistem Akuntansi Utang Pemerintah).
425746	Pendapatan Lain-lain atas Rekening Tujuan Tertentu
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan lain-lain atas rekening tujuan tertentu.
<b>42575</b>	<b>Pendapatan dari Selisih Kurs</b>
425751	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat untung selisih kurs terealisasi dalam pengelolaan rekening milik BUN.
425752	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan
	Digunakan untuk mencatat realisasi kentungan selisih kurs uang persediaan pada seluruh Kementerian/Lembaga.
425753	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D
	Selisih positif transaksi belanja dalam valuta asing antara resume tagihan/invoice/SPP dengan SP2D. Serta realisasi piutang dan utang dari kurs yang berbeda.
<b>42576</b>	<b>Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening</b>
425761	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari layanan jasa perbankan.
425762	Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat pendapatan jasa bank akibat transaksi pemberian pinjaman.
425763	Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas biaya management fee, komitmen fee dan fee-fee yang terjadi karena transaksi pemberian pinjaman.
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pemerintah.
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penutupan rekening pemerintah.
<b>42577</b>	<b>Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perpendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara</b>
425771	Pendapatan atas Penerbitan SP2D Dalam Rangka TSA
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diterima dari Bank Operasional atas penerbitan SP2D dalam rangka pengelolaan TSA. Merupakan pendapatan Ditjen Perpendaharaan, Kementerian Keuangan (015.08).
425772	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diterima dari hasil penempatan uang negara pada Bank Umum. Masuk Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
425773	Pendapatan dari Pelaksanaan <i>Treasury Notional Pooling</i>
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelaksanaan <i>Treasury Notional Pooling</i> . Masuk Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
425774	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diterima dari hasil penempatan uang negara pada Bank Sentral. Masuk Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
425775	Pendapatan dari Penempatan Uang Sebelum Rekonsiliasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penempatan uang sebelum rekonsiliasi.
<b>42578</b>	<b>Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara</b>
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pengenaan biaya penagihan secara paksa atas piutang pajak tidak tertagih. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan (BA 015).
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
	Digunakan untuk mencatat pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas I yang dipungut oleh DJKN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013.
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II
	Digunakan untuk mencatat pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II yang dipungut oleh DJKN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013.
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian
	Digunakan untuk mencatat pendapatan Bea Lelang oleh Pegadaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013.
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Masuk pendapatan Kementerian Keuangan (BA 015).
<b>42579</b>	<b>Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara</b>
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara.
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara.
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pihak lain/pihak ketiga yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara.
<b>4258</b>	<b>PENDAPATAN DENDA</b>
<b>42581</b>	<b>Pendapatan Denda I</b>
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari setoran rekanan pemerintah, berupa denda penyelesaian pekerjaan pemerintah. Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425812	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha
	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda yang berasal dari pelaku usaha yang telah mendapatkan putusan tetap dari peradilan. Masuk Bagian Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (BA 108).
425813	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Perdagangan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan Denda Administratif atas pelanggaran tidak mendaftar Prospektus dan Perjanjian Waralaba; Denda Administratif atas

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	pelanggaran terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perdagangan (BA 090).
425814	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA
	Digunakan untuk mencatat pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA. Merupakan pendapatan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (015.08).
425815	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia
	Digunakan untuk mencatat pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia. Merupakan pendapatan Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
425816	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan <i>Treasury Notional Pooling</i>
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Pelaksanaan <i>Treasury Notional Pooling</i> . Masuk Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
425817	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi.
425818	Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas
	Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa denda, bunga, dan penalti keterlambatan terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas.
425819	Pendapatan Denda terkait Pengusahaan Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda administrasi atas Keterlambatan dan Kekurangan Penyetoran Bagian Pemerintah dari Pengusahaan Panas Bumi.
<b>42582</b>	<b>Pendapatan Denda II</b>
425821	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyaluran SP2D pada Bank Operasional dan Bank Penyalur Gaji
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas keterlambatan menyalurkan dana SP2D/SP2D-R ke rekening yang berhak dan keterlambatan membukukan dana SP2D-R pada tanggal diterimanya dana ke Rekening RR SPAN/Rekening RR Gaji. Merupakan pendapatan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (015.08).
425822	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pembagian PBB oleh BO III PBB
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pembagian PBB oleh BO III PBB. Merupakan pendapatan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (015.08).
425823	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman, merupakan transaksi BA BUN satker Direktorat SMI.
425824	Pendapatan Denda Penyaluran Kredit Program
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan penerimaan denda karena bank yang ditunjuk terlambat menyalurkan dana kredit program kepada pihak yang berhak menerima.
425825	Pendapatan Denda Administrasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari denda administratif yang berasal dari Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, termasuk juga imbalan bunga atas keterlambatan pembayaran denda administratif yang berasal dari

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
425826	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Kredit Pemerintah (KUMK)
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh Debitur KUMK.
425827	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh Debitur Pemberian Pinjaman.
425828	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III
	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan kompensasi sewa beli rumah negara golongan III.
425829	Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda/kompensasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain berupa ganti rugi tegakan, denda pelanggaran eksplorasi hutan (DPEH), denda administratif bidang perlindungan hutan dan konservasi alam, dan ganti kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA.029).
<b>42583</b>	<b>Pendapatan Denda III</b>
425839	Pendapatan Denda Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda yang tidak termasuk ke dalam kelompok Pendapatan Denda I& II.
<b>4259</b>	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>
<b>42591</b>	<b>Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I</b>
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Pegawai TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Barang TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Modal TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425914	Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Pembayaran Kewajiban Utang TAYL.
425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Subsidi TAYL.
425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Hibah TAYL.
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Bantuan Sosial TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Lain-lain TAYL.
425919	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu Digunakan untuk mencatat pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa TAYL.
<b>42592</b>	<b>Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II</b>
425921	Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL Digunakan untuk mencatat Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL.
<b>42593</b>	<b>Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan</b>
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS Digunakan untuk mencatat pendapatan setoran atas kelebihan pembayaran belanja pegawai PNS yang sudah pensiun.
425932	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan Digunakan untuk mencatat pendapatan setoran atas kelebihan pembayaran belanja pegawai Prajurit TNI/PNS Kemhan yang sudah pensiun.
425933	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Anggota Polri/PNS Polri Digunakan untuk mencatat pendapatan setoran atas kelebihan pembayaran belanja pegawai Anggota Polri/PNS Polri yang sudah pensiun.
425934	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara Digunakan untuk mencatat pendapatan setoran atas kelebihan pembayaran belanja pegawai Pejabat Negara yang sudah pensiun.
<b>42598</b>	<b>Pendapatan Lain-Lain I</b>
425981	Penerimaan Lainnya dari Piutang Pemberian Pinjaman Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali atas pelunasan piutang pemberian pinjaman yang telah dihapuskan, meliputi piutang pokok penerusan pinjaman dan piutang non pokok, serta piutang sehubungan dengan kegiatan pemberian pinjaman BA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman, serta penerimaan kembali atas aset lainnya kredit program yang tidak teridentifikasi Surat Pengakuan Hutang-nya.
<b>42599</b>	<b>Pendapatan Lain-Lain II</b>
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pengembalian Uang Muka Gaji. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Pembayaran Premi dalam rangka Penjaminan Perbankan Nasional.
425993	Pendapatan Jasa Perbendaharaan Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diterima Pemerintah dari Bank Umum atau PT Pos sebagai pengelola kas negara (Bank Operasional).
425994	Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari Bank/Pos Persepsi Digunakan untuk mencatat Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Bank/Pos Persepsi.
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari penyetoran kelebihan hasil bersih lelang yang tidak diambil oleh yang berhak. Merupakan pendapatan BA 015.06 (Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan).
425996	Pendapatan dalam rangka Refund Dana PHLN
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dalam Rangka Refund Dana PHLN. Merupakan pendapatan BUN.
425997	Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan.
425998	Pendapatan dari Retur SP2D
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Retur SP2D yang disetorkan ke kas negara. Dibukukan pada BA 999.99 (BUN Transaksi Khusus).
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain
	Merupakan pendapatan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
<b>43</b>	<b>PENDAPATAN HIBAH</b>
<b>431</b>	<b>PENDAPATAN HIBAH DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</b>
<b>4311</b>	<b>Pendapatan Hibah Dalam Negeri</b>
<b>43111</b>	<b>Pendapatan Hibah Dalam Negeri Terencana</b>
431111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Perorangan
	Penerimaan hibah dalam negeri yang berasal dari perorangan. (BA 999.02).
431112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Lembaga/Badan Usaha
	Penerimaan hibah dalam negeri yang berasal dari Lembaga/Badan Usaha berbentuk badan hukum. (BA 999.02).
431119	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Lainnya
	Penerimaan hibah dalam negeri yang tidak dapat dikategorikan berasal dari perorangan maupun Lembaga/Badan Usaha berbentuk badan hukum. (BA 999.02).
<b>43112</b>	<b>Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga</b>
431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang
	Untuk mencatat pendapatan hibah dari Dalam Negeri berbentuk barang.
431122	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Jasa
	Untuk mencatat pendapatan hibah dari Dalam Negeri berbentuk Jasa.
431123	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga.
<b>43113</b>	<b>Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang</b>
431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Perorangan
	Penerimaan hibah dalam negeri langsung yang berasal dari perorangan (BA 999.02).
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lembaga/Badan Usaha
	Penerimaan hibah dalam negeri langsung yang berasal dari Lembaga/Badan Usaha berbentuk badan hukum (BA 999.02).

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Pemerintah Daerah.
431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lainnya
	Penerimaan hibah dalam negeri langsung yang tidak dapat dikategorikan berasal dari perorangan maupun Lembaga/Badan Usaha berbentuk badan hukum (BA 999.02).
<b>4312</b>	<b>Pendapatan Hibah Luar Negeri</b>
<b>43121</b>	<b>Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana</b>
431211	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Perorangan
	Penerimaan hibah luar negeri yang berasal dari perorangan. (BA 999.02).
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Bilateral
	Penerimaan hibah luar negeri yang berasal dari Lembaga Internasional dalam hubungan bilateral. (BA 999.02).
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Multilateral
	Penerimaan hibah luar negeri yang berasal dari Lembaga Internasional dalam hubungan multilateral. (BA 999.02).
431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Lainnya
	Penerimaan hibah luar negeri yang tidak dapat dikategorikan berasal Lembaga Internasional baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral. (BA 999.02).
<b>43122</b>	<b>Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga</b>
431221	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang
	Untuk mencatat pendapatan hibah dari Luar Negeri berbentuk barang.
431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Jasa
	Untuk mencatat pendapatan hibah dari Luar Negeri berbentuk Jasa.
431223	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga.
<b>43123</b>	<b>Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang</b>
431231	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Perorangan
	Penerimaan hibah luar negeri langsung yang berasal dari perorangan (BA 999.02).
431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Bilateral
	Penerimaan hibah luar negeri langsung yang berasal dari Lembaga Internasional dalam hubungan bilateral (BA 999.02).
431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Multilateral
	Penerimaan hibah luar negeri langsung yang berasal dari Lembaga Internasional dalam hubungan multilateral (BA 999.02).
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Lainnya
	Penerimaan hibah luar negeri langsung yang tidak dapat dikategorikan berasal Lembaga Internasional baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral (BA 999.02).
<b>43124</b>	<b>Pendapatan Hibah Luar Negeri yang Langsung Diterushibahkan</b>
431241	Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Barang yang Langsung Diterushibahkan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Barang yang

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Langsung Diterushibahkan.
431242	Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Jasa yang Langsung Diterushibahkan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Jasa yang Langsung Diterushibahkan.
431243	Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Surat Berharga yang Langsung Diterushibahkan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Surat Berharga yang Langsung Diterushibahkan.
<b>439</b>	<b>PENDAPATAN HIBAH LAIN-LAIN</b>
<b>4399</b>	<b>Pendapatan Hibah Lain-lain</b>
<b>43999</b>	<b>Pendapatan Hibah Lain-lain</b>
<b>439999</b>	Pendapatan Hibah Lain-lain
	Hanya digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah Lain-lain oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Jurnal Penyesuaian tingkat LKPP.

## PENJELASAN URAIAN SEGMENT AKUN BELANJA

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA NEGARA</b>
<b>51</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>
<b>511</b>	<b>BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN</b>
<b>5111</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan PNS</b>
<b>51111</b>	<b>Belanja Gaji PNS</b>
511111	Belanja Gaji Pokok PNS  Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS  Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran pembulatan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.
<b>51112</b>	<b>Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS</b>
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS  Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan suami/istri PNS.
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS  Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan anak PNS.
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS  Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan struktural PNS.
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS  Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan fungsional PNS.
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS  Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan PPh PNS.
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS  Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura.
511127	Belanja Tunjangan Kemahalan PNS  Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan kemahalan PNS.
511128	Belanja Tunjangan Lauk Pauk PNS  Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran dana lauk pauk yang diberikan kepada para pegawai negeri sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik).
511129	Belanja Uang Makan PNS  Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan uang makan PNS.
<b>51113</b>	<b>Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS</b>
511131	Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS  Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan PNS.
511132	Belanja Tunjangan Cacat PNS  Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan cacat PNS.
511133	Belanja Tunjangan Khusus Peralihan PNS  Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan khusus peralihan PNS.
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan kompensasi kerja PNS, termasuk tunjangan pengaman dan penyelamatan pelayaran, dan tunjangan kesyahbandaran yang pembayarannya selama ini berdasarkan SE DJA tanggal 28-05-1983 No. SE 74/A.23/1893, tgl 15-11-1993 NO SE 169/A.72/1983 dan tgl 02-12-1987 No. SE 83-/A.198/1987, termasuk Tunjangan Kompensasi Karya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tunjangan Kompensasi Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan (pagu tidak bersifat terbuka).
511135	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil PNS.
511136	Belanja Tunjangan Guru/Dosen/PNS Yang Dipekerjakan Pada Sekolah/PT Swasta/Badan/Komisi
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan guru/dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS.
511137	Belanja Tunjangan Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan tugas belajar tenaga pengajar biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS.
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan khusus PNS Papua.
511139	Belanja Tunjangan SAR PNS
	Digunakan untuk mencatat pembayaran Tunjangan <i>Search and Rescue</i> untuk Pegawai Negeri Sipil.
<b>51114</b>	<b>Belanja Tunjangan-tunjangan III Pegawai Negeri/Staff di Luar Negeri</b>
511141	Belanja Tunjangan Sewa Rumah PNS (Staff di LN)
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan sewa rumah PNS (staff di LN).
511142	Belanja Tunjangan Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)
	Digunakan untuk mencatat penggantian pembayaran tunjangan Pengobatan PNS (staff di LN).
511143	Belanja Tunjangan Social Security PNS (Staff di LN)
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan jaminan sosial PNS (staff di LN).
511144	Belanja Tunjangan Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di LN)
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan asuransi kecelakaan PNS (staff di LN).
511145	Belanja Tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN)
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (staff di LN).
511146	Belanja Tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN)
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (staff di LN).
511147	Belanja Tunjangan Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri.
511149	Belanja Lokal Staff Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji, tunjangan dan uang lembur lokal staff.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>51115</b>	<b>Belanja Tunjangan-tunjangan IV PNS</b>
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PNS, termasuk PNS TNI/Polri sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006.
511152	Belanja Tunjangan Profesi Guru
	Digunakan untuk pembayaran tunjangan profesi guru PNS yang telah lulus ujian sertifikasi guru dan mendapatkan NIRG (Nomor Induk Registrasi Guru).
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen
	Digunakan untuk pembayaran tunjangan profesi dosen PNS yang telah lulus ujian sertifikasi dosen.
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor
	Digunakan untuk pembayaran tunjangan kehormatan profesor yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
511155	Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS
	Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS bagi yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru.
511156	Belanja Tunjangan Khusus Guru/Dosen
	Digunakan untuk Belanja Tunjangan Khusus Guru/Dosen PNS.
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim
	Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim.
511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc
	Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak dan Fasilitas Hakim Ad Hoc
<b>51116</b>	<b>Belanja Gaji- PNS TNI/Polri</b>
511161	Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil TNI/Polri.
511169	Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran pembulatan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil TNI/Polri.
<b>51117</b>	<b>Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS TNI/Polri</b>
511171	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan suami/istri PNS TNI/Polri.
511172	Belanja Tunjangan Anak PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan struktural PNS TNI/Polri.
511173	Belanja Tunjangan Struktural PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan struktural PNS TNI/Polri.
511174	Belanja Tunjangan Fungsional PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan fungsional PNS TNI/Polri.
511175	Belanja Tunjangan PPh PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan PPh PNS TNI/Polri.
511176	Belanja Tunjangan Beras PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura untuk PNS TNI/Polri.
511177	Belanja Tunjangan Kemahalan PNS TNI/Polri

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan kemahalan PNS TNI Polri.
511178	Belanja Tunjangan Lauk pauk PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran dana lauk pauk yang diberikan kepada para pegawai negeri sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik) untuk PNS TNI/Polri.
511179	Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan uang makan PNS TNI/Polri.
<b>51118</b>	<b>Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS TNI/Polri</b>
511181	Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan PNS TNI/Polri.
511182	Belanja Tunjangan Cacat PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan cacat PNS TNI/Polri.
511183	Belanja Tunjangan Khusus Peralihan PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan khusus peralihan PNS TNI/Polri.
511184	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan kompensasi kerja PNS, termasuk tunjangan pengaman dan penyelamatan pelayaran, dan tunjangan kesyahbandaran yang pembayarannya selama ini berdasarkan SE DJA tanggal 28-05-1983 No. SE 74/A.23/1893, tgl 15-11-1993 NO SE 169/A.72/1983 dan tgl 02-12-1987 No. SE 83-/A.198/1987.
511185	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil PNS.
511187	Belanja Tunjangan Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan guru/dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS.
511188	Belanja Tunjangan Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan tugas belajar tenaga pengajar biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS.
511189	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan khusus PNS Papua.
<b>51119</b>	<b>Belanja Tunjangan-tunjangan III PNS TNI/POLRI</b>
511191	Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Medis PNS TNI/POLRI.
511192	Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan lain-lain termasuk uang duka TNI/POLRI termasuk tunjangan cacat.
511193	Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran Tunjangan Umum PNS TNI/Polri.
511194	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan kompensasi kerja bidang persandian PNS TNI/POLRI.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
511195	Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada pulau terluar dan wilayah perbatasan PNS TNI
	Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan bagi PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan sesuai dengan Perpres No.49 Tahun 2010.
511196	Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi PNS POLRI
	Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi PNS POLRI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012.
511197	Belanja Tunjangan Profesi Dosen/Kehormatan Guru Besar PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan dosen PNS TNI/Polri yang telah lulus ujian sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar PNS TNI/Polri.
<b>5112</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri</b>
<b>51121</b>	<b>Belanja Gaji TNI/POLRI</b>
511211	Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok TNI/POLRI.
511219	Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran pembulatan gaji pokok TNI/ POLRI.
<b>51122</b>	<b>Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI</b>
511221	Belanja Tunjangan Suami/Istri TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan suami/istri TNI/POLRI.
511222	Belanja Tunjangan Anak TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan anak TNI/POLRI.
511223	Belanja Tunjangan Struktural TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan struktural TNI/POLRI.
511224	Belanja Tunjangan Fungsional TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan fungsional TNI/POLRI.
511225	Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan PPh TNI/POLRI.
511226	Belanja Tunjangan Beras TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura TNI/POLRI.
511227	Belanja Tunjangan Kemahalan TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan kemahalan TNI/POLRI, termasuk tunjangan daerah terpencil POLRI yang pembayarannya selama ini berdasarkan SE bersama DJA dan Polri No. SE 141/A/2001 dan No. Pol/16/X/2001.
511228	Belanja Tunjangan Lauk pauk TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran dana lauk pauk yang diberikan kepada Anggota TNI/POLRI sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik).
511229	Belanja Uang Makan TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan uang makan TNI/POLRI.
<b>51123</b>	<b>Belanja Tunjangan-tunjangan II TNI/POLRI</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
511231	Belanja Tunjangan Anggota Cadangan TNI DDA TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan anggota cadangan TNI DDA TNI/POLRI.
511232	Belanja Tunjangan Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan kowan/polwan TNI TNI/POLRI.
511233	Belanja Tunjangan Babinkamtibmas TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Babinsa TNI/POLRI.
511234	Belanja Tunjangan Khusus Papua untuk TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan khusus Papua untuk TNI dan PNS TNI/POLRI.
511235	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan kompensasi kerja bidang persandian TNI TNI/POLRI.
511236	Belanja Tunjangan Brevet TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan brevet TNI/POLRI.
511237	Belanja Tunjangan Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan keahlian/keterampilan TNI/POLRI.
511238	Belanja Tunjangan Keterampilan Khusus TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan keterampilan khusus TNI/POLRI.
511239	Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan TNI
	Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan bagi prajurit TNI yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau terkecil terluar dan wilayah perbatasan sesuai dengan Perpres No.49 Tahun 2010.
<b>51124</b>	<b>Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI</b>
511241	Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Medis TNI/POLRI.
511242	Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan lain-lain termasuk uang duka TNI/POLRI termasuk tunjangan cacat.
511243	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan terpencil/sangat terpencil TNI/POLRI.
511244	Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum TNI/POLRI sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006.
511245	Belanja Santunan Cacat TNI
	Santunan yang diberikan kepada anggota TNI yang mengalami cacat dalam menjalankan tugas sesuai dengan PP Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit TNI.
511246	Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil Terluar/Perbatasan POLRI
	Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi Anggota POLRI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012.
511247	Belanja Tunjangan Profesi Dosen/Kehormatan Guru Besar TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan dosen TNI/Polri yang telah lulus ujian sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar TNI/Polri.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>5113</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara</b>
<b>51131</b>	<b>Belanja Gaji Pejabat Negara</b>
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok pejabat Negara.
511319	Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara Digunakan untuk mencatat pembayaran pembulatan gaji pokok pejabat negara.
<b>51132</b>	<b>Belanja Tunjangan-Tunjangan I Pejabat Negara</b>
511321	Belanja Tunjangan Suami/Istri Pejabat Negara Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan suami/istri pejabat negara.
511322	Belanja Tunjangan Anak Pejabat Negara Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan anak pejabat negara.
511323	Belanja Tunjangan Struktural Pejabat Negara Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan struktural pejabat negara.
511324	Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan PPh pejabat negara.
511325	Belanja Tunjangan Beras Pejabat Negara Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan beras pejabat negara.
<b>51133</b>	<b>Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara</b>
511331	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pejabat Negara Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan komunikasi intensif pejabat negara.
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan uang kehormatan pejabat negara.
511333	Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan paket harian pejabat negara.
511334	Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan penunjang kegiatan dewan pejabat negara.
511335	Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan pelayanan sidang dan penyelesaian tugas mendesak pejabat negara.
511336	Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan pembinaan kegiatan dan khusus BPK pejabat Negara.
511337	Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat Negara Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan lain-lain termasuk uang duka pejabat negara.
511338	Belanja Tunjangan Fasilitas KPK Untuk pembayaran tunjangan pejabat KPK seperti fasilitas yang diterima.
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara Digunakan untuk mencatat Belanja atas tunjangan penghasilan untuk Pejabat Negara (TPPN).
<b>5114</b>	<b>Belanja Gaji Dokter PTT</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>51141</b>	<b>Belanja Gaji Dokter PTT</b>
511411	Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji Dokter dan Bidan PTT.
511412	Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan pajak PPh Dokter dan Bidan PTT.
511413	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT.
511414	Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Dokter dan Bidan PTT termasuk tunjangan uang duka wafat (UDW).
<b>5115</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS</b>
<b>51151</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS</b>
511511	Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi.
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi.
511513	Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi.
511519	Belanja Tunjangan Lainnya Non PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan lainnya Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi.
<b>51152</b>	<b>Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluhan Non PNS</b>
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan tenaga pendidik non PNS, termasuk tunjangan profesi guru dan dosen Non PNS.
511522	Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluhan Non PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan tenaga penyuluhan non PNS, termasuk tunjangan penyuluhan agama non PNS.
511529	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluhan Lainnya Non PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluhan Lainnya Non PNS termasuk tunjangan Khusus dan Subsidi Tunjangan Fungsional.
<b>512</b>	<b>BELANJA HONORARIUM/LEMBUR/TUNJANGAN KHUSUS &amp; BELANJA PEGAWAI TRANSITO</b>
<b>5121</b>	<b>Belanja Honorarium</b>
<b>51211</b>	<b>Belanja Honorarium</b>
512111	Belanja Uang Honor Tetap Digunakan untuk pembayaran honor tetap, termasuk honor Pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi unit organisasi yang bersangkutan.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>5122</b>	<b>Belanja Lembur</b>
<b>51221</b>	<b>Belanja Lembur</b>
512211	Belanja Uang Lembur
	Digunakan untuk mencatat pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur.
<b>5124</b>	<b>Belanja Tunjangan Khusus &amp; Belanja Pegawai Transito</b>
<b>51241</b>	<b>Belanja Tunjangan Khusus &amp; Belanja Pegawai Transito</b>
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)
	Digunakan untuk pembayaran tunjangan khusus/kegiatan/kinerja dan pembiayaan kepegawaian lainnya di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
512412	Belanja Pegawai Transito
	Digunakan untuk pengeluaran sebagian belanja pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi.
512413	Belanja Pembayaran Uang Kompensasi Bagi PNS yang Diberhentikan Sebagai Dampak Reformasi Birokrasi
	Belanja pembayaran uang kompensasi atas PNS yang diberhentikan sebagai dampak reformasi birokrasi, digunakan untuk pembayaran uang kompensasi bagi PNS yang diberhentikan sebelum batas usia pensiun yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan kepegawaian, sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi.
<b>513</b>	<b>BELANJA KONTRIBUSI SOSIAL</b>
<b>5131</b>	<b>Belanja Pensiun dan Uang Tunggu</b>
<b>51311</b>	<b>Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara</b>
513111	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun PNS Pusat dan uang tunggu bagi PNS yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
513112	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Daerah
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun PNS Daerah dan uang tunggu bagi PNS Daerah yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
513113	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Kemhan
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun PNS TNI/Kemhan dan uang tunggu bagi PNS TNI/Kemhan yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
513114	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun PNS Polri dan uang tunggu bagi PNS Polri yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
513115	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Eks Pegadaian
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun PNS Eks Pegadaian dan uang tunggu bagi PNS Daerah yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
<b>51312</b>	<b>Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri</b>
513121	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (Lama)
	Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun TNI/Polri yang pensiun sebelum 1

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	April 1989.
513122	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Kemhan  Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun Prajurit TNI dan uang tunggu bagi Prajurit TNI yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
513123	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Polri  Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun anggota Polri dan uang tunggu bagi anggota Polri yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
<b>51313</b>	<b>Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara</b>
513131	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara  Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi Pejabat Negara yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
513132	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Hakim  Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi Hakim yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
<b>51314</b>	<b>Belanja Kontribusi APBN sebagai pendanaan bersama dalam pembayaran pensiun eks PNS Kemhub pada PT KAI</b>
513141	Kontribusi APBN Sebagai Pendanaan Bersama Dalam Pembayaran Pensiun Eks PNS Kemhub pada PT KAI  Belanja dalam rangka pembayaran pensiun eks PNS Kementerian Perhubungan pada PT Kereta Api sebagai pelaksanaan dari PP No 64 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia.
<b>51315</b>	<b>Belanja Pensiun Veteran dan PKRI/KNIP</b>
513151	Belanja Tunjangan Veteran  Digunakan untuk pembayaran tunjangan veteran RI.
513152	Belanja Dana Kehormatan Veteran  Digunakan untuk pembayaran Dana Kehormatan Veteran.
513153	Belanja Tunjangan PKRI dan KNIP  Digunakan untuk pembayaran tunjangan Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) dan Komite Nasional Indonesia Pusat.
<b>51316</b>	<b>Belanja Tunjangan Hari Tua</b>
513161	Belanja Tunjangan Hari Tua (Unfunded Liability)  Digunakan untuk pembayaran kewajiban pemerintah berupa Unfunded Liability (kekurangan Pendanaan) atas kenaikan Gaji Pokok Pegawai
<b>5132</b>	<b>Belanja Program Jaminan Sosial Pegawai</b>
<b>51321</b>	<b>Belanja Askes PNS/Pejabat Negara</b>
513211	Belanja Askes PNS  Digunakan untuk pembayaran Iuran Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan Asuransi Kesehatan PNS.
513212	Belanja Askes Pejabat Negara  Digunakan untuk pembayaran belanja Askes Pejabat Negara.
<b>51322</b>	<b>Belanja Askes Penerima Pensiun</b>
513221	Belanja Askes Penerima Pensiun

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk pembayaran iuran Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Penerima Pensiun.
<b>51323</b>	<b>Belanja Askes TNI/Kemhan</b>
513231	Belanja Askes TNI/Kemhan
	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes TNI/Kemhan.
<b>51324</b>	<b>Belanja Askes Polri</b>
513241	Belanja Askes Polri
	Digunakan untuk pembayaran belanja Askes Polri.
<b>51325</b>	<b>Belanja Askes Veteran</b>
513251	Belanja Askes Veteran
	Digunakan untuk pembayaran iuran kesehatan dalam rangka penyelenggaraan asuransi kesehatan veteran Penerima Tunjangan Veteran yang ditanggung pemerintah pusat.
<b>51326</b>	<b>Belanja Katastropik</b>
513261	Belanja Katastropik
	Digunakan untuk mencatat belanja katastropik.
<b>51327</b>	<b>Belanja Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai</b>
513271	Belanja Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai
	Digunakan untuk mencatat Belanja Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai, dikarenakan tanggung jawab pemerintah sebagai pemberi kerja penyelenggara negara.
<b>51328</b>	<b>Belanja Program Jaminan Kematian Pegawai</b>
513281	Belanja Program Jaminan Kematian Pegawai
	Digunakan untuk mencatat Belanja Program Jaminan Kematian Pegawai, dikarenakan tanggung jawab pemerintah sebagai pemberi kerja penyelenggara negara.
<b>5133</b>	<b>Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran</b>
<b>51331</b>	<b>Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran</b>
513311	Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran
	Digunakan untuk pembayaran iuran kesehatan dalam rangka penyelenggaraan asuransi kesehatan veteran Non Tuvet yang ditanggung pemerintah pusat.
<b>5134</b>	<b>Belanja Cadangan Perubahan Sharing</b>
<b>51341</b>	<b>Belanja Cadangan Perubahan Sharing</b>
513411	Belanja Cadangan Perubahan Sharing
	Digunakan untuk pembayaran cadangan perubahan sharing kepada pegawai.
<b>52</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>
<b>521</b>	<b>BELANJA BARANG</b>
<b>5211</b>	<b>Belanja Barang Operasional</b>
<b>52111</b>	<b>Belanja Barang Operasional</b>
521111	Belanja Keperluan Perkantoran
	Digunakan untuk mencatat membiayai keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional Kementerian negara/ lembaga, namun tidak menghasilkan barang persediaan yang terdiri antara lain : - Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu langganan surat

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	<p>kabar/ berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan tamu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya satpam/pengaman kantor, cleaning service, sopir, tenaga lepas (yang dipekerjakan secara kontraktual), telex, internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan penggantian sertifikat tanah yang hilang, pembayaran PBB.</li> <li>- Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan/penggantian inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/satker di bawah nilai kapitalisasi.</li> </ul>
521112	<p>Belanja Pengadaan Bahan Makanan</p> <p>Digunakan untuk mencatat pengadaan bahan makanan.</p>
521113	<p>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</p> <p>Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan bahan makanan/ minuman/ obat-obatan yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional kepada pegawai.</p>
521114	<p>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</p> <p>Digunakan untuk mencatat membiayai Pengiriman surat menyurat dalam rangka kedinasan yang dibayarkan oleh Kementerian Negara/lembaga.</p>
521115	<p>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</p> <p>Honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja seperti, honor pejabat kuasa pengguna anggaran, honor pejabat pembuat komitmen, honor pejabat penguji SPP dan penanda tangan SPM, Honor Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka, Honor Staf Pengelola Keuangan, Honor Pengelola PNBP (honor atasan langsung, bendahara dan sekretariat), honor pengelola satuan kerja(yang mengelola gaji pada Kementerian Pertahanan), honor Tim SAI (Pengelola SAK dan SIMAK-BMN). Honor Operasional Satuan Kerja merupakan honor yang menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan dan pembayaran honornya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran.</p>
521116	<p>Belanja Keperluan Perkantoran Atase Pertahanan Luar Negeri</p> <p>Digunakan untuk mencatat Belanja Keperluan Perkantoran Atase Pertahanan Republik Indonesia di Luar Negeri yang tidak menghasilkan barang persediaan.</p>
521119	<p>Belanja Barang Operasional Lainnya</p> <p>Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521111, 521112, 521113, 521114, 521115 dalam rangka kegiatan operasional satker dan tidak menghasilkan barang persediaan.</p>
<b>52112</b>	<b>Belanja Barang Operasional kepada BLU</b>
521121	<p>Belanja Barang Operasional Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga</p> <p>Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja barang operasional yang penyedia barang/rekanannya adalah BLU yang berada dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga.</p>
521122	<p>Belanja Barang Operasional Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain</p> <p>Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja barang operasional yang penyedia barang/rekanannya adalah BLU yang berada pada Kementerian Negara/Lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Pusat.</p>
<b>5212</b>	<b>Belanja Barang Non Operasional</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>52121</b>	<b>Belanja Barang Non Operasional</b>
521211	<p>Belanja Bahan</p> <p>Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsumsi/bahan makanan;</li> <li>- Dokumentasi;</li> <li>- Spanduk;</li> <li>- Biaya fotokopi;</li> </ul> <p>yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti pameran, seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain lain yang terkait langsung dengan output suatu kegiatan dan tidak menghasilkan barang persediaan.</p>
521212	Belanja Barang Transito
	Digunakan untuk pengeluaran pembiayaan belanja barang pada satuan kerja-satuan kerja yang baru dibentuk /UPT termasuk di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang diliikuidasi atau satker yang tidak melekat pada Bagian Anggaran / Kementerian Negara / Lembaga serta bisa digunakan oleh satker lain yang telah diberikan persetujuan oleh Menkeu.
521213	Belanja Honor Output Kegiatan
	Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output seperti : honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluh non PNS, Honor Tim Pelaksana Kegiatan (pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf sekretariat), Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pemeriksa Penerima Barang/Jasa, untuk pengadaan yang tidak menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya, termasuk juga vakasi. Honor Output Kegiatan dapat digunakan untuk biaya honor yang timbul sehubungan dengan/dalam rangka penyerahan barang kepada masyarakat. Honor Output Kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun.
521214	Belanja Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan
	Digunakan untuk mencatat kerugian selisih kurs Uang Persediaan pada seluruh Kementerian/Lembaga.
521215	Beban Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun
	Digunakan untuk mencatat biaya yang diperlukan oleh PT. Taspen (Persero) dan PT. Asabri (Persero) untuk operasional penyelenggaraan pembayaran dana belanja Pensiun.
521216	Belanja Pencairan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pencairan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH).
521217	Belanja Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Kepada Negara
	Digunakan untuk mencatat belanja atas denda keterlambatan pembayaran atas tagihan kepada negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pengenaan Denda Keterlambatan Pembayaran kepada Negara atas Tagihan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Belanja Negara.
521218	Belanja dalam Rangka Refund Dana PHLN
	Digunakan untuk mencatat belanja sebagai akibat kewajiban pemerintah untuk mengembalikan penarikan dana PHLN, termasuk penarikan dana PHLN yang

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	dilakukan dalam rangka pelaksanaan APBN yang dibiayai dari PHLN kepada pemberi PHLN.
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya
	Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kelompok Akun Belanja Barang Non Operasional. Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya <i>Crash Program</i> . Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk pemberian beasiswa kepada pegawai di lingkup K/L atau di luar lingkup satker. Belanja Barang Non Operasional Lainnya tidak menghasilkan barang persediaan.
<b>52122</b>	<b>Belanja Barang Non Operasional kepada BLU</b>
521221	Belanja Barang Non Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
	Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja barang non operasional yang penyedia barang/rekanannya adalah BLU yang berada dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga.
521222	Belanja Barang Non Operasional Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain
	Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja barang non operasional yang penyedia barang/rekanannya adalah BLU yang berada pada Kementerian Negara/Lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Pusat.
<b>52123</b>	<b>Belanja Barang Bantuan Pemerintah</b>
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pemberian penghargaan dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
521232	Belanja Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam bentuk uang
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pemberian beasiswa Non PNS dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pemberian bantuan operasional dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
521234	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk barang
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pemberian penghargaan dalam bentuk barang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.
<b>5215</b>	<b>Belanja Barang Pengganti Pajak Dalam Rangka Hibah MCC</b>
<b>52151</b>	<b>Belanja Barang Pengganti Pajak Pusat Dalam Rangka Hibah MCC</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
521511	Belanja Barang Pengganti PPN Dalam Rangka Hibah MCC Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Pengganti PPN dalam rangka Hibah MCC ( <i>Millenium Challenge Corporation</i> ).
521512	Belanja Barang Pengganti PPh Dalam Rangka Hibah MCC Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Pengganti PPh dalam rangka Hibah MCC ( <i>Millenium Challenge Corporation</i> ).
521513	Belanja Barang Pengganti Pajak Lainnya Dalam Rangka Hibah MCC Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Pengganti Pajak Lainnya dalam rangka Hibah MCC ( <i>Millenium Challenge Corporation</i> ).
<b>5217</b>	<b>Belanja Kontribusi</b>
<b>52171</b>	<b>Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund</b>
521711	Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan <i>Trust Fund</i> Digunakan untuk mencatat pengeluaran Kerja Sama Internasional yang mencakup pembayaran iuran keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam organisasi internasional dan tidak menimbulkan hak suara di luar ketentuan Keputusan Presiden Nomor 64 tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia Dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia Pada Organisasi-Organisasi Internasional, yang dibiayai dari Bagian Anggaran BUN (999.99); dan pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional yang mencakup transaksi yang timbul sebagai akibat dari perjanjian-perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pihak lain di dunia internasional dan dibiayai dari Bagian Anggaran BUN (999.99).
<b>52172</b>	<b>Belanja Kontribusi Dukungan Pemerintah dan Ketersediaan Layanan</b>
521721	Belanja Kontribusi Dana Dukungan Kelayakan ( <i>Viability Gap Fund</i> ) Digunakan untuk mencatat pengeluaran pemerintah yang merupakan dukungan pemerintah berupa kontribusi fiskal dalam bentuk tunai atas sebagian biaya pembangunan proyek yang dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam rangka penyediaan layanan infrastruktur yang terjangkau bagi masyarakat. Dibiayai dari Bagian Anggaran BUN (999.99).
521722	Belanja Kontribusi Fasilitas Penyiapan Proyek ( <i>Project Development Facility</i> ) Digunakan untuk mencatat pengeluaran pemerintah yang berupa bantuan teknis penyiapan dan transaksi proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta bagi Penanggung Jawab Program Kegiatan untuk menghasilkan <i>Bankable Business Case Project</i> dan dapat mencapai <i>Financial Close</i> . Dibiayai dari Bagian Anggaran BUN (999.99).
521723	Belanja Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Pembayaran secara berkala kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana di tentukan dalam Perjanjian KPBU, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pembayaran ketersediaan layanan dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
<b>5218</b>	<b>Belanja Barang Persediaan</b>
<b>52181</b>	<b>Belanja Barang untuk Persediaan</b>
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa barang konsumsi, seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ATK;</li> <li>- Bahan cetakan;</li> <li>- Alat-alat rumah tangga;</li> <li>- dll</li> </ul>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
521812	Belanja Barang Persediaan Amunisi Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa amunisi.
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa Pita Cukai, Meterai dan Leges.
<b>52182</b>	<b>Belanja Barang Persediaan untuk proses produksi</b>
521821	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk proses produksi berupa bahan baku.
521822	Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa barang dalam proses produksi.
<b>52183</b>	<b>Belanja Barang Persediaan Bahan Lainnya</b>
521831	Belanja Barang Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga.
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan lainnya.
<b>522</b>	<b>BELANJA JASA</b>
<b>5221</b>	<b>Belanja Jasa</b>
<b>52211</b>	<b>Belanja Langganan Daya dan Jasa</b>
522111	Belanja Langganan Listrik Belanja langganan listrik, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan listrik.
522112	Belanja Langganan Telepon Belanja langganan telepon, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan telepon.
522113	Belanja Langganan Air Belanja langganan air, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan air.
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja langganan daya dan jasa lainnya, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan daya dan jasa lainnya.
<b>52212</b>	<b>Belanja Jasa Pos dan Giro</b>
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro Digunakan untuk pembayaran jasa perdendaharaan yang telah dilaksanakan oleh kantor pos diseluruh Indonesia.
<b>52213</b>	<b>Belanja Jasa Konsultan</b>
522131	Belanja Jasa Konsultan Digunakan untuk pembayaran jasa konsultan secara kontraktual termasuk jasa pengacara yang outputnya tidak menghasilkan Aset Lainnya. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir ( <i>brainware</i> ).
<b>52214</b>	<b>Belanja Sewa</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
522141	Belanja Sewa Digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya sewa kantor/gedung/ruangan, atau sewa lainnya).
<b>52215</b>	<b>Belanja Jasa Profesi</b>
522151	Belanja Jasa Profesi Belanja untuk pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan mengacu pada ketentuan tentang standar biaya.
<b>52216</b>	<b>Belanja Jasa kepada BLU</b>
522161	Belanja Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja jasa yang penyedia jasa/rekanannya adalah BLU yang berada dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga.
522162	Belanja Jasa Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja jasa yang penyedia jasa/rekanannya adalah BLU yang berada pada Kementerian Negara/Lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Pusat.
<b>52219</b>	<b>Belanja Jasa Lainnya</b>
522191	Belanja Jasa Lainnya Digunakan untuk pembayaran jasa yang tidak bisa ditampung pada kelompok akun 52211, 52212, 52213, 52214, dan 52215. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan ( <i>skillware</i> ) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang
<b>523</b>	<b>BELANJA PEMELIHARAAN</b>
<b>5231</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>
<b>52311</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pengeluaran pemeliharaan/perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Biaya Umum. Dalam rangka mempertahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sampai dengan 2%; dan - Pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/kantor agar berada dalam kondisi normal (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan).
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan gedung dan bangunan.
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi gedung dan bangunan atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk gedung dan bangunan tersebut sesuai dengan perjanjian dan untuk mencatat biaya lain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat membiayai pemeliharaan rumah dinas dan rumah jabatan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas para pejabat seperti istana negara, rumah Jabatan Menteri/ Gubernur/ Bupati/Walikota/Mahkamah Agung/Ketua Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Pimpinan/Ketua Lembaga Non Kementerian/TNI/Polri/asrama yang terdapat di semua Kementerian/Lembaga Non Kementerian, termasuk TNI, Polri/Aula yang pisah dengan Gedung Kantor/Gedung Kesenian, Art Center/Gedung Museum beserta isinya termasuk taman, pagar agar berada dalam kondisi normal.
<b>52312</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina
	Digunakan untuk mencatat belanja atas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) yang digunakan untuk mendukung operasional Alutsista dan Non-Alutsista Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri. BMP antara lain terdiri dari Avgas, Avtur, MT-88, HSD, Karosine, Pertamax, Methanol. Serta Belanja atas SPO (Special Oil Non Pertamina), yaitu pelumas khusus yang tidak diproduksi oleh Pertamina tetapi sangat dibutuhkan untuk operasional alutsista TNI antara lain Petronas Hidroulic, Petronas Gear, Skydrol LD-4, Amazon Super Diesel, Penlube Hidrolic Oil, Shell Omala, Shell Gadus, Lafalf Gear Oil, Rocor Saphire, Nycolube 22, Neox 800, dst. SPO ini ada yang dapat dibeli di dalam negeri dan ada yang harus dibeli di Luar Negeri.
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin.
523124	Belanja Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor
	Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi alat angkutan darat/apung/udara bermotor atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk alat angkutan darat/apung/udara bermotor tersebut sesuai dengan perjanjian dan untuk mencatat biaya lain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pengeluaran lainnya untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
<b>52313</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	Digunakan untuk mencatat pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jalan dan jembatan agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi kriteria kapitalisasi jalan dan jembatan.
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi
	Digunakan untuk mencatat pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan irigasi agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jaringan agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi jaringan.
523134	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan.
523135	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi
	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan irigasi.
523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan
	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan jaringan.
523137	Belanja Asuransi Jembatan
	Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi jembatan atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk jembatan tersebut sesuai dengan perjanjian dan untuk mencatat biaya lain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.
<b>52319</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Lainnya</b>
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan lainnya.
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pemeliharaan aset tetap selain gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan agar berada dalam kondisi normal termasuk pemeliharaan tempat ibadah, bangunan bersejarah seperti candi, bangunan peninggalan Belanda, Jepang yang belum diubah posisinya, kondisi bangunan/ Bangunan Keraton/Puri bekas kerajaan, bangunan cagar valam, cagar budaya, makam yang memiliki nilai sejarah, serta pemeliharaan atas aset lainnya yang bukan milik entitas tersebut baik itu milik entitas pemerintah pusat lain ataupun entitas di luar pemerintah pusat.
<b>524</b>	<b>BELANJA PERJALANAN DINAS</b>
<b>5241</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>
<b>52411</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
	Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;</li> <li>Pengumandahan (detasering);</li> <li>Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;</li> <li>Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan;</li> <li>Memperoleh pengobatan;</li> <li>Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;</li> <li>Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;</li> </ol>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Mengikuti diklat;</li> <li>i. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;</li> <li>j. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.</li> </ul>
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap
	Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk kegiatan pelayanan masyarakat. Contoh: Perjalanan dinas oleh tenaga penyuluhan pertanian, juru penerang, penyuluhan agama, dan lainnya.
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
	<p>Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;</li> <li>b. Pengumandahan (detasering);</li> <li>c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;</li> <li>d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan;</li> <li>e. Memperoleh pengobatan;</li> <li>f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;</li> <li>g. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;</li> <li>h. Mengikuti diklat;</li> <li>i. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;</li> </ul>
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
	<p>Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara maupun yang dilaksanakan di dalam kota satker peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh satker peserta, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;</li> <li>b. Biaya paket meeting (<i>halfday/fullday/fullboard</i>);</li> <li>c. Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota termasuk uang saku rapat dalam kantor di luar jam kerja;</li> <li>d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.</li> </ul> <p>Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.</p>
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
	Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan dibiayai

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	<p>seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan di luar kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;</li> <li>b. Biaya paket meeting (<i>fullboard</i>);</li> <li>c. Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;</li> <li>d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.</li> </ul> <p>Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.</p>
<b>5242</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri</b>
<b>52421</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri</b>
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pensiun, pengiriman jenazah untuk kepentingan dinas di / ke luar negeri.
524212	Belanja Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh kementerian Negara/lembaga untuk kegiatan pelayanan warga di / ke luar negeri Contoh perjalanan dinas oleh tenaga ahli di kedutaan besar atau atase.
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri
	Pengeluaran untuk perjalanan dinas lainnya dalam rangka pendukung kegiatan kementerian negara/lembaga yang tidak tertampung di dalam pos belanja perjalanan biasa dan tetap antara lain biaya perjalanan teknis operasional kegiatan bagi kedutaan besar atau atase di luar negeri.
<b>525</b>	<b>BELANJA BADAN LAYANAN UMUM (BLU)</b>
<b>5251</b>	<b>Belanja Barang BLU</b>
<b>52511</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BLU</b>
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU.
525112	Belanja Barang
	Digunakan untuk mencatat pembelian barang untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU.
525113	Belanja Jasa
	Digunakan untuk mencatat memperoleh jasa untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU.
525114	Belanja Pemeliharaan
	Digunakan untuk mencatat pemeliharaan BMN BLU.
525115	Belanja Perjalanan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran perjalanan dinas pegawai BLU.
525116	Belanja atas Pengelolaan <i>Endowment Fund</i>
	Digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang digunakan untuk pengelolaan <i>Endowment Fund</i> dan Dana Cadangan Pendidikan oleh BLU Bidang Pendidikan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	atau yang ditunjuk pada Kementerian Keuangan sesuai maksud pembentukannya.
525117	Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
	Belanja BLU yang digunakan dalam rangka pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
525118	Belanja Ketersediaan Layanan BLU
	Pembayaran secara berkala kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana di tentukan dalam Perjanjian KPBU, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pembayaran ketersediaan layanan dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, yang dibayarkan oleh Satker BLU dengan sumber dana dari PNBP BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
	Digunakan untuk mencatat keperluan diluar akun 525111, 525112, 525113, 525114, 525115 dan 525116 untuk menunjang kegiatan BLU yang bersangkutan.
<b>52512</b>	<b>Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan BLU</b>
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
525122	Belanja Barang Persediaan Amunisi - BLU
	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan Amunisi - BLU
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU
	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU
525124	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges - BLU
	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges - BLU
525125	Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU
	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU
525126	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU
	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU
525127	Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses untuk Proses Produksi - BLU
	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan Barang dalam Proses untuk Proses Produksi - BLU
525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU
	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU
<b>52513</b>	<b>Belanja Asuransi BMN di BLU</b>
525131	Belanja Asuransi BMN Gedung dan Bangunan - BLU
	Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi gedung dan bangunan di BLU atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk gedung dan bangunan tersebut sesuai dengan perjanjian dan untuk mencatat biaya lain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.
525132	Belanja Asuransi BMN Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor – BLU
	Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi alat angkutan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	darat/apung/udara bermotor di BLU atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk alat angkutan darat/apung/udara bermotor tersebut sesuai dengan perjanjian dan untuk mencatat biaya lain-lain terkait pengasuransi BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransi Barang Milik Negara.
525133	Belanja Asuransi BMN Jembatan – BLU
	Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi jembatan di BLU atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk jembatan tersebut sesuai dengan perjanjian dan untuk mencatat biaya lain-lain terkait pengasuransi BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransi Barang Milik Negara.
<b>52514</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BLU Kepada BLU Lain</b>
525141	Belanja Barang BLU Kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
	Digunakan untuk mencatat pembelian barang untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU yang penyedia barang/rekanannya adalah BLU lain yang berada dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga.
525142	Belanja Barang BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain
	Digunakan untuk mencatat pembelian barang untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU Lain yang berada pada Kementerian Negara/Lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Pusat.
525143	Belanja Jasa BLU Kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
	Digunakan untuk mencatat perolehan jasa untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU yang penyedia jasa/rekanannya adalah BLU lain yang berada dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga.
525144	Belanja Jasa BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain
	Digunakan untuk mencatat perolehan jasa untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU yang penyedia jasa/rekanannya adalah BLU Lain yang berada pada Kementerian Negara/Lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Pusat.
<b>526</b>	<b>BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA</b>
<b>5261</b>	<b>Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda</b>
<b>52611</b>	<b>Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda</b>
526111	Belanja Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
	Digunakan untuk pengadaan barang berupa tanah oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
	Digunakan untuk pengadaan barang berupa peralatan dan mesin oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
	Digunakan untuk pengadaan Barang berupa Gedung dan Bangunan oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk gedung/bangunan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.
526114	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
	Digunakan untuk pengadaan Barang berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
	Digunakan untuk pengadaan Barang Fisik Lainnya oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, termasuk belanja barang fisik lain Tugas Pembantuan.
<b>52612</b>	<b>Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang</b>
526121	Belanja Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Tanah untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
526122	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Peralatan Dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
526123	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Gedung Dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk gedung/bangunan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
526124	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
<b>5262</b>	<b>Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>52621</b>	<b>Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah</b>
526211	Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembelian/pengadaan barang terkait dengan kegiatan pendukung atas kegiatan utama Dana Dekonsentrasi. Pembelian/Pengadaan tersebut menghasilkan BMN untuk diserahkan kepada pemerintah daerah melalui SKPD. Apabila aset itu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan, belum diserahkan ke pemda, atau pemda tidak bersedia menerima, maka aset dimaksud harus direklasifikasi dari Persediaan menjadi Aset Tetap (AT).
526212	Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembelian/pengadaan barang terkait dengan kegiatan pendukung atas kegiatan utama Dana Tugas Pembantuan. Pembelian/Pengadaan tersebut menghasilkan BMN untuk diserahkan kepada pemerintah daerah melalui SKPD. Apabila aset itu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan, belum diserahkan ke pemda, atau pemda tidak bersedia menerima, maka aset dimaksud harus direklasifikasi dari Persediaan menjadi Aset Tetap (AT).
<b>5263</b>	<b>Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda</b>
<b>52631</b>	<b>Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda</b>
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran barang bantuan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk barang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Belanja Barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dalam bentuk uang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, termasuk Rumah Aspirasi Anggota DPR. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
<b>527</b>	<b>BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN</b>
<b>5271</b>	<b>Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden</b>
<b>52711</b>	<b>Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden</b>
527111	Belanja Tanah untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden
	Digunakan untuk mencatat Belanja Tanah untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia.
527112	Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia.
527113	Belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden
	Digunakan untuk mencatat Belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia.
<b>53</b>	<b>BELANJA MODAL</b>
<b>531</b>	<b>BELANJA MODAL TANAH</b>
<b>5311</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>
<b>53111</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>
531111	Belanja Modal Tanah
	Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran - pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/ pakai (swakelola/kontraktual).
531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah
	Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pembebasan, balik nama, pengosongan, serta pengeluaran - pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi secara swakelola sampai tanah tersebut siap digunakan/ pakai (swakelola).
531113	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah
	Digunakan untuk mencatat pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah
	Pengeluaran yang dilakukan untuk pembuatan sertifikat tanah pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
	Pengeluaran yang dilakukan untuk pengurukan/penimbunan, perataan dan pematangan tanah pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).
531116	Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah
	Pengeluaran yang dilakukan untuk pengukuran tanah pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).
531117	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
	Pengeluaran yang dilakukan untuk kepentingan perjalanan dinas dalam rangka pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola).
<b>532</b>	<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>5321</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>
<b>53211</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
532112	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pengadaan bahan baku peralatan dan mesin pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola.
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan peralatan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
532114	Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pembayaran sewa ruangan, sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
532116	Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
532117	Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya pemasangan dan instalasi pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
532118	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
<b>53212</b>	<b>Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin</b>
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin
	Belanja Modal setelah perolehan peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja; dan memenuhi batasan minimum kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur batasan minimum kapitalisasi.
<b>533</b>	<b>BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN</b>
<b>5331</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>
<b>53311</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya kontruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual).
533112	Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pengadaan bahan baku Gedung dan Bangunan pada saat pengadaan Gedung dan Bangunan secara swakelola.
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan.
533114	Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran sewa ruangan, sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.
533116	Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.
533117	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat pembangunan
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.
<b>53312</b>	<b>Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan</b>
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
	Belanja Modal setelah perolehan gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja; dan memenuhi batasan minimum kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur batasan minimum kapitalisasi.
<b>534</b>	<b>BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>
<b>5341</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>
<b>53411</b>	<b>Belanja Modal Jalan dan Jembatan</b>
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan
	Digunakan untuk mencatat memperoleh jalan dan jembatan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan tersebut siap pakai.
534112	Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat pengadaan bahan baku Jalan dan Jembatan pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola.
534113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan jembatan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
534114	Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran sewa ruangan,sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan jalanan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
534115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
534116	Belanja Modal Perijinan Jalan dan Jembatan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
534117	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat pembangunan jalan dan jembatan secara swakelola.
534118	Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
<b>53412</b>	<b>Belanja Modal Irigasi</b>
534121	Belanja Modal Irigasi
	Digunakan untuk mencatat memperoleh irigasi sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai irigasi tersebut siap pakai.
534122	Belanja Modal Bahan Baku Irigasi
	Digunakan untuk mencatat pengadaan bahan baku irigasi pada saat pengadaan irigasi secara swakelola.
534123	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi
	Digunakan untuk mencatat pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.
534124	Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi
	Digunakan untuk mencatat pembayaran sewa ruangan,sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.
534125	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.
534126	Belanja Modal Perijinan Irigasi

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.
534127	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Irigasi
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat pembangunan irigasi secara swakelola.
534128	Belanja Modal Perjalanan Irigasi
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.
<b>53413</b>	<b>Belanja Modal Jaringan</b>
534131	Belanja Modal Jaringan
	Digunakan untuk mencatat memperoleh jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jaringan tersebut siap pakai.
534132	Belanja Modal Bahan Baku Jaringan
	Digunakan untuk mencatat pengadaan bahan baku jaringan pada saat pengadaan jaringan secara swakelola.
534133	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan.
534134	Belanja Modal Sewa Peralatan Jaringan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran sewa ruangan, sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan.
534135	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan.
534136	Belanja Modal Perijinan Jaringan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan.
534137	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Jaringan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat pembangunan jaringan secara swakelola.
534138	Belanja Modal Perjalanan Jaringan
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan.
<b>53414</b>	<b>Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan</b>
534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan
	Belanja Modal setelah perolehan jalan dan jembatan yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja.
<b>53415</b>	<b>Belanja Penambahan Nilai Irigasi</b>
534151	Belanja Penambahan Nilai Irigasi

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Belanja Modal setelah perolehan irigasi yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja.
<b>53416</b>	<b>Belanja Penambahan Nilai Jaringan</b>
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan
	Belanja Modal setelah perolehan jaringan yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja.
<b>536</b>	<b>BELANJA MODAL LAINNYA</b>
<b>5361</b>	<b>Belanja Modal Lainnya</b>
<b>53611</b>	<b>Belanja Modal Lainnya</b>
536111	Belanja Modal Lainnya
	Digunakan untuk mencatat memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Digunakan untuk mencatat memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya sampai dengan siap digunakan. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pengadaan software, pengembangan website, pengadaan lisensi yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun baik secara swakelola maupun dikontrakkan kepada Pihak Ketiga. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pembangunan aset tetap renovasi yang akan diserahkan kepada entitas lain dan masih di lingkungan pemerintah pusat. Untuk Aset Tetap Renovasi yang nantinya akan diserahkan kepada entitas lain berupa Gedung dan Bangunan mengikuti ketentuan batasan minimal kapitalisasi. Termasuk dalam belanja modal lainnya : pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, dan koleksi perpustakaan.
<b>53612</b>	<b>Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya</b>
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya
	Belanja Modal setelah perolehan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja. Untuk penambahan nilai Aset Tetap Renovasi yang nantinya akan diserahkan kepada entitas lain berupa Gedung dan Bangunan mengikuti ketentuan batasan minimal kapitalisasi.
<b>537</b>	<b>BELANJA MODAL BADAN LAYANAN UMUM (BLU)</b>
<b>5371</b>	<b>Belanja Modal BLU</b>
<b>53711</b>	<b>Belanja Modal BLU</b>
537111	Belanja Modal Tanah - BLU
	Belanja Modal Tanah BLU.
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU.
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU.
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU.
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Belanja Modal Lainnya BLU.
<b>54</b>	<b>BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG</b>
<b>541</b>	<b>BELANJA PEMBAYARAN BUNGA UTANG</b>
<b>5411</b>	<b>Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Pendek</b>
<b>54111</b>	<b>Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara</b>
541111	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara – Rupiah
	Digunakan untuk pembayaran belanja bunga terhadap penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan surat Berharga lainnya.
541112	Belanja Pembayaran Kupon SBN-TDR
	Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja kupon SBN pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
541113	Belanja Pembayaran Bunga Repo - TDR
	Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja bunga transaksi repo pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
541119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Surat Perbendaharan Negara
	Digunakan untuk pengeluaran kewajiban pemerintah lainnya terhadap bunga Surat perbendaharaan Negara.
<b>54112</b>	<b>Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara-Valas</b>
541121	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara-Valas
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara-Valas.
541122	Belanja Pembayaran Kupon SBN Valas-TDR
	Digunakan untuk mencatat pembayaran kupon SBN Valas pada transaksi <i>Treasury Dealing Room</i> .
541123	Belanja Pembayaran Bunga Repo Valas-TDR
	Digunakan untuk mencatat pembayaran bunga repo valas pada transaksi <i>Treasury Dealing Room</i> .
541129	Belanja Pembayaran Biaya/ Kewajiban Lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara - Valas
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Biaya/ Kewajiban Lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara - Valas.
<b>5412</b>	<b>Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Jangka Panjang</b>
<b>54121</b>	<b>Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara</b>
541211	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah
	Digunakan untuk pembayaran belanja bunga Obligasi Negara yang harus dibayar oleh pemerintah.
541219	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara
	Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara.
<b>54122</b>	<b>Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang Lainnya</b>
541221	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan.
541229	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara Lainnya.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>54123</b>	<b>Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri</b>
541231	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri.
541232	Belanja Biaya/Kewajiban Lainnya terhadap Pinjaman DN
	Digunakan untuk mencatat Belanja Biaya/Kewajiban Lainnya terhadap Pinjaman DN.
<b>54124</b>	<b>Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Dalam Negeri</b>
541241	Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Dalam Negeri
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Dalam Negeri.
<b>54125</b>	<b>Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas</b>
541251	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas.
541259	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara.
<b>5413</b>	<b>Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara</b>
<b>54131</b>	<b>Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang</b>
541311	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang
541312	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang
	Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya Imbalan SSBN Jangka Panjang.
<b>54132</b>	<b>Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek</b>
541321	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek
	Digunakan untuk mencatat pembayaran Imbalan Surat berharga Syariah Negara Jangka Pendek.
541322	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek
	Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya/kewajiban lainnya Imbalan SSBN Jangka Pendek.
<b>54133</b>	<b>Belanja Pembayaran Imbalan SPN Syariah</b>
541331	Belanja Pembayaran Imbalan SPN Syariah
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Imbalan SPN Syariah.
541332	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya-Imbalan SPN Syariah
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya-Imbalan SPN Syariah.
<b>54134</b>	<b>Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang Valas</b>
541341	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang Valas
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang Valas.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
541342	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang Valas
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang Valas.
<b>54135</b>	<b>Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek Valas</b>
541351	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek Valas
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek Valas.
541352	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek Valas
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek Valas.
<b>5414</b>	<b>Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang</b>
<b>54141</b>	<b>Belanja Bunga Pinjaman program</b>
541411	Belanja Bunga Pinjaman Program
	Digunakan untuk pembayaran belanja bunga pinjaman program atau nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan.
541419	Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program
	Digunakan untuk pengeluaran biaya/kewajiban pemerintah lainnya terhadap utang luar negeri jangka panjang dalam rangka pinjaman program.
<b>54142</b>	<b>Belanja Bunga Pinjaman proyek</b>
541421	Belanja Bunga Pinjaman Proyek
	Digunakan untuk pembayaran belanja bunga pinjaman proyek atau nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri di luar pinjaman program.
541429	Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek
	Digunakan untuk pengeluaran biaya/kewajiban pemerintah lainnya terhadap utang luar negeri jangka panjang dalam rangka pinjaman proyek.
<b>54144</b>	<b>Belanja Bunga Utang LN Melalui Penjadwalan Kembali Pinjaman</b>
541441	Belanja Bunga Utang LN dari Penjadwalan Kembali Pinjaman Program
	Digunakan untuk pembayaran belanja bunga terhadap utang LN dari Penjadwalan Kembali Pinjaman Program.
541442	Belanja Bunga Utang LN dari Penjadwalan Kembali Pinjaman Proyek
	Digunakan untuk pembayaran belanja bunga terhadap utang LN dari Penjadwalan Kembali Pinjaman Proyek.
541449	Belanja Biaya/Kewajiban Lainnya – Bunga Utang LN Melalui Penjadwalan Kembali Pinjaman
	Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya - bunga utang LN melalui penjadwalan kembali pinjaman.
<b>54146</b>	<b>Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri</b>
541461	Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri.
<b>542</b>	<b>BELANJA PEMBAYARAN DISCOUNT SURAT UTANG NEGARA</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>5421</b>	<b>Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara</b>
<b>54211</b>	<b>Belanja Pembayaran Discount Surat Perpendaharaan Negara</b>
542111	Belanja Pembayaran Discount Surat Perpendaharaan Negara
	Digunakan untuk pembayaran discount yang diberikan atas penerbitan surat perpendaharaan Negara.
542119	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Perpendaharaan Negara
	Digunakan untuk pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat Perpendaharaan Negara.
<b>54212</b>	<b>Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara</b>
542121	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara
	Digunakan untuk pembayaran discount yang diberikan atas penerbitan obligasi Negara.
542129	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Obligasi Negara
	Digunakan untuk pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount obligasi.
<b>54213</b>	<b>Belanja Pembayaran Discount Surat Perpendaharaan Negara Valas</b>
542131	Belanja Pembayaran Discount Surat Perpendaharaan Negara Valas
	Digunakan untuk pembayaran Discount Surat Perpendaharaan Negara Valas.
542139	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Perpendaharaan Negara Valas
	Digunakan untuk pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Perpendaharaan Negara Valas.
<b>54214</b>	<b>Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas</b>
542141	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas
	Digunakan untuk pembayaran Discount Obligasi Negara Valas.
542149	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Obligasi Negara Valas
	Digunakan untuk pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Obligasi Negara Valas.
<b>544</b>	<b>BELANJA PEMBAYARAN LOSS ON BOND REDEMPTION</b>
<b>5441</b>	<b>Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara</b>
<b>54411</b>	<b>Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara</b>
544111	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara
	Digunakan untuk mencatat belanja yang timbul dari selisih lebih <i>clean price</i> yang dibayar Pemerintah pada saat pembelian kembali SUN ( <i>buyback</i> ) dengan <i>carrying value</i> SUN. <i>Carrying value</i> SUN ialah nilai nominal SUN setelah dikurangi atau ditambah <i>unamortized discount</i> atau <i>premium</i> .
544112	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara.
544113	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valas
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Pembelian Kembali Obligasi Negara Valas.
544114	Belanja Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara Valas
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara Valas.
<b>545</b>	<b>BELANJA PEMBAYARAN DISCOUNT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA</b>
<b>5451</b>	<b>Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara</b>
<b>54511</b>	<b>Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang</b>
545111	Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang
	Digunakan untuk pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang.
545119	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang
	Digunakan untuk pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang.
<b>54512</b>	<b>Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek</b>
545121	Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek
	Digunakan untuk pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek.
545129	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Disocunt Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek
	Digunakan untuk pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Disocunt Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek.
<b>54513</b>	<b>Belanja Pembayaran Discount SPN</b>
545131	Belanja Pembayaran Discount SPN
	Digunakan untuk pembayaran Discount SPN.
545139	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya-Discount SPN
	Digunakan untuk pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya-Discount SPN.
<b>54514</b>	<b>Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang Valas</b>
545141	Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang Valas
	Digunakan untuk pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang Valas.
545149	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang Valas
	Digunakan untuk pembayaran Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang Valas.
<b>54515</b>	<b>Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek Valas</b>
545151	Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek Valas
	Digunakan untuk pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek Valas.
545159	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek Valas

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Disocunt Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek Valas.
<b>547</b>	<b>BELANJA DENDA</b>
<b>5471</b>	<b>Belanja Pembayaran Denda</b>
<b>54711</b>	<b>Belanja Pembayaran Imbalan Bunga</b>
547112	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan
	Digunakan untuk pembayaran imbalan bunga atas pinjaman perbankan.
547113	Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Bea dan Cukai (SPM-IB Bea dan Cukai)
	Digunakan untuk pembayaran imbalan bunga atas kelalaian pemerintah membayar kembali pengembalian kelebihan bea dan cukai.
547119	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya
	Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya - Bunga dalam negeri jangka pendek lainnya.
<b>55</b>	<b>BELANJA SUBSIDI</b>
<b>551</b>	<b>BELANJA SUBSIDI PERUSAHAAN NEGARA</b>
<b>5511</b>	<b>Belanja Subsidi Lembaga Keuangan</b>
<b>55111</b>	<b>Belanja Subsidi Lembaga Keuangan</b>
551111	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
	Digunakan untuk pembayaran subsidi melalui lembaga keuangan misalnya subsidi bunga KPR.
<b>5512</b>	<b>Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – BBM</b>
<b>55121</b>	<b>Belanja Subsidi BBM</b>
551211	Belanja Subsidi Avgas
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi avgas yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan avgas.
551212	Belanja Subsidi Avtur
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi avtur yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan avtur.
551213	Belanja Subsidi Premium
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi premium yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan premium.
551214	Belanja Subsidi Minyak Bakar
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak bakar yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak bakar.
551215	Belanja Subsidi Minyak Solar
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak solar yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak solar.
551216	Belanja Subsidi Minyak Diesel
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak diesel yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak diesel.
551217	Belanja Subsidi Minyak Tanah

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak tanah yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak tanah.
551218	Belanja Subsidi Elpiji
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak tanah yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan elpiji.
551219	Belanja Subsidi <i>Liquefied Gas for Vehicle (LGV)</i>
	Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi LGV yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan LGV.
<b>5513</b>	<b>Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – Non BBM</b>
<b>55131</b>	<b>Belanja Subsidi Non-BBM – Harga/Biaya</b>
551311	Belanja Subsidi Pangan
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih harga yang diberikan kepada BULOG atas penyaluran beras OPK kepada Keluarga Miskin dengan perhitungan berdasarkan selisih antara harga jual beras OPK dengan Harga Pokok Beras BULOG.
551312	Belanja Subsidi Listrik
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi dalam rangka menutup defisit arus kas operasi PT. PLN (Persero). Subsidi ini diberikan akibat harga jual listrik yang ditentukan oleh Pemerintah lebih rendah dibandingkan biaya produksi listrik oleh PT. PLN (Persero).
551313	Belanja Subsidi Benih
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih harga benih yang diberikan kepada petani melalui BUMN Benih terhadap penjualan benih padi dan kedele dibanding dengan biaya produksinya.
551314	Belanja Subsidi Obat
	Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih kurs atas pembelian impor bahan baku obat yang digunakan untuk pembuatan obat-obatan generik, alat kesehatan dan Keluarga Berencana.
551315	Belanja Subsidi Gula
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi harga yang diberikan kepada petani melalui Pabrik Gula atas selisih harga jual gula petani dengan provensie yang ditetapkan oleh Pemerintah.
551316	Belanja Subsidi Pupuk
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi harga yang diberikan kepada petani melalui Pabrik Pupuk atas selisih harga jual pupuk dengan provensie yang ditetapkan oleh Pemerintah.
551317	Belanja Subsidi Perawatan Beras
	Digunakan untuk mencatat Belanja Subsidi Perawatan Beras.
551318	Belanja Subsidi Pengawasan Pupuk
	Digunakan untuk mencatat Belanja Subsidi Pengawasan Pupuk.
551319	Belanja Subsidi Harga/Biaya Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi selain subsidi pupuk, subsidi gula, subsidi obat, subsidi benih, subsidi pangan dan subsidi listrik.
<b>55132</b>	<b>Belanja Subsidi Non-BBM – Pajak</b>
551321	Belanja Subsidi PPh-DTP

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat menampung pengeluaran negara atas pembayaran PPh yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.
551323	Belanja Subsidi BM-DTP
	Digunakan untuk mencatat menampung pengeluaran negara atas pembayaran BM yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.
<b>55133</b>	<b>Belanja Subsidi Non-BBM – Lainnya</b>
551331	Belanja Subsidi Haji
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi selisih kurs yang diberikan kepada jamaah haji terhadap perubahan kurs dibandingkan kurs dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
551332	Belanja Subsidi Kendaraan Bermotor
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi bunga kredit yang diberikan kepada anggota lembaga tinggi negara (DPR, DPA, MA, BPK) serta para pejabat eselon dalam Pemerintahan untuk pengadaan kendaraan perorangan.
551339	Belanja Subsidi Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
<b>55134</b>	<b>Belanja Subsidi Non BBM - Harga/Biaya II</b>
551341	Belanja Subsidi Minyak Goreng
	Subsidi harga minyak goreng, berupa PPN penjualan minyak goreng yang ditanggung pemerintah, untuk mengendalikan harga minyak goreng agar terjangkau masyarakat.
<b>5514</b>	<b>Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – PSO</b>
<b>55141</b>	<b>Belanja Subsidi dalam Rangka PSO</b>
551411	Belanja Subsidi PT KAI
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran bantuan kepada PT. Kereta Api Indonesia.
551412	Belanja Subsidi PT PELNI
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran bantuan kepada PT. PELNI.
551413	Belanja Subsidi PT Pos Indonesia
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran bantuan kepada PT. Pos Indonesia.
551414	Belanja Subsidi TVRI
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran bantuan kepada TVRI.
551415	Belanja Subsidi BULOG
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran bantuan kepada BULOG.
551419	Belanja Subsidi Dalam Rangka PSO Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran bantuan dalam rangka PSO lainnya.
<b>552</b>	<b>BELANJA SUBSIDI PERUSAHAAN SWASTA</b>
<b>5521</b>	<b>Belanja Subsidi Lembaga Keuangan</b>
<b>55211</b>	<b>Belanja Subsidi Lembaga Keuangan</b>
552111	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
552112	Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi bantuan uang muka yang harus dibayar oleh Pemerintah kepada Bank Pelaksana penyalur bantuan uang muka perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
<b>55212</b>	<b>Belanja Subsidi - Bunga Kredit</b>
552121	Belanja Subsidi Bunga KUT
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Usaha Tani (KUT).
552122	Belanja Subsidi Bunga KOP PIR
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Koperasi Anggota Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi.
552123	Belanja Subsidi Bunga KOP
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Koperasi (KKop).
552124	Belanja Subsidi Bunga KOP PRIM
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA).
552125	Belanja Subsidi Bunga KPR
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap kredit pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
552126	Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran subsidi Bunga yang dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi.
552127	Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Eks KLBI
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Program eks KLBI.
552128	Belanja Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Program Biofuel (Revitalisasi Perkebunan).
552129	Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Program Lainnya.
<b>55213</b>	<b>Belanja Subsidi Imbalan Jasa Peminjam dan Risk Sharing</b>
552131	Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
	Digunakan untuk mencatat pembayaran subsidi imbalan jasa penjaminan KUR kepada lembaga penjaminan yang seharusnya dibayar oleh penerima KUR.
552132	Belanja Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Klaim Resiko yang harus dibayar pemerintah kepada Perusahaan Penjaminan terhadap Penyaluran KKP (KKP).
<b>55214</b>	<b>Belanja Subsidi Kredit Program II</b>
552141	Belanja Subdidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Pemberian Pinjaman Kepada

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Pengusaha NAD dan Nias.
552142	Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS).
552143	Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Subsidi Resi Gudang.
<b>5522</b>	<b>Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan</b>
<b>55221</b>	<b>Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan</b>
552211	Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada organisasi internasional.
<b>56</b>	<b>BELANJA HIBAH</b>
<b>561</b>	<b>BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH LUAR NEGERI</b>
<b>5611</b>	<b>Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri</b>
<b>56111</b>	<b>Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri</b>
561111	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.
<b>562</b>	<b>BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI INTERNASIONAL</b>
<b>5621</b>	<b>Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional</b>
<b>56211</b>	<b>Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional</b>
562111	Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada organisasi internasional.
<b>563</b>	<b>BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH</b>
<b>5631</b>	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah</b>
<b>56311</b>	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah</b>
563111	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada pemerintah daerah.
<b>56312</b>	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah</b>
563121	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri.
563122	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri.
563123	Belanja Hibah Surat Berharga kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat Belanja Hibah Surat Berharga kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>565</b>	<b>BELANJA HIBAH LAINNYA</b>
<b>5651</b>	<b>Belanja Hibah Lainnya</b>
<b>56511</b>	<b>Belanja Hibah Lainnya</b>
565111	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Terkait Pendapatan/Belanja Hibah  Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya yang terkait dengan pendapatan dan belanja hibah baik DN/LN. Biaya-biaya dimaksud antara lain <i>banking commission, bank chargers</i> dan <i>fee</i> lainnya. Akun ini hanya digunakan pada BA Es 999.02 (Pengelolaan Hibah).
<b>57</b>	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>
	Pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
<b>571</b>	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK REHABILITASI SOSIAL</b>
<b>5711</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial</b>
<b>57111</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial</b>
571111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang  Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
571112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang  Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Akun ini dicatat dengan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.
571113	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Jasa  Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk jasa yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Akun ini dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
<b>572</b>	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK JAMINAN SOSIAL</b>
<b>5721</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial</b>
<b>57211</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial</b>
572111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang  Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah.
572112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Barang

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang yang dimaksudkan untuk skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial. Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah. Akun ini dicatat dengan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.
572113	Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Jasa
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk jasa yang dimaksudkan untuk skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial. Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah. Akun ini dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
<b>573</b>	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>
<b>5731</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial</b>
<b>57311</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial</b>
573111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kemauan dan kemampuan;</li> <li>2. Penggalian potensi dan sumber daya;</li> <li>3. Penggalian nilai-nilai dasar;</li> <li>4. Pemberian akses; dan/atau</li> <li>5. Pemberian bantuan usaha.</li> </ol>
573112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kemauan dan kemampuan;</li> <li>2. Penggalian potensi dan sumber daya;</li> <li>3. Penggalian nilai-nilai dasar;</li> <li>4. Pemberian akses; dan/atau</li> <li>5. Pemberian bantuan usaha.</li> </ol> Akun ini dicatat dengan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.
573113	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Jasa
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kemauan dan kemampuan;</li> <li>2. Penggalian potensi dan sumber daya;</li> </ol>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	<p>3. Penggalian nilai-nilai dasar;          4. Pemberian akses; dan/atau          5. Pemberian bantuan usaha.</p> <p>Akun ini dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya..</p>
<b>574</b>	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL</b>
<b>5741</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial</b>
<b>57411</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial</b>
574111	<p>Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang</p> <p>Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bantuan langsung;</li> <li>2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau</li> <li>3. penguatan kelembagaan.</li> </ol> </li> <li>- Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.</li> <li>- Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.</li> </ul>
574112	<p>Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang</p> <p>Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bantuan langsung;</li> <li>2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau</li> <li>3. penguatan kelembagaan.</li> </ol> </li> <li>- Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.</li> <li>- Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.</li> </ul> <p>Akun ini dicatat dengan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.</p>
574113	<p>Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Jasa</p> <p>Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bantuan langsung;</li> <li>2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau</li> <li>3. penguatan kelembagaan.</li> </ol> </li> <li>- Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.</li> </ul>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.</li> </ul> <p>Akun ini dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.</p>
<b>575</b>	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN</b>
<b>5751</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan</b>
<b>57511</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan</b>
575111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang
	<p>Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk a.l:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyuluhan dan bimbingan sosial Pelayanan sosial;</li> <li>- Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau</li> <li>- Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.</li> </ul>
575112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang
	<p>Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk a.l:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyuluhan dan bimbingan sosial;</li> <li>- Pelayanan sosial;</li> <li>- Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau</li> <li>- Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.</li> </ul> <p>Akun ini dicatat dengan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.</p>
575113	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Jasa
	<p>Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk a.l:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyuluhan dan bimbingan sosial;</li> <li>- Pelayanan sosial;</li> <li>- Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau</li> <li>- Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.</li> </ul> <p>Akun ini dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.</p>
<b>576</b>	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>5761</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana</b>
<b>57611</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana</b>
576111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang  Digunakan untuk mencatat belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan/mitigasi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi. Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam bentuk antara lain: <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;</li><li>- Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian;</li><li>- Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;</li><li>- Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;</li><li>- Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;</li><li>- Santunan duka cita; dan</li><li>- Santunan kecacatan</li></ul>
576112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Barang  Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan/mitigasi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi. Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam bentuk antara lain: <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;</li><li>- Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian;</li><li>- Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;</li><li>- Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;</li><li>- Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;</li><li>- Santunan duka cita; dan</li><li>- Santunan kecacatan.</li></ul> Akun ini dicatat dengan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.
576113	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Jasa  Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan/mitigasi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi. Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam bentuk antara lain: <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;</li><li>- Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian;</li><li>- Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;</li><li>- Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;</li><li>- Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;</li><li>- Santunan duka cita; dan</li><li>- Santunan kecacatan.</li></ul> Akun ini dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>58</b>	<b>BELANJA LAIN-LAIN</b>
<b>581</b>	<b>BELANJA LAIN-LAIN</b>
<b>5811</b>	<b>Belanja Lain-lain Dana Cadangan</b>
<b>58111</b>	<b>Belanja Lain-lain Cadangan I</b>
581111	Belanja Cadangan Umum
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran dalam rangka membentuk yang menggunakan dana cadangan umum.
581112	Belanja Cadangan Taggap Darurat (Dana Kontijensi)
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang sifatnya darurat. Bagian Anggaran 999.08 (BA Belanja Lainnya).
581113	Belanja Cadangan Dana Reboisasi
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembiayaan kegiatan dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana kehutanan.
581114	Belanja Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pembayaran selisih harga beras PNS/TNI/POLRI bila terjadi kenaikan pembelian harga beras Pemerintah kepada BULOG.
581115	Belanja Cadangan Kenaikan Harga Tanah ( <i>Land Capping</i> )
	Pengeluaran yang diberikan kepada Departemen Keuangan untuk membiayai kenaikan harga tanah pada saat pembebasan lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan tol.
581116	Belanja Cadangan Risiko Perubahan Asumsi Makro
	Digunakan untuk mencatat Belanja Cadangan Risiko Perubahan Asumsi Makro.
581117	Belanja Cadangan Stabilisasi Harga Pangan
	Digunakan untuk mencatat Belanja Cadangan Stabilisasi Harga Pangan.
581118	Belanja Cadangan Risiko Lifting
	Digunakan untuk mencatat Belanja Cadangan Risiko Lifting.
581119	Belanja Cadangan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Belanja Cadangan Lainnya.
<b>58112</b>	<b>Belanja Lain-lain Cadangan II</b>
581121	Belanja Cadangan Fiskal Lainnya (Risiko Kenaikan TTL Listrik)
	Digunakan untuk mencatat Belanja Cadangan Fiskal Lainnya (Risiko Kenaikan TTL Listrik).
581122	Belanja Cadangan Beras Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Belanja Cadangan Beras Pemerintah.
581123	Belanja Cadangan Benih Nasional
	Digunakan untuk mencatat Belanja Cadangan Benih Nasional.
<b>5812</b>	<b>Belanja Lain-lain Lembaga Non Kementerian</b>
<b>58121</b>	<b>Belanja Lain-lain Lembaga Non Kementerian</b>
581211	Belanja Lain-lain Lembaga Non Kementerian
	Digunakan untuk mencatat Belanja Lain-lain Lembaga Non Kementerian.
581212	Belanja Operasional Kegiatan SKK Migas
	Digunakan untuk mencatat Belanja Operasional Kegiatan SKK Migas.
<b>5813</b>	<b>Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>58131</b>	<b>Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN</b>
581311	Belanja Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi
	Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran kepada Bank/Pos Persepsi dalam rangka pelaksanaan Treasury Single Account (TSA).
581312	Belanja Jasa Surveyor
	Pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan survey yang dilakukan oleh pihak ketiga oleh Kementerian Negara/ Lembaga tertentu yang khusus dilakukan untuk keperluan tugas pokok fungsinya termasuk proses pengalihan ilmu/pembelajaran pada SDM K/L yang bersangkutan dalam rangka survei tersebut.
581314	Belanja Jasa Pelayanan Bank Operasional
	Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran kepada Bank Operasional atas layanan jasa yang telah diberikan dalam rangka kegiatan perbendaharaan (pengeluaran dan penerimaan anggaran) yang memakai Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan
581315	Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan
	Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran atas layanan jasa yang telah diberikan dalam rangka kegiatan perbendaharaan (pengeluaran dan penerimaan anggaran) yang memakai fasilitas PT Pos dan Giro serta pembayaran PPN BI RTGS/SWIFT, pembayaran bunga negatif, pembayaran PPN atas transaksi RTGS Bank Operasional, dan pembayaran imbalan jasa (fee) Bank Kustodian.
581316	Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog.
581319	Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN Lainnya.
<b>5814</b>	<b>Belanja Lain-lain BUN</b>
<b>58141</b>	<b>Belanja Lain-lain BUN</b>
581411	Belanja Iuran ke Lembaga Internasional
	Digunakan untuk mencatat Iuran Pemerintah ke Lembaga Internasional
581412	Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua
	Digunakan untuk mencatat Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua.
581413	Belanja Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga
	Digunakan untuk mencatat pembayaran terhadap klaim dari pihak ketiga.
581414	Belanja Dana Penunjang (PHLN)
	Digunakan untuk mencatat pelaksanaan kegiatan Pemda bersumber dari PHLN, Sesuai dengan KMK No. 35 Tahun 2002 tentang Tatacara Pemberian dan Penatausahaan PHLN kepada Pemda.
581415	Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN
	Digunakan untuk mencatat rugi selisih kurs terealisasi dalam pengelolaan rekening milik BUN.
581417	Belanja Kompensasi Kenaikan Harga BBM
	Pengeluaran yang digunakan untuk bantuan kepada masyarakat sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM.
581418	Belanja Konversi BBM ke BBG untuk Transportasi Umum
	Digunakan untuk mencatat Belanja Konversi BBM ke BBG untuk Transportasi Umum.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
581419	Belanja Lain-lain BUN Lainnya Digunakan untuk mencatat Belanja Lain-lain BUN Lainnya.
<b>58142</b>	<b>Belanja Lain-lain BUN II</b>
581421	Belanja Selisih Harga SBN Digunakan untuk mencatat Belanja Selisih Harga SBN.
581422	Belanja karena Selisih Kurs Satker Perwakilan RI/ Atase Teknis BA Belanja Lainnya Digunakan untuk mencatat Belanja karena Selisih Kurs Satker Perwakilan RI/ Atase Teknis yang dialokasikan dari BA 999.08 (Belanja Lainnya).
<b>5815</b>	<b>Belanja Lain-lain Tanggap Darurat</b>
<b>58151</b>	<b>Belanja Lain-lain Tanggap Darurat</b>
581511	Belanja Keperluan Mendesak/Tak Terduga Digunakan untuk mencatat Belanja Keperluan Mendesak/Tak Terduga.
581512	Belanja Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Digunakan untuk pengeluaran dalam rangka tanggap darurat penanggulangan bencana.
<b>5816</b>	<b>Belanja Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D</b>
<b>58161</b>	<b>Belanja Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D</b>
581611	Belanja Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D dan <i>Exotic Currency</i> Selisih negatif transaksi belanja dalam valuta asing antara antara resume tagihan/invoice/SPP dengan SP2D. Serta realisasi piutang dan utang dari kurs yang berbeda serta selisih dari <i>Exotic Currency</i> .
<b>5819</b>	<b>Belanja Lain-lain Lainnya</b>
<b>58191</b>	<b>Belanja Lain-lain Lainnya</b>
581911	Belanja Pemilu Digunakan untuk pengeluaran pembiayaan kegiatan dalam rangka pemilu/sidang tahunan.
581919	Belanja Lain-lain Digunakan untuk pengeluaran belanja lainnya.

**PENJELASAN URAIAN SEGMENT AKUN TRANSFER KE DAERAH  
DAN DANA DESA**

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>6</b>	<b>TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA</b>
<b>61</b>	<b>DANA BAGI HASIL</b>
<b>611</b>	<b>DANA BAGI HASIL PAJAK</b>
<b>6111</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan</b>
<b>61111</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan</b>
611111	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21
	Pengeluaran negara atas penyaluran penerimaan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian pendapatan Propinsi.
611112	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP
	Pengeluaran negara atas penyaluran penerimaan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian pendapatan Kabupaten/Kota.
<b>6112</b>	<b>Dana Bagi Hasil PBB</b>
<b>61121</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan</b>
611211	Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian propinsi sebesar 16,2 persen dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi.
611212	Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian Kabupaten/Kota sebesar 64,8 persen dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
611213	Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian daerah untuk Biaya Pemungutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi.
611214	Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian daerah untuk Biaya Pemungutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
611215	Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian Pemerintah Pusat dan dibagikan kepada seluruh Kabupaten/Kota.
611216	Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan sebagai Insentif PBB ke Kabupaten/Kota
	Digunakan untuk mencatat Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan sebagai Insentif PBB ke Kabupaten/Kota.
<b>612</b>	<b>DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM</b>
<b>6121</b>	<b>Dana Bagi Hasil-SDA Minyak Bumi</b>
<b>61211</b>	<b>Dana Bagi Hasil Minyak Bumi</b>
612111	Dana Bagi Hasil Minyak Bumi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Propinsi.
612112	Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0.5%
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
612113	Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus
	Digunakan untuk pembayaran tambahan Dana Bagi Hasil minyak bumi dalam rangka otonomi khusus NAD dan Papua.
<b>6122</b>	<b>Dana Bagi Hasil-SDA Gas Bumi</b>
<b>61221</b>	<b>Dana Bagi Hasil Gas Bumi</b>
612211	Dana Bagi Hasil Gas Bumi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Propinsi penghasil.
612212	Dana Bagi Hasil Gas Bumi 0.5%
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil.
612213	Tambahan Dana Bagi Hasil Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus
	Digunakan untuk pembayaran tambahan dana bagi hasil gas bumi dalam rangka otonomi khusus NAD dan Papua.
<b>6123</b>	<b>Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Umum</b>
<b>61231</b>	<b>Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Umum</b>
612311	Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil Iuran Tetap sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil.
612312	Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil Royalti sebesar 64 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil.
<b>6124</b>	<b>Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Panas Bumi</b>
<b>61241</b>	<b>Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi</b>
612411	Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil Iuran Tetap sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil.
612412	Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil Iuran Tetap sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil.
612413	Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Produksi (Royalti)
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil Royalti sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil.
<b>6125</b>	<b>Dana Bagi Hasil-SDA Kehutanan</b>
<b>61251</b>	<b>Dana Bagi Hasil Kehutanan</b>
612511	Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil IHPH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil.
612512	Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil IHPH sebesar 64% kepada Kabupaten/Kota penghasil.
612513	Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi
	Pengeluaran DAK yang bersumber dari dana reboisasi dan digunakan untuk kabupaten/kota.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>6126</b>	<b>Dana Bagi Hasil Perikanan</b>
<b>61261</b>	<b>Dana Bagi Hasil Perikanan</b>
612611	Dana Bagi Hasil Perikanan
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil perikanan sebesar 80% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
<b>613</b>	<b>DANA BAGI HASIL CUKAI</b>
<b>6131</b>	<b>Dana Bagi Hasil Cukai</b>
<b>61311</b>	<b>Dana Bagi Hasil Cukai</b>
613111	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
	Digunakan untuk pembayaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Propinsi sesuai dengan UU tentang APBN dan PP tentang Dana Perimbangan.
<b>62</b>	<b>DANA ALOKASI UMUM</b>
<b>621</b>	<b>DANA ALOKASI UMUM</b>
<b>6211</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>
<b>62111</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>
621111	Dana Alokasi Umum
	Pengeluaran Dana Alokasi Umum yang merupakan bagian Propinsi.
621114	Koreksi Dana Alokasi Umum
	Digunakan untuk mencatat Koreksi Dana Alokasi Umum.
<b>63</b>	<b>DANA ALOKASI KHUSUS FISIK</b>
<b>631</b>	<b>DANA ALOKASI KHUSUS FISIK</b>
<b>6311</b>	<b>Dana Alokasi Khusus Reguler</b>
<b>63111</b>	<b>Dana Alokasi Khusus</b>
631111	Dana Alokasi Khusus
	Pengeluaran negara untuk penyaluran Dana Alokasi Khusus.
631113	Koreksi Dana Alokasi Khusus
	Digunakan untuk mencatat Koreksi Dana Alokasi Khusus.
<b>6312</b>	<b>Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan</b>
<b>63121</b>	<b>Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan</b>
631211	Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah
	Pengeluaran negara untuk penyaluran Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah
631212	Dana Alokasi Khusus Penugasan
	Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik yang digunakan untuk mencapai sasaran prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah, dengan menu dan lokasi yang terbatas sesuai dengan UU APBN dan Perpres Rincian APBN.
<b>6313</b>	<b>Dana Alokasi Khusus Affirmasi</b>
<b>63131</b>	<b>Dana Alokasi Khusus Affirmasi</b>
631311	Dana Alokasi Khusus Affirmasi
	Pengeluaran negara untuk penyaluran Dana Alokasi Khusus Affirmasi
<b>6314</b>	<b>Tambahan DAK Fisik</b>
<b>63141</b>	<b>Tambahan DAK Fisik</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
631411	Tambahan DAK Fisik
	Digunakan untuk mencatat tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik yang antara lain terdiri dari Penyelesaian DAK Fisik 2016, Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Jalan, Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Irigasi.
<b>64</b>	<b>DANA OTONOMI KHUSUS, DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DAN DANA INSENTIF DAERAH</b>
<b>641</b>	<b>DANA OTONOMI KHUSUS</b>
<b>6411</b>	<b>Dana Otonomi Khusus Aceh</b>
<b>64111</b>	<b>Dana Otonomi Khusus Aceh</b>
641111	Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
	Pengeluaran untuk pelaksanaan otonomi khusus untuk NAD.
<b>6412</b>	<b>Dana Otonomi Khusus Papua</b>
<b>64121</b>	<b>Dana Otonomi Khusus Papua</b>
641211	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua
	Pengeluaran untuk pelaksanaan otonomi khusus untuk Papua, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.
641212	Dana Tambahan Infrastruktur Papua
	Pengeluaran untuk dana otonomi khusus tambahan infrastruktur untuk Papua.
<b>6413</b>	<b>Dana Otonomi Khusus Papua Barat</b>
<b>64131</b>	<b>Dana Otonomi Khusus Papua Barat</b>
641311	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
	Pengeluaran untuk pelaksanaan otonomi khusus untuk Papua Barat.
641312	Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat
	Pengeluaran untuk dana otonomi khusus tambahan infrastruktur untuk Papua Barat.
<b>642</b>	<b>DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b>
<b>6421</b>	<b>Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta</b>
<b>64211</b>	<b>Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta</b>
642111	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
	Digunakan untuk mencatat transfer Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan 124/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
<b>643</b>	<b>DANA INSENTIF DAERAH</b>
<b>6431</b>	<b>Dana Insentif Daerah</b>
<b>64311</b>	<b>Dana Insentif Daerah</b>
643111	Dana Insentif Daerah
	Digunakan untuk mencatat Dana Insentif Daerah.
<b>65</b>	<b>DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK</b>
<b>654</b>	<b>DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK</b>
<b>6541</b>	<b>Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus</b>
<b>65411</b>	<b>Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	<b>Daerah Khusus</b>
654111	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)
	Digunakan untuk mencatat Transfer Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG).
654112	Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus
	Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus non fisik yang memberikan kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus yaitu desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal menurut indeks desa membangun dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
<b>6542</b>	<b>Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah</b>
<b>65421</b>	<b>Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah</b>
654211	Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
	Pengeluaran negara untuk penyaluran dana untuk Guru PNSD dan Tambahan Tunjangan Guru PNSD.
<b>6543</b>	<b>Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)</b>
<b>65431</b>	<b>Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)</b>
654311	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
	Digunakan untuk mencatat Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
<b>6545</b>	<b>Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)</b>
<b>65451</b>	<b>Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)</b>
654511	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)
	Digunakan untuk mencatat Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2).
<b>6546</b>	<b>Dana Darurat</b>
<b>65461</b>	<b>Dana Darurat</b>
654611	Dana Darurat
	Digunakan untuk mencatat Dana Darurat.
<b>6547</b>	<b>Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana</b>
<b>65471</b>	<b>Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana</b>
654711	Dana Bantuan Operasional Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat transfer Dana Bantuan Operasional Kesehatan
654712	Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana
	Digunakan untuk mencatat transfer Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana
<b>6548</b>	<b>Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan dan Kependudukan</b>
<b>65481</b>	<b>Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan dan Kependudukan</b>
654811	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi
	Digunakan untuk mencatat transfer Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi
654812	Dana Peningkatan Kapasitas Usaha Kecil Menengah

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat transfer Dana Peningkatan Kapasitas Usaha Kecil Menengah
654813	Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan
	Digunakan untuk mencatat transfer Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan
654814	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
	Digunakan untuk menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
<b>6549</b>	<b>Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)</b>
<b>65491</b>	<b>Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)</b>
654911	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)
	Digunakan untuk mencatat Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)
<b>66</b>	<b>DANA DESA</b>
<b>662</b>	<b>DANA DESA</b>
<b>6621</b>	<b>Dana Desa</b>
<b>66211</b>	<b>Dana Desa</b>
662111	Dana Desa
	Digunakan untuk mencatat penyaluran anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## **PENJELASAN URAIAN SEGMENT AKUN PEMBIAYAAN**

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>7</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>
<b>71</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>
<b>711</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI</b>
<b>7111</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan</b>
<b>71111</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan</b>
	Penerimaan yang berasal dari pinjaman pemerintah pusat dari Bank dalam negeri.
711111	Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)
	Penerimaan dari Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun sebelumnya dan besar penggunaan dalam pembiayaan dengan persetujuan DPR.
711112	Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Dana Investasi
	Penerimaan RKUN 502.000.000 yang berasal dari rekening dana investasi
711113	Penerimaan Pembiayaan dari Rekening BUN untuk Obligasi
	Penerimaan RKUN 502.000.000 yang berasal dari rekening BUN untuk Obligasi
711114	Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Pembangunan Hutan
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Pembangunan Hutan.
<b>71112</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Dana Moratorium</b>
711121	Penerimaan Pembiayaan dari dana eks moratorium pokok untuk Cadangan Aceh
	Penerimaan dari cadangan moratorium Aceh
<b>7112</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan</b>
<b>71121</b>	<b>Penerimaan Kembali Investasi</b>
711211	Penerimaan Hasil Privatisasi
	Digunakan untuk mencatat penerimaan dari hasil penjualan saham.
711219	Penerimaan Kembali Investasi Lainnya
	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali investasi selain yang berasal dari privatisasi.
<b>71122</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri -Pinjaman Dalam Negeri</b>
711221	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Daerah.
711222	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN.
711223	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah.
<b>7113</b>	<b>Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi</b>
<b>71131</b>	<b>Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi</b>
711311	Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi
	Penerimaan dari penjualan aset restrukturisasi perbankan/ pengembalian dana talangan dari BPPN
711312	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks. BPPN
	Penerimaan dari penjualan/ penyelesaian aset yang selama ini dimiliki oleh BPPN
711313	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL).
<b>7114</b>	<b>Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara</b>
<b>71141</b>	<b>Penerimaan dari Penjualan Surat Perpendaharaan Negara</b>
711411	Penerimaan Penerbitan / Penjualan Surat Perpendaharaan Negara
	Penerimaan dari penerbitan/penjualan Surat Perpendaharaan Negara yang jatuh tempo dalam periode tidak lebih dari satu tahun.
<b>71142</b>	<b>Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara</b>
711421	Penerimaan Penerbitan / Penjualan Obligasi Negara
	Penerimaan dari penjadwalan kembali obligasi jangka panjang. Karena tidak ada penerimaan sesungguhnya, akun ini digunakan hanya untuk memungkinkan pelaporan terhadap utang bunga obligasi yang dijadwalkan kembali.
711422	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara
	Penerimaan bunga akrual obligasi negara jangka panjang dari obligor yang diterima pada saat penjualan obligasi dan akan dibayarkan kembali kepada obligor pada saat jatuh tempo bunga obligasi).
<b>71143</b>	<b>Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek</b>
711431	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek
	Penerimaan dari penerbitan atau penjualan Surat Berharga Syariah Negara yang jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun di bursa dalam negeri.
<b>71144</b>	<b>Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang</b>
711441	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka panjang
	Penerimaan dari penerbitan atau penjualan Surat Berharga Syariah Negara yang jatuh tempo lebih dari satu tahun di bursa dalam negeri.
711442	Penerimaan Imbalan Dibayar di muka Surat Berharga Syariah Negara Jangka panjang
	Penerimaan dari imbalan dibayar di muka Surat Berharga Syariah Negara yang jatuh tempo lebih dari satu tahun di bursa dalam negeri.
<b>71145</b>	<b>Penerimaan dari Penjualan Surat Perpendaharaan Negara Syariah</b>
711451	Penerimaan dari Penjualan Surat Perpendaharaan Negara Syariah
<b>71146</b>	<b>Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dalam Rangka Pembiayaan Proyek Melalui SBSN PBS</b>
711461	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dalam Rangka Pembiayaan Proyek Melalui Surat Berharga Syariah Negara - PBS
	Digunakan untuk mencatat penerimaan pembiayaan yang dananya berasal dari penerbitan SBSN Project Based Sukuk.
<b>7115</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir</b>
<b>71151</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir</b>
711511	Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir.
<b>7116</b>	<b>Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara-Valuta Asing</b>
<b>71161</b>	<b>Penerimaan Obligasi Negara - Valuta Asing</b>
711611	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara-Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara-

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Valas.
711612	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara-Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Utang Bunga Akrual Obligasi Negara-Valas.
<b>71162</b>	<b>Penerimaan Surat Perpendaharaan Negara-Valuta Asing</b>
711621	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perpendaharaan Negara-Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perpendaharaan Negara-Valas.
<b>71163</b>	<b>Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri-Jangka Pendek</b>
711631	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN Valas-Jangka Pendek
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN Valas-Jangka Pendek.
<b>71164</b>	<b>Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri-Jangka Panjang</b>
711641	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN Valas-Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN Valas-Jangka Panjang.
711642	Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka SBSN Valas-jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka SBSN Valas-jangka Panjang.
<b>71165</b>	<b>Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dalam Rangka Pembiayaan Proyek melalui SBSN Valas PBS</b>
711651	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dalam Rangka Pembiayaan Proyek melalui SBSN Valas PBS
	Digunakan untuk mencatat penerimaan pembiayaan yang dananya berasal dari penerbitan SBSN Valas Project Based Sukuk.
<b>712</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI</b>
<b>7121</b>	<b>Penarikan Pinjaman Tunai</b>
<b>71213</b>	<b>Penarikan Pinjaman Tunai</b>
712131	Penarikan Pinjaman Tunai
	Digunakan untuk mencatat penerimaan pembiayaan yang berasal dari Penarikan Pinjaman Tunai.
<b>7122</b>	<b>Penarikan Pinjaman Kegiatan</b>
<b>71226</b>	<b>Penarikan Pinjaman Kegiatan</b>
712261	Penarikan Pinjaman Kegiatan
	Digunakan untuk mencatat penerimaan pembiayaan yang berasal dari Penarikan Pinjaman Kegiatan.
<b>713</b>	<b>PENERIMAAN DARI PENJADWALAN KEMBALI POKOK UTANG LUAR NEGERI</b>
<b>7131</b>	<b>Penerimaan dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri</b>
<b>71311</b>	<b>Penerimaan Pinjaman Tunai dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri</b>
713111	Penerimaan Pinjaman Tunai dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
	Penerimaan dari Penjadwalan kembali pokok utang luar negeri dari pinjaman tunai. Akun 713111 menjadi penyeimbang akun 723111.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>71312</b>	<b>Penerimaan Pinjaman Kegiatan dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri</b>
713121	Penerimaan Pinjaman Kegiatan dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
	Penerimaan dari Penjadwalan kembali pokok utang luar negeri dari pinjaman kegiatan. Akun 1352/713121 menjadi penyeimbang akun 723211.
<b>714</b>	<b>PENERIMAAN DARI PENJADWALAN KEMBALI BUNGA UTANG LUAR NEGERI</b>
<b>7141</b>	<b>Penerimaan dari Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri</b>
<b>71411</b>	<b>Penjadwalan Kembali Bunga Utang Pinjaman Luar Negeri</b>
714111	Penerimaan Pembiayaan dari Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
	Penerimaan dari Penjadwalan kembali bunga utang luar negeri. Karena tidak ada penerimaan sesungguhnya, akun ini digunakan hanya untuk memungkinkan pelaporan terhadap utang yang dijadualkan kembali. Akun 714111 menjadi penyeimbang akun 723311.
<b>715</b>	<b>PENERIMAAN CICILAN PENGEMBALIAN PEMBERIAN PINJAMAN</b>
<b>7151</b>	<b>Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri</b>
<b>71511</b>	<b>Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri</b>
715111	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada Pemda
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman RDI/RPD dari Pemda
715112	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada BUMD
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman RDI/RPD dari BUMD
715113	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman RDI/RPD dari BUMN
715114	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada Non Pemerintah
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman RDI/RPD dari Lembaga Non Pemerintah
<b>7152</b>	<b>Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri</b>
<b>71521</b>	<b>Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan</b>
715211	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan
715212	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada BUMD Tahun Anggaran Berjalan
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada BUMD Tahun Anggaran Berjalan
715213	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan
715214	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri Non Pemerintah

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri Non Pemerintah.
<b>71522</b>	<b>Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri tahun Anggaran Yang lalu</b>
715221	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu
715222	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada BUMD Tahun Anggaran Yang Lalu
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada BUMD Tahun Anggaran Yang Lalu
715223	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN Tahun Anggaran Yang Lalu
	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu
<b>717</b>	<b>Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah</b>
<b>7171</b>	<b>Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah</b>
<b>71711</b>	<b>Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah</b>
717111	Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah
717112	Penerimaan Pembiayaan Atas Investasi Pemerintah Untuk Pembiayaan Dana Geothermal
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pembiayaan Atas Investasi Pemerintah Untuk Pembiayaan Dana Geothermal
<b>7172</b>	<b>Penerimaan yang Berasal dari Penjaminan Pemerintah</b>
<b>71721</b>	<b>Penerimaan yang Berasal dari Penjaminan Pemerintah</b>
717211	Penerimaan Cicilan atas Penjaminan Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat penerimaan cicilan atas Piutang Penjaminan Pinjaman oleh BUMN/BUMD/Pemda.
717212	Penerimaan atas Pencairan Dana Cadangan Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat penerimaan atas pencairan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah.
717213	Penerimaan atas Pengembalian Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat penerimaan atas Pengembalian Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah.
<b>7173</b>	<b>Penerimaan yang Berasal dari Manajemen Aset Negara</b>
<b>71731</b>	<b>Penerimaan yang Berasal dari Manajemen Aset Negara</b>
717311	Penerimaan Kembali Modal Awal Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara
	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali modal awal pembentukan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara.
<b>719</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN</b>
<b>7192</b>	<b>Penerimaan Piutang Yang Belum Direkonsiliasi</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>71921</b>	<b>Penerimaan Piutang Yang Belum Direkonsiliasi</b>
719211	Penerimaan Piutang Yang Belum Diidentifikasi
	Digunakan untuk mencatat penerimaan piutang yang belum diidentifikasi siapa debiturnya.
719212	Penerimaan Selisih Piutang (on Account)
	Digunakan untuk mencatat penerimaan atas selisih piutang.
719213	Penerimaan Piutang Yang Belum Disesuaikan
	Digunakan untuk mencatat penerimaan piutang yang belum dilakukan penyesuaian.
<b>7193</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan atas Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo</b>
<b>71931</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan atas Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo</b>
719311	Penerimaan Pembiayaan atas Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
	Digunakan untuk mencatat pengembalian pinjaman PT. Lapindo Brantas Inc./PT. Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah atas pembayaran langsung kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak Lumpur Sidoarjo.
<b>72</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>
<b>721</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI</b>
<b>7211</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan</b>
<b>72111</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan</b>
721111	Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dari Sektor Perbankan
	Pembayaran Pinjaman/Kredit Jangka Pendek dan Uang Muka dari bank-bank dalam negeri.
721112	Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan
	Pembayaran pinjaman kepada Bank dalam negeri.
<b>72112</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan untuk Moratorium</b>
721121	Pengeluaran Pembiayaan Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh
	Pengeluaran pembiayaan yang berasal dari Eks Moratorium untuk Cadangan Aceh
<b>7212</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan</b>
<b>72121</b>	<b>Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi</b>
721211	Pengeluaran untuk Program Restrukturisasi
	Pengeluaran untuk pembiayaan program restrukturisasi perbankan/dana talangan kepada BPPN
<b>72122</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri-Pengembangan Pendidikan Nasional</b>
721221	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri-Pengembangan Pendidikan Nasional
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri-Pengembangan Pendidikan Nasional.
<b>72123</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri</b>
721231	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari Pemda

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari Pemda.
721232	Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN.
721233	Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah.
<b>7213</b>	<b>Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara</b>
<b>72131</b>	<b>Pengeluaran Pelunasan Surat Perpendaharaan Negara</b>
721311	Pengeluaran Pelunasan SPN
	Pelunasan/pembayaran kembali SPN.
721312	Pengeluaran Pelunasan SPN melalui Pembelian Kembali
	Pengeluaran berkaitan dengan penjadwalan kembali SPN. Karena tidak ada pengeluaran sesungguhnya, akun ini digunakan hanya untuk memungkinkan pelaporan terhadap utang yang dijadualkan kembali.
<b>72132</b>	<b>Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara</b>
721321	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara
	Pengeluaran karena pelunasan/pembayaran kembali Obligasi Negara jangka panjang.
721322	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara melalui Pembelian Kembali
	Pelunasan Obligasi Negara jangka panjang yang lewat pembelian kembali.
721324	Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara
	Pembayaran bunga akrual obligasi negara jangka panjang kepada obligor (pembeli obligasi pemerintah) pada saat jatuh tempo bunga obligasi.
<b>72133</b>	<b>Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Jangka Pendek</b>
721331	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Jangka Pendek
	Pengeluaran untuk pelunasan Surat Berharga Syariah Negara jangka pendek.
721332	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali
	Pelunasan Surat Berharga Syariah negara jangka pendek melalui pembelian kembali (buyback)
<b>72134</b>	<b>Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Jangka Panjang</b>
721341	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) – Jangka Panjang
	Pengeluaran untuk pelunasan SBSN jangka panjang.
721342	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) – Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali
	Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara jangka panjang melalui pembelian kembali (buyback).
721343	Pengeluaran Pembayaran Imbalan dibayar dimuka SBSN-Jangka Panjang
	Pengeluaran berkaitan dengan pembelian kembali (buyback) Imbalan dibayar Di muka Surat Berharga Syariah Negara - Jangka panjang.
<b>72135</b>	<b>Pengeluaran Pelunasan Surat Perpendaharaan Negara-Syariah</b>
721351	Pengeluaran Pelunasan Surat Perpendaharaan Negara-Syariah

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara-Syariah.
721352	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara-Syariah-melalui Pembelian Kembali
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara-Syariah-melalui Pembelian Kembali.
<b>7214</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir</b>
<b>72141</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir</b>
721411	Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir.
<b>7215</b>	<b>Pengeluaran untuk Pelunasan Surat Berharga Negara - Valuta Asing</b>
<b>72151</b>	<b>Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara - Valas</b>
721511	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara - Valas
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara - Valas.
721512	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Valas - melalui Pembelian Kembali
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Valas - melalui Pembelian Kembali.
721513	Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara – Valas
	Digunakan untuk mencatat Pembayaran Utang Bunga Akrual Obligasi Negara - Valas
<b>72152</b>	<b>Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Valas</b>
721521	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Valas
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Valas.
721522	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Valas melalui Pembelian Kembali
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Valas melalui Pembelian Kembali.
<b>72153</b>	<b>Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Pendek</b>
721531	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Pendek
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Pendek.
721532	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Valas melalui Pembelian Kembali
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Valas melalui Pembelian Kembali.
<b>72154</b>	<b>Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang</b>
721541	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang.
721542	Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas-Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas-Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali.
721543	Pembayaran Imbalan Dibayar Di Muka Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Pembayaran Imbalan Dibayar Di Muka Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang.
<b>722</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI</b>
<b>7221</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Tunai</b>
<b>72211</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Tunai</b>
722113	Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Tunai
	Pembayaran kembali utang luar negeri jangka panjang dari sumber pinjaman tunai yang jatuh tempo selama tahun anggaran.
<b>7222</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Kegiatan</b>
<b>72221</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Kegiatan</b>
722213	Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Kegiatan
	Pembayaran kembali utang luar negeri jangka panjang dari sumber pinjaman kegiatan yang jatuh tempo selama tahun anggaran.
<b>7224</b>	<b>Pengembalian Pinjaman</b>
<b>72241</b>	<b>Pengembalian Pinjaman</b>
722411	Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran <i>Ineligible</i>
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran <i>Ineligible</i> pada BA 999.01 (Pengelolaan Utang Pemerintah).
<b>723</b>	<b>PELUNASAN POKOK UTANG LUAR NEGERI MELALUI PENJADWALAN KEMBALI</b>
	Pengeluaran yang berasal dari Penjadwalan kembali utang luar-negeri jangka-panjang yang jatuh tempo selama tahun anggaran tetapi tidak dibayar kembali dengan uang. MAK-MAK di bawah sub kelompok ini hanya disediakan untuk memungkinkan pelaporan terhadap utang luar negeri melalui penjadwalan kembali.
<b>7231</b>	<b>Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadwalan Kembali – Pinjaman Tunai</b>
	Pengeluaran berkaitan dengan Penjadwalan kembali utang luar negeri dari pinjaman tunai.
<b>72311</b>	<b>Pengeluaran Penjadwalan Kembali Utang LN Pinjaman Tunai</b>
723111	Pengeluaran Penjadwalan Kembali Utang LN Pinjaman Tunai
	Pengeluaran dari Penjadwalan kembali utang LN – pinjaman tunai.
<b>7232</b>	<b>Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadwalan Kembali – Pinjaman Kegiatan</b>
<b>72321</b>	<b>Pengeluaran Penjadwalan Kembali Utang LN Pinjaman Kegiatan</b>
723211	Pengeluaran Penjadwalan Kembali Utang LN Pinjaman Kegiatan
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Penjadwalan Kembali Utang LN Pinjaman Keigatan.
<b>7233</b>	<b>Pelunasan Bunga Utang Luar Negeri melalui Penjadwalan Kembali – Pinjaman Kegiatan</b>
<b>72331</b>	<b>Pengeluaran Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri</b>
723311	Pengeluaran Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri
<b>724</b>	<b>PENYERTAAN MODAL NEGARA</b>
<b>7241</b>	<b>Penyertaan Modal Negara pada BUMN</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>72411</b>	<b>Penyertaan Modal Negara pada BUMN</b>
724111	PMN untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
	Penyertaan modal negara pada BUMN
724112	Dana Investasi Pemerintah untuk Restrukturisasi BUMN
	Digunakan untuk mencatat Dana Investasi Pemerintah untuk Restrukturisasi BUMN.
<b>7242</b>	<b>Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional</b>
<b>72421</b>	<b>Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional</b>
724211	Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional
	Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional.
<b>7244</b>	<b>Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah</b>
<b>72441</b>	<b>Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah</b>
724411	Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah
	Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah.
<b>7249</b>	<b>Penyertaan Modal Negara Lainnya</b>
<b>72491</b>	<b>Penyertaan Modal Negara Lainnya</b>
724911	Penyertaan Modal Negara Lainnya
	Penyertaan modal pemerintah selain pada BUMN dan Badan Internasional.
724912	Penyertaan Modal Negara SMF
	Penyertaan modal negara pada SMF
724913	Penyertaan Modal Negara ke Bank Indonesia
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembiayaan dalam rangka penyertaan modal negara pada Bank Indonesia
<b>725</b>	<b>RDI/RPD</b>
<b>7251</b>	<b>Pemberian Pinjaman Dalam Negeri RDI/RPD</b>
<b>72511</b>	<b>Pemberian Pinjaman Dalam Negeri</b>
725111	Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada Daerah
	Investasi pemerintah pusat pada pemerintah daerah.
725112	Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada BUMD
	Investasi pemerintah pusat pada BUMD.
725113	Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada BUMN
	Investasi pemerintah pusat pada BUMN.
725114	Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada Non Pemerintah
	Investasi pemerintah pusat pada selain Pemda, BUMN, BUMD.
<b>7252</b>	<b>Pemberian Pinjaman Luar Negeri</b>
<b>72521</b>	<b>Pemberian Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Berjalan</b>
725211	Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan
	Pemberian pinjaman LN kepada Daerah tahun anggaran berjalan.
725212	Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMD Tahun Anggaran Berjalan
	Pemberian pinjaman LN kepada BUMD tahun anggaran berjalan.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
725213	Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan Pemberian pinjaman LN kepada BUMN tahun anggaran berjalan.
<b>72522</b>	<b>Pemberian Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu</b>
725221	Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Th. Anggaran Yang Lalu Pemberian pinjaman LN kepada daerah tahun anggaran yang lalu.
725222	Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMD Tahun Anggaran Yang Lalu Pemberian pinjaman LN kepada BUMD tahun anggaran yang lalu.
725223	Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Yang Lalu Pemberian pinjaman LN kepada BUMN tahun anggaran yang lalu.
<b>726</b>	<b>DUKUNGAN INFRASTRUKTUR</b>
<b>7261</b>	<b>Dukungan Infrastruktur</b>
<b>72611</b>	<b>Dukungan Infrastruktur</b>
726111	Dukungan Infrastruktur Digunakan untuk mencatat Dukungan Infrastruktur.
<b>727</b>	<b>PENGELUARAN INVESTASI PEMERINTAH</b>
<b>7271</b>	<b>Investasi Pemerintah</b>
<b>72711</b>	<b>Investasi Pemerintah</b>
727111	Investasi Pemerintah Digunakan untuk mencatat pengeluaran investasi pemerintah melalui BLU PIP sesuai PP No.1/2008 tentang Investasi Pemerintah dan Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan.
727112	Investasi Pemerintah untuk Pembiayaan Dana Geothermal Digunakan untuk mencatat Investasi Pemerintah untuk Pembiayaan Dana Geothermal.
<b>72712</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah</b>
727121	Pengeluaran Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah.
<b>72713</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan untuk Manajemen Aset Negara</b>
727131	Pengeluaran Pembiayaan untuk Modal Awal Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembiayaan investasi pemerintah dalam rangka pembentukan BLU LMAN sebagai modal awal.
727132	Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembiayaan investasi Pemerintah dalam rangka pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
<b>7272</b>	<b>Investasi Pemerintah untuk Kemudian Dipinjamkan</b>
<b>72721</b>	<b>Investasi Pemerintah untuk Kemudian Dipinjamkan kepada BUMN</b>
727211	Investasi Pemerintah untuk Kemudian Dipinjamkan kepada BUMN Digunakan untuk mencatat Investasi Pemerintah untuk Kemudian Dipinjamkan kepada BUMN.
<b>7273</b>	<b>Investasi Pemerintah dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah</b>
<b>72731</b>	<b>Investasi Pemerintah dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
727311	Pembayaran Penjaminan Pemerintah kepada Pihak Ketiga/ Kreditur
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pemerintah dalam rangka pembayaran penjaminan pinjaman BUMN/BUMD/Pemda kepada kreditur.
727312	Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pemerintah dalam rangka pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah
<b>729</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN</b>
<b>7292</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan untuk Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo</b>
<b>72921</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan untuk Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo</b>
729211	Pengeluaran Pembiayaan untuk Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
	Digunakan untuk mencatat dana yang disiapkan Pemerintah sebagai pelunasan pembayaran langsung kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak Lumpur Sidoarjo, sebagai pinjaman dari Pemerintah kepada PT. Lapindo Brantas Inc./PT. Minarak Lapindo Jaya.
<b>79</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN</b>
<b>798</b>	<b>SUSPENSE PEMBIAYAAN</b>
<b>7981</b>	<b>Suspense Penerimaan Pembiayaan</b>
<b>79811</b>	<b>Suspense Penerimaan Pembiayaan</b>
798111	Suspense Penerimaan Pembiayaan
	Digunakan untuk mencatat selisih Penerimaan Pembiayaan antara Kementerian/Lembaga dengan BUN.
<b>79812</b>	<b>Suspense Pengeluaran Pembiayaan</b>
798121	Suspense Pengeluaran Pembiayaan
	Digunakan untuk mencatat selisih Pengeluaran Pembiayaan antara Kementerian/Lembaga dengan BUN.

## **PENJELASAN URAIAN SEGMENTARIS AKUN TRANSITORIS**

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>8</b>	<b>NON ANGGARAN</b>
<b>81</b>	<b>PENERIMAAN NON ANGGARAN</b>
<b>811</b>	<b>PENERIMAAN NON ANGGARAN PFK</b>
<b>8111</b>	<b>Penerimaan PFK 10 % Gaji</b>
<b>81111</b>	<b>Penerimaan PFK 10 % Gaji</b>
811113	Penerimaan Setoran/Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji PNS Daerah  Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji PNS Daerah
811114	Penerimaan Setoran/Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 8% Gaji PNS Daerah  Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 8% Gaji PNS Daerah
<b>81113</b>	<b>Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10%</b>
811131	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan  Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan yang berasal dari PNS Pusat, POLRI/PNS POLRI, dan TNI/PNS Kemhan TNI
811132	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji PNS Pusat  Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji PNS Pusat.
811133	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji Polri dan PNS Polri  Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji Polri dan PNS Polri.
811134	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji TNI dan PNS Kemhan  Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji TNI dan PNS Kemhan.
811135	Penerimaan Setoran/Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji PNS Pusat  Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan yang berasal dari PNS Pusat.
811136	Penerimaan Setoran/Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Polri dan PNS Polri.  Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan yang berasal dari Anggota Polri dan PNS Polri.
811137	Penerimaan Setoran/Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji TNI dan PNS Kemhan  Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan yang berasal dari Prajurit TNI dan PNS Kemhan.
<b>81114</b>	<b>Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS yang Berasal dari APBN</b>
811141	Penerimaan PFK 2 % Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS yang Berasal dari APBN  Digunakan untuk mencatat Penerimaan PFK 2 % Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS-APBN.
811142	Penerimaan Setoran/Potongan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Kerja Pegawai Pemerintah Non PNS-APBN
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potongan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja Pegawai Pemerintah Non PNS yang Berasal dari APBN.
<b>81115</b>	<b>Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS yang Berasal dari APBD</b>
811151	Penerimaan PFK 2 % Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS-APBD
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan PFK 2 % Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS yang Berasal dari APBD.
811152	Penerimaan Setoran/Potongan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja Pegawai Pemerintah Non PNS-APBD
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potongan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja Pegawai Pemerintah Non PNS yang Berasal dari APBD.
<b>81116</b>	<b>Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Jaminan Kesehatan Pejabat Negara</b>
811161	Penerimaan PFK 2 % Iuran Jaminan Kesehatan Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan PFK 2 % Iuran Jaminan Kesehatan Pejabat Negara.
811162	Penerimaan Setoran/Potongan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potongan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja Pejabat Negara.
<b>81117</b>	<b>Penerimaan Setoran PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pihak Ketiga</b>
811171	Penerimaan Setoran PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan dari PT. Taspen
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan dari PT. Taspen
811172	Penerimaan Setoran PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan dari PT. Asabri
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan dari PT. Asabri
<b>81118</b>	<b>Penerimaan Setoran / Potongan Iuran Jaminan Kesehatan Pejabat Daerah</b>
811181	Penerimaan Setoran/Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD.
811182	Penerimaan Setoran/Potongan 3% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potongan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
<b>8112</b>	<b>Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan</b>
<b>81121</b>	<b>Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan</b>
811212	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji terusan PNS Daerah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji terusan PNS Daerah
<b>8113</b>	<b>Penerimaan PFK Beras BULOG</b>
<b>81131</b>	<b>Penerimaan PFK Beras BULOG</b>
811311	Penerimaan Setoran / Potongan PFK Bulog PNS Pusat

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran / Potongan PFK Bulog PNS Pusat
811312	Penerimaan Setoran / Potongan PFK Bulog Polri & PNS POLRI
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran / Potongan PFK Bulog Polri & PNS POLRI
811313	Penerimaan Setoran/ Potongan PFK Bulog TNI & PNS Dephan
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/ Potongan PFK Bulog TNI & PNS Dephan
<b>8114</b>	<b>Penerimaan PFK 3 % Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah</b>
<b>81141</b>	<b>Penerimaan PFK 3 % Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah</b>
811411	Penerimaan Setoran PFK 3 % Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Propinsi
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potongan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja Pejabat Negara.
811412	Penerimaan Setoran PFK 3 % Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Kabupaten/Kota
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran PFK 3 % Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Kabupaten/Kota.
<b>8115</b>	<b>Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT</b>
<b>81151</b>	<b>Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT</b>
811511	Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
<b>8117</b>	<b>Penerimaan PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP Migas)</b>
<b>81171</b>	<b>Penerimaan PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP Migas)</b>
811711	Penerimaan Setoran PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP Migas)
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP Migas)
<b>8118</b>	<b>Penerimaan PFK Penutupan Rekening</b>
<b>81181</b>	<b>Penerimaan PFK Penutupan Rekening</b>
811811	Penerimaan Setoran Penutupan Rekening
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran Penutupan Rekening
<b>8119</b>	<b>Penerimaan PFK Lain-lain</b>
<b>81191</b>	<b>Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS</b>
811911	Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Pusat
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Pusat
811912	Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Daerah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Daerah
<b>81192</b>	<b>Penerimaan Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu</b>
811921	Penerimaan Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Tahun Anggaran Yang Lalu.
<b>812</b>	<b>PENERIMAAN WESEL PEMERINTAH</b>
<b>8121</b>	<b>Penerimaan Wesel Pemerintah</b>
<b>81211</b>	<b>Penerimaan Wesel Pemerintah</b>
812111	Penerimaan potongan WP dari SPM KPPN
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan potongan WP dari SPM KPPN
812112	Penerimaan Setoran untuk penerbitan WP
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran untuk penerbitan WP
<b>813</b>	<b>PENERIMAAN REIMBURESEMENT DALAM RANGKA PREFINANCING (PP) DAN PFK BUN LAINNYA</b>
<b>8131</b>	<b>Penerimaan Reimburesement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya</b>
<b>81311</b>	<b>Penerimaan Reimburesement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya</b>
813116	Penggantian Dana dari REKSUS ke Rekening BUN karena Prefinancing REKSUS
	Digunakan untuk mencatat Penggantian Dana dari REKSUS ke Rekening BUN karena Prefinancing REKSUS
813117	Penggantian Dana dari Pihak ketiga ke Rekening BUN atas pembayaran kepada PPHLN (Karena adanya pembayaran <i>ineligible</i> )
	Digunakan untuk mencatat Penggantian Dana dari Pihak ketiga ke Rekening BUN atas pembayaran kepada PPHLN (Karena adanya pembayaran <i>ineligible</i> )
813118	Penggantian Dana dari Rekening Dana Talangan REKSUS kosong
	Digunakan untuk mencatat Penggantian Dana dari Rekening Dana Talangan REKSUS kosong
<b>81312</b>	<b>Penerimaan Dana Talangan</b>
813122	Penerimaan Dana Talangan dari dana moratorium
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Dana Talangan dari dana moratorium
813123	Penerimaan Dana Talangan dari Rekening Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Dana Talangan dari Rekening Lainnya
813124	Penerimaan Pengembalian dana Talangan ke rekening lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pengembalian dana Talangan ke rekening lainnya
813125	Penerimaan Talangan Dana Cadangan Subsidi
	Digunakan untuk mencatat penerimaan talangan dari Dana Cadangan Subsidi kepada RKUN
813126	Penerimaan Talangan Dana Cadangan DBH
	Digunakan untuk mencatat penerimaan talangan dari Dana Cadangan DBH kepada RKUN
813127	Penerimaan Talangan Dana Cadangan PMN
	Digunakan untuk mencatat penerimaan talangan dari Dana Cadangan PMN kepada RKUN
<b>815</b>	<b>PENERIMAAN TRANSITO</b>
<b>8151</b>	<b>Penerimaan Transito</b>
<b>81511</b>	<b>Penerimaan Transito</b>
815111	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Uang Persediaan baik yang sumber dananya Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, maupun Pinjaman/Hibah Luar Negeri T.A. berjalan.
815113	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana)
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana)
815114	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Uang Persediaan baik yang sumber dananya Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, maupun Pinjaman/Hibah Luar Negeri T.A. yang lalu.
815115	Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak
<b>81512</b>	<b>Penerimaan Dana dari BLU pada Rekening BUN</b>
815121	Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN.
815122	Penerimaan Penarikan Dana Kelolaan BLU pada Rekening RPL
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Penarikan Dana Kelolaan BLU pada Rekening RPL dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan BLU dan/atau optimalisasi kas pemerintah.
<b>81513</b>	<b>Penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan</b>
815131	Penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dari Penyetoran dana Hibah Langsung yang telah disahkan ke kas negara.
<b>8153</b>	<b>Penerimaan Persekot/ Uang Muka</b>
<b>81531</b>	<b>Penerimaan Persekot/ Uang Muka</b>
815311	Penerimaan Persekot Gaji
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan pengembalian cicilan persekot gaji.
<b>81532</b>	<b>Penerimaan Uang Muka Transfer</b>
815321	Penerimaan Uang Muka Dana Perimbangan
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Uang Muka Dana Perimbangan.
815322	Penerimaan Uang Muka Dana Otonomi Khusus
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Uang Muka Dana Otonomi Khusus.
<b>8154</b>	<b>Suspense Currency Loan</b>
<b>81541</b>	<b>Suspense Currency Loan</b>
815411	Suspense Currency Loan
	Akun Antara untuk mencatat perbedaan selisih kurs akibat perbedaan mata uang transaksi dengan mata uang pinjaman pada transaksi penarikan pinjaman. Pencatatan akun ini dilakukan untuk menihilkan saldo dari bank Lender (dummy Bank) pada masing-masing jenis mata uang.
<b>8155</b>	<b>Penerimaan Transito Tambahan Uang Persediaan</b>
<b>81551</b>	<b>Penerimaan Transito Uang Persediaan</b>
815511	Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Penerimaan transito dari setoran kembali sisa TUP Dana Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, maupun Pinjaman/Hibah Luar Negeri T.A. berjalan yang dipertanggungjawabkan oleh satker.
815513	Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana)
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pengguna PNBP (Swadana).
815514	Penerimaan Pengembalian Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pengembalian Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa TUP Tahun Anggaran Yang Lalu.
815515	Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pengembalian (Restitusi) Pajak.
<b>8156</b>	<b>Penerimaan Escrow</b>
<b>81561</b>	<b>Penerimaan Escrow</b>
815611	Penerimaan Escrow Dana Reboisasi
	Penerimaan Escrow yang belum bisa dibagikan kepada pihak yang berhak s.d tahun anggaran berakhir.
815612	Penerimaan Escrow Dana Subsidi/PSO
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Escrow Dana Subsidi/PSO.
815613	Penerimaan Escrow Dana Bagi Hasil SDA
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Escrow Dana Bagi Hasil SDA.
815614	Penerimaan Escrow Dana Penyertaan Modal Negara
	Digunakan untuk mencatat penerimaan dana escrow dana penyertaan modal negara.
815615	Penerimaan Non Anggaran Dana Penjaminan
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Dana Penjaminan
815616	Penerimaan Non Anggaran Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah
<b>81562</b>	<b>Penerimaan Pengembalian Escrow</b>
815621	Penerimaan Pengembalian Escrow Pajak
	Digunakan untuk mencatat penerimaan pengembalian dana escrow pajak.
815622	Penerimaan Pengembalian Escrow PNBP
	Digunakan untuk mencatat penerimaan pengembalian dana escrow PNBP.
<b>8157</b>	<b>Transito Diskonto Surat Berharga Negara</b>
<b>81571</b>	<b>Transito Diskonto Surat Berharga Negara</b>
815711	Penerimaan Transito Diskonto Surat Berharga Negara
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Transito Diskonto Surat Berharga Negara.
<b>8158</b>	<b>Penerimaan Transito Pengalihan Piutang Pemerintah</b>
<b>81581</b>	<b>Penerimaan Transito Pengalihan Piutang Pemberian Pinjaman</b>
815811	Penerimaan Transito Pengalihan Piutang Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Transito Pengalihan Piutang Pemberian Pinjaman.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>816</b>	<b>KOREKSI PENGELUARAN PEMINDAHBUKUAN</b>
<b>8161</b>	<b>Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan</b>
<b>81611</b>	<b>Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan</b>
816111	Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan
	Digunakan untuk mencatat Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan
<b>8162</b>	<b>Penerimaan Jasa Perbankan</b>
<b>81621</b>	<b>Penerimaan Jasa Perbankan</b>
816211	Penerimaan Jasa Perbankan
	Biaya perbankan yang dicatat setelah ada rekonsiliasi bank
<b>8163</b>	<b>Penerimaan Koreksi Pembukuan Perbankan</b>
<b>81631</b>	<b>Penerimaan Koreksi Pembukuan Perbankan</b>
816311	Penerimaan Koreksi Pembukuan Perbankan
	Kesalahan bank yang terdapat dalam rekening koran dan ditemukan saat proses rekonsiliasi bank (akun transaksi).
<b>817</b>	<b>PENERIMAAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA</b>
<b>8171</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga</b>
<b>81711</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga</b>
817111	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Rekening
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Rekening
817113	Penerimaan Non Anggaran setoran dana rekening retur ke kas negara
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan setoran uang dari rr kepada Bank Persepsi
<b>81712</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga di RKUN yang Ditangguhkan</b>
817121	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga di RKUN yang ditangguhkan
	Penerimaan Pihak Ketiga setoran yang diterima dari RKUN yang belum teridentifikasi pihak penyetorannya. Pengakuan transaksi penerimaan kas ini di rekening kas ini belum dapat menambah nilai ekuitas dan dikategorikan dalam utang. Transaksi ini termasuk dalam transaksi yang ditangguhkan dan dicatat oleh satker BUN.
<b>8172</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya</b>
<b>81721</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Sumber Daya Alam</b>
817211	Penerimaan Setoran Migas
	Penerimaan dari sektor migas yang masih belum diperhitungkan (bruto) dan dicatat oleh satker BUN
817212	Penerimaan Setoran Pertambangan
	Penerimaan dari sektor pertambangan yang masih belum diperhitungkan (bruto)
817213	Penerimaan Setoran Panas Bumi
	Penerimaan dari sektor geothermal yang masih belum diperhitungkan (bruto)
817214	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena Retur pada Rekening Pemerintah Lainnya
	Digunakan untuk menampung transaksi penerimaan retur atas pembayaran kewajiban kontraktual pemerintah sektor migas dan panas bumi pada Rekening Lainnya
817215	Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi-Reimbursement PPN

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi-Reimbursement PPN
817216	Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi Transito diestimasi-Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi Transito diestimasi-Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi
817217	Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi-Penggantian Bonus Produksi
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi-Penggantian Bonus Produksi
817218	Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi Transito diestimasi-Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi Transito diestimasi-Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi
<b>81722</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan Surat Berharga Negara</b>
817221	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan Surat Berharga Negara
	Penerimaan penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) secara bruto dan belum diperhitungkan.
817222	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan SBN Ritel Online
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan SBN Ritel <i>Online</i> .
<b>81723</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Aset Lainnya</b>
817231	Penerimaan dari Aset Lainnya (Rek.Dana Talangan)
	Pelimpahan dari rekening dana talangan ke RKUN.
817232	Penerimaan dari Aset Lainnya (Rek.Bapertarum)
	Pelimpahan dari rekening Bapertarum ke RKUN.
817233	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rangka Tujuan Tertentu
	Digunakan utnuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam rangka tujuan tertentu.
817234	Penerimaan dari Aset Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan dari Aset Lainnya.
<b>8173</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas</b>
<b>81731</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas</b>
817311	Penerimaan Pihak Ketiga Migas-Pajak Air Tanah ke Pemda
	Penerimaan Pihak Ketiga Pajak Air Tanah bagian Pemda yang terjadi akibat pengelolaan Migas yang telah diidentifikasi dengan Dit PNBP DJA namun belum dibayarkan ke Pemda yang berhak.
817312	Penerimaan Pihak Ketiga Migas-Pajak Penerangan Jalan non PLN ke Pemda
	Penerimaan Pihak Ketiga Pajak Penerangan Jalan hak Pemda yang terjadi akibat pengelolaan Migas yang telah diidentifikasi dgn Dit PNBP DJA namun belum dibayarkan ke Pemda yang berhak.
817313	Penerimaan Pihak Ketiga Migas-Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Migas-Lainnya pada Rekening Migas
817314	Penerimaan Pihak Ketiga Migas-Reimbursement DMO Fee KKKS
	Penerimaan Pihak Ketiga Reimbursement DMO Fee KKKS yang terjadi akibat pengelolaan Migas yang telah teridentifikasi oleh Dit PNBP DJA namun belum

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	dibayarkan ke KKKS yang berhak.
817315	Penerimaan Pihak Ketiga Migas-Reimbursement PPN KKKS
	Penerimaan Pihak Ketiga Reimbursement PPN KKKS yang terjadi akibat pengelolaan Migas yang telah teridentifikasi oleh Dit PNBP DJA namun belum dibayarkan kepada yang berhak.
817316	Penerimaan Pihak Ketiga Migas-Reimbursement Underlifting KKKS
	Penerimaan Pihak Ketiga Reimbursement Underlifting KKKS yang terjadi akibat pengelolaan Migas yang telah diidentifikasi oleh Dit PNBP DJA namun belum dibayarkan kepada yang berhak.
817317	Penerimaan Pihak Ketiga Migas-Fee BP Migas
	Penerimaan Pihak Ketiga fee BP Migas yang telah diidentifikasi oleh Dit PNBP DJA namun belum dibayarkan ke BP Migas.
817318	Penerimaan Pihak Ketiga Migas – Fee Penjualan Migas Bagian Negara
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Migas – Fee Penjualan Migas Bagian Negara
<b>81732</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas Transito I</b>
817321	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Minyak Bumi
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Minyak Bumi
817322	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Gas Bumi
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Gas Bumi
817323	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Migas Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Migas Lainnya
817324	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan Minyak Bumi
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan Minyak Bumi
817325	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan Gas Bumi
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan Gas Bumi
817326	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PBB Minyak Bumi
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PBB Minyak Bumi
817327	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPN Dalam Negeri
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan non anggaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPN Dalam Negeri
817328	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Pasal 23
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan non anggaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Pasal 23
817329	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito – Pendapatan Migas Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito – Pendapatan Migas Lainnya
<b>81733</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas Transito II</b>
817331	Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito – Pendapatan Atas Denda Keterlambatan Pembayaran

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Migas Transito – Pendapatan Atas Denda Keterlambatan Pembayaran
<b>8174</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas</b>
<b>81741</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas</b>
817411	Penerimaan Pihak Ketiga Perusahaan Pertambangan Umum Non Migas
	Penerimaan Pihak Ketiga Pertambangan yang telah diidentifikasi namun belum dibayarkan kepada Perusahaan Pertambangan Umum.
817412	Penerimaan Pihak Ketiga Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara - Valas
	Penerimaan Pihak ketiga Penjualan/Penerbitan Obligasi Negara Valas namun belum dibayarkan kepada yang berhak yang telah diidentifikasi dengan DJPU terkait.
817413	Penerimaan Pihak Ketiga Utang Bunga Obligasi Negara - Valas
	Penerimaan Pihak Ketiga SPN-Bunga Obligasi Negara Valas namun belum dibayarkan kepada yang berhak yang telah diidentifikasi dengan DJPU terkait.
817414	Penerimaan Pihak Ketiga Penerbitan Surat Utang Negara
	Penerimaan Pihak Ketiga Surat Utang Negara yang telah diidentifikasi oleh DJPU namun belum dibayarkan kepada yang berhak.
817415	Penerimaan Pihak Ketiga-Penjualan SPN
	Penerimaan Pihak Ketiga penerbitan-Penjualan Obligasi Negara sesudah diidentifikasi dengan DJPU namun belum dibayarkan kepada yang berhak.
817416	Penerimaan Pihak Ketiga-Penjualan Obligasi Negara DN
	Penerimaan Pihak Ketiga akibat penerbitan-Penjualan Obligasi Negara DN sesudah diidentifikasi oleh DJPU namun belum dibayarkan kepada yang berhak.
817417	Penerimaan Pihak Ketiga-Utang Bunga Obligasi Negara DN
	Penerimaan Pihak Ketiga yang telah diidentifikasi oleh DJPU terkait penerimaan SPN-Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri namun belum dibayarkan kepada yang berhak.
817418	Penerimaan Pihak Ketiga-Retensi
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga-Retensi
817419	Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi-Reimbursement PPN
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi-Reimbursement PPN
<b>81742</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas Transito</b>
817421	Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi Transito - Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi Transito Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi.
817422	Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi Transito - Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi Transito Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi.
<b>81743</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Panas Bumi</b>
817431	Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi - Penggantian Bonus Produksi
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Pihak Ketiga Panas Bumi - Penggantian Bonus Produksi.
<b>8175</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>81751</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman</b>
817511	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Dalam negeri
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Dalam negeri
817512	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Dalam negeri.
<b>8175</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus</b>
<b>81751</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman</b>
817511	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Dalam negeri
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Dalam negeri
817512	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Dalam negeri.
<b>81752</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah</b>
817521	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Dalam Negeri
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Dalam Negeri
817522	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar negeri
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar negeri
<b>8176</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas</b>
<b>81761</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum</b>
817611	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah.
817612	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD.
817613	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen.
817614	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro.
817619	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya.
<b>81762</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN</b>
817621	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah.
817622	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD.
817623	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah Valuta Yen.
817624	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro.
817626	Penerimaan Non Anggaran Pendapatan Kupon SBN Ditangguhkan
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Pendapatan Kupon SBN Ditangguhkan
817627	Penerimaan Non Anggaran Pendapatan Selisih Harga SBN Ditangguhkan
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Pendapatan Selisih Harga SBN Ditangguhkan
817629	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya.
<b>81763</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo</b>
817631	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah.
817632	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD.
817633	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen.
817634	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro.
817639	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya.
<b>81764</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo</b>
817641	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah.
817642	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD.
817643	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah Valuta Yen.
817644	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro.
817649	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya.
<b>81765</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah</b>
817651	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta USD.
817652	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Yen.
817653	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Euro.
817659	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Asing Lainnya.
<b>81766</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
817661	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Rupiah.
817662	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Yen.
817663	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Euro.
817669	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Asing Lainnya.
<b>81767</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen</b>
817671	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Rupiah.
817672	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta USD.
817673	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta Euro.
817679	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta Asing Lainnya.
<b>81768</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro</b>
817681	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Rupiah.
817682	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta USD

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta USD.
817683	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta Yen.
817689	Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta Asing Lainnya.
<b>8177</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok dan Piutang Lainnya</b>
<b>81771</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok dan Piutang Lainnya</b>
817711	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok sesuai dengan PMK 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.
817712	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang
	Digunakan untuk mencatat Dana Hasil Pemotongan DAU dan/atau DBH sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemotongan DAU dan/atau DBH bagi daerah induk yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada Daerah Otonom Baru.
817713	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi
	Digunakan untuk mencatat penerimaan non anggaran hasil penjualan/penyelesaian aset bekas milik eks Bank Dalam Likuidasi
817714	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU atau DBH untuk Alokasi Dana Desa (ADD)
	Digunakan untuk mencatat penerimaan non anggaran Dana Hasil Pemotongan DAU dan/atau DBH sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD)
<b>8179</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena Kesalahan Sistem Perbankan</b>
<b>81791</b>	<b>Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena Kesalahan Sistem Perbankan</b>
817911	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan
	Digunakan untuk mencatat penerimaan akibat transaksi mark as error pada SPAN.
<b>818</b>	<b>PENERIMAAN KIRIMAN UANG ANTAR REKENING BANK</b>
<b>8181</b>	<b>Kiriman Uang antar Rekening Bank</b>
<b>81811</b>	<b>Kiriman Uang antar Rekening Bank</b>
818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank
	Penerimaan kiriman uang antar rekening yang dimiliki oleh satker BUN (KPPN dan Dit PKN )
<b>82</b>	<b>PENGELUARAN NON ANGGARAN</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>821</b>	<b>PENGELUARAN NON ANGGARAN PFK</b>
<b>8211</b>	<b>Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 10% Gaji</b>
<b>82113</b>	<b>Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 10% Gaji</b>
821131	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 2% Gaji untuk Penyaluran kepada BPJS Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 2% Gaji untuk Penyaluran kepada BPJS Kesehatan PNS Pusat, POLRI/PNS POLRI, dan TNI/PNS Kemhan TNI
821132	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 3.25% Gaji untuk Tabungan Hari Tua PT. Taspen
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 3.25% Gaji untuk Tabungan Hari Tua PT. Taspen.
821133	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 4.75% Gaji untuk Iuran Dana Pensiun PT. Taspen
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 4.75% Gaji untuk Iuran Dana Pensiun PT. Taspen.
821134	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 3.25% Gaji untuk Tabungan Hari Tua PT. Asabri
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 3.25% Gaji untuk Tabungan Hari Tua PT. Asabri
821135	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 4.75% Gaji untuk Iuran Dana Pensiun PT. Asabri
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 4.75% Gaji untuk Iuran Dana Pensiun PT. Asabri.
<b>8212</b>	<b>Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan</b>
<b>82121</b>	<b>Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan</b>
821211	Pengembalian Penerimaan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan PNS
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Penerimaan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan PNS.
821212	Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Daerah (2%)
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Daerah (2%)
821213	Pengembalian Penerimaan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan TNI/PNS Kemhan dan Polri/PNS Polri
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Penerimaan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan Pensiunan TNI/PNS Kemhan dan Polri/PNS Polri.
<b>8213</b>	<b>Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog</b>
<b>82131</b>	<b>Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog</b>
821311	Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog PNS Pusat
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog PNS Pusat
821312	Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog Polri & PNS Polri
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog Polri & PNS Polri
821313	Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog TNI & PNS Dephan
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog TNI & PNS Dephan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>8214</b>	<b>Pengembalian Penerimaan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan</b>
<b>82141</b>	<b>Pengembalian Penerimaan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan</b>
821411	Pengembalian Penerimaan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja untuk Penyaluran kepada BPJS Kesehatan
	Pengembalian Penerimaan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja untuk Penyaluran kepada BPJS Kesehatan.
<b>8215</b>	<b>Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT</b>
<b>82151</b>	<b>Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT</b>
821511	Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
<b>8217</b>	<b>Pengembalian Penerimaan Dana Tabungan Pesangon Tenaga kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP Migas)</b>
<b>82171</b>	<b>Pengembalian Penerimaan PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP Migas)</b>
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Penerimaan PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP Migas)
821711	Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi
<b>8218</b>	<b>Pengembalian Penerimaan PFK Penutupan Rekening</b>
<b>82181</b>	<b>Pengembalian Penerimaan PFK Penutupan Rekening</b>
821811	Pengembalian Penerimaan Setoran Penutupan Rekening Pihak Ketiga
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Penerimaan Setoran Penutupan Rekening Pihak Ketiga
<b>8219</b>	<b>Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain</b>
<b>82191</b>	<b>Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS</b>
821911	Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Pusat
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Pusat
821912	Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Daerah
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Daerah
<b>82192</b>	<b>Pengembalian Penerimaan PFK Lain-Lain</b>
821921	Pengembalian Penerimaan PFK Lain-Lain
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Penerimaan PFK Lain-Lain.
<b>822</b>	<b>PELUNASAN WESEL PEMERINTAH</b>
<b>8221</b>	<b>Pelunasan Wesel Pemerintah</b>
<b>82211</b>	<b>Pelunasan Wesel Pemerintah</b>
822111	Pelunasan Wesel Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pelunasan Wesel Pemerintah
<b>823</b>	<b>PEMBAYARAN PFK PREFINANCING DAN PFK BUN LAINNYA</b>
<b>8231</b>	<b>Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>82311</b>	<b>Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya</b>
823116	Pembayaran dari Rekening BUN karena Prefinancing UP-Reksus
	Digunakan untuk mencatat Pembayaran dari Rekening BUN karena Prefinancing UP-Reksus
823117	Pengisian Rekening Dana SAL
	Digunakan untuk mencatat Pengisian Rekening Dana SAL
823118	Pembayaran ke Rekening Dana Talangan Reksus kosong
	Digunakan untuk mencatat Pembayaran ke Rekening Dana Talangan Reksus kosong
<b>82312</b>	<b>Pengembalian Dana Talangan</b>
823122	Pengembalian Dana Talangan ke dana moratorium
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Dana Talangan ke dana moratorium
823123	Pengeluaran dana talangan dari rekening lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran dana talangan dari rekening lainnya
823124	Pengembalian dana talangan ke rekening lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian dana talangan ke rekening lainnya
823125	Pengeluaran Talangan Dana Cadangan Subsidi
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran talangan dari Dana Cadangan Subsidi kepada RKUN
823126	Pengeluaran Talangan Dana Cadangan DBH
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran talangan dari Dana Cadangan DBH kepada RKUN
823127	Pengeluaran Talangan Dana Cadangan PMN
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran talangan dari Dana Cadangan PMN kepada RKUN
<b>82455</b>	<b>Pengeluaran Pemindahbukuan antar Rekening KUN Dalam Valuta Yen ke Rekening Penempatan Dalam Valuta Asing</b>
824551	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening KUN Dalam Valuta Yen ke Rekening Penempatan Dalam Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening No. 600.502111 Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta Yen ke Rekening No. 608.000111 Rekening Penempatan Dalam Valuta Yen
824552	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Penempatan Dalam Valuta Yen ke Rekening KUN Dalam Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening No. 608.000111 Rekening Penempatan Dalam Valuta Yen ke Rekening No. 600.502111 Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta Yen
<b>82456</b>	<b>Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Menteri Keuangan untuk Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam Valuta EURO ke Rekening Rupiah</b>
824561	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 609.000991.980 ke Rekening 519.000124.980
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 609.000991.980 ke Rekening 519.000124.980
824562	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 609.022411.980 ke Rekening 519.000124.980

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 609.022411.980 ke Rekening 519.000124.980
<b>82457</b>	<b>Pengeluaran Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan dari Rek. KUN Dalam Valas selain USD dan Yen</b>
824571	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening KUN Dalam Valuta Asing selain USD dan Yen ke Rekening Penempatan Dalam Valuta Asing selain USD dan Yen
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening KUN Dalam Valuta Asing selain USD dan Yen ke Rekening Penempatan Dalam Valuta Asing selain USD dan Yen
824572	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Penempatan Dalam Valuta Asing selain USD dan Yen ke Rekening KUN Dalam Valuta Asing selain USD dan Yen
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Penempatan Dalam Valuta Asing selain USD dan Yen ke Rekening KUN Dalam Valuta Asing selain USD dan Yen
<b>8246</b>	<b>Pengeluaran Pemindahbukuan II</b>
<b>82461</b>	<b>Pengeluaran Pemindahbukuan RKUN Rupiah dengan RKUN Valuta Asing</b>
824611	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening KUN dalam Valuta Yen ke Rekening KUN dalam Valuta Asing selain USD dan Yen
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening KUN dalam Valuta Yen 600.502111980 ke Rekening KUN dalam Valuta Asing selain USD dan Yen
824612	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening KUN dalam Valuta Asing selain USD dan Yen ke Rekening KUN Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening KUN dalam Valuta Asing selain USD dan Yen ke Rekening KUN Valuta USD 600.502411980
824613	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening KUN dalam Valuta USD ke Rekening KUN dalam Valuta Asing selain USD dan Yen
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening KUN dalam Valuta USD 600.502411980 ke Rekening KUN dalam Valuta Asing selain USD dan Yen
824614	Pengeluaran Pemindahbukuan dari RDI Euro ke RKUN Dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pemindahbukuan dari RDI Euro ke RKUN Dalam Valuta Euro
<b>82462</b>	<b>Pengeluaran Pemindahbukuan dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan/ Kekurangan Kas Pemerintah</b>
824621	Pengeluaran Pemindahbukuan dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan/ Kekurangan Kas Pemerintah dari RKUN ke Rek. SBN
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pemindahbukuan dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan/ Kekurangan Kas Pemerintah dari RKUN ke Rek. SBN
824622	Pengeluaran Pemindahbukuan dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan/ Kekurangan Kas Pemerintah dari Rekening SBN ke RKUN
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pemindahbukuan dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan/ Kekurangan Kas Pemerintah dari Rekening SBN ke RKUN
<b>8247</b>	<b>Pengeluaran Pemindahbukuan dalam Rangka Treasury Dealing Room</b>
<b>82471</b>	<b>Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening KUN Rupiah ke Rekening Kelolaan TDR Rupiah</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
824711	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening KUN Rupiah ke Rekening Kelolaan TDR Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening KUN Rupiah ke Rekening Kelolaan TDR Rupiah.
824712	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah ke Rekening KUN Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah ke Rekening KUN Rupiah.
<b>82472</b>	<b>Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening KUN dalam Valuta Asing ke Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing</b>
824721	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening KUN dalam Valuta USD ke Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening KUN dalam Valuta USD ke Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD.
824722	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD ke Rekening KUN dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD ke Rekening KUN dalam Valuta USD.
824723	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening KUN dalam Valuta Yen ke Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening KUN dalam Valuta Yen ke Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen.
824724	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen ke Rekening KUN dalam Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen ke Rekening KUN dalam Valuta Yen.
824725	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening KUN dalam Valuta Euro ke Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening KUN dalam Valuta Euro ke Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro.
824726	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro ke Rekening KUN dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro ke Rekening KUN dalam Valuta Euro.
824727	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening KUN dalam Valuta Asing Lainnya ke Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening KUN dalam Valuta Asing Lainnya ke Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya.
824728	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya ke Rekening KUN dalam Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya ke Rekening KUN dalam Valuta Asing Lainnya.
<b>825</b>	<b>PENGELUARAN TRANSITO</b>
<b>8251</b>	<b>Pengeluaran Transito</b>
<b>82511</b>	<b>Pengeluaran Transito</b>
825111	Pengeluaran Uang Persediaan
	Digunakan untuk mencatat penarikan Uang Persediaan baik yang sumber dananya

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, maupun Pinjaman/Hibah Luar Negeri T.A. berjalan.
825113	Pengeluaran Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana)
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana).
825114	Pengeluaran Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu.
825115	Pengeluaran Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak.
<b>82512</b>	<b>Pengembalian Penerimaan Dana dari BLU pada Rekening BUN</b>
825121	Pengembalian Penerimaan Surplus BLU pada Rekening Kas Negara ke Rekening Kas BLU
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Penerimaan Surplus BLU pada Rekening Kas Negara ke Rekening Kas BLU.
825122	Pengembalian Penerimaan Penarikan Dana Kelolaan BLU pada Rekening RPL
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Penerimaan Penarikan Dana Kelolaan BLU pada Rekening RPL dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan BLU dan/atau optimalisasi kas pemerintah.
<b>82513</b>	<b>Pengeluaran penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan</b>
825131	Pengeluaran penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran atas Penyetoran dana Hibah Langsung yang telah disahkan ke kas negara.
<b>8252</b>	<b>Suspense TUP</b>
<b>82521</b>	<b>Suspense TUP</b>
825211	Suspense TUP
	Akun antara selisih setoran pengembalian TUP antara yang diterima dan yang disetor.
<b>8253</b>	<b>Pengeluaran Persekot/ Uang Muka</b>
<b>82531</b>	<b>Pengeluaran Persekot/ Uang Muka</b>
825311	Pengeluaran Persekot Gaji
	Akun Transito pencatatan pengeluaran atas pengajuan ResUME Tagihan transaksi Pembayaran Persekot Gaji.
<b>82532</b>	<b>Pengeluaran Uang Muka Transfer</b>
825321	Pengeluaran Uang Muka Dana Perimbangan
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Uang Muka Dana Perimbangan.
825322	Pengeluaran Uang Muka Dana Otonomi Khusus
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Uang Muka Dana Otonomi Khusus.
<b>8255</b>	<b>Pengeluaran Transito Tambahan Uang Persediaan</b>
<b>82551</b>	<b>Pengeluaran Transito Tambahan Uang Persediaan</b>
825511	Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan
	Pengeluaran atas pengajuan ResUME Tagihan transaksi Pembayaran TUP, baik yang sumber dananya Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, maupun

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
825513	Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana)
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pengguna PNBP (Swadana).
825514	Pengeluaran Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa TUP Tahun Anggaran Yang Lalu.
825515	Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pengembalian (Restitusi) Pajak.
<b>8256</b>	<b>Pengeluaran Escrow</b>
<b>82561</b>	<b>Pengeluaran Escrow</b>
825611	Pengeluaran Escrow Dana Reboisasi
	Pengeluaran atas pengajuan ResUME Tagihan yang membebani Rekening Escrow.
825612	Pengeluaran Escrow Dana Subsidi/PSO
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Escrow Dana Subsidi/PSO.
825613	Pengeluaran Escrow Dana Bagi Hasil SDA
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Escrow Dana Bagi Hasil SDA.
825614	Pengeluaran Escrow Dana Penyertaan Modal Negara
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran dana escrow dana penyertaan modal negara.
825615	Pengeluaran Non Anggaran Dana Penjaminan
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran Dana Penjaminan
825616	Pengeluaran Non Anggaran Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah
<b>82562</b>	<b>Pengeluaran Pengembalian Escrow</b>
825621	Pengeluaran Pengembalian Escrow Pajak
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pengembalian dana escrow pajak.
825622	Pengeluaran Pengembalian Escrow PNBP
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pengembalian dana escrow PNBP.
<b>8257</b>	<b>Pengeluaran Transito Diskonto Surat Berharga Negara</b>
<b>82571</b>	<b>Pengeluaran Transito Diskonto Surat Berharga Negara</b>
825711	Pengeluaran Transito Diskonto Surat Berharga Negara
	Digunakan untuk mencatat transito pengeluaran atas pengajuan resume tagihan diskonto SBN.
<b>8258</b>	<b>Pengeluaran Transito Pengalihan Piutang Pemerintah</b>
<b>82581</b>	<b>Pengeluaran Transito Pengalihan Piutang Pemberian Pinjaman</b>
825811	Pengeluaran Transito Pengalihan Piutang Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Transito Pengalihan Piutang Pemberian Pinjaman.
<b>826</b>	<b>KOREKSI PENERIMAAN PEMINDAHBUKUAN</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>8261</b>	<b>Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan</b>
<b>82611</b>	<b>Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan</b>
826111	Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan  Digunakan untuk mencatat Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan
<b>827</b>	<b>PENGELUARAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA</b>
<b>8271</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga</b>
<b>82711</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga</b>
827111	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Rekening  Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dari rr kepada Pihak Ketiga karena kesalahan Rekening atau mencatat setoran dari rr kepada Bank Persepsi
827113	Pengeluaran Non Anggaran Pembayaran Kembali Retur kepada Pihak Ketiga  Digunakan untuk mencatat pembayaran kembali retur kepada pihak ketiga yang dananya telah disetorkan dari rr ke Kas Negara (Persepsi)
<b>82712</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga di RKUN yang ditangguhkan</b>
827121	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga di RKUN yang ditangguhkan  Pengeluaran dari setoran yang diterima dari RKUN yang belum teridentifikasi pihak penyatornya. Pengakuan transaksi penerimaan kas ini belum menambah nilai ekuitas dan dikategorikan dalam utang.
<b>8272</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya</b>
<b>82721</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Sumber Daya Alam</b>
827211	Pengeluaran Setoran Migas  pengeluaran dari sektor migas yang masih belum diperhitungkan (bruto).
827212	Pengeluaran Setoran Pertambangan  Pengeluaran dari sektor pertambangan yang masih belum diperhitungkan (bruto)
827213	Pengeluaran Setoran Panas Bumi  Pengeluaran dari sektor geothermal yang masih belum diperhitungkan (bruto)
827214	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Pembayaran Kembali Retur pada Rekening Pemerintah Lainnya  Digunakan untuk mencatat pembayaran kembali retur atas pembayaran kewajiban kontraktual pemerintah sektor migas dan panas bumi pada Rekening Lainnya.
827215	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi-Reimbursement PPN  Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi-Reimbursement PPN
827216	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi Transito diestimasi-Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi  Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi Transito diestimasi-Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi
827217	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi Transito diestimasi-Pengembalian Bonus Produksi  Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi Transito diestimasi-Pengembalian Bonus Produksi
827218	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi Transito diestimasi-Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi Transito diestimasi-Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi
<b>82722</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan Surat Berharga Negara</b>
827221	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan Surat Berharga Negara
	Pengeluaran penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) secara bruto dan belum diperhitungkan.
827222	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan SBN Ritel Online
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan SBN Ritel <i>Online</i>
<b>82723</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Aset Lainnya</b>
827231	Pengeluaran ke Aset Lainnya (Rek.Dana Talangan)
	Pelimpahan dari RKUN ke rekening dana talangan.
827232	Pengeluaran ke Aset Lainnya (Rek.Bapertarum)
	Pelimpahan dari RKUN ke rekening Bapertarum.
827233	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam rangka tujuan tertentu
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam rangka tujuan tertentu.
827234	Pengeluaran dari Aset Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran dari Aset Lainnya.
<b>8273</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas</b>
<b>82731</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas</b>
827311	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas-Pajak Air Tanah ke Pemda
	Pengeluaran Pihak Ketiga Pajak Air Tanah bagian Pemda yang terjadi akibat pengelolaan Migas setelah diidentifikasi dengan Dit PNBP DJA namun belum dibayarkan ke Pemda yang berhak.
827312	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas-Pajak Penerangan Jalan non PLN ke Pemda
	Pengeluaran dari bagian Pajak Penerangan Jalan hak Pemda yang terjadi akibat adanya pengelolaan Migas setelah diidentifikasi oleh Dit PNBP DJA namun belum dibayarkan ke Pemda yang berhak.
827313	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas-Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pihak Ketiga Migas-Lainnya pada Rekening Migas.
827314	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas-Reimbursement DMO Fee KKKS
	Pengeluaran dari bagian Reimbursement DMO Fee KKKS pengelolaan Migas setelah diidentifikasi oleh Dit PNBP DJA namun belum dibayarkan ke KKKS yang berhak.
827315	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas-Reimbursement PPN KKKS
	Pengeluaran dari bagian Reimbursement PPN KKKS pengelolaan Migas setelah diidentifikasi oleh Dit PNBP DJA namun belum dibayarkan kepada yang berhak.
827316	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas-Reimbursement Underlifting KKKS
	Pengeluaran dari bagian-Reimbursement Underlifting KKKS pengelolaan Migas setelah diidentifikasi oleh Dit PNBP DJA namun belum dibayarkan kepada yang berhak.
827317	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas-Fee BP Migas
	Pengeluaran dari bagian fee BP Migas setelah diidentifikasi Dit PNBP DJA namun belum dibayarkan ke BP Migas.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
827318	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas – Fee Penjualan Migas Bagian Negara
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan non anggaran Pihak Ketiga Migas – Fee Penjualan Migas Bagian Negara
<b>82732</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas Transito I</b>
827321	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Minyak Bumi
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran transito pendapatan PPh minyak bumi saat reklasifikasi.
827322	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Gas Bumi
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran transito pendapatan PPh gas bumi saat reklasifikasi.
827323	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Migas Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran transito pendapatan PPh migas lainnya saat reklasifikasi.
827324	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan Minyak Bumi
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran transito pendapatan minyak bumi saat reklasifikasi.
827325	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan Gas Bumi
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran transito pendapatan PPh gas bumi saat reklasifikasi.
827326	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PBB Minyak Bumi
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran transito pendapatan PBB minyak bumi saat reklasifikasi.
827327	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPN Dalam Negeri
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran non anggaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPN Dalam Negeri
827328	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Pasal 23
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran non anggaran Pihak Ketiga Migas Transito Pendapatan PPh Pasal 23
827329	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito - Pendapatan Migas Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito - Pendapatan Migas Lainnya
<b>82733</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas Transito II</b>
827331	Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito - Pendapatan Atas Denda Keterlambatan Pembayaran
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pihak Ketiga Migas Transito - Pendapatan Atas Denda Keterlambatan Pembayaran
<b>8274</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas</b>
<b>82741</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas</b>
827411	Pengeluaran Pihak Ketiga Perusahaan Pertambangan Umum Non Migas
	Penerimaan Pihak Ketiga Pertambangan yang telah diidentifikasi namun belum dibayarkan kepada Perusahaan Pertambangan Umum.
827412	Pengeluaran Pihak Ketiga Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara - Valas
	Pengeluaran dari bagian hasil reklasifikasi dengan DJPU terkait penerimaan Penjualan/Penerbitan Obligasi Negara Valas sebelum dibayarkan kepada yang berhak.
827413	Pengeluaran Pihak Ketiga Utang Bunga Obligasi Negara - Valas

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Pengeluaran dari bagian hasil reklasifikasi dengan DJPU terkait penerimaan Pihak Ketiga SPN-Bunga Obligasi Negara Valas sebelum dibayarkan kepada yang berhak.
827414	Pengeluaran Pihak Ketiga Penerbitan Surat Utang Negara
	Pengeluaran dari bagian hasil reklasifikasi dengan DJPU terkait penerimaan Pihak ketiga Surat Utang Negara sebelum dibayarkan kepada yang berhak.
827415	Pengeluaran Pihak Ketiga-Penjualan SPN
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pihak Ketiga-Penjualan SPN.
827416	Pengeluaran Phak Ketiga-Penjualan Obligasi Negara DN
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Phak Ketiga-Penjualan Obligasi Negara DN.
827417	Pengeluaran Pihak Ketiga-Utang Bunga Obligasi Negara DN
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pihak Ketiga-Utang Bunga Obligasi Negara DN.
827418	Pengeluaran Pihak Ketiga-Retensi
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pihak Ketiga-Retensi.
827419	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi-Reimbursement PPN
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi-Reimbursement PPN.
<b>82742</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas Transito</b>
827421	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi Transito Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran transito pendapatan PBB pertambangan saat reklasifikasi.
827422	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi Transito Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran transito pendapatan setoran bagian pemerintah pertambangan panas bumi saat reklasifikasi.
<b>82743</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Panas Bumi</b>
827431	Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi - Penggantian Bonus Produksi
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pihak Ketiga Panas Bumi - Penggantian Bonus Produksi
<b>8275</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus</b>
<b>82751</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman</b>
827511	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Dalam negeri
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Dalam negeri.
827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri.
<b>82752</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah</b>
827521	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Dalam Negeri
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Dalam Negeri.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
827522	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar negeri
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar negeri.
<b>8276</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Fihak Ketiga Optimalisasi Kas</b>
<b>82761</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum</b>
827611	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah.
827612	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD.
827613	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen.
827614	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro.
827619	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya.
<b>82762</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN</b>
827621	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR SBN dalam Rupiah.
827622	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD.
827623	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen.
827624	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro.
827626	Pengeluaran Non Anggaran Pendapatan Kupon SBN Ditangguhkan
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pendapatan Kupon SBN Ditangguhkan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
827627	Pengeluaran Non Anggaran Pendapatan Selisih Harga SBN Ditangguhkan
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pendapatan Selisih Harga SBN Ditangguhkan
827629	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya.
<b>82763</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo</b>
827631	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah.
827632	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD.
827633	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen.
827634	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro.
827639	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Reverse Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya.
<b>82764</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo</b>
827641	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah.
827642	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD.
827643	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Rupiah Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen.
827644	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro.
827649	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Repo dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Asing Lainnya.
<b>82765</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah</b>
827651	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta USD.
827652	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Yen.
827653	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Euro.
827659	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR Rupiah terhadap Valuta Asing Lainnya.
<b>82766</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD</b>
827661	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Rupiah.
827662	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Yen.
827663	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Euro.
827669	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta USD terhadap Valuta Asing Lainnya.
<b>82767</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen</b>
827671	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Rupiah.
827672	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta USD.
827673	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta Euro.
827679	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Yen terhadap Valuta Asing Lainnya.
<b>82768</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro</b>
827681	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Rupiah.
827682	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta USD.
827683	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta Yen.
827689	Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam Rangka Transaksi Foreign Exchange dari Rekening Kelolaan TDR dalam Valuta Euro terhadap Valuta Asing Lainnya.
<b>8277</b>	<b>Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok dan Piutang Lainnya</b>
<b>82771</b>	<b>Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok dan Piutang Lainnya</b>
827711	Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok sesuai dengan PMK 115/PMK.07/ 2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.
827712	Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang
	Digunakan untuk mencatat Penyaluran Dana Hasil Pemotongan DAU dan/atau DBH sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemotongan DAU dan/atau DBH bagi daerah induk yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada Daerah Otonom Baru.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
827713	Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/ Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi
	Digunakan untuk mencatat pengembalian penerimaan non anggaran hasil penjualan/penyelesaian aset bekas milik eks Bank Dalam Likuidasi
827714	Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU atau DBH untuk Alokasi Dana Desa (ADD)
	Digunakan untuk mencatat penyaluran dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD)
<b>8279</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan</b>
<b>82791</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan</b>
827911	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran akibat transaksi mark as error pada SPAN.
<b>828</b>	<b>PENGELUARAN KIRIMAN UANG ANTAR REKENING BANK</b>
<b>8281</b>	<b>Kiriman Uang antar Rekening Bank</b>
<b>82811</b>	<b>Kiriman Uang antar Rekening Bank</b>
828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank
	Pelimpahan kiriman uang antar rekening yang dimiliki oleh satker BUN (KPPN dan Dit PKN).
<b>83</b>	<b>OUTPUT KINERJA</b>
<b>831</b>	<b>OUTPUT KINERJA</b>
<b>8311</b>	<b>Output Kinerja</b>
<b>83111</b>	<b>Output Kinerja</b>
831111	Output Kinerja
	Akun statistik untuk menghasilkan laporan kinerja



### SEGMENTASI AKUN NERACA

KODE AKUN	URAIAN AKUN
1 ASET	
11 ASET LANCAR	
111 KAS DAN SETARA KAS	
1111 Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah	
11111 Kas di Bank Indonesia dalam Rupiah	
111111 Kas di Rekening KUN dalam Rupiah	
111112 Kas di Rekening Sub RKUN Kuasa BUN Pusat	
111113 Kas di Rekening SAL	
111114 Kas di Rekening Talangan Reksus Kosong	
111115 Kas di Rekening Penempatan dalam Rupiah	
111116 Kas di Rekening Antara Reksus	
111117 Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah	
111118 Kas di Rekening Sub BUN Talangan	
11112 Kas di Rekening Sub RKUN	
111121 Kas di Rekening Sub RKUN Penerimaan	
111122 Kas di Rekening Sub RKUN Pengeluaran	
111123 Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Rupiah	
11113 Kas di Rekening Surat Utang Negara	
111131 Kas di Rekening Penerimaan Surat Utang Negara	
111132 Kas di Rekening Pengeluaran Surat Utang Negara	
11114 Kas di Rekening Persepsi Pusat	
111141 Kas di Rekening Persepsi Pusat	
111142 Kas di Rekening Pos Persepsi Pusat	
11115 Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat-SPAN	
111151 Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	
111152 Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN - Gaji	
1112 Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing	
11121 Kas di Bank Indonesia dalam Valuta Asing	
111211 Kas di Rekening KUN dalam Valuta USD	
111212 Kas di Rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Asing	
111213 Kas di Rekening Hasil Minyak Perjanjian Karya	
111214 Kas di Rekening Khusus dalam Valuta Asing	
111215 Kas di Rekening Penempatan dalam Valuta USD	
111216 Kas di Rekening KUN Dalam Valuta Yen	
111217 Kas di Rekening Penempatan Dalam Valuta Yen	
111218 Kas di Rekening KUN dalam Valuta Euro	
111219 Kas di Rekening Penempatan Dalam Valuta Euro	

KODE AKUN	URAIAN AKUN
11122	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing
111221	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing JPY
111222	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing USD
111223	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing Euro
1113	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya
11131	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia
111311	Kas Pemerintah Lainnya dalam Rupiah
111312	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya dalam Valuta Asing
111313	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi
111314	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah
111315	Kas di Rekening Penerimaan Migas - RPL
111316	Kas di Rekening Penerimaan Panas Bumi pada Kuasa BUN Pusat
111317	Kas di Rekening Pertambangan dan Perikanan pada Kuasa BUN Pusat
111318	Kas di Rekening Kelolaan <i>Treasury Dealing Room</i>
111319	Kas di Rekening Penerbitan Surat Berharga Negara
11132	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Umum
111321	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat
111322	Kas Pemerintah yang ada di K/L
111323	Kas Pemerintah yang ada di BLU
111324	Kas di Rekening PFK
111325	Kas di Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Penempatan
111326	Kas di Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Hibah Luar Negeri Bencana Alam
111327	Kas di rekening PHLN
111328	Kas di Rekening Dana Bergulir
111329	Kas lainnya
11134	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN
111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN- Non Gaji
111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN- Gaji
111343	Kas di Rekening Retur Surat Berharga Syariah Negara
1114	Kas di Rekening Kas di KPPN
11141	Kas di Bank Indonesia

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	111411 Kas di Rekening Pengeluaran di Bank Tunggal
	111412 Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Rupiah
11142	Kas di Bank Umum
	111421 Kas di Rekening Pengeluaran di Bank Operasional
	111422 Kas di Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi)
	111423 Kas di Rekening Retur BO/Pos (KPPN)
11143	Kas KPPN di Bank Indonesia dalam Valuta Asing
	111431 Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta USD
	111432 Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta Yen
	111433 Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta Euro
11144	Kas KPPN di Bank Umum dalam Valuta Asing
	111441 Kas di Rekening Penerimaan (Persepsi/ Devisa Persepsi) dalam Valuta USD
11145	Kas di Rekening Retur BI dalam Rupiah
	111451 Kas di Rekening Retur BI dalam Rupiah
11146	Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Asing
	111461 Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta USD
	111462 Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Yen
	111463 Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Euro
	111469 Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Asing Lainnya
1115	Kas dalam Transito
	11151 Kas dalam Transito - BUN
	111511 Kas dalam Transito - BUN
	111512 Kas dalam Transito Rekening Pinjaman/ Hibah
	111513 Kas dalam Transito TUP
	111514 Kas dalam Transito UP
	111515 Kas dalam Transito BLU
	111516 Kas dalam Transito-Transaksi Non Kas
	111517 Kas dalam Transito-Transaksi DTP
	111519 Kas dalam Transito Lainnya
	11152 Kas dalam Transito - K/L
	111521 Kas dalam Transito - Perwakilan Luar Negeri
1116	Kas di Bendahara Pengeluaran
	11161 Kas di Bendahara Pengeluaran
	111611 Kas di Bendahara Pengeluaran
	111613 Kas di Bendahara Pengeluaran TUP

KODE AKUN	URAIAN AKUN
1117	Kas di Bendahara Penerimaan
11171	Kas di Bendahara Penerimaan
111711	Kas di Bendahara Penerimaan
1118	Kas Lainnya dan Setara Kas
11181	Setara Kas
111811	Surat Berharga
111812	Penempatan di Bank Umum
111813	Reverse Repo
111814	<i>Foreign Exchange</i>
111819	Setara Kas lainnya
11182	Kas Lainnya Pada Kementerian Negara/Lembaga
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah
111823	Kas Lainnya di K/L Dana Kelolaan LPP RRI/TVRI
111824	Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi
111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
111826	Kas Lainnya di BLU
111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan
1119	Kas pada Badan Layanan Umum
11191	Kas - BLU
111911	Kas dan Bank - BLU
111912	Dana yang akan Dijaminkan - BLU
111913	Dana yang akan dipadankan - BLU
111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan
11192	Setara Kas - BLU
111921	Surat Berharga - BLU
111929	Setara kas Lainnya - BLU
112	UANG MUKA REKENING BUN
1121	Uang Muka Dari Rekening KUN
11211	Uang Muka KUN UP
112111	Uang Muka KUN UP – PP
1122	Uang Muka Dari Rekening Khusus
11221	Uang Muka Reksus UP
112211	Uang Muka Reksus UP - PP Reksus
11222	Uang Muka Reksus Non UP
112221	Uang Muka Reksus Kosong
1123	Talangan kepada RKUN
11231	Talangan kepada RKUN
112311	Talangan Dana Cadangan Subsidi kepada RKUN
112312	Talangan Dana Cadangan DBH kepada RKUN

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	112313 Talangan Dana Cadangan PMN kepada RKUN
113 INVESTASI JANGKA PENDEK	
1131 Investasi dalam Deposito	
11311 Investasi dalam Deposito	
113111 Investasi dalam Deposito Jangka Pendek	
1132 Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara	
11321 Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara	
113211 Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara	
11322 Investasi Jangka Pendek pada Surat Berharga Negara	
113221 Investasi Jangka Pendek pada SBN dalam Rangka Stabilisasi Pasar	
113222 Investasi Jangka Pendek pada SBN dalam Rangka Optimalisasi Kas	
1133 Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	
11331 Deposito Jangka Pendek - BLU	
113311 Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan	
113319 Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Dana Kelolaan BLU dan/atau Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya	
1134 Bagian Lancar Investasi Non Permanen	
11341 Bagian Lancar Investasi Non Permanen	
113411 Bagian Lancar Investasi Non Permanen	
1139 Investasi Jangka Pendek Lainnya	
11391 Investasi Jangka Pendek Lainnya	
113911 Investasi Jangka Pendek Lainnya	
114 BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA, DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
1141 Belanja Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )	
11411 Belanja Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )	
114111 Belanja Pegawai Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )	
114112 Belanja Barang yang Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )	
114113 Belanja Pembayaran Bunga Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )	
114114 Belanja Lain-Lain Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )	
114115 Belanja Modal Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )	
114116 Belanja Hibah Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )	
114117 Belanja Subsidi Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )	
114118 Belanja Bantuan Sosial Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )	
1142 Uang Muka Belanja ( <i>prepayment</i> )	
11421 Uang Muka Belanja Pemerintah Pusat ( <i>prepayment</i> )	
114211 Uang Muka Belanja Pegawai ( <i>prepayment</i> )	
114212 Uang Muka Belanja Barang ( <i>prepayment</i> )	

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	114213 Uang Muka Belanja Modal ( <i>prepayment</i> )
	114214 Uang Muka Belanja Pembayaran Bunga ( <i>prepayment</i> )
	114215 Uang Muka Belanja Subsidi ( <i>prepayment</i> )
	114216 Uang Muka Belanja Hibah ( <i>prepayment</i> )
	114217 Uang Muka Belanja Bantuan Sosial ( <i>prepayment</i> )
	114218 Uang Muka Belanja Lain-Lain ( <i>prepayment</i> )
11422	Uang Muka Transfer ke Daerah ( <i>prepayment</i> )
	114221 Uang Muka Dana Perimbangan ( <i>prepayment</i> )
	114222 Uang Muka Otonomi Khusus dan Penyesuaian ( <i>prepayment</i> )
1143	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
	11431 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
	114311 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
115	PIUTANG
	1151 Piatang Perpajakan
	11511 Piatang Pajak PPh Migas
	115111 Piatang PPh Minyak Bumi
	115112 Piatang PPh Gas Bumi
	115119 Piatang PPh Migas Lainnya
	11512 Piatang Pajak PPh Non Migas
	115121 Piatang PPh Pasal 21
	115122 Piatang PPh Pasal 22
	115123 Piatang PPh Pasal 22 Impor
	115124 Piatang PPh Pasal 23
	115125 Piatang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
	115126 Piatang PPh Pasal 25/29 Badan
	115127 Piatang PPh Pasal 26
	115128 Piatang PPh Final
	115129 Piatang PPh Piatang PPh Fiskal Luar Negeri
	11513 Piatang Pajak PPN
	115131 Piatang PPN Dalam Negeri
	115132 Piatang PPN Impor
	115139 Piatang PPN Lainnya
	11514 Piatang Pajak PPnBM
	115141 Piatang PPnBM dalam Negeri
	115142 Piatang PPnBM Impor
	115149 Piatang PPnBM Lainnya
	11515 Piatang Pajak PBB dan BPHTB
	115151 Piatang PBB Pedesaan
	115152 Piatang PBB Perkotaan
	115153 Piatang PBB Perkebunan

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	115154 Piutang PBB Kehutanan
	115155 Piutang PBB Pertambangan
	115156 Piutang BPHTB
	115159 Piutang PBB Lainnya
11516	Piutang Cukai dan Bea Meterai
	115161 Piutang Cukai Hasil Tembakau
	115162 Piutang Cukai Ethyl Alkohol
	115163 Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol
	115164 Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai
	115165 Piutang Bea Meterai
	115169 Piutang Pendapatan Cukai Lainnya
11517	Piutang Pajak Lainnya
	115171 Piutang Pendapatan dari Penjualan Benda Materai
	115172 Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya
	115173 Piutang Bunga Penagihan PPh
	115174 Piutang Bunga Penagihan PPN
	115175 Piutang Bunga Penagihan PPnBM
	115176 Piutang Bunga Penagihan PTLL
11518	Piutang Pajak Perdagangan Internasional
	115181 Piutang Bea Masuk
	115182 Piutang Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)
	115183 Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean
	115184 Piutang Pendapatan Pabean Lainnya
	115185 Piutang Pajak/Pungutan Ekspor
	115186 Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar
	115187 Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar
11519	Piutang Bea Masuk Tindakan
	115191 Piutang Bea Masuk Antidumping
	115192 Piutang Bea Masuk Imbalan
	115193 Piutang Bea Masuk Tindakan Pengamanan
1152	Piutang Bukan Pajak
	11521 Piutang Bukan Pajak
	115211 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak
	115212 Piutang Lainnya
11522	Piutang PT PPA
	115221 Piutang PT. PPA
11523	Piutang Transfer ke Daerah
	115231 Piutang Transfer Dana Perimbangan

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	115232 Piutang Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
	115239 Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Lainnya
11524	Bagian Lancar Piutang Kredit Investasi Pemerintah
	115241 Bagian Lancar Piutang Kredit Investasi Pemerintah
11525	Piutang Transfer ke Daerah-Diestimasi
	115251 Piutang Transfer Dana Perimbangan-Diestimasi
	115252 Piutang Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian-Diestimasi
11526	Piutang Subsidi
	115261 Piutang Subsidi
1153	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
	11531 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
	115311 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
11532	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - BLU
	115321 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - BLU
1154	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
	11541 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan
	115411 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan
11542	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
	115421 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
11543	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi - BLU
	115431 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi - BLU
1155	Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman
	11551 Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman
	115511 Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman
	115512 Bagian Lancar RDI
	115513 Potensi Tunggakan Yang Dapat Ditagih
11552	Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman
	115521 Potensi Tunggakan yang Dapat Ditagih
	115522 Piutang Bunga Pemberian Pinjaman
	115523 Piutang Denda Pemberian Pinjaman
	115524 Piutang Jasa Bank Pemberian Pinjaman
	115525 Piutang Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman
11553	Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman untuk Penyesuaian Akrual
	115531 Piutang Bunga Pemberian Pinjaman Penyesuaian
	115532 Piutang Denda Pemberian Pinjaman Penyesuaian

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
11559	Suspen Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman
115591	Suspen Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman
115592	Suspen Piutang Bunga Pemberian Pinjaman
115593	Suspen Piutang Denda Pemberian Pinjaman
115594	Suspen Piutang Jasa Bank Pemberian Pinjaman
115595	Suspen Piutang Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman
1156	Piutang dari KUN
11561	Piutang dari KUN
115611	Piutang dari BUN
115612	Piutang dari KPPN
115613	Piutang dari Uang Persediaan yang akan Diterima
115614	Piutang dari Tambahan Uang Persediaan yang akan Diterima
115615	Piutang dari Uang Muka Belanja Barang yang akan Diterima
115616	Piutang dari Uang Muka Belanja Modal yang akan Diterima
115617	Piutang dari Persekot Gaji yang akan Diterima
11563	Piutang dari Kas BLU
115631	Piutang dari Kas BLU
11565	Piutang Kepada RKUN
115651	Piutang Kepada RKUN
11566	Piutang Transito
115661	Piutang dari Penerimaan Transito
11567	Piutang atas Komitmen <i>Treasury Dealing Room</i>
115671	Piutang Komitmen atas Penempatan pada Bank Indonesia
115672	Piutang Komitmen atas Penempatan pada Bank Umum
115673	Piutang Komitmen atas Transaksi SBN-TDR
115674	Piutang Komitmen atas Reverse Repo-TDR
115675	Piutang Komitmen atas Repo-TDR
115676	Piutang Komitmen atas Transaksi <i>Foreign Exchange</i> -TDR
11568	Piutang atas Transaksi Treasury Dealing Room
115681	Piutang Bunga Penempatan pada Bank Indonesia
115682	Piutang Bunga Penempatan pada Bank Umum
115683	Piutang Kupon SBN
115684	Piutang Bunga Reverse Repo
1157	Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum
11571	Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	115711 Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
	115712 Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
	115713 Piutang BLU Penunjang Konstruksi
	115714 Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
	115719 Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
11572	Piutang BLU Pengelola Wilayah/Kawasan Tertentu
	115721 Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita
	115722 Piutang BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
	115729 Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya
11573	Piutang BLU Pengelola Dana Khusus Masyarakat
	115731 Piutang BLU Pengelola Dana Investasi
	115732 Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir
	115739 Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya
11574	Piutang dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat
	115741 Piutang dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat
11579	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional
	115791 Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional
1158	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum
11581	Piutang Sewa - BLU
	115811 Piutang Sewa Tanah - BLU
	115812 Piutang Sewa Gedung - BLU
	115813 Piutang Sewa Ruangan - BLU
	115814 Piutang Sewa Peralatan dan Mesin - BLU
	115815 Piutang Sewa Aset Tetap Lainnya - BLU
	115819 Piutang Sewa Lainnya - BLU
11582	Piutang dari Penjualan Aset - BLU
	115821 Piutang dari Penjualan Aset Tetap - BLU
	115829 Piutang dari Penjualan Aset lainnya - BLU
11583	Piutang dari Tukar Menukar Aset - BLU
	115831 Piutang dari Tukar Menukar Aset Tetap - BLU
	115839 Piutang dari Tukar Menukar Aset Lainnya - BLU
11589	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional
	115891 Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional
1159	Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya
11591	Piutang Lancar Kredit Pemerintah
	115911 Piutang Lancar Kredit Pemerintah (KUMK)
	115912 Piutang Bunga Kredit Pemerintah (KUMK)
	115913 Piutang Denda Keterlambatan Bunga KUMK

KODE AKUN	URAIAN AKUN
115914	Piutang Denda Penyaluran KUMK
11592	Bagian Lancar Piutang Penjaminan Pemerintah
115921	Bagian Lancar Piutang Penjaminan Pemerintah
11593	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang
115931	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
115939	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya
116	PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
1161	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Perpajakan
11611	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Perpajakan
116111	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPh Migas
116112	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPh Non Migas
116113	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPN
116114	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPnBM
116115	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PBB dan BPHTB
116116	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Cukai dan Bea Materai
116117	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Lainnya
116118	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Perdagangan Internasional
116119	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bea Masuk Tindakan
1162	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
11621	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP
116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya
11622	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – PT PPA
116221	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – PT PPA
11623	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman
116231	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman
116232	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar RDI
11624	Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya
116241	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Kredit Pemerintah Bidang Perkebunan

KODE AKUN	URAIAN AKUN
116242	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Kredit Investasi Pemerintah
116243	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
11625	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman
116251	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Potensi Tunggakan Yang Dapat Ditagih
116252	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bunga Pemberian Pinjaman
116253	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Denda Pemberian Pinjaman
11626	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Penjaminan Pemerintah
116261	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Penjaminan Pemerintah
11627	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Subsidi
116271	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek Subsidi
1163	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
11631	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
116311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1164	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
11641	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan
116411	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan
11642	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
1165	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Investasi Permanen
11651	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Investasi Permanen
116511	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Investasi Permanen
1166	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
11661	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa
116611	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Kesehatan

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	116612 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
	116613 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penunjang Konstruksi
	116614 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
	116619 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
11662	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Wilayah/Kawasan Tertentu
	116621 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita
	116622 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Kasawan Ekonomi Terpadu
	116629 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Kasawan Lainnya
11663	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Khusus Masyarakat
	116631 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Investasi
	116632 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir
	116639 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya
11664	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat
	116641 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat
11669	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Operasional Lainnya BLU
	116691 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU
1167	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU
	11671 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa BLU
	116711 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Tanah BLU
	116712 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Gedung BLU
	116713 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU
	116714 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU
	116719 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Lainnya BLU
11672	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset BLU
	116721 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU

KODE AKUN	URAIAN AKUN
116722	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU
11673	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU
116731	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran BLU
116732	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU
11679	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Operasional Lainnya BLU
116791	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU
117 PERSEDIAAN	
1171 Persediaan	
11711 Persediaan Bahan untuk Operasional	
117111 Barang Konsumsi	
117112 Amunisi	
117113 Bahan untuk Pemeliharaan	
117114 Suku Cadang	
11712 Persedian Bahan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	
117121 Pita Cukai, Materai dan Leges	
117122 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
117123 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
117124 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
117125 Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	
117126 Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	
117127 Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	
117128 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	
117129 Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	
11713 Persediaan Bahan untuk Proses Produksi	
117131 Bahan Baku	
117132 Barang dalam Proses	
11714 Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	
117141 Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	
11719 Persediaan Bahan Lainnya	
117191 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	117192 Persediaan Barang Hasil Sitaan
	117199 Persediaan Lainnya
1172	Persediaan Badan Layanan Umum
	11721 Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa
	117211 Persediaan BLU Pelayanan Kesehatan
	117212 Persediaan BLU Pelayanan Pendidikan
	117213 Persediaan BLU penunjang Konstruksi
	117214 Persediaan BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
	117219 Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
	11722 Persediaan BLU Pengelola Wilayah/Kawasan Tertentu
	117221 Persediaan BLU Pengelola Kawasan Otorita
	117222 Persediaan BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
	117229 Persediaan BLU Pengelola Kawasan Lainnya
	11723 Persediaan BLU Pengelola Dana Khusus Masyarakat
	117231 Persediaan BLU Pengelola Dana Investasi
	117232 Persediaan BLU Pengelola Dana Bergulir
	117239 Persediaan BLU Pengelola Dana Lainnya
	1179 Persediaan yang Belum Diregister
	11791 Persediaan yang Belum Diregister
	117911 Persediaan yang Belum Diregister
118	PIUTANG PFK
	1181 Piutang PFK I
	11811 Piutang PFK I
	118111 Piutang PFK 2 % Gaji
	118112 Piutang PFK 2% Pensiunan PNS
	118113 Piutang PFK Beras Bulog
	118114 Piutang PFK 8% Gaji
	118115 Piutang PFK Tabungan Wajib Perumahan
	118116 Piutang PFK 2 % Pensiunan TNI/PNS Kemhan dan Polri/PNS Polri
	118117 Piutang PFK 3 % Iuran Jaminan Kesehatan
	118118 Piutang PFK 2 % Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
	118119 Piutang PFK Lain-lain
	11812 Piutang PFK II
	118121 Piutang PFK Wesel Pemerintah
	118122 Piutang Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu
	1182 Piutang Pengembalian Escrow ke RKUN
	11821 Piutang Pengembalian Escrow Pajak
	118211 Piutang Pengembalian Escrow Pajak

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	11822 Piutang Pengembalian Escrow PNBP
	118221 Piutang Pengembalian Escrow PNBP
12 INVESTASI JANGKA PANJANG	
121 INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN	
1212 Dana Restrukturisasi Perbankan	
12121 Dana Restrukturisasi Perbankan	
121211 Dana Restrukturisasi Perbankan	
1213 Dana Bergulir	
12131 Program Kemitraan (PK)	
121311 Program Kemitraan (PK)	
12132 Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	
121321 Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga	
12133 Dana Bergulir Lainnya	
121331 Dana Bergulir Lainnya	
1214 Investasi dalam Obligasi	
12141 Investasi dalam Obligasi	
121411 Investasi dalam Obligasi	
1215 Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan	
12151 Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan	
121511 Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan	
1216 Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum	
12161 Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa - Non Permanen	
121611 Investasi BLU Pelayanan Kesehatan - Non Permanen	
121613 Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Non Permanen	
121614 Investasi BLU Penunjang Konstruksi - Non Permanen	
121615 Investasi BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi - Non Permanen	
121619 Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya - Non Permanen	
12162 Investasi BLU Pengelola Wilayah/Kawasan tertentu - Non Permanen	
121621 Investasi BLU Pengelola Kawasan Otorita - Non Permanen	
121622 Investasi BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu - Non Permanen	
121629 Investasi BLU Pengelola Kawasan Lainnya - Non Permanen	
12163 Investasi BLU Pengelola Dana Khusus untuk Masyarakat - Non Permanen	
121631 Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Non Permanen	

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	121632 Investasi BLU Pengelola Dana Bergulir - Non Permanen
	121639 Investasi BLU Pengelola Dana Lainnya - Non Permanen
1219	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya
	12191 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya
	121911 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya
122	INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN
	1221 Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah
	12211 Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Negara/Daerah
	122111 Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero
	122112 Penyertaan Modal Pemerintah pada PERUM
	12212 Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional
	122121 Penyertaan Modal Luar Negeri
	12213 Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya
	122131 Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya
	1222 Investasi Permanen Badan Layanan Umum
	12221 Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa - Permanen
	122211 Investasi BLU Pelayanan Kesehatan - Permanen
	122212 Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Permanen
	122213 Investasi BLU Penunjang Konstruksi - Permanen
	122214 Investasi BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi - Permanen
	122219 Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya - Permanen
	12222 Investasi BLU Pengelola Kawasan - Permanen
	122221 Investasi BLU Pengelola Kawasan Otorita - Permanen
	122222 Investasi BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu - Permanen
	122223 Investasi BLU Pengelola Kawasan Lainnya - Permanen
	12223 Investasi BLU Pengelola Dana - Permanen
	122231 Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Permanen
	122232 Investasi BLU Pengelola Dana Bergulir - Permanen
	122239 Investasi BLU Pengelola Dana Lainnya - Permanen
1229	Investasi Permanen Lainnya
	12291 Investasi Permanen Lainnya
	122911 Investasi dalam Obligasi

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	122912 Investasi pada Otorita
	122913 Investasi pada Bank Indonesia
	122919 Investasi Lain-lain
123 Dana Bergulir Diragukan Tertagih	
1231 Dana Bergulir Diragukan Tertagih	
12311 Dana Bergulir Diragukan Tertagih	
123111 Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Program Kemitraan	
123112 Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Kementerian Negara/Lembaga	
123113 Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Lainnya	
1232 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	
12321 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	
123211 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	
1233 Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih	
12331 Investasi Non Permanen BLU Penyedia Barang dan Jasa Diragukan Tertagih	
123311 Investasi Non Permanen BLU Pelayanan Kesehatan Diragukan Tertagih	
123312 Investasi Non Permanen BLU Pelayanan Pendidikan Diragukan Tertagih	
123313 Investasi Non Permanen BLU Penunjang Konstruksi Diragukan Tertagih	
123314 Investasi Non Permanen BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi Diragukan Tertagih	
123319 Investasi Non Permanen BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya Diragukan Tertagih	
12332 Investasi Non Permanen BLU Pengelola Wilayah/Kawasan Tertentu Diragukan Tertagih	
123321 Investasi Non Permanen BLU Pengelola Kawasan Otorita Diragukan Tertagih	
123322 Investasi Non Permanen BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu Diragukan Tertagih	
123329 Investasi Non Permanen BLU Pengelola Kawasan Lainnya Diragukan Tertagih	
12333 Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Khusus untuk Masyarakat Diragukan Tertagih	
123331 Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Investasi Diragukan Tertagih	
123332 Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Bergulir Diragukan Tertagih	
123339 Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Lainnya Diragukan Tertagih	

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
13 ASET TETAP	
131 TANAH	
1311 Tanah	
13111 Tanah	
131111 Tanah	
1312 Tanah Belum Diregister	
13121 Tanah Belum Diregister	
131211 Tanah Belum Diregister	
1313 Tanah Badan Layanan Umum	
13131 Tanah - BLU	
131311 Tanah - BLU	
1314 Tanah Belum Diregister – BLU	
13141 Tanah Belum Diregister – BLU	
131411 Tanah Belum Diregister – BLU	
132 PERALATAN DAN MESIN	
1321 Peralatan dan Mesin	
13211 Peralatan dan Mesin	
132111 Peralatan dan Mesin	
1322 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
13221 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
132211 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
1323 Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum	
13231 Peralatan dan Mesin - BLU	
132311 Peralatan dan Mesin - BLU	
1324 Peralatan dan Mesin Belum Diregister – BLU	
13241 Peralatan dan Mesin Belum Diregister – BLU	
132411 Peralatan dan Mesin Belum Diregister – BLU	
133 GEDUNG DAN BANGUNAN	
1331 Gedung dan Bangunan	
13311 Gedung dan Bangunan	
133111 Gedung dan Bangunan	
1332 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
13321 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
133211 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
1333 Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum	
13331 Gedung dan Bangunan - BLU	
133311 Gedung dan Bangunan - BLU	
1334 Gedung dan Bangunan Belum Diregister - BLU	
13341 Gedung dan Bangunan Belum Diregister - BLU	
133411 Gedung dan Bangunan Belum Diregister - BLU	

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
134 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
1341 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
13411 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
134111 Jalan dan Jembatan	
134112 Irigasi	
134113 Jaringan	
1342 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
13421 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
134211 Jalan dan Jembatan Belum Diregister	
134212 Irigasi Belum Diregister	
134213 Jaringan Belum Diregister	
1343 Jalan,Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum	
13431 Jalan, Irigasi, dan Jaringan - BLU	
134311 Jalan, Irigasi, dan Jaringan - BLU	
1344 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister - BLU	
13441 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister - BLU	
134411 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister - BLU	
135 ASET TETAP LAINNYA	
1351 Aset Tetap Lainnya	
13511 Aset Tetap Renovasi	
135111 Aset Tetap Renovasi	
13512 Aset Tetap Lainnya	
135121 Aset Tetap Lainnya	
1352 Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum	
13521 Aset Tetap Lainnya - BLU	
135211 Aset Tetap Lainnya - BLU	
13522 Aset Tetap Renovasi – BLU	
135221 Aset Tetap Renovasi – BLU	
136 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	
1361 Konstruksi Dalam Penggerjaan	
13611 Konstruksi Dalam Penggerjaan	
136111 Konstruksi Dalam penggerjaan	
1362 Konstruksi Dalam Penggerjaan – BLU	
13621 Konstruksi Dalam Penggerjaan– BLU	
136211 Konstruksi Dalam Penggerjaan – BLU	
137 AKUMULASI PENYUSUTAN	
1371 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	
13711 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	
137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
13712	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU
137121	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU
1372	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
13721	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
13722	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU
137221	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU
1373	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan
13731	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan
13732	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
137321	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
1374	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
13741	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
13742	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU
137421	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU
139	ASET TETAP YANG BELUM DIREGISTER
1391	Aset Tetap yang Belum Diregister
13911	Aset Tetap yang Belum Diregister
139111	Aset Tetap yang Belum Diregister
14	DANA CADANGAN
141	DANA CADANGAN
1411	Dana Cadangan
14111	Dana Cadangan
141111	Dana Cadangan
15	PIUTANG JANGKA PANJANG
151	PIUTANG TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN
1511	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
15111	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
151111	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
1512	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran BLU
15121	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran-Badan Layanan Umum
151211	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran-Badan Layanan Umum

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
152 PIUTANG TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TAGIHAN TUNTUTAN GANTI RUGI	
1521 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
15211 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	
152111 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	
1522 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	
15221 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi-Badan Layanan Umum	
152211 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi-Badan Layanan Umum	
153 PIUTANG JANGKA PANJANG PEMBERIAN PINJAMAN	
1531 Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	
15311 Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	
153111 Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	
153112 Aset Lainnya RDI	
153113 Piutang yang belum tertagih ( <i>Unbilled</i> )	
153114 Piutang yang belum teridentifikasi ( <i>Unidentified</i> )	
153115 Selisih piutang ( <i>On Account</i> )	
153116 Piutang yang belum terekonsiliasi ( <i>Unapplied</i> )	
153117 Aset Lainnya Kredit Program	
153118 Piutang Pemberian Pinjaman yang belum Disesuaikan	
153119 Piutang Transito Pengalihan Pemberian Pinjaman	
15319 Suspen Piutang Pemberian Pinjaman	
153191 Suspen Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	
154 PIUTANG JANGKA PANJANG KREDIT PEMERINTAH	
1541 Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah	
15411 Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah Bidang Pertanian dan Perkebunan	
154111 Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah KUT-TP 1999/2000	
154112 Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah Dana Cadangan KUT-TP	
154113 Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah KKop Pangan MP2000	
154114 Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah PIR dan UPP Perkebunan	
154115 Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah (KUMK)	
154116 Piutang yang belum tertagih ( <i>unbilled</i> ) atas Kredit Pemerintah (KUMK)	

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
15412	Piutang Jangka Panjang atas Kredit Investasi Pemerintah
154121	Piutang Jangka Panjang atas Kredit Investasi Pemerintah
154122	Piutang Jangka Panjang atas Kredit Investasi Pemerintah yang belum disesuaikan
15413	Piutang Jangka Panjang atas Penjaminan Pemerintah
154131	Piutang Jangka Panjang atas Penjaminan Pemerintah
155	PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA
1551	Piutang Jangka Panjang lainnya
15511	Piutang Jangka Panjang lainnya
155111	Piutang Jangka Panjang lainnya
15512	Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
155121	Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
1552	Piutang Jangka Panjang Subsidi
15521	Piutang Jangka Panjang Subsidi
155211	Piutang Jangka Panjang Subsidi
156	PENYISIHAN PIUTANG JANGKA PANJANG
1561	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran
15611	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Penjualan Angsuran
156111	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Penjualan Angsuran
1562	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran BLU
15621	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Penjualan Angsuran BLU
156211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Penjualan Angsuran BLU
1563	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
15631	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perpendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
1564	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU
15641	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU
156411	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU
1565	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman
15651	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	156511 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman
	156512 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Aset Lainnya RDI
	156513 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Aset Lainnya Kredit Program
1566	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Kredit Pemerintah
	15661 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Kredit Pemerintah
	156611 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Kredit Pemerintah Bidang Pertanian dan Perkebunan
	156612 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Kredit Investasi Pemerintah
	15662 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Penjaminan Pemerintah
	156621 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Penjaminan Pemerintah
1567	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH JANGKA PANJANG SUBSIDI
	15671 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang Subsidi
	156711 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang Subsidi
1569	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya
	15691 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya
	156911 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya
	15692 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
	156921 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
16	ASET LAINNYA
161	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA
	1611 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
	16111 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
	161111 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
162	ASET TIDAK BERWUJUD
	1621 Aset Tak Berwujud
	16211 Goodwill
	162111 Goodwill
	16212 Hak Cipta
	162121 Hak Cipta
	16213 Royalti
	162131 Royalti
	16214 Paten
	162141 Paten

KODE AKUN	URAIAN AKUN
16215	Software 162151 Software
16216	Lisensi 162161 Lisensi
16217	Hasil Kajian/Penelitian 162171 Hasil Kajian/Penelitian
16219	Aset Tak Berwujud Lainnya 162191 Aset Tak Berwujud Lainnya
1622	Aset Tak Berwujud- Badan Layanan Umum 16221 Software-Badan Layanan Umum 162211 Software-Badan Layanan Umum
16222	Hak Cipta BLU 162221 Hak Cipta BLU
16223	Royalti BLU 162231 Royalti BLU
16224	Paten BLU 162241 Paten BLU
16229	Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum 162291 Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum
1623	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan 16231 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan 162311 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
1624	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan-BLU 16241 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan-BLU 162411 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan-BLU
163	DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA 1631 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya 16311 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya 163111 Cadangan Dana Reboisasi 163112 Cadangan Dana Subsidi/PSO 163113 Cadangan Dana Bagi Hasil SDA 163114 Dana untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) 163116 DAU yang belum dibagi 163117 Dana pada Bapertarum 163118 Cadangan Dana Sebelum disesuaikan 163119 Dana Lainnya 16312 Trust Fund 163121 Trust Fund 16313 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya II 163131 Dana Perhitungan Fihak Ketiga

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
1632	Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri
16321	Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri
164	DANA PENJAMINAN
1641	Dana Cadangan Penjaminan
16411	Dana Cadangan Penjaminan
164111	Dana Cadangan Penjaminan
1642	Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi
16421	Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi
164211	Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi
165	DANA KELOLAAN BLU
1651	Dana Kelolaan Badan Layanan Umum
16511	Dana Kelolaan Badan Layanan Umum
165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/ diinvestasikan
165112	Dana Kelolaan BLU yang Ditarik ke Rekening BUN
166	ASET LAIN-LAIN
1661	Aset Lain-lain
16611	Aset Lain-lain K/L
166111	Aset Lain-lain
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan
16612	Aset Lain-lain BUN
166121	Aset Eks BPPN
166122	Aset yang Diserahkan pada PT Perusahaan Pengelola Aset
166123	Aset dari BUMN yang belum ditetapkan Statusnya
166124	Aset yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
166125	Aset Eks Kelolaan PT. PPA
166126	Aset Eks Pertamina
166127	Aset yang Berasal dari Kontraktor PKP2B
166128	Aset Idle yang sudah diserahkan ke DJKN
166129	Aset Lain-lain BUN
1662	Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum
16621	Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum
166211	Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum
166212	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	166213 Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya
	166214 Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan - BLU
1663	Aset Lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP dan Kas Besi
	16631 Aset Lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP
	166311 Aset Lainnya Reklasifikasi dari Kas di Bendahara Pengeluaran-PFK Minus
	166312 Aset Lainnya Reklasifikasi dari Kas di Bendahara Pengeluaran-BPPR Minus
	166313 Aset Lainnya Reklasifikasi dari Kas di Bendahara Pengeluaran-BPJ Minus
	16632 Aset Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi
	166321 Aset Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi - BPPR Minus
	166322 Aset Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi - BPJ Minus
1664	Aset Lainnya yang Belum Deregister
	16641 Aset Lainnya yang Belum Deregister
	166411 Aset Lainnya yang Belum Deregister
167	ASET LAINNYA DARI UNIT PEMERINTAH LAINNYA
	1671 Aset Lainnya dari Ekuitas pada Unit Badan Lainnya
	16711 Aset Lainnya dari Ekuitas pada Unit Badan Lainnya
	167111 Aset Lainnya dari ekuitas pada Unit Badan Lainnya
168	ASET LAINNYA PEMBERIAN PINJAMAN
	1681 Aset Lainnya Pemberian Pinjaman
	16811 Aset Lainnya Pemberian Pinjaman
	168111 Aset Lainnya Pemberian Pinjaman
	168112 Aset Lainnya Piutang Jangka Panjang
	168113 Aset Lainnya RDI
	168114 Aset Lainnya Kredit Program
169	AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA
	1691 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
	16911 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak ketiga
	169111 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
	16912 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain K/L
	169121 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain
	169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan
	16913 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN
	169131 Akumulasi Penyusutan Aset Eks BPPN
	169132 Akumulasi Penyusutan Aset yang diserahkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	169133 Akumulasi Penyusutan Aset dari BUMN yang belum ditetapkan statusnya
	169134 Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
	169135 Akumulasi Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA
	169136 Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina
	169137 Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari Kontraktor PKP2B
	169138 Akumulasi Penyusutan Aset Idle yang sudah diserahkan ke DJKN
	169139 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN
1692	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya BLU
	16921 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum
	169211 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum
	169212 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan Badan Layanan Umum
1693	Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya
	16931 Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya
	169311 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
	169312 Akumulasi Amortisasi Hak Cipta
	169313 Akumulasi Amortisasi Royalti
	169314 Akumulasi Amortisasi Paten
	169315 Akumulasi Amortisasi Software
	169316 Akumulasi Amortisasi Lisensi
	169317 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya
	169318 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan
1694	Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya BLU
	16941 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud-Badan Layanan Umum
	169411 Akumulasi Amortisasi Software-Badan Layanan Umum
	169412 Akumulasi Amortisasi Hak Cipta BLU
	169413 Akumulasi Amortisasi Royalti BLU
	169414 Akumulasi Amortisasi Paten BLU
	169415 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum
	169416 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan - BLU

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
19 AKUN SETUP	
191 AKUN SETUP	
1911 Akun Set up A	
19111 Akun Set up A	
191111 Material	
191112 Deffered COGS	
1912 Cross Currency Type Account	
19121 Cross Currency Type Account	
191211 Cross Currency Type Account	
2 KEWAJIBAN	
21 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
211 UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA	
2111 Utang Perhitungan Fihak Ketiga	
21111 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) I	
211111 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji	
211112 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Pensiunan PNS	
211113 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog	
211114 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 8% Gaji	
211115 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tabungan Wajib Perumahan	
211116 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2 % Pensiunan TNI/PNS Kemhan dan Polri/PNS Polri	
211117 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 3 % Iuran Jaminan Kesehatan	
211118 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2 % Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT	
211119 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lain-lain	
21112 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lainnya	
211121 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP Migas)	
211122 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Penutupan Rekening	
211123 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga Wesel Pemerintah	
21115 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) II	
211151 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada PT Taspen	
211152 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada PT Asabri	

KODE AKUN	URAIAN AKUN
211153	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada PT Askes
211154	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada Pusku POLRI
211155	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada Pusku Kemhan
211156	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Penyaluran Beras BULOG
21116	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Setoran Pajak Rokok dan Pengalihan Piutang
211161	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Setoran Pajak Rokok
211162	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengalihan Piutang
211163	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi
211164	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pemotongan DAU atau DBH untuk Alokasi Dana Desa (ADD)
212	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA
2121	Utang kepada Pihak Ketiga I
21211	Belanja Pemerintah Pusat yang Masih Harus Dibayar
212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar
212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar
212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar
212114	Belanja Hibah yang Masih Harus Dibayar
212115	Belanja Bantuan Sosial yang Masih Harus Dibayar
212116	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar
212119	Belanja Lain-lain yang Masih Harus Dibayar
21212	Utang kepada Pihak Ketiga BLU
212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU
212122	Utang Usaha BLU
21213	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar
212131	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri yang Masih Harus Dibayar
212132	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri yang Masih Harus Dibayar
212133	Penyertaan Modal Negara yang Masih Harus Dibayar
212134	RDI/RPD yang Masih Harus Dibayar
212135	Dukungan Infrastruktur yang Masih Harus Dibayar
212136	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar
212137	Pengeluaran Pembiayaan Lain-Lain yang Masih Harus Dibayar

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
21214	Pengeluaran Non Anggaran yang Masih Harus Dibayar
212141	Pengeluaran Non Anggaran PFK yang Masih Harus Dibayar
212142	Pelunasan Wesel Pemerintah yang Masih Harus Dibayar
212143	Pembayaran Prefinancing dan PFK BUN Lainnya yang Masih Harus Dibayar
212144	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar
212145	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga yang Masih Harus Dibayar
21215	Utang Pihak Ketiga Migas
212151	Utang Pihak Ketiga – Fee Penjualan Migas Bagian Negara
212152	Utang Pihak Ketiga Migas-Pajak Air Tanah ke Pemda
212153	Utang Pihak Ketiga Migas-Pajak Penerangan Jalan non PLN ke Pemda
212154	Utang Pihak Ketiga Migas – PBB Migas dan Utang Lainnya
212155	Utang Pihak Ketiga Migas-Reimbursement DMO Bagian KKKS
212156	Utang Pihak Ketiga Migas-Reimbursement PPN KKKS
212157	Utang Pihak Ketiga Migas-Reimbursement Underlifting KKKS
212158	Utang Pihak Ketiga Migas Transito
212159	Utang Pihak Ketiga Migas – Fee Penjualan Migas Bagian Negara.
21216	Utang Pihak Ketiga Non Migas
212161	Utang Pihak Ketiga atas Penjualan SPN
212162	Utang Pihak Ketiga-Penjualan Obligasi Negara DN
212163	Utang Pihak Ketiga-Bunga Obligasi Negara DN
212164	Utang Pihak Ketiga-Penjualan/Penerbitan Obligasi Negara Valas
212165	Utang Pihak Ketiga-Bunga Obligasi Negara Valas
212166	Utang Pihak Ketiga-Penerbitan Surat Utang Negara
212167	Utang Pihak Ketiga kepada Perusahaan Pertambangan Umum Non Migas
212168	Utang Pihak Ketiga Geothermal-Reimbursement PPN
212169	Utang Pihak Ketiga Non Migas Transito
21217	Utang Pihak Ketiga Komitmen <i>Treasury Dealing Room</i>
212171	Utang Komitmen atas Penempatan pada bank Indonesia
212172	Utang Komitmen atas Penempatan pada Bank Umum

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
212173	Utang Komitmen atas Transaksi SBN-TDR
212174	Utang Komitmen atas Reverse Repo-TDR
212175	Utang Komitmen atas Repo-TDR
212176	Utang Komitmen atas Transaksi <i>Foreign Exchange-TDR</i>
212177	Utang Komitmen atas Kupon SBN-TDR
21218	Utang Pihak Ketiga Transaksi <i>Treasury Dealing Room</i>
212181	Utang Repo-TDR
21219	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya I
212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya
212192	Dana Pihak Ketiga
212193	Dana Pihak Ketiga BLU
212194	Utang Pihak Ketiga - PBB Panas Bumi
212195	Utang Pihak Ketiga - Penggantian Bonus Produksi Panas Bumi
212196	Utang Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi – Reimbursement PPN
212197	Utang Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi – PBB Panas Bumi
212198	Utang Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi – Penggantian Bonus Produksi
212199	Bagian Pemerintah dari Penerimaan Panas Bumi yang belum dipindahbukukan
2122	Utang kepada Pihak Ketiga II
21221	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya II
212211	Utang Pihak Ketiga - Reimbursement PPN Panas Bumi
212212	Utang Transito Panas Bumi
213	UTANG BUNGA
2131	Utang Biaya Pinjaman
21311	Utang Bunga
213111	Utang Bunga Luar Negeri
213112	Utang Bunga Dalam Negeri
213113	Utang Bunga-Pinjaman Dalam Negeri
21312	Discount
213121	Discount Surat Perbendaharaan Negara dalam Rupiah
213122	Discount Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah
213123	Discount Surat Perbendaharaan Negara dalam Valuta Asing
213124	Discount Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta asing
213125	Discount Surat Perbendaharaan Negara Syariah dalam Rupiah

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
213126	Discount Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah
213127	Discount Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing
213128	Discount Surat Perbendaharaan Negara Syariah dalam Valuta Asing
21313	Premium
213131	Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Rupiah.
213132	Premium Bagian Lancar Obligasi Negara valuta Asing
213133	Premium Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah
213134	Premium Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing
21314	Utang Diskonto yang belum disesuaikan
213141	Utang Diskonto yang Belum Disesuaikan
21315	Utang Bunga Transaksi <i>Treasury Dealing Room</i>
	213151 Utang Bunga Repo-TDR
214	UTANG SUBSIDI
2141	Utang Subsidi
21411	Utang Subsidi
214111	Utang Subsidi
214112	Utang Subsidi - Estimasi
2142	Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar
21421	Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar
	214211 Belanja Subsidi yang Masih Harus Dibayar
215	UTANG TRANSFER
2151	Utang Transfer
21511	Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar
215111	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar
215112	Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian yang Masih Harus Dibayar
21512	Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar - Estimasi
215121	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar - Estimasi
215122	Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Yang Masih Harus Dibayar - Estimasi
216	BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG
2161	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
21611	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang -Pinjaman
216111	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri
216112	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
21612	Bagian Lancar Obligasi Negara-Rupiah
216121	Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah
21613	Bagian Lancar Obligasi Negara-Valuta Asing
216131	Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta Asing
21614	Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara-dalam Rupiah
216141	Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah
21615	Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara-Valuta Asing
216151	Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing
217	UTANG SURAT BERHARGA NEGARA
2171	Utang Surat Berharga Negara - Jangka Pendek
21711	Utang Surat Perbendaharaan Negara Rupiah
217111	Surat Perbendaharaan Negara dalam Rupiah
217112	Utang Obligasi Negara dalam Rupiah
21712	Utang Surat Perbendaharaan Negara dalam Valuta Asing
217121	Surat Perbendaharaan Negara dalam Valuta Asing
217122	Utang Obligasi Negara dalam Valuta Asing
21713	Utang Surat Berharga Syariah Negara-Rupiah Jangka Pendek
217131	Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah
217132	Surat Perbendaharaan Negara Syariah
21714	Utang Surat Berharga Syariah Negara-Valuta Asing Jangka Pendek
217141	Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing
218	UTANG YANG BELUM DITAGIHKAN
2181	Utang Yang Belum Ditagihkan
21811	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya
218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya
2182	Hibah Langsung yang Belum Disahkan
21821	Hibah Langsung yang Belum Disahkan
218211	Hibah Langsung yang Belum Disahkan
219	UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
2191	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
21911	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak
219111	Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh
219112	Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM
219113	Utang Kelebihan Bayar Cukai
219114	Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB

KODE AKUN	URAIAN AKUN
219115	Utang Kelebihan Bayar Pajak BPHTB
219116	Utang Kelebihan Bayar Bea Masuk
219117	Utang Kelebihan Bayar Bea Keluar
21912	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak
219121	Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Sumber Daya Alam
219122	Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Bagian Laba BUMN
219123	Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya
2192	Pendapatan Diterima di Muka
21921	Pendapatan Diterima di Muka
219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka
219212	Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima di Muka
219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU
21922	Pendapatan Bea Masuk Diterima Dimuka
219221	Pendapatan Bea Masuk Diterima Di Muka
219222	Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka KITE Diterima Di Muka
219223	Pendapatan Pabean Lainnya Diterima Di Muka
219224	Pendapatan Bea Masuk Antidumping Diterima Di Muka
219225	Pendapatan Bea Masuk Imbalan Diterima Di Muka
219226	Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Diterima Di Muka
21923	Pendapatan Bea Keluar Diterima Dimuka
219231	Pendapatan Bea Keluar Diterima Di Muka
2193	Uang Muka Rekening Khusus
21931	Uang Muka Rekening Khusus
219311	Uang Muka Rekening Khusus
2194	Uang Muka
21941	Uang Muka dari KUN
219411	Uang Muka dari KUN
219412	Uang Muka dari Kementerian Negara/Lembaga
2195	Uang Muka dari KPPN
21951	Uang Muka dari KPPN
219511	Uang Muka dari KPPN
2196	Pendapatan Yang Ditangguhkan
21961	Pendapatan yang Ditangguhkan
219611	Pendapatan yang Ditangguhkan
219612	Pendapatan Kupon SBN Ditangguhkan
219613	Pendapatan Selisih Harga SBN Ditangguhkan

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
21962	Pendapatan Migas yang Ditangguhkan
219621	Pendapatan Panas Bumi Ditangguhkan
219622	Pendapatan Migas Ditangguhkan
219623	Pendapatan Setoran Pertambangan Ditangguhkan
219624	Pendapatan yang Ditangguhkan karena Retur pada Rekening Pemerintah Lainnya
21963	Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan
219631	Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan Dalam Negeri
219632	Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri
21967	Hibah Langsung yang Belum Disahkan
219671	Hibah Langsung yang Belum Disahkan
2197	Utang Kepada KUN
21971	Utang Kepada KUN
219711	Utang Kepada KUN
21972	Utang Kepada kas BLU
219721	Utang Kepada kas BLU
2198	Utang Kepada RPL
21981	Utang Kepada RPL
219811	Utang Kepada RPL
21982	Utang Talangan
219821	Utang Talangan Dana Cadangan Subsidi
219822	Utang Talangan Dana Cadangan DBH
219823	Utang Talangan Dana Cadangan PMN
2199	Utang Jangka Pendek Lainnya
21991	Utang Jangka Pendek lainnya
219911	Utang Jangka Pendek Perbankan
219912	Dana yang akan diserahkan kepada BLU Bidang Pendidikan
219913	Utang Jangka Pendek Lain-lain
219914	Utang Retensi
21992	Utang jangka Pendek dalam Rangka Rekening Khusus
219921	Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Dalam Negeri
219922	Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri
219923	Utang Pihak Ketiga dalam rangka tujuan tertentu
21993	Utang Escrow
219931	Utang Escrow Dana Reboisasi
219932	Utang Escrow Dana Subsidi/PSO
219933	Utang Escrow Dana Bagi Hasil SDA

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	219934 Utang Escrow Dana Penyertaan Modal Negara
	219935 Utang Pengembalian <i>Escrow</i> Pajak
	219936 Utang Pengembalian <i>Escrow</i> PNBP
	219937 Utang Dana Penjaminan
21994	Utang Jangka Pendek Sementara
	219941 Utang Jangka Pendek Sementara Karena Kesalahan Rekening Pihak Ketiga
	219942 Utang Jangka Pendek sementara Pengembalian Uang Persediaan (UP)
	219943 Utang Jangka Pendek sementara Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP)
	219944 Utang Jangka Pendek sementara karena kesalahan Sistem Perbankan
21995	Utang Permintaan Uang Muka Belanja
	219951 Utang Permintaan Persekot Gaji
21996	Utang Bendahara
	219961 Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
	219962 Utang Perwalian Bendahara yang Belum Disampaikan Kepada yang Berhak
	219963 Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor
	219964 Utang Pajak Bendahara BLU yang Belum Disetor
21997	Pembiayaan Surat Perbendaharaan Negara Ditangguhkan
	219971 Pembiayaan Surat Perbendaharaan Negara Ditangguhkan
	219972 Pembiayaan Surat Perbendaharaan Negara Syariah Ditangguhkan
21998	Pembiayaan yang diterima RKUN yang Ditangguhkan
	219981 Pembiayaan yang diterima RKUN yang Ditangguhkan
21999	Pembiayaan yang Ditangguhkan
	219991 Pembiayaan yang Ditangguhkan dalam negeri
	219992 Pembiayaan yang Ditangguhkan luar negeri
	219993 Pembiayaan Pinjaman Program yang Ditangguhkan
	219994 Pembiayaan Pinjaman Proyek yang Ditangguhkan
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
221	UTANG JANGKA PANJANG DALAM NEGERI
2211	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan
	22111 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan
	221111 Utang Perbankan Jangka Panjang
22112	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan BLU
	221121 Utang Perbankan Jangka Panjang BLU

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
2212	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan
22121	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Obligasi Negara Dalam Rupiah
221211	Utang Dalam Negeri Obligasi Negara Dalam Rupiah
22122	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Obligasi Negara Dalam Valuta Asing
221221	Utang Dalam Negeri Obligasi Negara Dalam Valuta Asing
22123	Utang Surat Berharga Syariah Negara Rupiah Jangka Panjang
221231	Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang dalam Rupiah
22124	Utang Surat Berharga Syariah Negara Valuta Asing Jangka Panjang
221241	Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang dalam Valuta Asing
22125	Discount
221251	Discount Obligasi Negara - dalam Rupiah
221252	Discount Obligasi Negara - dalam Valuta Asing
221253	Discount SBSN - dalam Rupiah
221254	Discount SBSN - dalam Valuta Asing
22126	Premium
221261	Premium Obligasi Negara - dalam Rupiah
221262	Premium Obligasi Negara - dalam Valuta Asing
221263	Premium SBSN - dalam Rupiah
221264	Premium SBSN - dalam Valuta Asing
22127	Utang Jangka Panjang-Pinjaman Dalam Negeri
221271	Utang Jangka Panjang-Pinjaman Dalam Negeri
2213	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT
22131	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT
221311	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT
2214	Pembiayaan Surat Utang Negara Ditangguhkan
22141	Pembiayaan Surat Utang Negara Ditangguhkan
221411	Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan
2215	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN
22151	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN
221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN
2216	Utang Jangka Panjang Subsidi
22161	Utang Jangka Panjang Subsidi
221611	Utang Jangka Panjang Subsidi
2219	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya
22191	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	221911 Utang Jangka Panjang Bapertarum
	221912 Utang Jangka Panjang Rekening Pembangunan Hutan
	221919 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya
22192	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU
	221929 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU
222	UTANG JANGKA PANJANG LUAR NEGERI
	2221 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan
	22211 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan
	22215 Utang Program
	22216 Utang Proyek
2222	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan
	22221 Utang Sewa-Beli
	222211 Utang Sewa-Beli
2223	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya
	22231 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya
	222311 Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lain-lain
225	UTANG TRANSFER JANGKA PANJANG
	2251 Utang Transfer Jangka Panjang
	22511 Utang Transfer Jangka Panjang
	225111 Utang Transfer Dana Perimbangan Jangka Panjang
	225112 Utang Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Jangka Panjang
23	DICADANGKAN UNTUK KOMITMEN BELANJA
231	DICADANGKAN UNTUK KOMITMEN BELANJA
	2311 Dicadangkan untuk Komitmen Belanja
	23111 Dicadangkan untuk Komitmen Belanja
	231111 Dicadangkan untuk Komitmen Belanja
29	AKUN SETUP
291	AKUN SETUP
	2912 Akun Set up A
	29121 Akun Set up
	291211 Inventory AP Accrual
	291212 Expenses AP Accrual
	291213 Unearned Revenue
3	EKUITAS
31	EKUITAS
	311 EKUITAS
	3113 SAL dan SILPA BLU
	31131 SAL BLU
	311311 SAL BLU

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
311312	Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
311313	SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi
311314	Penggunaan SAL BLU
311315	Penyesuaian SAL BLU
31132	SILPA BLU
311321	SILPA BLU
3117	Keuntungan/Kerugian yang Belum Terealisasi
31171	Selisih Kurs
311711	Selisih Kurs
3119	Ekuitas Dana Lancar Lainnya
31191	Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung
311911	Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung
313	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS
3131	Due to - Due from
31311	Ditagihkan ke Entitas Lain
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain
31312	Diterima dari Entitas Lain
313121	Diterima dari Entitas Lain
3132	Transfer
31321	Transfer Keluar
313211	Transfer Keluar
31322	Transfer Masuk
313221	Transfer Masuk
31323	Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU
313231	Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU
39	EKUITAS
391	EKUITAS
3911	Ekuitas
39111	Ekuitas
391111	Ekuitas
391112	Surplus/Defisit-LO
391113	Koreksi Nilai Persediaan
391114	Revaluasi Aset Tetap
391115	Dana yang Disediakan Untuk Pengalihan Aset
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
391117	Penyesuaian Nilai Persediaan
391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi
391119	Koreksi Lainnya

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
39112	Ekuitas Transaksi Lainnya
391121	Ekuitas Transaksi Lainnya
391122	Ekuitas Badan Lainnya
39113	Ekuitas Pengesahan Hibah
391131	Pengesahan Hibah Langsung
391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung
391133	Pengesahan Hibah Langsung TAYL
39114	Ekuitas Surplus BLU
391141	Setoran Surplus BLU
39115	Koreksi Atas Reklasifikasi Aset
391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya

## **SEGMENT AKUN PENDAPATAN-LO**

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
4 PENDAPATAN NEGARA	
41 PENDAPATAN PERPAJAKAN	
411 PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI	
4111 Pendapatan Pajak Penghasilan	
41111 Pendapatan PPh Migas	
411111 Pendapatan PPh Minyak Bumi	
411112 Pendapatan PPh Gas Bumi	
411119 Pendapatan PPh Migas Lainnya	
41112 Pendapatan PPh Non-Migas	
411121 Pendapatan PPh Pasal 21	
411122 Pendapatan PPh Pasal 22	
411123 Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	
411124 Pendapatan PPh Pasal 23	
411125 Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	
411126 Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	
411127 Pendapatan PPh Pasal 26	
411128 Pendapatan PPh Final	
411129 Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	
41113 Pendapatan PPh Fiskal	
411131 Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	
41114 Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah	
411141 Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	
411142 Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah	
411143 Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah	
411144 Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah	
411145 Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah	
411146 Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah	
411147 Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	
411148 Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah	
411149 Pendapatan PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah	
4112 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	
41121 Pendapatan PPN	
411211 Pendapatan PPN Dalam Negeri	
411212 Pendapatan PPN Impor	
411219 Pendapatan PPN Lainnya	
41122 Pendapatan PPnBM	
411221 Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	411222 Pendapatan PPnBM Impor
	411229 Pendapatan PPnBM Lainnya
4113	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
41131	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
	411311 Pendapatan PBB Pedesaan
	411312 Pendapatan PBB Perkotaan
	411313 Pendapatan PBB Perkebunan
	411314 Pendapatan PBB Kehutanan
	411315 Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara
	411316 Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
	411317 Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi
	411319 Pendapatan PBB Lainnya
4114	Pendapatan BPHTB
41141	Pendapatan BPHTB
	411411 Pendapatan BPHTB
4115	Pendapatan Cukai
41151	Pendapatan Cukai
	411511 Pendapatan Cukai Hasil Tembakau
	411512 Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol
	411513 Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol
	411514 Pendapatan Denda Administrasi Cukai
	411519 Pendapatan Cukai Lainnya
4116	Pendapatan Pajak Lainnya
41161	Pendapatan Pajak Lainnya
	411611 Pendapatan Bea Meterai
	411612 Pendapatan dari Penjualan Benda Materai
	411613 Pendapatan PPn Batubara
	411619 Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya
41162	Pendapatan Bunga Penagihan Pajak
	411621 Pendapatan Bunga Penagihan PPh
	411622 Pendapatan Bunga Penagihan PPN
	411623 Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM
	411624 Pendapatan Bunga Penagihan PTLL
41163	Pendapatan Pajak Lainnya Ditanggung Pemerintah
	411631 Pendapatan Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah
412	PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
4121	Pendapatan Bea Masuk
41211	Pendapatan Bea Masuk
	412111 Pendapatan Bea Masuk
	412112 Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean
412114	Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
412115	Denda Atas Sanksi Administrasi Dari Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Tertentu Yang Pengangkutannya Di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)
412116	Pendapatan BM-DTP
412119	Pendapatan Pabean Lainnya
41212	Pendapatan Bea Masuk Tindakan
412121	Pendapatan Bea Masuk Antidumping
412122	Pendapatan Bea Masuk Imbalan
412123	Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan
4122	Pendapatan Bea Keluar
41221	Pendapatan Bea Keluar
412211	Pendapatan Bea Keluar
412212	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar
412213	Pendapatan Bunga Bea Keluar
419	PENDAPATAN PAJAK LAIN-LAIN
4199	Pendapatan Pajak Lain-lain
41999	Pendapatan Pajak Lain-lain
419999	Pendapatan Pajak Lain-lain
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
421	PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM
4211	Pendapatan Minyak Bumi
42111	Pendapatan Minyak Bumi
421111	Pendapatan Minyak Bumi
4212	Pendapatan Gas Bumi
42121	Pendapatan Gas Bumi
421211	Pendapatan Gas Bumi
4213	Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara
42132	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara
421321	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Eksplorasi
421322	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Operasi Produksi
421323	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Izin Pertambangan Rakyat
42133	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara
421331	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Batubara
421332	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Tembaga
421333	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Emas

KODE AKUN	URAIAN AKUN
421334	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Perak
421335	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Nikel
421336	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Timah
421339	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Lainnya
42134	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
421341	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
4214	Pendapatan Kehutanan
42141	Pendapatan Dana Reboisasi
421411	Pendapatan Dana Reboisasi
42142	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
42143	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)
421435	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)
42144	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan
4215	Pendapatan Perikanan
42152	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan
421521	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap
421522	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
42153	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan
421531	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan
4216	Pendapatan Panas Bumi
42162	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi
421621	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi
42163	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi
421631	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Eksplorasi
421632	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Operasi Produksi
42164	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi
421641	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi
422	PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND)
4221	Pendapatan Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN
42213	Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
422131	Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan di Bawah Kementerian BUMN
422132	Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN
42214	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan
422141	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan
422142	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan
4222	Pendapatan Dari KND Lainnya
42221	Pendapatan dari Surplus Lembaga
422211	Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia
422212	Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan
422213	Pendapatan dari Surplus Lembaga Penjamin Simpanan
	422219 Pendapatan dari Surplus Lembaga Lainnya
424	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum
42411	Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran
424118	Pendapatan Penyediaan Barang
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya
42412	Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita
424122	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya
42413	Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat
424131	Pendapatan Program Dana Penjaminan
424132	Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah
424133	Pendapatan Program Modal Ventura
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektorial

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	424135 Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah
	424136 Pendapatan Investasi
	424137 Pendapatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
	424138 Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
	424139 Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya
42414	Pendapatan dari pengelolaan BMN pada Pengelola Barang
	424141 Pendapatan dari pengelolaan BMN pada Pengelola Barang
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum
42421	Pendapatan Hibah Terikat - Uang
	424211 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang
	424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
	424213 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang
	424214 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang
	424215 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
	424216 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara - Uang
	424219 Pendapatan Hibah Terikat Lainnya - Uang
42422	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Uang
	424221 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang
	424222 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
	424223 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang
	424224 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang
	424225 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
	424226 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara - Uang
	424229 Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya - Uang
42423	Pendapatan Hibah Terikat - Barang / Jasa
	424231 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa
	424232 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa
	424233 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Barang / Jasa
	424234 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan - Barang / Jasa

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
424235	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa
424236	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara - Barang / Jasa
424239	Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya - Barang / Jasa
42424	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Barang / Jasa
424241	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa
424242	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa
424243	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Barang / Jasa
424244	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan - Barang / Jasa
424245	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa
424246	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara - Barang / Jasa
424249	Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya - Barang / Jasa
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
42431	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah
4244	Pendapatan dari Alokasi APBN
42441	Pendapatan dari Alokasi APBN
424411	Pendapatan dari Alokasi APBN
42442	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU
4249	Pendapatan BLU Lainnya
42491	Pendapatan BLU Lainnya
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
424912	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang dibatasi pengelolaannya
424913	Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
424914	Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi - BLU
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
424917	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan / TGR - BLU
424919	Pendapatan Lain-lain BLU
42492	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin
424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya
42493	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN BLU
424931	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Tanah BLU
424932	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU
424933	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU
424934	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU
424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU
42494	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar BMN BLU
424941	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Tanah BLU
424942	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Gedung dan Bangunan BLU
424943	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin BLU
424944	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU
424945	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya BLU
424949	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar BMN Lainnya BLU
425	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha
42511	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang
425111	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian,

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	Perkebunan, Peternakan dan Budidaya
425113	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan
425114	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya
42512	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
425123	Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III
425124	Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan
425125	Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
425126	Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
42513	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin
425133	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan
425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan
425135	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin
425136	Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi, dan Jaringan
425137	Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)
425138	Pendapatan dari Bangun, Serah, dan Guna (BSG)
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya
42514	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang
425141	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS
425142	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B
425143	Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti
425144	Pendapatan Atas Aset Saham dan Surat Berharga Lain
425145	Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari Pengelola Barang
42515	Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi

KODE AKUN	URAIAN AKUN
42516	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas
425161	Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak
425162	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)
425169	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas
42517	Pendapatan Iuran Badan Usaha
425171	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM
425172	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum
42521	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum
425211	Pendapatan Paspor
425212	Pendapatan Visa
425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)
425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya
425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia
425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum
425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya
425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual
425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya
42522	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri
425221	Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri
425222	Pendapatan Paspor Republik Indonesia di Luar Negeri
425223	Pendapatan Dokumen Kekonsuleran
425224	Pendapatan Jasa Pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Luar Negeri
425228	Pendapatan Pelayanan Lainnya di Luar Negeri
425229	Pendapatan Administrasi di Luar Negeri
42523	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan
425233	Pendapatan Ongkos Perkara
425234	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara
425235	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi
425236	Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan
425237	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas
425238	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya

KODE AKUN	URAIAN AKUN
42524	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang
425241	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
425242	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
425243	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
425244	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang
425245	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi
425246	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi
425247	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
425248	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara
425249	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
42525	Pendapatan Perizinan
425251	Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian
425253	Pendapatan Perizinan di Bidang Perdagangan
425254	Pendapatan Perizinan di Bidang Kesehatan
425255	Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya
42526	Pendapatan Pelayanan Kepolisian I
425261	Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)
425262	Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)
425263	Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
425264	Pendapatan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
425265	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
425266	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
425267	Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi
425268	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah
425269	Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan
42527	Pendapatan Pelayanan Kepolisian II
425271	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
425272	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara
425273	Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
425274	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)
425275	Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman
425276	Pendapatan Pengamanan Obyek Vital
425279	Pendapatan Pelayanan Kepolisian Lainnya
42528	Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi
425281	Pendapatan Akreditasi
425282	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
425283	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian
425284	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perdagangan
425285	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan
425286	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum
425287	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan
425288	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan
42531	Pendapatan Jasa Kesehatan
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
425312	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan
425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan
425316	Pendapatan Registrasi Tenaga Kesehatan
42532	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan
425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan
42533	Pendapatan Jasa Karantina
425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan
425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
42534	Pendapatan Jasa Agraria
425341	Pendapatan Pelayanan Pertanahan
425342	Pendapatan Penerimaan Hak Atas Tanah P3MB/Presidium Kabinet Dwikora
42535	Pendapatan Jasa Keagamaan
425351	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama
425359	Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi
42541	Pendapatan Pendidikan
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan
425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya
42542	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya
42543	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek
425431	Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan
425433	Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual
425439	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya
42545	Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan
425451	Pendapatan Museum
425459	Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan Lainnya
4255	Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika
42551	Pendapatan Jasa Transportasi
425511	Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
425512	Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge
425513	Pendapatan Jasa Kepelabuhanan
425514	Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran
425515	Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan
425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan
425517	Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	425518 Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi
	425519 Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya
42552	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika
	425521 Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
	425522 Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi
	425523 Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran
	425524 Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos
	425525 Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal
	425526 Pendapatan Pengelolaan Nama Domain Indonesia
	425529 Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika Lainnya
42553	Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik
	425531 Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI
	425532 Pendapatan Jasa Non Siaran LPP RRI
	425533 Pendapatan Jasa Siaran LPP TVRI
	425534 Pendapatan Jasa Non Siaran LPP TVRI
4256	Pendapatan Jasa Lainnya
	42561 Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	425611 Pendapatan Wisata Alam
	425612 Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	425619 Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya
42562	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan
	425621 Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan
	425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya
42569	Pendapatan Jasa Lainnya
	425691 Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan
	425692 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi
	425693 Pendapatan dari Jasa Layanan Jalan Tol
	425694 Pendapatan dari Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA)
	425699 Pendapatan Jasa Lainnya
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan
	42571 Pendapatan Bunga
	425711 Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi
	425712 Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi
	425713 Pendapatan Bunga dari Piutang dan Pemberian Pinjaman
	425714 Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah
	425715 Pendapatan Komitmen Pemberian Pinjaman

KODE AKUN	URAIAN AKUN
425716	Pendapatan Bunga Kredit Program
425717	Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan
425719	Pendapatan Bunga Lainnya
42572	Pendapatan Gain on Bond Redemption
425721	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Jangka Panjang
425722	Pendapatan dari Transaksi Security Lending
425723	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valuta Asing
425724	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali SBSN Jangka Panjang
425725	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali SBSN Valuta Asing Jangka Panjang
42573	Pendapatan Premium atas Obligasi Negara
425731	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah
425732	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing
425733	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah
425734	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Valuta Asing
42574	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara
425741	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur
425742	Pendapatan Selisih Harga SBN
425743	Pendapatan Kupon SBN
425744	Pendapatan Bunga Reverse Repo
425745	Pendapatan Fee atas Transaksi Security Lending SUN
425746	Pendapatan Lain-lain atas Rekening Tujuan Tertentu
42575	Pendapatan dari Selisih Kurs
425751	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN
425752	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan
425753	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D
42576	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening
425761	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan
425762	Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman
425763	Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	425765 Pendapatan dari Penutupan Rekening
42577	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara
	425771 Pendapatan atas Penerbitan SP2D Dalam Rangka TSA
	425772 Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum
	425773 Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling
	425774 Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia
	425775 Pendapatan dari Penempatan Uang Sebelum Rekonsiliasi
42578	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara
	425781 Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa
	425782 Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
	425783 Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II
	425784 Pendapatan Bea Lelang Pegadaian
	425785 Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara
42577	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara
	425771 Pendapatan atas Penerbitan SP2D Dalam Rangka TSA
	425772 Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum
	425773 Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling
	425774 Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia
	425775 Pendapatan dari Penempatan Uang Sebelum Rekonsiliasi
42577	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara
	425771 Pendapatan atas Penerbitan SP2D Dalam Rangka TSA
	425772 Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum
	425773 Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling
	425774 Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia
	425775 Pendapatan dari Penempatan Uang Sebelum Rekonsiliasi

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
42578	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara
42579	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga
4258	Pendapatan Denda
42581	Pendapatan Denda I
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
425812	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha
425813	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Perdagangan
425814	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA
425815	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia
425816	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling
425817	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi
425818	Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalty terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas
425819	Pendapatan Denda terkait Pengusahaan Panas Bumi
42582	Pendapatan Denda II
425821	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyaluran SP2D pada Bank Operasional dan Bank Penyalur Gaji
425822	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pembagian PBB oleh BO III PBB
425823	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman
425824	Pendapatan Denda Penyaluran Kredit Program

KODE AKUN	URAIAN AKUN
425825	Pendapatan Denda Administrasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
425826	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Kredit Pemerintah (KUMK)
425827	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Pemberian Pinjaman
425828	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III
425829	Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
42583	Pendapatan Denda III
425839	Pendapatan Denda Lainnya
4259	Pendapatan Lain-Lain
42591	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
425914	Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu
425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu
425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu
425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu
425919	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu
42592	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II
425921	Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL
42593	Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS
425932	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan
425933	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Anggota Polri/PNS Polri
425934	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara
42598	Pendapatan Lain-Lain I
425981	Penerimaan Lainnya dari Piutang Pemberian Pinjaman

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
42599	Pendapatan Lain-Lain II
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
425992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional
425993	Pendapatan Jasa Perbendaharaan
425994	Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari Bank/Pos Persepsi
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak
425996	Pendapatan dalam rangka Refund Dana PHLN
425997	Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan
425998	Pendapatan dari Retur SP2D
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain
43	PENDAPATAN HIBAH
431	PENDAPATAN HIBAH DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
4311	Pendapatan Hibah Dalam Negeri
43111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Terencana
431111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Perorangan
431112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Lembaga/Badan Usaha
431119	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Lainnya
43112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang/Jasa/ Surat Berharga
431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang
431122	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Jasa
431123	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga
43113	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang
431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Perorangan
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lembaga/ Badan Usaha
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Pemerintah Daerah
431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lainnya
4312	Pendapatan Hibah Luar Negeri
43121	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana
431211	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Perorangan
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Bilateral
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Multilateral

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	431219 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Lainnya
43122	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
431221	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang
431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Jasa
431223	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga
43123	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang
431231	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Perorangan
431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Bilateral
431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Multilateral
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Lainnya
43124	Pendapatan Hibah Luar Negeri yang Langsung Diterushibahkan
431241	Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Barang yang Langsung Diterushibahkan
431242	Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Jasa yang Langsung Diterushibahkan
431243	Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Surat Berharga yang Langsung Diterushibahkan
439	PENDAPATAN HIBAH LAIN-LAIN
4399	Pendapatan Hibah Lain-lain
43999	Pendapatan Hibah Lain-lain
439999	Pendapatan Hibah Lain-lain
49	PENDAPATAN PENYESUAIAN
491	PENDAPATAN PENYESUAIAN AKRUAL
4911	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
49111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
491112	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi BLU
4912	Pendapatan Amortisasi Premium
49121	Pendapatan Amortisasi Premium
491211	Pendapatan Amortisasi Premium
4913	Pendapatan Penyesuaian Lainnya
49131	Pendapatan Penyesuaian Lainnya
491311	Pendapatan Penyesuaian Lainnya
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
4914	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset
49141	Pendapatan Pelepasan Aset
	491411 Pendapatan Pelepasan Aset
49142	Pendapatan Sitaan/Rampasan
	491421 Pendapatan Sitaan/Rampasan
	491429 Pendapatan Perolehan Aset Lainnya
4915	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset
49151	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset
	491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan
498	SUSPENSE PENDAPATAN
4981	Suspense Pendapatan
	49811 Suspense Pendapatan
	498111 Suspense Pendapatan
499	AKUN SET UP
4991	Akun Set Up
	49911 Akun Set Up
	499111 Akun Set Up
	499112 Unearned Discount
	499113 Sales Account
4999	Revenue
49999	Revenue
	499999 Revenue

## SEGMENTASI AKUN BEBAN

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
5 BEBAN NEGARA	
51 BEBAN PEGAWAI	
511 BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN	
5111 Beban Gaji dan Tunjangan PNS	
51111 Beban Gaji PNS	
511111 Beban Gaji Pokok PNS	
511119 Beban Pembulatan Gaji PNS	
51112 Beban Tunjangan-tunjangan I PNS	
511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS	
511122 Beban Tunj. Anak PNS	
511123 Beban Tunj. Struktural PNS	
511124 Beban Tunj. Fungsional PNS	
511125 Beban Tunj. PPh PNS	
511126 Beban Tunj. Beras PNS	
511127 Beban Tunj. Kemahalan PNS	
511128 Beban Tunj. Lauk pauk PNS	
511129 Beban Uang Makan PNS	
51113 Beban Tunjangan-tunjangan II PNS	
511131 Beban Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS	
511132 Beban Tunj. Cacat PNS	
511133 Beban Tunj. Khusus Peralihan PNS	
511134 Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	
511135 Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	
511136 Beban Tunj. Guru/Dosen/PNS yang Dipekerjakan pada Sekolah/ PT Swasta/ Badan/Komisi	
511137 Beban Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk Mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana PNS	
511138 Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	
511139 Beban Tunjangan SAR PNS	
51114 Beban Tunjangan-tunjangan III Pegawai Negeri/ Staff di Luar Negeri	
511141 Beban Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di LN)	
511142 Beban Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)	
511143 Beban Tunj. <i>Social Security</i> PNS (Staff di LN)	
511144 Beban Tunj. Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di LN)	
511145 Beban Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN)	
511146 Beban Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN)	

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	511147 Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri
	511149 Beban Lokal Staff Lainnya
51115	Beban Tunjangan-tunjangan IV PNS
	511151 Beban Tunjangan Umum PNS
	511152 Beban Tunjangan Profesi Guru
	511153 Beban Tunjangan Profesi Dosen
	511154 Beban Tunjangan Kehormatan Profesor
	511155 Beban Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS
	511156 Beban Tunjangan Khusus Guru/Dosen
	511157 Beban Tunjangan Kemahalan Hakim
	511158 Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc
51116	Beban Gaji - PNS TNI/Polri
	511161 Beban Gaji Pokok PNS TNI/Polri
	511169 Beban Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri
51117	Beban Tunjangan-tunjangan I PNS TNI/Polri
	511171 Beban Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
	511172 Beban Tunj. Anak PNS TNI/Polri
	511173 Beban Tunj. Struktural PNS TNI/Polri
	511174 Beban Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri
	511175 Beban Tunj. PPh PNS TNI/Polri
	511176 Beban Tunj. Beras PNS TNI/Polri
	511177 Beban Tunj. Kemahalan PNS TNI/Polri
	511178 Beban Tunj. Lauk pauk PNS TNI/Polri
	511179 Beban Uang Makan PNS TNI/Polri
51118	Beban Tunjangan-tunjangan II PNS TNI/Polri
	511181 Beban Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS TNI/Polri
	511182 Beban Tunj. Cacat PNS TNI/Polri
	511183 Beban Tunj. Khusus Peralihan PNS TNI/Polri
	511184 Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS TNI/Polri
	511185 Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS TNI/Polri
	511187 Beban Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS TNI/Polri
	511188 Beban Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS
	511189 Beban Tunjangan Khusus Papua PNS TNI/Polri
51119	Beban Tunjangan-tunjangan III PNS TNI/POLRI
	511191 Beban Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI
	511192 Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/POLRI

KODE AKUN	URAIAN AKUN
511193	Beban Tunjangan Umum PNS TNI/Polri
511194	Beban Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri
511195	Beban Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan PNS TNI
511196	Beban Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi PNS Polri
511197	Beban Tunjangan Profesi Dosen/Kehormatan Guru Besar PNS TNI Polri
5112	Beban Gaji dan Tunjangan TNI/Polri
51121	Beban Gaji TNI/POLRI
511211	Beban Gaji Pokok TNI/POLRI
511219	Beban Pembulatan Gaji TNI/POLRI
51122	Beban Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI
511221	Beban Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI
511222	Beban Tunj. Anak TNI/POLRI
511223	Beban Tunj. Struktural TNI/POLRI
511224	Beban Tunj. Fungsional TNI/POLRI
511225	Beban Tunj. PPh TNI/POLRI
511226	Beban Tunj. Beras TNI/POLRI
511227	Beban Tunj. Kemahalan TNI/POLRI
511228	Beban Tunj. Lauk Pauk TNI/POLRI
511229	Beban Uang Makan TNI/POLRI
51123	Beban Tunjangan-tunjangan II TNI/POLRI
511231	Beban Tunj. Anggota Cadangan TNI DDA TNI/POLRI
511232	Beban Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI
511233	Beban Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI
511234	Beban Tunj. Khusus Papua untuk TNI/ POLRI
511235	Beban Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI
511236	Beban Tunj. Brevet TNI/POLRI
511237	Beban Tunj. Keahlian/ Keterampilan TNI/POLRI
511238	Beban Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI
511239	Beban Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan TNI
51124	Beban Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI
511241	Beban Tunjangan Medis TNI/POLRI
511242	Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka TNI/POLRI
511243	Beban Tunjangan Daerah Terpencil/ Sangat Terpencil TNI/Polri
511244	Beban Tunjangan Umum TNI/Polri

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	511245 Beban Santunan Cacat TNI
	511246 Beban Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil Terluar/ Perbatasan Polri
	511247 Beban Tunjangan Profesi Dosen/Kehormatan Guru Besar TNI/Polri
5113	Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara
	51131 Beban Gaji Pejabat Negara
	511311 Beban Gaji Pokok Pejabat Negara
	511319 Beban Pembulatan Gaji Pejabat Negara
	51132 Beban Tunjangan-tunjangan I Pejabat Negara
	511321 Beban Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara
	511322 Beban Tunj. Anak Pejabat Negara
	511323 Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara
	511324 Beban Tunj. PPh Pejabat Negara
	511325 Beban Tunj. Beras Pejabat Negara
	51133 Beban Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara
	511331 Beban Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara
	511332 Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara
	511333 Beban Uang Paket Harian Pejabat Negara
	511334 Beban Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara
	511335 Beban Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara
	511336 Beban Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara
	511337 Beban Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat Negara
	511338 Beban Tunjangan Fasilitas KPK
	511339 Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara
5114	Beban Gaji Dokter PTT
	51141 Beban Gaji Dokter PTT
	511411 Beban Gaji Dokter dan Bidan PTT
	511412 Beban Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT
	511413 Beban Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT
	511414 Beban Tunjangan Dokter dan Bidan PTT
5115	Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
	51151 Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
	511511 Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS
	511512 Beban Tunjangan Pegawai Non PNS
	511513 Beban Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS
	511519 Beban Tunjangan Lainnya Non PNS
	51152 Beban Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluhan Non PNS
	511521 Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	511522 Beban Tunjangan Tenaga Penyuluhan Non PNS
	511529 Beban Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluhan Lainnya Non PNS
512 BEBAN HONORARIUM/LEMBUR /TUNJ. KHUSUS & BEBAN PEGAWAI TRANSITO	
5121 Beban Honorarium	
51211 Beban Honorarium	
512111 Beban Uang Honor Tetap	
5122 Beban Lembur	
51221 Beban Lembur	
512211 Beban Uang Lembur	
5124 Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	
51241 Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	
512411 Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/ Kinerja)	
512412 Beban Pegawai Transito	
512413 Beban Pembayaran Uang Kompensasi Bagi PNS yang Diberhentikan sebagai Dampak Reformasi Birokrasi	
513 BEBAN KONTRIBUSI SOSIAL	
5131 Beban Pensiun dan Uang Tunggu	
51311 Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara	
513111 Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS	
513112 Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS Daerah	
513113 Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Kemhan	
513114 Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri	
513115 Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS Eks Pegadaian	
51312 Beban Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri	
513121 Beban Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (Lama)	
513122 Beban Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Kemhan	
513123 Beban Pensiun dan Uang Tunggu Polri	
51313 Beban Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara	
513131 Beban Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara	
513132 Beban Pensiun dan Uang Tunggu Hakim	
51314 Beban Kontribusi APBN sebagai pendanaan bersama dalam pembayaran pensiun eks PNS Kemhub pada PT KAI	
513141 Kontribusi APBN sebagai Pendanaan Bersama Dalam Pembayaran Pensiun Eks PNS Kemhub pada PT KAI	
51315 Beban Pensiun Veteran dan PKRI/KNIP	
513151 Beban Tunjangan Veteran	
513152 Beban Dana Kehormatan Veteran	

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	513153 Beban Tunjangan PKRI dan KNIP
51316	Beban Tunjangan Hari Tua
	513161 Beban Tunjangan Hari Tua ( <i>Unfunded Liability</i> )
5132	Beban Program Jaminan Sosial Pegawai
51321	Beban Askes PNS/Pejabat Negara
	513211 Beban Askes PNS
	513212 Beban Askes Pejabat Negara
51322	Beban Askes Penerima Pensiun
	513221 Beban Askes Penerima Pensiun
51323	Beban Askes TNI/Kemhan
	513231 Beban Askes TNI/Kemhan
51324	Beban Askes Polri
	513241 Beban Askes Polri
51325	Beban Askes Veteran
	513251 Beban Askes Veteran
51326	Beban Katastropik
	513261 Beban Katastropik
51327	Beban Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai
	513271 Beban Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai
51328	Beban Program Jaminan Kematian Pegawai
	513281 Beban Program Jaminan Kematian Pegawai
5133	Beban Tunjangan Kesehatan Veteran
51331	Beban Tunjangan Kesehatan Veteran
	513311 Beban Tunjangan Kesehatan Veteran
5134	Beban Cadangan Perubahan Sharing
51341	Beban Cadangan Perubahan Sharing
	513411 Beban Cadangan Perubahan Sharing
52	BEBAN BARANG DAN JASA
521	BEBAN BARANG
5211	Beban Barang Operasional
52111	Beban Barang Operasional
521111	Beban Keperluan Perkantoran
521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja
521116	Beban Keperluan Perkantoran Atase Pertahanan Luar Negeri
521119	Beban Barang Operasional Lainnya
52112	Beban Barang Operasional kepada BLU
521121	Beban Barang Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	521122 Beban Barang Operasional Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain
5212 Beban Barang Non Operasional	
52121 Beban Barang Non Operasional	
521211 Beban Bahan	
521212 Beban Barang Transito	
521213 Beban Honor Output Kegiatan	
521214 Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan	
521215 Beban Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun	
521216 Beban Pencairan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum	
521217 Beban Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Kepada Negara	
521218 Beban dalam Rangka Refund Dana PHLN	
521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya	
52122 Beban Barang Non Operasional Kepada BLU	
521221 Beban Barang Non Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	
521222 Beban Barang Non Operasional Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain	
52123 Beban Barang Bantuan Pemerintah	
521231 Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	
521232 Beban Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam bentuk uang	
521233 Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	
521234 Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk barang	
5215 Beban Barang Pengganti Pajak Dalam Rangka Hibah MCC	
52151 Beban Barang Pengganti Pajak Pusat Dalam Rangka Hibah MCC	
521511 Beban Barang Pengganti PPN Dalam Rangka Hibah MCC	
521512 Beban Barang Pengganti PPh Dalam Rangka Hibah MCC	
521513 Beban Barang Pengganti Pajak Lainnya Dalam Rangka Hibah MCC	
5217 Beban Kontribusi	
52171 Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan <i>Trust Fund</i>	
521711 Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan <i>Trust Fund</i>	
52172 Beban Kontribusi Dukungan Pemerintah dan Ketersediaan Layanan	

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	521721 Beban Kontribusi Dana Dukungan Kelayakan <i>(Viability Gap Fund)</i>
	521722 Beban Kontribusi Fasilitas Penyiapan Proyek <i>(Project Development Facility)</i>
	521723 Beban Ketersediaan Layanan <i>(Availability Payment)</i>
522 BEBAN JASA	
5221 Beban Jasa	
52211 Beban Langganan Daya dan Jasa	
522111 Beban Langganan Listrik	
522112 Beban Langganan Telepon	
522113 Beban Langganan Air	
522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	
52212 Beban Jasa Pos dan Giro	
522121 Beban Jasa Pos dan Giro	
52213 Beban Jasa Konsultan	
522131 Beban Jasa Konsultan	
52214 Beban Sewa	
522141 Beban Sewa	
52215 Beban Jasa Profesi	
522151 Beban Jasa Profesi	
52216 Beban Jasa kepada BLU	
522161 Beban Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	
522162 Beban Jasa Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain	
52219 Beban Jasa Lainnya	
522191 Beban Jasa Lainnya	
523 BEBAN PEMELIHARAAN	
5231 Beban Pemeliharaan	
52311 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	
523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	
523113 Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	
523119 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	
52312 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
523122 Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	
523124 Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/ Udara Bermotor	
523129 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
52313	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
523132	Beban Pemeliharaan Irigasi
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan
523137	Beban Asuransi Jembatan
52319	Beban Pemeliharaan Lainnya
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya
524	BEBAN PERJALANAN DINAS
5241	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri
52411	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa
524112	Beban Perjalanan Dinas Tetap
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
5242	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri
52421	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri
524212	Beban Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri
524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri
525	BEBAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
5251	Beban Barang BLU
52511	Beban Barang dan Jasa BLU
525111	Beban Gaji dan Tunjangan
525112	Beban Barang
525113	Beban Jasa
525114	Beban Pemeliharaan
525115	Beban Perjalanan
525116	Beban atas Pengelolaan <i>Endowment Fund</i>
525117	Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
525118	Beban Ketersediaan Layanan BLU
525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
52513	Beban Asuransi BMN di BLU
525131	Beban Asuransi BMN Gedung dan Bangunan - BLU
525132	Beban Asuransi BMN Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor - BLU
525133	Beban Asuransi BMN Jembatan – BLU
52514	Beban Barang dan Jasa BLU kepada BLU Lain
525141	Beban Barang BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	525142 Beban Barang BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain
	525143 Beban Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
	525144 Beban Jasa BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain
526 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/ PEMDA	
5261 Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	
52611 Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda	
526111 Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	
526112 Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	
526113 Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	
526114 Beban Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	
526115 Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	
52612 Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang	
526121 Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	
526122 Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	
526123 Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	
526124 Beban Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	
5262 Beban Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	
52621 Beban Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah	
526211 Beban Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah	
526212 Beban Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah	
5263 Beban Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	
52631 Beban Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	
526311 Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	
526312 Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
527	BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN
5271	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden
52711	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden
527111	Beban Tanah untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden
527112	Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden
527113	Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden
54	BEBAN PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG
541	BEBAN PEMBAYARAN BUNGA UTANG
5411	Beban Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Pendek
54111	Beban Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara
541111	Beban Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara – Rupiah
541112	Beban Pembayaran Kupon SBN-TDR
541113	Beban Pembayaran Bunga Repo-TDR
541119	Beban Pembayaran Biaya/ kewajiban lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara
54112	Beban Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara-Valas
541121	Beban Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara-Valas
541122	Beban Pembayaran Kupon SBN Valas-TDR
541123	Beban Pembayaran Bunga Repo Valas-TDR
541129	Beban Pembayaran Biaya/ Kewajiban Lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara - Valas
5412	Beban Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang
54121	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara
541211	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah
541219	Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara
54122	Beban Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang Lainnya
541221	Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan
541229	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara Lainnya
54123	Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri
541231	Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri
541232	Beban Biaya/Kewajiban Lainnya terhadap Pinjaman Dalam Negeri
54124	Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Dalam Negeri
541241	Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Dalam Negeri

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	54125 Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas
	541251 Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas
	541259 Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara
5413	Beban Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara
	54131 Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang
	541311 Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang
	541312 Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang
	54132 Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek
	541321 Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek
	541322 Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Pendek
	54133 Beban Pembayaran Imbalan SPN Syariah
	541331 Beban Pembayaran Imbalan SPN Syariah
	541332 Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya- Imbalan SPN Syariah
	54134 Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas
	541341 Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas
	541342 Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas
	54135 Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek Valas
	541351 Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek Valas
	541352 Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Imbalan SBSN Jangka Pendek Valas
5414	Beban Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang
	54141 Beban Bunga Pinjaman program
	541411 Beban Bunga Pinjaman Program
	541419 Beban Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program
	54142 Beban Bunga Pinjaman Proyek
	541421 Beban Bunga Pinjaman Proyek
	541429 Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Proyek
	54144 Beban Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman
	541441 Beban Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program
	541442 Beban Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek
	541449 Beban Biaya/Kewajiban Lainnya – Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman
54146	Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri
	541461 Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
542 BEBAN PEMBAYARAN DISCOUNT SURAT UTANG NEGARA	
5421 Beban Pembayaran Discount Surat Utang Negara	
54211 Beban Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara	
542111 Beban Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara	
542119 Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Perbendaharaan	
54212 Beban Pembayaran Discount Obligasi Negara	
542121 Beban Pembayaran Discount Obligasi Negara	
542129 Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Obligasi Negara	
54213 Beban Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Valas	
542131 Beban Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Valas	
542139 Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Valas	
54214 Beban Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas	
542141 Beban Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas	
542149 Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Obligasi Negara Valas	
544 BEBAN PEMBAYARAN LOSS ON BOND REDEMPTION	
5441 Beban Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara	
54411 Beban Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara	
544111 Beban Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara	
544112 Beban Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali SBSN	
544113 Beban Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valas	
544114 Beban Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali SBSN Valas	
547 BEBAN DENDA	
5471 Beban Pembayaran Denda	
54711 Beban Pembayaran Imbalan Bunga	
547112 Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan	
547113 Beban Pembayaran Imbalan Bunga Bea dan Cukai (SPM-IB Bea dan Cukai)	
547119 Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya	
55 BEBAN SUBSIDI	
551 BEBAN SUBSIDI PERUSAHAAN NEGARA	
5511 Beban Subsidi Lembaga Keuangan	
55111 Beban Subsidi Lembaga Keuangan	

KODE AKUN	URAIAN AKUN
	551111 Beban Subsidi Lembaga Keuangan
5512	Beban Subsidi Lembaga Non-Keuangan – BBM
	55121 Beban Subsidi BBM
	551211 Beban Subsidi Avgas
	551212 Beban Subsidi Avtur
	551213 Beban Subsidi Premium
	551214 Beban Subsidi Minyak Bakar
	551215 Beban Subsidi Minyak Solar
	551216 Beban Subsidi Minyak Diesel
	551217 Beban Subsidi Minyak Tanah
	551218 Beban Subsidi Elpiji
	551219 Beban Subsidi <i>Liquefied Gas For Vehicle (LGV)</i>
5513	Beban Subsidi Lembaga Non-Keuangan – Non BBM
	55131 Beban Subsidi Non-BBM – Harga/Biaya
	551311 Beban Subsidi Pangan
	551312 Beban Subsidi Listrik
	551313 Beban Subsidi Benih
	551314 Beban Subsidi Obat
	551315 Beban Subsidi Gula
	551316 Beban Subsidi Pupuk
	551317 Beban Subsidi Perawatan Beras
	551318 Beban Subsidi Pengawasan Pupuk
	551319 Beban Subsidi Harga/Biaya Lainnya
	55132 Beban Subsidi Non-BBM – Pajak
	551321 Beban Subsidi PPh-DTP
	551323 Beban Subsidi BM-DTP
	55133 Beban Subsidi Non-BBM – Lainnya
	551331 Beban Subsidi Haji
	551332 Beban Subsidi Kendaraan Bermotor
	551339 Beban Subsidi Lainnya
	55134 Beban Subsidi Non BBM - Harga/Biaya II
	551341 Beban Subsidi Minyak Goreng
5514	Beban Subsidi Lembaga Non-Keuangan – PSO
	55141 Beban Subsidi dalam rangka PSO
	551411 Beban Subsidi PT KAI
	551412 Beban Subsidi PT PELNI
	551413 Beban Subsidi PT Pos Indonesia
	551414 Beban Subsidi TVRI
	551415 Beban Subsidi BULOG
	551419 Beban Subsidi Dalam Rangka PSO Lainnya

KODE AKUN	URAIAN AKUN
552 BEBAN SUBSIDI PERUSAHAAN SWASTA	
5521 Beban Subsidi Lembaga Keuangan	
55211 Beban Subsidi Lembaga Keuangan	
552111 Beban Subsidi Lembaga Keuangan	
552112 Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	
55212 Beban Subsidi – Bunga Kredit	
552121 Beban Subsidi Bunga KUT	
552122 Beban Subsidi Bunga KOP PIR	
552123 Beban Subsidi Bunga KOP	
552124 Beban Subsidi Bunga KOP PRIM	
552125 Beban Subsidi Bunga KPR	
552126 Beban Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi	
552127 Beban Subsidi Bunga Kredit Program Eks KLBI	
552128 Beban Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	
552129 Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	
55213 Beban Subsidi Imbalan Jasa Peminjam dan Risk Sharing	
552131 Beban Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat	
552132 Beban Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi	
55214 Beban Subsidi Kredit Program II	
552141 Beban Subdidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias	
552142 Beban Subsidi Kredit Sektor Peternakan	
552143 Beban Subsidi Kredit Resi Gudang	
5522 Beban Subsidi Lembaga Non-Keuangan	
55221 Beban Subsidi Lembaga Non Keuangan	
552211 Beban Subsidi Lembaga Non Keuangan	
553 BEBAN SUBSIDI - ESTIMASI	
5531 Beban Subsidi - Estimasi	
55311 Beban Subsidi - Estimasi	
553111 Beban Subsidi - Estimasi	
56 BEBAN HIBAH	
561 BEBAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH LUAR NEGERI	
5611 Beban Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	
56111 Beban Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	
561111 Beban Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	
562 BEBAN HIBAH KEPADA ORGANISASI INTERNASIONAL	
5621 Beban Hibah Kepada Organisasi Internasional	
56211 Beban Hibah Kepada Organisasi Internasional	
562111 Beban Hibah Kepada Organisasi Internasional	

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
563 BEBAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH	
5631 Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah	
56311 Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah	
563111 Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah	
56312 Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah	
563121 Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri	
563122 Beban Hibah Jasa Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri	
563123 Beban Hibah Surat Berharga Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri	
565 BEBAN HIBAH LAINNYA	
5651 Beban Hibah Lainnya	
56511 Beban Hibah Lainnya	
565111 Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Terkait Pendapatan/Belanja Hibah	
57 BEBAN BANTUAN SOSIAL	
571 BEBAN BANTUAN SOSIAL UNTUK REHABILITASI SOSIAL	
5711 Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	
57111 Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	
571111 Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang	
571112 Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang	
571113 Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Jasa	
572 BEBAN BANTUAN SOSIAL UNTUK JAMINAN SOSIAL	
5721 Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	
57211 Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	
572111 Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang	
572112 Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Barang	
572113 Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Jasa	
573 BEBAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN SOSIAL	
5731 Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	
57311 Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	
573111 Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang	
573112 Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	
573113 Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Jasa	

KODE AKUN	URAIAN AKUN
574 BEBAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL	
5741 Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	
57411 Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	
574111 Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	
574112 Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang	
574113 Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Jasa	
575 BEBAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN	
5751 Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	
57511 Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	
575111 Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang	
575112 Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang	
575113 Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Jasa	
576 BEBAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA	
5761 Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	
57611 Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	
576111 Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang	
576112 Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Barang	
576113 Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Jasa	
58 BEBAN LAIN-LAIN	
581 BEBAN LAIN-LAIN	
5811 Beban Lain-lain Dana Cadangan	
58111 Beban Lain-lain Cadangan I	
581111 Beban Cadangan Umum	
581112 Beban Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi)	
581113 Beban Cadangan Dana Reboisasi	
581114 Beban Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/Polri	
581115 Beban Cadangan Kenaikan Harga Tanah ( <i>Land Capping</i> )	
581116 Beban Cadangan Risiko Perubahan Asumsi Makro	
581117 Beban Cadangan Stabilisasi Harga Pangan	
581118 Beban Cadangan Risiko Lifting	
581119 Beban Cadangan Lainnya	

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
58112	Beban Lain-lain Cadangan II
581121	Beban Cadangan Fiskal Lainnya (Risiko Kenaikan TTL Listrik)
581122	Beban Cadangan Beras Pemerintah
581123	Beban Cadangan Benih Nasional
5812	Beban Lain-lain Lembaga Non Kementerian
58121	Beban Lain-lain Lembaga Non Kementerian
581211	Beban Lain-lain Lembaga Non Kementerian
581212	Beban Operasional Kegiatan SKK Migas
5813	Beban Lain-lain Jasa Pelayanan BUN
58131	Beban Lain-lain Jasa Pelayanan BUN
581311	Beban Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi
581312	Jasa Surveyor
581314	Jasa Pelayanan Bank Operasional
581315	Beban Jasa Pelayanan Perbendaharaan
581316	Beban Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog
581319	Beban Lain-lain Jasa Pelayanan BUN Lainnya
5814	Beban Lain-lain BUN
58141	Beban Lain-lain BUN
581411	Beban Iuran ke Lembaga Internasional
581412	Beban Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua
581413	Beban Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga
581414	Beban Dana Penunjang (PHLN)
581415	Beban Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN
581417	Beban Kompensasi Kenaikan Harga BBM
581418	Beban Konversi BBM ke BBG untuk Transportasi Umum
581419	Beban Lain-lain BUN Lainnya
58142	Beban Lain-lain BUN II
581421	Beban Selisih Harga SBN
581422	Beban karena Selisih Kurs Satker Perwakilan RI/ Atase Teknis BA Beban Lainnya
5815	Beban Lain-lain Tanggap Darurat
58151	Beban Lain-lain Tanggap Darurat
581511	Beban Keperluan Mendesak/Tak Terduga
581512	Beban Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
5816	Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D
58161	Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D
581611	Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D dan <i>Exotic Currency</i>

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
5819	Beban Lain-lain Lainnya
58191	Beban Lain-lain Lainnya
581911	Beban Pemilu
581919	Beban Lain-lain
59	BEBAN PENYESUAIAN
591	BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP
5911	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
59111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
59112	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU
591121	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU
5912	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
59121	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
59122	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU
591221	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU
5913	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan
59131	Beban Penyusutan Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan
591312	Beban Penyusutan Irigasi
591313	Beban Penyusutan Jaringan
59132	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
591321	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
5914	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
59141	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
59142	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU
591421	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU
592	BEBAN PENYUSUTAN ASET LAINNYA/AMORTISASI ASET LAINNYA
5921	Beban Amortisasi Aset Lainnya
59211	Beban Amortisasi Aset Lainnya
592111	Beban Amortisasi Goodwill
592112	Beban Amortisasi Hak Cipta
592113	Beban Amortisasi Royalty
592114	Beban Amortisasi Paten
592115	Beban Amortisasi Software
592116	Beban Amortisasi Lisensi
592117	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya
592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
59212	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Badan Layanan Umum
592121	Beban Amortisasi Software-Badan Layanan Umum
592122	Beban Amortisasi-Hak Cipta BLU
592123	Beban Amortisasi-Royalti BLU
592124	Beban Amortisasi-Paten BLU
592125	Beban Amortisasi-Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum
592126	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan - BLU
5922	Beban Penyusutan Aset Lainnya
59221	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
592211	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
59222	Beban Penyusutan Aset Lain-lain K/L
592221	Beban Penyusutan Aset Lain-lain
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah
59223	Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN
592231	Beban Penyusutan Aset Eks BPPN
592232	Beban Penyusutan Aset yang Diserahkan kepada PT. PPA
592233	Beban Penyusutan Aset BUMN yang Belum Ditetapkan Statusnya
592234	Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama
592235	Beban Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA
592236	Beban Penyusutan Aset Eks Pertamina
592237	Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor PKP2B
592238	Beban Penyusutan Aset Idle yang Sudah Diserahkan ke DJKN
592239	Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN
59224	Beban Penyusutan Aset Lain-lain BLU
592241	Beban Penyusutan Aset Lain-lain BLU
592242	Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan BLU
593	BEBAN PERSEDIAAN
5931	Beban Persediaan
59311	Beban Persediaan Bahan untuk Operasional
593111	Beban Persediaan konsumsi
593112	Beban Persediaan amunisi
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan
593114	Beban Persediaan suku cadang

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
59312	Beban Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat
593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges
593122	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
593125	Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat
593126	Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat
593127	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
59313	Beban Persediaan untuk proses produksi
593131	Beban Persediaan bahan baku
593132	Beban Persediaan barang dalam proses
59314	Beban Persediaan Bahan Lainnya
593141	Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga
593142	Beban Persediaan barang hasil sitaan
593149	Beban Persediaan Lainnya
5932	Beban Persediaan Badan Layanan Umum
59321	Beban Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa
593211	Beban Persediaan BLU Pelayanan Kesehatan
593212	Beban Persediaan BLU Pelayanan Pendidikan
593213	Beban Persediaan BLU penunjang Konstruksi
593214	Beban Persediaan BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
593215	Beban Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
59322	Beban Persediaan BLU Pengelola Wilayah/Kawasan Tertentu
593221	Beban Persediaan BLU Pengelola Kawasan Otorita
593222	Beban Persediaan BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
593229	Beban Persediaan BLU Pengelola Kawasan Lainnya
59323	Beban Persediaan BLU Pengelola Dana Khusus Masyarakat
593231	Beban Persediaan BLU Pengelola Dana Investasi
593232	Beban Persediaan BLU Pengelola Dana Bergulir
593239	Beban Persediaan BLU Pengelola Dana Lainnya

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
5933	Beban Penyesuaian Nilai Aset
59331	Beban Penyesuaian Nilai Aset
	593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan
594	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
5941	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Perpajakan
59411	Beban Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih
594111	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PPh Migas
594112	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PPh Non Migas
594113	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PPN
594114	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PPnBM
594115	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PBB dan BPHTB
594116	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Cukai dan Bea Materai
594117	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Lainnya
594118	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Perdagangan Internasional
594119	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bea Masuk Tindakan
5942	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
59421	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP
594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya
59422	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PT PPA
594221	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PT PPA
59423	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman
594231	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman
594232	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar RDI
594233	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Potensi Tunggakan Yang Dapat Ditagih
594234	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bunga Pemberian Pinjaman
594235	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Denda Pemberian Pinjaman

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
59424	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Kredit Pemerintah dan Piutang Lainnya
594241	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Kredit Pemerintah Bidang Perkebunan
594242	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Kredit Investasi Pemerintah
594243	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
59425	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Penjaminan Pemerintah
594251	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Penjaminan Pemerintah
59426	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Subsidi
594261	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek Subsidi
594262	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Subsidi
5943	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
59431	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
594311	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
59432	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran BLU
594321	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran BLU
5944	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
59441	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
59442	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU
594421	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU
5945	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Investasi Permanen
59451	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Investasi Permanen
594511	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Investasi Permanen

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
5946	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
59461	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa
594611	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
594612	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
594613	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penunjang Konstruksi
594614	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
594619	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
59462	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Wilayah/Kawasan Tertentu
594621	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita
594622	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
594623	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya
59463	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Khusus Masyarakat
594631	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Investasi
594632	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir
594639	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya
59464	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Operasional Lainnya BLU
594641	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU
59465	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat
594651	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat
5947	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Kegiatan Non Operasional BLU
59471	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa BLU
594711	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Tanah BLU
594712	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Gedung BLU
594713	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	594714 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU
	594719 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Lainnya BLU
59472	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset BLU
	594721 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU
	594722 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU
59479	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Operasional Lainnya BLU
	594791 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU
5948	Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih
	59481 Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih
	594811 Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Program Kemitraan
	594812 Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Kementerian Negara/Lembaga
	594813 Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Lainnya
59482	Beban Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya
	594821 Beban Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya
	594822 Beban Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih
5949	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang
	59491 Beban Penyisihan Piutang Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran
	594911 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tagihan Penjualan Angsuran
59492	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tagihan Penjualan Angsuran BLU
	594921 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tagihan Penjualan Angsuran BLU
59493	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perpendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
	594931 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perpendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
59494	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perpendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU
	594941 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perpendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
59495	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman
594951	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman
594952	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Aset Lainnya RDI
594953	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Aset Lainnya Kredit Program
59496	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Kredit Pemerintah
594961	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Kredit Pemerintah Bidang Pertanian dan Perkebunan
594962	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Kredit Investasi Pemerintah
594963	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Penjaminan Pemerintah
59499	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Lainnya
594991	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Lainnya
594992	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
595	BEBAN REKLASIFIKASI ASET
5951	Beban Aset Ekstrakomtabel
59511	Beban Aset Ekstrakomtabel
595111	Beban Aset Ekstrakomtabel Tanah
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan
595114	Beban Aset Ekstrakomtabel Jalan, Irigasi dan Jaringan
595115	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya
595116	Beban Aset Ekstrakomtabel Konstruksi Dalam Pengerjaan
595117	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tak Berwujud
59512	Beban Aset Ekstrakomtabel – BLU
595121	Beban Aset Ekstrakomtabel Tanah – BLU
595122	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin – BLU
595123	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan – BLU
595124	Beban Aset Ekstrakomtabel Jalan, Irigasi dan Jaringan – BLU
595125	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya – BLU

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	595126 Beban Aset Ekstrakomtabel Konstruksi Dalam Pengerajan – BLU
	595127 Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tak Berwujud – BLU
596 BEBAN KERUGIAN DAN LAINNYA	
5961 Beban Pelepasan Aset	
59611 Kerugian Pelepasan Aset	
596111 Kerugian Pelepasan Aset	
596112 Tuntutan Ganti Rugi	
59612 Beban Persediaan Rusak/Usang	
596121 Beban Persediaan Rusak/Usang	
59613 Beban Penghapusan Piutang	
596131 Beban Penghapusan Piutang Pemberian Pinjaman	
596132 Beban Penghapusan Piutang TP/TGR Kementerian Lembaga	
5962 Kerugian Belum Terealisasi	
59621 Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	
596211 Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	
596212 Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi - BLU	
59622 Beban Penyesuaian Nilai Investasi	
596221 Beban Penyesuaian Nilai Investasi	
5963 Beban Pihak Ketiga	
59631 Beban Pihak Ketiga Migas	
596311 Beban Pihak Ketiga Migas – Pajak Air Tanah ke Pemda	
596312 Beban Pihak Ketiga Migas – Pajak Penerangan Jalan non PLN ke Pemda	
596313 Beban Pihak Ketiga Migas – DMO Fee KKKS	
596314 Beban Pihak Ketiga Migas – Reimbursement PPN KKKS	
596315 Beban Pihak Ketiga Migas – Underlifting KKKS	
596316 Beban Pihak Ketiga Migas – Fee Penjualan Migas Bagian Negara	
596317 Beban Pihak Ketiga Migas – Beban Lainnya	
59632 Beban Pihak Ketiga Non Migas	
596321 Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - Reimbursement PPN	
596322 Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - Penggantian Bonus Produksi	
596323 Beban diestimasi - Reimbursement PPN	
596324 Beban diestimasi - PBB Panas Bumi	
596325 Beban diestimasi - Penggantian Bonus Produksi	
596326 Beban diestimasi - setoran kepada Pemerintah	
5964 Beban Penyesuaian Lainnya	
59641 Beban Penyesuaian Lainnya	
596411 Beban Penyesuaian Selisih Kurs	

KODE AKUN	URAIAN AKUN
5965	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara
59651	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara
596511	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara
597	PEMBULATAN
5971	Pembulatan
59711	Pembulatan
597111	Pembulatan
598	SUSPENSE BEBAN
5981	Suspense Beban
59811	Suspense Beban
598111	Suspense Beban
599	AKUN SET UP
5991	Akun Set Up A
59911	Akun Set up
599111	Earned Discount
599113	Discount Taken
599114	Rounding
5992	Akun Set Up B
59921	Akun Set Up
599211	PO Rate Variance Gain
599212	PO Rate Variance Loss
599213	Purchase Price Variance
599214	Invoice Price Variance
5993	Akun Set Up Bank
59931	Akun Set Up Bank
599311	Kesalahan Bank ( <i>Bank Error</i> )
599312	Biaya Perbankan ( <i>Bank Charge</i> )

## **SEGMENT AKUN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA**

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
6 BEBAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	
61 BEBAN DANA BAGI HASIL	
611 BEBAN DANA BAGI HASIL PAJAK	
6111 Beban Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	
61111 Beban Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	
611111 Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	
611112 Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	
6112 Beban Dana Bagi Hasil PBB	
61121 Beban Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	
611211 Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	
611212 Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	
611213 Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi	
611214 Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota	
611215 Beban Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota	
611216 Beban Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan sebagai Insentif PBB ke Kabupaten/Kota	
612 BEBAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM	
6121 Beban Dana Bagi Hasil-SDA Minyak Bumi	
61211 Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	
612111 Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	
612112 Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0.5%	
612113 Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus	
6122 Beban Dana Bagi Hasil -SDA Gas Bumi	
61221 Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi	
612211 Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi	
612212 Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi 0.5%	
612213 Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus	
6123 Beban Dana Bagi Hasil -SDA Pertambangan Umum	
61231 Beban Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Umum	
612311 Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	
612312 Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	
6124 Beban Dana Bagi Hasil -SDA Pertambangan Panas Bumi	
61241 Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	
612411 Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah	
612412 Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap	

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	612413 Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Produksi (Royalti)
6125	Beban Dana Bagi Hasil -SDA Kehutanan
	61251 Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan
	612511 Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH
	612512 Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH
	612513 Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi
6126	Beban Dana Bagi Hasil Perikanan
	61261 Beban Dana Bagi Hasil Perikanan
	612611 Beban Dana Bagi Hasil Perikanan
613	BEBAN DANA BAGI HASIL CUKAI
	6131 Beban Dana Bagi Hasil Cukai
	61311 Beban Dana Bagi Hasil Cukai
	613111 Beban Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
62	BEBAN DANA ALOKASI UMUM
621	BEBAN DANA ALOKASI UMUM
	6211 Beban Dana Alokasi Umum
	62111 Beban Dana Alokasi Umum
	621111 Beban Dana Alokasi Umum
	621114 Beban Koreksi Dana Alokasi Umum
63	BEBAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
631	BEBAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
	6311 Beban Dana Alokasi Khusus Reguler
	63111 Beban Dana Alokasi Khusus Reguler
	631111 Beban Dana Alokasi Khusus Reguler
	631113 Beban Koreksi Dana Alokasi Khusus Reguler
	6312 Beban Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan
	63121 Beban Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan
	631211 Beban Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah
	631212 Beban Dana Alokasi Khusus Penugasan
	6313 Beban Dana Alokasi Khusus Affirmasi
	63131 Beban Dana Alokasi Khusus Affirmasi
	631311 Beban Dana Alokasi Khusus Affirmasi
	6314 Beban Tambahan DAK Fisik
	63141 Beban Tambahan DAK Fisik
	631411 Beban Tambahan DAK Fisik
64	BEBAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DAN DANA INSENTIF DAERAH
641	BEBAN DANA OTONOMI KHUSUS
	6411 Beban Dana Otonomi Khusus Aceh

<b>KODE AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
	64111      Beban Dana Otonomi Khusus Aceh
	641111     Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
6412	Beban Dana Otonomi Khusus Papua
	64121     Beban Dana Otonomi Khusus Papua
	641211    Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua
	641212    Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua
6413	Beban Dana Otonomi Khusus Papua Barat
	64131     Beban Dana Otonomi Khusus Papua Barat
	641311    Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
	641312    Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat
642	BEBAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
	6421      Beban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
	64211     Beban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
	642111    Beban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
643	BEBAN DANA INSENTIF DAERAH
	6431      Beban Dana Insentif Daerah
	64311     Beban Dana Insentif Daerah
	643111    Beban Dana Insentif Daerah
65	BEBAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
654	BEBAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
	6541      Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus
	65411     Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus
	654111    Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)
	654112    Beban Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus
	6542      Beban Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
	65421     Beban Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
	654211    Beban Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
	6543      Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
	65431     Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
	654311    Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
	6545      Beban Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)
	65451     Beban Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)
	654511    Beban Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)
6546	Beban Dana Darurat

KODE AKUN	URAIAN AKUN
65461	Beban Dana Darurat
654611	Beban Dana Darurat
6547	Beban Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana
65471	Beban Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana
654711	Beban Dana Bantuan Operasional Kesehatan
654712	Beban Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana
6548	Beban Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan dan Kependudukan
65481	Beban Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan dan Kependudukan
654811	Beban Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi
654812	Beban Dana Peningkatan Kapasitas Usaha Kecil Menengah
654813	Beban Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan
654814	Beban Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
6549	Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)
65491	Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)
654911	Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)
66	BEBAN DANA DESA
662	BEBAN DANA DESA
6621	Beban Dana Desa
66211	Beban Dana Desa
662111	Beban Dana Desa
69	BEBAN TRANSFER LAIN-LAIN
698	BEBAN SUSPENSE TRANSFER
6981	Beban Suspense Transfer
69811	Beban Suspense Transfer
698111	Beban Suspense Transfer



## PENJELASAN URAIAN SEGMENTASI AKUN NERACA

AKUN	PENJELASAN
<b>1</b>	<b>ASET</b>
	Digunakan untuk mencatat sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
<b>11</b>	<b>ASET LANCAR</b>
	Digunakan untuk mencatat aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.
<b>111</b>	<b>KAS DAN SETARA KAS</b>
	Digunakan untuk mencatat kas dan setara kas berupa uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
<b>1111</b>	<b>Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah</b>
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam Rupiah
<b>11111</b>	<b>Kas di Bank Indonesia dalam Rupiah</b>
	Digunakan untuk mencatat kas yang ada di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam Rupiah
111111	Kas di Rekening KUN dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening KUN dalam Rupiah 502.000000980
111112	Kas di Rekening SubRKUN Kuasa BUN Pusat
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Sub RKUN Kuasa BUN Pusat 500.000000980
111113	Kas di Rekening SAL
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening SAL
111114	Kas di Rekening Talangan Reksus Kosong
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Talangan Reksus Kosong
111115	Kas di Rekening Penempatan dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penempatan dalam Rupiah 518.000122980
111116	Kas di Rekening Antara Reksus
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Antara Reksus
111117	Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah
111118	Kas di Rekening Sub BUN Talangan
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Sub BUN Talangan
<b>11112</b>	<b>Kas di Rekening Sub RKUN</b>
111121	Kas di Rekening Sub RKUN Penerimaan
	Digunakan untuk mencatat pelimpahan penerimaan negara dari seluruh bank

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	persepsi ke Rekening sub RKUN penerimaan. Rekening ini dibuat pada Bank Indonesia dan dimiliki oleh satker Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN).
111122	Kas di Rekening Sub RKUN Pengeluaran
	Digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran pinjaman luar negeri dan transaksi SP2D Valas. Rekening ini dibuat pada Bank Indonesia dan dimiliki oleh Satker Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN).
111123	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Rupiah
<b>11113</b>	<b>Kas di Rekening Surat Utang Negara</b>
111131	Kas di Rekening Penerimaan Surat Utang Negara
	Digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dari penerbitan SUN. Rekening ini dibuat pada Bank Indonesia dan dimiliki oleh Satker Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN).
111132	Kas di Rekening Pengeluaran Surat Utang Negara
	Digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran cicilan kupon atau pelunasan SUN. Rekening ini dibuat pada Bank Indonesia dan dimiliki oleh Satker Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN).
<b>11114</b>	<b>Kas di Rekening Persepsi Pusat</b>
111141	Kas di Rekening Persepsi Pusat
	Digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan pendapatan dari bank persepsi. Rekening ini dibuat pada bank umum dan PT Pos dan dimiliki oleh Satker Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN).
111142	Kas di Rekening Pos Persepsi Pusat
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pos Persepsi Pusat
<b>11115</b>	<b>Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat-SPAN</b>
111151	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji
111152	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN - Gaji
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Gaji
<b>1112</b>	<b>Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing</b>
<b>11121</b>	<b>Kas di Bank Indonesia dalam Valuta Asing</b>
111211	Kas di Rekening KUN dalam Valuta USD
111212	Kas di Rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Asing
111213	Kas di Rekening Hasil Minyak Perjanjian Karya
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Hasil Minyak Perjanjian Karya 600.000411980
111214	Kas di Rekening Khusus dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Khusus dalam Valuta Asing
111215	Kas di Rekening Penempatan dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penempatan dalam Valuta USD 608.001411980

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
111216	Kas di Rekening KUN Dalam Valuta Yen Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening KUN Dalam Valuta Yen 600.502111980
111217	Kas di rekening Penempatan Dalam Valuta Yen Digunakan untuk mencatat Kas di rekening Penempatan Dalam Valuta Yen 608.000111980
111218	Kas di Rekening KUN dalam Valuta Euro Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening KUN dalam Valuta Euro 600.502991980
111219	Kas di Rekening Penempatan Dalam Valuta Euro Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penempatan Dalam Valuta Euro 608.000991980
<b>11122</b>	<b>Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing</b>
111221	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing JPY Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing JPY
111222	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing USD Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing USD
111223	Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing Euro Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Asing Euro
<b>1113</b>	<b>Kas di Rekening Pemerintah Lainnya</b>
<b>11131</b>	<b>Kas di Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia</b>
111311	Kas Pemerintah Lainnya dalam rupiah Digunakan untuk mencatat Kas Pemerintah Lainnya dalam Rupiah
111312	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya dalam Valuta Asing Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pemerintah Lainnya dalam Valuta Asing
111313	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi
111314	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah
111315	Kas di Rekening Penerimaan Migas - RPL Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan Migas - RPL
111316	Kas di Rekening Penerimaan Panas Bumi pada Kuasa BUN Pusat Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan Panas Bumi pada Kuasa BUN Pusat
111317	Kas di Rekening Pertambangan dan Perikanan pada Kuasa BUN Pusat Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pertambangan dan Perikanan pada Kuasa BUN Pusat
111318	Kas di Rekening Kelolaan <i>Treasury Dealing Room</i> Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Kelolaan <i>Treasury Dealing Room</i> .

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
111319	Kas di Rekening Penerbitan Surat Berharga Negara Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerbitan Surat Berharga Negara
<b>11132</b>	<b>Kas di Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Umum</b>
111321	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat
111322	Kas Pemerintah yang ada di K/L Digunakan untuk mencatat Kas Pemerintah yang ada di K/L
111323	Kas Pemerintah yang ada di BLU Digunakan untuk mencatat Kas Pemerintah yang ada di BLU
111324	Kas di Rekening PFK Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening PFK
111325	Kas di Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Penempatan Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Penempatan
111326	Kas di Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Hibah luar negeri bencana alam Digunakan untuk mencatat transaksi pinjaman dan hibah luar negeri melalui rekening khusus. Rekening ini dimiliki oleh satker Direktorat Pengelolaan Kas negara (PKN). Akun ini terdiri dari rekening khusus yang dibuat di Bank Indonesia dan Bank Umum.
111327	Kas di rekening PHLN Digunakan untuk mencatat Kas di rekening PHLN
111328	Kas di Rekening Dana Bergulir Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Dana Bergulir
111329	Kas lainnya Digunakan untuk mencatat Kas lainnya
<b>11134</b>	<b>Kas di Rekening Retur Kuasa BUN</b>
111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Non Gaji Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Non Gaji.
111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji.
111343	Kas di Rekening Retur Surat Berharga Syariah Negara Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur Surat Berharga Syariah Negara.
<b>1114</b>	<b>Kas di Rekening Kas di KPPN</b>
<b>11141</b>	<b>Kas di Bank Indonesia</b>
111411	Kas di Rekening Pengeluaran di Bank Tunggal Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pengeluaran di Bank Tunggal
111412	Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam rupiah Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Rupiah
<b>11142</b>	<b>Kas di Bank Umum</b>
111421	Kas di Rekening Pengeluaran di Bank Operasional

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pengeluaran di Bank Operasional
111422	Kas di Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi)
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi)
111423	Kas di Rekening Retur BO/Pos (KPPN)
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur BO/BO KPPN
<b>11143</b>	<b>Kas KPPN di Bank Indonesia dalam Valuta Asing</b>
111431	Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam valuta USD
111432	Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam valuta Yen
111433	Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Pengeluaran BI dalam valuta Euro
<b>11144</b>	<b>Kas KPPN di Bank Umum dalam Valuta Asing</b>
111441	Kas di Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi) dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi) dalam Valuta USD.
<b>11145</b>	<b>Kas di Rekening Retur BI dalam Rupiah</b>
111451	Kas di Rekening Retur BI dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur BI dalam Rupiah.
<b>11146</b>	<b>Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Asing</b>
111461	Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta USD
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta USD.
111462	Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Yen
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Yen.
111463	Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Euro
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Euro.
111469	Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Asing Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Retur BI dalam Valuta Asing Lainnya.
<b>1115</b>	<b>Kas dalam Transito</b>
<b>11151</b>	<b>Kas dalam Transito - BUN</b>
111511	Kas dalam Transito - BUN
	Digunakan untuk mencatat selisih kiriman uang/pemindahbukuan antara pengeluaran dan penerimaan pada BUN.
111512	Kas dalam Transito Rekening Pinjaman/Hibah
	Digunakan untuk mencatat Kas dalam Transito Rekening Pinjaman/Hibah
111513	Kas dalam Transito TUP
	Akun antara pada SPAN untuk mencatat transaksi pertanggungjawaban TUP satker. Akun ini adalah akun yang menggunakan nomor rekening bank (dummy) dan menghubungkan pembayaran GTUP Nihil dengan pemotongan dana TUP ( <i>zero payment</i> ). Secara transaksi, akun ini akan nihil dalam laporan keuangan.
111514	Kas dalam Transito UP
	Akun antara untuk mencatat transaksi pertanggungjawaban UP satker. Akun ini

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	adalah akun yang menggunakan nomor rekening bank ( <i>dummy</i> ) dan menghubungkan pembayaran GUP Nihil dengan pemotongan dana UP ( <i>zero payment</i> ). Secara transaksi, akun ini akan nihil dalam laporan keuangan.
111515	Kas dalam Transito BLU
	Akun antara untuk mencatat transaksi pertanggungjawaban UP satker. Akun ini adalah akun yang tidak memiliki nomor rekening bank dan menghubungkan pembayaran Pengesahan Transaksi BLU ( <i>zero payment</i> ). Secara transaksi, akun ini akan nihil dalam laporan keuangan.
111516	Kas dalam Transito-Transaksi Non Kas
	Akun antara yang menggunakan nomor rekening bank ( <i>dummy</i> ) dan dibutuhkan untuk menciptakan aliran kas masuk dan keluar pada proses transaksi hibah non kas. Secara transaksi, akun ini akan nihil dalam laporan keuangan.
111517	Kas dalam Transito-Transaksi DTP
	Digunakan untuk mencatat proses in out dari penerimaan pajak ditanggung pemerintah. Jika menggunakan akun kas ini maka tidak akan masuk LAK.
111519	Kas dalam Transito Lainnya
	Akun antara untuk mencatat pertanggungjawaban transaksi transito yang melalui modul Penerimaan dan Pembayaran. Akun ini menggunakan nomor rekening bank ( <i>dummy</i> ) yang ada pada segmen bank.
<b>11152</b>	<b>Kas dalam Transito - K/L</b>
111521	Kas dalam Transito - Perwakilan Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat kiriman sisa UP/Kas di Bendahara Pengeluaran Satket Perwakilan RI di luar negeri yang sudah disetorkan, namun sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima.
<b>1116</b>	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>
<b>11161</b>	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>
111611	Kas di Bendahara Pengeluaran
	Digunakan untuk mencatat kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.
111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP
	Digunakan untuk mencatat kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.
<b>1117</b>	<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>
<b>11171</b>	<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>
111711	Kas di Bendahara Penerimaan
	Digunakan untuk mencatat Kas di Bendahara Penerimaan yang mencakup seluruh

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke kas negara.
<b>1118</b>	<b>Kas Lainnya dan Setara Kas</b>
<b>11181</b>	<b>Setara Kas</b>
111811	Surat Berharga
	Digunakan untuk mencatat setara kas Surat Berharga
111812	Penempatan di Bank Umum
	Digunakan untuk mencatat setara kas Penempatan di Bank Umum
111813	Reverse Repo
	Digunakan untuk mencatat setara kas Reverse Repo
111814	<i>Foreign Exchange</i>
	Digunakan untuk mencatat setara kas transaksi <i>Foreign Exchange</i> .
111819	Setara Kas lainnya
	Digunakan untuk mencatat Setara Kas lainnya
<b>11182</b>	<b>Kas Lainnya Pada Kementerian Negara/Lembaga</b>
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
	Digunakan untuk mencatat Kas Lainnya dan Setara Kas, yang mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran berupa kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai.
111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah
	Digunakan untuk mencatat Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah Langsung yang telah disahkan.
111823	Kas Lainnya di K/L Dana Kelolaan LPP RRI/TVRI
	Digunakan untuk mencatat Kas Lainnya di K/L Dana Kelolaan LPP RRI/TVRI
111824	Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi
	Digunakan untuk mencatat reklasifikasi Kas Besi yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Satker Perwakilan RI di Luar Negeri selama Uang Persediaan belum diterima. Digunakan pada BA Kementerian Luar Negeri (011).
111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
	Digunakan untuk mencatat kas lainnya di bendahara penerimaan yang berasal dari penerimaan yang belum diperhitungkan atau belum dapat diakui sebagai pendapatan.
111826	Kas Lainnya di BLU
	Digunakan untuk mencatat saldo Kas BLU yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan BLU, seperti dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, uang muka pelayanan, pajak-pajak yang belum disetor, uang pihak ketiga yang belum diserahkan seperti honorarium pegawai atau pajak yang belum disetor yang sumber dananya berasal dari DIPA Rupiah Murni dan/atau DIPA PNBP
111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan
	Digunakan untuk mencatat Kas Lainnya di K/L yang berasal dari Hibah langsung bentuk uang yang Belum Disahkan
<b>1119</b>	<b>Kas pada Badan Layanan Umum</b>
<b>11191</b>	<b>Kas - BLU</b>
111911	Kas dan Bank - BLU

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Kas Pada BLU, yang mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di BLU (yang sudah disahkan BUN).
111912	Dana yang akan Dijaminkan - BLU
	Digunakan untuk mencatat Dana yang akan Dijaminkan - BLU
111913	Dana yang akan dipadankan - BLU
	Digunakan untuk mencatat Dana yang akan dipadankan - BLU
111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan
	Digunakan untuk mencatat Kas dan Bank BLU Belum Disahkan
<b>11192</b>	<b>Setara Kas - BLU</b>
111921	Surat Berharga - BLU
	Digunakan untuk mencatat Surat Berharga - BLU
111929	Setara kas Lainnya - BLU
	Digunakan untuk mencatat Setara kas Lainnya - BLU
<b>112</b>	<b>UANG MUKA REKENING BUN</b>
<b>1121</b>	<b>Uang Muka Dari Rekening KUN</b>
<b>11211</b>	<b>Uang Muka KUN UP</b>
112111	Uang Muka KUN UP – PP
	Digunakan untuk mencatat Uang Muka KUN UP – PP
<b>1122</b>	<b>Uang Muka Dari Rekening Khusus</b>
<b>11221</b>	<b>Uang Muka Reksus UP</b>
112211	Uang Muka Reksus UP - PP Reksus
	Digunakan untuk mencatat Uang Muka Reksus UP - PP Reksus
<b>11222</b>	<b>Uang Muka Reksus Non UP</b>
112221	Uang Muka Reksus Kosong
	Digunakan untuk mencatat Uang Muka Reksus Kosong
<b>1123</b>	<b>Talangan kepada RKUN</b>
<b>11231</b>	<b>Talangan kepada RKUN</b>
112311	Talangan Dana Cadangan Subsidi kepada RKUN
	Digunakan untuk mencatat Talangan Dana Cadangan Subsidi kepada RKUN
112312	Talangan Dana Cadangan DBH kepada RKUN
	Digunakan untuk mencatat Talangan Dana Cadangan DBH kepada RKUN
112313	Talangan Dana Cadangan PMN kepada RKUN
	Digunakan untuk mencatat Talangan Dana Cadangan PMN kepada RKUN
<b>113</b>	<b>INVESTASI JANGKA PENDEK</b>
<b>1131</b>	<b>Investasi dalam Deposito</b>
<b>11311</b>	<b>Investasi dalam Deposito</b>
113111	Investasi dalam Deposito Jangka pendek
	Digunakan untuk mencatat Investasi dalam Deposito Jangka pendek
<b>1132</b>	<b>Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara</b>
<b>11321</b>	<b>Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara
113211	Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara
	Digunakan untuk mencatat Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara
<b>11322</b>	<b>Investasi Jangka Pendek pada Surat Berharga Negara</b>
113221	Investasi jangka Pendek pada SBN dalam rangka stabilisasi pasar
	Digunakan untuk mencatat Investasi jangka Pendek pada SBN dalam rangka stabilisasi pasar
113222	Investasi jangka Pendek pada SBN dalam rangka optimalisasi kas
	Digunakan untuk mencatat Investasi jangka Pendek pada SBN dalam rangka optimalisasi kas
<b>1133</b>	<b>Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum</b>
<b>11331</b>	<b>Deposito Jangka Pendek - BLU</b>
113311	Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan
	Digunakan untuk mencatat Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan
113319	Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Dana Kelolaan BLU dan/atau Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya
	Digunakan untuk mencatat Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Dana Kelolaan BLU dan/atau Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya
<b>1134</b>	<b>Bagian Lancar Investasi Non Permanen</b>
<b>11341</b>	<b>Bagian Lancar Investasi Non Permanen</b>
113411	Bagian Lancar Investasi Non Permanen
	Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Investasi Non Permanen.
<b>1139</b>	<b>Investasi Jangka Pendek Lainnya</b>
<b>11391</b>	<b>Investasi Jangka Pendek Lainnya</b>
113911	Investasi Jangka Pendek Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Investasi Jangka Pendek Lainnya
<b>114</b>	<b>BELANJA DIBAYAR DI MUKA, UANG MUKA BELANJA, DAN PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA</b>
<b>1141</b>	<b>Belanja Dibayar di Muka (<i>prepaid</i>)</b>
<b>11411</b>	<b>Belanja Dibayar di Muka (<i>prepaid</i>)</b>
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang telah dapat ditentukan penggunaannya, namun belum menerima manfaat baik berupa barang/jasa atas pengeluaran tersebut. Dan atas pengeluaran tersebut telah terpenuhinya bukti-bukti legal/dokumen2 yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan dari pihak ketiga seperti kwitansi, invoice, dll.
114111	Belanja Pegawai Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pegawai Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
114112	Belanja barang yang dibayar di muka ( <i>prepaid</i> )
	Digunakan untuk mencatat Belanja barang yang dibayar di muka ( <i>prepaid</i> )
114113	Belanja Pembayaran Bunga Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
	Digunakan untuk mencatat Belanja pembayaran bunga dibayar di muka ( <i>prepaid</i> )
114114	Belanja Lain-lain Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Belanja Lain-Lain Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
114115	Belanja Modal Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
	Digunakan untuk mencatat Belanja Modal Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
114116	Belanja Hibah Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
	Digunakan untuk mencatat Belanja Hibah Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
114117	Belanja Subsidi Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
	Digunakan untuk mencatat Belanja Subsidi Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
114118	Belanja Bantuan Sosial Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
	Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial Dibayar di Muka ( <i>prepaid</i> )
<b>1142</b>	<b>Uang muka belanja (<i>prepayment</i>)</b>
<b>11421</b>	<b>Uang muka belanja pemerintah pusat (<i>prepayment</i>)</b>
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran atas pembayaran sebagian nominal dari nilai transaksi yang telah disepakati dengan pihak ketiga, dan merupakan tanda bahwa perjanjian jual beli yang diadakan telah mengikat.
114211	Uang Muka Belanja Pegawai ( <i>Prepayment</i> )
	Digunakan untuk mencatat uang muka belanja pegawai ( <i>prepayment</i> )
114212	Uang Muka Belanja Barang ( <i>Prepayment</i> )
	Digunakan untuk mencatat uang muka belanja barang ( <i>prepayment</i> )
114213	Uang Muka Belanja Modal ( <i>Prepayment</i> )
	Digunakan untuk mencatat uang muka belanja modal ( <i>prepayment</i> )
114214	Uang Muka Belanja Pembayaran Bunga ( <i>Prepayment</i> )
	Digunakan untuk mencatat uang muka belanja pembayaran bunga ( <i>prepayment</i> )
114215	Uang Muka Belanja Subsidi ( <i>Prepayment</i> )
	Digunakan untuk mencatat uang muka belanja subsidi ( <i>prepayment</i> )
114216	Uang Muka Belanja Hibah ( <i>Prepayment</i> )
	Digunakan untuk mencatat uang muka belanja hibah ( <i>prepayment</i> )
114217	Uang Muka Belanja Bantuan Sosial ( <i>Prepayment</i> )
	Digunakan untuk mencatat uang muka belanja bantuan sosial ( <i>prepayment</i> )
114218	Uang Muka Belanja Lain-lain ( <i>prepayment</i> )
	Digunakan untuk mencatat Uang Muka Belanja Lain-Lain ( <i>prepayment</i> )
<b>11422</b>	<b>Uang muka transfer ke daerah (<i>prepayment</i>)</b>
114221	Uang muka dana perimbangan ( <i>prepayment</i> )
	Digunakan untuk mencatat Uang muka belanja dana perimbangan ( <i>prepayment</i> )
114222	Uang muka otonomi khusus dan penyesuaian ( <i>prepayment</i> )
	Digunakan untuk mencatat Uang muka belanja otonomi khusus dan penyesuaian ( <i>prepayment</i> ).
<b>1143</b>	<b>Pendapatan Yang Masih Harus Diterima</b>
<b>11431</b>	<b>Pendapatan Yang Masih Harus Diterima</b>
114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
	Digunakan untuk mencatat penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima pada akhir periode pelaporan.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>115</b>	<b>PIUTANG</b>
	Digunakan untuk mencatat Piutang, meliputi jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara/Lembaga dan/atau Hak Kementerian Negara/Lembaga yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari perjanjian atau akibat lainnya berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
<b>1151</b>	<b>Piutang Perpajakan</b>
<b>11511</b>	<b>Piutang Pajak PPh Migas</b>
115111	Piutang PPh Minyak Bumi
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPh Minyak Bumi
115112	Piutang PPh Gas Bumi
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPh Gas Bumi
115119	Piutang PPh Migas Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPh Migas Lainnya
<b>11512</b>	<b>Piutang Pajak PPh Non Migas</b>
115121	Piutang PPh Pasal 21
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPh Pasal 21
115122	Piutang PPh Pasal 22
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPh Pasal 22
115123	Piutang PPh Pasal 22 Impor
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPh Pasal 22 Impor
115124	Piutang PPh Pasal 23
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPh Pasal 23
115125	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
115126	Piutang PPh Pasal 25/29 Badan
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPh Pasal 25/29 Badan
115127	Piutang PPh Pasal 26
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPh Pasal 26
115128	Piutang PPh Final
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPh Final
115129	Piutang PPh Piutang PPh Fiskal Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPh Piutang PPh Fiskal Luar Negeri
<b>11513</b>	<b>Piutang Pajak PPN</b>
115131	Piutang PPN Dalam Negeri
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPN Dalam Negeri
115132	Piutang PPN Impor
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPN Impor
115139	Piutang PPN Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPN Lainnya
<b>11514</b>	<b>Piutang Pajak PPnBM</b>
115141	Piutang PPnBM dalam Negeri

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPnBM dalam Negeri
115142	Piutang PPnBM Impor
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPnBM Impor
115149	Piutang PPnBM Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Piutang PPnBM Lainnya
<b>11515</b>	<b>Piutang Pajak PBB dan BPHTB</b>
115151	Piutang PBB Pedesaan
	Digunakan untuk mencatat Piutang PBB Pedesaan
115152	Piutang PBB Perkotaan
	Digunakan untuk mencatat Piutang PBB Perkotaan
115153	Piutang PBB Perkebunan
	Digunakan untuk mencatat Piutang PBB Perkebunan
115154	Piutang PBB Kehutanan
	Digunakan untuk mencatat Piutang PBB Kehutanan
115155	Piutang PBB Pertambangan
	Digunakan untuk mencatat Piutang PBB Pertambangan
115156	Piutang BPHTB
	Digunakan untuk mencatat Piutang BPHTB
115159	Piutang PBB Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Piutang PBB Lainnya
<b>11516</b>	<b>Piutang Cukai dan Bea Meterai</b>
115161	Piutang Cukai Hasil Tembakau
	Digunakan untuk mencatat Piutang Cukai Hasil Tembakau
115162	Piutang Cukai Ethyl Alkohol
	Digunakan untuk mencatat Piutang Cukai Ethyl Alkohol
115163	Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol
	Digunakan untuk mencatat Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol
115164	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai
	Digunakan untuk mencatat Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai
115165	Piutang Bea Meterai
	Digunakan untuk mencatat Piutang Bea Meterai
115169	Piutang Pendapatan Cukai Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Piutang Pendapatan Cukai Lainnya
<b>11517</b>	<b>Piutang Pajak Lainnya</b>
115171	Piutang Pendapatan dari Penjualan Benda Materai
	Digunakan untuk mencatat Piutang Pendapatan dari Penjualan Benda Materai
115172	Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh
	Digunakan untuk mencatat Piutang Bunga Penagihan PPh

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN Digunakan untuk mencatat Piutang Bunga Penagihan PPN
115175	Piutang Bunga Penagihan PPnBM Digunakan untuk mencatat Piutang Bunga Penagihan PPnBM
115176	Piutang Bunga Penagihan PTLL Digunakan untuk mencatat Piutang Bunga Penagihan PTLL
<b>11518</b>	<b>Piutang Pajak Perdagangan Internasional</b>
115181	Piutang Bea masuk Digunakan untuk mencatat Piutang Bea masuk
115182	Piutang Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil) Digunakan untuk mencatat Piutang Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)
115183	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean Digunakan untuk mencatat Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean
115184	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya Digunakan untuk mencatat Piutang Pendapatan Pabean Lainnya
115185	Piutang Pajak/Pungutan Ekspor Digunakan untuk mencatat Piutang Pajak/Pungutan Ekspor
115186	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar Digunakan untuk mencatat Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar
115187	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar Digunakan untuk mencatat Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar
<b>11519</b>	<b>Piutang Bea Masuk Tindakan</b>
115191	Piutang Bea Masuk Antidumping Digunakan untuk mencatat piutang atas pendapatan negara yang berasal dari pungutan yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian.
115192	Piutang Bea Masuk Imbalan Digunakan untuk mencatat piutang atas pendapatan negara yang berasal dari pungutan yang dikenakan terhadap barang impor mengandung subsidi yang menyebabkan kerugian.
115193	Piutang Bea Masuk Tindakan Pengamanan Digunakan untuk mencatat piutang atas pendapatan negara yang berasal dari pungutan untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan.
<b>1152</b>	<b>Piutang Bukan Pajak</b>
	Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari PNBP, meliputi seluruh penerimaan pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah
<b>11521</b>	<b>Piutang Bukan Pajak</b>
115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Digunakan untuk mencatat Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
115212	Piutang Lainnya Digunakan untuk mencatat Piutang Lainnya
<b>11522</b>	<b>Piutang PT PPA</b>
115221	Piutang PT. PPA Digunakan untuk mencatat Piutang PT. PPA
<b>11523</b>	<b>Piutang transfer ke Daerah</b>
115231	Piutang Transfer Dana Perimbangan Digunakan untuk mencatat Piutang Transfer Dana Perimbangan
115232	Piutang Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Digunakan untuk mencatat Piutang Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
115239	Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Lainnya Digunakan untuk mencatat Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Lainnya
<b>11524</b>	<b>Bagian Lancar Piutang Kredit Investasi Pemerintah</b>
115241	Bagian Lancar Piutang Kredit Investasi Pemerintah Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Piutang Kredit Investasi Pemerintah
<b>11525</b>	<b>Piutang Transfer ke Daerah-Diestimasi</b>
115251	Piutang Transfer Dana Perimbangan-Diestimasi Digunakan untuk mencatat Piutang Transfer Dana Perimbangan-Diestimasi
115252	Piutang Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian-Diestimasi Digunakan untuk mencatat Piutang Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian-Diestimasi
<b>11526</b>	<b>Piutang Subsidi</b>
115261	Piutang Subsidi Digunakan untuk mencatat Piutang Subsidi
<b>1153</b>	<b>Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran</b>
<b>11531</b>	<b>Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran</b>
115311	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
<b>11532</b>	<b>Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - BLU</b>
115321	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - BLU Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - BLU
<b>1154</b>	<b>Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi</b>
<b>11541</b>	<b>Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan</b>
115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
<b>11542</b>	<b>Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi</b>
115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
<b>11543</b>	<b>Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi - BLU</b>
115431	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi - BLU

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi - BLU
<b>1155</b>	<b>Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman</b>
<b>11551</b>	<b>Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman</b>
115511	Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman
115512	Bagian Lancar RDI
	Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar RDI
115513	Potensi Tunggakan Yang Dapat Ditagih
	Digunakan untuk mencatat Potensi Tunggakan Yang Dapat Ditagih.
<b>11552</b>	<b>Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman</b>
115521	Potensi tunggakan yang dapat ditagih
	Digunakan untuk mencatat Potensi tunggakan yang dapat ditagih
115522	Piutang Bunga Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat Piutang Bunga Pemberian Pinjaman
115523	Piutang Denda Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat Piutang Denda Pemberian Pinjaman
115524	Piutang Jasa Bank Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat Piutang Jasa Bank Pemberian Pinjaman.
115525	Piutang Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat Piutang Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman.
<b>11553</b>	<b>Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman untuk Penyesuaian Akrual</b>
115531	Piutang Bunga Pemberian Pinjaman Penyesuaian
	Digunakan untuk mencatat piutang bunga dan denda akrual pada akhir periode pelaporan
115532	Piutang Denda Pemberian Pinjaman Penyesuaian
	Digunakan untuk mencatat bunga Pemberian pinjaman akrual pada akhir periode pelaporan (semesteran).
<b>11559</b>	<b>Suspen Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman</b>
115591	Suspen Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman
	Akun untuk mencatat nominal Selisih Saldo Awal Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman antara aplikasi <i>existing</i> dengan yang tercatat di SPAN dan belum teridentifikasi pasti dan nantinya harus diselesaikan pada akun piutang aslinya.
115592	Suspen Piutang Bunga Pemberian Pinjaman
	Akun untuk mencatat nominal Selisih Saldo Awal Piutang Bunga Pemberian Pinjaman antara aplikasi <i>existing</i> dengan yang tercatat di SPAN dan belum teridentifikasi pasti dan nantinya harus diselesaikan pada akun piutang aslinya.
115593	Suspen Piutang Denda Pemberian Pinjaman
	Akun untuk mencatat nominal Selisih Saldo Awal Piutang Denda Pemberian Pinjaman antara aplikasi <i>existing</i> dengan yang tercatat di SPAN dan belum teridentifikasi pasti dan nantinya harus diselesaikan pada akun piutang aslinya
115594	Suspen Piutang Jasa Bank Pemberian Pinjaman
	Akun untuk mencatat nominal Selisih Saldo Awal Piutang Jasa Bank Pemberian

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Pinjaman antara aplikasi <i>existing</i> dengan yang tercatat di SPAN dan belum teridentifikasi pasti dan nantinya harus diselesaikan pada akun piutang aslinya.
115595	Suspen Piutang Biaya Lain-lain Penerusan Pinjaman
	Akun untuk mencatat nominal Selisih Saldo Awal Piutang Biaya Lain-Lain Penerusan Pinjaman antara aplikasi <i>existing</i> dengan yang tercatat di SPAN dan belum teridentifikasi pasti dan nantinya harus diselesaikan pada akun piutang aslinya.
<b>1156</b>	<b>Piutang dari KUN</b>
<b>11561</b>	<b>Piutang dari KUN</b>
115611	Piutang dari BUN
	Digunakan untuk mencatat Piutang dari BUN
115612	Piutang dari KPPN
	Digunakan untuk mencatat Piutang dari KPPN
115613	Piutang dari Uang Persediaan yang akan diterima
	Digunakan untuk mencatat Piutang secara akrual saat pengajuan SPM terkait permintaan Uang Persediaan. Setelah proses pembayaran, saldo akun piutang ini akan tereliminasi menjadi akun Kas Di Bendahara Pengeluaran UP.
115614	Piutang dari Tambahan Uang Persediaan yang akan diterima
	Digunakan untuk mencatat Piutang secara akrual saat pengajuan SPM terkait permintaan Tambahan Uang Persediaan. Setelah proses pembayaran, saldo akun piutang ini akan tereliminasi menjadi akun Kas Di Bendahara Pengeluaran TUP.
115615	Piutang dari Uang Muka Belanja Barang yang akan diterima
	Digunakan untuk mencatat pengakuan piutang secara akrual saat pengajuan pembayaran SPM terkait permintaan uang muka belanja barang. Setelah proses pembayaran, saldo akun piutang ini akan tereliminasi menjadi akun uang muka belanja barang.
115616	Piutang dari Uang Muka Belanja Modal yang akan diterima
	Digunakan untuk mencatat pengakuan piutang secara akrual saat pengajuan pembayaran SPM terkait uang muka belanja modal. Setelah proses pembayaran, saldo akun piutang ini akan tereliminasi menjadi akun Uang Muka Belanja Modal.
115617	Piutang dari Persekot Gaji yang akan diterima
	Digunakan untuk mencatat pengakuan piutang secara akrual saat pengajuan pembayaran SPM terkait persekot gaji. Setelah proses pembayaran, saldo akun piutang ini akan tereliminasi menjadi akun Uang Muka Belanja Pegawai.
<b>11563</b>	<b>Piutang dari Kas BLU</b>
115631	Piutang dari Kas BLU
	Digunakan untuk mencatat Piutang dari Kas BLU
<b>11565</b>	<b>Piutang Kepada RKUN</b>
	Digunakan untuk mencatat Piutang Kepada RKUN, meliputi Rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral
115651	Piutang Kepada RKUN
	Digunakan untuk mencatat Piutang Kepada RKUN
<b>11566</b>	<b>Piutang Transito</b>
115661	Piutang dari Penerimaan Transito

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat piutang dari penerimaan transito.
<b>11567</b>	<b>Piutang atas Komitmen Treasury Dealing Room</b>
115671	Piutang Komitmen atas Penempatan pada Bank Indonesia
	Digunakan untuk mencatat Piutang Komitmen atas Penempatan pada Bank Indonesia pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
115672	Piutang Komitmen atas Penempatan pada Bank Umum
	Digunakan untuk mencatat Piutang Komitmen atas Penempatan pada Bank Umum pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
115673	Piutang Komitmen atas Transaksi SBN-TDR
	Digunakan untuk mencatat Piutang Komitmen atas Transaksi SBN pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
115674	Piutang Komitmen atas Reverse Repo-TDR
	Digunakan untuk mencatat Piutang Komitmen atas Reverse Repo.
115675	Piutang Komitmen atas Repo-TDR
	Digunakan untuk mencatat Piutang Komitmen atas Repo pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
115676	Piutang Komitmen atas Transaksi <i>Foreign Exchange</i> -TDR
	Digunakan untuk mencatat Piutang Komitmen atas Transaksi <i>Foreign Exchange</i> pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
<b>11568</b>	<b>Piutang atas Transaksi Treasury Dealing Room</b>
115681	Piutang Bunga Penempatan pada Bank Indonesia
	Digunakan untuk mencatat Piutang Bunga Penempatan pada Bank Indonesia pada transaksi <i>Treasury Dealing Room</i> .
115682	Piutang Bunga Penempatan pada Bank Umum
	Digunakan untuk mencatat Piutang Bunga Penempatan pada Bank Umum pada transaksi <i>Treasury Dealing Room</i> .
115683	Piutang Kupon SBN
	Digunakan untuk mencatat Piutang Kupon SBN pada transaksi <i>Treasury Dealing Room</i> .
115684	Piutang Bunga Reverse Repo
	Digunakan untuk Piutang Bunga Transaksi Reverse Repo pada transaksi <i>Treasury Dealing Room</i> .
<b>1157</b>	<b>Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum</b>
<b>11571</b>	<b>Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa</b>
115711	Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
115712	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
	Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
115713	Piutang BLU Penunjang Konstruksi
	Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Penunjang Konstruksi
115714	Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
	Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
115719	Piutang BLU penyedia Barang dan Jasa Lainnya

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Piutang BLU penyedia Barang dan Jasa Lainnya
<b>11572</b>	<b>Piutang BLU Pengelola Wilayah/Kawasan Tertentu</b>
115721	Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita
	Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita
115722	Piutang BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
	Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
115729	Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya
<b>11573</b>	<b>Piutang BLU Pengelola Dana Khusus Masyarakat</b>
115731	Piutang BLU Pengelola Dana Investasi
	Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Pengelola Dana Investasi
115732	Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir
	Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir
115739	Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya
<b>11574</b>	<b>Piutang dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat</b>
115741	Piutang dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat
	Digunakan untuk mencatat Piutang dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat
<b>11579</b>	<b>Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional</b>
115791	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional
	Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional
<b>1158</b>	<b>Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum</b>
<b>11581</b>	<b>Piutang Sewa - BLU</b>
115811	Piutang Sewa Tanah - BLU
	Digunakan untuk mencatat Piutang Sewa Tanah - BLU
115812	Piutang Sewa Gedung - BLU
	Digunakan untuk mencatat Piutang Sewa Gedung - BLU
115813	Piutang Sewa Ruangan - BLU
	Digunakan untuk mencatat Piutang Sewa Ruangan - BLU
115814	Piutang Sewa Peralatan dan Mesin - BLU
	Digunakan untuk mencatat Piutang Sewa Peralatan dan Mesin - BLU
115815	Piutang Sewa Aset Tetap Lainnya - BLU
	Digunakan untuk mencatat Piutang Sewa Aset Tetap Lainnya - BLU
115819	Piutang Sewa Lainnya - BLU
	Digunakan untuk mencatat Piutang Sewa Lainnya - BLU
<b>11582</b>	<b>Piutang dari Penjualan Aset - BLU</b>
115821	Piutang dari Penjualan Aset Tetap - BLU
	Digunakan untuk mencatat Piutang dari Penjualan Aset Tetap - BLU
115829	Piutang dari penjualan Aset lainnya - BLU
	Digunakan untuk mencatat Piutang dari penjualan Aset lainnya - BLU

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>11583</b>	<b>Piutang dari Tukar Menukar Aset - BLU</b>
115831	Piutang dari Tukar Menukar Aset Tetap - BLU
	Digunakan untuk mencatat Piutang dari Tukar Menukar Aset Tetap - BLU
115839	Piutang dari Tukar Menukar Aset Lainnya - BLU
	Digunakan untuk mencatat Piutang dari Tukar Menukar Aset Lainnya - BLU
<b>11589</b>	<b>Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional</b>
115891	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional
	Digunakan untuk mencatat Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional
<b>1159</b>	<b>Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya</b>
<b>11591</b>	<b>Piutang Lancar Kredit Pemerintah</b>
115911	Piutang Lancar Kredit Pemerintah (KUMK)
	Digunakan untuk mencatat tagihan jangka pendek pokok/bunga/denda kredit pemerintah (KUMK).
115912	Piutang Bunga Kredit Pemerintah (KUMK)
	Digunakan untuk mencatat Piutang Bunga Kredit Pemerintah (KUMK)
115913	Piutang Denda Keterlambatan Bunga KUMK
	Digunakan untuk mencatat Piutang Denda Keterlambatan Bunga KUMK
115914	Piutang Denda Penyaluran KUMK
	Digunakan untuk mencatat Piutang Denda Penyaluran KUMK
<b>11592</b>	<b>Bagian Lancar Piutang Penjaminan Pemerintah</b>
115921	Bagian Lancar Piutang Penjaminan Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat tagihan jangka pendek pokok/bunga/denda atas penjaminan pemerintah.
<b>11593</b>	<b>Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang</b>
115931	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
	Digunakan untuk mencatat bagian lancar yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atas Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
115939	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya
	Digunakan untuk mencatat bagian lancar yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atas Piutang Jangka Panjang Lainnya.
<b>116</b>	<b>PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH</b>
<b>1161</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Perpajakan</b>
<b>11611</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Perpajakan</b>
116111	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPh Migas
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPh Migas
116112	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPh Non Migas
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPh Non Migas
116113	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPN
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPN
116114	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPnBM
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPnBM

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	PPnBM
116115	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PBB dan BPHTB Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PBB dan BPHTB
116116	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Cukai dan Bea Materai Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Cukai dan Bea Materai
116117	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Lainnya Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Lainnya
116118	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Perdagangan Internasional Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Perdagangan Internasional
116119	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bea Masuk Tindakan Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Piutang Bea Masuk Tindakan yang terdiri dari atas Piutang Bea Masuk Antidumping, Piutang Bea Masuk Imbalan, dan Piutang Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
<b>1162</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak</b>
<b>11621</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak</b>
116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP
116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya
<b>11622</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – PT PPA</b>
116221	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – PT PPA Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – PT PPA
<b>11623</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman</b>
116231	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman
116232	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar RDI Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar RDI
<b>11624</b>	<b>Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya</b>
116241	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Kredit Pemerintah Bidang Perkebunan Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Kredit Pemerintah Bidang Perkebunan
116242	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Kredit Investasi Pemerintah Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Kredit Investasi Pemerintah
116243	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
<b>11625</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman</b>
116251	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Potensi Tunggakan Yang Dapat Ditagih
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Potensi Tunggakan Yang Dapat Ditagih
116252	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bunga Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bunga Pemberian Pinjaman
116253	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Denda Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Denda Pemberian Pinjaman
<b>11626</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Penjaminan Pemerintah</b>
116261	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Penjaminan Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Bagian Lancar Piutang Penjaminan Pemerintah
<b>11627</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Subsidi</b>
116271	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek Subsidi
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Piutang Jangka Pendek Subsidi
<b>1163</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran</b>
<b>11631</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran</b>
116311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
<b>1164</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi</b>
<b>11641</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan</b>
116411	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
<b>11642</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi</b>
116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
<b>1165</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Investasi Permanen</b>
<b>11651</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Investasi Permanen</b>
116511	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Investasi Permanen
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Investasi Permanen

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>1166</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU</b>
<b>11661</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa</b>
116611	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Kesehatan  Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
116612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan  Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
116613	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penunjang Konstruksi  Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penunjang Konstruksi
116614	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi  Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
116619	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya  Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
<b>11662</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Wilayah/Kawasan Tertentu</b>
116621	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita  Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita
116622	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Kasawan Ekonomi Terpadu  Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Kasawan Ekonomi Terpadu
116629	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Kasawan Lainnya  Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya
<b>11663</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Khusus Masyarakat</b>
116631	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Investasi  Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Investasi
116632	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir  Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir
116639	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya  Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya
<b>11664</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat</b>
116641	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat  Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>11669</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Operasional Lainnya BLU</b>
116691	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU
<b>1167</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU</b>
<b>11671</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa BLU</b>
116711	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Tanah BLU Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Tanah BLU
116712	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Gedung BLU Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Gedung BLU
116713	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU
116714	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU
116719	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Lainnya BLU Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Lainnya BLU
<b>11672</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset BLU</b>
116721	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU
116722	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU
<b>11673</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU</b>
116731	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran BLU Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran BLU
116732	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU
<b>11679</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Operasional Lainnya BLU</b>
116791	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU
<b>117</b>	<b>PERSEDIAAN</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
<b>1171</b>	<b>Persediaan</b>
	Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
<b>11711</b>	<b>Persediaan Bahan untuk Operasional</b>
117111	Barang Konsumsi
	Digunakan untuk mencatat persediaan bahan untuk kegiatan operasional satker berupa Barang Konsumsi sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN, misalnya : ATK, buku nikah, plat nomor, dll.
117112	Amunisi
	Digunakan untuk mencatat persediaan bahan untuk operasional berupa Amunisi sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
117113	Bahan untuk Pemeliharaan
	Digunakan untuk mencatat persediaan bahan untuk operasional berupa Bahan untuk Pemeliharaan sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
117114	Suku Cadang
	Digunakan untuk mencatat persediaan bahan untuk operasional berupa Suku Cadang sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
<b>11712</b>	<b>Persedian Bahan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat</b>
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges
	Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Pita Cukai, Materai dan Leges sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
	Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Tanah Bangunan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
	Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Hewan dan Tanaman untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
	Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Peralatan dan Mesin untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat  Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat  Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat  Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat  Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses  Digunakan untuk mencatat persediaan berupa barang dalam proses produksi untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
<b>11713</b>	<b>Persediaan Bahan untuk Proses Produksi</b>
117131	Bahan Baku  Digunakan untuk mencatat persediaan bahan untuk proses produksi berupa bahan baku sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN
117132	Barang dalam Proses  Digunakan untuk mencatat persediaan berupa barang dalam proses produksi sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN.
<b>11714</b>	<b>Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial</b>
117141	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial  Digunakan untuk mencatat persediaan berupa barang yang digunakan dalam rangka Bantuan Sosial.
<b>11719</b>	<b>Persediaan Bahan Lainnya</b>
	Digunakan untuk mencatat persediaan selain dari bahan untuk operasional, bahan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, dan bahan untuk proses produksi
117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga  Digunakan untuk mencatat Persediaan bahan lainnya berupa persediaan untuk tujuan strategis/berjaga – jaga.
117192	Persediaan Barang Hasil Sitaan  Digunakan untuk mencatat Persediaan bahan lainnya berupa Barang Hasil Sitaan
117199	Persediaan Lainnya  Digunakan untuk mencatat Persediaan Lainnya
<b>1172</b>	<b>Persediaan Badan Layanan Umum</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khusus satker Badan Layanan Umum
<b>11721</b>	<b>Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa</b>
	Digunakan untuk mencatat Persediaan milik Satker BLU sektor Penyedia Barang dan Jasa
117211	Persediaan BLU Pelayanan Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat Persediaan milik Satker BLU Pelayanan Kesehatan
117212	Persediaan BLU Pelayanan Pendidikan
	Digunakan untuk mencatat Persediaan milik Satker BLU Pelayanan Pendidikan
117213	Persediaan BLU penunjang Konstruksi
	Digunakan untuk mencatat Persediaan milik Satker BLU penunjang Konstruksi
117214	Persediaan BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
	Digunakan untuk mencatat Persediaan BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
117219	Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Persediaan milik Satker BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
<b>11722</b>	<b>Persediaan BLU Pengelola Wilayah/Kawasan Tertentu</b>
117221	Persediaan BLU Pengelola Kawasan Otorita
	Digunakan untuk mencatat Persediaan milik Satker BLU Pengelola Kawasan Otorita
117222	Persediaan BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
	Digunakan untuk mencatat Persediaan milik Satker BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
117229	Persediaan BLU Pengelola Kawasan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Persediaan milik Satker BLU Pengelola Kawasan Lainnya
<b>11723</b>	<b>Persediaan BLU Pengelola Dana Khusus Masyarakat</b>
117231	Persediaan BLU Pengelola Dana Investasi
	Digunakan untuk mencatat Persediaan milik Satker BLU Pengelola Dana Investasi
117232	Persediaan BLU Pengelola Dana Bergulir
	Digunakan untuk mencatat Persediaan milik Satker BLU Pengelola Dana Bergulir
117239	Persediaan BLU Pengelola Dana Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Persediaan milik Satker BLU Pengelola Dana Lainnya
<b>1179</b>	<b>Persediaan yang Belum Deregister</b>
<b>11791</b>	<b>Persediaan yang Belum Deregister</b>
117911	Persediaan yang Belum Deregister
	Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap persediaan yang diterima.
<b>118</b>	<b>PIUTANG PFK</b>
<b>1181</b>	<b>Piutang PFK I</b>
<b>11811</b>	<b>Piutang PFK I</b>
118111	Piutang PFK 2 % Gaji

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Piutang PFK 2 % Gaji.
118112	Piutang PFK 2% Pensiunan PNS
	Digunakan untuk mencatat Piutang PFK 2% Pensiunan PNS
118113	Piutang PFK Beras Bulog
	Piutang yang berasal dari penerimaan PFK Beras Bulog melalui potongan SPM Gaji. Akun ini terdapat pada pengajuan Resume Tagihan dari Satker ke KPPN.
118114	Piutang PFK 8% Gaji
	Digunakan untuk mencatat Piutang PFK 8% Gaji
118115	Piutang PFK Tabungan Wajib Perumahan
	Piutang yang berasal dari penerimaan PFK Taperum melalui potongan SPM Gaji. Akun ini terdapat pada pengajuan Resume Tagihan dari Satker ke KPPN.
118116	Piutang PFK 2 % Pensiunan TNI/PNS Kemhan dan Polri/PNS Polri
	Digunakan untuk mencatat Piutang PFK 2% Pensiunan TNI/PNS Kemhan dan Polri/PNS Polri
118117	Piutang PFK 3 % Iuran Jaminan Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat Piutang PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan
118118	Piutang PFK 2 % Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
	Digunakan untuk mencatat Piutang PFK 2% Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
118119	Piutang PFK Lain-lain
	Digunakan untuk mencatat Piutang PFK Lain-Lain
<b>11812</b>	<b>Piutang PFK II</b>
118121	Piutang PFK Wesel Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Piutang PFK Wesel Pemerintah
118122	Piutang Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat Piutang Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu.
<b>1182</b>	<b>Piutang Pengembalian Escrow ke RKUN</b>
<b>11821</b>	<b>Piutang Pengembalian Escrow Pajak</b>
118211	Piutang Pengembalian Escrow Pajak
	Digunakan untuk mencatat Piutang Pengembalian Escrow Pajak
<b>11822</b>	<b>Piutang Pengembalian Escrow PNBP</b>
118221	Piutang Pengembalian Escrow PNBP
	Digunakan untuk mencatat Piutang Pengembalian Escrow Pajak
<b>12</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>
	Digunakan untuk mencatat investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan
<b>121</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN</b>
	Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan
<b>1212</b>	<b>Dana Restrukturisasi Perbankan</b>
<b>12121</b>	<b>Dana Restrukturisasi Perbankan</b>
121211	Dana Restrukturisasi Perbankan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang non permanen berupa Dana Restrukturisasi Perbankan sesuai peraturan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
<b>1213</b>	<b>Dana Bergulir</b>
<b>12131</b>	<b>Program Kemitraan (PK)</b>
121311	Program Kemitraan (PK)
	Digunakan untuk mencatat Dana Bergulir berupa Program Kemitraan sesuai peraturan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
<b>12132</b>	<b>Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga</b>
121321	Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga
	Digunakan untuk mencatat Dana Bergulir berupa Dana Bergulir yang dikelola oleh Kementerian Negara/Lembaga sesuai peraturan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
<b>12133</b>	<b>Dana Bergulir Lainnya</b>
121331	Dana Bergulir Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Dana Bergulir selain dari Program Kemitraan dan Dana Bergulir Kementerian Negara/Lembaga sesuai peraturan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
<b>1214</b>	<b>Investasi dalam Obligasi</b>
<b>12141</b>	<b>Investasi dalam Obligasi</b>
121411	Investasi dalam Obligasi
	Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang non permanen berupa Obligasi sesuai peraturan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
<b>1215</b>	<b>Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan</b>
	Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang non permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan
<b>12151</b>	<b>Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan</b>
	Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang non permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan
121511	Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan
	Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang non permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan sesuai peraturan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
<b>1216</b>	<b>Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum</b>
<b>12161</b>	<b>Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa - Non Permanen</b>
121611	Investasi BLU Pelayanan Kesehatan - Non Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pelayanan Kesehatan - Non Permanen
121613	Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Non Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Non Permanen
121614	Investasi BLU Penunjang Konstruksi - Non Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Penunjang Konstruksi - Non Permanen
121615	Investasi BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi - Non Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi - Non Permanen

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
121619	Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya - Non Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya - Non Permanen
<b>12162</b>	<b>Investasi BLU Pengelola Wilayah/Kawasan tertentu - Non Permanen</b>
121621	Investasi BLU Pengelola Kawasan Otorita - Non Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pengelola Kawasan Otorita - Non Permanen
121622	Investasi BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu - Non Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu - Non Permanen
121629	Investasi BLU Pengelola Kawasan Lainnya - Non Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pengelola Kawasan Lainnya - Non Permanen
<b>12163</b>	<b>Investasi BLU Pengelola Dana Khusus untuk Masyarakat - Non Permanen</b>
121631	Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Non Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Non Permanen
121632	Investasi BLU Pengelola Dana Bergulir - Non Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pengelola Dana Bergulir - Non Permanen
121639	Investasi BLU Pengelola Dana Lainnya - Non Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pengelola Dana Lainnya - Non Permanen
<b>1219</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya</b>
	Digunakan untuk mencatat Investasi Non Permanen Lainnya yang tidak memenuhi kriteria Investasi dalam Dana Restrukturisasi Perbankan, Dana Bergulir, Obligasi, Penyertaan Modal Pemerintah dan BLU
<b>12191</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya</b>
	Digunakan untuk mencatat Investasi Non Permanen Lainnya yang tidak memenuhi kriteria Investasi dalam Dana Restrukturisasi Perbankan, Dana Bergulir, Obligasi, Penyertaan Modal Pemerintah dan BLU
121911	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya
<b>122</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN</b>
	Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan yang mempunyai masa investasi lebih dari 12 (duabelas) bulan.
<b>1221</b>	<b>Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah</b>
	Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, lembaga keuangan Negara, BHMN, badan-badan internasional seperti IMF, ADB, serta badan hukum lainnya.
<b>12211</b>	<b>Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Negara/Daerah</b>
122111	Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero
	Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero
122112	Penyertaan Modal Pemerintah pada PERUM
	Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Pemerintah pada PERUM
<b>12212</b>	<b>Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
122121	Penyertaan Modal Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Luar Negeri pada badan-badan internasional seperti IMF dan ADB
<b>12213</b>	<b>Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya</b>
	Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya yang tidak termasuk kriteria sebagai perusahaan negara/daerah dan badan-badan internasional.
122131	Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya
<b>1222</b>	<b>Investasi Permanen Badan Layanan Umum</b>
<b>12221</b>	<b>Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa – Permanen</b>
	Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Pemerintah pada BLU Penyedia Barang dan Jasa mencakup layanan kesehatan, pendidikan, penunjang konstruksi, jasa komunikasi dan penyedia barang dan jasa lainnya.
122211	Investasi BLU Pelayanan Kesehatan - Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pelayanan Kesehatan - Permanen
122212	Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Permanen
122213	Investasi BLU Penunjang Konstruksi - Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Penunjang Konstruksi - Permanen
122214	Investasi BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi - Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi - Permanen
122219	Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya - Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya - Permanen
<b>12222</b>	<b>Investasi BLU Pengelola Kawasan - Permanen</b>
	Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Pemerintah pada BLU Pengelola Kawasan mencakup pengelolaan kawasan otorita, kawasan ekonomi terpadu dan kawasan lainnya.
122221	Investasi BLU Pengelola Kawasan Otorita - Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pengelola Kawasan Otorita - Permanen
122222	Investasi BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu - Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu - Permanen
122223	Investasi BLU Pengelola Kawasan Lainnya - Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pengelola Kawasan Lainnya - Permanen
<b>12223</b>	<b>Investasi BLU Pengelola Dana - Permanen</b>
	Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal Pemerintah pada BLU Pengelola Dana mencakup pengelolaan Dana Investasi, Dana Bergulir dan Dana Lainnya.
122231	Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pengelola Dana Investasi - Permanen
122232	Investasi BLU Pengelola Dana Bergulir - Permanen

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pengelola Dana Bergulir - Permanen
122239	Investasi BLU Pengelola Dana Lainnya - Permanen
	Digunakan untuk mencatat Investasi BLU Pengelola Dana Lainnya - Permanen
<b>1229</b>	<b>Investasi Permanen Lainnya</b>
	Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang lainnya, yaitu investasi permanen yang tidak dapat dikategorikan sebagai Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah dan Badan Layanan Umum.
<b>12291</b>	<b>Investasi Permanen Lainnya</b>
	Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang lainnya yang terdiri dari Investasi dalam Obligasi, pada Otorita, pada Bank Indonesia dan Investasi Lain-lain.
122911	Investasi dalam Obligasi
	Digunakan untuk mencatat Investasi dalam Obligasi
122912	Investasi pada Otorita
	Digunakan untuk mencatat Investasi pada Otorita
122913	Investasi pada Bank Indonesia
	Digunakan untuk mencatat Investasi pada Bank Indonesia
122919	Investasi Lain-lain
	Digunakan untuk mencatat Investasi Lain-lain
<b>123</b>	<b>DANA BERGULIR DIRAGUKAN TERTAGIH</b>
<b>1231</b>	<b>Dana Bergulir Diragukan Tertagih</b>
<b>12311</b>	<b>Dana Bergulir Diragukan Tertagih</b>
123111	Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Program Kemitraan
	Digunakan untuk mencatat Dana Bergulir Diragukan Tertagih-Kementerian Negara/Lembaga.
123112	Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Kementerian Negara/ Lembaga
	Digunakan untuk mencatat Dana Bergulir Diragukan Tertagih-Program Kemitraan.
123113	Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Dana Bergulir Diragukan Tertagih-Lainnya.
<b>1232</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya</b>
<b>12321</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya</b>
123211	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya
	Digunakan untuk mencatat Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya.
<b>1233</b>	<b>Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih</b>
<b>12331</b>	<b>Investasi Non Permanen BLU Penyedia Barang dan Jasa Diragukan Tertagih</b>
123311	Investasi Non Permanen BLU Pelayanan Kesehatan Diragukan Tertagih
	Digunakan untuk mencatat Investasi Non Permanen BLU Pelayanan Kesehatan Diragukan Tertagih
123312	Investasi Non Permanen BLU Pendidikan Diragukan Tertagih
	Digunakan untuk mencatat Investasi Non Permanen BLU Pendidikan Diragukan Tertagih
123313	Investasi Non Permanen BLU Penunjang Konstruksi Diragukan Tertagih
	Digunakan untuk mencatat Investasi Non Permanen BLU Penunjang Konstruksi

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Diragukan Tertagih
123314	Investasi Non Permanen BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi Diragukan Tertagih
	Digunakan untuk mencatat Investasi Non Permanen BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi Diragukan Tertagih
123319	Investasi Non Permanen BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya Diragukan Tertagih
	Digunakan untuk mencatat Investasi Non Permanen BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya Diragukan Tertagih
<b>12332</b>	<b>Investasi Non Permanen BLU Pengelola Wilayah/Kawasan Tertentu Diragukan Tertagih</b>
123321	Investasi Non Permanen BLU Pengelola Kawasan Otorita Diragukan Tertagih
	Digunakan untuk mencatat Investasi Non Permanen BLU Pengelola Kawasan Otorita Diragukan Tertagih
123322	Investasi Non Permanen BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu Diragukan Tertagih
	Digunakan untuk mencatat Investasi Non Permanen BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu Diragukan Tertagih
123329	Investasi Non Permanen BLU Pengelola Kawasan Lainnya Diragukan Tertagih
	Digunakan untuk mencatat Investasi Non Permanen BLU Pengelola Kawasan Lainnya Diragukan Tertagih
<b>12333</b>	<b>Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Khusus untuk Masyarakat Diragukan Tertagih</b>
123331	Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Investasi Diragukan Tertagih
	Digunakan untuk mencatat Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Investasi Diragukan Tertagih
123332	Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Bergulir Diragukan Tertagih
	Digunakan untuk mencatat Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Bergulir Diragukan Tertagih
123339	Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Lainnya Diragukan Tertagih
	Digunakan untuk mencatat Investasi Non Permanen BLU Pengelola Dana Lainnya Diragukan Tertagih
<b>13</b>	<b>ASET TETAP</b>
	Digunakan untuk mencatat aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
<b>131</b>	<b>TANAH</b>
	Digunakan untuk mencatat aset tetap berwujud tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.
<b>1311</b>	<b>Tanah</b>
	Digunakan untuk mencatat tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
<b>13111</b>	<b>Tanah</b>
	Digunakan untuk mencatat BMN berupa Aset Tetap - Tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>1312</b>	<b>Tanah Belum Deregister</b>
<b>13121</b>	<b>Tanah Belum Deregister</b>
131211	Tanah Belum Deregister
	Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Tanah yang diterima.
<b>1313</b>	<b>Tanah Badan Layanan Umum</b>
<b>13131</b>	<b>Tanah - BLU</b>
131311	Tanah - BLU
	Digunakan untuk mencatat tanah yang dimiliki atau diperoleh Badan Layanan Umum dengan maksud digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
<b>1314</b>	<b>Tanah Belum Deregister - BLU</b>
<b>13141</b>	<b>Tanah Belum Deregister - BLU</b>
131411	Tanah Belum Deregister - BLU
	Digunakan untuk pencatatan pada satker BLU ketika dilakukan BAST terhadap Tanah yang diterima.
<b>132</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>
<b>1321</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>
<b>13211</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>
	Digunakan untuk mencatat peralatan dan mesin yang nilainya signifikan dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dengan masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.
132111	Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat Peralatan dan Mesin. Mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai, sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai kodefikasi BMN
<b>1322</b>	<b>Peralatan dan Mesin Belum Deregister</b>
<b>13221</b>	<b>Peralatan dan Mesin Belum Deregister</b>
132211	Peralatan dan Mesin Belum Deregister
	Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Peralatan dan Mesin yang diterima.
<b>1323</b>	<b>Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum</b>
<b>13231</b>	<b>Peralatan dan Mesin - BLU</b>
132311	Peralatan dan Mesin - BLU
	Digunakan untuk mencatat peralatan dan mesin yang nilainya signifikan dimiliki atau diperoleh Badan Layanan Umum dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional BLU dengan masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.
<b>1324</b>	<b>Peralatan dan Mesin Belum Deregister - BLU</b>
<b>13241</b>	<b>Peralatan dan Mesin Belum Deregister - BLU</b>
132411	Peralatan dan Mesin Belum Deregister - BLU
	Digunakan untuk pencatatan pada satker BLU ketika dilakukan BAST terhadap Peralatan dan Mesin yang diterima.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>133</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>
<b>1331</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>
<b>13311</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>
133111	Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat seluruh Gedung dan Bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan meliputi antara lain bagunan gedung; monumen; bangunan menara; rambu-rambu; dan tugu titik kontrol/pasti.
<b>1332</b>	<b>Gedung dan Bangunan Belum Diregister</b>
<b>13321</b>	<b>Gedung dan Bangunan Belum Diregister</b>
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister
	Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Gedung dan Bangunan yang diterima.
<b>1333</b>	<b>Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum</b>
<b>13331</b>	<b>Gedung dan Bangunan - BLU</b>
133311	Gedung dan Bangunan - BLU
	Digunakan untuk mencatat seluruh Gedung dan Bangunan yang dibeli, diperoleh atau dibangun Badan Layanan Umum dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional BLU dan dalam kondisi siap digunakan.
<b>1334</b>	<b>Gedung dan Bangunan Belum Diregister - BLU</b>
<b>13341</b>	<b>Gedung dan Bangunan Belum Diregister - BLU</b>
133411	Gedung dan Bangunan Belum Diregister - BLU
	Digunakan untuk pencatatan pada satker BLU ketika dilakukan BAST terhadap Gedung dan Bangunan yang diterima.
<b>134</b>	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>
<b>1341</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>
<b>13411</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>
134111	Jalan dan Jembatan
	Digunakan untuk mencatat Jalan dan Jembatan. Jalan dan jembatan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
134112	Irigasi
	Digunakan untuk mencatat Irigasi. Irigasi yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai
134113	Jaringan
	Digunakan untuk mencatat Jaringan. Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai
<b>1342</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister</b>
<b>13421</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister</b>
134211	Jalan dan Jembatan Belum Diregister
	Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Jalan dan Jembatan yang diterima.
134212	Irigasi Belum Diregister
	Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Irigasi yang diterima.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
134213	Jaringan Belum Deregister Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Jaringan yang diterima.
<b>1343</b>	<b>Jalan,Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum</b>
<b>13431</b>	<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan - BLU</b>
134311	Jalan, Irigasi, dan Jaringan - BLU Digunakan untuk mencatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dibangun atau diperoleh oleh Badan Layanan Umum serta dikuasai oleh satker BLU dan dalam kondisi siap digunakan.
<b>1344</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Deregister - BLU</b>
<b>13441</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Deregister - BLU</b>
134411	Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Deregister - BLU Digunakan untuk pencatatan pada satker BLU ketika dilakukan BAST terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diterima.
<b>135</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>
<b>1351</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>
<b>13511</b>	<b>Aset Tetap Renovasi</b>
135111	Aset Tetap Renovasi Digunakan untuk mencatat kapitalisasi atas biaya renovasi/biaya pengembangan yang memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap, yang bukan milik entitas akuntansi, namun digunakan dalam kegiatan operasional entitas akuntansi yang melakukan renovasi. Berdasarkan hal tersebut, Aset Tetap Renovasi memiliki kriteria sbb: 1. Aset yang direnovasi bukan milik entitas akuntansi bersangkutan; 2. Aset yang direnovasi digunakan untuk kegiatan operasional entitas akuntansi yang merenovasi; 3. Sampai dengan tanggal pelaporan belum diserahkan oleh entitas akuntansi perenovasi kepada pemilik Aset.
<b>13512</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>
135121	Aset Tetap Lainnya Digunakan untuk mencatat seluruh Aset Tetap Lainnya. Aset Tetap Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikategorikan sebagai Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan pemerintah dan siap digunakan.
<b>1352</b>	<b>Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum</b>
<b>13521</b>	<b>Aset Tetap Lainnya - BLU</b>
135211	Aset Tetap Lainnya - BLU Digunakan untuk mencatat seluruh Aset Tetap Lainnya. Aset Tetap Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikategorikan sebagai Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh Badan Layanan Umum dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional satker BLU dan dalam kondisi siap digunakan.
<b>13522</b>	<b>Aset Tetap Renovasi - BLU</b>
135221	Aset Tetap Renovasi - BLU Digunakan untuk mencatat kapitalisasi atas biaya renovasi/biaya pengembangan yang memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap, yang bukan milik satker BLU, namun digunakan dalam kegiatan operasional satker BLU yang melakukan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	<p>renovasi.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, Aset Tetap Renovasi memiliki kriteria sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aset yang direnovasi bukan milik entitas akuntansi bersangkutan;</li> <li>2. Aset yang direnovasi digunakan untuk kegiatan operasional entitas akuntansi yang merenovasi;</li> <li>3. Sampai dengan tanggal pelaporan belum diserahkan oleh entitas akuntansi perenovasi kepada pemilik Aset.</li> </ol>
<b>136</b>	<b>KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Konstruksi Dalam Pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
<b>1361</b>	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>
	Digunakan untuk mencatat Konstruksi Dalam Pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
<b>13611</b>	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>
	Digunakan untuk mencatat Konstruksi Dalam Pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan
	Digunakan untuk mencatat Konstruksi Dalam Pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
<b>1362</b>	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum</b>
<b>13621</b>	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum</b>
136211	Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum
	Digunakan untuk mencatat Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum. Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU adalah aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan oleh satker BLU, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
<b>137</b>	<b>AKUMULASI PENYUSUTAN</b>
<b>1371</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>
<b>13711</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli.
<b>13712</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU</b>
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker BLU.
137121	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker BLU.
<b>1372</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>
<b>13721</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan  Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun.
<b>13722</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU</b>
137221	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU  Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun oleh satker BLU.
<b>1373</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>
<b>13731</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi</b>
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan  Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Jalan dan Jembatan mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun.
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi  Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Irigasi mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun.
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan  Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Jaringan mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun.
<b>13732</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU</b>
137321	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU  Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun oleh satker BLU.
<b>1374</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya</b>
<b>13741</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya</b>
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya  Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun.
<b>13742</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU</b>
137421	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU  Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau selesai dibangun oleh satker BLU.
<b>139</b>	<b>ASET TETAP YANG BELUM DIREGISTER</b>
<b>1391</b>	<b>Aset Tetap yang Belum Diregister</b>
<b>13911</b>	<b>Aset Tetap yang Belum Diregister</b>
139111	Aset Tetap yang Belum Diregister  Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Aset Tetap yang diterima.
<b>14</b>	<b>DANA CADANGAN</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>141</b>	<b>DANA CADANGAN</b>
<b>1411</b>	<b>Dana Cadangan</b>
<b>14111</b>	<b>Dana Cadangan</b>
141111	Dana Cadangan
	Digunakan untuk mencatat dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
<b>15</b>	<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>
<b>151</b>	<b>PIUTANG TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN</b>
<b>1511</b>	<b>Piutang Tagihan Penjualan Angsuran</b>
<b>15111</b>	<b>Piutang Tagihan Penjualan Angsuran</b>
151111	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
	Digunakan untuk mencatat jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Jumlah TPA dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara.
<b>1512</b>	<b>Piutang Tagihan Penjualan Angsuran BLU</b>
<b>15121</b>	<b>Piutang Tagihan Penjualan Angsuran-Badan Layanan Umum</b>
151211	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran-Badan Layanan Umum
	Digunakan untuk mencatat jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah di satker BLU secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Jumlah TPA dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara.
<b>152</b>	<b>PIUTANG TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TAGIHAN TUNTUTAN GANTI RUGI</b>
<b>1521</b>	<b>Piutang Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi</b>
<b>15211</b>	<b>Piutang Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi</b>
152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
	Digunakan untuk mencatat jumlah yang dapat diterima dari suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai negeri non bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Jumlah TPA/TGR dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebaran/ Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh Bendahara/Pegawai Negeri bukan bendahara yang bersangkutan ke kas negara.
<b>1522</b>	<b>Piutang Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU</b>
<b>15221</b>	<b>Piutang Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi-Badan Layanan Umum</b>
152211	Piutang Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi-Badan Layanan Umum

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat jumlah tagihan yang timbul atas proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai non bendahara satker BLU dengan tujuan untuk menuntut peggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/ pegawai non bendahara satker BLU tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Jumlah TPA/TGR dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan/ Surat Ketetapan Tanggungjawab Mutlak setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh Bendahara/Pegawai Negeri bukan bendahara yang bersangkutan ke kas negara.
<b>153</b>	<b>PIUTANG JANGKA PANJANG PEMBERIAN PINJAMAN</b>
<b>1531</b>	<b>Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman</b>
<b>15311</b>	<b>Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman</b>
153111	Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat nilai aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian pinjaman yang berasal dari pinjaman/hibah baik yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri kepada Pemerintah Daerah (Pemda)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah.
153112	Aset Lainnya RDI
	Digunakan untuk mencatat nilai aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya penerusan pinjaman berupa Aset lainnya RDI yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah
153113	Piutang yang belum tertagih ( <i>Unbilled</i> )
	Posisi tagihan penerusan pinjaman yang belum ditagihkan dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun dan dicatat oleh satker Direktorat SMI
153114	Piutang yang belum teridentifikasi ( <i>Unidentified</i> )
	Piutang yang telah diketahui debiturnya atau customernya dari piutang penerusan pinjaman namun belum direkonsiliasi dengan piutang penerusan pinjamannya
153115	Selisih piutang ( <i>On Account</i> )
	Penerimaan standar yang tidak merujuk ke tagihan piutang
153116	Piutang yang belum terekonsiliasi ( <i>Unapplied</i> )
	Pengembalian piutang yang belum diketahui wajib setornya
153117	Aset Lainnya Kredit Program
	Piutang biaya komitmen timbul atas pinjaman yang belum dilakukan penarikan. Dokumen sumbernya Naskah Perjanjian Pemberian Pinjaman
153118	Piutang Pemberian Pinjaman yang belum disesuaikan
	Digunakan untuk mencatat penagihan pemberian pinjaman sebagai perantara sebelum disesuaikan dengan piutang jangka panjang pemberian pinjaman.
153119	Piutang Transito Pengalihan Pemberian Pinjaman
	Akun piutang transito untuk mencatat pengalihan piutang pemberian pinjaman.
<b>15319</b>	<b>Suspen Piutang Pemberian Pinjaman</b>
153191	Suspen Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman
	Akun untuk mencatat nominal Selisih Saldo Awal Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman antara aplikasi <i>existing</i> dengan yang tercatat di SPAN dan belum teridentifikasi pasti dan nantinya harus diselesaikan pada akun piutang aslinya.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>154</b>	<b>PIUTANG JANGKA PANJANG KREDIT PEMERINTAH</b>
<b>1541</b>	<b>Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah</b>
<b>15411</b>	<b>Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah Bidang Pertanian dan Perkebunan</b>
154111	Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah KUT-TP 1999/2000  Digunakan untuk mencatat nilai aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian kredit KUT-TP 1999/2000 oleh pemerintah kepada Pemerintah Daerah (Pemda)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/penerima lainnya yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan.
154112	Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah Dana Cadangan KUT-TP  Digunakan untuk mencatat nilai aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian kredit cadangan KUT-TP oleh pemerintah kepada Pemerintah Daerah (Pemda)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/penerima lainnya yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan.
154113	Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah KKop Pangan MP2000  Digunakan untuk mencatat nilai aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian kredit KKop Pangan MP2000 oleh pemerintah kepada Pemerintah Daerah (Pemda)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/penerima lainnya yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan.
154114	Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah PIR dan UPP Perkebunan  Digunakan untuk mencatat nilai aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian kredit PIR dan UPP Perkebunan oleh pemerintah kepada Pemerintah Daerah (Pemda)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/penerima lainnya yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan.
154115	Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah (KUMK)  Digunakan untuk mencatat tagihan jangka panjang pokok/bunga/denda kredit pemerintah.
154116	Piutang yang Belum Tertagih ( <i>unbilled</i> ) atas Kredit Pemerintah (KUMK)  Digunakan untuk mencatat Piutang yang Belum Tertagih ( <i>unbilled</i> ) atas Kredit Pemerintah (KUMK).
<b>15412</b>	<b>Piutang Jangka Panjang atas Kredit Investasi Pemerintah</b>
154121	Piutang Jangka Panjang atas Kredit Investasi Pemerintah  Digunakan untuk mencatat nilai aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian kredit investasi oleh pemerintah kepada Pemerintah Daerah (Pemda)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/penerima lainnya yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan.
154122	Piutang Jangka Panjang atas Kredit Investasi Pemerintah yang belum disesuaikan  Digunakan untuk mencatat tagihan jangka panjang pokok/bunga/denda kredit investasi pemerintah.
<b>15413</b>	<b>Piutang Jangka Panjang atas Penjaminan Pemerintah</b>
154131	Piutang Jangka Panjang atas Penjaminan Pemerintah  Digunakan untuk mencatat piutang atas Penjaminan Pemerintah kepada BUMN/BUMD/Pemda.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>155</b>	<b>PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA</b>
<b>1551</b>	<b>Piutang Jangka Panjang lainnya</b>
<b>15511</b>	<b>Piutang Jangka Panjang lainnya</b>
155111	Piutang Jangka Panjang lainnya
	Digunakan untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah.
<b>15512</b>	<b>Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo</b>
155121	Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
	Digunakan untuk mencatat Piutang Jangka Panjang Pemerintah kepada PT. Lapindo Brantas Inc./PT. Minarak Lapindo Jaya atas pembayaran langsung kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak Lumpur Sidoarjo.
<b>1552</b>	<b>Piutang Jangka Panjang Subsidi</b>
<b>15521</b>	<b>Piutang Jangka Panjang Subsidi</b>
155211	Piutang Jangka Panjang Subsidi
	Digunakan untuk mencatat Piutang Jangka Panjang Subsidi
<b>156</b>	<b>PENYISIHAN PIUTANG JANGKA PANJANG</b>
<b>1561</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran</b>
<b>15611</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Penjualan Angsuran</b>
156111	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Penjualan Angsuran
	Digunakan untuk mencatat cadangan yang harus dibentuk atas piutang yang tidak tertagih sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang - Tagihan Penjualan Angsuran
<b>1562</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran BLU</b>
<b>15621</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Penjualan Angsuran BLU</b>
156211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Penjualan Angsuran BLU
	Digunakan untuk mencatat cadangan yang harus dibentuk satker BLU atas piutang yang tidak tertagih sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang - Tagihan Penjualan Angsuran BLU
<b>1563</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi</b>
<b>15631</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi</b>
156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
	Digunakan untuk mencatat cadangan yang harus dibentuk atas piutang yang tidak tertagih sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
<b>1564</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU</b>
<b>15641</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU</b>
156411	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Ganti Rugi BLU
	Digunakan untuk mencatat cadangan yang harus dibentuk satker BLU atas piutang yang tidak tertagih sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU
<b>1565</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman</b>
<b>15651</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman</b>
156511	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat cadangan yang harus dibentuk atas piutang yang tidak tertagih sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang jangka panjang Pemberian Pinjaman.
156512	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Aset Lainnya RDI
	Digunakan untuk mencatat cadangan yang harus dibentuk atas piutang yang tidak tertagih sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang - Aset Lainnya RDI.
156513	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Aset Lainnya Kredit Program
	Digunakan untuk mencatat cadangan yang harus dibentuk atas piutang yang tidak tertagih sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang - Aset Lainnya Kredit Program.
<b>1566</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Kredit Pemerintah</b>
<b>15661</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Kredit Pemerintah</b>
156611	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Kredit Pemerintah Bidang Pertanian dan Perkebunan
	Digunakan untuk mencatat cadangan yang harus dibentuk atas piutang yang tidak tertagih sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang - Kredit Pemerintah bidang pertanian dan perkebunan.
156612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Kredit Investasi Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat cadangan yang harus dibentuk atas piutang yang tidak tertagih sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang - Kredit Investasi Pemerintah.
<b>15662</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Penjaminan Pemerintah</b>
156621	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Penjaminan Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat cadangan yang harus dibentuk atas piutang yang tidak tertagih sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang - Penjaminan Pemerintah.
<b>1567</b>	<b>PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH JANGKA PANJANG SUBSIDI</b>
<b>15671</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang Subsidi</b>
156711	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang Subsidi
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang Subsidi
<b>1569</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya</b>
<b>15691</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya</b>
156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Panjang Lainnya
<b>15692</b>	<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo</b>
156921	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
	Digunakan untuk mencatat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
<b>16</b>	<b>ASET LAINNYA</b>
<b>161</b>	<b>KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA</b>
<b>1611</b>	<b>Kemitraan Dengan Pihak Ketiga</b>
<b>16111</b>	<b>Kemitraan Dengan Pihak Ketiga</b>
161111	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
	Digunakan untuk mencatat Aset Lainnya berupa Kemitraan Dengan Pihak Ketiga berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa Bangun, Kelola, Serah (BKS) dan Bangun, Serah, Kelola (BSK).
<b>162</b>	<b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>
<b>1621</b>	<b>Aset Tak Berwujud</b>
	Digunakan untuk mencatat aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
<b>16211</b>	<b>Goodwill</b>
162111	Goodwill
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa Goodwill
<b>16212</b>	<b>Hak Cipta</b>
162121	Hak Cipta
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.
<b>16213</b>	<b>Royalti</b>
162131	Royalti
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa Royalti
<b>16214</b>	<b>Paten</b>
162141	Paten
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
<b>16215</b>	<b>Software</b>
162151	Software
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa Software

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>16216</b>	<b>Lisensi</b>
162161	Lisensi
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu
<b>16217</b>	<b>Hasil Kajian/Penelitian</b>
162171	Hasil Kajian/Penelitian
	Digunakan untuk mencatat aset tak berwujud lainnya berupa hasil kajian/penelitian.
<b>16219</b>	<b>Aset Tak Berwujud Lainnya</b>
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar pengeluaran yang terjadi dengan SPM belanja modal non fisik yang melekat pada aset tersebut
<b>1622</b>	<b>Aset Tak Berwujud- Badan Layanan Umum</b>
<b>16221</b>	<b>Software-Badan Layanan Umum</b>
162211	Software-Badan Layanan Umum
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa Software pada Badan Layanan Umum
<b>16222</b>	<b>Hak Cipta BLU</b>
162221	Hak Cipta BLU
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada BLU
<b>16223</b>	<b>Royalti BLU</b>
162231	Royalti BLU
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa Royalti pada BLU
<b>16224</b>	<b>Paten BLU</b>
162241	Paten BLU
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud berupa hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) pada satker BLU atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
<b>16229</b>	<b>Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum</b>
162291	Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Lainnya pada Badan Layanan Umum
<b>1623</b>	<b>Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan</b>
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
<b>16231</b>	<b>Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan</b>
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Dalam Penggerjaan
<b>1624</b>	<b>Aset Tak Berwujud Dalam Penggerjaan-BLU</b>
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Dalam Penggerjaan pada Badan Layanan Umum
<b>16241</b>	<b>Aset Tak Berwujud Dalam Penggerjaan-BLU</b>
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Dalam Penggerjaan pada Badan Layanan Umum
162411	Aset Tak Berwujud Dalam Penggerjaan-BLU
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud Dalam Penggerjaan pada Badan Layanan Umum
<b>163</b>	<b>DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA</b>
<b>1631</b>	<b>Dana Yang Dibatasi Penggunaannya</b>
<b>16311</b>	<b>Dana Yang Dibatasi Penggunaannya</b>
163111	Cadangan Dana Reboisasi
	Digunakan untuk mencatat saldo dana yang penggunaannya dibatasi hanya untuk tujuan/kegiatan reboisasi.
163112	Cadangan Dana Subsidi/PSO
	Digunakan untuk mencatat saldo dana yang penggunaannya dibatasi hanya untuk tujuan/kegiatan subsidi/ PSO.
163113	Cadangan Dana Bagi Hasil SDA
	Digunakan untuk mencatat saldo dana yang penggunaannya dibatasi hanya untuk tujuan/kegiatan bagi hasil SDA.
163114	Dana untuk Penyertaan Modal Negara (PMN)
	Digunakan untuk mencatat saldo dana yang penggunaannya dibatasi hanya untuk tujuan/kegiatan penyertaan modal negara (PMN).
163116	DAU yang belum dibagi
	Digunakan untuk mencatat saldo dana yang penggunaannya dibatasi hanya untuk tujuan/kegiatan DAU yang belum dibagi.
163117	Dana pada Bapertarum
	Digunakan untuk mencatat saldo dana yang penggunaannya dibatasi hanya untuk tujuan/kegiatan pada Bapertarum.
163118	Cadangan Dana Sebelum disesuaikan
	Digunakan untuk mencatat Cadangan Dana Sebelum disesuaikan.
163119	Dana Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Dana Lainnya.
<b>16312</b>	<b>Trust Fund</b>
163121	<i>Trust Fund</i>
	Digunakan untuk mencatat saldo dana yang penggunaannya dibatasi hanya untuk <i>Trust Fund</i> .
<b>16313</b>	<b>Dana Yang Dibatasi Penggunaannya II</b>
163131	Dana Perhitungan Fihak Ketiga
	Digunakan untuk mencatat Dana Perhitungan Fihak Ketiga
<b>1632</b>	<b>Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>16321</b>	<b>Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri</b>
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat saldo kas besi yang disediakan pada Perwakilan RI di Luar Negeri untuk keperluan mendesak.
<b>164</b>	<b>DANA PENJAMINAN</b>
<b>1641</b>	<b>Dana Cadangan Penjaminan</b>
<b>16411</b>	<b>Dana Cadangan Penjaminan</b>
164111	Dana Cadangan Penjaminan
	Digunakan untuk mencatat dana cadangan penjaminan yang diberikan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada kreditur yang memberikan pinjaman perbankan atau pembayaran kewajiban Penanggung Jawab Proyek Kerjasama kepada Badan Usaha dalam proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur.
<b>1642</b>	<b>Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi</b>
<b>16421</b>	<b>Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi</b>
164211	Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi
	Akun aset lainnya untuk mencatat penampungan kas dari dana penjaminan pihak ketiga (retensi).
<b>165</b>	<b>DANA KELOLAAN BLU</b>
<b>1651</b>	<b>Dana Kelolaan Badan Layanan Umum</b>
<b>16511</b>	<b>Dana Kelolaan Badan Layanan Umum</b>
165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan
	Digunakan untuk mencatat Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan
165112	Dana Kelolaan BLU yang Ditarik ke Rekening BUN
	Digunakan untuk mencatat Dana Kelolaan BLU yang Ditarik ke Rekening BUN.
<b>166</b>	<b>ASET LAIN-LAIN</b>
<b>1661</b>	<b>Aset Lain-lain</b>
	Digunakan untuk mencatat Aset Lain-lain milik pemerintah sesuai dengan SAP yang tidak termasuk jenis-jenis Aset Lainnya sebagaimana tersebut di atas.
<b>16611</b>	<b>Aset Lain-lain K/L</b>
	Digunakan untuk mencatat Aset Lain-lain
166111	Aset Lain-lain
	Digunakan untuk mencatat Aset Lain-lain
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
	Digunakan untuk mencatat Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan
	Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan.
<b>16612</b>	<b>Aset Lain-lain BUN</b>
	Digunakan untuk mencatat Aset Lain-lain BUN sesuai dengan SAP yang tidak termasuk jenis-jenis Aset Lainnya sebagaimana tersebut di atas.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
166121	Aset Eks BPPN Digunakan untuk mencatat TP BPPN
166122	Aset yang diserahkan kepada Pada PT Perusahaan Pengelola Aset Digunakan untuk mencatat Aset Pada PT Perusahaan Pengelola Aset
166123	Aset dari BUMN yang belum ditetapkan statusnya Digunakan untuk mencatat Aset dari BUMN yang belum ditetapkan statusnya
166124	Aset yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Digunakan untuk mencatat Aset Pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
166125	Aset Eks Kelolaan PT. PPA Digunakan untuk mencatat Aset Eks PPA
166126	Aset Eks Pertamina Digunakan untuk mencatat Aset Eks Pertamina
166127	Aset yang berasal dari Kontraktor PKP2B Digunakan untuk mencatat Aset PKP2B dan Idle Asset
166128	Aset Idle yang sudah diserahkan ke DJKN Digunakan untuk mencatat Aset Idle yang sudah diserahkan ke DJKN
166129	Aset Lain-lain BUN Digunakan untuk mencatat Aset Lain-lain BUN.
<b>1662</b>	<b>Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum</b>
<b>16621</b>	<b>Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum</b>
	Digunakan untuk mencatat Aset Lain-lain milik BLU sesuai dengan SAP yang tidak termasuk jenis-jenis Aset Lainnya sebagaimana tersebut di atas.
166211	Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum Digunakan untuk mencatat Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum
166212	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan Digunakan untuk mencatat Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi BLU
166213	Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya Digunakan untuk mencatat Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya
166214	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan - BLU Digunakan untuk mencatat Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan – Satker BLU.
<b>1663</b>	<b>Aset Lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP dan Kas Besi</b>
<b>16631</b>	<b>Aset Lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP</b>
	Digunakan untuk mencatat Aset Lain-lain sesuai dengan SAP yang tidak termasuk jenis-jenis Aset Lainnya sebagaimana tersebut di atas yang berasal dari Reklasifikasi UP/TUP.
166311	Aset Lainnya Reklasifikasi dari Kas di Bendahara Pengeluaran-PFK Minus Digunakan untuk mencatat Aset Lainnya Reklasifikasi UP/TUP dari Kas di Bendahara Pengeluaran-PFK Minus
166312	Aset Lainnya Reklasifikasi dari Kas di Bendahara Pengeluaran-BPPR Minus Digunakan untuk mencatat Aset Lainnya Reklasifikasi UP/TUP dari Kas di Bendahara Pengeluaran-BPPR Minus

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
166313	Aset Lainnya Reklasifikasi dari Kas di Bendahara Pengeluaran-BPJ Minus Digunakan untuk mencatat Aset Lainnya Reklasifikasi UP/TUP dari Kas di Bendahara Pengeluaran-BPJ Minus
<b>16632</b>	<b>Aset Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi</b>
166321	Aset Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi – BPPR Minus Digunakan untuk mencatat Aset Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi – BPPR Minus
166322	Aset Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi – BPJ Minus Digunakan untuk mencatat Aset Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi – BPJ Minus
<b>1664</b>	<b>Aset Lainnya yang Belum Deregister</b>
<b>16641</b>	<b>Aset Lainnya yang Belum Deregister</b>
166411	Aset Lainnya yang Belum Deregister Digunakan untuk pencatatan pada satker ketika dilakukan BAST terhadap Aset lainnya yang diterima.
<b>167</b>	<b>ASET LAINNYA DARI UNIT PEMERINTAH LAINNYA</b>
<b>1671</b>	<b>Aset Lainnya dari Ekuitas pada Unit Badan Lainnya</b>
<b>16711</b>	<b>Aset Lainnya dari ekuitas pada Unit Badan Lainnya</b> Digunakan untuk mencatat Aset Lain-lain yang berasal dari unit Badan Lainnya sesuai dengan SAP yang tidak termasuk jenis-jenis Aset Lainnya sebagaimana tersebut di atas.
167111	Aset Lainnya dari ekuitas pada Unit Badan Lainnya Digunakan untuk mencatat Aset Lainnya dari ekuitas pada Unit Badan Lainnya
<b>168</b>	<b>ASET LAINNYA PEMBERIAN PINJAMAN</b>
<b>1681</b>	<b>Aset Lainnya Pemberian Pinjaman</b>
<b>16811</b>	<b>Aset Lainnya Pemberian Pinjaman</b> Aset Lainnya Pemberian Pinjaman Digunakan untuk mencatat Aset Lain-lain yang berasal dari Pemberian Pinjaman sesuai dengan SAP yang tidak termasuk jenis-jenis Aset Lainnya sebagaimana tersebut di atas.
168112	Aset Lainnya Piutang Jangka Panjang Digunakan untuk mencatat Aset Lain-lain yang berasal dari Piutang Jangka Panjang sesuai dengan SAP yang tidak termasuk jenis-jenis Aset Lainnya sebagaimana tersebut di atas.
168113	Aset Lainnya RDI Digunakan untuk mencatat Aset Lain-lain yang berasal dari RDI sesuai dengan SAP yang tidak termasuk jenis-jenis Aset Lainnya sebagaimana tersebut di atas.
168114	Aset Lainnya Kredit Program Digunakan untuk mencatat Aset Lain-lain yang berasal dari penyaluran Kredit Program sesuai dengan SAP yang tidak termasuk jenis-jenis Aset Lainnya sebagaimana tersebut di atas.
<b>169</b>	<b>AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA</b>
<b>1691</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya</b> Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan aset lainnya mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>16911</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak ketiga</b>
169111	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak ketiga
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
<b>16912</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain K/L</b>
169121	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset Lain-lain mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
<b>16913</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN</b>
169131	Akumulasi Penyusutan Aset Eks BPPN
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset Eks BPPN mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
169132	Akumulasi Penyusutan Aset yang diserahkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset yang diserahkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
169133	Akumulasi Penyusutan Aset dari BUMN yang belum ditetapkan statusnya
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset dari BUMN mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
169134	Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset yang berasal dari KKKS mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
169135	Akumulasi Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
169136	Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan aset eks Pertamina mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
169137	Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari Kontraktor PKP2B
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan aset yang berasal dari Kontraktor PKP2B mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
169138	Akumulasi Penyusutan Aset Idle yang sudah diserahkan ke DJKN  Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset Idle yang diserahkan ke DJKN mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
169139	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN  Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan Aset Lain-lain BUN mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
<b>1692</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya BLU</b>
<b>16921</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum</b>
169211	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum  Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan aset lain-lain mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker BLU.
169212	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan Badan Layanan Umum  Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi penyusutan aset tetap tidak digunakan dalam operasi pemerintah mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker BLU.
<b>1693</b>	<b>Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya</b>
<b>16931</b>	<b>Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya</b>
169311	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud  Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi tak berwujud mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta  Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi hak cipta yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh oleh satker.
169313	Akumulasi Amortisasi Royalti  Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi royalti yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh oleh satker.
169314	Akumulasi Amortisasi Paten  Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi paten yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh oleh satker.
169315	Akumulasi Amortisasi Software  Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi software mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi  Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi lisensi mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
169317	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi aset tak berwujud lainnya mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan
	Digunakan untuk mencatat Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah.
<b>1694</b>	<b>Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya BLU</b>
<b>16941</b>	<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud-Badan Layanan Umum</b>
169411	Akumulasi Amortisasi Software-Badan Layanan Umum
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi software mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker BLU.
169412	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta BLU
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi hak cipta yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh oleh satker BLU.
169413	Akumulasi Amortisasi Royalti BLU
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi royalti yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh oleh satker BLU.
169414	Akumulasi Amortisasi Paten BLU
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi paten yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh oleh satker BLU.
169415	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum
	Digunakan untuk mencatat jumlah total akumulasi amortisasi aset tak berwujud lainnya mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui oleh pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker BLU.
169416	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan - BLU
	Digunakan untuk mencatat Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan – Satker BLU.
<b>19</b>	<b>AKUN SETUP</b>
<b>191</b>	<b>AKUN SETUP</b>
<b>1911</b>	<b>Akun Set up A</b>
<b>19111</b>	<b>Akun Set up A</b>
191111	Material
	Digunakan untuk mencatat Akun Set UP Material pada aplikasi SPAN yang digunakan oleh modul Aset
191112	<i>Deffered COGS</i>
	Digunakan untuk mencatat Akun Set UP Deffered COGS pada aplikasi SPAN yang digunakan oleh modul <i>Inventory</i>
<b>1912</b>	<b>Cross Currency Type Account</b>
<b>19121</b>	<b>Cross Currency Type Account</b>
191211	Cross Currency Type Account
	Digunakan untuk mencatat akun set up Cross Currency Type Account pada aplikasi SPAN yang digunakan oleh modul <i>Cash Management</i> .

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>
	Digunakan untuk mencatat kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
<b>21</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>
	Digunakan untuk mencatat kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca.
<b>211</b>	<b>UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA</b>
<b>2111</b>	<b>Utang Perhitungan Fihak Ketiga</b>
<b>21111</b>	<b>Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PKF) I</b>
	Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pungutan Iuran Askes, Bulog, Taspen/Asabri dan Taperum serta badan lainnya. Termasuk akun ini antara lain terdiri dari potongan iuran Taspen, Bulog, Bapertarum, dan Askes.
211111	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PKF) 2% Gaji
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PKF) 2% Gaji
211112	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PKF) 2% Pensiunan PNS
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PKF) 2% Pensiunan PNS
211113	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PKF) Beras Bulog
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PKF) Beras Bulog
211114	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PKF) 8% Gaji
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PKF) 8% Gaji
211115	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PKF) Tabungan Wajib Perumahan
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PKF) Tabungan Wajib Perumahan
211116	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PKF) 2% Pensiunan TNI/PNS Kemhan dan Polri/PNS Polri
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PKF) 2% Pensiunan TNI/PNS Kemhan dan Polri/PNS Polri
211117	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PKF) 3% Iuran Jaminan Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PKF) 3% Iuran Jaminan Kesehatan
211118	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PKF) 2 % Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PKF) 2 % Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT
211119	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PKF) Lain-lain
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PKF) Lain-lain
<b>21112</b>	<b>Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PKF) Lainnya</b>
211121	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PKF) Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PKF DTP Migas)

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Bagian pihak ketiga Pemborong Migas atas Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP M) sebelum dibayarkan kepada yang berhak. Utang ini menjadi transaksi satker BUN
211122	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Penutupan Rekening
	Digunakan untuk mencatat Bagian penerimaan PFK Penutupan rekening sebelum dibayarkan kepada yang berhak. Utang ini menjadi transaksi satker BUN.
211123	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga Wesel Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga Wesel Pemerintah
<b>21115</b>	<b>Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) II</b>
211151	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada PT Taspen
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada PT Taspen.
211152	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada PT Asabri
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada PT Asabri.
211153	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada PT Askes
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada PT Askes.
211154	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada Pusku POLRI
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada Pusku POLRI.
211155	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada Pusku Kemhan
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) kepada Pusku Kemhan.
211156	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Penyaluran Beras BULOG
	Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Penyaluran Beras BULOG.
<b>21116</b>	<b>Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Setoran Pajak Rokok dan Pengalihan Piutang</b>
211161	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Setoran Pajak Rokok
	Digunakan untuk mencatat utang atas selisih penerimaan non anggaran pihak ketiga setoran pajak rokok dan pengembalian penerimaan non anggaran pihak ketiga setoran pajak rokok.
211162	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengalihan Piutang
	Digunakan untuk mencatat utang atas selisih penerimaan non anggaran pihak ketiga pengalihan piutang dan pengembalian penerimaan non anggaran pihak ketiga pengalihan piutang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemotongan DAU dan/atau DBH bagi daerah induk yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada Daerah Otonom Baru.
211163	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi
	Digunakan untuk mencatat utang atas selisih penerimaan non anggaran pihak ketiga hasil penjualan/penyelesaian aset bekas milik eks Bank Dalam Likuidasi dan pengembalian penerimaan non anggaran pihak ketiga hasil penjualan/penyelesaian aset bekas milik eks Bank dalam Likuidasi.
211164	Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pemotongan DAU atau DBH

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	untuk Alokasi Dana Desa (ADD)
	Digunakan untuk mencatat utang atas selisih penerimaan non anggaran pihak ketiga pemotongan DAU atau DBH dan pengembalian penerimaan non anggaran pihak ketiga pemotongan DAU atau DBH sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD).
<b>212</b>	<b>UTANG KEPADA PIHAK KETIGA</b>
<b>2121</b>	<b>Utang kepada Pihak Ketiga I</b>
<b>21211</b>	<b>Belanja Pemerintah Pusat Yang Masih Harus Dibayar</b>
212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar
	Digunakan untuk mencatat utang karena belum dibayarkannya belanja pegawai oleh pemerintah yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar
	Digunakan untuk mencatat utang karena belanja barang yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah berasal dari kontrak/perolehan barang atau jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
212113	Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar
	Digunakan untuk mencatat utang karena belanja modal yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah berasal dari kontrak/perolehan barang atau jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
212114	Belanja Hibah Yang Masih Harus Dibayar
	Digunakan untuk mencatat utang karena belanja hibah yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
212115	Belanja Bantuan Sosial Yang Masih Harus Dibayar
	Digunakan untuk mencatat Belanja bantuan sosial yang masih harus dibayar
212116	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar
	Digunakan untuk mencatat Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar
212119	Belanja Lain-Lain Yang Masih Harus Dibayar
	Digunakan untuk mencatat Belanja Lain-lain yang masih harus dibayar
<b>21212</b>	<b>Utang kepada Pihak Ketiga BLU</b>
212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU
	Digunakan untuk mencatat utang karena belum dibayarkan suatu belanja BLU atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan oleh BLU yang dapat berasal dari antara lain kontrak/perolehan barang atau jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
212122	Utang Usaha BLU
	Digunakan untuk mencatat Utang Usaha BLU
<b>21213</b>	<b>Pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar</b>
212131	Pengeluaran pembiayaan dalam negeri yang masih harus dibayar
	Digunakan untuk mencatat Utang secara akrual atas pengajuan Resume Tagihan transaksi Pembayaran Kembali Utang Dalam Negeri.
212132	Pengeluaran pembiayaan luar negeri yang masih harus dibayar
	Digunakan untuk mencatat Utang secara akrual atas pengajuan Resume Tagihan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	transaksi Pembayaran Kembali Utang luar Negeri.
212133	Penyertaan modal negara yang masih harus dibayar
	Digunakan untuk mencatat Utang secara akrual atas pengajuan Resume Tagihan transaksi Penyertaan Modal Negara.
212134	RDI/RPD yang masih harus dibayar
	Digunakan untuk mencatat Utang secara akrual atas pengajuan Resume Tagihan transaksi RDI/RPD.
212135	Dukungan infrastruktur yang masih harus dibayar
	Digunakan untuk mencatat Utang secara akrual atas pengajuan Resume Tagihan transaksi dukungan infrastruktur
212136	Investasi pemerintah yang masih harus dibayar
	Digunakan untuk mencatat Utang secara akrual atas pengajuan Resume Tagihan transaksi Investasi Pemerintah.
212137	Pengeluaran Pembiayaan Lain-Lain yang Masih Harus Dibayar
	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Pembiayaan Lain-Lain yang Masih Harus Dibayar
<b>21214</b>	<b>Pengeluaran Non Anggaran yang masih harus dibayar</b>
212141	Pengeluaran non anggaran PFK yang masih harus dibayar
	Utang secara akrual atas pengajuan Resume Tagihan transaksi Pengeluaran Non Anggaran PFK.
212142	Pelunasan wesel pemerintah yang masih harus dibayar
	Utang secara akrual atas pengajuan Resume Tagihan transaksi Pelunasan Wesel Pemerintah.
212143	Pembayaran prefinancing dan PFK BUN lainnya yang masih harus dibayar
	Digunakan untuk mencatat Utang secara akrual atas pengajuan Resume Tagihan transaksi Pembayaran Utang Pihak Ketiga Prefinancing dan Utang Pihak Ketiga BUN.
212144	Pengeluaran transito yang masih harus dibayar
	Digunakan untuk mencatat Utang secara akrual atas pengajuan Resume Tagihan transaksi Pengeluaran Transito.
212145	Pengeluaran non anggaran pihak ketiga yang masih harus dibayar
	Digunakan untuk mencatat Utang secara akrual atas pengajuan Resume Tagihan transaksi Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga.
<b>21215</b>	<b>Utang Pihak Ketiga Migas</b>
212151	Utang Pihak Ketiga – Fee Penjualan Migas Bagian Negara
	Digunakan untuk mencatat Utang Pihak Ketiga – Fee Penjualan Migas Bagian Negara.
212152	Utang Pihak Ketiga Migas-Pajak Air Tanah ke Pemda
	Digunakan untuk mencatat Bagian Pemda atas Pajak Air Tanah akibat pengelolaan Migas yang masih harus dibayar dan telah ketahui jumlahnya berdasarkan informasi dari Dit PNBP DJA dan sebelum dibayarkan ke Pemda yang berhak. Utang ini menjadi transaksi satker BUN.
212153	Utang Pihak Ketiga Migas-Pajak Penerangan Jalan non PLN ke Pemda
	Digunakan untuk mencatat Bagian Pemda atas Pajak Penerangan Jalan akibat pengelolaan Migas yang masih harus dibayar dan telah diketahui jumlahnya berdasarkan informasi dari Dit PNBP DJA dan sebelum dibayarkan ke Pemda yang

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	berhak. Utang ini menjadi transaksi satker BUN.
212154	Utang Pihak Ketiga Migas – PBB Migas dan Utang Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Utang Pihak Ketiga Migas – PBB Migas dan Utang Lainnya.
212155	Utang Pihak Ketiga Migas-Reimbursement DMO Bagian KKKS
	Digunakan untuk mencatat bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atas Migas-Reimbursement DMO (Debt Manajemen Office) yang masih harus dibayar dan telah diketahui jumlahnya berdasarkan informasi dari Dit PNBP DJA. Utang ini menjadi transaksi satker BUN
212156	Utang Pihak Ketiga Migas-Reimbursement PPN KKKS
	Digunakan untuk mencatat bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atas Migas-Reimbursement PPN yang masih harus dibayar dan telah diketahui jumlahnya berdasarkan informasi dari Dit PNBP DJA. Utang ini menjadi transaksi satker BUN
212157	Utang Pihak Ketiga Migas-Reimbursement Underlifting KKKS
	Digunakan untuk mencatat Bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atas Migas-Reimbursement Underlifting yang masih harus dibayar dan telah diketahui jumlahnya berdasarkan informasi dari Dit PNBP DJA. Utang ini menjadi transaksi satker BUN.
212158	Utang Pihak Ketiga Migas Transito
	Digunakan untuk mencatat utang pihak ketiga migas transito, korolari dari reklasifikasi penerimaan transito penerimaan ditangguhkan ke pendapatan migas transito.
212159	Utang Pihak Ketiga Migas – Fee Penjualan Migas Bagian Negara.
	Digunakan untuk mencatat Utang Pihak Ketiga Migas – Fee Penjualan Migas Bagian Negara
<b>21216</b>	<b>Utang Pihak Ketiga Non Migas</b>
212161	Utang Pihak Ketiga atas Penjualan SPN
	Digunakan untuk mencatat bagian Pihak ketiga yang masih harus dibayar akibat penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang diketahui jumlahnya berdasarkan informasi DJPU. Utang ini menjadi transaksi satker BUN
212162	Utang Pihak Ketiga-Penjualan Obligasi Negara DN
	Digunakan untuk mencatat Bagian Pihak ketiga yang masih harus dibayar akibat Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri yang diketahui jumlahnya berdasarkan informasi DJPU. Utang ini menjadi transaksi satker BUN.
212163	Utang Pihak Ketiga-Bunga Obligasi Negara DN
	Digunakan untuk mencatat bagian Pihak ketiga yang masih harus dibayar akibat Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri yang diketahui jumlahnya berdasarkan informasi DJPU. Utang ini menjadi transaksi satker BUN.
212164	Utang Pihak Ketiga-Penjualan/Penerbitan Obligasi Negara Valas
	Digunakan untuk mencatat Bagian Pihak ketiga yang masih harus dibayar akibat penerimaan Penjualan/Penerbitan Obligasi Negara Valas yang diketahui jumlahnya berdasarkan informasi DJPU. Utang ini menjadi transaksi satker BUN
212165	Utang Pihak Ketiga-Bunga Obligasi Negara Valas
	Digunakan untuk mencatat Bagian Pihak ketiga yang masih harus dibayar akibat penerimaan Bunga Obligasi Negara Valas yang diketahui jumlahnya berdasarkan informasi DJPU. Utang ini menjadi transaksi satker BUN.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
212166	Utang Pihak Ketiga-Penerbitan Surat Utang Negara  Digunakan untuk mencatat Bagian Pihak ketiga yang masih harus dibayar akibat penerimaan Surat Utang Negara yang diketahui jumlahnya berdasarkan informasi DJPU. Utang ini menjadi transaksi satker BUN.
212167	Utang Pihak Ketiga kepada Perusahaan Pertambangan Umum Non Migas  Digunakan untuk mencatat Bagian PT Inalum yang masih harus dibayar atas penerimaan Pertambangan yang diketahui jumlahnya berdasarkan informasi DJA. Utang ini menjadi transaksi satker BUN.
212168	Utang Pihak Ketiga Geothermal-Reimbursement PPN  Digunakan untuk mencatat Bagian Pihak Ketiga yang masih harus dibayar penerimaan PFK Panas Bumi yang diketahui jumlahnya berdasarkan informasi DJA. Utang ini menjadi transaksi satker BUN.
212169	Utang Pihak Ketiga Non Migas Transito  Akun untuk utang pihak ketiga non migas transito korolari dari reklassifikasi penerimaan transito penerimaan ditangguhkan ke pendapatan PBB non migas transito.
<b>21217</b>	<b>Utang Pihak Ketiga Komitmen <i>Treasury Dealing Room</i></b>
212171	Utang Komitmen atas Penempatan pada Bank Indonesia  Digunakan untuk mencatat Utang Komitmen atas Penempatan pada Bank Indonesia pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
212172	Utang Komitmen atas Penempatan pada Bank Umum  Digunakan untuk mencatat Utang Komitmen atas Penempatan pada Bank Umum pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
212173	Utang Komitmen atas Transaksi SBN-TDR  Digunakan untuk mencatat Utang Komitmen atas Transaksi SBN pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
212174	Utang Komitmen atas Reverse Repo-TDR  Digunakan untuk mencatat Utang Komitmen atas Reverse Repo pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
212175	Utang Komitmen atas Repo-TDR  Digunakan untuk mencatat Utang Komitmen atas Repo pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
212176	Utang Komitmen atas Transaksi Foreign Exchange-TDR  Digunakan untuk mencatat Utang Komitmen atas Transaksi Foreign Exchange pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
212177	Utang Komitmen atas Kupon SBN-TDR  Digunakan untuk mencatat Utang Komitmen atas Bunga SBN-TDR.
<b>21218</b>	<b>Utang Pihak Ketiga Transaksi <i>Treasury Dealing Room</i></b>
212181	Utang Repo-TDR  Digunakan untuk mencatat Utang Transaksi Repo pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
<b>21219</b>	<b>Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya I</b>
212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya  Digunakan untuk mencatat utang karena belum dibayarkan suatu belanja diluar kategori belanja pemerintah pusat dan BLU atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
212192	Dana Pihak Ketiga

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat saldo kas di rekening Bendahara Penerimaan yang akan disetorkan kepada pihak ketiga.
212193	Dana Pihak Ketiga BLU
	Digunakan untuk mencatat Dana Pihak Ketiga BLU
212194	Utang Pihak Ketiga - PBB Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat Utang Pihak Ketiga - PBB Panas Bumi
212195	Utang Pihak Ketiga - Penggantian Bonus Produksi Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat Utang Pihak Ketiga - Penggantian Bonus Produksi Panas Bumi
212196	Utang Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi – <i>Reimbursement PPN</i>
	Digunakan untuk mencatat Utang Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi – <i>Reimbursement PPN</i>
212197	Utang Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi – PBB Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat Utang Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi – PBB Panas Bumi
212198	Utang Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi – Penggantian Bonus Produksi
	Digunakan untuk mencatat Utang Pihak Ketiga Panas Bumi diestimasi – Penggantian Bonus Produksi
212199	Bagian Pemerintah dari Penerimaan Panas Bumi yang belum dipindahbukukan
	Digunakan untuk mencatat Bagian Pemerintah dari Penerimaan Panas Bumi yang belum dipindahbukukan
<b>2122</b>	<b>Utang kepada Pihak Ketiga II</b>
<b>21221</b>	<b>Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya II</b>
212211	Utang Pihak Ketiga - <i>Reimbursement PPN</i> Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat Utang Pihak Ketiga - <i>Reimbursement PPN</i> Panas Bumi
212212	Utang Transito Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat Utang Transito Panas Bumi
<b>213</b>	<b>UTANG BUNGA</b>
<b>2131</b>	<b>Utang Biaya Pinjaman</b>
<b>21311</b>	<b>Utang Bunga</b>
213111	Utang Bunga Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat Utang Bunga yang timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek dan utang jangka panjang yang berasal dari luar negeri.
213112	Utang Bunga Dalam Negeri
	Digunakan untuk mencatat Utang Bunga yang timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek dan utang jangka panjang yang berasal dari dalam negeri.
213113	Utang Bunga-Pinjaman Dalam Negeri
	Digunakan untuk mencatat Utang Bunga-Pinjaman Dalam Negeri
<b>21312</b>	<b>Discount</b>
	Digunakan untuk mencatat discount yang timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek dan utang jangka panjang yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
213121	Discount Surat Perbendaharaan Negara dalam Rupiah

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Discount Surat Perbendaharaan Negara dalam Rupiah
213122	Discount Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Discount Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah
213123	Discount Surat Perbendaharaan Negara dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Discount Surat Perbendaharaan Negara dalam Valuta Asing
213124	Discount Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta asing
	Digunakan untuk mencatat Discount Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta asing
213125	Discount Surat Perbendaharaan Negara Syariah dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Discount Surat Perbendaharaan Negara Syariah dalam Rupiah
213126	Discount Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Discount Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah
213127	Discount Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Discount Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing
213128	Discount Surat Perbendaharaan Negara Syariah dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Discount Surat Perbendaharaan Negara Syariah dalam Valuta Asing
<b>21313</b>	<b>Premium</b>
	Digunakan untuk mencatat Premium yang timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek dan utang jangka panjang yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
213131	Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Rupiah.
	Digunakan untuk mencatat Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Rupiah.
213132	Premium Bagian Lancar Obligasi Negara valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Premium Bagian Lancar Obligasi Negara valuta Asing
213133	Premium Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Premium Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah
213134	Premium Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Premium Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing
<b>21314</b>	<b>Utang Diskonto yang belum disesuaikan</b>
213141	Utang Diskonto yang belum disesuaikan
	Digunakan untuk mencatat Utang Diskonto yang belum disesuaikan.
<b>21315</b>	<b>Utang Bunga Transaksi Treasury Dealing Room</b>
213151	Utang Bunga Repo-TDR
	Digunakan untuk mencatat bunga atas transaksi Repo pada Treasury Dealing Room.
<b>214</b>	<b>UTANG SUBSIDI</b>
<b>2141</b>	<b>Utang Subsidi</b>
<b>21411</b>	<b>Utang Subsidi</b>
214111	Utang Subsidi

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat utang subsidi sesuai dengan ketentuan pemerintah yang mengatur mengenai subsidi
214112	Utang Subsidi - Estimasi
	Digunakan untuk mencatat Utang Subsidi - Estimasi
<b>2142</b>	<b>Belanja subsidi yang masih harus dibayar</b>
<b>21421</b>	<b>Belanja subsidi yang masih harus dibayar</b>
	Digunakan untuk mencatat belanja subsidi sesuai dengan ketentuan pemerintah yang mengatur mengenai subsidi yang masih harus dibayar
214211	Belanja subsidi yang masih harus dibayar
	Digunakan untuk mencatat belanja subsidi sesuai dengan ketentuan pemerintah yang mengatur mengenai subsidi yang masih harus dibayar
<b>215</b>	<b>UTANG TRANSFER</b>
<b>2151</b>	<b>Utang Transfer</b>
<b>21511</b>	<b>Transfer ke daerah yang masih harus dibayar</b>
215111	Transfer dana perimbangan yang masih harus dibayar
	Digunakan untuk mencatat Transfer dana perimbangan yang masih harus dibayar
215112	Transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian yang masih harus dibayar
	Digunakan untuk mencatat Transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian yang masih harus dibayar
<b>21512</b>	<b>Transfer ke daerah yang masih harus dibayar - Estimasi</b>
215121	Transfer dana perimbangan yang masih harus dibayar - Estimasi
	Digunakan untuk mencatat Transfer dana perimbangan yang masih harus dibayar - Estimasi
215122	Transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian yang masih harus dibayar - Estimasi
	Digunakan untuk mencatat Transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian yang masih harus dibayar - Estimasi
<b>216</b>	<b>BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG</b>
<b>2161</b>	<b>Bagian Lancar Utang Jangka Panjang</b>
<b>21611</b>	<b>Bagian Lancar Utang Jangka Panjang -Pinjaman</b>
	Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca.
216111	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri
216112	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri
	Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri
<b>21612</b>	<b>Bagian Lancar Obligasi Negara-Rupiah</b>
216121	Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Obligasi Negara - Rupiah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca.
<b>21613</b>	<b>Bagian Lancar Obligasi Negara-Valuta Asing</b>
216131	Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Obligasi Negara - Valuta Asing yang

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca.
<b>21614</b>	<b>Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara-dalam Rupiah</b>
216141	Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara-dalam Rupiah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca.
<b>21615</b>	<b>Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara-Valuta Asing</b>
216151	Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara-Valuta Asing yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca.
<b>217</b>	<b>UTANG SURAT BERHARGA NEGARA</b>
<b>2171</b>	<b>Utang Surat Berharga Negara - Jangka Pendek</b>
<b>21711</b>	<b>Utang Surat Perbendaharaan Negara Rupiah</b>
	Digunakan untuk mencatat Utang atas SPN - Rupiah yang diterbitkan pemerintah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca .
217111	Surat Perbendaharaan Negara dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Surat Perbendaharaan Negara dalam Rupiah
217112	Utang Obligasi Negara dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Utang Obligasi Negara dalam Rupiah
<b>21712</b>	<b>Utang Surat Perbendaharaan Negara dalam Valuta Asing</b>
217121	Surat Perbendaharaan Negara dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Surat Perbendaharaan Negara dalam Valuta Asing
217122	Utang Obligasi Negara dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Utang Obligasi Negara dalam Valuta Asing.
<b>21713</b>	<b>Utang Surat Berharga Syariah Negara-Rupiah Jangka Pendek</b>
	Digunakan untuk mencatat Utang atas Surat Berharga Syariah Negara - Rupiah yang diterbitkan pemerintah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca .
217131	Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah
217132	Surat Perbendaharaan Negara Syariah
	Digunakan untuk mencatat Surat Perbendaharaan Negara Syariah
<b>21714</b>	<b>Utang Surat Berharga Syariah Negara-Valuta Asing Jangka Pendek</b>
217141	Surat Berharga Syariah Negara dalam valuta asing
	Digunakan untuk mencatat Surat Berharga Syariah Negara dalam valuta asing
<b>218</b>	<b>UTANG YANG BELUM DITAGIHKAN</b>
<b>2181</b>	<b>Utang Yang Belum Ditagihkan</b>
<b>21811</b>	<b>Utang Yang Belum Diterima Tagihannya</b>
218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya
	Utang akrual saat Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pihak ketiga. Pengakuan hutang ini dicatat oleh satker dengan dokumen sumber BAST.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>2182</b>	<b>Hibah Langsung yang Belum Disahkan</b>
<b>21821</b>	<b>Hibah Langsung yang Belum Disahkan</b>
218211	Hibah Langsung yang Belum Disahkan
	Digunakan untuk mencatat Hibah Langsung yang Belum Disahkan
<b>219</b>	<b>UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA</b>
	Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya seperti kelebihan pembayaran pendapatan, pendapatan diterima di Muka, uang muka, pendapatan yang ditangguhkan dan utang jangka pendek lainnya.
<b>2191</b>	<b>Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan</b>
<b>21911</b>	<b>Utang Kelebihan Pembayaran Pajak</b>
219111	Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh
	Digunakan untuk mencatat Utang atas Kelebihan pembayaran PPh
219112	Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM
	Digunakan untuk mencatat Utang atas Kelebihan pembayaran PPN/PPnBM
219113	Utang Kelebihan Bayar Cukai
	Digunakan untuk mencatat Utang atas Kelebihan pembayaran Cukai
219114	Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB
	Digunakan untuk mencatat Utang atas Kelebihan pembayaran PBB
219115	Utang Kelebihan Bayar Pajak BPHTB
	Digunakan untuk mencatat Utang atas Kelebihan pembayaran BPHTB
219116	Utang Kelebihan Bayar Bea Masuk
	Digunakan untuk mencatat Utang atas Kelebihan pembayaran Bea Masuk
219117	Utang Kelebihan Bayar Bea Keluar
	Digunakan untuk mencatat Utang atas Kelebihan pembayaran Bea Keluar
<b>21912</b>	<b>Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak</b>
219121	Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Sumber Daya Alam
	Digunakan untuk mencatat Utang atas Kelebihan pembayaran Pendapatan Sumber Daya Alam
219122	Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Bagian Laba BUMN
	Digunakan untuk mencatat Utang atas Kelebihan pembayaran Pendapatan Bagian Laba BUMN
219123	Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Utang atas Kelebihan pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya
<b>2192</b>	<b>Pendapatan Diterima di Muka</b>
<b>21921</b>	<b>Pendapatan Diterima di Muka</b>
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang telah diterima dan disetor ke rekening kas umum negara namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari satuan kerja/pemerintah, atau pendapatan pajak/bukan pajak yang telah disetor oleh wajib pajak/bayar ke Rekening Kas Umum Negara yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau penelitian oleh pihak yang berwenang terdapat lebih bayar pajak/bukan pajak
219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan atas Sewa yang telah Diterima di Muka

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bukan pajak lainnya yang telah Diterima di Muka
219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU Digunakan untuk mencatat Pendapatan Diterima di Muka BLU
<b>21922</b>	<b>Pendapatan Bea Masuk Diterima Dimuka</b>
219221	Pendapatan Bea Masuk Diterima Di Muka Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bea Masuk Diterima Di Muka pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (BA 15.05).
219222	Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka KITE Diterima Di Muka Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka KITE Diterima Di Muka pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (BA 15.05).
219223	Pendapatan Pabean Lainnya Diterima Di Muka Digunakan untuk mencatat Pendapatan Pabean Lainnya Diterima Di Muka pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (BA 15.05).
219224	Pendapatan Bea Masuk Antidumping Diterima Di Muka Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bea Masuk Antidumping Diterima Di Muka pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (BA 15.05).
219225	Pendapatan Bea Masuk Imbalan Diterima Di Muka Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bea Masuk Imbalan Diterima Di Muka pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (BA 15.05).
219226	Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Diterima Di Muka Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Diterima Di Muka pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (BA 15.05).
<b>21923</b>	<b>Pendapatan Bea Keluar Diterima Dimuka</b>
219231	Pendapatan Bea Keluar Diterima Di Muka Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bea Keluar Diterima Di Muka pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (BA 15.05).
<b>2193</b>	<b>Uang Muka Rekening Khusus</b>
<b>21931</b>	<b>Uang Muka Rekening Khusus</b>
219311	Uang Muka Rekening Khusus Digunakan untuk mencatat Uang muka dari rekening khusus (valas)
<b>2194</b>	<b>Uang Muka</b>
<b>21941</b>	<b>Uang Muka dari KUN</b>
219411	Uang Muka dari KUN Digunakan untuk mencatat uang muka dari kas umum negara yang belum dipertanggungjawabkan pada tanggal neraca
219412	Uang Muka dari Kementerian Negara/Lembaga Digunakan untuk mencatat Uang Muka yang berasal dari Kementerian Negara/Lembaga
<b>2195</b>	<b>Uang Muka dari KPPN</b>
<b>21951</b>	<b>Uang Muka dari KPPN</b>
219511	Uang Muka dari KPPN Digunakan untuk mencatat Uang Muka yang berasal dari KPPN (uang persediaan dan tambahan uang persediaan) yang belum dipertanggungjawabkan pada tanggal

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	neraca
<b>2196</b>	<b>Pendapatan Yang Ditangguhkan</b>
<b>21961</b>	<b>Pendapatan Yang Ditangguhkan</b>
219611	Pendapatan Yang Ditangguhkan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum disetor ke kas negara
219612	Pendapatan Kupon SBN Ditangguhkan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Kupon SBN di Rekening Kelolaan <i>Treasury Dealing Room</i> yang belum disetorkan ke RKUN.
219613	Pendapatan Selisih Harga SBN Ditangguhkan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Selisih Harga SBN di Rekening Kelolaan <i>Treasury Dealing Room</i> yang belum disetorkan ke RKUN.
<b>21962</b>	<b>Pendapatan Migas yang ditangguhkan</b>
219621	Pendapatan Panas Bumi Ditangguhkan
	Utang dari penerimaan sektor Panas Bumi yang masih belum diperhitungkan (bruto).
219622	Pendapatan Migas Ditangguhkan
	Utang dari penerimaan sektor Minyak dan Gas Bumi yang masih belum diperhitungkan (bruto)
219623	Pendapatan Setoran Pertambangan Ditangguhkan
	Utang dari penerimaan dari sektor pertambangan yang masih belum diperhitungkan (bruto)
219624	Pendapatan yang Ditangguhkan karena Retur pada Rekening Pemerintah Lainnya
	Digunakan untuk mencatat utang dari transaksi penerimaan retur atas pembayaran kewajiban kontraktual pemerintah sektor migas dan panas bumi pada Rekening Lainnya.
<b>21963</b>	<b>Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan</b>
219631	Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan Dalam Negeri
	Utang dari penerimaan penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang belum diperhitungkan (bruto). Transaksi ini yang dicatat oleh satker BUN
219632	Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah dalam Reksus yang ditangguhkan luar negeri.
<b>21967</b>	<b>Hibah Langsung yang Belum Disahkan</b>
219671	Hibah Langsung yang Belum Disahkan
	Digunakan untuk mencatat Hibah Langsung yang Belum Disahkan.
<b>2197</b>	<b>Utang Kepada KUN</b>
<b>21971</b>	<b>Utang Kepada KUN</b>
219711	Utang Kepada KUN
	Digunakan untuk mencatat utang-utang kepada Kas Umum Negara
<b>21972</b>	<b>Utang Kepada kas BLU</b>
219721	Utang Kepada kas BLU
	Digunakan untuk mencatat Utang kepada Kas BLU.
<b>2198</b>	<b>Utang Kepada RPL</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>21981</b>	<b>Utang Kepada RPL</b>
219811	Utang Kepada RPL
	Digunakan untuk mencatat utang-utang kepada Rekening Pemerintah Lainnya
<b>21982</b>	<b>Utang Talangan</b>
219821	Utang Talangan Dana Cadangan Subsidi
	Digunakan untuk mencatat Utang Talangan Dana Cadangan Subsidi
219822	Utang Talangan Dana Cadangan DBH
	Digunakan untuk mencatat Utang Talangan Dana Cadangan DBH
219823	Utang Talangan Dana Cadangan PMN
	Digunakan untuk mencatat Utang Talangan Dana Cadangan PMN
<b>2199</b>	<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>
<b>21991</b>	<b>Utang Jangka Pendek lainnya</b>
219911	Utang Jangka Pendek Perbankan
	Digunakan untuk mencatat utang-utang Jangka Pendek perbankan
219912	Dana yang akan diserahkan kepada BLU Bidang Pendidikan
	Digunakan untuk mencatat Dana yang akan diserahkan kepada Badan Layanan Umum di Bidang Pendidikan
219913	Utang Jangka Pendek Lain-lain
	Digunakan untuk mencatat utang-utang Jangka Pendek Lain-lain
219914	Utang Retensi
	Digunakan untuk mencatat utang terkait potongan belanja dalam rangka jaminan pemeliharaan (retensi) atas pengajuan resume tagihan dari kontrak-kontrak yang mengharuskan pemeliharaan. Dalam transaksi ini rekanan tidak mengajukan jaminan pemeliharaan.
<b>21992</b>	<b>Utang Jangka Pendek dalam rangka rekening khusus</b>
219921	Pinjaman dalam rangka rekening khusus yang ditangguhkan Dalam Negeri
	Digunakan untuk mencatat Utang atas transaksi penerimaan dana pada Rekening Khusus dari Lender Dalam Negeri yang NOD-nya belum diterima oleh Dit. PKN.
219922	Pinjaman dalam rangka rekening khusus yang ditangguhkan Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat Utang atas transaksi penerimaan dana pada Rekening Khusus Lender Luar Negeri yang NOD-nya belum diterima oleh Dit. PKN.
219923	Utang Pihak Ketiga dalam rangka tujuan tertentu
	Digunakan untuk mencatat Utang Pihak Ketiga dalam rangka tujuan tertentu.
<b>21993</b>	<b>Utang Escrow</b>
219931	Utang Escrow Dana Reboisasi
	Digunakan untuk mencatat Utang dari dana escrow yang belum disalurkan kepada pihak ketiga dari penerimaan non anggaran (escrow) dan dicatat pada satker BUN dengan pencatatan jurnal korolari atas transaksi pembayaran yang dilakukan melalui Rekening Escrow.
219932	Utang Escrow Dana Subsidi/PSO
	Digunakan untuk mencatat utang escrow Subsidi/PSO.
219933	Utang Escrow dana Bagi Hasil SDA
	Digunakan untuk mencatat utang escrow Bagi Hasil SDA.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
219934	Utang Escrow dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Digunakan untuk mencatat Utang Escrow dana Penyertaan Modal Negara (PMN)
219935	Utang Pengembalian Escrow Pajak Digunakan untuk mencatat Utang Pengembalian Escrow Pajak
219936	Utang Pengembalian Escrow PNBP Digunakan untuk mencatat Utang Pengembalian Escrow PNBP
219937	Utang Dana Penjaminan Digunakan untuk mencatat Utang Dana Penjaminan
<b>21994</b>	<b>Utang Jangka Pendek sementara</b>
219941	Utang Jangka Pendek sementara karena kesalahan rekening pihak ketiga Utang dari penerimaan kas di rekening retur atas kesalahan nomor rekening
219942	Utang Jangka Pendek sementara Pengembalian Uang Persediaan (UP) Digunakan untuk mencatat uang perantara yang terbentuk saat resume tagihan pengembalian UP (nihil), yang nilainya akan habis ketika diterbitkan SP2D pengembalian UP (nihil) dan menihilkan Kas di Bendahara Pengeluaran.
219943	Utang Jangka Pendek sementara Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Digunakan untuk mencatat utang perantara yang terbentuk saat resume tagihan pengembalian TUP (nihil), yang nilainya akan habis ketika diterbitkan SP2D pengembalian UP (nihil) dan menihilkan Kas di Bendahara Pengeluaran.
219944	Utang Jangka Pendek sementara karena kesalahan Sistem Perbankan Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Pendek sementara karena kesalahan Sistem Perbankan.
<b>21995</b>	<b>Utang Permintaan Uang Muka Belanja</b>
219951	Utang Permintaan Persekot Gaji Utang atas pengajuan Resume Tagihan transaksi Pembayaran Persekot Gaji yang disertai dengan pengembalian Persekot Gaji.
<b>21996</b>	<b>Utang Bendahara</b>
219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor Utang yang berasal dari potongan/pungutan pajak oleh bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut, namun belum disetorkan ke Kas Negara.
219962	Utang perwalian Bendahara yang belum disampaikan kepada yang berhak Utang yang berasal dari dana titipan pihak ketiga yang berada dalam catatan bendahara pengeluaran.
219963	Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor Utang yang berasal dari potongan/pungutan pajak oleh bendahara penerimaan sebagai wajib pungut, namun belum disetorkan ke Kas Negara.
219964	Utang Pajak Bendahara BLU yang Belum Disetor Digunakan untuk mencatat Utang Pajak Bendahara BLU yang Belum Disetor
<b>21997</b>	<b>Pembiayaan Surat Perpendaharaan Negara Ditangguhkan</b>
219971	Pembiayaan Surat Perpendaharaan Negara Ditangguhkan Digunakan untuk mencatat pembiayaan SPN ditangguhkan.
219972	Pembiayaan Surat Perpendaharaan Negara Syariah Ditangguhkan Digunakan untuk mencatat pembiayaan SPN Syariah ditangguhkan.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>21998</b>	<b>Pembiayaan yang diterima RKUN Yang Ditangguhkan</b>
219981	Pembiayaan yang diterima RKUN Yang Ditangguhkan
	Digunakan untuk mencatat pembiayaan yang ditangguhkan pada RKUN.
<b>21999</b>	<b>Pembiayaan yang Ditangguhkan</b>
219991	Pembiayaan yang Ditangguhkan dalam negeri
	Digunakan untuk mencatat pembiayaan dalam negeri yang ditangguhkan.
219992	Pembiayaan yang Ditangguhkan luar negeri
	Digunakan untuk mencatat pembiayaan luar negeri yang ditangguhkan.
219993	Pembiayaan Pinjaman Program yang Ditangguhkan
	Digunakan untuk mencatat Pembiayaan Pinjaman Program yang Ditangguhkan
219994	Pembiayaan Pinjaman Proyek yang Ditangguhkan
	Digunakan untuk mencatat Pembiayaan Pinjaman Proyek yang Ditangguhkan
<b>22</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>
<b>221</b>	<b>UTANG JANGKA PANJANG DALAM NEGERI</b>
<b>2211</b>	<b>Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan</b>
<b>22111</b>	<b>Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan</b>
	Digunakan untuk mencatat kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca berasal dari Utang Dalam Negeri Perbankan.
221111	Utang Perbankan Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat Utang Perbankan Jangka Panjang
<b>22112</b>	<b>Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan BLU</b>
	Digunakan untuk mencatat kewajiban satker BLU yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca berasal dari utang Dalam Negeri Perbankan.
221121	Utang Perbankan Jangka Panjang BLU
	Digunakan untuk mencatat Utang Perbankan Jangka Panjang BLU
<b>2212</b>	<b>Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan</b>
<b>22121</b>	<b>Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Obligasi Negara Dalam Rupiah</b>
	Digunakan untuk mencatat kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca berasal dari utang SBN Dalam Negeri berupa Obligasi Negara dalam Rupiah.
221211	Utang Dalam Negeri Obligasi Negara Dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca berasal dari utang SBN Dalam Negeri berupa Obligasi Negara dalam Rupiah.
<b>22122</b>	<b>Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Obligasi Negara Dalam Valuta Asing</b>
221221	Utang Dalam Negeri Obligasi Negara Dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca berasal dari utang SBN Dalam Negeri berupa Obligasi Negara dalam Valuta Asing.
<b>22123</b>	<b>Utang Surat Berharga Syariah Negara Rupiah Jangka Panjang</b>
221231	Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang dalam Rupiah
	Digunakan untuk mencatat kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca berasal dari utang SBN Dalam Negeri berupa Surat Berharga Syariah dalam Rupiah.
<b>22124</b>	<b>Utang Surat Berharga Syariah Negara Valuta Asing Jangka Panjang</b>
221241	Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca berasal dari utang SBN Dalam Negeri berupa Surat Berharga Syariah dalam Valuta Asing.
<b>22125</b>	<b>Discount</b>
	Digunakan untuk mencatat jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban ( <i>present value</i> ) dengan nilai jatuh tempo kewajiban ( <i>maturity value</i> ) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.
221251	Discount Obligasi Negara - dalam rupiah
	Digunakan untuk mencatat Discount Obligasi Negara - dalam rupiah
221252	Discount Obligasi Negara - dalam valuta asing
	Digunakan untuk mencatat Discount Obligasi Negara - dalam valuta asing
221253	Discount SBSN - dalam rupiah
	Digunakan untuk mencatat jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban ( <i>present value</i> ) dengan nilai jatuh tempo kewajiban ( <i>maturity value</i> ) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif pada Surat Berharga Syariah Negara dalam mata uang rupiah
221254	Discount SBSN - dalam valuta asing
	Digunakan untuk mencatat Discount SBSN - dalam valuta asing
<b>22126</b>	<b>Premium</b>
221261	Premium Obligasi Negara - dalam rupiah
	Digunakan untuk mencatat Premium atas Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto dalam mata uang rupiah.
221262	Premium Obligasi Negara - dalam valuta asing
	Digunakan untuk mencatat Premium atas Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto dalam mata uang asing.
221263	Premium SBSN - dalam rupiah
	digunakan untuk mencatat Premium atas surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah (Sukuk Negara), sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang Rupiah.
221264	Premium SBSN - dalam valuta asing
	digunakan untuk mencatat Premium atas surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah (Sukuk Negara), sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam valuta asing.
<b>22127</b>	<b>Utang Jangka Panjang-Pinjaman Dalam Negeri</b>
221271	Utang Jangka Panjang-Pinjaman Dalam Negeri
	Digunaan untuk mencatat Utang Jangka Panjang-Pinjaman Dalam Negeri.
<b>2213</b>	<b>Utang Kepada Dana Pensiun dan THT</b>
<b>22131</b>	<b>Utang Kepada Dana Pensiun dan THT</b>
221311	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Utang Kepada Dana Pensiun dan THT
<b>2214</b>	<b>Pembiayaan Surat Utang Negara Ditangguhkan</b>
<b>22141</b>	<b>Pembiayaan Surat Utang Negara Ditangguhkan</b>
221411	Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan Digunakan untuk mencatat Surat Berharga Negara yang ditangguhkan.
<b>2215</b>	<b>Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN</b>
<b>22151</b>	<b>Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN</b>
221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN
<b>2216</b>	<b>Utang Jangka Panjang Subsidi</b>
<b>22161</b>	<b>Utang Jangka Panjang Subsidi</b>
221611	Utang Jangka Panjang Subsidi Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang Subsidi
<b>2219</b>	<b>Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya</b>
<b>22191</b>	<b>Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya</b>
221911	Utang Jangka Panjang Bapertarum Digunakan untuk mencatat utang jangka panjang Bapertarum
221912	Utang Jangka Panjang Rekening Pembangunan Hutan Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang Rekening Pembangunan Hutan.
221919	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya
<b>22192</b>	<b>Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU</b>
221929	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU
<b>222</b>	<b>UTANG JANGKA PANJANG LUAR NEGERI</b>
<b>2221</b>	<b>Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan</b>
<b>22211</b>	<b>Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan</b>
	Digunakan untuk mencatat setiap penerimaan Negara baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu yang berasal dari Perbankan luar negeri.
222115	Utang Program Digunakan untuk mencatat Utang Program yang diterima dari luar negeri.
222116	Utang Proyek Digunakan untuk mencatat Utang Proyek yang diterima dari luar negeri.
<b>2222</b>	<b>Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan</b>
<b>22221</b>	<b>Utang Sewa-Beli</b>
222211	Utang Sewa-Beli Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang Luar Negeri yang berasal dari perjanjian Sewa Beli.
<b>2223</b>	<b>Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya</b>
<b>22231</b>	<b>Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
222311	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lain-lain
	Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya diluar kategori Utang Perbankan dan Non Perbankan.
<b>225</b>	<b>UTANG TRANSFER JANGKA PANJANG</b>
<b>2251</b>	<b>Utang Transfer Jangka Panjang</b>
<b>22511</b>	<b>Utang Transfer Jangka Panjang</b>
225111	Utang Transfer Dana Perimbangan Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat Utang Transfer Dana Perimbangan Jangka Panjang
225112	Utang Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat Utang Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Jangka Panjang
<b>23</b>	<b>DICADANGKAN UNTUK KOMITMEN BELANJA</b>
<b>231</b>	<b>DICADANGKAN UNTUK KOMITMEN BELANJA</b>
<b>2311</b>	<b>Dicadangkan untuk Komitmen Belanja</b>
<b>23111</b>	<b>Dicadangkan untuk Komitmen Belanja</b>
231111	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja
	Akun penyeimbang dari transaksi komitmen dari seluruh alokasi anggaran untuk mengontrol dana yang tersedia. Pencatatan komitmen dicatat untuk satker atas pelaksanaan anggarannya.
<b>29</b>	<b>AKUN SETUP</b>
<b>291</b>	<b>AKUN SETUP</b>
<b>2912</b>	<b>Akun Set up A</b>
<b>29121</b>	<b>Akun Set up</b>
291211	Inventory AP Accrual
	Digunakan untuk mencatat Inventory AP Accrual pada aplikasi SPAN yang dilakukan di modul <i>Inventory</i>
291212	Expenses AP Accrual
	Digunakan untuk mencatat Expenses AP Accrual pada aplikasi SPAN yang dilakukan di modul <i>Account payable</i> .
291213	Unearned Revenue
	Akun setup up untuk mencatat Unearned Revenue pada aplikasi SPAN yang dilakukan di modul <i>Account Receivable</i>
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>
	Digunakan untuk mencatat pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
<b>31</b>	<b>EKUITAS</b>
<b>311</b>	<b>EKUITAS</b>
<b>3113</b>	<b>SAL dan SILPA BLU</b>
<b>31131</b>	<b>SAL BLU</b>
311311	SAL BLU
	Digunakan untuk mencatat SAL BLU
311312	Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
311313	SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi Digunakan untuk mencatat SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi
311314	Penggunaan SAL BLU Digunakan untuk mencatat Penggunaan SAL BLU
311315	Penyesuaian SAL BLU Digunakan untuk mencatat Penyesuaian SAL BLU
<b>31132</b>	<b>SILPA BLU</b>
311321	SILPA BLU Digunakan untuk mencatat SILPA BLU
<b>3117</b>	<b>Keuntungan/Kerugian yang Belum Terealisasi</b>
<b>31171</b>	<b>Selisih Kurs</b>
311711	Selisih Kurs Digunakan untuk mencatat Selisih Kurs belum terealisasi sebelum direklas menjadi akun pendapatan LO/Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<b>3119</b>	<b>Ekuitas Dana Lancar Lainnya</b>
<b>31191</b>	<b>Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung</b>
311911	Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung Digunakan untuk mencatat Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung
<b>313</b>	<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>
<b>3131</b>	<b>Due to - Due from</b>
<b>31311</b>	<b>Ditagihkan ke Entitas Lain</b>
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain Penyeimbang transaksi dengan perbedaan entitas akuntansi, transaksi tersebut akan diseimbangkan dengan ditagihkan ke entitas lainnya.
<b>31312</b>	<b>Diterima dari Entitas Lain</b>
313121	Diterima dari Entitas Lain Penyeimbang transaksi dengan perbedaan entitas akuntansi, transaksinya akan diseimbangkan dengan diterima dari entitas lainnya
<b>3132</b>	<b>Transfer</b>
<b>31321</b>	<b>Transfer Keluar</b>
313211	Transfer Keluar Digunakan untuk mencatat Transfer Keluar
<b>31322</b>	<b>Transfer Masuk</b>
313221	Transfer Masuk Digunakan untuk mencatat Transfer Masuk
<b>31323</b>	<b>Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU</b>
313231	Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU Digunakan untuk mencatat Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU
<b>39</b>	<b>EKUITAS</b>
<b>391</b>	<b>EKUITAS</b>
<b>3911</b>	<b>Ekuitas</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>39111</b>	<b>Ekuitas</b>
391111	Ekuitas
	Digunakan untuk mencatat Surplus/Defisit Laporan Operasional.
391112	Surplus/Defisit-LO
	Digunakan untuk mencatat Surplus/Defisit-LO.
391113	Koreksi Nilai Persediaan
	Digunakan untuk mencatat koreksi nilai persediaan.
391114	Revaluasi Aset Tetap
	Digunakan untuk mencatat revaluasi aset tetap.
391115	Dana yang Disediakan Untuk Pengalihan Aset
	Digunakan untuk mencatat ekuitas dana yang disediakan untuk pengalihan aset.
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
	Digunakan untuk mencatat Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
391117	Penyesuaian Nilai Persediaan
	Digunakan untuk mencatat Penyesuaian Nilai Persediaan
391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi
	Digunakan untuk mencatat Koreksi pencatatan Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi.
391119	Koreksi Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Koreksi Lainnya
<b>39112</b>	<b>Ekuitas Transaksi Lainnya</b>
391121	Ekuitas Transaksi Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Ekuitas Transaksi Lainnya
391122	Ekuitas Badan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Ekuitas Badan Lainnya
<b>39113</b>	<b>Ekuitas Pengesahan Hibah</b>
391131	Pengesahan Hibah Langsung
	Digunakan untuk mencatat Pengesahan Hibah Langsung
391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung
	Digunakan untuk mencatat Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung
391133	Pengesahan Hibah Langsung TAYL
	Digunakan untuk mencatat Pengesahan Hibah Langsung yang diterima pada Tahun Anggaran Yang Lalu
<b>39114</b>	<b>Ekuitas Surplus BLU</b>
391141	Setoran Surplus BLU
	Digunakan untuk mencatat perubahan Ekuitas BLU atas transaksi setoran surplus Kas BLU ke Kas Negara atau pengembaliannya ke Kas BLU
<b>39115</b>	<b>Koreksi Atas Reklasifikasi Aset</b>
391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya

## **PENJELASAN URAIAN SEGMENT AKUN PENDAPATAN-LO**

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA</b>
<b>41</b>	<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>
<b>411</b>	<b>PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI</b>
<b>4111</b>	<b>Pendapatan Pajak Penghasilan</b>
<b>41111</b>	<b>Pendapatan PPh Migas</b>
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari PPh minyak bumi yang terdiri dari: - PPh Minyak Bumi; - Surat Tagihan Pajak (STP); - SKPKB PPh Minyak Bumi; dan - SKPKBT PPh Minyak Bumi.
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan ke kas negara yang berasal PPh gas bumi yang terdiri dari : - PPh Gas Bumi; - Surat Tagihan Pajak (STP); - SKPKB PPh Gas Bumi; dan - SKPKBT PPh Gas Bumi.
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari PPh Lainnya yang dihasilkan dari kegiatan penambangan Gas Alam, yang terdiri dari : - PPh Lainnya dari Gas Bumi; - Surat Tagihan Pajak (STP) Lainnya dari Gas Bumi; - SKPKB PPh Lainnya dari Gas Bumi; dan - SKPKBT PPh Lainnya dari Gas Bumi.
<b>41112</b>	<b>Pendapatan PPh Non-Migas</b>
411121	Pendapatan PPh Pasal 21
	Pendapatan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran: - Masa/Angsuran Tahunan; - Surat Tagihan Pajak (STP); - PPh Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, - Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon; Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); - SKPKB PPh Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, - Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon; - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); - SKPKBT PPh Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, - Uang Tebusan Pensiun, dan - Uang pesangon.
411122	Pendapatan PPh Pasal 22
	Pendapatan dari transaksi dalam negeri yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa;</li> <li>- PPh Penebusan Migas;</li> <li>- PPh Penyerahan Rokok Produksi Dalam Negeri;</li> <li>- PPh yang dipungut Bendaharawan; PPh yang dipungut Badan Pemungut Lainnya;</li> <li>- Surat Tagihan Pajak (STP);</li> <li>- SKPKB; SKPKB PPh Penebusan Migas;</li> <li>- SKPKB PPh Penyerahan Rokok Produksi Dalam Negeri;</li> <li>- SKPKBT;</li> <li>- SKPKBT PPh Penebusan Migas; dan</li> <li>- SKPKBT PPh Penyerahan Rokok Produksi Dalam Negeri.</li> </ul>
411123	<p>Pendapatan PPh Pasal 22 Impor</p> <p>Pendapatan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa;</li> <li>- Surat Tagihan Pajak (STP);</li> <li>- SKPKB;</li> <li>- SKPKBT.</li> </ul>
411124	<p>Pendapatan PPh Pasal 23</p> <p>Pendapatan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa;</li> <li>- Dividen;</li> <li>- Bunga;</li> <li>- Royalti;</li> <li>- Jasa;</li> <li>- PPh Bunga Simpanan Anggota Koperasi;</li> <li>- Surat Tagihan Pajak (STP);</li> <li>- STP Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa;</li> <li>- SKPKB;</li> <li>- SKPKB Dividen, Bunga Royalti dan Jasa;</li> <li>- SKPKB PPh Bunga Simpanan Anggota Koperasi;</li> <li>- SKPKBT;</li> <li>- SKPKBT Dividen, Bunga, Royalti dan Jasa; dan</li> <li>- SKPKBT PPh Bunga Simpanan Anggota Koperasi.</li> </ul>
411125	<p>Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi</p> <p>Pendapatan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Masa/Angsuran;</li> <li>· Tahunan;</li> <li>· Surat Tagihan Pajak (STP);</li> <li>· SKPKB; dan</li> <li>· SKPKBT.</li> </ul>
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan

AKUN	PENJELASAN
	<p>Pendapatan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Masa/Angsuran</li><li>· Tahunan;</li><li>· Surat Tagihan Pajak (STP);</li><li>· SKPKB; dan</li><li>· SKPKBT.</li></ul>
411127	Pendapatan PPh Pasal 26
	<p>Pendapatan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Masa/Angsuran;</li><li>· Dividen;</li><li>· Bunga;</li><li>· Royalti;</li><li>· Jasa;</li><li>· Laba setelah pajak BUT;</li><li>· Surat Tagihan Pajak (STP);</li><li>· STP Dividen, Bunga, Royalti, Jasa dan Laba setelah pajak BUT;</li><li>· SKPKB;</li><li>· SKPKB Dividen, Bunga Royalti, Jasa dan Laba setelah pajak BUT;</li><li>· SKPKBT; dan</li><li>· SKPKBT Dividen, Bunga, Royalti, Jasa dan Laba setelah pajak BUT.</li></ul>
411128	Pendapatan PPh Final
	<p>Pendapatan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Fiskal Luar Negeri;</li><li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Diskonto/Bunga Obligasi Orang Pribadi;</li><li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan OP;</li><li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Orang Pribadi;</li><li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Bunga Deposito/Tabungan dan SBI Orang Pribadi;</li><li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian Orang Pribadi;</li><li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Transaksi saham dan obligasi di Bursa Efek Orang Pribadi;</li><li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham Pendiri Orang Pribadi;</li><li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura OP;</li><li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi Orang Pribadi;</li><li>· PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran Dalam Negeri Orang Pribadi;</li><li>· PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar</li><li>· PPh Final Pasal 15 Jasa Penerbangan Dalam Negeri Orang Pribadi;</li><li>· PPh Final Pasal 15 Penghasilan Perwakilan Dagang LN Orang Pribadi;</li></ul>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>· PPh Final Pasal 15 Pola Bagi Hasil Orang Pribadi;</li><li>· PPh Final Pasal 15 Kerjasama Bentuk BOT Orang Pribadi;</li><li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Diskonto/Bunga Obligasi Badan;</li><li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Badan;</li><li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Badan;</li><li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Bunga Deposito/Tabungan dan SBI Badan;</li><li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Hadiah Undian Badan;</li><li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Transaksi saham dan obligasi di Bursa Efek Badan;</li><li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham Pendiri Badan;</li><li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura Badan;</li><li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi Badan;</li><li>· PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jasa Konsultasi Badan;</li><li>· PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran Dalam Negeri Badan;</li><li>· PPh Final Pasal 15 Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri Badan;</li><li>· PPh Final Pasal 15 Jasa Penerbangan Dalam Negeri Badan;</li><li>· PPh Final Pasal 15 Penghasilan Perwakilan Dagang LN Badan;</li><li>· PPh Final Pasal 15 Pola Bagi Hasil Badan;</li><li>· PPh Final Pasal 15 Kerjasama Bentuk BOT Badan;</li><li>· PPh Final Pasal 19 Revaluasi Aktiva Tetap Badan;</li><li>· PPh Final Lainnya;</li><li>· Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Final;</li><li>· SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) Orang Pribadi;</li><li>· SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2) Badan;</li><li>· SKPKB PPh Final Pasal 15 Orang Pribadi;</li><li>· SKPKB PPh Final Pasal 15 Badan;</li><li>· SKPKB PPh Final Pasal 19 Badan;</li><li>· SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2) Orang Pribadi;</li><li>· SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2) Badan;</li><li>· SKPKBT PPh Final Pasal 15 Orang Pribadi;</li><li>· SKPKBT PPh Final Pasal 15 Badan;</li><li>· SKPKBT PPh Final Pasal 19 Badan.</li></ul>
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya  Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari PPh, selain yang dihasilkan dari kegiatan penambangan minyak bumi, yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"><li>· PPh Lainnya dari Minyak Bumi;</li><li>· Surat Tagihan Pajak (STP) Lainnya dari Minyak Bumi;</li><li>· SKPKB PPh Lainnya dari Minyak Bumi dan;</li><li>· SKPKBT PPh Lainnya dari Minyak Bumi.</li></ul> Pendapatan yang berasal dari PPh, selain yang dihasilkan dari kegiatan penambangan Gas Alam, yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"><li>· PPh Lainnya dari Gas Alam;</li></ul>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Surat Tagihan Pajak (STP) Lainnya dari Gas Alam;</li> <li>· SKPKB PPh Lainnya dari Gas Alam; dan</li> <li>· SKPKBT PPh Lainnya dari Gas Alam.</li> </ul>
<b>41113</b>	<b>Pendapatan PPh Fiskal</b>
411131	Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri
	Pendapatan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran Fiskal Luar Negeri.
<b>41114</b>	<b>Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah</b>
411141	Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.
411142	Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah.
411143	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah.
411144	Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah.
411145	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah.
411146	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah.
411147	Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah.
411148	Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah.
411149	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah.
<b>4112</b>	<b>Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai</b>
<b>41121</b>	<b>Pendapatan PPN</b>
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri
	<p>Pendapatan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 18 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Masa;</li> <li>· Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar Daerah Pabean;</li> <li>· Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean;</li> <li>· Kegiatan Membangun Sendiri;</li> <li>· Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan;</li> </ul>

AKUN	PENJELASAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>· STP;</li><li>· SKPKB Masa;</li><li>· SKPKB Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean;</li><li>· SKPKB Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean;</li><li>· SKPKB Kegiatan Membangun Sendiri;</li><li>· SKPKB Pemungut PPn;</li><li>· SKPKBT Masa;</li><li>· SKPKBT Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean;</li><li>· SKPKBT Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean;</li><li>· SKPKBT Kegiatan Membangun Sendiri;</li><li>· SKPKBT Pemungut PPn;</li><li>· PPn Final Membangun Sendiri;</li><li>· Pemungut.</li></ul>
411212	Pendapatan PPn Impor
	Pendapatan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 18 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran: <ul style="list-style-type: none"><li>· Masa;</li><li>· STP;</li><li>· SKPKB PPn Impor;</li><li>· SKPKBT PPn Impor;</li><li>· Pemungut.</li></ul>
411219	Pendapatan PPn Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari PPn, yang belum tertampung dalam pembagian jenis pendapatan PPn.
<b>41122</b>	<b>Pendapatan PPnBM</b>
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri
	Pendapatan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 18 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran: <ul style="list-style-type: none"><li>· Masa/Angsuran;</li><li>· STP;</li><li>· SKPKB Masa;</li><li>· SKPKB Pemungut PPn BM;</li><li>· SKPKBT Masa;</li><li>· SKPKBT Pemungut PPnBM;</li><li>· Pemungut.</li></ul>
411222	Pendapatan PPnBM Impor
	Pendapatan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 18 tahun 2000, yang berasal dari pembayaran: <ul style="list-style-type: none"><li>· Masa;</li><li>· STP;</li><li>· SKPKB PPn BM Impor;</li><li>· SKPKBT PPn BM Impor;</li></ul>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	· Pemungut.
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari PPnBM, yang belum tertampung dalam pembagian jenis Pendapatan PPnBM.
<b>4113</b>	<b>Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan</b>
<b>41131</b>	<b>Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan</b>
411311	Pendapatan PBB Pedesaan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari PBB sektor pedesaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411312	Pendapatan PBB Perkotaan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari PBB sektor perkotaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411313	Pendapatan PBB Perkebunan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari PBB sektor perkebunan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411314	Pendapatan PBB Kehutanan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari PBB sektor kehutanan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari PBB sektor pertambangan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi
	Pendapatan yang diperoleh dari penarikan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam. Mulai digunakan untuk tahun 2009.
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi
	Pendapatan yang diperoleh dari penarikan Pajak Bumi dan Bangunan dari Sektor Pertambangan Panas Bumi. Mulai digunakan untuk tahun 2014.
411319	Pendapatan PBB Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan PBB Lainnya.
<b>4114</b>	<b>Pendapatan BPHTB</b>
<b>41141</b>	<b>Pendapatan BPHTB</b>
411411	Pendapatan BPHTB
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari BPHTB yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No.21 Tahun 1997 UU No. 20 tahun 2000.
<b>4115</b>	<b>Pendapatan Cukai</b>
<b>41151</b>	<b>Pendapatan Cukai</b>
411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari cukai hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak menggunakan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya sesuai dengan UU No. 11 Tahun 1995 pasal 4 ayat (1) c.
411512	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari cukai Ethyl Alkohol atau etanol meliputi barang cair, jernih, dan tidak berwarna,merupakan senyawa

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	organik dengan rumus kimia C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH yang diperoleh baik secara peragian dan/ atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
411513	Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari cukai MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman mengandung ethyl alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya dengan tidak menggunakan bahan antara lain : bir, shandy, anggur, gin, whisky (pasal 4 a).
411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai
	Pendapatan Denda Administrasi pada Direktorat Bea dan Cukai yang selama ini masih tergabung dalam MA Pabean Lainnya.
411519	Pendapatan Cukai Lainnya
	Pendapatan cukai lainnya adalah pendapatan dari cukai yang tidak tertampung pada Cukai Hasil Tembakau,Ethyl Alcohol, Minuman Ethyl Alkohol dan Denda Administrasi Cukai (pasal 7 ayat (7) UU No. 11 tahun 1995).
<b>4116</b>	<b>Pendapatan Pajak Lainnya</b>
<b>41161</b>	<b>Pendapatan Pajak Lainnya</b>
411611	Pendapatan Bea Meterai
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari penggunaan Bea Materai yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 1985.
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai
	Pendapatan dana hasil Penjualan Benda Materai oleh PT. Pos Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan (BA.015).
411613	Pendapatan PPn Batubara
	Digunakan untuk mencatat Pajak Penjualan (PPn) yang dilakukan oleh Wajib Pajak terkait dengan Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Penjualan bagi Kontraktor PKP2B Generasi I.
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran pajak tidak langsung lainnya yang tidak termasuk dalam ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 18 Tahun 2000.
<b>41162</b>	<b>Pendapatan Bunga Penagihan Pajak</b>
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PPh yang diatur berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 19 Tahun 2000.
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PPN yang diatur berdasarkan UU No. 19 Thn 1997 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 19 Thn 2000.
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PPnBM yang diatur berdasarkan UU No. 19 Thn 1997 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 19 Thn 2000.
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran bunga dan denda penagihan surat ketetapan pajak PTLL yang diatur berdasarkan UU No. 19 Thn 1997 yang telah dirubah terakhir dalam UU No. 19 Thn 2000.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>41163</b>	<b>Pendapatan Pajak Lainnya Ditanggung Pemerintah</b>
411631	Pendapatan Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah  Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah.
<b>412</b>	<b>PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL</b>
<b>4121</b>	<b>Pendapatan Bea Masuk</b>
<b>41211</b>	<b>Pendapatan Bea Masuk</b>
412111	Pendapatan Bea Masuk  Pendapatan yang berasal dari pungutan bea atas barang-barang impor.
412112	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)  Digunakan untuk mencatat Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah sesuai dengan UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 25/26.
412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean  Pendapatan Denda Administrasi pada Direktorat Bea dan Cukai yang selama ini masih tergabung dalam MA Pabean Lainnya.
412114	Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)  Pendapatan bea masuk atas barang impor yang dibayar oleh perusahaan pengguna fasilitas KITE dengan mendapatkan fasilitas pengembalian Bea masuk.
412115	Denda Atas Sanksi Administrasi Dari Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Tertentu yang Pengangkutannya Di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)  Dalam rangka pelaksanaan undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai diberi kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap barang tertentu yang pengangkutannya di dalam daerah pabean (antar pulau). Denda ini berasal dari penerapan peraturan pasal 4,7,8 dan 9 UU No 17 tahun 2006.
412116	Pendapatan BM-DTP  Untuk mencatat pendapatan bea masuk yang ditanggung pemerintah dan pada saat bersamaan dibayarkan Belanja Subsidi BM-DTP.
412119	Pendapatan Pabean Lainnya  Pendapatan pabean lainnya adalah Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari : · Sanksi administrasi berupa denda (pasal 37 ayat (1) UU No. 10 tahun 1995); · Bunga (pasal 38 ayat (1) UU No. 10 tahun 1995).
<b>41212</b>	<b>Pendapatan Bea Masuk Tindakan</b>
412121	Pendapatan Bea Masuk Antidumping  Digunakan untuk mencatat penerimaan negara atas pungutan yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian. Merupakan pendapatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (015.05)
412122	Pendapatan Bea Masuk Imbalan  Digunakan untuk mencatat penerimaan negara atas pungutan yang dikenakan terhadap barang impor mengandung subsidi yang menyebabkan kerugian. Merupakan pendapatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (015.05).
412123	Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan  Digunakan untuk mencatat penerimaan negara atas pungutan untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan. Merupakan pendapatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (015.05).
<b>4122</b>	<b>Pendapatan Bea Keluar</b>
<b>41221</b>	<b>Pendapatan Bea Keluar</b>
412211	Pendapatan Bea Keluar
	Pendapatan yang diperoleh dari pungutan atas barang-barang yang dieksport (sebelumnya disebut pajak ekspor).
412212	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar
	Pendapatan yang diperoleh dari Denda Administrasi atas Bea keluar yang tidak dibayar/terlambat dibayar.
412213	Pendapatan Bunga Bea Keluar
	Pendapatan yang diperoleh dari beban Bunga atas Bea keluar yang tidak dibayar/terlambat dibayar.
<b>419</b>	<b>PENDAPATAN PAJAK LAIN-LAIN</b>
<b>4199</b>	<b>Pendapatan Pajak Lain-lain</b>
<b>41999</b>	<b>Pendapatan Pajak Lain-lain</b>
<b>419999</b>	Pendapatan Pajak Lain-lain
	Hanya digunakan untuk mencatat Pendapatan Pajak Lain-lain oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Jurnal Penyesuaian tingkat LKPP.
<b>42</b>	<b>PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>
<b>421</b>	<b>PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM</b>
<b>4211</b>	<b>PENDAPATAN MINYAK BUMI</b>
<b>42111</b>	<b>Pendapatan Minyak Bumi</b>
421111	Pendapatan Minyak Bumi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bagian Pemerintah dari penjualan minyak bumi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan-BUN (BA 999.99).
<b>4212</b>	<b>PENDAPATAN GAS BUMI</b>
<b>42121</b>	<b>Pendapatan Gas Bumi</b>
421211	Pendapatan Gas Bumi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bagian Pemerintah dari penjualan gas bumi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan-BUN (999.99).
<b>4213</b>	<b>PENDAPATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA</b>
<b>42132</b>	<b>Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara</b>
421321	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara – Eksplorasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemberian izin melaksanakan eksplorasi pertambangan Mineral dan Batubara. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421322	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Operasi Produksi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemberian izin melaksanakan operasi produksi pertambangan Mineral dan Batubara. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421323	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Izin Pertambangan Rakyat

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemberian izin melaksanakan usaha pertambangan di bidang Mineral dan Batubara dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
<b>42133</b>	<b>Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara</b>
421331	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Batubara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan batubara. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421332	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Tembaga
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan tembaga. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421333	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Emas
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan emas. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421334	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Perak
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan perak. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421335	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Nikel
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan nikel. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421336	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Timah
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan timah. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421339	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pertambangan komoditi tambang selain batubara, tembaga, emas, perak, nikel, timah dan besi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
<b>42134</b>	<b>Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)</b>
421341	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
	Digunakan untuk mencatat penerimaan dari bagian pemerintah atas keuntungan bersih dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
<b>4214</b>	<b>PENDAPATAN KEHUTANAN</b>
<b>42141</b>	<b>Pendapatan Dana Reboisasi</b>
421411	Pendapatan Dana Reboisasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Dana Reboisasi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029)

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>42142</b>	<b>Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan</b>
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029).
<b>42143</b>	<b>Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)</b>
421435	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH) antara lain Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IIUPHHK-HA) dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IIUPHHK-HTR).Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029).
<b>42144</b>	<b>Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan</b>
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan sebagai pengganti lahan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029).
<b>4215</b>	<b>PENDAPATAN PERIKANAN</b>
<b>42152</b>	<b>Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan</b>
421521	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari izin untuk melaksanakan pengusahaan perikanan bidang perikanan tangkap antara lain Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) atau Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI)
421522	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari izin untuk melaksanakan pengusahaan perikanan bidang pembudidayaan ikan antara lain Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan dan Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal (RPIPM).
<b>42153</b>	<b>Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan</b>
421531	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dalam rangka penangkapan ikan antara lain Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
<b>4216</b>	<b>PENDAPATAN PANAS BUMI</b>
<b>42162</b>	<b>Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi</b>
421621	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari setoran bagian pemerintah setelah dikurangi dengan kewajiban perpjakan dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan-BUN (BA 999.99)
<b>42163</b>	<b>Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi</b>
421631	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Eksplorasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemberian izin melaksanakan eksplorasi pengusahaan panas bumi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
421632	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Operasi Produksi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemberian izin melaksanakan operasi produksi pengusahaan panas bumi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
<b>42164</b>	<b>Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi</b>
421641	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari iuran produksi atas hasil usaha dari kegiatan pengusahaan panas bumi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
<b>422</b>	<b>PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND)</b>
<b>4221</b>	<b>PENDAPATAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN</b>
<b>42213</b>	<b>Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN</b>
422131	Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan di Bawah Kementerian BUMN
	Digunakan untuk mencatat penerimaan bagian Pemerintah dari laba BUMN Perbankan. Masuk Bagian Anggaran BUN (BA 999.03)
422132	Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN
	Digunakan untuk mencatat penerimaan bagian Pemerintah dari laba BUMN Non Perbankan. Masuk Bagian Anggaran BUN (BA 999.03)
<b>42214</b>	<b>Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan</b>
422141	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Laba dari Investasi pada BUMN/Lembaga Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan. Masuk Bagian Anggaran BUN (BA 999.03)
422142	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Laba dari Investasi pada BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan. Masuk Bagian Anggaran BUN (BA 999.03)
<b>4222</b>	<b>PENDAPATAN DARI KND LAINNYA</b>
<b>42221</b>	<b>Pendapatan dari Surplus Lembaga</b>
422211	Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah.
422212	Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi bagian Pemerintah.
422213	Pendapatan dari Surplus Lembaga Penjamin Simpanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang menjadi bagian Pemerintah.
422219	Pendapatan dari Surplus Lembaga Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari surplus lembaga lainnya yang menjadi bagian Pemerintah.
<b>424</b>	<b>PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM</b>
<b>4241</b>	<b>Pendapatan Jasa Layanan Umum</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>42411</b>	<b>Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat</b>
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU bagi BLU Penyedia Barang dan Jasa dari hasil pelayanan jasa yang merupakan <i>core business</i> -nya sebagaimana terlampir.
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit
	Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU dari hasil pelayanan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan, baik yang berada di Lingkungan Kementerian Kesehatan (BA 024) maupun kementerian lainnya. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> rumah sakit/instansi kesehatan walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti rumah sakit yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas pendidikan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU yang berasal dari Sekolah maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (BA 023) maupun di kementerian lain. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> layanan pendidikan, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti perguruan tinggi yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas kesehatan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU dari kegiatan Jasa layanan bantuan tenaga terampil, informasi, pekerjaan, pelatihan dan teknologi. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> layanan bantuan tenaga terampil, informasi, pekerjaan, pelatihan dan teknologi, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti BLU jasa layanan IT yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas kesehatan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU dari jasa pencetakan dokumen, buku dan sejenisnya. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> layanan jasa pencetakan, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti BLU layanan jasa pencetakan yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas pendidikan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian
	Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU dari jasa kegiatan bandara, pelabuhan laut dan pengaturan navigasi untuk kepentingan transportasi. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> layanan jasa kegiatan bandara, pelabuhan laut dan pengaturan navigasi untuk kepentingan transportasi, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti BLU layanan jasa pelabuhan yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas kesehatan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi
	Pendapatan BLU atas kegiatan layanan penyelenggaraan kegiatan telekomunikasi melalui media atau sarana yang ada seperti alat telekomunikasi dan sejenisnya. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> layanan jasa telekomunikasi, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti BLU layanan jasa telekomunikasi yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas layanan lainnya, mencatat pendapatan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	tersebut dengan menggunakan akun ini.
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran
	Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU atas jasa layanan kegiatan pemasaran produk-produk tertentu yang ditujukan bagi konsumen atau pengguna produk atau jasa yang ditawarkan. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> layanan kegiatan pemasaran, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti BLU layanan kegiatan pemasaran yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas kesehatan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
424118	Pendapatan Penyediaan Barang
	Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU yang diperoleh dari kegiatan penyediaan barang untuk kepentingan masyarakat atau instansi pengguna lainnya. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> layanan penyediaan barang, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti BLU layanan penyediaan barang yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas pendidikan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya
	Pendapatan BLU yang diperoleh dari kegiatan di luar penyediaan barang dan jasa lainnya selain dari yang telah dijelaskan pada akun 424111, 424112, 424113, 424114, 424115, 424116, 424117, dan 424118. Akun ini digunakan untuk seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh BLU dengan <i>core business</i> layanan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, walaupun terdapat pendapatan dari penyediaan fasilitas/jasa lainnya, seperti BLU layanan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya yang juga mendapatkan pendapatan dari fasilitas pendidikan, mencatat pendapatan tersebut dengan menggunakan akun ini.
<b>42412</b>	<b>Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu</b>
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU bagi BLU Pengelola Wilayah/Kawasan tertentu dari hasil pelayanannya termasuk pendapatan yang berasal dari kerjasama operasional dan sewa menyewa.
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita
	Pendapatan BLU dari hasil pengelolaan Kawasan Otorita yang ditetapkan oleh Pemerintah.
424122	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
	Pendapatan BLU dari hasil pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah
	Pendapatan BLU dari hasil pengelolaan Fasilitas Umum milik Pemerintah.
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya
	Pendapatan BLU dari hasil diluar pengelolaan kawasan otorita, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan fasilitas umum lainnya.
<b>42413</b>	<b>Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat</b>
424131	Pendapatan Program Dana Penjaminan
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan program dana penjaminan.
424132	Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan program dana penjaminan Syariah.
424133	Pendapatan Program Modal Ventura

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan program Modal Ventura.
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan program dana bergulir Sektoral.
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan program dana bergulir Syariah.
424136	Pendapatan Investasi
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan investasi atas bidang-bidang tertentu.
424137	Pendapatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
	Pendapatan yang berasal dari pengelolaan dana pengembangan pendidikan nasional.
424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
	Pendapatan BLU yang berasal dari Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya
	Pendapatan BLU dari hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana khusus lainnya.
<b>42414</b>	<b>Pendapatan dari pengelolaan BMN pada Pengelola Barang</b>
424141	Pendapatan dari pengelolaan BMN pada Pengelola Barang
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari hasil kelolaan BMN pada satuan kerja pengelola aset BUN. Dicatat pada Bagian Anggaran Kementerian Keuangan (015).
<b>4242</b>	<b>Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum</b>
	Digunakan untuk mencatat pendapatan hibah yang diterima oleh Satker BLU.
<b>42421</b>	<b>Pendapatan Hibah Terikat - Uang</b>
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang
	Pendapatan Hibah terikat Dalam Negeri yang berasal dari perorangan.
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
	Pendapatan Hibah terikat Dalam Negeri yang berasal dari Lembaga / Badan Usaha.
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang
	Pendapatan Hibah terikat Dalam Negeri yang berasal dari Pemda.
424214	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang
	Pendapatan Hibah terikat Luar Negeri yang berasal dari perorangan.
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
	Pendapatan Hibah terikat Luar Negeri yang berasal dari Lembaga/Badan Usaha.
424216	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara - Uang
	Pendapatan Hibah terikat Luar Negeri yang berasal dari Negara.
424219	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya - Uang
	Pendapatan Hibah terikat Dalam / Luar Negeri yang bukan berasal dari perorangan, lembaga/ Badan Usaha dan Pemda.
<b>42422</b>	<b>Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Uang</b>
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam Negeri yang berasal dari perorangan dalam bentuk uang.
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam Negeri yang berasal dari lembaga/Badan Usaha dalam bentuk uang.
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam Negeri yang berasal dari pemda dalam bentuk uang.
424224	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan - Uang
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Luar Negeri yang berasal dari perorangan dalam bentuk uang.
424225	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Luar Negeri yang berasal dari Lembaga/Badan Usaha dalam bentuk uang.
424226	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara - Uang
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Luar Negeri yang berasal dari Negara lain dalam bentuk uang.
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya - Uang
	Pendapatan Hibah Tidak terikat Dalam / Luar Negeri yang bukan berasal dari perorangan, lembaga/ Badan Usaha dan Pemda dalam bentuk uang.
<b>42423</b>	<b>Pendapatan Hibah Terikat - Barang / Jasa</b>
424231	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa
	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan dalam bentuk barang/jasa.
424232	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa
	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha bentuk barang/jasa.
424233	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Barang / Jasa
	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda bentuk barang/jasa.
424234	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan - Barang / Jasa
	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan bentuk barang/jasa.
424235	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa
	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha bentuk barang/jasa.
424236	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara - Barang / Jasa
	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara bentuk barang/jasa.
424239	Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya - Barang / Jasa
	Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya bentuk barang/jasa.
<b>42424</b>	<b>Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Barang / Jasa</b>
424241	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa
	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan bentuk barang/jasa.
424242	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha bentuk barang/jasa.
424243	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Barang / Jasa Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda bentuk barang/jasa.
424244	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan - Barang / Jasa Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Perorangan bentuk barang/jasa.
424245	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha bentuk barang/jasa.
424246	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara - Barang / Jasa Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Negara bentuk barang/jasa.
424249	Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya - Barang / Jasa Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya bentuk barang/jasa.
<b>4243</b>	<b>Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU</b> Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dan sewa menyewa bagi semua BLU selain Pengelola Wilayah/Kawasan tertentu.
<b>42431</b>	<b>Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU</b> 424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan Pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dengan pihak lain : perorangan.
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha Pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dengan pihak lain : Lembaga/Badan Usaha.
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah Pendapatan BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama dengan pihak lain : Pemda.
<b>4244</b>	<b>Pendapatan dari Alokasi APBN</b>
<b>42441</b>	<b>Pendapatan dari Alokasi APBN</b> 424411 Pendapatan dari Alokasi APBN Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU yang berasal dari DIPA sumber dana Rupiah Murni (RM), yang akan dieliminasi dalam proses konsolidasi LKKL
<b>42442</b>	<b>Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat</b> 424421 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU
<b>4249</b>	<b>Pendapatan BLU Lainnya</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat pendapatan BLU lainnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai pendapatan jasa layanan umum, pendapatan hasil kerja sama BLU, dan pendapatan hibah BLU, dengan rincian sesuai dengan kode akun 6 digitnya.
<b>42491</b>	<b>Pendapatan BLU Lainnya</b>
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
	Kode akun ini digunakan untuk mencatat pendapatan jasa giro dan layanan perbankan yang diterima oleh Badan Layanan Umum.
424912	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang dibatasi pengelolaannya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga dari penempatan endowment fund dan dana cadangan pendidikan oleh BLU bidang pendidikan atau yang ditunjuk pada Kementerian Keuangan.
424913	Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU
	Digunakan untuk mencatat Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU
424914	Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi - BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi - BLU
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
424917	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perpendaharaan / TGR - BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perpendaharaan / TGR - BLU
424919	Pendapatan Lain-lain BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Lain-lain BLU
<b>42492</b>	<b>Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa</b>
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin
424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya
<b>42493</b>	<b>Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN BLU</b>
424931	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Tanah BLU

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Tanah BLU
424932	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU
424933	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU
424934	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Aset Tetap Lainnya BLU
424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU
<b>42494</b>	<b>Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar BMN BLU</b>
424941	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Tanah BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Tanah BLU
424942	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Gedung dan Bangunan BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Gedung dan Bangunan BLU
424943	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin BLU
424944	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU
424945	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya BLU
424949	Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar BMN Lainnya BLU
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan BLU Lainnya dari Tukar Menukar BMN Lainnya BLU
<b>425</b>	<b>PENDAPATAN PNBP LAINNYA</b>
<b>4251</b>	<b>PENDAPATAN DARI PENJUALAN, PENGELOLAAN BMN, DAN IURAN BADAN USAHA</b>
<b>42511</b>	<b>Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang</b>
425111	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara
	Digunakan untuk mencatat penerimaan dari penjualan produksi batubara bagian pemerintah di luar royalti. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan budidaya yang tidak berasal dari hasil kegiatan penelitian dan/atau pengembangan. Merupakan pendapatan yang bisa terdapat di semua Kementerian/Lembaga
425113	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari penjualan dokumen lelang. Merupakan pendapatan yang bisa terdapat di semua Kementerian/Lembaga
425114	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni
	Digunakan untuk mencatat pendapatan penjualan cadangan beras pemerintah dalam rangka menstabilkan harga beras di pasaran
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan selain kelompok pendapatan atas penjualan-penjualan di atas dan tidak berasal dari hasil kegiatan penelitian/pengembangan, antara lain berasal dari hasil penjualan produk ekonomi kreatif, penjualan obat-obatan dan hasil farmasi. Merupakan pendapatan yang bisa terdapat di semua Kementerian/Lembaga
<b>42512</b>	<b>Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN</b>
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan, tidak termasuk penjualan sewa beli rumah negara, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425123	Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III
	Digunakan untuk mencatat pendapatan kompensasi sewa beli rumah negara golongan III. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BA 033) .
425124	Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari tukar menukar Tanah, Gedung dan Bangunan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425125	Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari tukar menukar Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425126	Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari tukar menukar jalan, irigasi dan jaringan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
<b>42513</b>	<b>Pendapatan dari Pemanfaatan BMN</b>
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan termasuk pendapatan sewa rumah dinas. Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pendapatan sewa Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425133	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat pendapatan sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425135	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang bisa ada di semua Kementerian/Lembaga.
425136	Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi, dan Jaringan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425137	Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
425138	Pendapatan dari Bangun, Serah, dan Guna (BSG)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan BMN Lainnya, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
<b>42514</b>	<b>Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang</b>
425141	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS
	Digunakan untuk mencatat pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN yang berasal dari KKKS, baik masih berada dalam penguasaan KKKS maupun yang telah diserahkan kepada BUN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.
425142	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B
	Digunakan untuk mencatat pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B, baik masih berada dalam penguasaan Kontraktor PKP2B maupun yang telah diserahkan kepada BUN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.
425143	Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari Pemanfaatan aset properti/Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dicatat pada Bagian Anggaran Transaksi Khusus (999.99)
425144	Pendapatan Atas Aset Saham dan Surat Berharga Lain
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari aset saham dan surat berharga lain eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) berupa dividen, bunga dan denda keterlambatan. Dicatat pada Bagian Anggaran Transaksi Khusus (999.99)

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
425145	Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Digunakan untuk mencatat pendapatan atas kompensasi aset bekas milik Asing/Tionghoa.
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari Pengelola Barang Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengelolaan barang pada pengelola barang selain yang berasal dari KKKS, Kontraktor PKP2B, aset eks BLBI dan aset bekas milik asing/Tionghoa.
<b>42515</b>	<b>Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi</b>
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari penatausahaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah yang mengatur Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
<b>42516</b>	<b>Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas</b>
425161	Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak Digunakan untuk mencatat penerimaan yang timbul akibat selisih harga beli BBM Pemerintah dari Badan Usaha (harga patokan) lebih rendah/kecil dari harga jual BBM Pemerintah kepada Masyarakat yang ditetapkan dalam Perpres. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan-BUN (BA 999.99)
425162	Pendapatan Minyak Mentah (DMO) Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari selisih antara nilai minyak mentah DMO / <i>Domestic Market Obligation</i> dengan harga ICP / <i>Indonesian Crude Price</i> dengan <i>DMO Fee</i> . Nilai minyak mentah DMO adalah hasil penjualan minyak mentah bagian KKKS (Kontraktor Kontrak kerja Sama) diserahkan kepada Pemerintah atau dibeli Pemerintah. Sedangkan <i>DMO Fee</i> adalah pembayaran atau harga beli Pemerintah atas penyerahan minyak mentah DMO bagian KKKS. Penerimaan ini bersifat kontijensi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan-BUN (BA 999.99).
425169	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diterima dari kegiatan usaha hulu migas antara lain penerimaan bonus dari KKKS, transfer material, dan <i>firm commitment</i> .
<b>42517</b>	<b>Pendapatan Iuran Badan Usaha</b>
425171	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM.
425172	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha niaga dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.
<b>4252</b>	<b>PENDAPATAN ADMINISTRASI DAN PENEGAKAN HUKUM</b>
<b>42521</b>	<b>Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum</b>
425211	Pendapatan Paspor Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan pembuatan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia antara lain berupa paspor biasa, paspor pengganti, surat perjalanan laksana paspor, dan pas lintas batas. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
425212	Pendapatan Visa Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan Visa, antara lain berupa visa kunjungan dan visa tinggal terbatas. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali ( <i>Re-entry permit</i> ) Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan pemberian Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali ( <i>Re-entry permit</i> ) antara lain berupa izin kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan keimigrasian selain paspor, visa, dan izin keimigrasi dan Izin Masuk Kembali ( <i>Re-entry permit</i> ), antara lain berupa biaya beban keimigrasian, <i>Smart Card</i> , pembuatan Surat Keterangan Keimigrasian, pembuatan dan penggantian Kartu Perjalanan Pebisnis APEC (KPP APEC) / <i>APEC Business Travel Card</i> (ABTC), pemberian fasilitas AFFIDAVIT. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan fidusia antara lain berupa pendaftaran jaminan fidusia dan penghapusan atau pencoretan sertifikat jaminan fidusia. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan Badan Hukum antara lain berupa pendirian badan usaha, yayasan, dan perseroan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan jasa hukum selain pelayanan fidusia dan pelayanan badan hukum, antara lain berupa Pendapatan dari pelayanan perdata umum, notariat, harta peninggalan, pengambilan sidik jari (daktiloskopi), partai politik, kewarganegaraan dan perwarganegaraan RI. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan atas kekayaan intelektual antara lain berupa hak cipta, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merek, dan indikasi geografis, dan Pengangkatan Konsultan Kekayaan Intelektual. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan dan administrasi hukum selain pelayanan keimigrasian, pelayanan jasa hukum dan pelayanan kekayaan intelektual, antara lain kegiatan pembinaan kemandirian warga binaan pemasarakatan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
<b>42522</b>	<b>Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri</b>
425221	Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri Digunakan untuk mencatat pendapatan dari visa Republik Indonesia di luar negeri. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri (BA 011).
425222	Pendapatan Paspor Republik Indonesia di Luar Negeri Digunakan untuk mencatat pendapatan dari paspor Republik Indonesia di luar negeri, termasuk Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Masuk Bagian Anggaran

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Kementerian Luar Negeri (BA 011).
425223	Pendapatan Dokumen Kekonsuleran  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengurusan dokumen konsuler. Antara lain pengesahan tandatangan/legalisasi salinan dokumen, surat keterangan jalan, surat keterangan usaha/ bisnis dan buku pengenalan diri ( <i>ID Book</i> ). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri (BA 011).
425224	Pendapatan Jasa Pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Luar Negeri  Digunakan untuk mencatat Pendapatan Pelayanan pada KDEI di Luar Negeri, meliputi pendapatan paspor, visa, fasilitas keimigrasian (affidavit) bagi anak berkewarganegaraan ganda, Dokumen Konsuler, dan pelayanan lainnya yang dilaksanakan oleh KDEI. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perdagangan (BA 090).
425228	Pendapatan Pelayanan Lainnya di Luar Negeri  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan lainnya di luar negeri antara lain pendapatan fasilitas keimigrasian (affidavit) bagi anak berkewarganegaraan ganda, Surat Keterangan Keimigrasian, pelayanan kepelautan, pelayanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan, dan pelayanan lainnya. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri (BA 011).
425229	Pendapatan Administrasi di Luar Negeri  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari administrasi di luar negeri antara lain pendapatan cicilan Beban Pusat Persekot Resmi (BPPR), pengembalian <i>Value Added Tax</i> (VAT), dan pendapatan administrasi lainnya. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri (BA 011).
<b>42523</b>	<b>Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi</b>
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengesahan surat di bawah tangan. Masuk ke Bagian Anggaran Mahkamah Agung (BA 005).
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung (BA 005).
425233	Pendapatan Ongkos Perkara  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari ongkos perkara. Masuk Bagian Anggaran Mahkamah Agung (BA 005), Kejaksaan Agung (BA 006), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (093).
425234	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara  Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara.
425235	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi  Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari lelang barang-barang gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara.
425236	Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan hasil sitaan dan/atau temuan berupa barang yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan selain dari perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006).
425237	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hasil Denda Pelanggaran Lalu Lintas. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006).
425238	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana selain Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, antara lain berupa denda hasil tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006).
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari kejaksaan dan peradilan lainnya, antara lain berupa pendaftaran pengangkatan sita, hasil penjualan barang bukti yang tidak diambil orang yang berhak, hasil pemulihan kerugian negara, hasil kerja sama di bidang hukum dengan negara lain, sisa panjar biaya perkara, dan hak redaksi. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Mahkamah Agung (BA 005).
<b>42524</b>	<b>Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang</b>
425241	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari uang sitaan hasil korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425242	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari uang sitaan tindak pidana pencucian uang yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425243	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari uang pengganti tindak pidana korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425244	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan hasil lelang barang rampasan tindak pidana pencucian uang. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425245	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan hasil lelang barang rampasan tindak pidana korupsi dan hasil penjualan barang sita eksekusi. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425246	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari denda hasil tindak pidana korupsi. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425247	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari denda hasil tindak pidana pencucian uang. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
425248	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengembalian uang Negara tanpa putusan pengadilan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006).
425249	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil sitaan dan/atau temuan berupa uang yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan selain dari perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, antara lain berupa uang sitaan dari tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan RI (BA 006) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
<b>42525</b>	<b>Pendapatan Perizinan</b>
425251	Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas kompensasi penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan (BA 026).
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari jasa pelayanan pengajuan Hak dan Perizinan di bidang pertanian antara lain berupa jasa pelayanan perlindungan varietas tanaman (PVT), jasa pendaftaran pupuk, jasa pendaftaran pestisida, jasa pendaftaran obat hewan, dan jasa sertifikasi obat hewan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Pertanian (BA 018).
425253	Pendapatan Perizinan di Bidang Perdagangan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA), jasa pengujian dalam rangka persyaratan izin tanda pabrik dan izin tipe alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, izin usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi, dan perizinan lainnya di bidang perdagangan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perdagangan (BA 090).
425254	Pendapatan Perizinan di Bidang Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari perizinan kefarmasian, perizinan alat kesehatan, izin edar alat kesehatan, dan izin edar perbekalan kesehatan rumah tangga. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kesehatan (BA 024).
425255	Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain berupa iuran izin pemanfaatan kawasan, iuran izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi (IUPJL), penerbitan izin lingkungan, dan penerbitan izin pengendalian pencemaran air. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029).
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari perizinan selain perizinan Tenaga Kerja Asing, perizinan Pertanian, perizinan bidang perdagangan, perizinan bidang kesehatan dan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain berupa perizinan undian berhadiah serta perizinan penelitian, perizinan pelaksanaan reklamasi dan pengembangan bagi peneliti asing, dan iuran tahunan akibat penerapan hak.
<b>42526</b>	<b>Pendapatan Pelayanan Kepolisian I</b>
425261	Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425262	Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425263	Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425264	Pendapatan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pendapatan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425265	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425266	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425267	Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Ujian Keterampilan Mengemudisuaui Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425268	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerahsesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425269	Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihansesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
<b>42527</b>	<b>Pendapatan Pelayanan Kepolisian II</b>
425271	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang melintasi batas negara Indonesiasesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
425272	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang melintasi batas negara Indonesia sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425273	Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak serta penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425274	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425275	Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pelayanan Satuan Pengaman, yaitu penerbitan kartu anggota satuan pengaman, penerbitan ijazah satuan pengaman, dan penerbitan surat izin operasional badan usaha jasa pengamanan sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425276	Pendapatan Pengamanan Obyek Vital  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Jasa Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek tertentu dan Jasa Manajemen sistem pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek tertentu sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
425279	Pendapatan Pelayanan Kepolisian Lainnya  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pelayanan Kepolisian Lainnya, termasuk pelayanan penyelenggaraan assesment center Polri sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
<b>42528</b>	<b>Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi</b>
425281	Pendapatan Akreditasi  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari akreditasi antara lain akreditasi pada Badan Standardisasi Nasional. Merupakan penerimaan yang bisa terdapat di seluruh Kementerian/Lembaga.
425282	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari antara lain pendapatan dari sertifikasi benih, Jasa Akreditasi Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jasa Pengujian Benih Tanaman Kehutanan, Pengujian Bibit Tanaman Hutan, dan Jasa Laboratorium. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029)

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
425283	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian (BA 019) antara lain meliputi jasa pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi serta pelayanan teknis mesin.
425284	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perdagangan  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (BA 090) antara lain meliputi jasa pelayanan teknis pengujian kalibrasi dan verifikasi, pelayanan inspeksi teknik, pelayanan teknis mesin, pelayanan teknis sertifikasi, serta jasa tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang memerlukan penanganan khusus.
425285	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (BA 024) antara lain meliputi jasa pelayanan teknis pengujian dan kalibrasi dan pelayanan teknis sertifikasi.
425286	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum  Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BA 033)
425287	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pengujian selain dari pengujian kendaraan bermotor, Sertifikasi, dan Kalibrasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (BA 022) antara lain meliputi sertifikasi angkutan penyeberangan lintas dalam negeri, sertifikasi kompetensi pengawakan angkutan umum, sertifikasi SDM perkeretaapian, sertifikasi sarana dan prasarana perkeretaapian, penerbitan lisensi dan sertifikasi bidang transportasi udara, dan kalibrasi peralatan penerbangan.
425288	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika  Digunakan untuk mencatat pendapatan pengujian, sertifikasi dan kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi selain di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, perindustrian, perdagangan, kesehatan, dan pekerjaan umum, antara lain pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standardisasi di bidang tenaga nuklir dan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
<b>4253</b>	<b>PENDAPATAN KESEHATAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, DAN KEAGAMAAN</b>
<b>42531</b>	<b>Pendapatan Jasa Kesehatan</b>
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).  Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
425312	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL).
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan lainnya selain dari BPJS Kesehatan.
425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari jasa karantina kesehatan antara lain karantina kapal yang dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kesehatan (024).
425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari jasa pemberian vaksin kesehatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kesehatan (024).
425316	Pendapatan Registrasi Tenaga Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari registrasi tenaga kesehatan, meliputi dokter, dokter gigi, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kesehatan (024).
<b>42532</b>	<b>Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan</b>
425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan pengawasan obat dan makanan antara lain berupa pendaftaran, sertifikasi, dan pengujian obat dan makanan. Masuk Bagian Anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BA 063).
<b>42533</b>	<b>Pendapatan Jasa Karantina</b>
425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari jasa tindakan karantina pertanian dan peternakan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Pertanian (BA 018).
425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari jasa tindakan karantina perikanan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032).
<b>42534</b>	<b>Pendapatan Jasa Agraria</b>
425341	Pendapatan Pelayanan Pertanahan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan survei, pengukuran, dan pemetaan, pelayanan pemeriksaan tanah, pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya, pelayanan pertimbangan teknis pertanahan, pelayanan pendaftaran tanah, pelayanan informasi pertanahan, pelayanan lisensi, dan pelayanan di bidang pertanahan yang berasal dari kerja sama dengan pihak lain. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BA 056).
425342	Pendapatan Penerimaan Hak Atas Tanah P3MB/Presidium Kabinet Dwikora
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan penetapan tanah obyek penguasaan benda-benda tetap milik perseorangan warga negara Belanda (P3MB) sesuai Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BA 056).

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>42535</b>	<b>Pendapatan Jasa Keagamaan</b>
425351	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari hasil pelayanan Jasa Kantor Urusan Agama dari pencatatan nikah dan rujuk. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Agama (BA 025).
425359	Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya, antara lain pendapatan dari pengelolaan asrama haji, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, dan pencetakan Al Qur'an. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Agama (BA 025).
<b>4254</b>	<b>PENDAPATAN PENDIDIKAN, BUDAYA, RISET, DAN TEKNOLOGI</b>
<b>42541</b>	<b>Pendapatan Pendidikan</b>
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan pada Sekolah maupun Perguruan Tinggi Pemerintah (PTP).
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Biaya Pendidikan di Sekolah maupun PTP yang dibayarkan selama masa pendidikan antara lain berupa uang kuliah tunggal, SPP, uang praktikum, cuti akademik, semester pendek, bimbingan karya ilmiah akhir, Praktik Kerja Lapangan, ujian remedial, dan ujian komprehensif.
425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari kegiatan penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Sekolah maupun PTP, antara lain kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta dalam rangka kajian reorientasi pembangunan pedesaan, kajian dalam kebijakan strategis dalam pemetaan cluster sektor unggulan, kajian pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis ekonomi kreatif).
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat seluruh pendapatan pendidikan pada Sekolah maupun PTP selain pendapatan ujian masuk/seleksi masuk pendidikan, pendapatan biaya pendidikan, dan pendapatan penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat. Antara lain berupa wisuda, kartu perpustakaan, penjualan hasil praktik pendidikan, dan pendapatan <i>try out</i> .
<b>42542</b>	<b>Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan, merupakan penerimaan yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya di berbagai Kementerian/Lembaga selain layanan pendidikan dan/atau pelatihan serta assessment dan sertifikasi kompetensi. Antara lain berasal dari <i>assessment center</i> dan psikometri, sertifikasi kepabeanan, sertifikasi <i>welding</i> , jasa registrasi kompetensi nasional bidang lingkungan hidup, dan sertifikasi penanggulangan bencana.
<b>42543</b>	<b>Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek</b>
425431	Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek, merupakan penerimaan yang (bisa) ada di semua

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Kementerian/Lembaga, antara lain berupa pengukuran debit air permukaan menggunakan <i>current meter type propeler OTT C2</i> (Jasa Instrumentasi Peralatan Lapang).
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Layanan Survei dan Pemetaan di lingkungan Kementerian/Lembaga, antara lain pengolahan data sosial ekonomi pertanian, jasa survey dan pemetaan dalam rangka survei hidro oseanografi.
425433	Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Masuk Bagian Anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BA 075).
425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Hasil Penelitian/Riset dan hasil Pengembangan Iptek. merupakan penerimaan yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga, antara lain pendapatan dari laboratorium bank gen.
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Hasil Survei dan Pemetaan di lingkungan Kementerian/Lembaga, antara lain peta laut navigasi, buku nautis, peta navigasi elektronis.
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual
	Digunakan untuk mencatat pendapatan royalti atas kekayaan intelektual. Merupakan penerimaan yang bisa terdapat di seluruh Kementerian/Lembaga, antara lain pendapatan royalti dari kekayaan intelektual yang berasal dari alih teknologi hasil litbang kesehatan.
425439	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Penelitian/Riset, Survei, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya, antara lain jasa penggunaan peralatan survey dan pemetaan, jasa penimbalan peralatan nautika dan tiket masuk kebun raya dan balai konservasi tumbuhan.
<b>42545</b>	<b>Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan</b>
425451	Pendapatan Museum
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari museum antara lain berupa tiket masuk museum dan pameran. Merupakan penerimaan yang (bisa) ada di Kementerian/Lembaga, antara lain museum Basoeki Abdullah, Museum Nasional, museum Sumpah Pemuda, museum geologi.
425459	Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kegiatan di bidang sejarah dan kebudayaan lainnya antara lain kerja sama pengelolaan cagar budaya (contoh: Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Pawon, dan Candi Mendut).
<b>4255</b>	<b>PENDAPATAN JASA TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>
<b>42551</b>	<b>Pendapatan Jasa Transportasi</b>
425511	Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari jasa pengujian kendaraan bermotor antara lain berupa uji tipe kendaraan, uji sampel kendaraan dan penerbitan surat sertifikat uji tipe (SUT) serta surat registrasi uji tipe (SRUT). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425512	Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/ <i>Track Access Charge</i>
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Biaya Penggunaan Prasarana

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Perkeretaapian. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425513	Pendapatan Jasa Kepelabuhanan  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan lintas dalam negeri antara lain berupa jasa pelayanan kapal, jasa pelayanan barang, jasa pelayanan orang, penggunaan sarana dan prasarana di pelabuhan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425514	Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan jasa navigasi pelayaran antara lain berupa penggunaan sarana bantu navigasi pelayaran, pelayanan jasa telekomunikasi pelayaran, pelayanan jasa salvage dan pekerjaan bawah air. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425515	Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerimaan uang perkapalan dan kepelautan antara lain berupa surat pengukuran kapal, dokumen kepelautan, dan pengawasan barang berbahaya. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan di bandar udara antara lain berupa pelayanan jasa penumpang pesawat udara, pelayanan jasa pendaratan penempatan dan penyimpanan pesawat udara, jasa kargo dan pos pesawat udara, penggunaan sarana dan prasarana di bandar udara serta penerbitan izin masuk daerah keamanan terbatas. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425517	Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelayanan jasa navigasi penerbangan antara lain <i>terminal navigation charge, enroute charge dan overflying</i> . Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425518	Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari konsesi di bidang transportasi, antara lain konsesi jasa kepelabuhanan dan konsesi jasa kebandarudaraan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya  Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pelayanan di bidang transportasi selain pengujian kendaraan bermotor, penggunaan prasarana perkeretaapian, jasa kepelabuhanan, jasa navigasi pelayaran, jasa perkapalan dan kepelautan, jasa kebandarudaraan, jasa navigasi penerbangan, dan pendapatan dari konsesi bidang transportasi.  Penerimaan Jasa Transportasi Lainnya antara lain berupa penerbitan izin angkutan jalan, penerbitan izin bidang perkeretaapian, penerbitan Surat izin Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL), dan penerbitan izin bidang angkutan udara. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perhubungan (BA 022).
<b>42552</b>	<b>Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika</b>
425521	Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio  Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).
425522	Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi  Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Informatika (BA 059).
425523	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).
425524	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Pos. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).
425525	Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).
425526	Pendapatan Pengelolaan Nama Domain Indonesia Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Pengelolaan Nama Domain Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).
425529	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika Lainnya Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Jasa Komunikasi dan Informatika Lainnya di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059).
<b>42553</b>	<b>Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik</b>
425531	Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Jasa Siaran. Masuk Bagian Anggaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (BA 116).
425532	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP RRI Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Jasa Non Siaran. Masuk Bagian Anggaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (BA 116).
425533	Pendapatan Jasa Siaran LPP TVRI Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Jasa Siaran. Masuk Bagian Anggaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (BA 117).
425534	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP TVRI Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Jasa Non Siaran. Masuk Bagian Anggaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (BA 117).
<b>4256</b>	<b>PENDAPATAN JASA LAINNYA</b>
<b>42561</b>	<b>Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>
425611	Pendapatan Wisata Alam Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari wisata alam di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain berupa pungutan hasil usaha penyediaan jasa wisata alam, pungutan hasil usaha penyediaan sarana pariwisata alam, pungutan jasa kegiatan wisata alam, dan karcis masuk di kawasan suaka alam (KSA), kawasan pariwisata alam (KPA) dan taman buru (TB). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA.029).
425612	Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari iuran di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang pembayarannya dilakukan secara periodik, antara lain berupa iuran pengumpulan/pengunduhan benih dan anakan, pungutan usaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pungutan usaha pemanfaatan air (PUPA), dan pungutan usaha pemanfaatan energi air (PUPEA). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA.029).

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
425619	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya Digunakan untuk mencatat pendapatan jasa di bidang lingkungan hidup dan kehutanan selain pendapatan wisata alam, dan pendapatan iuran di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain berupa hasil lelang kayu temuan dan hasil lelang tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang, hasil silvopastural system, hasil <i>silvofishery system</i> , penerbitan rekomendasi pengangkutan dan registrasi bahan berbahaya dan beracun (B3), pendapatan dari pengumpulan benih dan anakan dan transaksi kegiatan penyerapan dan atau penyimpanan karbon dari kawasan hutan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029).
<b>42562</b>	<b>Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan</b>
425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan Pendapatan dari pelayanan di pelabuhan perikanan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032).
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya Digunakan untuk mencatat pendapatan selain Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan, antara lain berupa pungutan dari penggunaan kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan dan pembudidayaan ikan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032).
<b>42569</b>	<b>Pendapatan Jasa Lainnya</b>
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari kegiatan pengawasan dan/atau pemeriksaan yang bisa terdapat di seluruh Kementerian/Lembaga antara lain berupa jasa inspeksi, jasa surveilans dan jasa audit.
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi Digunakan untuk mencatat pendapatan dari jasa tenaga, pekerjaan, dan informasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga, antara lain jasa tenaga ahli, jasa perpustakaan,jasa rancang bangun dan perekayasaan,dan jasa konsultasi.
425693	Pendapatan dari Jasa Layanan Jalan Tol Digunakan untuk mencatat pendapatan dari jasa layanan jalan tol. Masuk ke Bagian Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (BA 033).
425694	Pendapatan dari Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) Pendapatan dari Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA). Masuk ke Bagian Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (BA 033).
425699	Pendapatan Jasa Lainnya Digunakan untuk mencatat penerimaan dari pelayanan lainnya yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi.
<b>4257</b>	<b>PENDAPATAN BUNGA, PENGELOLAAN REKENING PERBANKAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN</b>
<b>42571</b>	<b>Pendapatan Bunga</b>
425711	Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga yang bersumber dari investasi atau pembelian surat-surat berharga berupa obligasi.
425712	Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga dari BPPN yang bersumber dari investasi/ pembelian surat-surat berharga berupa obligasi.
425713	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Pemberian Pinjaman

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari pemberian piutang tersebut di atas.
425714	Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya yang berasal dari pemberian kredit pemerintah termasuk kredit investasi pemerintah dan kredit bidang perkebunan dan kehutanan.
425715	Pendapatan Komitmen Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari biaya komitmen yang timbul akibat pemberian pinjaman, merupakan transaksi BA BUN Satker Direktorat SMI.
425716	Pendapatan Bunga Kredit Program
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga transaksi kredit program.
425717	Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan
	Digunakan untuk mencatat PNBP yang berasal dari bunga dari pengelolaan rekening pembangunan hutan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029).
425719	Pendapatan Bunga Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga selain yang bersumber dari investasi atau pembelian surat-surat berharga lainnya.
<b>42572</b>	<b>Pendapatan Gain on Bond Redemption</b>
425721	Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diperoleh dari selisih lebih <i>carrying value</i> Obligasi yang dibeli kembali dengan <i>clean price</i> yang dibayar Pemerintah pada saat pembelian kembali Obligasi ( <i>buyback</i> ). <i>Carrying Value</i> Obligasi ialah nominal Obligasi setelah dikurangi atau ditambah <i>unamortized discount</i> atau <i>premium</i> .
425722	Pendapatan dari Transaksi <i>Security Lending</i>
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Transaksi <i>Security Lending</i> .
425723	Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valuta Asing.
425724	Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali SBSN Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali SBSN Jangka Panjang.
425725	Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali SBSN Valuta Asing Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali SBSN Valas Jangka Panjang.
<b>42573</b>	<b>Pendapatan Premium atas Obligasi Negara</b>
425731	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diperoleh pada saat penerbitan SUN berdenominasi Rupiah yang dihitung dari selisih lebih penerimaan kas ( <i>clean price</i> ) dengan nominal SUN yang diterbitkan.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
425732	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diperoleh pada saat penerbitan SUN berdenominasi Valuta Asing yang dihitung dari selisih lebih penerimaan kas ( <i>clean price</i> ) dengan nominal SUN yang diterbitkan.
425733	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diperoleh pada saat penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berdenominasi Rupiah yang dihitung dari selisih lebih penerimaan kas ( <i>clean price</i> ) dengan nominal SBSN.
425734	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Valuta Asing
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diperoleh pada saat penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berdenominasi Valuta Asing yang dihitung dari selisih lebih penerimaan kas ( <i>clean price</i> ) dengan nominal SBSN.
<b>42574</b>	<b>Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara</b>
425741	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas imbal jasa penjaminan infrastruktur.
425742	Pendapatan Selisih Harga SBN
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Selisih Harga SBN.
425743	Pendapatan Kupon SBN
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan atas Kupon SBN.
425744	Pendapatan Bunga Reverse Repo
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga atas transaksi <i>reverse repo</i> .
425745	Pendapatan Fee atas Transaksi Security Lending SUN
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas SUN yang dipinjamkan kepada Dealer Utama. Masuk Bagian Anggaran 999.01 (Sistem Akuntansi Utang Pemerintah).
425746	Pendapatan Lain-lain atas Rekening Tujuan Tertentu
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan lain-lain atas rekening tujuan tertentu.
<b>42575</b>	<b>Pendapatan dari Selisih Kurs</b>
425751	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN
	Digunakan untuk mencatat untung selisih kurs terealisasi dalam pengelolaan rekening milik BUN.
425752	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan
	Digunakan untuk mencatat realisasi kentungan selisih kurs uang persediaan pada seluruh Kementerian/Lembaga.
425753	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D
	Selisih positif transaksi belanja dalam valuta asing antara resume tagihan/invoice/SPP dengan SP2D. Serta realisasi piutang dan utang dari kurs yang berbeda.
<b>42576</b>	<b>Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening</b>
425761	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari layanan jasa perbankan.
425762	Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat pendapatan jasa bank akibat transaksi pemberian pinjaman.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
425763	Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas biaya management fee, komitmen fee dan fee-fee yang terjadi karena transaksi pemberian pinjaman.
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pemerintah.
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penutupan rekening pemerintah.
<b>42577</b>	<b>Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara</b>
425771	Pendapatan atas Penerbitan SP2D Dalam Rangka TSA
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diterima dari Bank Operasional atas penerbitan SP2D dalam rangka pengelolaan TSA. Merupakan pendapatan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (015.08).
425772	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diterima dari hasil penempatan uang negara pada Bank Umum. Masuk Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
425773	Pendapatan dari Pelaksanaan <i>Treasury Notional Pooling</i>
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pelaksanaan <i>Treasury Notional Pooling</i> . Masuk Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
425774	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diterima dari hasil penempatan uang negara pada Bank Sentral. Masuk Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
425775	Pendapatan dari Penempatan Uang Sebelum Rekonsiliasi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penempatan uang sebelum rekonsiliasi.
<b>42578</b>	<b>Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara</b>
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pengenaan biaya penagihan secara paksa atas piutang pajak tidak tertagih. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan (BA 015).
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
	Digunakan untuk mencatat pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas I yang dipungut oleh DJKN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013.
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II
	Digunakan untuk mencatat pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II yang dipungut oleh DJKN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013.
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian
	Digunakan untuk mencatat pendapatan Bea Lelang oleh Pegadaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013.
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Masuk pendapatan Kementerian Keuangan (BA 015).
<b>42579</b>	<b>Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara</b>
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara.
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara.
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pihak lain/pihak ketiga yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara.
<b>4258</b>	<b>PENDAPATAN DENDA</b>
<b>42581</b>	<b>Pendapatan Denda I</b>
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari setoran rekanan pemerintah, berupa denda penyelesaian pekerjaan pemerintah. Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425812	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha
	Digunakan untuk mencatat pendapatan denda yang berasal dari pelaku usaha yang telah mendapatkan putusan tetap dari peradilan. Masuk Bagian Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (BA 108).
425813	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Perdagangan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan Denda Administratif atas pelanggaran tidak mendaftar Prospektus dan Perjanjian Waralaba; Denda Administratif atas pelanggaran terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Perdagangan (BA 090).
425814	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA
	Digunakan untuk mencatat pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA. Merupakan pendapatan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (015.08).
425815	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia
	Digunakan untuk mencatat pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia. Merupakan pendapatan Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
425816	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan <i>Treasury Notional Pooling</i>
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Pelaksanaan <i>Treasury Notional Pooling</i> . Masuk Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
425817	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi  Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi.
425818	Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas  Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa denda, bunga, dan penalti keterlambatan terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas.
425819	Pendapatan Denda terkait Pengusahaan Panas Bumi  Digunakan untuk mencatat pendapatan denda admistrasi atas Keterlambatan dan Kekurangan Penyetoran Bagian Pemerintah dari Pengusahaan Panas Bumi.
<b>42582</b>	<b>Pendapatan Denda II</b>
425821	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyaluran SP2D pada Bank Operasional dan Bank Penyalur Gaji  Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas keterlambatan menyalurkan dana SP2D/SP2D-R ke rekening yang berhak dan keterlambatan membukukan dana SP2D-R pada tanggal diterimanya dana ke Rekening RR SPAN/Rekening RR Gaji. Merupakan pendapatan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (015.08).
425822	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pembagian PBB oleh BO III PBB  Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pembagian PBB oleh BO III PBB. Merupakan pendapatan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (015.08).
425823	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman  Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman, merupakan transaksi BA BUN satker Direktorat SMI.
425824	Pendapatan Denda Penyaluran Kredit Program  Digunakan untuk mencatat Pendapatan penerimaan denda karena bank yang ditunjuk terlambat menyalurkan dana kredit program kepada pihak yang berhak menerima.
425825	Pendapatan Denda Administrasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik  Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari denda administratif yang berasal dari Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, termasuk juga imbalan bunga atas keterlambatan pembayaran denda administratif yang berasal dari Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
425826	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Kredit Pemerintah (KUMK)  Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh Debitur KUMK.
425827	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Pemberian Pinjaman  Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh Debitur Pemberian Pinjaman.
425828	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III  Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan kompensasi sewa beli rumah negara golongan III.
425829	Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Digunakan untuk mencatat pendapatan denda/kompensasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain berupa ganti rugi tegakan, denda pelanggaran

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	eksploitasi hutan (DPEH), denda administratif bidang perlindungan hutan dan konservasi alam, dan ganti kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA.029).
<b>42583</b>	<b>Pendapatan Denda III</b>
425839	Pendapatan Denda Lainnya  Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda yang tidak termasuk ke dalam kelompok Pendapatan Denda I& II.
<b>4259</b>	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>
<b>42591</b>	<b>Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I</b>
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Pegawai TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu  Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Barang TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu  Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Modal TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425914	Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu  Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Pembayaran Kewajiban Utang TAYL.
425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu  Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Subsidi TAYL.
425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu  Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Hibah TAYL.
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu  Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Bantuan Sosial TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu  Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Lain-lain TAYL.
425919	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu  Digunakan untuk mencatat pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa TAYL.
<b>42592</b>	<b>Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II</b>
425921	Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL  Digunakan untuk mencatat Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL.
<b>42593</b>	<b>Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan</b>
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS  Digunakan untuk mencatat pendapatan setoran atas kelebihan pembayaran belanja pegawai PNS yang sudah pensiun.
425932	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat pendapatan setoran atas kelebihan pembayaran belanja pegawai Prajurit TNI/PNS Kemhan yang sudah pensiun.
425933	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Anggota Polri/PNS Polri
	Digunakan untuk mencatat pendapatan setoran atas kelebihan pembayaran belanja pegawai Anggota Polri/PNS Polri yang sudah pensiun.
425934	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan setoran atas kelebihan pembayaran belanja pegawai Pejabat Negara yang sudah pensiun.
<b>42598</b>	<b>Pendapatan Lain-Lain I</b>
425981	Penerimaan Lainnya dari Piutang Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali atas pelunasan piutang pemberian pinjaman yang telah dihapuskan, meliputi piutang pokok penerusan pinjaman dan piutang non pokok, serta piutang sehubungan dengan kegiatan pemberian pinjaman BA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman, serta penerimaan kembali atas aset lainnya kredit program yang tidak teridentifikasi Surat Pengakuan Hutang-nya.
<b>42599</b>	<b>Pendapatan Lain-Lain II</b>
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pengembalian Uang Muka Gaji. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
425992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari Pembayaran Premi dalam rangka Penjaminan Perbankan Nasional.
425993	Pendapatan Jasa Perbendaharaan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diterima Pemerintah dari Bank Umum atau PT Pos sebagai pengelola kas negara (Bank Operasional).
425994	Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari Bank/Pos Persepsi
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari Bank/Pos Persepsi.
425995	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari penyetoran kelebihan hasil bersih lelang yang tidak diambil oleh yang berhak. Merupakan pendapatan BA 015.06 (Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan).
425996	Pendapatan dalam rangka Refund Dana PHLN
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dalam Rangka Refund Dana PHLN. Merupakan pendapatan BUN.
425997	Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan.
425998	Pendapatan dari Retur SP2D
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Retur SP2D yang disetorkan ke kas negara. Dibukukan pada BA 999.99 (BUN Transaksi Khusus).
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain
	Merupakan pendapatan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>43</b>	<b>PENDAPATAN HIBAH</b>
<b>431</b>	<b>PENDAPATAN HIBAH DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</b>
<b>4311</b>	<b>Pendapatan Hibah Dalam Negeri</b>
<b>43111</b>	<b>Pendapatan Hibah Dalam Negeri Terencana</b>
431111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Perorangan  Pendapatan hibah dalam negeri yang berasal dari perorangan. (BA 999.02).
431112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Lembaga/Badan Usaha  Pendapatan hibah dalam negeri yang berasal dari Lembaga/Badan Usaha berbentuk badan hukum. (BA 999.02).
431119	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Lainnya  Pendapatan hibah dalam negeri yang tidak dapat dikategorikan berasal dari perorangan maupun Lembaga/Badan Usaha berbentuk badan hukum. (BA 999.02).
<b>43112</b>	<b>Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga</b>
431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang  Untuk mencatat pendapatan hibah dari Dalam Negeri berbentuk barang.
431122	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Jasa  Untuk mencatat pendapatan hibah dari Dalam Negeri berbentuk Jasa.
431123	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga  Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga.
<b>43113</b>	<b>Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang</b>
431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Perorangan  Pendapatan hibah dalam negeri langsung yang berasal dari perorangan (BA 999.02).
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lembaga/Badan Usaha  Pendapatan hibah dalam negeri langsung yang berasal dari Lembaga/Badan Usaha berbentuk badan hukum (BA 999.02).
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Pemerintah Daerah  Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Pemerintah Daerah.
431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lainnya  Pendapatan hibah dalam negeri langsung yang tidak dapat dikategorikan berasal dari perorangan maupun Lembaga/Badan Usaha berbentuk badan hukum (BA 999.02).
<b>4312</b>	<b>Pendapatan Hibah Luar Negeri</b>
<b>43121</b>	<b>Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana</b>
431211	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Perorangan  Pendapatan hibah luar negeri yang berasal dari perorangan. (BA 999.02).
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Bilateral  Pendapatan hibah luar negeri yang berasal dari Lembaga Internasional dalam hubungan bilateral. (BA 999.02).
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Multilateral

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Pendapatan hibah luar negeri yang berasal dari Lembaga Internasional dalam hubungan multilateral. (BA 999.02).
431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Lainnya
	Pendapatan hibah luar negeri yang tidak dapat dikategorikan berasal Lembaga Internasional baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral. (BA 999.02).
<b>43122</b>	<b>Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga</b>
431221	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang
	Untuk mencatat pendapatan hibah dari Luar Negeri berbentuk barang.
431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Jasa
	Untuk mencatat pendapatan hibah dari Luar Negeri berbentuk Jasa.
431223	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga.
<b>43123</b>	<b>Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang</b>
431231	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Perorangan
	Pendapatan hibah luar negeri langsung yang berasal dari perorangan (BA 999.02).
431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Bilateral
	Pendapatan hibah luar negeri langsung yang berasal dari Lembaga Internasional dalam hubungan bilateral (BA 999.02).
431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Multilateral
	Pendapatan hibah luar negeri langsung yang berasal dari Lembaga Internasional dalam hubungan multilateral (BA 999.02).
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang Lainnya
	Pendapatan hibah luar negeri langsung yang tidak dapat dikategorikan berasal Lembaga Internasional baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral (BA 999.02).
<b>43124</b>	<b>Pendapatan Hibah Luar Negeri yang Langsung Diterushibahkan</b>
431241	Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Barang yang Langsung Diterushibahkan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Barang yang Langsung Diterushibahkan.
431242	Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Jasa yang Langsung Diterushibahkan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Jasa yang Langsung Diterushibahkan.
431243	Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Surat Berharga yang Langsung Diterushibahkan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Surat Berharga yang Langsung Diterushibahkan.
<b>439</b>	<b>PENDAPATAN HIBAH LAIN-LAIN</b>
<b>4399</b>	<b>Pendapatan Hibah Lain-lain</b>
<b>43999</b>	<b>Pendapatan Hibah Lain-lain</b>
<b>439999</b>	Pendapatan Hibah Lain-lain
	Hanya digunakan untuk mencatat Pendapatan Hibah Lain-lain oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Jurnal Penyesuaian tingkat LKPP.
<b>49</b>	<b>PENDAPATAN PENYESUAIAN</b>
<b>491</b>	<b>PENDAPATAN PENYESUAIAN AKRUAL</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>4911</b>	<b>Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi</b>
<b>49111</b>	<b>Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi</b>
491111	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi
	Pendapatan akrual atas keuntungan selisih kurs yang belum terealisasi dari proses revaluasi. Akun ini dicatat oleh satker yang memiliki rekening bank dalam bentuk valuta asing (valas) misal satker BUN.
491112	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi BLU
	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi BLU
<b>4912</b>	<b>Pendapatan Amortisasi Premium</b>
<b>49121</b>	<b>Pendapatan Amortisasi Premium</b>
491211	Pendapatan amortisasi premium
	Akun yang digunakan untuk mencatat transaksi akrual pendapatan yang berasal dari amortisasi premium dari obligasi negara.
<b>4913</b>	<b>Pendapatan Penyesuaian Lainnya</b>
<b>49131</b>	<b>Pendapatan Penyesuaian Lainnya</b>
491311	Pendapatan penyesuaian Lainnya
	Pendapatan akrual dengan jurnal penyesuaian lainnya
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs pada Kementerian Negara/Lembaga, dan akan dicatat pada Laporan Operasional sebagai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.
<b>4914</b>	<b>Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset</b>
<b>49141</b>	<b>Pendapatan Pelepasan Aset</b>
491411	Pendapatan Pelepasan Aset
	Akun yang digunakan untuk mencatat transaksi akrual Pendapatan dari Pendapatan Pelepasan Aset.
<b>49142</b>	<b>Pendapatan Sitaan/Rampasan</b>
491421	Pendapatan Sitaan/Rampasan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan atas Sitaan/Rampasan.
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Perolehan Aset Lainnya
<b>4915</b>	<b>Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset</b>
<b>49151</b>	<b>Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset</b>
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan
<b>498</b>	<b>SUSPENSE PENDAPATAN</b>
<b>4981</b>	<b>Suspense Pendapatan</b>
<b>49811</b>	<b>Suspense Pendapatan</b>
498111	Suspense Pendapatan
	Digunakan untuk mencatat selisih Pendapatan antara Kementerian/ Lembaga dengan BUN.
<b>499</b>	<b>AKUN SET UP</b>
<b>4991</b>	<b>Akun Set up</b>
<b>49911</b>	<b>Akun set up</b>

AKUN	PENJELASAN
499111	Akun set up
	Akun Set Up pada aplikasi SPAN yang dilakukan di modul Account Receivable.
499112	Unearned Discount
	Akun Set Up pada aplikasi SPAN yang dilakukan di modul Account Receivable.
499113	Sales Account
	Akun Set Up pada aplikasi SPAN yang dilakukan di modul Account Receivable.
<b>4999</b>	<b>Revenue</b>
<b>49999</b>	<b>Revenue</b>
499999	Revenue
	Revenue pada aplikasi SPAN yang dilakukan di modul Account Receivable.

## **PENJELASAN URAIAN SEGMENT AKUN BEBAN**

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>5</b>	<b>BEBAN NEGARA</b>
<b>51</b>	<b>BEBAN PEGAWAI</b>
<b>511</b>	<b>BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN</b>
<b>5111</b>	<b>Beban Gaji dan Tunjangan PNS</b>
<b>51111</b>	<b>Beban Gaji PNS</b>
511111	Beban Gaji Pokok PNS  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pembulatan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.
<b>51112</b>	<b>Beban Tunjangan-tunjangan I PNS</b>
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan suami/istri PNS.
511122	Beban Tunj. Anak PNS  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan anak PNS.
511123	Beban Tunj. Struktural PNS  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan struktural PNS.
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan fungsional PNS.
511125	Beban Tunj. PPh PNS  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan PPh PNS.
511126	Beban Tunj. Beras PNS  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan beras berbentuk uang maupun natura.
511127	Beban Tunj. Kemahalan PNS  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan kemahalan PNS.
511128	Beban Tunjangan Lauk Pauk PNS  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban dana lauk pauk yang diberikan kepada para pegawai negeri sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik).
511129	Beban Uang Makan PNS  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan uang makan PNS.
<b>51113</b>	<b>Beban Tunjangan-tunjangan II PNS</b>
511131	Beban Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan perbaikan penghasilan PNS.
511132	Beban Tunj. Cacat PNS  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan cacat PNS.
511133	Beban Tunj. Khusus Peralihan PNS  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan khusus peralihan PNS.
511134	Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan kompensasi kerja PNS, termasuk tunjangan pengaman dan penyelamatan pelayaran, dan tunjangan kesyahbandaran yang pembayarannya selama ini berdasarkan SE DJA tanggal 28-05-1983 No. SE 74/A.23/1893, tgl 15-11-1993 NO SE 169/A.72/1983 dan tgl 02-12-1987 No. SE 83-/A.198/1987, termasuk Tunjangan Kompensasi Karya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tunjangan Kompensasi Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan (pagu tidak bersifat terbuka).
511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil PNS.
511136	Beban Tunj. Guru/Dosen/PNS Yang Dipekerjakan Pada Sekolah/PT Swasta/Badan/Komisi
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan guru/dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS.
511137	Beban Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan tugas belajar tenaga pengajar biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS.
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan khusus PNS Papua.
511139	Beban Tunjangan SAR PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Tunjangan <i>Search and Rescue</i> untuk Pegawai Negeri Sipil.
<b>51114</b>	<b>Beban Tunjangan-tunjangan III Pegawai Negeri/Staff di Luar Negeri</b>
511141	Beban Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di LN)
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan sewa rumah PNS (staff di LN).
511142	Beban Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas penggantian pembayaran tunjangan Pengobatan PNS (staff di LN).
511143	Beban Tunj. Social Security PNS (Staff di LN)
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan jaminan sosial PNS (staff di LN).
511144	Beban Tunj. Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di LN)
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan asuransi kecelakaan PNS (staff di LN).
511145	Beban Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN)
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (staff di LN).
511146	Beban Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN)
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (staff di LN).
511147	Beban Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri.
511149	Beban Lokal Staff Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban gaji, tunjangan dan uang lembur

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	lokal staff.
<b>51115</b>	<b>Beban Tunjangan-tunjangan IV PNS</b>
511151	Beban Tunjangan Umum PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PNS, termasuk PNS TNI/Polri sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006.
511152	Beban Tunjangan Profesi Guru
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan profesi guru PNS yang telah lulus ujian sertifikasi guru dan mendapatkan NIRG (Nomor Induk Registrasi Guru).
511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan profesi dosen PNS yang telah lulus ujian sertifikasi dosen.
511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan kehormatan profesor yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
511155	Beban Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS bagi yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru.
511156	Beban Tunjangan Khusus Guru/Dosen
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Tunjangan Khusus Guru/Dosen PNS.
511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Tunjangan Kemahalan Hakim.
511158	Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Tunjangan Hakim Ad Hoc sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak dan Fasilitas Hakim Ad Hoc
<b>51116</b>	<b>Beban Gaji- PNS TNI/Polri</b>
511161	Beban Gaji Pokok PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban gaji pokok Pegawai Negeri Sipil TNI/Polri.
511169	Beban Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pembulatan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil TNI/Polri.
<b>51117</b>	<b>Beban Tunjangan-tunjangan I PNS TNI/Polri</b>
511171	Beban Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan suami/istri PNS TNI/Polri.
511172	Beban Tunj. Anak PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan struktural PNS TNI/Polri.
511173	Beban Tunj. Struktural PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan struktural PNS TNI/Polri.
511174	Beban Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan fungsional PNS TNI/Polri.
511175	Beban Tunj. PPh PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan PPh PNS TNI/Polri.
511176	Beban Tunj. Beras PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan beras berbentuk uang maupun natura untuk PNS TNI/Polri.
511177	Beban Tunj. Kemahalan PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan kemahalan PNS TNI Polri.
511178	Beban Tunj. Lauk pauk PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat beban atas lauk pauk yang diberikan kepada para pegawai negeri sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik) untuk PNS TNI/Polri.
511179	Beban Uang Makan PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan uang makan PNS TNI/Polri.
<b>51118</b>	<b>Beban Tunjangan-tunjangan II PNS TNI/Polri</b>
511181	Beban Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan perbaikan penghasilan PNS TNI/Polri.
511182	Beban Tunj. Cacat PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan cacat PNS TNI/Polri.
511183	Beban Tunj. Khusus Peralihan PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan khusus peralihan PNS TNI/Polri.
511184	Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan kompensasi kerja PNS, termasuk tunjangan pengamanan dan penyelamatan pelayaran, dan tunjangan kesyahbandaran yang pembayarannya selama ini berdasarkan SE DJA tanggal 28-05-1983 No. SE 74/A.23/1893, tgl 15-11-1993 NO SE 169/A.72/1983 dan tgl 02-12-1987 No. SE 83-/A.198/1987.
511185	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil PNS.
511187	Beban Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan guru/dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS.
511188	Beban Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan tugas belajar tenaga pengajar biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS.
511189	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan khusus PNS Papua.
<b>51119</b>	<b>Beban Tunjangan-tunjangan III PNS TNI/POLRI</b>
511191	Beban Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan Medis PNS TNI/POLRI.
511192	Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan lain-lain termasuk uang duka TNI/POLRI termasuk tunjangan cacat.
511193	Beban Tunjangan Umum PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Tunjangan Umum PNS TNI/Polri.
511194	Beban Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan kompensasi kerja bidang persandian PNS TNI/POLRI.
511195	Beban Tunjangan Operasi Pengamanan pada pulau terluar dan wilayah perbatasan PNS TNI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Tunjangan Operasi Pengamanan bagi PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan sesuai dengan Perpres No.49 Tahun 2010.
511196	Beban Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi PNS POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi PNS POLRI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012.
511197	Beban Tunjangan Profesi Dosen/Kehormatan Guru Besar PNS TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan dosen PNS TNI/Polri yang telah lulus ujian sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar PNS TNI/Polri.
<b>5112</b>	<b>Beban Gaji dan Tunjangan TNI/Polri</b>
<b>51121</b>	<b>Beban Gaji TNI/POLRI</b>
511211	Beban Gaji Pokok TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban gaji pokok TNI/POLRI.
511219	Beban Pembulatan Gaji TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pembulatan gaji pokok TNI/ POLRI.
<b>51122</b>	<b>Beban Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI</b>
511221	Beban Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan suami/istri TNI/POLRI.
511222	Beban Tunj. Anak TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan anak TNI/POLRI.
511223	Beban Tunj. Struktural TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan struktural TNI/POLRI.
511224	Beban Tunj. Fungsional TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan fungsional TNI/POLRI.
511225	Beban Tunj. PPh TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan PPh TNI/POLRI.
511226	Beban Tunj. Beras TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan beras berbentuk uang maupun natura TNI/POLRI.
511227	Beban Tunj. Kemahalan TNI/POLRI

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan kemahalan TNI/POLRI, termasuk tunjangan daerah terpencil POLRI yang pembayarannya selama ini berdasarkan SE bersama DJA dan Polri No. SE 141/A/2001 dan No. Pol/16/X/2001.
511228	Beban Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban dana lauk pauk yang diberikan kepada Anggota TNI/POLRI sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non organik).
511229	Beban Uang Makan TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan uang makan TNI/POLRI.
<b>51123</b>	<b>Beban Tunjangan-tunjangan II TNI/POLRI</b>
511231	Beban Tunj. Anggota Cadangan TNI DDA TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan anggota cadangan TNI DDA TNI/POLRI.
511232	Beban Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan kowan/polwan TNI TNI/POLRI.
511233	Beban Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan Babinsa TNI/POLRI.
511234	Beban Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan khusus Papua untuk TNI dan PNS TNI/POLRI.
511235	Beban Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan kompensasi kerja bidang persandian TNI TNI/POLRI.
511236	Beban Tunj. Brevet TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan brevet TNI/POLRI.
511237	Beban Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan keahlian/keterampilan TNI/POLRI.
511238	Beban Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan keterampilan khusus TNI/POLRI.
511239	Beban Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan TNI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Tunjangan Operasi Pengamanan bagi prajurit TNI yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau terkecil terluar dan wilayah perbatasan sesuai dengan Perpres No.49 Tahun 2010.
<b>51124</b>	<b>Beban Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI</b>
511241	Beban Tunjangan Medis TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan Medis TNI/POLRI.
511242	Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka TNI/POLRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan lain-lain termasuk uang duka TNI/POLRI termasuk tunjangan cacat.
511243	Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan terpencil/sangat terpencil TNI/POLRI.
511244	Beban Tunjangan Umum TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan umum/tambahan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	tunjangan umum TNI/POLRI sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006.
511245	Beban Santunan Cacat TNI  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban santunan yang diberikan kepada anggota TNI yang mengalami cacat dalam menjalankan tugas sesuai dengan PP Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit TNI.
511246	Beban Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil Terluar/Perbatasan POLRI  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi Anggota POLRI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012.
511247	Beban Tunjangan Profesi Dosen/Kehormatan Guru Besar TNI/Polri  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan dosen TNI/Polri yang telah lulus ujian sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar TNI/Polri.
<b>5113</b>	<b>Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara</b>
<b>51131</b>	<b>Beban Gaji Pejabat Negara</b>
511311	Beban Gaji Pokok Pejabat Negara  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban gaji pokok pejabat Negara.
511319	Beban Pembulatan Gaji Pejabat Negara  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pembulatan gaji pokok pejabat negara.
<b>51132</b>	<b>Beban Tunjangan-Tunjangan I Pejabat Negara</b>
511321	Beban Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan suami/istri pejabat negara.
511322	Beban Tunj. Anak Pejabat Negara  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan anak pejabat negara.
511323	Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan struktural pejabat negara.
511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan PPh pejabat negara.
511325	Beban Tunj. Beras Pejabat Negara  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan beras pejabat negara.
<b>51133</b>	<b>Beban Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara</b>
511331	Beban Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan komunikasi intensif pejabat negara.
511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan uang kehormatan pejabat negara.
511333	Beban Uang Paket Harian Pejabat Negara  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan paket harian pejabat negara.
511334	Beban Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan penunjang kegiatan dewan pejabat negara.
511335	Beban Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan pelayanan sidang dan penyelesaian tugas mendesak pejabat negara.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
511336	Beban Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan pembinaan kegiatan dan khusus BPK pejabat Negara.
511337	Beban Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan lain-lain termasuk uang duka pejabat negara.
511338	Beban Tunjangan Fasilitas KPK
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan pejabat KPK seperti fasilitas yang diterima.
511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas tunjangan penghasilan untuk Pejabat Negara (TPPN).
<b>5114</b>	<b>Beban Gaji Dokter PTT</b>
<b>51141</b>	<b>Beban Gaji Dokter PTT</b>
511411	Beban Gaji Dokter dan Bidan PTT
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban gaji Dokter dan Bidan PTT.
511412	Beban Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan pajak PPh Dokter dan Bidan PTT.
511413	Beban Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT.
511414	Beban Tunjangan Dokter dan Bidan PTT
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan Dokter dan Bidan PTT termasuk tunjangan uang duka wafat (UDW).
<b>5115</b>	<b>Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS</b>
<b>51151</b>	<b>Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS</b>
511511	Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban gaji pokok Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi.
511512	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi.
511513	Beban Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi.
511519	Beban Tunjangan Lainnya Non PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan lainnya Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi.
<b>51152</b>	<b>Beban Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluhan Non PNS</b>
511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan tenaga pendidik non PNS, termasuk tunjangan profesi guru dan dosen Non PNS.
511522	Beban Tunjangan Tenaga Penyuluhan Non PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan tenaga penyuluhan non

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	PNS, termasuk tunjangan penyuluhan agama non PNS.
511529	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluhan Lainnya Non PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembayaran tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluhan Lainnya Non PNS termasuk tunjangan Khusus dan Subsidi Tunjangan Fungsional.
<b>512</b>	<b>BEBAN HONORARIUM/LEMBUR/TUNJ. KHUSUS &amp; BEBAN PEGAWAI TRANSITO</b>
<b>5121</b>	<b>Beban Honorarium</b>
<b>51211</b>	<b>Beban Honorarium</b>
512111	Beban Uang Honor Tetap
	Digunakan untuk pengakuan beban honor tetap, termasuk honor Pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi unit organisasi yang bersangkutan.
<b>5122</b>	<b>Beban Lembur</b>
<b>51221</b>	<b>Beban Lembur</b>
512211	Beban Uang Lembur
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur.
<b>5124</b>	<b>Beban Tunj. Khusus &amp; Beban Pegawai Transito</b>
<b>51241</b>	<b>Beban Tunj. Khusus &amp; Beban Pegawai Transito</b>
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban tunjangan khusus/kegiatan/kinerja dan pembiayaan kepegawaian lainnya di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
512412	Beban Pegawai Transito
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi.
512413	Beban Pembayaran Uang Kompensasi Bagi PNS yang Diberhentikan Sebagai Dampak Reformasi Birokrasi
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas uang kompensasi kepada PNS yang diberhentikan sebagai dampak reformasi birokrasi, digunakan untuk pembayaran uang kompensasi bagi PNS yang diberhentikan sebelum batas usia pensiun yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan kepegawaian, sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi.
<b>513</b>	<b>BEBAN KONTRIBUSI SOSIAL</b>
<b>5131</b>	<b>Beban Pensiun dan Uang Tunggu</b>
<b>51311</b>	<b>Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara</b>
513111	Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pensiun PNS Pusat dan uang tunggu bagi PNS yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
513112	Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS Daerah
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban pensiun PNS Daerah dan uang tunggu bagi PNS Daerah yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
513113	Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Kemhan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk pembayaran Beban pensiun PNS TNI/Kemhan dan uang tunggu bagi PNS TNI/Kemhan yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
513114	Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pensiun PNS Polri dan uang tunggu bagi PNS Polri yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
513115	Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS Eks Pegadaian
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pensiun PNS Eks Pegadaian dan uang tunggu bagi PNS Daerah yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
<b>51312</b>	<b>Beban Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri</b>
513121	Beban Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (Lama)
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pensiun TNI/Polri yang pensiun sebelum 1 April 1989.
513122	Beban Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Kemhan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pensiun Prajurit TNI dan uang tunggu bagi Prajurit TNI yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
513123	Beban Pensiun dan Uang Tunggu Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pensiun anggota Polri dan uang tunggu bagi anggota Polri yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
<b>51313</b>	<b>Beban Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara</b>
513131	Beban Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pensiun dan uang tunggu bagi Pejabat Negara yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
513132	Beban Pensiun dan Uang Tunggu Hakim
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pensiun dan uang tunggu bagi Hakim yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun.
<b>51314</b>	<b>Beban Kontribusi APBN sebagai pendanaan bersama dalam pembayaran pensiun eks PNS Kemhub pada PT KAI</b>
513141	Kontribusi APBN Sebagai Pendanaan Bersama Dalam Pembayaran Pensiun Eks PNS Kemhub pada PT KAI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pensiun eks PNS Kementerian Perhubungan pada PT Kereta Api sebagai pelaksanaan dari PP No 64 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia.
<b>51315</b>	<b>Beban Pensiu Veteran dan PKRI/KNIP</b>
513151	Beban Tunjangan Veteran
	Digunakan mencatat pengakuan beban tunjangan veteran RI.
513152	Beban Dana Kehormatan Veteran
	Digunakan mencatat pengakuan beban Dana Kehormatan Veteran.
513153	Beban Tunjangan PKRI dan KNIP
	Digunakan mencatat pengakuan beban tunjangan Pejuang Kemerdekaan Republik

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Indonesia (PKRI) dan Komite Nasional Indonesia Pusat.
<b>51316</b>	<b>Beban Tunjangan Hari Tua</b>
513161	Beban Tunjangan Hari Tua ( <i>Unfunded Liability</i> )
	Digunakan mencatat pengakuan beban yang atas kewajiban pemerintah berupa <i>Unfunded Liability</i> (kekurangan Pendanaan) atas kenaikan Gaji Pokok Pegawai
<b>5132</b>	<b>Beban Program Jaminan Sosial Pegawai</b>
<b>51321</b>	<b>Beban Askes PNS/Pejabat Negara</b>
513211	Beban Askes PNS
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas Iuran Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan Asuransi Kesehatan PNS.
513212	Beban Askes Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Askes Pejabat Negara.
<b>51322</b>	<b>Beban Askes Penerima Pensiun</b>
513221	Beban Askes Penerima Pensiun
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas Iuran Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Penerima Pensiun.
<b>51323</b>	<b>Beban Askes TNI/Kemhan</b>
513231	Beban Askes TNI/Kemhan
	Digunakan mencatat pengakuan beban Askes TNI/Kemhan.
<b>51324</b>	<b>Beban Askes Polri</b>
513241	Beban Askes Polri
	Digunakan mencatat pengakuan beban Askes Polri.
<b>51325</b>	<b>Beban Askes Veteran</b>
513251	Beban Askes Veteran
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas iuran kesehatan dalam rangka penyelenggaraan asuransi kesehatan veteran Penerima Tunjangan Veteran yang ditanggung pemerintah pusat.
<b>51326</b>	<b>Beban Katastropik</b>
513261	Beban Katastropik
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban katastropik.
<b>51327</b>	<b>Beban Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai</b>
513271	Beban Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai, dikarenakan tanggung jawab pemerintah sebagai pemberi kerja penyelenggara negara.
<b>51328</b>	<b>Beban Program Jaminan Kematian Pegawai</b>
513281	Beban Program Jaminan Kematian Pegawai
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Program Jaminan Kematian Pegawai, dikarenakan tanggung jawab pemerintah sebagai pemberi kerja penyelenggara negara.
<b>5133</b>	<b>Beban Tunjangan Kesehatan Veteran</b>
<b>51331</b>	<b>Beban Tunjangan Kesehatan Veteran</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
513311	Beban Tunjangan Kesehatan Veteran  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas iuran kesehatan dalam rangka penyelenggaraan asuransi kesehatan veteran Non Tuvet yang ditanggung pemerintah pusat.
<b>5134</b>	<b>Beban Cadangan Perubahan Sharing</b>
<b>51341</b>	<b>Beban Cadangan Perubahan Sharing</b>
513411	Beban Cadangan Perubahan <i>Sharing</i>  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban cadangan perubahan <i>sharing</i> kepada pegawai.
<b>52</b>	<b>BEBAN BARANG DAN BARANG</b>
<b>521</b>	<b>BEBAN BARANG</b>
<b>5211</b>	<b>Beban Barang Operasional</b>
<b>52111</b>	<b>Beban Barang Operasional</b>
521111	Beban Keperluan Perkantoran  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional Kementerian negara/ lembaga, namun tidak menghasilkan barang persediaan yang terdiri antara lain : <ul style="list-style-type: none"><li>- Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu langganan surat kabar/ berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan tamu.</li><li>- Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya satpam/pengaman kantor, cleaning service, sopir, tenaga lepas (yang dipekerjakan secara kontraktual), telex, internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan penggantian sertifikat tanah yang hilang, pembayaran PBB.</li><li>- Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan/penggantian inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/satker di bawah nilai kapitalisasi.</li></ul>
521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengadaan bahan makanan.
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengadaan bahan makanan/ minuman/ obat-obatan yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional kepada pegawai.
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas Pengiriman surat menyurat dalam rangka kedinasan yang dibayarkan oleh Kementerian Negara/lembaga.
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja  Digunakan untuk mencatat mencatat pengakuan beban atas honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja seperti, honor pejabat kuasa pengguna anggaran, honor pejabat pembuat komitmen, honor pejabat penguji SPP dan penanda tangan SPM, Honor Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka, Honor Staf Pengelola Keuangan, Honor Pengelola PNBP (honor atasan langsung, bendahara dan sekretariat), honor pengelola satuan kerja(yang mengelola gaji pada Kementerian Pertahanan), honor Tim SAI (Pengelola SAK dan SIMAK-BMN). Honor Operasional Satuan Kerja merupakan honor yang menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan dan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	pembayaran honornya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran.
521116	Beban Keperluan Perkantoran Atase Pertahanan Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Keperluan Perkantoran Atase Pertahanan Republik Indonesia di Luar Negeri yang tidak menghasilkan barang persediaan.
521119	Beban Barang Operasional Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban barang operasional yang tidak dapat ditampung dalam akun dalam kelompok Akun Beban Barang Operasional dalam rangka kegiatan operasional satker dan tidak menghasilkan barang persediaan.
<b>52112</b>	<b>Beban Barang Operasional kepada BLU</b>
521121	Beban Barang Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban barang operasional yang penyedia barang/rekanannya adalah BLU yang berada dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga. Akun beban ini akan dieliminasi pada Laporan Keuangan Konsolidasian tingkat Kementerian Negara/Lembaga.
521122	Beban Barang Operasional Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban barang operasional yang penyedia barang/rekanannya adalah BLU yang berada pada Kementerian Negara/Lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Pusat. Akun beban ini akan dieliminasi pada Laporan Keuangan Konsolidasian tingkat Pemerintah Pusat (LKPP).
<b>5212</b>	<b>Beban Barang Non Operasional</b>
<b>52121</b>	<b>Beban Barang Non Operasional</b>
521211	Beban Bahan
	Pengeluaran yang digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsumsi/bahan makanan;</li> <li>- Dokumentasi; Spanduk;</li> <li>- Biaya fotokopi;</li> </ul> yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti pameran, seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain lain yang terkait langsung dengan output suatu kegiatan dan tidak menghasilkan barang persediaan.
521212	Beban Barang Transito
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban barang pada satuan kerja-satuan kerja yang baru dibentuk /UPT termasuk di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi atau satker yang tidak melekat pada Bagian Anggaran / Kementerian Negara / Lembaga serta bisa digunakan oleh satker lain yang telah diberikan persetujuan oleh Menkeu.
521213	Beban Honor Output Kegiatan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output seperti : honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluhan non PNS, Honor Tim Pelaksana Kegiatan (pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf sekretariat), Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pemeriksa Penerima Barang/Jasa, untuk pengadaan yang tidak menghasilkan Aset

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Tetap/Aset Lainnya, termasuk juga vakasi. Honor Output Kegiatan dapat digunakan untuk biaya honor yang timbul sehubungan dengan/dalam rangka penyerahan barang kepada masyarakat. Honor Output Kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun.
521214	Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan
	Digunakan untuk mencatat kerugian selisih kurs Uang Persediaan pada seluruh Kementerian/Lembaga.
521215	Beban Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun
	Digunakan untuk mencatat biaya yang diperlukan oleh PT. Taspen (Persero) dan PT. Asabri (Persero) untuk operasional penyelenggaraan pembayaran dana belanja Pensiun.
521216	Beban Pencairan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
	Digunakan untuk mencatat Beban Pencairan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH)
521217	Beban Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Kepada Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas denda keterlambatan pembayaran atas tagihan kepada negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pengenaan Denda Keterlambatan Pembayaran kepada Negara atas Tagihan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Belanja Negara.
521218	Beban dalam Rangka <i>Refund</i> Dana PHLN
	Digunakan untuk mencatat beban akibat kewajiban pemerintah untuk mengembalikan penarikan dana PHLN, termasuk penarikan dana PHLN yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan APBN yang dibiayai dari PHLN kepada pemberi PHLN.
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam akun lainnya dalam kelompok Akun Beban Barang Non Operasional. Beban Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya <i>Crash Program</i> . Beban Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk pemberian beasiswa kepada pegawai di lingkup K/L atau di luar lingkup satker. Beban Barang Non Operasional Lainnya tidak menghasilkan barang persediaan.
<b>52122</b>	<b>Beban Barang Non Operasional Kepada BLU</b>
521221	Beban Barang Non Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban barang non operasional yang menyedia barang/rekanannya adalah BLU yang berada dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga. Akun beban ini akan dieliminasi pada Laporan Keuangan Konsolidasian tingkat Kementerian Negara/Lembaga.
521222	Beban Barang Non Operasional Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban barang non operasional yang menyedia barang/rekanannya adalah BLU yang berada pada Kementerian Negara/Lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Pusat. Akun beban ini akan dieliminasi pada Laporan Keuangan Konsolidasian tingkat Pemerintah Pusat (LKPP).

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>52123</b>	<b>Beban Barang Bantuan Pemerintah</b>
521231	Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang  Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pemberian penghargaan dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
521232	Beban Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam bentuk uang  Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pemberian beasiswa Non PNS dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
521233	Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang  Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pemberian bantuan operasional dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
521234	Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk barang  Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Pemerintah untuk pemberian penghargaan dalam bentuk barang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.
<b>5215</b>	<b>Beban Barang Pengganti Pajak Dalam Rangka Hibah MCC</b>
<b>52151</b>	<b>Beban Barang Pengganti Pajak Pusat Dalam Rangka Hibah MCC</b>
521511	Beban Barang Pengganti PPN Dalam Rangka Hibah MCC  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Barang Pengganti PPN dalam rangka Hibah MCC ( <i>Millenium Challenge Corporation</i> ).
521512	Beban Barang Pengganti PPh Dalam Rangka Hibah MCC  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Barang Pengganti PPh dalam rangka Hibah MCC ( <i>Millenium Challenge Corporation</i> ).
521513	Beban Barang Pengganti Pajak Lainnya Dalam Rangka Hibah MCC  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban Barang Pengganti Pajak Lainnya dalam rangka Hibah MCC ( <i>Millenium Challenge Corporation</i> ).
<b>5217</b>	<b>Beban Kontribusi</b>
<b>52171</b>	<b>Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund</b>
521711	Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran Kerja Sama Internasional yang mencakup pembayaran iuran keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam organisasi internasional dan tidak menimbulkan hak suara di luar ketentuan Keputusan Presiden Nomor 64 tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia Dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia Pada Organisasi-Organisasi Internasional, yang dibiayai dari Bagian Anggaran BUN (999.99); dan pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional yang mencakup transaksi yang timbul sebagai akibat dari perjanjian-perjanjian antara pemerintah Indonesia

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	dengan pihak lain di dunia internasional dan dibiayai dari Bagian Anggaran BUN (999.99).
<b>52172</b>	<b>Beban Kontribusi Dukungan Pemerintah dan Ketersediaan Layanan</b>
521721	Beban Kontribusi Dana Dukungan Kelayakan ( <i>Viability Gap Fund</i> )
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran pemerintah yang merupakan dukungan pemerintah berupa kontribusi fiskal dalam bentuk tunai atas sebagian biaya pembangunan proyek yang dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam rangka penyediaan layanan infrastruktur yang terjangkau bagi masyarakat. Dibiayai dari Bagian Anggaran BUN (999.99).
521722	Beban Kontribusi Fasilitas Penyiapan Proyek ( <i>Project Development Facility</i> )
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas bantuan teknis penyiapan dan transaksi proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta bagi Penanggung Jawab Program Kegiatan untuk menghasilkan <i>Bankable Business Case Project</i> dan dapat mencapai <i>Financial Close</i> . Dibiayai dari Bagian Anggaran BUN (999.99).
521723	Beban Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )
	Pembayaran secara berkala kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana di tentukan dalam Perjanjian KPBU, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pembayaran ketersediaan layanan dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
<b>522</b>	<b>BEBAN JASA</b>
<b>5221</b>	<b>Beban Jasa</b>
<b>52211</b>	<b>Beban Langganan Daya dan Jasa</b>
522111	Beban Langganan Listrik
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban langganan listrik, termasuk Beban apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan listrik.
522112	Beban Langganan Telepon
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban langganan telepon, termasuk Beban apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan telepon.
522113	Beban Langganan Air
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban langganan air, termasuk Beban apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan air.
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban langganan daya dan jasa lainnya, termasuk Beban apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan daya dan jasa lainnya.
<b>52212</b>	<b>Beban Jasa Pos dan Giro</b>
522121	Beban Jasa Pos dan Giro
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban jasa perpendaharaan yang telah dilaksanakan oleh kantor pos diseluruh Indonesia.
<b>52213</b>	<b>Beban Jasa Konsultan</b>
522131	Beban Jasa Konsultan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban jasa konsultan secara kontraktual termasuk jasa pengacara yang outputnya tidak menghasilkan Aset Lainnya. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir ( <i>brainware</i> ).
<b>52214</b>	<b>Beban Sewa</b>
522141	Beban Sewa
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban sewa (misalnya sewa kantor/gedung/ruangan, atau sewa lainnya).
<b>52215</b>	<b>Beban Jasa Profesi</b>
522151	Beban Jasa Profesi
	Beban untuk mencatat pengakuan beban honorarium narasumber yang diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan mengacu pada ketentuan tentang standar biaya.
<b>52216</b>	<b>Beban Jasa kepada BLU</b>
522161	Beban Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban jasa yang penyedia jasa/rekanannya adalah BLU yang berada dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga. Akun beban ini akan dieliminasi pada Laporan Keuangan Konsolidasian tingkat Kementerian Negara/Lembaga.
522162	Beban Jasa Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban jasa yang penyedia jasa/rekanannya adalah BLU yang berada pada Kementerian Negara/Lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Pusat. Akun beban ini akan dieliminasi pada Laporan Keuangan Konsolidasian tingkat Pemerintah Pusat (LKPP).
<b>52219</b>	<b>Beban Jasa Lainnya</b>
522191	Beban Jasa Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban jasa yang tidak bisa ditampung pada kelompok akun 52211, 52212, 52213, 52214, dan 52215. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan ( <i>skillware</i> ) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang
<b>523</b>	<b>BEBAN PEMELIHARAAN</b>
<b>5231</b>	<b>Beban Pemeliharaan</b>
<b>52311</b>	<b>Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengeluaran pemeliharaan/perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Biaya Umum. Dalam rangka mempertahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sampai dengan 2%; dan</li> <li>- Pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/kantor agar berada dalam kondisi normal (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan).</li> </ul>
523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi gedung dan bangunan atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk gedung dan bangunan tersebut sesuai dengan perjanjian dan untuk mencatat biaya lain-lain terkait pengasuransian

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan rumah dinas dan rumah jabatan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas para pejabat seperti istana negara, rumah Jabatan Menteri/ Gubernur/ Bupati/Walikota/Mahkamah Agung/Ketua Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Pimpinan/Ketua Lembaga Non Kementerian/ TNI/Polri/asrama yang terdapat di semua Kementerian/Lembaga Non Kementerian, termasuk TNI, Polri/Aula yang pisah dengan Gedung Kantor/Gedung Kesenian, Art Center/Gedung Museum beserta isinya termasuk taman, pagar agar berada dalam kondisi normal.
<b>52312</b>	<b>Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
523122	Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina  Digunakan untuk mencatat belanja atas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) yang digunakan untuk mendukung operasional Alutsista dan Non-Alutsista Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri. BMP antara lain terdiri dari Avgas, Avtur, MT-88, HSD, Karosine, Pertamax, Methanol. Serta Belanja atas SPO (Special Oil Non Pertamina), yaitu pelumas khusus yang tidak diproduksi oleh Pertamina tetapi sangat dibutuhkan untuk operasional alutsista TNI antara lain Petronas Hidroulic, Petronas Gear, Skydrol LD-4, Amazon Super Diesel, Penlube Hidrolic Oil, Shell Omala, Shell Gadus, Lafalf Gear Oil, Rocor Saphire, Nycolube 22, Neox 800, dst. SPO ini ada yang dapat dibeli di dalam negeri dan ada yang harus dibeli di Luar Negeri.
523124	Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor  Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi alat angkutan darat/apung/udara bermotor atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk alat angkutan darat/apung/udara bermotor tersebut sesuai dengan perjanjian dan untuk mencatat biaya lain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran lainnya untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
<b>52313</b>	<b>Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>
523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jalan dan jembatan agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi kriteria kapitalisasi jalan dan jembatan.
523132	Beban Pemeliharaan Irigasi  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan irigasi agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jaringan agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi jaringan.
523137	Beban Asuransi Jembatan
	Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi jembatan atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk jembatan tersebut sesuai dengan perjanjian dan untuk mencatat biaya lain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.
<b>52319</b>	<b>Beban Pemeliharaan Lainnya</b>
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pemeliharaan aset tetap selain gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan agar berada dalam kondisi normal termasuk pemeliharaan tempat ibadah, bangunan bersejarah seperti candi, bangunan peninggalan Belanda, Jepang yang belum diubah posisinya, kondisi bangunan/ Bangunan Keraton/Puri bekas kerajaan, bangunan cagar valam, cagar budaya, makam yang memiliki nilai sejarah, serta pemeliharaan atas aset lainnya yang bukan milik entitas tersebut baik itu milik entitas pemerintah pusat lain ataupun entitas di luar pemerintah pusat.
<b>524</b>	<b>BEBAN PERJALANAN DINAS</b>
<b>5241</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>
<b>52411</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota meliputi: a) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b) Pengumandahan (Detasering); c) Menempuh ujian dinas/ujian jabatan; d) Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan; e) Memperoleh pengobatan; f) Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; g) Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; h) Mengikuti diklat; i) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; j) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
524112	Beban Perjalanan Dinas Tetap
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk kegiatan pelayanan masyarakat. Contoh: Perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	penerang, penyuluhan agama, dan lainnya.
524113	<p>Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota</p> <p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap.</p> <p>Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;</li> <li>b) Pengumandahan (Detasering);</li> <li>c) Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;</li> <li>d) Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan;</li> <li>e) Memperoleh pengobatan;</li> <li>f) Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;</li> <li>g) Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;</li> <li>h) Mengikuti diklat;</li> <li>i) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.</li> </ul>
524114	<p>Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</p> <p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara maupun yang dilaksanakan di dalam kota satker peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh satker peserta, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;</li> <li>b) Biaya paket meeting (<i>halfday/fullday/fullboard</i>);</li> <li>c) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota termasuk uang saku rapat dalam kantor di luar jam kerja;</li> <li>d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.</li> </ul>
524119	<p>Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</p> <p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan di luar kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;</li> <li>b) Biaya paket meeting (<i>fullboard</i>);</li> <li>c) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;</li> <li>d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.</li> </ul>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
<b>5242</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri</b>
<b>52421</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri</b>
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pensiun, pengiriman jenazah untuk kepentingan dinas di / ke luar negeri.
524212	Beban Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh kementerian Negara/lembaga untuk kegiatan pelayanan warga di / ke luar negeri Contoh perjalanan dinas oleh tenaga ahli di kedutaan besar atau atase.
524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas lainnya dalam rangka pendukung kegiatan kementerian negara/lembaga yang tidak tertampung di dalam pos Beban perjalanan biasa dan tetap antara lain biaya perjalanan teknis operasional kegiatan bagi kedutaan besar atau atase di luar negeri.
<b>525</b>	<b>BEBAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)</b>
<b>5251</b>	<b>Beban Barang BLU</b>
<b>52511</b>	<b>Beban Barang dan Jasa BLU</b>
525111	Beban Gaji dan Tunjangan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban gaji dan tunjangan pegawai BLU.
525112	Beban Barang
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pembelian barang untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU.
525113	Beban Jasa
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas perolehan jasa untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU.
525114	Beban Pemeliharaan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pemeliharaan BMN BLU.
525115	Beban Perjalanan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas pegawai BLU.
525116	Beban atas Pengelolaan Endowment Fund
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas biaya-biaya yang digunakan untuk pengelolaan Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan oleh BLU Bidang Pendidikan atau yang ditunjuk pada Kementerian Keuangan sesuai maksud pembentukannya.
525117	Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
	Beban BLU yang digunakan dalam rangka pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
525118	Beban Ketersediaan Layanan BLU
	Pembayaran secara berkala kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	di tentukan dalam Perjanjian KPBU, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pembayaran ketersediaan layanan dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, yang dibayarkan oleh Satker BLU dengan sumber dana dari PNBP BLU.
525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas keperluan diluar akun 525111, 525112, 525113, 525114, 525115 dan 525116 untuk menunjang kegiatan BLU yang bersangkutan.
<b>52513</b>	<b>Beban Asuransi BMN di BLU</b>
525131	Beban Asuransi BMN Gedung dan Bangunan - BLU
	Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi gedung dan bangunan di BLU atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk gedung dan bangunan tersebut sesuai dengan perjanjian dan untuk mencatat biaya lain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.
525132	Beban Asuransi BMN Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor – BLU
	Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi alat angkutan darat/apung/udara bermotor di BLU atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk alat angkutan darat/apung/udara bermotor tersebut sesuai dengan perjanjian dan untuk mencatat biaya lain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.
525133	Beban Asuransi BMN Jembatan – BLU
	Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi jembatan di BLU atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk jembatan tersebut sesuai dengan perjanjian dan untuk mencatat biaya lain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.
<b>52514</b>	<b>Beban Barang dan Jasa BLU kepada BLU Lain</b>
525141	Beban Barang BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
	Digunakan untuk mencatat pembelian barang untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU yang penyedia barang/rekanannya adalah BLU lain yang berada dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga.
525142	Beban Barang BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain
	Digunakan untuk mencatat pembelian barang untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU Lain yang berada pada Kementerian Negara/Lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Pusat.
525143	Beban Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
	Digunakan untuk mencatat perolehan jasa untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU yang penyedia jasa/rekanannya adalah BLU lain yang berada dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga.
525144	Beban Jasa BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain
	Digunakan untuk mencatat perolehan jasa untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU yang penyedia jasa/rekanannya adalah BLU Lain yang berada pada Kementerian Negara/Lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Pusat.
<b>526</b>	<b>BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA</b>
<b>5261</b>	<b>Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>52611</b>	<b>Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda</b>
526111	Beban Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengadaan barang berupa tanah oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.
526112	Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengadaan barang berupa peralatan dan mesin oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.
526113	Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengadaan Barang berupa Gedung dan Bangunan oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.
526114	Beban Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda  Digunakan untuk pengadaan Barang berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.
526115	Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengadaan Barang Fisik Lainnya oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, termasuk Beban barang fisik lain Tugas Pembantuan.
<b>52612</b>	<b>Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang</b>
526121	Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang  Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Tanah untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
526122	Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang  Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Peralatan Dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
526123	Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Gedung Dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk gedung/bangunan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
526124	Beban Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Bantuan Pemerintah untuk pengadaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
<b>5262</b>	<b>Beban Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah</b>
<b>52621</b>	<b>Beban Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah</b>
526211	Beban Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembelian/pengadaan barang terkait dengan kegiatan pendukung atas kegiatan utama Dana Dekonsentrasi. Pembelian/Pengadaan tersebut menghasilkan BMN untuk diserahkan kepada pemerintah daerah melalui SKPD. Apabila aset itu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan, belum diserahkan ke pemda, atau pemda tidak bersedia menerima, maka aset dimaksud harus direklasifikasi dari Persediaan menjadi Aset Tetap (AT).
526212	Beban Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembelian/pengadaan barang terkait dengan kegiatan pendukung atas kegiatan utama Dana Tugas Pembantuan. Pembelian/Pengadaan tersebut menghasilkan BMN untuk diserahkan kepada pemerintah daerah melalui SKPD. Apabila aset itu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan, belum diserahkan ke pemda, atau pemda tidak bersedia menerima, maka aset dimaksud harus direklasifikasi dari Persediaan menjadi Aset Tetap (AT).
<b>5263</b>	<b>Beban Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda</b>
<b>52631</b>	<b>Beban Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda</b>
526311	Beban Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
	Digunakan untuk mencatat pengeluaran barang bantuan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk barang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
526312	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Beban Barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dalam bentuk uang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, termasuk Rumah Aspirasi Anggota DPR. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
<b>527</b>	<b>BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN</b>
<b>5271</b>	<b>Beban Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden</b>
<b>52711</b>	<b>Beban Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden</b>
527111	Beban Tanah untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Tanah untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia.
527112	Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia.
527113	Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia.
<b>54</b>	<b>BEBAN PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG</b>
<b>541</b>	<b>BEBAN PEMBAYARAN BUNGA UTANG</b>
<b>5411</b>	<b>Beban Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Pendek</b>
<b>54111</b>	<b>Beban Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara</b>
541111	Beban Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara – Rupiah
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bunga terhadap penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan surat Berharga lainnya.
541112	Beban Pembayaran Kupon SBN-TDR
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban kupon SBN pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
541113	Beban Pembayaran Bunga Repo - TDR
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bunga transaksi repo pada <i>Treasury Dealing Room</i> .
541119	Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembayaran biaya/kewajiban pemerintah lainnya terhadap bunga Surat Perbendaharaan Negara.
<b>54112</b>	<b>Beban Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara-Valas</b>
541121	Beban Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara-Valas
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara-Valas.
541122	Beban Pembayaran Kupon SBN Valas-TDR
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban kupon SBN Valas pada transaksi <i>Treasury Dealing Room</i> .
541123	Beban Pembayaran Bunga Repo Valas-TDR
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bunga repo valas pada transaksi <i>Treasury Dealing Room</i> .
541129	Beban Pembayaran Biaya/ Kewajiban Lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara - Valas
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Biaya/ Kewajiban Lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara - Valas.
<b>5412</b>	<b>Beban Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang</b>
<b>54121</b>	<b>Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara</b>
541211	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bunga Obligasi Negara - Rupiah yang harus dibayar oleh pemerintah.
541219	Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara
	Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara.
<b>54122</b>	<b>Beban Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang Lainnya</b>
541221	Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan.
541229	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara Lainnya.
<b>54123</b>	<b>Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri</b>
541231	Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri.
541232	Beban Biaya/Kewajiban Lainnya terhadap Pinjaman Dalam Negeri.
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Biaya/Kewajiban Lainnya terhadap Pinjaman DN.
<b>54124</b>	<b>Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Dalam Negeri</b>
541241	Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Dalam Negeri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Dalam Negeri.
<b>54125</b>	<b>Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas</b>
541251	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
541259	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara.
<b>5413</b>	<b>Beban Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara</b>
<b>54131</b>	<b>Beban Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang</b>
541311	Beban Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang
541312	Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembayaran biaya/kewajiban lainnya Imbalan SSBN Jangka Panjang.
<b>54132</b>	<b>Beban Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek</b>
541321	Beban Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembayaran Imbalan Surat berharga Syariah Negara Jangka Pendek.
541322	Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembayaran biaya/kewajiban lainnya Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek.
<b>54133</b>	<b>Beban Pembayaran Imbalan SPN Syariah</b>
541331	Beban Pembayaran Imbalan SPN Syariah
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Imbalan SPN Syariah.
541332	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya-Imbalan SPN Syariah
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya-Imbalan SPN Syariah.
<b>54134</b>	<b>Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas</b>
541341	Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas.
541342	Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas.
<b>54135</b>	<b>Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek Valas</b>
541351	Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek Valas
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek Valas.
541352	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Imbalan SBSN Jangka Pendek Valas
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Imbalan SBSN Jangka Pendek Valas.
<b>5414</b>	<b>Beban Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang</b>
<b>54141</b>	<b>Beban Bunga Pinjaman program</b>
541411	Beban Bunga Pinjaman Program

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bunga pinjaman program atau nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan.
541419	Beban Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran biaya/kewajiban pemerintah lainnya terhadap utang luar negeri jangka panjang dalam rangka pinjaman program.
<b>54142</b>	<b>Beban Bunga Pinjaman proyek</b>
541421	Beban Bunga Pinjaman Proyek
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bunga pinjaman proyek atau nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri di luar pinjaman program.
541429	Beban Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas biaya/kewajiban pemerintah lainnya terhadap utang luar negeri jangka panjang dalam rangka pinjaman proyek.
<b>54144</b>	<b>Beban Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman</b>
541441	Beban Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bunga terhadap utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program.
541442	Beban Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bunga terhadap utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek.
541449	Beban Biaya/Kewajiban Lainnya – Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas biaya/kewajiban lainnya - bunga utang LN melalui penjadualan kembali pinjaman.
<b>54146</b>	<b>Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri</b>
541461	Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri.
<b>542</b>	<b>BEBAN PEMBAYARAN DISCOUNT SURAT UTANG NEGARA</b>
<b>5421</b>	<b>Beban Pembayaran Discount Surat Utang Negara</b>
<b>54211</b>	<b>Beban Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara</b>
542111	Beban Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan discount yang diberikan atas penerbitan surat perbendaharaan Negara.
542119	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat Perbendaharaan Negara.
<b>54212</b>	<b>Beban Pembayaran Discount Obligasi Negara</b>
542121	Beban Pembayaran Discount Obligasi Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan discount yang diberikan atas penerbitan obligasi Negara.
542129	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Obligasi Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas Biaya/kewajiban lainnya -

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Discount Obligasi Negara.
<b>54213</b>	<b>Beban Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Valas</b>
542131	Beban Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Valas
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Valas.
542139	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Valas
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Surat Perbendaharaan Negara Valas.
<b>54214</b>	<b>Beban Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas</b>
542141	Beban Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas.
542149	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Obligasi Negara Valas
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya – Discount Obligasi Negara Valas.
<b>544</b>	<b>BEBAN PEMBAYARAN LOSS ON BOND REDEMPTION</b>
<b>5441</b>	<b>Beban Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara</b>
<b>54411</b>	<b>Beban Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara</b>
544111	Beban Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban yang timbul dari selisih lebih <i>clean price</i> yang dibayar Pemerintah pada saat pembelian kembali SUN ( <i>buyback</i> ) dengan <i>carrying value</i> SUN. <i>Carrying value</i> SUN ialah nilai nominal SUN setelah dikurangi atau ditambah <i>unamortized discount</i> atau <i>premium</i> .
544112	Beban Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali SBSN
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali SBSN.
544113	Beban Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valas
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban <i>Pembayaran Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valas.
544114	Beban Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali SBSN Valas
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali SBSN Valas.
<b>547</b>	<b>BEBAN DENDA</b>
<b>5471</b>	<b>Beban Pembayaran Denda</b>
<b>54711</b>	<b>Beban Pembayaran Imbalan Bunga</b>
547112	Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas imbalan bunga atas pinjaman perbankan.
547113	Beban Pembayaran Imbalan Bunga Bea dan Cukai (SPM-IB Bea dan Cukai)
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban imbalan bunga atas kelalaian pemerintah membayar kembali pengembalian kelebihan bea dan cukai.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
547119	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas biaya/kewajiban lainnya - Bunga dalam negeri jangka pendek lainnya.
<b>55</b>	<b>BEBAN SUBSIDI</b>
<b>551</b>	<b>BEBAN SUBSIDI PERUSAHAAN NEGARA</b>
<b>5511</b>	<b>Beban Subsidi Lembaga Keuangan</b>
<b>55111</b>	<b>Beban Subsidi Lembaga Keuangan</b>  551111 Beban Subsidi Lembaga Keuangan  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi melalui lembaga keuangan misalnya subsidi bunga KPR.
<b>5512</b>	<b>Beban Subsidi Lembaga Non-Keuangan – BBM</b>
<b>55121</b>	<b>Beban Subsidi BBM</b>
551211	Beban Subsidi Avgas  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran negara dalam bentuk subsidi avgas yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan avgas.
551212	Beban Subsidi Avtur  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran negara dalam bentuk subsidi avtur yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan avtur.
551213	Beban Subsidi Premium  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran negara dalam bentuk subsidi premium yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan premium.
551214	Beban Subsidi Minyak Bakar  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak bakar yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak bakar.
551215	Beban Subsidi Minyak Solar  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak solar yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak solar.
551216	Beban Subsidi Minyak Diesel  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak diesel yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak diesel.
551217	Beban Subsidi Minyak Tanah  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak tanah yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak tanah.
551218	Beban Subsidi Elpiji  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak tanah yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan elpiji.
551219	Beban Subsidi <i>Liquefied Gas for Vehicle (LGV)</i>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran negara dalam bentuk subsidi LGV yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan LGV.
<b>5513</b>	<b>Beban Subsidi Lembaga Non-Keuangan – Non BBM</b>
<b>55131</b>	<b>Beban Subsidi Non-BBM – Harga/Biaya</b>
551311	Beban Subsidi Pangan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran subsidi selisih harga yang diberikan kepada BULOG atas penyaluran beras OPK kepada Keluarga Miskin dengan perhitungan berdasarkan selisih antara harga jual beras OPK dengan Harga Pokok Beras BULOG.
551312	Beban Subsidi Listrik
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran subsidi dalam rangka menutup defisit arus kas operasi PT. PLN (Persero). Subsidi ini diberikan akibat harga jual listrik yang ditentukan oleh Pemerintah lebih rendah dibandingkan biaya produksi listrik oleh PT. PLN (Persero).
551313	Beban Subsidi Benih
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran subsidi selisih harga benih yang diberikan kepada petani melalui BUMN Benih terhadap penjualan benih padi dan kedele dibanding dengan biaya produksinya.
551314	Beban Subsidi Obat
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran subsidi selisih kurs atas pembelian impor bahan baku obat yang digunakan untuk pembuatan obat-obatan generik, alat kesehatan dan Keluarga Berencana.
551315	Beban Subsidi Gula
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran subsidi harga yang diberikan kepada petani melalui Pabrik Gula atas selisih harga jual gula petani dengan provenue yang ditetapkan oleh Pemerintah.
551316	Beban Subsidi Pupuk
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran subsidi harga yang diberikan kepada petani melalui Pabrik Pupuk atas selisih harga jual pupuk dengan provenue yang ditetapkan oleh Pemerintah.
551317	Beban Subsidi Perawatan Beras
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Subsidi Perawatan Beras.
551318	Beban Subsidi Pengawasan Pupuk
	Digunakan untuk mencatat Beban Subsidi Pengawasan Pupuk.
551319	Beban Subsidi Harga/Biaya Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran subsidi selain subsidi pupuk, subsidi gula, subsidi obat, subsidi benih, subsidi pangan dan subsidi listrik.
<b>55132</b>	<b>Beban Subsidi Non-BBM – Pajak</b>
551321	Beban Subsidi PPh-DTP
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pengeluaran negara atas pembayaran PPh yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.
551323	Beban Subsidi BM-DTP
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pengeluaran negara atas pembayaran BM yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	perundangan perpajakan yang berlaku.
<b>55133</b>	<b>Beban Subsidi Non-BBM – Lainnya</b>
551331	Beban Subsidi Haji
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi selisih kurs yang diberikan kepada jamaah haji terhadap perubahan kurs dibandingkan kurs dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
551332	Beban Subsidi Kendaraan Bermotor
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran subsidi bunga kredit yang diberikan kepada anggota lembaga tinggi negara (DPR, DPA, MA, BPK) serta para pejabat eselon dalam Pemerintahan untuk pengadaan kendaraan perorangan.
551339	Beban Subsidi Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran subsidi lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
<b>55134</b>	<b>Beban Subsidi Non BBM - Harga/Biaya II</b>
551341	Beban Subsidi Minyak Goreng
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi harga minyak goreng, berupa PPN penjualan minyak goreng yang ditanggung pemerintah, untuk mengendalikan harga minyak goreng agar terjangkau masyarakat.
<b>5514</b>	<b>Beban Subsidi Lembaga Non-Keuangan – PSO</b>
<b>55141</b>	<b>Beban Subsidi dalam Rangka PSO</b>
551411	Beban Subsidi PT KAI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pengeluaran bantuan kepada PT. Kereta Api Indonesia.
551412	Beban Subsidi PT PELNI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pengeluaran bantuan kepada PT. PELNI.
551413	Beban Subsidi PT Pos Indonesia
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pengeluaran bantuan kepada PT. Pos Indonesia.
551414	Beban Subsidi TVRI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pengeluaran bantuan kepada TVRI.
551415	Beban Subsidi BULOG
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pengeluaran bantuan kepada BULOG.
551419	Beban Subsidi Dalam Rangka PSO Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban pengeluaran bantuan dalam rangka PSO lainnya.
<b>552</b>	<b>BEBAN SUBSIDI PERUSAHAAN SWASTA</b>
<b>5521</b>	<b>Beban Subsidi Lembaga Keuangan</b>
<b>55211</b>	<b>Beban Subsidi Lembaga Keuangan</b>
552111	Beban Subsidi Lembaga Keuangan
	Beban Subsidi Lembaga Keuangan
552112	Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi bantuan uang muka yang

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	harus dibayar oleh Pemerintah kepada Bank Pelaksana penyalur bantuan uang muka perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
<b>55212</b>	<b>Beban Subsidi – Bunga Kredit</b>
552121	Beban Subsidi Bunga KUT
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Usaha Tani (KUT).
552122	Beban Subsidi Bunga KOP PIR
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Koperasi Anggota Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi.
552123	Beban Subsidi Bunga KOP
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Koperasi (KKop).
552124	Beban Subsidi Bunga KOP PRIM
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA).
552125	Beban Subsidi Bunga KPR
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap kredit pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
552126	Beban Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi bunga yang dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi.
552127	Beban Subsidi Bunga Kredit Program Eks KLBI
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Program eks KLBI.
552128	Beban Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Program Biofuel (Revitalisasi Perkebunan).
552129	Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Program Lainnya.
<b>55213</b>	<b>Beban Subsidi Imbalan Jasa Peminjam dan Risk Sharing</b>
552131	Beban Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi imbalan jasa penjaminan KUR kepada lembaga penjaminan yang seharusnya dibayar oleh penerima KUR.
552132	Beban Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi klaim resiko yang harus dibayar pemerintah kepada Perusahaan Penjaminan terhadap Penyaluran KKP (KKP).
<b>55214</b>	<b>Beban Subsidi Kredit Program II</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
552141	Beban Subdidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Pemberian Pinjaman Kepada Pengusaha NAD dan Nias.
552142	Beban Subsidi Kredit Sektor Peternakan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS).
552143	Beban Subsidi Kredit Resi Gudang
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban subsidi bunga yang harus dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap Subsidi Resi Gudang.
<b>5522</b>	<b>Beban Subsidi Lembaga Non-Keuangan</b>
<b>55221</b>	<b>Beban Subsidi Lembaga Non Keuangan</b>
552211	Beban Subsidi Lembaga Non Keuangan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada organisasi internasional.
<b>553</b>	<b>BEBAN SUBSIDI - ESTIMASI</b>
<b>5531</b>	<b>Beban Subsidi - Estimasi</b>
<b>55311</b>	<b>Beban Subsidi - Estimasi</b>
553111	Beban Subsidi - Estimasi
	Digunakan untuk mencatat Beban Subsidi - Estimasi
<b>56</b>	<b>BEBAN HIBAH</b>
<b>561</b>	<b>BEBAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH LUAR NEGERI</b>
<b>5611</b>	<b>Beban Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri</b>
<b>56111</b>	<b>Beban Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri</b>
561111	Beban Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain.
<b>562</b>	<b>BEBAN HIBAH KEPADA ORGANISASI INTERNASIONAL</b>
<b>5621</b>	<b>Beban Hibah Kepada Organisasi Internasional</b>
<b>56211</b>	<b>Beban Hibah Kepada Organisasi Internasional</b>
562111	Beban Hibah Kepada Organisasi Internasional
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada organisasi internasional.
<b>563</b>	<b>BEBAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH</b>
<b>5631</b>	<b>Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah</b>
<b>56311</b>	<b>Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah</b>
563111	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada pemerintah daerah.
<b>56312</b>	<b>Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
563121	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri.
563122	Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri.
563123	Beban Hibah Surat Berharga kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Hibah Surat Berharga kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri.
<b>565</b>	<b>BEBAN HIBAH LAINNYA</b>
<b>5651</b>	<b>Beban Hibah Lainnya</b>
<b>56511</b>	<b>Beban Hibah Lainnya</b>
565111	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Terkait Pendapatan/Belanja Hibah
	Digunakan untuk mencatat beban pembayaran biaya yang terkait dengan pendapatan dan belanja hibah baik DN/LN. Biaya-biaya dimaksud antara lain banking commission, bank chargers dan fee lainnya. Akun ini hanya digunakan pada BA Es 999.02 (Pengelolaan Hibah).
<b>57</b>	<b>BEBAN BANTUAN SOSIAL</b>
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
<b>571</b>	<b>BEBAN BANTUAN SOSIAL UNTUK REHABILITASI SOSIAL</b>
<b>5711</b>	<b>Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial</b>
<b>57111</b>	<b>Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial</b>
571111	Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
571112	Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Akun ini dicatat dengan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.
571113	Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Jasa
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Akun ini dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
<b>572</b>	<b>BEBAN BANTUAN SOSIAL UNTUK JAMINAN SOSIAL</b>
<b>5721</b>	<b>Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial</b>
<b>57211</b>	<b>Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
572111	Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah.
572112	Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Barang  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah. Akun ini dicatat dengan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.
572113	Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Jasa  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah. Akun ini dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.
<b>573</b>	<b>BEBAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>
<b>5731</b>	<b>Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial</b>
<b>57311</b>	<b>Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial</b>
573111	Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk uang yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kemauan dan kemampuan;</li> <li>2. Penggalian potensi dan sumber daya;</li> <li>3. Penggalian nilai-nilai dasar;</li> <li>4. Pemberian akses; dan/atau</li> <li>5. Pemberian bantuan usaha.</li> </ol>
573112	Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang  Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kemauan dan kemampuan;</li> <li>2. Penggalian potensi dan sumber daya;</li> </ol>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	<p>3. Penggalian nilai-nilai dasar;          4. Pemberian akses; dan/atau          5. Pemberian bantuan usaha.          Akun ini dicatat dengan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.</p>
573113	<p>Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Jasa</p> <p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kemauan dan kemampuan;</li> <li>2. Penggalian potensi dan sumber daya;</li> <li>3. Penggalian nilai-nilai dasar;</li> <li>4. Pemberian akses; dan/atau</li> <li>5. Pemberian bantuan usaha.</li> </ol> <p>Akun ini dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.</p>
<b>574</b>	<b>BEBAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL</b>
<b>5741</b>	<b>Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial</b>
<b>57411</b>	<b>Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial</b>
574111	<p>Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang</p> <p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bantuan langsung;</li> <li>2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau</li> <li>3. penguatan kelembagaan.</li> </ol> </li> <li>- Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.</li> <li>- Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.</li> </ul>
574112	<p>Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang</p> <p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bantuan langsung;</li> <li>2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau</li> <li>3. penguatan kelembagaan.</li> </ol> </li> <li>- Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.</li> <li>- Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.</li> </ul> <p>Akun ini dicatat dengan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.</p>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
574113	<p>Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Jasa</p> <p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bantuan langsung;</li> <li>2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau</li> <li>3. penguatan kelembagaan.</li> </ol> </li> <li>- Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.</li> <li>- Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.</li> </ul> <p>Akun ini dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.</p>
<b>575</b>	<b>BEBAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN</b>
<b>5751</b>	<b>Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan</b>
<b>57511</b>	<b>Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan</b>
575111	<p>Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang</p> <p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk uang yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk a.l:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyaluran dan bimbingan sosial Pelayanan sosial;</li> <li>- Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau</li> <li>- Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.</li> </ul>
575112	<p>Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang</p> <p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk a.l:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyaluran dan bimbingan sosial Pelayanan sosial;</li> <li>- Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau</li> <li>- Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.</li> </ul> <p>Akun ini dicatat dengan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.</p>
575113	<p>Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Jasa</p> <p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk a.l:</p>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyuluhan dan bimbingan sosial Pelayanan sosial;</li> <li>- Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;</li> <li>- Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau</li> <li>- Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.</li> </ul> <p>Akun ini dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.</p>
<b>576</b>	<b>BEBAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA</b>
<b>5761</b>	<b>Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana</b>
<b>57611</b>	<b>Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana</b>
576111	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang
	<p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk uang yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan/mitigasi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi. Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam bentuk antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;</li> <li>- Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian;</li> <li>- Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;</li> <li>- Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;</li> <li>- Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;</li> <li>- Santunan duka cita; dan</li> <li>- Santunan kecacatan.</li> </ul>
576112	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Barang
	<p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan/mitigasi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi. Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam bentuk antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;</li> <li>- Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian;</li> <li>- Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;</li> <li>- Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;</li> <li>- Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;</li> <li>- Santunan duka cita; dan</li> <li>- Santunan kecacatan.</li> </ul> <p>Akun ini dicatat dengan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.</p>
576113	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Jasa
	<p>Digunakan untuk mencatat pengakuan beban bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan/mitigasi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi. Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam bentuk antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;</li> </ul>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian;</li> <li>- Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;</li> <li>- Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;</li> <li>- Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;</li> <li>- Santunan duka cita; dan</li> <li>- Santunan kecacatan.</li> </ul> <p>Akun ini dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya.</p>
<b>58</b>	<b>BEBAN LAIN-LAIN</b>
<b>581</b>	<b>BEBAN LAIN-LAIN</b>
<b>5811</b>	<b>Beban Lain-lain Dana Cadangan</b>
<b>58111</b>	<b>Beban Lain-lain Cadangan I</b>
581111	Beban Cadangan Umum
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran dalam rangka membentuk yang menggunakan dana cadangan umum.
581112	Beban Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi)
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran yang sifatnya darurat. Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Beban Lainnya).
581113	Beban Cadangan Dana Reboisasi
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran pembiayaan kegiatan dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana kehutanan.
581114	Beban Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/Polri
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban selisih harga beras PNS/TNI/POLRI bila terjadi kenaikan pembelian harga beras Pemerintah kepada BULOG.
581115	Beban Cadangan Kenaikan Harga Tanah (Land Capping)
	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran yang diberikan kepada Departemen Keuangan untuk membiayai kenaikan harga tanah pada saat pembebasan lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan tol.
581116	Beban Cadangan Risiko Perubahan Asumsi Makro
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Cadangan Risiko Perubahan Asumsi Makro.
581117	Beban Cadangan Stabilisasi Harga Pangan
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Cadangan Stabilisasi Harga Pangan.
581118	Beban Cadangan Risiko Lifting
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Cadangan Risiko Lifting.
581119	Beban Cadangan Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Cadangan Lainnya.
<b>58112</b>	<b>Beban Lain-lain Cadangan II</b>
581121	Beban Cadangan Fiskal Lainnya (Risiko Kenaikan TTL Listrik)
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Cadangan Fiskal Lainnya (Risiko Kenaikan TTL Listrik).

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
581122	Beban Cadangan Beras Pemerintah Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Cadangan Beras Pemerintah.
581123	Beban Cadangan Benih Nasional Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Cadangan Benih Nasional.
<b>5812</b>	<b>Beban Lain-lain Lembaga Non Kementerian</b>
<b>58121</b>	<b>Beban Lain-lain Lembaga Non Kementerian</b>
581211	Beban Lain-lain Lembaga Non Kementerian Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Lain-lain Lembaga Non Kementerian.
581212	Beban Operasional Kegiatan SKK Migas Digunakan untuk mencatat Beban Operasional Kegiatan SKK Migas.
<b>5813</b>	<b>Beban Lain-lain Jasa Pelayanan BUN</b>
<b>58131</b>	<b>Beban Lain-lain Jasa Pelayanan BUN</b>
581311	Beban Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran kepada Bank/Pos Persepsi dalam rangka pelaksanaan Treasury Single Account (TSA).
581312	Jasa Surveyor Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan survey yang dilakukan oleh pihak ketiga oleh Kementerian Negara/ Lembaga tertentu yang khusus dilakukan untuk keperluan tugas pokok fungsinya termasuk proses pengalihan ilmu/pembelajaran pada SDM K/L ybs dalam rangka survey tersebut.
581314	Jasa Pelayanan Bank Operasional Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembayaran kepada Bank Operasional atas layanan jasa yang telah diberikan dalam rangka kegiatan perpendaharaan (pengeluaran dan penerimaan anggaran) yang memakai Beban Jasa Pelayanan Perpendaharaan
581315	Beban Jasa Pelayanan Perpendaharaan Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran atas layanan jasa yang telah diberikan dalam rangka kegiatan perpendaharaan (pengeluaran dan penerimaan anggaran) yang memakai fasilitas PT Pos dan Giro serta pembayaran PPN BI RTGS/SWIFT, pembayaran bunga negatif, pembayaran PPN atas transaksi RTGS Bank Operasional, dan pembayaran imbalan jasa (fee) Bank Kustodian.
581316	Beban Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog.
581319	Beban Lain-lain Jasa Pelayanan BUN Lainnya Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Lain-lain Jasa Pelayanan BUN Lainnya.
<b>5814</b>	<b>Beban Lain-lain BUN</b>
<b>58141</b>	<b>Beban Lain-lain BUN</b>
581411	Beban Iuran ke Lembaga Internasional Digunakan untuk mencatat Beban Iuran ke Lembaga Internasional
581412	Beban Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
581413	Beban Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pembayaran terhadap klaim dari pihak ketiga.
581414	Beban Dana Penunjang (PHLN) Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pelaksanaan kegiatan Pemda yang bersumber dari PHLN, Sesuai dengan KMK No. 35 Tahun 2002 tentang Tatacara Pemberian dan Penatausahaan PHLN kepada Pemda.
581415	Beban Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN Digunakan untuk mencatat pengakuan beban rugi selisih kurs terealisasi dalam pengelolaan rekening milik BUN.
581417	Beban Kompensasi Kenaikan Harga BBM Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran yang digunakan untuk bantuan kepada masyarakat sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM.
581418	Beban Konversi BBM ke BBG untuk Transportasi Umum Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Konversi BBM ke BBG untuk Transportasi Umum.
581419	Beban Lain-lain BUN Lainnya Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Lain-lain BUN Lainnya.
<b>58142</b>	<b>Beban Lain-lain BUN II</b>
581421	Beban Selisih Harga SBN Digunakan untuk mencatat Beban Selisih Harga SBN.
581422	Beban karena Selisih Kurs Satker Perwakilan RI/ Atase Teknis BA Beban Lainnya Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban karena Selisih Kurs Satker Perwakilan RI/ Atase Teknis yang dialokasikan dari BA 999.08 (Belanja Lainnya).
<b>5815</b>	<b>Beban Lain-lain Tanggap Darurat</b>
<b>58151</b>	<b>Beban Lain-lain Tanggap Darurat</b>
581511	Beban Keperluan Mendesak/Tak Terduga Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban Keperluan Mendesak/Tak Terduga.
581512	Beban Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran dalam rangka tanggap darurat penanggulangan bencana.
<b>5816</b>	<b>Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D</b>
<b>58161</b>	<b>Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D</b>
581611	Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D dan Exotic Currency Selisih negatif transaksi belanja dalam valuta asing antara antara resume tagihan/invoice/SPP dengan SP2D. Serta realisasi piutang dan utang dari kurs yang berbeda serta selisih dari Exotic Currency.
<b>5819</b>	<b>Beban Lain-lain Lainnya</b>
<b>58191</b>	<b>Beban Lain-lain Lainnya</b>
581911	Beban Pemilu Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran pembiayaan kegiatan dalam rangka pemilu/sidang tahunan.
581919	Beban Lain-lain

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat pengakuan Beban lainnya.
<b>59</b>	<b>BEBAN PENYESUAIAN</b>
<b>591</b>	<b>BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP</b>
<b>5911</b>	<b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>
<b>59111</b>	<b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
	Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin. Transaksi ini terjadi di satker yang non BLU
<b>59112</b>	<b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU</b>
591121	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU
	Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin. Transaksi ini terjadi di satker BLU
<b>5912</b>	<b>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>
<b>59121</b>	<b>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
	Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Gedung dan Bangunan. Transaksi ini terjadi di satker yang non BLU
<b>59122</b>	<b>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU</b>
591221	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU
	Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Gedung dan Bangunan. Transaksi ini terjadi di satker BLU
<b>5913</b>	<b>Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>
<b>59131</b>	<b>Beban Penyusutan Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi</b>
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan
	Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Jalan dan Jembatan. Transaksi ini terjadi di satker Non BLU
591312	Beban Penyusutan Irigasi
	Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Irigasi. Transaksi ini terjadi di satker Non BLU
591313	Beban Penyusutan Jaringan
	Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Jaringan. Transaksi ini terjadi di satker Non BLU
<b>59132</b>	<b>Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU</b>
591321	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
	Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan. Transaksi ini terjadi di satker BLU
<b>5914</b>	<b>Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya</b>
<b>59141</b>	<b>Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya</b>
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
	Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap dalam kelompok aset lainnya. Transaksi ini terjadi di satker Non BLU
<b>59142</b>	<b>Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU</b>
591421	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Transaksi penyesuaian atas penyusutan aset tetap dalam kelompok aset lainnya. Transaksi ini terjadi di satker BLU
<b>592</b>	<b>BEBAN PENYUSUTAN ASET LAINNYA/AMORTISASI ASET LAINNYA</b>
<b>5921</b>	<b>Beban Amortisasi Aset Lainnya</b>
<b>59211</b>	<b>Beban Amortisasi Aset Lainnya</b>
592111	Beban Amortisasi Goodwill
	Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa Goodwill pada satker Non BLU
592112	Beban Amortisasi Hak Cipta
	Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa Hak Cipta pada satker Non BLU
592113	Beban Amortisasi Royalti
	Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa Royalti pada satker Non BLU
592114	Beban Amortisasi Paten
	Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa paten pada satker Non BLU
592115	Beban Amortisasi Software
	Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa software pada satker Non BLU
592116	Beban Amortisasi Lisensi
	Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa lisensi pada satker Non BLU
592117	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya
	Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset dalam kelompok aset tak berwujud lainnya pada satker Non BLU
592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan
	Digunakan untuk mencatat Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan
<b>59212</b>	<b>Beban Amortisasi Aset Lainnya-Badan Layanan Umum</b>
592121	Beban Amortisasi Software-Badan Layanan Umum
	Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa Software pada satker BLU
592122	Beban Amortisasi-Hak Cipta BLU
	Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa Hak Cipta pada satker BLU
592123	Beban Amortisasi-Royalti BLU
	Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa Royalti pada satker BLU
592124	Beban Amortisasi-Paten BLU
	Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset yang tidak berwujud berupa paten pada satker BLU
592125	Beban Amortisasi-Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum
	Transaksi penyesuaian untuk amortisasi aset dalam kelompok aset tak berwujud

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	lainnya pada satker BLU
592126	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan - BLU
	Digunakan untuk mencatat Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan – Satker BLU
<b>5922</b>	<b>Beban Penyusutan Aset Lainnya</b>
<b>59221</b>	<b>Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>
592211	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
	Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
<b>59222</b>	<b>Beban Penyusutan Aset Lain-lain K/L</b>
592221	Beban Penyusutan Aset Lain-lain
	Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset Lain-lain.
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah
	Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah.
<b>59223</b>	<b>Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN</b>
592231	Beban Penyusutan Aset Eks BPPN
	Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset Eks BPPN
592232	Beban Penyusutan Aset yang Diserahkan kepada PT. PPA
	Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset yang Diserahkan kepada PT. PPA.
592233	Beban Penyusutan Aset BUMN yang Belum Ditetapkan Statusnya
	Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset BUMN yang Belum Ditetapkan Statusnya.
592234	Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama
	Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
592235	Beban Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA
	Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA.
592236	Beban Penyusutan Aset Eks Pertamina
	Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset Eks Pertamina.
592237	Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor PKP2B
	Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor PKP2B.
592238	Beban Penyusutan Aset Idle yang Sudah Diserahkan ke DJKN
	Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset Idle yang Sudah Diserahkan ke DJKN.
592239	Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN
	Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset Lain-lain BUN.
<b>59224</b>	<b>Beban Penyusutan Aset Lain-lain BLU</b>
592241	Beban Penyusutan Aset Lain-lain BLU
	Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset Lain-lain BLU
592242	Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan BLU

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Transaksi penyesuaian untuk Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan BLU
<b>593</b>	<b>BEBAN PERSEDIAAN</b>
<b>5931</b>	<b>Beban Persediaan</b>
<b>59311</b>	<b>Beban Persediaan Bahan untuk Operasional</b>
593111	Beban Persediaan konsumsi Penggunaan persediaan dan berkurangnya nilai aset persediaan konsumsi karena sifat dan jenis barang
593112	Beban Persediaan amunisi penggunaan persediaan dan berkurangnya nilai aset persediaan amunisi karena sifat dan jenis barang
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan penggunaan persediaan dan berkurangnya nilai bahan pemeliharaan karena sifat dan jenis barang
593114	Beban Persediaan suku cadang penggunaan persediaan dan berkurangnya nilai aset persediaan suku cadang karena sifat dan jenis barang
<b>59312</b>	<b>Beban Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat</b>
593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges penggunaan persediaan dan berkurangnya nilai aset persediaan pita cukai, materai dan leges ke pihak lainnya
593122	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Penjualan atau penyerahan aset persediaan tanah bangunan ke pihak lainnya
593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Penjualan atau penyerahan aset persediaan hewan dan tanaman ke pihak lainnya
593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Penjualan atau penyerahan aset persediaan peralatan dan mesin ke pihak lainnya
593125	Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat Penjualan atau penyerahan aset persediaan jalan, irigasi dan jaringan ke pihak lainnya
593126	Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat Penjualan atau penyerahan aset persediaan aset tetap lainnya ke pihak lainnya
593127	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat Penjualan atau penyerahan aset persediaan aset lain-lain ke pihak lainnya
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat Penjualan atau penyerahan aset persediaan lainnya ke pihak lainnya
<b>59313</b>	<b>Beban Persediaan untuk proses produksi</b>
593131	Beban Persediaan bahan baku Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan bahan baku

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	ke pihak lainnya
593132	Beban Persediaan barang dalam proses
	Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan barang dalam proses ke pihak lainnya
<b>59314</b>	<b>Beban Persediaan Bahan Lainnya</b>
593141	Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga
	Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan untuk tujuan strategis ke pihak lainnya
593142	Beban Persediaan barang hasil sitaan
	Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan barang hasil sitaan ke pihak lainnya
593149	Beban persediaan lainnya
	Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan ke pihak lainnya
<b>5932</b>	<b>Beban Persediaan Badan Layanan Umum</b>
<b>59321</b>	<b>Beban Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa</b>
593211	Beban Persediaan BLU Pelayanan Kesehatan
	Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan BLU Pelayanan Kesehatan ke pihak lainnya
593212	Beban Persediaan BLU Pelayanan Pendidikan
	Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan BLU Pelayanan Pendidikan ke pihak lainnya
593213	Beban Persediaan BLU penunjang Konstruksi
	Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan BLU penunjang Konstruksi ke pihak lainnya
593214	Beban Persediaan BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
	Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi ke pihak lainnya
593215	Beban Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
	Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya ke pihak lainnya
<b>59322</b>	<b>Beban Persediaan BLU Pengelola Wilayah/Kawasan Tertentu</b>
593221	Beban Persediaan BLU Pengelola Kawasan Otorita
	Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan BLU Pengelola Kawasan Otorita ke pihak lainnya
593222	Beban Persediaan BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
	Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu ke pihak lainnya
593229	Beban Persediaan BLU Pengelola Kawasan Lainnya
	Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu ke pihak lainnya
<b>59323</b>	<b>Beban Persediaan BLU Pengelola Dana Khusus Masyarakat</b>
593231	Beban Persediaan BLU Pengelola Dana Investasi
	Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan BLU Pengelola Dana Investasi ke pihak lainnya

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
593232	Beban Persediaan BLU Pengelola Dana Bergulir
	Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan BLU Pengelola Dana Bergulir ke pihak lainnya
593239	Beban Persediaan BLU Pengelola Dana Lainnya
	Penggunaan persediaan, penjualan atau penyerahan aset persediaan BLU Pengelola Dana Lainnya ke pihak lainnya
<b>5933</b>	<b>Beban Penyesuaian Nilai Aset</b>
<b>59331</b>	<b>Beban Penyesuaian Nilai Aset</b>
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyesuaian Nilai Persediaan
<b>594</b>	<b>BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH</b>
<b>5941</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Perpajakan</b>
<b>59411</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Perpajakan</b>
594111	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PPh Migas
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas piutang PPh Migas
594112	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PPh Non Migas
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas piutang PPh Non Migas
594113	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PPN
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas piutang PPN
594114	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PPnBM
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas piutang PPnBM
594115	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PBB dan BPHTB
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas piutang PBB dan BPHTB
594116	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Cukai dan Bea Materai
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas piutang PBB dan BPHTB
594117	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Lainnya
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas piutang pajak Lainnya
594118	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Perdagangan Internasional
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Pajak Perdagangan Internasional
594119	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bea Masuk Tindakan
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Piutang Bea Masuk Tindakan
<b>5942</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak</b>
<b>59421</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak</b>
594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas piutang PNBP
594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas piutang piutang lainnya
<b>59422</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PT PPA</b>
594221	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PT PPA
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas piutang PT PPA

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>59423</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman</b>
594231	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas piutang pemberian pinjaman
594232	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar RDI
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang RDI
594233	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Potensi Tunggakan Yang Dapat Ditagih
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas piutang potensi tunggakan yang dapat ditagih
594234	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bunga Pemberian Pinjaman
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Bunga Pemberian Pinjaman
594235	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Denda Pemberian Pinjaman
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Denda Pemberian Pinjaman
<b>59424</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Kredit Pemerintah dan Piutang Lainnya</b>
594241	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Kredit Pemerintah Bidang Perkebunan
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Kredit Pemerintah Bidang Perkebunan
594242	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Kredit Investasi Pemerintah
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Kredit Investasi Pemerintah
594243	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
<b>59425</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Penjaminan Pemerintah</b>
594251	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Penjaminan Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Penjaminan Pemerintah
<b>59426</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Subsidi</b>
594261	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek Subsidi
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Piutang Jangka Pendek Subsidi
594262	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Subsidi
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Piutang Jangka Panjang Subsidi
<b>5943</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran</b>
<b>59431</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran</b>
594311	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
<b>59432</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	<b>Angsuran BLU</b>
594321	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran BLU  Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran BLU
<b>5944</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi</b>
<b>59441</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi</b>
594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi  Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
<b>59442</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU</b>
594421	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU  Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU
<b>5945</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Investasi Permanen</b>
<b>59451</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Investasi Permanen</b>
594511	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Investasi Permanen  Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Investasi Permanen
<b>5946</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU</b>
<b>59461</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa</b>
594611	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Kesehatan  Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU Pelayanan Kesehatan
594612	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan  Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
594613	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penunjang Konstruksi  Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU Penunjang Konstruksi
594614	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi  Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
594619	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya  Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
<b>59462</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Wilayah/Kawasan Tertentu</b>
594621	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita  Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
594622	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
594623	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya
<b>59463</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Khusus Masyarakat</b>
594631	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Investasi
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU Pengelola Dana Investasi
594632	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir
594639	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya
<b>59464</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Operasional Lainnya BLU</b>
594641	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU
<b>59465</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat</b>
594651	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat
<b>5947</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Kegiatan Non Operasional BLU</b>
<b>59471</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa BLU</b>
594711	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Tanah BLU
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Sewa Tanah BLU
594712	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Gedung BLU
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Sewa Gedung BLU
594713	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Sewa Ruangan BLU
594714	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU
594719	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Lainnya BLU
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang Sewa Lainnya BLU
<b>59472</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset BLU</b>
594721	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU
594722	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU
<b>59479</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Operasional Lainnya BLU</b>
594791	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU
	Alokasi piutang yang tidak tertagih atas Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU
<b>5948</b>	<b>Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih</b>
<b>59481</b>	<b>Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih</b>
594811	Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Program Kemitraan
	Digunakan untuk mencatat Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Program Kemitraan.
594812	Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Kementerian Negara/Lembaga
	Digunakan untuk mencatat Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Kementerian Negara/Lembaga.
594813	Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih - Lainnya.
<b>59482</b>	<b>Beban Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya</b>
594821	Beban Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya
	Digunakan untuk mencatat Beban Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya
594822	Beban Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih
	Digunakan untuk mencatat Beban Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih
<b>5949</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang</b>
<b>59491</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran</b>
594911	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tagihan Penjualan Angsuran
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tagihan Penjualan Angsuran
<b>59492</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tagihan Penjualan Angsuran BLU</b>
594921	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tagihan Penjualan Angsuran BLU
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tagihan Penjualan Angsuran BLU
<b>59493</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perpendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi</b>
594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perpendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perpendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
<b>59494</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perpendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU</b>
594941	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perpendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU
<b>59495</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman</b>
594951	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman
594952	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Aset Lainnya RDI
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Aset Lainnya RDI
594953	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Aset Lainnya Kredit Program
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Aset Lainnya Kredit Program
<b>59496</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Kredit Pemerintah</b>
594961	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Kredit Pemerintah Bidang Pertanian dan Perkebunan
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Kredit Pemerintah Bidang Pertanian dan Perkebunan
594962	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Kredit Investasi Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Kredit Investasi Pemerintah
594963	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Penjaminan Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Penjaminan Pemerintah
<b>59499</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Lainnya</b>
594991	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Lainnya
594992	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang atas Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
<b>595</b>	<b>BEBAN REKLASIFIKASI ASET</b>
<b>5951</b>	<b>Beban Aset Ekstrakomtabel</b>
<b>59511</b>	<b>Beban Aset Ekstrakomtabel</b>
595111	Beban Aset Ekstrakomtabel Tanah
	Digunakan untuk pencatatan oleh satker ketika mengakui beban aset ekstrakomptable tanah. Akun ini merupakan Koreksi pencatatan atas Beban modal tanah yang seharusnya tidak dikapitalisasi.
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk pencatatan oleh satker ketika mengakui beban asset ekstrakomptabel peralatan dan mesin. Akun ini merupakan Koreksi pencatatan atas Beban modal peralatan dan mesin yang seharusnya tidak dikapitalisasi.
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk pencatatan oleh satker ketika mengakui beban asset ekstrakomptabel gedung dan bangunan. Akun ini merupakan Koreksi pencatatan atas Beban modal gedung dan bangunan yang seharusnya tidak dikapitalisasi.
595114	Beban Aset Ekstrakomtabel Jalan, Irigasi dan Jaringan
	Digunakan untuk pencatatan oleh satker ketika mengakui beban asset ekstrakomptabel jalan, irigasi, dan jaringan. Akun ini merupakan Koreksi pencatatan atas Beban modal jalan, irigasi, dan jaringan yang seharusnya tidak dikapitalisasi.
595115	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya
	Digunakan untuk pencatatan oleh satker ketika mengakui beban asset ekstrakomptabel aset tetap lainnya. Akun ini merupakan Koreksi pencatatan atas Beban modal lainnya yang seharusnya tidak dikapitalisasi.
595116	Beban Aset Ekstrakomtabel Konstruksi Dalam Pengerjaan
	Digunakan untuk pencatatan oleh satker ketika mengakui beban asset ekstrakomptabel konstruksi dalam pengerjaan. Akun ini merupakan Koreksi pencatatan atas Beban modal yang menghasilkan KDP yang seharusnya tidak dikapitalisasi.
595117	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tak Berwujud
	Digunakan untuk pencatatan oleh satker ketika mengakui beban asset ekstrakomptabel aset tak berwujud. Akun ini merupakan Koreksi pencatatan atas Beban modal lainnya yang seharusnya tidak dikapitalisasi.
<b>59512</b>	<b>Beban Aset Ekstrakomtabel – BLU</b>
595121	Beban Aset Ekstrakomtabel Tanah – BLU
	Digunakan untuk mencatat Beban Aset Ekstrakomtabel Tanah - BLU
595122	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin – BLU
	Digunakan untuk mencatat Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin - BLU
595123	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan – BLU
	Digunakan untuk mencatat Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan - BLU
595124	Beban Aset Ekstrakomtabel Jalan, Irigasi dan Jaringan – BLU
	Digunakan untuk mencatat Beban Aset Ekstrakomtabel Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU
595125	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya – BLU
	Digunakan untuk mencatat Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya - BLU
595126	Beban Aset Ekstrakomtabel Konstruksi Dalam Pengerjaan – BLU
	Digunakan untuk mencatat Beban Aset Ekstrakomtabel Konstruksi Dalam Pengerjaan – BLU
595127	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tak Berwujud – BLU
	Digunakan untuk mencatat Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tak Berwujud – BLU
<b>596</b>	<b>BEBAN KERUGIAN DAN LAINNYA</b>
<b>5961</b>	<b>Beban Pelepasan Aset</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>59611</b>	<b>Kerugian Pelepasan Aset</b>
596111	Kerugian Pelepasan Aset
	Transaksi akrual atas kerugian pelepasan aset dari nilai bukunya.
596112	Tuntutan Ganti Rugi
	Transaksi atas kerugian Tuntutan Ganti Rugi.
<b>59612</b>	<b>Beban Persediaan Rusak/Usang</b>
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang
	Digunakan untuk mencatat Beban Persediaan Rusak/Usang
<b>59613</b>	<b>Beban Penghapusan Piutang</b>
596131	Beban Penghapusan Piutang Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat selisih yang timbul karena nilai outstanding Piutang Pemberian Pinjaman yang dihapuskan lebih besar dari nilai outstanding Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pemberian Pinjaman yang dihapuskan, meliputi piutang pokok penerusan pinjaman dan piutang non pokok, serta piutang sehubungan dengan kegiatan pemberian pinjaman BA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman
596132	Beban Penghapusan Piutang TP/TGR Kementerian Lembaga
	Digunakan untuk mencatat penghapusan piutang TP/TGR yang masuk ke ranah hukum dan telah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ( <i>inkracht</i> ).
<b>5962</b>	<b>Kerugian Belum Terealisasi</b>
<b>59621</b>	<b>Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi</b>
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi
	Penyesuaian Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi
596212	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi - BLU
	Digunakan untuk mencatat Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BLU
<b>59622</b>	<b>Beban Penyesuaian Nilai Investasi</b>
596221	Beban Penyesuaian Nilai Investasi
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyesuaian Nilai Investasi
<b>5963</b>	<b>Beban Pihak Ketiga</b>
<b>59631</b>	<b>Beban Pihak Ketiga Migas</b>
596311	Beban Pihak Ketiga Migas – Pajak Air Tanah ke Pemda
	Digunakan untuk mencatat Beban Pihak Ketiga Migas – Pajak Air Tanah ke Pemda
596312	Beban Pihak Ketiga Migas – Pajak Penerangan Jalan non PLN ke Pemda
	Digunakan untuk mencatat Beban Pihak Ketiga Migas – Pajak Penerangan Jalan non PLN ke Pemda
596313	Beban Pihak Ketiga Migas – DMO Fee KKKS
	Digunakan untuk mencatat Beban Pihak Ketiga Migas – DMO Fee KKKS
596314	Beban Pihak Ketiga Migas – Reimbursement PPN KKKS
	Digunakan untuk mencatat Beban Pihak Ketiga Migas – Reimbursement PPN KKKS
596315	Beban Pihak Ketiga Migas – Underlifting KKKS
	Digunakan untuk mencatat Beban Pihak Ketiga Migas – Underlifting KKKS
596316	Beban Pihak Ketiga Migas – Fee Penjualan Migas Bagian Negara

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Beban Pihak Ketiga Migas – Fee Penjualan Migas Bagian Negara
596317	Beban Pihak Ketiga Migas – Beban Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Beban Pihak Ketiga Migas – Beban Lainnya
<b>59632</b>	<b>Beban Pihak Ketiga Non Migas</b>
596321	Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - <i>Reimbursement PPN</i>
	Digunakan untuk mencatat Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - Reimbursement PPN
596322	Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - <i>Penggantian Bonus Produksi</i>
	Digunakan untuk mencatat Beban Pihak Ketiga Panas Bumi - Penggantian Bonus Produksi
596323	Beban diestimasi - <i>Reimbursement PPN</i>
	Digunakan untuk mencatat Beban diestimasi - <i>Reimbursement PPN</i>
596324	Beban diestimasi - PBB Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat Beban diestimasi - PBB Panas Bumi
596325	Beban diestimasi - Penggantian Bonus Produksi
	Digunakan untuk mencatat Beban diestimasi - Penggantian Bonus Produksi
596326	Beban diestimasi - setoran kepada Pemerintah
	Digunakan untuk mencatat Beban diestimasi - setoran kepada Pemerintah
<b>5964</b>	<b>Beban Penyesuaian Lainnya</b>
<b>59641</b>	<b>Beban Penyesuaian Lainnya</b>
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs
	Digunakan untuk mencatat Beban Penyesuaian Selisih Kurs pada Kementerian Negara/Lembaga, dan akan dicatat pada Laporan Operasional sebagai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.
<b>5965</b>	<b>Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara</b>
<b>59651</b>	<b>Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara</b>
596511	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara
	Digunakan untuk mencatat Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara
<b>597</b>	<b>PEMBULATAN</b>
<b>5971</b>	<b>Pembulatan</b>
<b>59711</b>	<b>Pembulatan</b>
597111	Pembulatan
	Akun penyeimbang pada proses transfer rekening kas negara valas ke dalam rekening rupiah.
<b>598</b>	<b>SUSPENSE BEBAN</b>
<b>5981</b>	<b>Suspense Beban</b>
<b>59811</b>	<b>Suspense Beban</b>
598111	Suspense Beban
	Digunakan untuk mencatat selisih Beban antara K/L dengan BUN.
<b>599</b>	<b>AKUN SET UP</b>
<b>5991</b>	<b>Akun Set up A</b>
<b>59911</b>	<b>Akun Set up</b>
599111	Earned Discount

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Akun Set Up up pada aplikasi SPAN yang digunakan untuk modul <i>Account Payable</i>
599113	Discount Taken
	Akun Set up pada aplikasi SPAN yang digunakan untuk modul <i>Account Payable</i>
599114	Rounding
	Akun Set up pada aplikasi SPAN yang digunakan untuk modul <i>Account Payable</i>
<b>5992</b>	<b>Akun Set up B</b>
<b>59921</b>	<b>Akun Set up</b>
599211	PO Rate Variance Gain
	Akun Set up pada aplikasi SPAN yang digunakan untuk modul <i>Account Payable</i>
599212	PO Rate Variance Loss
	Akun Set up pada aplikasi SPAN yang digunakan untuk modul <i>Account Payable</i>
599213	Purchase Price Variance
	Akun Set up pada aplikasi SPAN yang digunakan untuk modul <i>Budget Commitment</i>
599214	Invoice Price Variance
	Akun Set up pada aplikasi SPAN yang digunakan untuk modul <i>Budget Commitment</i>
<b>5993</b>	<b>Akun Set Up Bank</b>
<b>59931</b>	<b>Akun Set Up Bank</b>
599311	Kesalahan Bank ( <i>Bank Error</i> )
	Akun Set up pada aplikasi SPAN yang digunakan untuk modul <i>Cash Management</i>
599312	Biaya Perbankan ( <i>Bank Charge</i> )
	Akun Set up pada aplikasi SPAN yang digunakan untuk modul <i>Cash Management</i>

## **PENJELASAN URAIAN SEGMENT AKUN TRANSFER KE DAERAH**

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>6</b>	<b>BEBAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA</b>
<b>61</b>	<b>BEBAN DANA BAGI HASIL</b>
<b>611</b>	<b>BEBAN DANA BAGI HASIL PAJAK</b>
<b>6111</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan</b>
<b>61111</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan</b>
611111	Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21
	Pengeluaran negara atas penyaluran penerimaan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian pendapatan Propinsi.
611112	Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP
	Pengeluaran negara atas penyaluran penerimaan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian pendapatan Kabupaten/Kota.
<b>6112</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil PBB</b>
<b>61121</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan</b>
611211	Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian propinsi sebesar 16,2 persen dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi.
611212	Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian Kabupaten/Kota sebesar 64,8 persen dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
611213	Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian daerah untuk Biaya Pemungutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi.
611214	Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian daerah untuk Biaya Pemungutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
611215	Beban Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian Pemerintah Pusat dan dibagikan kepada seluruh Kabupaten/Kota.
611216	Beban Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan sebagai Insentif PBB ke Kabupaten/Kota
	Digunakan untuk mencatat Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan sebagai Insentif PBB ke Kabupaten/Kota.
<b>612</b>	<b>BEBAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM</b>
<b>6121</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil-SDA Minyak Bumi</b>
<b>61211</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi</b>
612111	Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Propinsi.
612112	Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0.5%
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil.
612113	Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk pembayaran tambahan Dana Bagi Hasil minyak bumi dalam rangka otonomi khusus NAD dan Papua.
<b>6122</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil-SDA Gas Bumi</b>
<b>61221</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi</b>
612211	Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Propinsi penghasil.
612212	Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi 0.5%
	Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil.
612213	Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus
	Digunakan untuk pembayaran tambahan dana bagi hasil gas bumi dalam rangka otonomi khusus NAD dan Papua.
<b>6123</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Umum</b>
<b>61231</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Umum</b>
612311	Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil Iuran Tetap sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil.
612312	Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil Royalti sebesar 64 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil.
<b>6124</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Panas Bumi</b>
<b>61241</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi</b>
612411	Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil Iuran Tetap sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil.
612412	Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil Iuran Tetap sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil.
612413	Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Produksi (Royalti)
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil Royalti sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil.
<b>6125</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil-SDA Kehutanan</b>
<b>61251</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan</b>
612511	Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil IHPH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil.
612512	Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil IHPH sebesar 64% kepada Kabupaten/Kota penghasil.
612513	Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi
	Pengeluaran DAK yang bersumber dari dana reboisasi dan digunakan untuk kabupaten/kota.
<b>6126</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil Perikanan</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>61261</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil Perikanan</b>
612611	Beban Dana Bagi Hasil Perikanan
	Pengeluaran negara untuk penyaluran bagi hasil perikanan sebesar 80% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
<b>613</b>	<b>BEBAN DANA BAGI HASIL CUKAI</b>
<b>6131</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil Cukai</b>
<b>61311</b>	<b>Beban Dana Bagi Hasil Cukai</b>
613111	Beban Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
	Digunakan untuk pembayaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Propinsi sesuai dengan UU tentang APBN dan PP tentang Dana Perimbangan.
<b>62</b>	<b>BEBAN DANA ALOKASI UMUM</b>
<b>621</b>	<b>BEBAN DANA ALOKASI UMUM</b>
<b>6211</b>	<b>Beban Dana Alokasi Umum</b>
<b>62111</b>	<b>Beban Dana Alokasi Umum</b>
621111	Beban Dana Alokasi Umum
	Pengeluaran Dana Alokasi Umum yang merupakan bagian Propinsi.
621114	Beban Koreksi Dana Alokasi Umum
	Digunakan untuk mencatat Koreksi Dana Alokasi Umum.
<b>63</b>	<b>BEBAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK</b>
<b>631</b>	<b>BEBAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK</b>
<b>6311</b>	<b>Beban Dana Alokasi Khusus Reguler</b>
<b>63111</b>	<b>Beban Dana Alokasi Khusus Reguler</b>
631111	Beban Dana Alokasi Khusus Reguler
	Pengeluaran negara untuk penyaluran Dana Alokasi Khusus Reguler.
631113	Beban Koreksi Dana Alokasi Khusus Reguler
	Digunakan untuk mencatat Koreksi Dana Alokasi Khusus Reguler.
<b>6312</b>	<b>Beban Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan</b>
<b>63121</b>	<b>Beban Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan</b>
631211	Beban Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah
	Pengeluaran negara untuk penyaluran Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah
631212	Beban Dana Alokasi Khusus Penugasan
	Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik yang digunakan untuk mencapai sasaran prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah, dengan menu dan lokasi yang terbatas sesuai dengan UU APBN dan Perpres Rincian APBN.
<b>6313</b>	<b>Beban Dana Alokasi Khusus Affirmasi</b>
<b>63131</b>	<b>Beban Dana Alokasi Khusus Affirmasi</b>
631311	Beban Dana Alokasi Khusus Affirmasi
	Pengeluaran negara untuk penyaluran Dana Alokasi Khusus Affirmasi
<b>6314</b>	<b>Beban Tambahan DAK Fisik</b>
<b>63141</b>	<b>Beban Tambahan DAK Fisik</b>
631411	Beban Tambahan DAK Fisik

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik yang antara lain terdiri dari Penyelesaian DAK Fisik 2016, Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Jalan, Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Irigasi.
<b>64</b>	<b>BEBAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DAN DANA INSENTIF DAERAH</b>
<b>641</b>	<b>BEBAN DANA OTONOMI KHUSUS</b>
<b>6411</b>	<b>Beban Dana Otonomi Khusus Aceh</b>
<b>64111</b>	<b>Beban Dana Otonomi Khusus Aceh</b>
641111	Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
	Pengeluaran untuk pelaksanaan otonomi khusus untuk NAD.
<b>6412</b>	<b>Beban Dana Otonomi Khusus Papua</b>
<b>64121</b>	<b>Beban Dana Otonomi Khusus Papua</b>
641211	Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua
	Pengeluaran untuk pelaksanaan otonomi khusus untuk Papua, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.
641212	Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua
	Pengeluaran untuk dana otonomi khusus tambahan infrastruktur untuk Papua.
<b>6413</b>	<b>Beban Dana Otonomi Khusus Papua Barat</b>
<b>64131</b>	<b>Beban Dana Otonomi Khusus Papua Barat</b>
641311	Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
	Pengeluaran untuk pelaksanaan otonomi khusus untuk Papua Barat.
641312	Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat
	Pengeluaran untuk dana otonomi khusus tambahan infrastruktur untuk Papua Barat.
<b>642</b>	<b>BEBAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b>
<b>6421</b>	<b>Beban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta</b>
<b>64211</b>	<b>Beban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta</b>
642111	Beban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
	Digunakan untuk mencatat transfer Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan PMK 124/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
<b>643</b>	<b>BEBAN DANA INSENTIF DAERAH</b>
<b>6431</b>	<b>Beban Dana Insentif Daerah</b>
<b>64311</b>	<b>Beban Dana Insentif Daerah</b>
643111	Beban Dana Insentif Daerah
	Digunakan untuk mencatat Dana Insentif Daerah.
<b>65</b>	<b>BEBAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK</b>
<b>654</b>	<b>BEBAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK</b>
<b>6541</b>	<b>Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus</b>
<b>65411</b>	<b>Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus</b>
654111	Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat Transfer Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG).
654112	Beban Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus
	Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus non fisik yang memberikan kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus yaitu desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal menurut indeks desa membangun dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
<b>6542</b>	<b>Beban Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah</b>
<b>65421</b>	<b>Beban Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah</b>
654211	Beban Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
	Pengeluaran negara untuk penyaluran dana untuk Guru PNSD dan Tambahan Tunjangan Guru PNSD.
<b>6543</b>	<b>Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)</b>
<b>65431</b>	<b>Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)</b>
654311	Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
	Digunakan untuk mencatat Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
<b>6545</b>	<b>Beban Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)</b>
<b>65451</b>	<b>Beban Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)</b>
654511	Beban Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)
	Digunakan untuk mencatat Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2).
<b>6546</b>	<b>Beban Dana Darurat</b>
<b>65461</b>	<b>Beban Dana Darurat</b>
654611	Beban Dana Darurat
	Digunakan untuk mencatat Dana Darurat.
<b>6547</b>	<b>Beban Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana</b>
<b>65471</b>	<b>Beban Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana</b>
654711	Beban Dana Bantuan Operasional Kesehatan
	Digunakan untuk mencatat transfer Dana Bantuan Operasional Kesehatan
654712	Beban Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana
	Digunakan untuk mencatat transfer Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana
<b>6548</b>	<b>Beban Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan dan Kependudukan</b>
<b>65481</b>	<b>Beban Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan dan Kependudukan</b>
654811	Beban Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi
	Digunakan untuk mencatat transfer Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi
654812	Beban Dana Peningkatan Kapasitas Usaha Kecil Menengah
	Digunakan untuk mencatat transfer Dana Peningkatan Kapasitas Usaha Kecil Menengah
654813	Beban Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat transfer Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan
654814	Beban Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
	Digunakan untuk menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
<b>6549</b>	<b>Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)</b>
<b>65491</b>	<b>Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)</b>
654911	Beban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)
	Digunakan untuk mencatat Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)
<b>66</b>	<b>BEBAN DANA DESA</b>
<b>662</b>	<b>BEBAN DANA DESA</b>
<b>6621</b>	<b>Beban Dana Desa</b>
<b>66211</b>	<b>Beban Dana Desa</b>
662111	Beban Dana Desa
	Digunakan untuk mencatat penyaluran anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
<b>69</b>	<b>BEBAN TRANSFER LAIN-LAIN</b>
<b>698</b>	<b>BEBAN SUSPENSE TRANSFER</b>
<b>6981</b>	<b>Beban Suspense Transfer</b>
<b>69811</b>	<b>Beban Suspense Transfer</b>
698111	Beban Suspense Transfer
	Digunakan untuk mencatat selisih Transfer antara Kementerian/ Lembaga dengan BUN.



DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

*MARWANTO HARJOWIRYONO*

**SEGMENTASI AKUN PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017**

AKUN	PENJELASAN
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA</b>
<b>42</b>	<b>PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>
<b>421</b>	<b>PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM</b>
<b>4211</b>	<b>Pendapatan Minyak Bumi</b>
<b>42111</b>	<b>Pendapatan Minyak Bumi</b>
421111	Pendapatan Minyak Bumi
	Penerimaan bagian Pemerintah dari penjualan minyak bumi, masuk ke Bagian Anggaran 999.99 (Kementerian Keuangan - BUN).
<b>4212</b>	<b>Pendapatan Gas Bumi</b>
<b>42121</b>	<b>Pendapatan Gas Bumi</b>
421211	Pendapatan Gas Bumi
	Penerimaan bagian Pemerintah dari penjualan gas bumi, masuk ke Bagian Anggaran 999.99 (Kementerian Keuangan - BUN).
<b>4213</b>	<b>Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara</b>
<b>42131</b>	<b>Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara</b>
421311	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara
	Dipungut dari Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan umum (Kontrak Karya, Kuasa Pertambangan dan Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421312	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara
	Dipungut dari Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan umum (Kontrak Karya, Kuasa Pertambangan dan Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421313	Pendapatan dari Keuntungan Bersih Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Keuntungan Bersih Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
<b>4214</b>	<b>Pendapatan Kehutanan</b>
<b>42141</b>	<b>Pendapatan Dana Reboisasi</b>
421411	Pendapatan Dana Reboisasi
	Dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (PHH), Ijin Penebangan Kayu (IPK) dan Pemenang Lelang Kayu Sitaan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029).
<b>42142</b>	<b>Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan</b>
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan
	Dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (PHH), Ijin Penebangan Kayu (IPK) dan Pemenang Lelang Kayu Sitaan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029).
421422	Pendapatan Hasil Silvopastural dan Silvofishery Kehutanan
	PNBP yang berasal dari hasil Silvopastural dan Silvofishery Kehutanan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029.03)
<b>42143</b>	<b>Pendapatan IIUPH (IHPH)</b>
421431	Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Industri
	Dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang izin

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	usaha pengelolaan hutan (IUPH/HPH). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029).
421432	Pendapatan IIUPH (IHPH) Bambu Dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang izin usaha pengelolaan hutan (IUPH/HPH). Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029).
421433	Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Rotan Dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang izin usaha pengelolaan hutan (IUPH/HPH).Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029).
421434	Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam Dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan pemegang izin usaha pengelolaan hutan (IUPH/HPH).Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029).
<b>42144</b>	<b>Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan</b>
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang luas kawasannya hutannya di atas 30% (tiga puluh persen ) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029).
421443	Pendapatan Penyerapan dan atau Penyimpanan Karbon dari Kawasan Hutan PNBP yang berasal dari hasil penjualan karbon atas Penyerapan dan atau Penyimpanan Karbon dari Kawasan Hutan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029.03)
421444	Pendapatan Iuran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan air dan Energi Air PNBP yang berasal dari Iuran Pungutan Usaha Pemanfaatan Air dan Energi Air. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029.05)
<b>42145</b>	<b>Pendapatan Jasa Perbenihan dan Kehutanan</b>
421451	Pendapatan dari Kegiatan Perijinan di Bidang Perbenihan Pendapatan yang diperoleh dari Iuran dan perpanjangan Izin pemasukan dan pengeluaran benih dari dan ke luar negeri. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029.04)
421452	Pendapatan dari Sertifikasi Benih Pendapatan yang diperoleh dari setoran Sertifikasi Sumber Benih termasuk Sertifikasi Mutu Benih, Mutu Bibit Generatif, Mutu Bibit Kultur Jaringan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029.04)
421453	Pendapatan dari Pengumpulan Benih dan Anakan Pendapatan yang diperoleh dari Iuran Pengumpulan dan Pengunduhan Benih dan Anakan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029.04)
<b>4215</b>	<b>Pendapatan Perikanan</b>
<b>42151</b>	<b>Pendapatan Perikanan</b>
421511	Pendapatan Perikanan Penerimaan dari Pungutan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan dari Perusahaan Perikanan dalam rangka PMA/PMDN. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032).
<b>4216</b>	<b>Pendapatan Pertambangan Panas Bumi</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>42161</b>	<b>Pendapatan Pertambangan Panas Bumi</b>
421611	Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi
	Penerimaan bersih dari setoran bagian pemerintah yang berasal dari pengusaha panas bumi sesuai dengan Keppres No.49 Tahun 1991, masuk Bagian Anggaran 999.99 (Kementerian Keuangan - BUN).
421612	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan iuran tetap pertambangan panas bumi sesuai dengan PP No. 9 Tahun 2012. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
421613	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Panas Bumi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan iuran produksi/royalti pertambangan panas bumi sesuai dengan PP No. 9 Tahun 2012. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
<b>4217</b>	<b>Penerimaan Sharing Migas</b>
<b>42171</b>	<b>Penerimaan Sharing Migas</b>
421711	Penerimaan Sharing Migas
	Digunakan untuk mencatat pendapatan sharing migas.
<b>422</b>	<b>PENDAPATAN BAGIAN LABA BUMN/KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN</b>
<b>4221</b>	<b>Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN/KND</b>
<b>42211</b>	<b>Pendapatan Laba BUMN/KND Perbankan</b>
422111	Pendapatan Laba BUMN/KND Perbankan
	Penerimaan bagian pemerintah dari laba BUMN perbankan. Masuk Bagian Anggaran BUN 999.03.
422112	Pendapatan Laba/Kelolaan BUMN/Lembaga di bawah Kemenkeu Perbankan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Laba dari Investasi pada BUMN Perbankan. Masuk Bagian Anggaran BUN 999.03.
<b>42212</b>	<b>Pendapatan Laba BUMN/KND Non-Perbankan</b>
422121	Pendapatan Laba BUMN/KND Non Perbankan
	Penerimaan bagian pemerintah dari laba BUMN non perbankan. Masuk Bagian Anggaran BUN 999.03.
422122	Pendapatan Laba/Kelolaan BUMN/Lembaga di bawah Kemenkeu Non Perbankan
	Digunakan untuk mencatat PNBP dari Laba/Kelolaan BUMN/KND di bawah Kemenkeu-Non Perbankan. Masuk Bagian Anggaran BUN 999.03.
<b>423</b>	<b>PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA</b>
<b>4231</b>	<b>Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan</b>
<b>42311</b>	<b>Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/ Sitaan/Arsip/Hasil Bongkaran Gedung dan Bangunan</b>
423111	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan
	Penerimaan dari penjualan sisa penelitian pertanian, benih dan hasil pertanian dari praktek perkebunan siswa. Merupakan pendapatan yang bisa terdapat di semua Kementerian Negara/Lembaga.
423112	Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan
	Penerimaan dari penjualan sisa penelitian peternakan dan perikanan, semen beku untuk inseminasi buatan, bibit ternak, calon bibit, ternak susu, ternak afkir, hasil peternakan dan perikanan praktek siswa. Masuk Bagian Anggaran Kementerian

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Pertanian (BA 018), Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032).
423113	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang
	Penerimaan dari penjualan produksi batubara bagian pemerintah di luar royalti dan PPN. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).
423114	Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan
	Penerimaan dari penjualan hasil sitaan baik berupa uang maupun hasil penjualan barang rampasan. Masuk Bagian Anggaran Kejaksaan Agung (BA 006), Kementerian Hukum dan HAM (013), Kepolisian RI (060), Kementerian Hukum dan HAM (013), dan Kementerian Keuangan (015).
423115	Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi Lainnya
	Penjualan vaksin dan antigen hewan ternak pada Kementerian Pertanian (BA 018) termasuk di dalamnya Penjualan radioisotop pada BATAN (BA 042.03), dan pada Kementerian lainnya.
423116	Pendapatan Dari Hasil Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan, Hasil Cetakan dan Informasi Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Dari Hasil Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan, Hasil Cetakan dan Informasi Lainnya yang berada di berbagai Kementerian Negara/Lembaga.
423117	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan
	Penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian yang berasal dari penjualan dokumen lelang.
423118	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni
	Pendapatan penjualan cadangan beras pemerintah dalam rangka menstabilkan harga beras di pasaran.
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya
	Penjualan yang tidak termasuk ke dalam kelompok pendapatan atas penjualan-penjualan di atas termasuk penjualan arsip/hasil bongkarang gedung dan bangunan.
<b>42312</b>	<b>Pendapatan dari Pemindahtempahan BMN dan Kekayaan Negara Lain-lain</b>
423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan, tidak termasuk penjualan sewa beli rumah dinas, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
423123	Pendapatan Kompensasi Sewa Beli
	Digunakan untuk mencatat pendapatan kompensasi sewa beli, termasuk penerimaan dari kompensasi rumah dinas melalui kontrak sewa beli.
423124	Pendapatan Kompensasi Pelepasan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas kompensasi aset bekas milik Asing/Tionghoa pada Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (BA 999.99)
423125	Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari tukar menukar Tanah, Gedung dan Bangunan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
423126	Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari tukar menukar Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
423127	Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari tukar menukar jalan, irigasi dan jaringan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
<b>42313</b>	<b>Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas</b>
423131	Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak  Penerimaan yang timbul akibat selisih harga beli BBM Pemerintah dari Badan Usaha (harga patokan) lebih rendah/kecil dari harga jual BBM Pemerintah kepada Masyarakat yang ditetapkan dalam Perpres. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan - BUN.
423132	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)  Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari selisih antara nilai minyak mentah DMO / Domestic Market Obligation dengan harga ICP / Indonesian Crude Price dengan DMO Fee. Nilai minyak mentah DMO adalah hasil penjualan minyak mentah bagian KKKS (Kontraktor Kontrak kerja Sama) diserahkan kepada Pemerintah atau dibeli Pemerintah. Sedangkan DMO Fee adalah pembayaran atau harga beli Pemerintah atas penyerahan minyak mentah DMO bagian KKKS. Penerimaan ini bersifat kontijensi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Keuangan - BUN.
423133	Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas  Digunakan untuk mencatat pendapatan berupa denda, bunga, dan penalti keterlambatan terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas
423139	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas  Penerimaan yang diterima dari kegiatan usaha hulu migas seperti penerimaan bonus dari KKKS, transfer material, dan firm commitment.
<b>42314</b>	<b>Pendapatan dari Pemanfaatan BMN</b>
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian, termasuk pendapatan sewa rumah dinas.
423142	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin  Digunakan untuk mencatat pendapatan sewa Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
423143	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan  Digunakan untuk mencatat pendapatan sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
423144	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
423145	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang bisa ada di semua Kementerian Negara/Lembaga.
423146	Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
423147	Pendapatan dari Bangun, Guna, Serah (BGS)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
423148	Pendapatan dari Bangun, Serah, Guna (BSG)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pemanfaatan BMN Lainnya, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian.
<b>42315</b>	<b>Pendapatan dari Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lain-lain</b>
423151	Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pengelolaan barang, berupa pemanfaatan, pemindahtanganan, serta penjualan BMN pada Pengelola Barang. Bagian Anggaran Transaksi Khusus (999.99).
423152	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS
	Digunakan untuk mencatat pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN yang berasal dari KKKS, baik masih berada dalam penguasaan KKKS maupun yang telah diserahkan kepada BUN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.
423153	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B
	Digunakan untuk mencatat pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B, baik masih berada dalam penguasaan Kontraktor PKP2B maupun yang telah diserahkan kepada BUN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.
423154	Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang berasal dari Pemanfaatan aset properti/Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dicatat pada bagian anggaran Transaksi Khusus (999.99)
423155	Pendapatan atas Aset Saham dan Surat Berharga Lain
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari aset saham dan surat berharga lain eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) berupa deviden, bunga dan denda keterlambatan. Dicatat pada bagian anggaran Transaksi Khusus (999.99)
<b>4232</b>	<b>Pendapatan Jasa</b>
<b>42321</b>	<b>Pendapatan Jasa I</b>
423211	Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya
	Pendapatan dari hasil pelayanan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan, baik yang berada di Lingkungan Kementerian Kesehatan maupun kementerian lainnya.
423212	Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA)

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Pendapatan dari penjualan karcis masuk tempat hiburan/taman maupun museum dalam pengelolaan Kementerian Negara/Lembaga.
423213	Pendapatan Surat Keterangan, Visa, dan Paspor
	Pendapatan dari pelayanan pembuatan Surat Keterangan, antara lain Visa dan paspor oleh Kementerian Luar Negeri (BA 011), pendapatan dari surat keterangan keimigrasian antara lain KITAS, izin tinggal tetap di Indonesia dari Kementerian Hukum dan HAM (BA 013), Surat Keterangan Asal (SKA) dari Kementerian Perdagangan (BA 090), Surat Keterangan Bebas Tanggungan Berperkara dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (BA 108).
423214	Pendapatan Hak dan Perijinan
	Pendapatan dari permintaan hak paten, hak cipta maupun perpanjangan Merk di Kementerian Hukum dan HAM (BA 013), Pendapatan dari pendaftaran pestisida, royalti hasil penelitian dan pembuatan label obat-obatan pertanian/peternakan di Kementerian Pertanian (BA 018), wajib daftar perusahaan, pengujian mutu barang dan sertifikasi mutu barang di Kementerian Perindustrian (BA 019) dan/atau Kementerian Perdagangan (BA 090), penyelenggaraan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk, penyelenggaraan pos, dan pengelolaan nama domain Indonesia di Kementerian Komunikasi dan Informatika (BA 059), hak dan perijinan Kementerian Tenaga Kerja (BA 026), hak dan perijinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032), hasil lelang 3G (postel), termasuk pendapatan perijinan, dan persetujuan akuntan publik pada Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Setjen Kementerian Keuangan (BA 015), penerimaan pelayanan penetapan obyek tanah penguasaan benda-benda tetap milik perseorangan warga Negara Belanda (P3MB)/Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BA 056).
423215	Pendapatan Sensor, Karantina, Pengawasan, Pemeriksaan
	Pendapatan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan di berbagai kementerian antara lain Kementerian Pertanian (BA 018), Kementerian Perindustrian (BA 019) , Kementerian Perdagangan (BA 090), Kementerian Pendidikan Nasional (BA 023), Kementerian Kesehatan (BA 024), Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032), Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (BA 040), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (042).
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga
	Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, sertifikasi, pelatihan dan teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.
423217	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama
	Pendapatan dari hasil pelayanan jasa urusan agama terutama pencatatan nikah dan rujuk di lingkungan Kementerian Agama (BA 025).
423218	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian
	Penerimaan dari jasa penyeberangan untuk kapal lintas dalam negeri dan luar negeri, pendapatan pengguna sarana bantu navigasi dan pendapatan jasa perkapalan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa penerbangan, sewa dan tanda masuk Bandar Udara.
423219	Pendapatan Pelayanan Pertanahan
	Digunakan untuk membuka penerimaan pelayanan survei, pengukuran, dan pemetaan; penerimaan pelayanan pemeriksaan tanah; penerimaan pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya; penerimaan pelayanan pertimbangan teknis pertanahan; penerimaan pelayanan pendaftaran tanah; penerimaan pelayanan informasi pertanahan; penerimaan pelayanan lisensi; penerimaan pelayanan di

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	bidang pertanahan yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain. Merupakan penerimaan fungsional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BA. 056) sesuai dengan PP No. 128 Tahun 2015.
<b>42322</b>	<b>Pendapatan Jasa II</b>
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
	Pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pemerintah.
423222	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Jasa Penyelenggaraan Penyiaran
	Digunakan untuk mencatat penerimaan dari jasa penyelenggaraan telekomunikasi dan jasa penyelenggaraan penyiaran pada Kementerian Komunikasi dan Informasi (BA 059)
423223	Pendapatan Iuran Lelang untuk Fakir Miskin
	Pendapatan yang berasal dari sebagian hasil lelang penghapusan BMN yang dialokasikan untuk Fakir Miskin dan berasal dari seluruh Kementerian Negara/Lembaga serta disetorkan atas nama Kementerian Sosial (BA 027)
423224	Pendapatan Jasa Catatan Sipil
	Penerimaan dari hasil pelayanan jasa Kantor Catatan Sipil. Masuk pendapatan Kementerian Dalam Negeri (BA 010)
423225	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa
	Pendapatan yang berasal dari pengenaan biaya penagihan secara paksa atas piutang pajak tidak tertagih. Masuk pendapatan Kementerian Keuangan (BA 015).
423226	Pendapatan Uang Pewarganegaraan
	Pendapatan yang berasal dari uang registrasi menjadi warga Negara Indonesia, masuk pendapatan Kementerian Hukum dan HAM (BA 013).
423227	Pendapatan Bea Lelang
	Pendapatan yang diperoleh dari bea lelang dan masuk pendapatan Kementerian Keuangan (BA 015).
423228	Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara
	Pendapatan yang berasal dari Jasa Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. Masuk pendapatan Kementerian Keuangan (BA 015).
423229	Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi
	Merupakan penerimaan yang berasal dari Registrasi Dokter dan Dokter Gigi yang diselenggarakan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Masuk pendapatan Kementerian Kesehatan (024).
<b>42323</b>	<b>Pendapatan Jasa Luar Negeri</b>
423231	Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI
	Pendapatan dari surat perjalanan RI dan masuk ke Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri (BA 011).
423232	Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler
	Pendapatan dari pengurusan dokumen konsuler dan masuk ke Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri (BA 011)
423233	Pendapatan Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler dan Jasa Surat Keterangan Keimigrasian
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Luar Negeri termasuk Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler dan Jasa Surat Keterangan Keimigrasian dan masuk ke Bagian Anggaran Kementerian Perdagangan (BA 090).

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
423239	Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri
	Pendapatan dari luar negeri selain surat perjalanan RI dan pengurusan dokumen konsuler.
<b>42324</b>	<b>Pendapatan Layanan Jasa Perbankan</b>
423242	Pendapatan Jasa Bank dari Penerusan Pinjaman
	Pendapatan penerimaan jasa bank akibat transaksi penerusan pinjaman.
423243	Pendapatan Biaya Lain-Lain Penerusan Pinjaman
	Pendapatan penerimaan atas biaya management fee, komitmen fee dan fee-fee yang terjadi karena transaksi penerusan pinjaman
<b>42325</b>	<b>Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara</b>
423251	Pendapatan atas Penerbitan SP2D Dalam Rangka TSA
	Pendapatan yang diterima dari Bank Operasional atas penerbitan SP2D dalam rangka pengelolaan TSA. Merupakan pendapatan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (015.08).
423252	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum
	Pendapatan yang diterima dari hasil penempatan uang negara pada Bank Umum. Merupakan pendapatan Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
423253	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling
	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling. Merupakan pendapatan Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
423254	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia
	Pendapatan yang diterima dari hasil penempatan uang negara pada Bank Sentral. Merupakan pendapatan Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
423255	Pendapatan dari Penempatan Uang sebelum rekonsiliasi
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Penempatan Uang sebelum rekonsiliasi.
<b>42326</b>	<b>Pendapatan Jasa Kepolisian I</b>
423261	Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
423262	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerbitan dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), termasuk STNK lintas batas negara sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
423263	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
423264	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
423265	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) termasuk TNKB lintas batas negara sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
423266	Pendapatan Uji Keterampilan Pengemudi
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerbitan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
423267	Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
423268	Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
423269	Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
<b>42327</b>	<b>Pendapatan Jasa III</b>
423271	Pendapatan Jasa Pelayanan Jalan Tol Suramadu
	Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengelolaan Jembatan Suramadu. Merupakan pendapatan Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga (BA 033.04).
423272	Pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Digunakan pada Bagian Anggaran Kementerian Pertahanan/TNI (012), POLRI (060), Kemenpora (092), dan Kemenkes (024).
423273	Pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari klaim BPJS Kesehatan pada Fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKTL). Digunakan pada Bagian Anggaran Kementerian Pertahanan/TNI (012), POLRI (060), Kemenpora (092), dan Kemenkes (024).
423274	Pendapatan dari penggunaan spectrum dan frekuensi radio
	Digunakan untuk mencatat PNBP yang berasal dari penggunaan spektrum dan frekuensi radio pada Kementerian Kominfo (BA 059).

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>42328</b>	<b>Pendapatan Jasa Kepolisian II</b>
423281	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
423282	Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
423286	Pendapatan Pengamanan Obyek Vital  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Jasa Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek tertentu dan Jasa Manajemen sistem pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek tertentu sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
423287	Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pelayanan Satuan Pengaman, yaitu penerbitan kartu anggota satuan pengaman, penerbitan ijazah satuan pengaman, dan penerbitan surat izin operasional badan usaha jasa pengamanan sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
423289	Pendapatan Pelayanan Kepolisian Lainnya  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Pelayanan Kepolisian Lainnya, termasuk pelayanan penyelenggaraan assesment center Polri sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masuk Bagian Anggaran Kepolisian Negara RI (BA 060).
<b>42329</b>	<b>Pendapatan Jasa Lainnya</b>
423291	Pendapatan Jasa Lainnya  Pendapatan jasa yang tidak termasuk kelompok pendapatan jasa I dan II.
423292	Pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II  Pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II yang dipungut oleh DJKN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2013.
423293	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian  Pendapatan Bea Lelang oleh Pegadaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2013.
423294	Pendapatan Jasa Siaran  Digunakan untuk mencatat penerimaan kas yang berasal dari jasa siaran pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
423295	Pendapatan Jasa Non Siaran  Digunakan untuk mencatat penerimaan kas yang berasal dari penggunaan sarana dan prasarana siaran pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Termasuk pendapatan yang berasal dari pemanfaatan BMN sesuai dengan tugas dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
<b>4233</b>	<b>Pendapatan Bunga</b>

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>42331</b>	<b>Pendapatan Bunga</b>
423311	Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi  Pendapatan bunga yang bersumber dari investasi atau pembelian surat-surat berharga berupa obligasi.
423312	Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi  Pendapatan bunga dari BPPN yang bersumber dari investasi/ pembelian surat-surat berharga berupa obligasi.
423313	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman  Pendapatan yang berasal dari bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari pemberian piutang tersebut di atas.
423314	Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah  Pendapatan yang berasal dari bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya yang berasal dari pemberian kredit pemerintah termasuk kredit investasi pemerintah dan kredit bidang perkebunan dan kehutanan.
423315	Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan  Pendapatan yang berasal dari bunga,yang berasal dari pengelolaan rekening pembangunan hutan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.
423316	Pendapatan Komitmen Penerusan Pinjaman  Pendapatan dari biaya komitmen yang timbul akibat penerusan pinjaman, merupakan transaksi BA BUN satker Direktorat SMI
423317	Pendapatan Bunga Kredit Program  Pendapatan bunga transaksi kredit program
423319	Pendapatan Bunga Lainnya  Pendapatan bunga selain yang bersumber dari investasi atau pembelian surat-surat berharga lainnya.
<b>42332</b>	<b>Pendapatan Gain on Bond Redemption</b>
423321	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Jangka Panjang  Pendapatan yang diperoleh dari selisih lebih carrying value Obligasi yang dibeli kembali dengan clean price yang dibayar Pemerintah pada saat pembelian kembali Obligasi (buyback). Carrying Value Obligasi ialah nominal Obligasi setelah dikurangi atau ditambah unamortized discount atau premium.
423322	Pendapatan dari Transaksi Security Lending  Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Transaksi Security Lending.
423323	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valas  Digunakan untuk mencatat Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valas.
423324	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali SBSN Jangka Panjang  Digunakan untuk mencatat Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali SBSN Jangka Panjang.
423325	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali SBSN Valas Jangka Panjang  Digunakan untuk mencatat Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali SBSN Valas Jangka Panjang.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>42333</b>	<b>Pendapatan Premium atas Obligasi Negara</b>
423331	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah
	Pendapatan yang diperoleh pada saat penerbitan SUN berdenominasi Rupiah yang dihitung dari selisih lebih penerimaan kas (clean price) dengan nominal SUN yang diterbitkan.
423332	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing
	Pendapatan yang diperoleh pada saat penerbitan SUN berdenominasi Valuta Asing yang dihitung dari selisih lebih penerimaan kas (clean price) dengan nominal SUN yang diterbitkan.
423333	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah
	Pendapatan yang diperoleh pada saat penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berdenominasi Rupiah yang dihitung dari selisih lebih penerimaan kas (clean price) dengan nominal SBSN.
423334	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Valuta Asing
	Pendapatan yang diperoleh pada saat penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berdenominasi Valuta Asing yang dihitung dari selisih lebih penerimaan kas (clean price) dengan nominal SBSN.
<b>42334</b>	<b>Pendapatan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara</b>
423341	Pendapatan Fee atas Transaksi Security Lending SUN
	Untuk mencatat pendapatan atas SUN yang dipinjamkan kepada Dealer Utama. Menjadi pendapatan Bagian Anggaran 999.01 (Sistem Akuntansi Utang Pemerintah).
423342	Pendapatan lain-lain atas rekening tujuan tertentu
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan lain-lain atas rekening tujuan tertentu.
<b>42335</b>	<b>Pendapatan Selisih Harga SBN</b>
423351	Pendapatan Selisih Harga SBN
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Selisih Harga SBN
423352	Pendapatan Kupon SBN
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan atas Kupon SBN.
423353	Pendapatan Bunga Reverse Repo
	Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga atas transaksi reverse repo.
<b>42336</b>	<b>Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah</b>
423361	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur
	Digunakan untuk mencatat pendapatan atas imbal jasa penjaminan infrastruktur.
<b>4234</b>	<b>Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi</b>
<b>42341</b>	<b>Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi</b>
423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan
	Penerimaan legalisasi tanda tangan. Masuk ke Bagian Anggaran Mahkamah Agung (BA 005).
423412	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan
	Pengesahan surat di bawah tangan. Masuk ke Bagian Anggaran Mahkamah Agung (BA 005).
423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung (BA 005).
423414	Pendapatan Hasil Denda dan sebagainya
	Hasil denda di lingkungan Kejaksaan Agung (BA 006).
423415	Pendapatan Ongkos Perkara
	Pendapatan dari ongkos perkara di lingkungan Mahkamah Agung (BA 005) dan Kejaksaan Agung (BA 006).
423416	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi
	Pendapatan negara yang berasal dari lelang barang-barang tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR).
423417	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi
	Pendapatan negara yang berasal dari lelang barang-barang Gratifikasi yang diserahkan oleh penyelenggara negara.
423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
	Menampung pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya di lingkungan Mahkamah Agung (BA 005) dan Kejaksaan Agung (BA 006).
<b>42342</b>	<b>Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang</b>
423421	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Ditetapkan Pengadilan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Ditetapkan Pengadilan. Masuk Bagian Anggaran BA Kejaksaan Agung (BA 006) dan Bagian Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
423422	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang. Masuk Bagian Anggaran BA Kejaksaan Agung (BA 006) dan Bagian Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (BA 093).
<b>4235</b>	<b>Pendapatan Pendidikan</b>
<b>42351</b>	<b>Pendapatan Pendidikan</b>
423511	Pendapatan Uang Pendidikan
	Uang pendidikan berasal dari Sekolah maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional maupun di kementerian lain.
423512	Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan
	Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat dan Akhir yang berasal dari Sekolah maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (BA 023) maupun di kementerian lain.
423513	Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek
	Uang Ujian untuk menjalankan Praktek yang berasal dari Sekolah Maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (BA 023) maupun di kementerian lain.
423519	Pendapatan Pendidikan Lainnya
	Uang pendapatan pendidikan lainnya seperti sumbangan pendidikan yang berasal dari Sekolah Maupun PTN yang menyelenggarakan pendidikan baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (BA 023) maupun di kementerian lain.
<b>4236</b>	<b>Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi</b>
<b>42361</b>	<b>Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi</b>
423611	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan Pengadilan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	PNBP yang merupakan uang sitaan dari hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan.
423612	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara.
423613	Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan Keuangan Pendapatan dari pengembalian penyalahgunaan penyelenggaraan keuangan.
423614	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Yang Ditetapkan Di Pengadilan Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan pengadilan.
423615	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara Pendapatan dari pengembalian uang Negara berdasarkan putusan pengadilan.
<b>4237</b>	<b>Pendapatan Iuran dan Denda</b>
<b>42371</b>	<b>Pendapatan Iuran Badan Usaha</b>
423711	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM PNBP yang berasal dari Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM.
423712	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa PNBP yang berasal dari Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.
423713	Pendapatan Iuran Badan Usaha di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan PNBP yang berasal dari Iuran Badan Usaha dari kegiatan di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
<b>42372</b>	<b>Pendapatan Dana Pengamanan Hutan dan Lingkungan Hidup</b>
423721	Pendapatan Dana Pengamanan Hutan Pendapatan yang diterima dari Dana Pengamanan Hutan (DPH), Dana Illegal Logging, Dana Kompensasi Areal Pengganti.
423722	Pendapatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan Pendapatan yang diterima dari pembayaran atas penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dan di luar pengadilan.
423723	Pendapatan Ganti Rugi Penggantian Tanaman Hasil Reboisasi Pendapatan yang diterima dari pembayaran ganti rugi atas penggantian tanaman hasil reboisasi yang bersumber dari DAK DR/DBH.
<b>42373</b>	<b>Pendapatan dari Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam</b>
423731	Pendapatan Iuran Menangkap/Mengambil/ Mengangkut Satwa Liar/ Mengambil/ Mengangkut Tumbuhan Alam Hidup, Termasuk Sarang Burung Walet di Kawasan Konservasi Pendapatan yang diterima dari iuran kepada pemegang izin menangkap, mengambil dan mangangkut satwa liar dan tumbuhan alam termasuk sarang burung walet di kawasan konservasi dalam keadaan hidup atau mati atau bagian-bagian daripadanya yang tidak dilindungi undang-undang dan yang dilindungi undang. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029.05)
423732	Pendapatan Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA) Pendapatan yang berasal dari Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA) adalah pungutan yang dikenakan kepada calon pemegang izin pengusahaan pariwisata alam dan dikenakan sekali selama jangka waktu pengusahaan.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
423733	Pendapatan Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru (PIPTB)
	Pendapatan yang berasal dari Pungutan izin pengusahaan taman buru (PIPTB) adalah pungutan yang dikenakan kepada calon pemegang izin pengusahaan taman buru dan dikenakan sekali dalam jangka waktu pengusahaan.
423734	Pendapatan Pungutan Izin Berburu di Taman Buru dan Areal Buru (PIB)
	Pendapatan yang berasal dari Pungutan Izin Berburu, yaitu pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin berburu dan dikenakan satu kali pada saat izin berburu dikeluarkan.
423735	Pendapatan Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam
	Pendapatan yang berasal dari Pungutan Masuk Obyek Wisata, yaitu pungutan yang dikenakan terhadap setiap pengunjung yang masuk ke Taman Wisata Alam, Taman Nasional dan atau Taman Buru.
423736	Pendapatan Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA)
	Pendapatan yang berasal dari Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata alam (IHUPA), yaitu iuran yang dikenakan kepada pemegang izin pengusahaan pariwisata alam yang dikenakan dari hasil usahanya sekali setiap tahun.
423737	Pendapatan Iuran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPTB)
	Pendapatan yang berasal dari Iuran Hasil usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPB), yaitu iuran yang dikenakan kepada pemegang izin berburu berdasarkan jumlah satwa yang diburu sesuai dengan harga patokan yang berlaku untuk masing-masing jenis satwa yang diburu.
423738	Pendapatan Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan penggantian harga minimum yang seharusnya dibayarkan oleh pemungut dari Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan atau dari Penyiapan Lahan dalam Pembangunan Hutan Tanaman serta ganti rugi. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029.03)
423739	Pendapatan Pungutan Hasil Usaha Jasa Wisata Alam
	Pendapatan dari Pungutan Hasil Usaha Jasa Wisata Alam yang diterima setiap bulan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029.05)
<b>42374</b>	<b>Pendapatan Penerimaan dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan</b>
423741	Pendapatan Penerimaan Dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan
	Penerimaan dana kompensasi pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) Kelautan yang berasal dari Kapal Keruk Pasir Laut. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032).
<b>42375</b>	<b>Pendapatan Denda</b>
423751	Pendapatan Denda Pelanggaran Eksplorasi Hutan dan Denda Terkait Kegiatan Pidana
	Pendapatan yang diterima dari Denda Pelanggaran Eksplorasi Hutan (DPEH), Penerimaan dari Denda Post Audit, Tata Usaha Provisi Sumber Daya Hutan dan Denda terkait kegiatan pidana. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029.03)
423752	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
	PNBP yang berasal dari setoran rekanan pemerintah, berupa denda penyelesaian pekerjaan pemerintah. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua kementerian.
423753	Pendapatan Denda Administrasi BPHTB

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Merupakan penerimaan dari Badan Pertanahan Nasional (BA 056).
423754	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal
	Pendapatan denda yang berasal dari pelaku pasar modal karena pelanggaran yang dilakukan. Merupakan PNBP Kementerian Keuangan.
423755	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha
	Pendapatan denda yang berasal dari pelaku usaha yang telah mendapatkan putusan tetap dari peradilan. Merupakan PNBP Komisi Pengawas Persaingan Usaha (BA 108).
423756	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA. Merupakan pendapatan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (015.08).
423757	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia. Merupakan pendapatan Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
423758	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling. Merupakan pendapatan Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
423759	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Penerimaan Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari denda keterlambatan/kurang limpah penerimaan negara; denda tidak membuka loket penerimaan negara pada waktu yang ditetapkan; denda karena menolak setoran penerimaan negara dari wajib pajak/wajib bayar/wajib setor yang bukan nasabahnya; denda karena mengenakan biaya kepada wajib pajak/wajib bayar/wajib setor atas jasa layanan perbankan; dan denda kepada bank cabang yang melakukan penerimaan negara namun belum memperoleh ijin sebagai Bank/PO persepsi. Merupakan pendapatan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (015.08).
<b>42376</b>	<b>Pendapatan Denda II</b>
423761	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Saldo BO II ke BO I
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Saldo BO II ke BO I. Merupakan pendapatan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (015.08).
423762	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pembagian PBB oleh BO III PBB
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pembagian PBB oleh BO III PBB. Merupakan pendapatan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (015.08).
423763	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Penerusan Pinjaman
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Penerusan Pinjaman, merupakan transaksi BA BUN satker Direktorat SMI
423764	Pendapatan Denda Penyaluran kredit Program
	Pendapatan penerimaan denda karena bank yang ditunjuk terlambat menyalurkan dana kredit program kepada pihak yang berhak menerima.

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
423765	Pendapatan Denda Administrasi bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA)
	Pendapatan yang diterima dari Denda Administrasi bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) seperti penyimpangan dokumen/ kegiatan bidang usaha tumbuhan dan satwa liar, dan Penyimpangan terhadap izin usaha di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029.05)
423766	Pendapatan Denda Administrasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari denda administratif yang berasal dari Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, termasuk juga imbalan bunga atas keterlambatan pembayaran denda administratif yang berasal dari Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
423767	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh Debitur KUMK
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh Debitur KUMK.
423768	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh Debitur Penerusan Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh Debitur Penerusan Pinjaman.
423769	Pendapatan Denda Lainnya
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda yang tidak termasuk ke dalam kelompok Pendapatan Denda di atas (42376) dan kelompok Pendapatan Denda (42375).
<b>42377</b>	<b>Pendapatan Izin Pemanfaatan Hutan</b>
423771	Pendapatan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan
	Pendapatan dari Iuran Izin pemanfaatan kawasan hutan per tahun. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029.03)
423772	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi (IIUPJL)
	Pendapatan dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi (IIUPJL) per tahun. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029.03)
423773	Pendapatan Iuran Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam
	Pendapatan yang diterima dari Iuran Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kehutanan (BA 029.05)
<b>4239</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>
<b>42391</b>	<b>Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I</b>
423912	Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL
	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL
<b>42392</b>	<b>Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi/ Tuntutan Perpendaharaan</b>
423921	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara
	Pendapatan yang berasal dari pembayaran cicilan Piutang Non Bendahara. Piutang non bendahara terjadi karena kelalaian pegawai yang menyebabkan kerugian negara di luar pengurusan keuangan negara.
423922	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perpendaharaan
	Pendapatan yang berasal dari pembayaran cicilan Tuntutan Perpendaharaan kepada Bendahara. Tuntutan Perpendaharaan terjadi karena ada kerugian negara yang disebabkan kesalahan atau kelalaian bendahara dalam rangka pengurusan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Keuangan Negara. Merupakan penerimaan umum yang bisa ada di semua kementerian.
<b>42393</b>	<b>Pendapatan dari Penutupan Rekening</b>
423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Penutupan Rekening pemerintah.
<b>42394</b>	<b>Pendapatan dari Selisih Kurs</b>
423941	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUN
	Digunakan untuk mencatat untung selisih kurs terealisasi dalam pengelolaan rekening milik BUN.
423942	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan
	Digunakan untuk mencatat realisasi kentungan selisih kurs uang persediaan pada seluruh Kementerian/Lembaga.
423943	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D
	Selisih positif transaksi belanja dalam valuta asing antara antara resume tagihan/invoice/SPP dengan SP2D. Serta realisasi piutang dan utang dari kurs yang berbeda.
<b>42395</b>	<b>Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II</b>
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Pegawai TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua kementerian.
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Barang TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua kementerian.
423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Modal TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua kementerian.
423954	Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Pembayaran Kewajiban Utang TAYL.
423955	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Subsidi TAYL.
423956	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Hibah TAYL.
423957	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Bantuan Sosial TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua kementerian.
423958	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Lain-lain TAYL.
423959	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu
	Digunakan untuk mencatat pengembalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa TAYL.
<b>42396</b>	<b>Pendapatan Lain-Lain I</b>
423961	Pendapatan dalam Rangka Refund Dana PHLN
	Digunakan untuk mencatat pendapatan setoran dalam Rangka Refund Dana

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	PHLN. Merupakan pendapatan BUN.
423962	Pendapatan dari Retur SP2D
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Retur SP2D yang disetorkan ke kas negara. Dibukukan pada BA 999.99 (BUN Transaksi Khusus)
423963	Pendapatan Surplus Pungutan Otoritas Jasa Keuangan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Surplus Pungutan Otoritas Jasa Keuangan
423964	Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan
423965	Penerimaan Lainnya dari Piutang Pemberian Pinjaman
	Digunakan untuk mencatat penerimaan kembali atas pelunasan piutang pemberian pinjaman yang telah dihapuskan, meliputi piutang pokok penerusan pinjaman dan piutang non pokok, serta piutang sehubungan dengan kegiatan pemberian pinjaman BA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman, serta penerimaan kembali atas aset lainnya kredit program yang tidak teridentifikasi Surat Pengakuan Hutang-nya.
<b>42397</b>	<b>Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan</b>
423971	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS
	Digunakan untuk mencatat pendapatan setoran atas kelebihan pembayaran belanja dari pensiunan PNS semasa aktif.
423972	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan
	Digunakan untuk mencatat pendapatan setoran atas kelebihan pembayaran belanja dari Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan semasa aktif.
423973	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Anggota Polri/PNS Polri
	Digunakan untuk mencatat pendapatan setoran atas kelebihan pembayaran belanja dari Pensiunan Anggota Polri / PNS Polri semasa aktif.
423974	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara
	Digunakan untuk mencatat pendapatan setoran atas kelebihan pembayaran belanja dari Pensiunan Pejabat Negara semasa aktif.
<b>42399</b>	<b>Pendapatan Lain-Lain II</b>
423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
	PNBP yang berasal dari pengembalian Uang Muka Gaji. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua kementerian.
423992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional
	Merupakan PNBP yang berasal dari Pembayaran Premi dalam rangka Penjaminan Perbankan Nasional.
423993	Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL)
	Merupakan pendapatan yang berasal dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL).
423994	Pendapatan dari Biaya Pengawasan HET Minyak Tanah
	Pendapatan yang berasal dari Biaya Pengawasan HET Minyak Tanah. Merupakan PNBP Kementerian Dalam Negeri (BA 010).
423995	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia
	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia.
423996	Pendapatan Jasa Perbendaharaan

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	Pendapatan yang diterima Pemerintah dari Bank Umum atau PT Pos sebagai pengelola kas negara (Bank Operasional).
423997	Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari Bank/Pos Persepsi
	Digunakan untuk mencatat Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari Bank/Pos Persepsi.
423998	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak
	Merupakan pendapatan BA 015.06 (Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan)
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain
	Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua kementerian.

